2025 **Laporan Tahunan** | Annual Report

PT Kaltim Industrial Estate



Memperkuat **Fondasi,** Menjalankan **Komitmen**

Strengthening the Foundation, Delivering Commitments

Sanggahan dan Batasan Tanggung Jawab
Disclaimer and Limitation of Liability

Laporan Tahunan 2025 PT Kaltim Industrial Estate (selanjutnya disebut "Laporan") disusun sebagai wujud pertanggungjawaban dan komitmen transparansi Perusahaan kepada para pemangku kepentingan. Laporan ini memuat informasi material yang disusun berdasarkan hasil analisis internal dan didukung oleh sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.

Perlu disampaikan bahwa Laporan ini memuat proyeksi dan pernyataan mengenai kondisi serta kinerja Perusahaan di masa mendatang yang disusun berdasarkan asumsi-asumsi terkini atas kondisi internal maupun lingkungan usaha yang relevan. Pernyataan yang disampaikan dalam Laporan Tahunan bukan menjadi jaminan atas kinerja Perusahaan di masa mendatang, mengingat realisasi kinerja di masa depan dapat berbeda dari yang disampaikan dalam Laporan Tahunan ini karena dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berada di luar kendali Perusahaan.

Setiap penggunaan istilah "KIE" atau "Perusahaan" dalam Laporan ini merujuk pada **PT Kaltim Industrial Estate**. Namun demikian, penggunaan istilah "KIE" tidak serta-merta mengesampingkan keterlibatan Anak Perusahaan atau entitas yang terafiliasi dengan PT Kaltim Industrial Estate.

Pembaca juga perlu memahami bahwa Laporan ini menyajikan sejumlah informasi yang mengandung pandangan ke depan (*forward-looking statements*). KIE menyadari bahwa berbagai risiko dan ketidakpastian dari berbagai faktor dapat mempengaruhi kinerja operasional dan kondisi usaha ke depan. Oleh karena itu, KIE mengingatkan bahwa tidak ada jaminan atas akurasi atau terpenuhinya seluruh proyeksi dan pernyataan yang disampaikan dalam Laporan ini.

Laporan ini disajikan dalam 2 (dua) bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Penyajian data numerik pada tabel dan grafik menggunakan kaidah bahasa Indonesia. Sementara itu, penyajian angka dalam narasi mengikuti kaidah bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia, yang disesuaikan dengan konteks penyampaiannya.

The 2025 Annual Report of PT Kaltim Industrial Estate (hereinafter referred as the "Report") is developed as a form of the Company's commitment to transparency and accountability to stakeholders. The Report contains material information prepared based on current assumptions about internal conditions and the business environment.

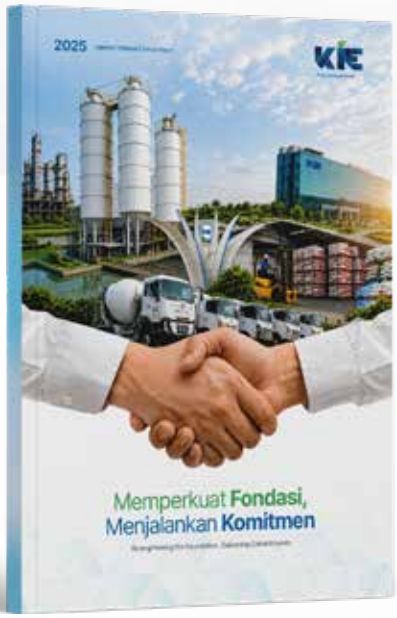
The Report contains projections and statements regarding the Company's future condition and performance, which are based on current assumptions regarding internal conditions and the relevant business environment. The statements presented in this Annual Report do not constitute guarantees of the Company's future performance. Actual results may differ materially from those expressed or implied in such statements due to various factors, including but not limited to risks and uncertainties that are beyond the Company's control.

Throughout this Report, the terms "KIE" and the "Company" refer to **PT Kaltim Industrial Estate**. The use of the term "KIE" does not exclude the involvement of its Subsidiaries or affiliated entities with PT Kaltim Industrial Estate.

This Report contains certain forward-looking statements that reflect the Company's current views with respect to future events. KIE recognizes that actual results may differ materially from those projected due to various risks and uncertainties arising from internal and external factors. Accordingly, KIE provides no assurance as to the accuracy, completeness, or realization of any projections, estimates, or forward-looking statements contained in the Report.

This Report is presented in 2 (two) languages, namely Indonesian and English. The presentation of numerical data in tables and graphs follows Indonesian numerical conventions. Meanwhile, numerical figures presented within narrative sections follow either English or Indonesian conventions, as appropriate to the context of disclosure.

Tema Cover
Cover Theme



Memperkuat Fondasi, Menjalankan Komitmen

Strengthening the Foundation, Delivering Commitments

2025

Pembahasan Tema

Memasuki tahun 2025, KIE berada pada fase penguatan arah dan konsolidasi strategi untuk memastikan keberlanjutan usaha dalam jangka panjang. Perusahaan tidak hanya berfokus pada pencapaian kinerja, tetapi juga pada penguatan struktur tata kelola, keandalan operasional kawasan industri, serta peningkatan kualitas layanan sebagai bagian dari upaya memperkuat daya saing dan kepercayaan pemangku kepentingan.

Sebagai pengelola kawasan industri strategis, KIE terus menyesuaikan langkah dengan dinamika industri dan tuntutan lingkungan usaha yang semakin kompleks. Adaptasi, peningkatan sistem, serta pengelolaan risiko menjadi fokus utama untuk memastikan bahwa setiap inisiatif bisnis dijalankan secara terarah, bertanggung jawab, dan selaras dengan komitmen Perusahaan terhadap praktik usaha yang berkelanjutan.

Melalui tema **"Memperkuat Fondasi, Menjalankan Komitmen"**, KIE menegaskan bahwa berbagai inisiatif strategis yang telah dijalankan pada periode sebelumnya kini difokuskan pada pemantapan dan penguatan fondasi tata kelola, sistem operasional, serta peningkatan kinerja Perusahaan secara menyeluruh.

Pemilihan diksi "*fondasi*" menegaskan kesinambungan tema dari tahun-tahun sebelumnya. Dampak nyata yang disampaikan dalam *Sustainability Report* merupakan hasil dari proses jangka panjang, di mana komitmen keberlanjutan yang telah dibangun dan diperkuat kini dijalankan secara sistematis, terukur, dan konsisten sebagai bagian dari strategi Perusahaan.

Theme Discussion

Entering 2025, KIE is in a phase of strengthening it's strategic direction and consolidating its strategies to ensure long-term business sustainability. The Company's focus extends beyond performance achievement to strengthening governance structures, enhancing the operational reliability of its industrial estate, and improving service quality as part of its broader efforts to reinforce competitiveness and sustain stakeholder confidence.

As a strategic industrial estate management company, KIE continues to align its strategic initiatives with evolving industry dynamics and an increasingly complex business environment. Adaptability, system enhancement, and prudent risk management constitute key priorities to ensure that each business initiative is executed in a structured, accountable, and disciplined manner, consistent with the Company's commitment to sustainable business practices.

Through the theme, **"Strengthening the Foundation, and Delivering Commitments"**, KIE underscores that the strategic initiatives implemented in prior periods are now directed toward reinforcing and institutionalizing governance frameworks, operational systems, and overall corporate performance.

The deliberate use of the term "foundation" reflects continuity with themes articulated in previous years. The tangible impacts presented in the Sustainability Report represent the culmination of a long-term process, whereby sustainability commitments that have been progressively established and strengthened are now implemented systematically, measurably, and consistently as an integral component of the Company's corporate strategy.

Kesinambungan Tema Laporan Tahunan
The Annual Report Theme Continuity



Komitmen Berkelanjutan
untuk Pertumbuhan Masa Depan

Sustainability Commitment for Future Growth

2024



Peningkatan Kinerja untuk Mencapai
Pertumbuhan yang Berkelanjutan

Accelerate Performance to Reach Sustainable Growth

2023



Pulih Untuk Tumbuh
Menuju Bisnis Berkelanjutan

Recover to Growth Into Sustainable Business

2022



Optimasi Kepuasan Pelanggan
Untuk Tumbuh Secara Berkelanjutan

Optimization of Customer Satisfaction to Grow Sustainably

2021

Daftar Isi
Table of Content

3 Sanggahan dan Batasan Tanggung Jawab
Disclaimers and Limitation of Liability

4 Tema Cover
Cover Theme

5 Kesinambungan Tema Laporan Tahunan
The Annual Report Theme Continuity

6 Daftar Isi
Table of Content

01 Kilas Kinerja
Performance Highlights

8 Ringkasan Kinerja Utama 2025
2025 Key Performance Highlight

12 Ikhtisar Data Keuangan Penting
Key Financial Data Highlights

15 Ikhtisar Pendapatan
Revenue Highlight

16 Informasi Saham
Share Information

16 Ikhtisar Obligasi, Sukuk, atau Obligasi Konversi, Serta Efek Lainnya
Summary of Bonds, Sukuk, Convertible Bonds, and Other Securities

16 Indikator Kinerja Perusahaan
The Company Performance Indicators

18 Peristiwa Penting
Event Highlights

22 Penghargaan dan Sertifikasi
Awards and Certifications

02 Laporan Manajemen
Management Report

26 Laporan Dewan Komisaris
Report of The Board of Commissioners

32 Laporan Direksi
Board of Directors Report

40 Pernyataan Tanggung Jawab
Statement of Responsibility

03 Profil Perusahaan
Company Profile

44 Informasi Umum dan Identitas Perusahaan
General Information and Company Identity

46 Makna Logo Perusahaan
Meaning of The Company Logo

47 Riwayat Singkat Perusahaan
The Company at a Glimpse

50 Jejak Langkah
Milestone

52 Visi, Misi, dan Tata Nilai Perusahaan
Vision, Mission, and Corporate Governance

55 Kegiatan dan Bidang Usaha
Business Activities and Sector

58 Wilayah Operasional
Operational Area

60 Struktur Organisasi
Structure of Organization

62 Profil Komisaris
Board of Commissioners Profiles

63 Profil Direksi
Board of Director Profiles

68 Profil Pejabat Executive
Executive Profiles

70 Sumber Daya Manusia
Human Resources

77 Komposisi Pemegang Saham
Shareholder Composition

78 Informasi Tentang Kepemilikan Saham Perusahaan oleh Manajemen Kunci
Information on the Company Shareholding by Key Managements

79 Struktur Grup Perusahaan
Company Group Structure

80 Daftar Entitas Anak dan Informasi Tentang Entitas Asosiasi, Penyertaan Saham, Ventura Bersama dan Kerja sama Operasi
List of Subsidiaries and Information on Associates, Equity Participation, Joint Ventures, and Operational Coorperation

82 Kronologi Penerbitan dan Pencatatan Saham
Share Listing Chronology

83 Kronologi Penerbitan dan Pencatatan Efek Lainnya
Chronology of Issuance and Listing of Other Securities

83 Lembaga Profesi Penunjang Pasar Modal
Capital Market Supporting Institutions and Professions

83 Akuntan Perusahaan
Public Accounting Firm

84 Nama dan Alamat Biro Administrasi Efek Lainnya
Name and Address of the Securities Administration Bureau and Securities Rating Agency

84 Daftar Keanggotaan Asosiasi Industri
List of Industry Association Membership

84 Informasi pada Situs Web Perusahaan
Information on the Company Website

04 Analisis dan Pembahasan Manajemen
Management Discussion and Analysis

88 Tinjauan Umum Ekonomi Makro dan Industri
Macroeconomic and Industry Overview

88 Tinjauan Operasi per Segmen Usaha
Operational Review by Business Segment

90 Analisis Keuangan
Financial Analysis

98 Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan: Solvabilitas, Likuiditas dan Kolektibilitas
Analysis of Company Financial Performance: Solvency, Liquidity and Collectibility

101 Struktur Modal dan Kebijakan Manajemen Atas Struktur Modal
Capital Structure and Management Policy on Capital Structure

102 Ikatan Material untuk Investasi Barang Modal
Material Commitment for Capital Expenditure

102 Investasi Barang Modal, Divestasi, dan Restrukturisasi
Information On Capital Expenditure, Divestment and Restructuring

102 Informasi Keuangan yang Mengandung Kejadian yang Bersifat Luar Biasa dan Jarang Terjadi
Financial Information Containing Extraordinary and Rare Events

103 Dampak Perubahan Harga yang Berpengaruh Terhadap Pendapatan dan Kinerja Perusahaan
The Impact of Price Changes on Revenue and Company Performance

103 Informasi dan Fakta Material yang Terjadi Setelah Tanggal Laporan Akuntan
Material Information and Facts Occurred After the Accounting Report Date

103 Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025
Comparison of Targets and Realization in 2025

105 Proyeksi Usaha Tahun 2026
2026 Business Outlook

106 Aspek Pemasaran
Marketing Aspect

107 Informasi Kelangsungan Usaha
Information on Business Continuity

107 Uraian Dividen
Dividend Description

108 Informasi Material untuk Investasi, Ekspansi, Divestasi, Penggabungan/ Peleburan Usaha, Akuisisi dan Restrukturisasi Utang/Modal
Material Information for Investment, Expansion, Divestment, Merger/ Consolidation, Acquisition and Debt/Capital Restructuring

109 Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/ atau Transaksi Dengan Pihak Afiliasi/ Pihak Berelasi
Information on Material Transactions Containing Conflicts of Interest or Transactions with Affiliated/Related Parties

111 Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Realization of The Use of Public Offering Proceedings

111 Perubahan Peraturan Perundang-Undangan yang Berpengaruh Signifikan Terhadap Perusahaan
Regulatory Changes with Significant Impact on the Company

112 Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Dampaknya Terhadap Perusahaan
Changes in Accounting Policies and Their Impact on the Company

113 Manajemen Risiko Keuangan
Financial Risk Management

05 Tata Kelola Perusahaan (Governansi Korporat)
Good Corporate Governance

118 Penerapan Tata Kelola Perusahaan
The Implementation of Corporate Governance

120 Momen Penting GCG
Key GCG Moments

123 Struktur dan Mekanisme Tata Kelola Perusahaan
Corporate Governance Structure

127 Pengukuran Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik
Good Corporate Governance Assessment

138 Rapat Umum Pemegang Saham
General Meeting of Shareholders

151 Dewan Komisaris
Board of Commissioners

170 Direksi
Board of Directors

184 Rapat Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2025
Joint Meetings of the Board of Commissioners and Board of Directors 2025

186 Kebijakan Suksesi Direksi
Succession Policy of The Board of Directors

186 Pengungkapan Hubungan Afiliasi Antara Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali
Disclosure of Affiliations Relationship Between Directors, Board of Commissioners and Majority and/or Controlling Shareholders

188 Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi
Board of Commissioners and Board of Directors Remuneration

191 Sekretaris Dewan Komisaris
Secretary of the Board of Commissioners

193 Komite Audit
Audit Committee

201 Komite Nominasi dan Remunerasi
Nomination and Remuneration Committee

201 Komite GCG, Manajemen Risiko dan Investasi
GCG, Risk Management, and Investment Committee

207 Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary

213 Audit Internal
Internal Audit

219 Auditor Eksternal
External Auditor

220 Sistem Pengendalian Internal
Company Internal Control System

223 Manajemen Risiko
Risk Management

232 Pengadaan Barang & Jasa
Procurement of Goods & Services

236 *Whistleblowing System*
Whistleblowing System

241 Kebijakan Anti Korupsi
Anti-Corruption Policy

242 Transparansi Praktik Bad Governance
Transparency on Bad Governance Practices

243 Perkara Penting
Significant Cases

245 Kode Etik Perusahaan
Company Code of Conduct

250 Akses Informasi dan Transparansi
Information Access and Transparency

252 Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
Management of State Officials' Wealth Reports

254 Pengendalian Gratifikasi
Gratification Control

257 Benturan Kepentingan
Conflict of Interest

259 Kebijakan Kompensasi Jangka Panjang: Progran Kepemilikan Saham Oleh Pegawai dan/atau Manajemen Perusahaan (MSOP/ESOP)
Long-Term Compensation Policy: Company Management and/or Employee Stock Ownership Program (MSOP/ESOP)

06 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Social and Environmental Responsibility

262 Komitmen dan Kebijakan
Commitment and Policy

262 Strategi TJSL
TJSL Strategy

263 Visi dan Misi TJSL
Vision and Mission of TJSL

263 Program TJSL
TJSL Programs

264 TJSL Perusahaan Bidang Hak Asasi Manusia
TJSL in the Human Rights Aspect

265 TJSL Perusahaan Terkait Operasi yang Adil
TJSL in the Fair Operating Practices Aspect

266 TJSL Perusahaan Bidang Lingkungan Hidup
TJSL in the Environmental Aspect

268 TJSL Perusahaan Bidang Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja
TJSL in the Employment, Occupational Health and Safety Aspect

271 TJSL Perusahaan Bidang Tanggung Jawab Terhadap Produk dan Pelanggan
TJSL in Product and Customer Responsibility

272 TJSL Perusahaan Bidang Pengembangan Sosial Kemasyarakatan
TJSL in Community Social Empowerment

07 Laporan Keuangan
Financial Statements

Ringkasan Kinerja Utama 2025
2025 Performance

Pendapatan
Revenue

Rp520,05
miliar | billion

Kinerja Perusahaan
Company Performance

81,50

Nilai Kesehatan Perusahaan (2025)
Corporate Soundness Score (2025)

SEHAT "AA"
SOUND "AA"

Kriteria Kesehatan Perusahaan (2025)
Corporate Soundness Criteria (2025)

Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015
ISO 9001:2025 Quality Management System

Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001:2015
ISO 14001:2015 Environmental Management System

Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016
ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System

Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja ISO 45001:2018
ISO 45001:2018 Occupational Health and Safety Management System

PROPERNAS

"BIRU"
"BLUE"

dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
from Ministry of Environment and Forestry, Republic of Indonesia

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehata Kerja (SMK3)
Occupational Safety and Health Management System

PROPERDA

"EMAS"
"GOLD"

dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
from the East Kalimantan Provincial Government

Laba Tahun Berjalan
Profit for the Year

Rp112,03
miliar | billion

Sumber Daya Manusia
Human Resources

66
Orang | People
Jumlah Karyawan
Total Employees

217
Hari Kerja | Working Days
Jumlah Pelatihan
Total Training

51
Orang | People
Jumlah Sertifikasi
Total Certification

3.252.616
Jam | Hours
Jumlah Jam Kerja
Total Working Hours

0
Kecelakaan | Accident
Jam Kerja Hilang Akibat Kecelakaan
Lost Time Injury Rate

0
Cedera | Injury
Kecelakaan yang Terekam/ Tercatat
Total Recordable Injury Rate

01 →

Kilas Kinerja

Performance Highlights





Ikhtisar Data Keuangan Penting
Key Financial Data Highlights

LABA (RUGI) DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN
CONSOLIDATED PROFIT (LOSS) AND COMPREHENSIVE INCOME

(dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lain / in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Uraian Description	2025	2024	2023	2022	2021
Pendapatan Revenue	520.047	504.283	382.982	334.825	319.235
Beban Pokok Pendapatan Cost of Revenue	(387.006)	(385.906)	(285.685)	(254.777)	(247.812)
Laba Bruto Gross Profit	133.041	118.377	97.297	80.048	71.423
Beban Usaha Operating Expenses	(62.529)	(60.037)	(56.201)	(52.397)	(48.921)
Laba Usaha Operating Profit	70.512	58.340	41.096	27.651	22.502
Pendapatan Keuangan/(Beban) Financial Income/(Expenses)	17.020	13.232	5.656	8.719	(1.580)
Bagian Laba Entitas Asosiasi Share of Profit from Associate Entities	38.561	42.621	38.967	30.625	25.250
Laba Sebelum Pajak Profit Before Income Tax	126.094	114.193	85.719	66.995	46.172
Beban Pajak Penghasilan Income Tax Expenses	(14.061)	(12.759)	(8.051)	(6.513)	(5.078)
Laba (Rugi) Tahun Berjalan Profit (Loss) for The Year	112.033	101.434	77.668	60.482	41.094
Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan Comprehensive Income for the Year	(12.538)	(2.238)	(1.170)	7.762	168
Laba Tahun Berjalan yang Diatribusikan Pada: Profit For The Year Attributable to					
Pemilik Entitas Induk Owners of the Parent Entity	96.343	89.867	71.336	56.889	37.555
Kepentingan Non Pengendali Non-Controlling Interest	15.690	11.567	6.332	3.593	3.539
Jumlah Penghasilan Komprehensif yang Diatribusikan pada: Total Comprehensive Income Attributable to:					
Pemilik Entitas Induk Owners of the Parent Entity	86.827	87.870	70.559	64.651	37.723
Kepentingan Non Pengendali Non-Controlling Interest	12.668	11.326	5.939	3.593	3.539
Laba Rugi Komprehensif Comprehensive Profit (Loss)					
Laba Sebelum Bunga & Pajak Profit Before Interest and Income Tax	109.074	100.961	80.063	58.276	47.752
Laba Sebelum Bunga, Pajak, Depresiasi dan Amortisasi Profit Before Interest, Income Tax, Depreciation and Amortization	131.657	120.932	99.789	75.395	66.815
Arus Kas dari Aktivitas Operasi Cash Flows From Operating Activities	94.867	86.476	82.265	60.721	28.361
Dividen Dividend	35.000	-	-	-	-

Pendapatan
Revenue
Rp520,05
miliar | billion

Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan
Profit (Loss) for the Year
Rp112,03
miliar | billion

POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
CONSOLIDATED FINANCIAL POSITION

(dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lain / in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Uraian Description	2025	2024	2023	2022	2021
Aset Assets					
Aset Lancar Current Assets	687.293	608.477	496.664	422.197	405.113
Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama Investment in Associates and Joint Venture	260.700	251.861	227.824	224.996	190.185
Aset Tidak Lancar Non-Current Assets	487.101	480.871	479.298	481.469	460.767
Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya Other Non-Current Financial Assets	344	14.915	15.815	15.107	14.006
Jumlah Aset Total Assets	1.435.438	1.356.124	1.219.601	1.143.769	1.070.071
Liabilitas Liabilities					
Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities	140.157	125.369	84.273	80.670	73.577
Liabilitas Jangka Panjang Non-Current Liabilities	20.577	12.358	13.881	16.823	16.922
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	160.734	137.727	98.154	97.493	90.499
Ekuitas Equity					
Modal Saham Share Capital	58.307	58.307	58.307	58.307	58.307
Saldo Laba Retained Earnings	1.034.469	973.126	883.259	811.923	755.034
Ekuitas Lainnya Other Equity	(27.063)	(27.063)	(27.063)	(27.063)	(27.063)
Penghasilan Komprehensif Lainnya / Beban Other Comprehensive Income / (Loss)	170.228	179.744	181.741	182.518	174.756
Kepentingan Nonpengendali Non-Controlling Interest	38.763	34.283	25.203	20.591	18.538
Jumlah Ekuitas Total Equity	1.274.704	1.218.397	1.121.447	1.046.276	979.572
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas Total Liabilities and Equity	1.435.438	1.356.124	1.219.601	1.143.769	1.070.071

Jumlah Aset
Total Assets
Rp1.435,44
miliar | billion

Jumlah Liabilitas
Total Liabilities
Rp160,73
miliar | billion

Jumlah Ekuitas
Total Equity
Rp1.274,70
miliar | billion

(dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lain / in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Uraian Description	2025	2024	2023	2022	2021
Arus Kas dari (digunakan untuk) Aktivitas Operasi Cash Flows from (used in) Operating Activities	94.867	86.476	82.265	60.721	28.361
Arus Kas dari (digunakan untuk) Aktivitas Investasi Cash Flows from (used in) Investing Activities	(138.513)	23.855	(68.983)	(15.349)	5.546
Arus Kas dari (digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan Cash Flows from (used in) Financing Activities	(45.284)	(34)	(7.529)	4.336	(5.716)
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas Net Increase (Decrease) in Cash and Cash Equivalents	(88.930)	110.297	5.753	49.708	28.191
Pengaruh Perubahan Kurs Mata Uang Asing Effect of Foreign Exchange Rate Change	(43)	(49)	(23)	(281)	10
Kas dan Setara Kas pada Awal Tahun Cash and Cash Equivalents at the Beginning of the Year	346.766	236.518	230.788	181.361	153.160
Kas dan Setara Kas pada Akhir Tahun Cash and Cash Equivalents at the End of the Year	257.793	346.766	236.518	230.788	181.361

Arus Kas dari (digunakan untuk) Aktivitas Operasi
Cash Flows from (used in) Operating Activities
Rp94,87
miliar | billion

Arus Kas dari (digunakan untuk) Aktivitas Investasi
Cash Flows from (used in) Investing Activities
Rp(138,51)
miliar | billion

Arus Kas dari (digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan
Cash Flows from (used in) Financing Activities
Rp(45,28)
miliar | billion

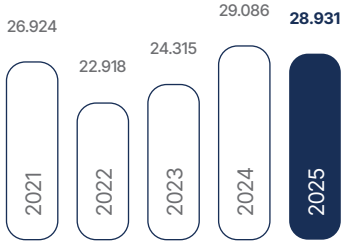
RASIO KEUANGAN
FINANCIAL RATIO

Uraian Description	2025	2024	2023	2022	2021
Rasio Profitabilitas Profitability Ratio					
Rasio Laba (Rugi) terhadap Aset (%) Return on Assets Ratio (%)	8%	7%	6%	5%	4%
Rasio Laba (Rugi) terdapat Ekuitas (%) Return on Equity Ratio (%)	9%	8%	7%	6%	4%
Rasio Laba (Rugi) terhadap Investasi(%) Return on Investment (%)	8%	7%	6%	5%	4%
Rasio Laba (Rugi) terhadap Pendapatan (%) Profit (Loss) Ratio to Revenue (%)	22%	20%	20%	18%	13%
Rasio Lancar (%) Current Ratio (%)	490%	485%	589%	523%	551%
Rasio Solvabilitas Solvency Ratio					
Rasio Pinjaman Terhadap Ekuitas (%) Debt to Equity Ratio (%)	13%	12%	9%	9%	9%
Rasio Pinjaman terhadap Aset (%) Debt to Asset Ratio (%)	11%	10%	8%	9%	8%
EBITDA/Biaya Bunga (%) Interest Coverage Ratio (%)	-	-	-	-	-
Rasio Aktivitas Activity Ratio					
Perputaran Persediaan (hari) Inventory Turnover (days)	96	84	111	123	122
Rata-rata Penerimaan Piutang (hari) Average Collection Period (days)	58	53	61	81	87
Perputaran Total Aset (%) Total Asset Turnover (%)	36%	39%	32%	30%	30%

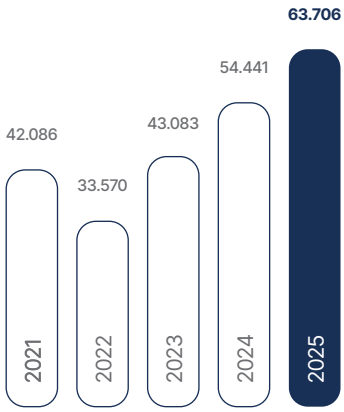
Ikhtisar Pendapatan
Revenue Highlight

PENJUALAN 5 PILAR BISNIS
SALES FROM 5 BUSINESS PILLARS

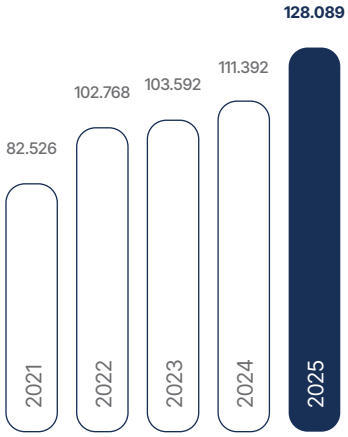
KAWASAN INDUSTRI
INDUSTRIAL ESTATE



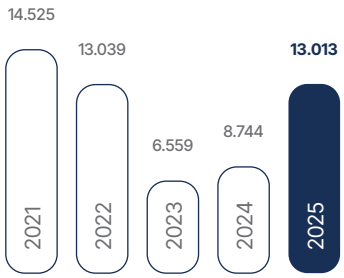
BETON
CONCRETE



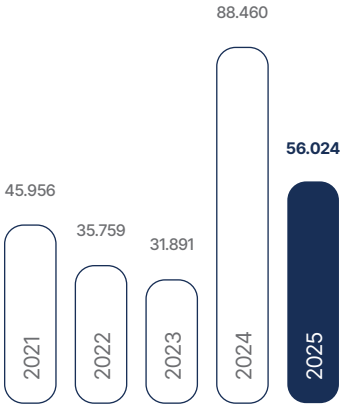
PROPERTI
PROPERTY



TRADING
TRADING



KONSTRUKSI
CONSTRUCTION



Informasi Saham
Share Information

Sampai dengan 31 Desember 2025, KIE belum melakukan penawaran saham kepada masyarakat serta tidak mencatatkan maupun memperdagangkan sahamnya di bursa efek mana pun. Struktur kepemilikan saham Perusahaan didominasi oleh PT Pupuk Kalimantan Timur dengan kepemilikan sebanyak 58.306 lembar saham atau sebesar 99,99%, sedangkan di Yayasan Kesejahteraan Hari Tua Pupuk Kalimantan Timur memiliki 1 lembar saham atau setara dengan 0,01%.

As of December 31, 2025, KIE has not conducted a public offering of its shares and has not listed or traded its shares on any stock exchange. The Company's shareholding structure is predominantly controlled by PT Pupuk Kalimantan Timur, which holds 58,306 shares, representing 99.99% of the total issued and fully paid-up capital. The remaining 1 share, equivalent to 0.01%, is held by Yayasan Kesejahteraan Hari Tua Pupuk Kalimantan Timur.

Sepanjang tahun 2025, Perusahaan tidak melakukan tindakan atau aksi korporasi.

Throughout fiscal year 2025, the Company did not undertake any corporate actions.

Ikhtisar Obligasi, Sukuk, atau Obligasi Konversi, Serta Efek Lainnya
Summary of Bonds, Sukuk, Convertible Bonds, and Other Securities

Sampai dengan 31 Desember 2025, KIE tidak menerbitkan obligasi, sukuk, dan obligasi konversi. Dengan demikian, tidak terdapat informasi mengenai jumlah efek yang beredar, tingkat bunga atau imbalan hasil, tanggal jatuh tempo, maupun peringkat obligasi atau sukuk.

As of December 31, 2025, KIE has not issued any bonds, sukuk, convertible bonds, or other debt securities. Accordingly, there are no outstanding securities as of the reporting date, and therefore no applicable disclosures regarding principal amounts, interest rates or profit-sharing yields, maturity dates, or credit ratings.

Indikator Kinerja Perusahaan
The Company Performance Indicators

Uraian Description	2025	2024	2023	2022	2021
Nilai Kesehatan Perusahaan Corporate Soundness Score	81,50	79,00	76,00	72,50	71,50
Kriteria Kesehatan Perusahaan Corporate Soundness Criteria	SEHAT "AA" SOUND "AA"	SEHAT "A" SOUND "A"	SEHAT "A" SOUND "A"	SEHAT "A" SOUND "A"	SEHAT "A" SOUND "A"
Skor Assessment GCG GCG Assessment Score	-	-	-	84,82	80,60

Keterangan : Tahun 2025 KIE tidak melakukan pengukuran terhadap penerapan GCG dengan metode kuantitatif.
Remarks : In 2025 KIE did not conduct assessment toward GCG implementation using quantitative methods.



Peristiwa Penting
Event Highlights



14-15 Januari 2025 | January 14-15, 2025

KIE menerima Penghargaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) Tahun 2024 dari Pemerintah Kota Bontang. Penghargaan ini merupakan apresiasi atas komitmen dan kontribusi Perusahaan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan melalui pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan.
KIE received the 2024 Corporate Social and Environmental Responsibility (TJSL) Award from the Government of the City of Bontang. The award represents formal recognition of the Company's commitment and contributions in supporting sustainable development through the implementation of structured Corporate Social and Environmental Responsibility (TJSL) programs.



23 Januari 2025 | January 23, 2025

KIE bekerja sama dengan BNN Kota Bontang menyelenggarakan Seminar Edukasi Bahaya Narkoba bagi pelajar SMA/SMK dan karyawan Perusahaan di kawasan KIE. Kegiatan yang dilaksanakan pada Januari 2025 ini merupakan wujud komitmen perusahaan dalam mendukung generasi muda yang sehat, berdaya saing, serta bebas dari penyalahgunaan narkoba.
In collaboration with the National Narcotics Board (BNN) of Bontang City, KIE organized an educational seminar on the dangers of narcotics for senior high school/vocational students and employees within KIE. Conducted in January 2025, this initiative reflects the Company's commitment to fostering a healthy, competitive, and drug-free younger generation,



11 Februari 2025 | February 11, 2025

Dalam rangka Bulan K3 Nasional (BK3N) 2025, KIE menyelenggarakan kegiatan edukasi terkait dampak dan penanggulangan bahaya industri bekerja sama dengan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bontang serta Dinas Ketenagakerjaan. Kegiatan ini menegaskan komitmen Perusahaan dalam meningkatkan kesadaran keselamatan kerja dan memperkuat penerapan Sistem Manajemen K3 (SMK3) di kawasan industri.
In observance of National OHS Month (BK3N) 2025, KIE conducted an educational program addressing industrial hazard impacts and mitigation measures. The program was organized in collaboration with the Bontang City Fire and Rescue Department and the Manpower Office. This initiative underscores the Company's commitment to enhancing workplace safety awareness and strengthening the OHS Management System (SMK3) across the industrial estate.



16 Februari 2025 | February 16, 2025

BK3N 2025 Resmi ditutup melalui Emergency Response Competition. KIE menutup rangkaian Bulan K3 Nasional (BK3N) 2025 melalui kegiatan Emergency Response Competition (ERC) yang melibatkan karyawan lintas unit kerja. Kegiatan ini bertujuan mengasah kesiapsiagaan dan respon tanggap darurat dalam menghadapi berbagai potensi risiko di lingkungan kerja, sekaligus memperkuat budaya keselamatan dan kesehatan kerja di kawasan industri.
KIE officially concluded the National OHS Month (BK3N) 2025 series through an Emergency Response Competition (ERC) involving employees from various work units. The activity was designed to enhance emergency preparedness and response capabilities in addressing potential workplace risks, while reinforcing a strong occupational health and safety culture within the industrial estate.



19 Februari 2025 | February 19, 2025

Dukung Pengembangan UMK, KIE Gelar Bimtek Keamanan Pangan. KIE menyelenggarakan bimbingan teknis (bimtek) keamanan pangan bagi 30 pelaku Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) di Kota Bontang. Kegiatan ini merupakan wujud komitmen Perusahaan dalam mendukung peningkatan kapasitas dan kualitas produk UMK, sehingga mampu bersaing serta berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
In support of Micro and Small Enterprises (MSEs) development, KIE organized a technical guidance program on food safety for 30 Home-Based Food Industry (IRTP) business operators in Bontang City. This initiative reflects the Company's commitment to strengthening the capacity and product quality of local MSEs, enabling them to enhance competitiveness and contribute to regional economic growth.



12 Juni 2025 | June 12, 2025

KIE melaksanakan kegiatan penanaman pohon di kawasan industri KIE dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Kegiatan ini merupakan wujud komitmen Perusahaan terhadap keberlanjutan lingkungan melalui upaya rehabilitasi lahan dan penguatan program pelestarian alam di wilayah operasional.
In observance of World Environment Day, KIE conducted a tree planting initiative within the KIE industrial estate. This program reflects the Company's commitment to environmental sustainability through land rehabilitation efforts and the strengthening of conservation programs within its operational area.



23 Juni 2025 | June 23, 2025

Pada peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2025, KIE untuk pertama kalinya meraih peringkat Emas dalam Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (PROPERDA) dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Penghargaan ini menjadi bukti komitmen perusahaan dalam menerapkan praktik pengelolaan lingkungan yang unggul dan berkelanjutan di kawasan industri.
During the 2025 World Environment Day commemoration, KIE was awarded, for the first time, a Gold Rating in the Regional Environmental Performance Rating Program (PROPERDA) awarded by the Provincial Government of East Kalimantan. This recognition affirms the Company's commitment to implementing exemplary and sustainable environmental management practices within the industrial estate.



25 Juni 2025 | June 25, 2025

Kolaborasi Pengembangan Industri Rendah Karbon KIE bersama PT Pupuk Kalimantan Timur dan PT Kaltim Methanol Industri menandatangani Perjanjian Kerja Sama penyediaan suplai karbon dioksida (CO_2) sebagai bagian dari pengembangan industri rendah karbon di Kota Bontang. Kerja sama ini menjadi langkah strategis dalam mendukung pemanfaatan CO_2 yang lebih berkelanjutan serta memperkuat komitmen Perusahaan terhadap transisi energi dan pengelolaan lingkungan yang ramah iklim.
In collaboration with PT Pupuk Kalimantan Timur and PT Kaltim Methanol Industri, KIE signed a Cooperation Agreement for the supply of carbon dioxide (CO_2) as part of the development of a low-carbon industrial ecosystem in Bontang City. This strategic partnership represents a concrete step toward advancing sustainable CO_2 utilization, while reinforcing the Company's commitment to energy transition initiatives and climate-responsible environmental management.



26 Juni 2025 | June 26, 2025

Penghargaan Zero Accident 2025. KIE meraih penghargaan Zero Accident pada ajang Penghargaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Penghargaan ini menjadi bukti konsistensi perusahaan dalam membangun budaya keselamatan kerja serta menjaga kinerja operasional tanpa kecelakaan kerja dalam periode penilaian.

The 2025 Zero Accident Award. KIE received the Zero Accident Award at the 2025 Occupational Safety and Health (K3) Award ceremony organized by the Provincial Government of East Kalimantan. This recognition affirms the Company's consistent commitment to fostering a strong occupational safety culture and maintaining accident-free operational performance throughout the assessment period.



23 Juli 2025 | July 23, 2025

Kolaborasi Program TRABAS STUNTING Peringati Hari Anak Nasional 2025. KIE berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan dan Puskesmas Bontang Utara II melaksanakan Program TRABAS STUNTING di MTs Al-Amin Loktuan dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional. Kegiatan ini menegaskan komitmen Perusahaan dalam mendukung pencegahan anemia remaja dan stunting melalui edukasi serta peningkatan kesadaran kesehatan generasi muda.

In commemoration of National Children's Day 2025, KIE, in collaboration with the Bontang City Health Center and the North Bontang II Community Health Center, implemented the TRABAS STUNTING Program at MTs Al-Amin Loktuan. This initiative underscores the Company's commitment to supporting the prevention of adolescent anemia and stunting through health education and enhanced awareness among the younger generation.



29 Juli 2025 | July 29, 2025

Kolaborasi Pencegahan Kebakaran di Kawasan Industri. KIE menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bontang terkait pencegahan dan penanggulangan kebakaran di kawasan industri KIE. Kerja sama ini mempertegas komitmen Perusahaan dalam meningkatkan kesiapsiagaan, memperkuat sistem proteksi kebakaran, serta memastikan lingkungan kerja yang aman bagi seluruh tenant dan pemangku kepentingan.

Fire Prevention Collaboration in the Industrial Estate. KIE entered into a Memorandum of Understanding (MoU) with the Bontang City Fire Department concerning fire prevention and mitigation within the KIE industrial estate. This collaboration reinforces the Company's commitment to enhancing emergency preparedness, strengthening fire protection systems, and ensuring a safe working environment for all tenants and stakeholders.



23 September 2025 | September 23, 2025

Penghargaan Perusahaan dengan Tata Kelola Layak 2025. KIE menerima penghargaan Perusahaan dengan Tata Kelola Layak Tahun 2025 dari Dinas Ketenagakerjaan Kota Bontang. Penghargaan ini menjadi apresiasi atas komitmen perusahaan dalam menerapkan praktik ketenagakerjaan yang adil, patuh regulasi, serta menjunjung perlindungan dan keselamatan tenaga kerja.

2025 Recognition for Company with Good Corporate Governance Practices. KIE received the 2025 Company with Good Governance Practice Award from the Bontang City Manpower Office. This recognition serves as acknowledgment of the Company's commitment to implementing fair labor practices, maintaining regulatory compliance, and upholding workforce protection and occupational safety standards.



30 September 2025 | September 30, 2025

Predikat Gold pada Vendor Gathering PT Pupuk Kaltim 2025. KIE meraih predikat Gold dalam ajang Vendor Gathering PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim) yang diselenggarakan di Balikpapan. Penghargaan ini menjadi apresiasi atas kinerja dan kontribusi KIE dalam mendukung rantai pasok, efisiensi operasional, serta keberlanjutan mitra strategis perusahaan.

Gold Predicate on PT Pupuk Kaltim Vendor Gathering 2025. KIE received the Gold Predicate at the 2025 Vendor Gathering hosted by PT Pupuk Kalimantan Timur in Balikpapan. This distinction recognizes KIE's performance and contribution in supporting supply chain reliability, operational efficiency, and the sustainability of the Company's strategic business partners.



14 November 2025 | November 14, 2025

KIE menerima kunjungan lapangan dari Kementerian Investasi/BKPM dalam rangka penjajakan pengembangan investasi migas di kawasan industri. Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi dan mendorong percepatan investasi berbasis migas yang terintegrasi dan berdaya saing di Kota Bontang.

KIE received an official site visit from the Ministry of Investment/BKPM as part of a preliminary assessment regarding the development of oil and gas investment within the industrial estate. The visit formed part of broader efforts to strengthen institutional synergy and accelerate integrated, competitive oil and gas-based investment development in Bontang City.



03 Desember 2025 | Desember 3, 2025

KIE menerima Penghargaan Dunia Usaha Peduli Lingkungan Tahun 2025 sebagai bentuk apresiasi atas komitmen dan konsistensi perusahaan dalam mendukung perlindungan serta pengelolaan lingkungan di Kota Bontang. Penghargaan ini menegaskan peran aktif KIE dalam menjalankan operasional kawasan industri yang selaras dengan prinsip keberlanjutan.

KIE received the 2025 Business Sector Environmental Stewardship Award in recognition of its commitment and consistency in supporting environmental protection and management initiatives in Bontang City. This award reaffirms KIE's active role in operating and managing its industrial estate in alignment with sustainability principles.



11 Desember 2025 | Desember 11, 2025

KIE menyelenggarakan Workshop Emergency Response Plan (ERP) sebagai upaya memperkuat kesiapsiagaan dan kemampuan respons perusahaan dalam menghadapi potensi kondisi darurat di kawasan industri. Kegiatan ini menegaskan komitmen KIE dalam membangun budaya keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang berkelanjutan melalui peningkatan kapasitas sumber daya dan sistem tanggap darurat bersama Polres Bontang dan BPBD Kota Bontang.

KIE conducted an Emergency Response Plan (ERP) Workshop to strengthen preparedness and enhance the Company's response capabilities in addressing potential emergency situations within the industrial estate. The workshop underscores the Company's commitment to fostering a sustainable occupational health and safety (OHS) culture through capacity building and the reinforcement of integrated emergency response systems in collaboration with the Bontang Police Department (Polres Bontang) and the Regional Disaster Management Agency (BPBD) of Bontang City,



23 Desember 2025 | Desember 23, 2025

KIE melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) menyelenggarakan sosialisasi Program Kampung Iklim (PROKLIM) di Kampung Iklim Pesisir BSD, Kota Bontang, sekaligus menyerahkan dukungan fasilitas pengelolaan sampah komunitas. Kegiatan ini merupakan wujud komitmen perusahaan dalam mendukung adaptasi dan mitigasi perubahan iklim berbasis masyarakat serta penguatan pengelolaan lingkungan di tingkat komunitas.

Through its Corporate Social and Environmental Responsibility (TJSL) program, KIE conducted a socialization session on the Climate Village Program (PROKLIM) at the Coastal Climate Village of BSD, Bontang City, and provided support for community-based waste management facilities. This initiative reflects the Company's commitment to advancing community-based climate change adaptation and mitigation efforts, while strengthening environmental management practices at the community level.

Penghargaan dan Sertifikasi
Awards and Certification

PENGHARGAAN | AWARDS



14 Januari 2025
January 14, 2025

Penghargaan Sinergi dan Kolaborasi dalam Pelaksanaan Pembangunan Kota Bontang
Award on Synergy and Collaboration in the Implementation of Bontang City Development

Walikota Bontang
Mayor of Bontang

23 Juni 2025
June 23, 2025

Program Penilaian Kinerja Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup - Peringkat "Emas" periode 2024-2025 Provinsi Kalimantan Timur
Performance Assessment Program in Environmental Management - "Gold" Rating for the 2024-2025 period

Gubernur Kalimantan Timur
Governor of East Kalimantan

7 April 2026
April 7, 2026

Program Penilaian Kinerja Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup - Peringkat "Biru" periode 2024-2025
Performance Assessment Program in Environmental Management - "Blue" Rating for the 2024-2025 period

Kementerian Lingkungan Hidup
Ministry of Environmental

26 Juni 2025
June 26, 2025

Piagam Penghargaan Kecelakaan Kerja Nihil (*Zero Accident*)
Zero Accident Award

Gubernur Kalimantan Timur
Governor of East Kalimantan



23 September 2025
September 23, 2025

Penghargaan Tata Kelola Layak Tahun 2025
2025 Good Corporate Governance Award

Disnaker Kota Bontang
Bontang Manpower Office

23 September 2025
September 23, 2025

Apresiasi sebagai Pemerhati Lingkungan dan Partisipasi Dalam Rangka Kegiatan World Cleanup Day (WCD) Kota Bontang tahun 2025
Appreciation as an Environmental Advocate and Participation in World Cleanup Day (WCD) 2025 in Bontang City

Walikota Bontang
Mayor of Bontang

03 Desember 2025
December 3, 2025

Dukungan dan Partisipasi Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kota Bontang
Recognition for Support and Participation in Environmental Protection and Management in Bontang City

Walikota Bontang
Mayor of Bontang

30 September 2025
September 30, 2025

Predikat Gold di Ajang *Vendor Gathering* PT Pupuk Kalimantan Timur
Gold Predicate in Vendor Gathering PT Pupuk Kalimantan Timur 2025

PT Pupuk Kalimantan Timur

SERTIFIKASI | CERTIFICATIONS



13 Januari 2025
January 13, 2025

Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016
ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System

PT URS Service Indonesia

12 Januari 2028
January 12, 2028

11 November 2024
November 11, 2024

Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015
ISO 9001:2015 Quality Management System

PT URS Service Indonesia

10 November 2027
November 10, 2027

16 September 2023
September 16, 2023

Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja ISO 45001:2018
ISO 45001:2018 Occupational Health and Safety Management System

PT URS Service Indonesia

15 September 2026
September 15, 2026

15 September 2023
September 15, 2023

Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001:2015
ISO 14001:2015 Environmental Management System

PT URS Service Indonesia

18 Agustus 2026
August 18, 2026

04 Maret 2025
March 4, 2025

Keanggotaan Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia
Membership of the Indonesian Real Estate Association

Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia
The Indonesian Real Estate Association

31 Desember 2025
December 13, 2025



25 Juni 2025
June 25, 2025

Keanggotaan Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia
Membership of the National Contractors Association of Indonesia

GAPENSI

24 Juni 2026
June 24, 2026

10 Januari 2024
January 10, 2024

Keanggotaan Himpunan Kawasan Industri (HKI)
Membership of the Industrial Estates Association

Himpunan Kawasan Industri (HKI)
The Industrial Estates Association

10 Januari 2026
January 10, 2026

12 Juli 2025
July 12, 2025

Keanggotaan Kamar Dagang dan Industri
Membership of the Chamber of Commerce and Industry

KADIN Indonesia
The Chamber of Commerce and Industry

12 Juli 2026
July 12, 2026

02 →

Laporan Manajemen

Management Report





Laporan Dewan Komisaris
Report of the Board of Commissioners



Dewan Komisaris menilai Direksi telah menunjukkan kinerja yang positif sepanjang tahun 2025, didukung oleh pertumbuhan kinerja keuangan, penguatan tata kelola, serta peningkatan kualitas pengelolaan usaha yang berkelanjutan.

The Board of Commissioners assesses that the Board of Directors delivered positive performance throughout 2025, supported by improved financial performance, strengthened governance, and enhanced quality of sustainable business management.

Turkhamim

Komisaris
Commissioner

PEMEGANG SAHAM DAN PEMANGKU KEPENTINGAN YANG KAMI HORMATI,

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga PT Kaltim Industrial Estate (KIE) dapat melalui Tahun Buku 2025 dengan baik di tengah dinamika lingkungan usaha yang terus berkembang.

Sepanjang tahun buku 2025, Dewan Komisaris melaksanakan fungsi pengawasan serta pemberian nasihat kepada Direksi guna memastikan pengelolaan Perusahaan berjalan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Dalam menjalankan perannya, Dewan Komisaris berpedoman pada prinsip tata kelola Perusahaan yang baik serta memastikan bahwa setiap kebijakan dan langkah strategis yang diambil Direksi selaras dengan kepentingan jangka panjang Perusahaan.

Tahun 2025 menjadi periode yang penting bagi KIE dalam memperkuat kapasitas organisasi serta meningkatkan kualitas pengelolaan kawasan industri. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan kinerja operasional, penguatan sistem tata kelola, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perusahaan guna menjaga keberlanjutan usaha di tengah dinamika lingkungan bisnis yang terus berkembang.

PENILAIAN DEWAN KOMISARIS ATAS KINERJA DIREKSI DAN DASAR PENILAIANNYA

Dalam menjalankan fungsi pengawasannya, Dewan Komisaris secara berkala melakukan evaluasi terhadap kinerja Direksi dengan mempertimbangkan berbagai indikator, antara lain pencapaian target kinerja Perusahaan, implementasi strategi bisnis, efektivitas pengelolaan risiko, serta penerapan tata kelola Perusahaan yang baik.

Berdasarkan hasil pengawasan dan evaluasi tersebut, Dewan Komisaris menilai bahwa Direksi telah menunjukkan kinerja yang positif sepanjang tahun 2025. Hal ini tercermin dari pertumbuhan kinerja keuangan Perusahaan, dimana pendapatan Perusahaan tercatat sebesar Rp520,04 miliar, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp504,28 miliar, sementara laba tahun berjalan mencapai Rp112,03 miliar.

Dewan Komisaris memandang bahwa pencapaian tersebut mencerminkan kemampuan Direksi dalam menjaga stabilitas operasional Perusahaan sekaligus meningkatkan kinerja usaha melalui pengelolaan bisnis yang lebih efektif dan terukur.

DEAR VALUED SHAREHOLDERS AND STAKEHOLDERS,

First and foremost, we express our gratitude to Almighty God for His grace and blessings, which have enabled PT Kaltim Industrial Estate (KIE) to successfully navigate Fiscal Year 2025 amid an evolving and increasingly dynamic business environment.

Throughout Fiscal Year 2025, the Board of Commissioners diligently carried out its supervisory and advisory functions to ensure that the Company's management was conducted in a professional, transparent, and accountable manner. In fulfilling its duties, the Board of Commissioners adhered to the principles of Good Corporate Governance (GCG) and ensured that the policies and strategic decisions carried out by the Board of Directors were aligned with the Company's long-term interests.

The year 2025 marked a significant period for KIE in strengthening organizational capacity and enhancing the quality of industrial estate management. These efforts were pursued through the improvement of operational performance, the reinforcement of governance systems, and the optimization of the Company's resources to safeguard business sustainability amid a continuously evolving business landscape.

ASSESSMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS' PERFORMANCE AND BASIS OF EVALUATION

In carrying out its supervisory function, the Board of Commissioners periodically evaluates the performance of the Board of Directors by considering various indicators, including the achievement of the Company's performance targets, the implementation of business strategies, the effectiveness of risk management, and the application of Good Corporate Governance principles.

Based on the results of such supervision and evaluation, the Board of Commissioners concludes the Board of Directors demonstrated positive performance throughout 2025. This assessment is reflected in the Company's financial performance, with revenue recorded at Rp520.04 billion, representing an increase from Rp504.28 billion in the prior year, while profit for the year amounted to Rp112.03 billion.

The Board of Commissioners considers these achievements to reflect the Board of Directors' ability to maintain operational stability while enhancing business performance through increasingly effective and measurable business management practices.

Selain itu, Dewan Komisaris juga menilai bahwa Direksi telah menunjukkan komitmen dalam memperkuat fondasi organisasi melalui peningkatan tata kelola Perusahaan, penguatan sistem pengendalian internal, serta pengembangan sumber daya manusia guna mendukung keberlanjutan pertumbuhan Perusahaan di masa mendatang.

In addition, the Board of Commissioners acknowledges the Board of Directors' commitment to strengthening the organizational foundation through improvements in corporate governance, reinforcement of internal control systems, and the development of human resources to support the Company's sustainable growth in the years ahead.

PENGAWASAN DALAM PERUMUSAN DAN IMPLEMENTASI STRATEGI YANG DISUSUN OLEH DIREKSI

Dalam proses perumusan dan implementasi strategi Perusahaan, Dewan Komisaris memberikan perhatian khusus pada keselarasan antara rencana pengembangan bisnis dengan kapasitas operasional Perusahaan serta pengelolaan risiko yang memadai.

Sepanjang tahun 2025, Dewan Komisaris memantau berbagai inisiatif strategis yang dijalankan Direksi dalam pengembangan kawasan industri, termasuk penguatan infrastruktur kawasan, peningkatan kualitas layanan pelanggan, serta optimalisasi unit-unit usaha lainnya. Pendekatan ini dinilai penting untuk memastikan bahwa pertumbuhan bisnis Perusahaan berjalan secara berkelanjutan serta mampu memberikan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan.

OVERSIGHT OF STRATEGY FORMULATION AND IMPLEMENTATION

In the process of formulating and implementing the Company's strategy, the Board of Commissioners places particular emphasis on ensuring alignment between business development plans, the Company's operational capacity, and prudent risk management practices.

Throughout 2025, the Board of Commissioners monitored various strategic initiatives undertaken by the Board of Directors in the development of the industrial estate, which includes strengthening estate's infrastructures, enhancing customer services quality, and optimizing other business units. Such an approach is considered essential to ensuring that the Company's business growth is sustainable and capable of delivering long-term value to shareholders and other stakeholders.

MEKANISME DAN FREKUENSI PEMBERIAN NASIHAT KEPADA DIREKSI

Pemberian nasihat kepada Direksi dilakukan secara berkelanjutan melalui berbagai forum komunikasi formal maupun informal. Dewan Komisaris secara rutin melakukan koordinasi dengan Direksi untuk membahas perkembangan kinerja Perusahaan, implementasi strategi bisnis, serta berbagai isu strategis yang memerlukan perhatian bersama.

Sepanjang tahun 2025, rapat Dewan Komisaris bersama Direksi sebanyak 9 (sembilan) kali rapat sebagai bagian dari mekanisme pengambilan keputusan strategis dan pengendalian operasional Perusahaan. Forum tersebut juga menjadi sarana bagi Dewan Komisaris untuk memberikan pandangan serta arahan strategis guna memastikan setiap keputusan yang diambil selaras dengan kepentingan jangka panjang Perusahaan.

ADVISORY MECHANISM AND FREQUENCY TO THE BOARD OF DIRECTORS

The provision of advice to the Board of Directors is conducted on a continuous basis through formal and informal communication forums. The Board of Commissioners regularly coordinates with the Board of Directors to discuss the Company's performance developments, implementation of business strategies, and strategic matters requiring joint attention.

Throughout 2025, the Board of Commissioners convened joint meetings with the Board of Directors on 9 (nine) occasions as part of the Company's strategic decision-making and operational control mechanisms. These forums also served as platforms for the Board of Commissioners to provide strategic views and direction to ensure that all decisions taken remain aligned with the Company's long-term interests.

PANDANGAN ATAS PROSPEK USAHA PERUSAHAAN

Dewan Komisaris memandang bahwa prospek usaha Perusahaan ke depan tetap memiliki potensi yang positif, seiring dengan meningkatnya kebutuhan pengembangan kawasan industri yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Namun demikian, Dewan Komisaris juga menekankan pentingnya kesiapan Perusahaan dalam menghadapi berbagai tantangan, termasuk perubahan dinamika ekonomi global, perkembangan teknologi industri, serta meningkatnya

OUTLOOK ON THE COMPANY'S BUSINESS PROSPECTS

The Board of Commissioners acknowledges that the Company's future business prospects remain positive, supported by increasing demand for the development of integrated and sustainable industrial estates.

Nevertheless, the Board of Commissioners emphasizes the importance of the Company's preparedness in addressing various challenges, including shifts in global economic dynamics, advancements in industrial technology, and

tuntutan terhadap aspek keberlanjutan lingkungan dan sosial dalam pengelolaan kawasan industri.

Dalam konteks tersebut, Dewan Komisaris terus mendorong Direksi untuk memperkuat daya saing Perusahaan melalui inovasi layanan kawasan, peningkatan efisiensi operasional, serta penguatan tata kelola Perusahaan yang adaptif terhadap perubahan lingkungan bisnis.

PANDANGAN DAN PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS ATAS PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN DI LINGKUP PERUSAHAAN

Dewan Komisaris menilai bahwa penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik telah dilaksanakan secara konsisten dalam seluruh aspek pengelolaan Perusahaan. Hal ini tercermin dari berbagai mekanisme pengambilan keputusan yang transparan, penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan Perusahaan, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dewan Komisaris juga terus mendorong penguatan budaya integritas, profesionalisme, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia guna memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional Perusahaan dijalankan dengan standar tata kelola yang baik.

PANDANGAN DEWAN KOMISARIS ATAS EFEKTIVITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DAN MANAJEMEN RISIKO PERUSAHAAN

Dewan Komisaris secara berkelanjutan melakukan pengawasan terhadap efektivitas sistem pengendalian internal serta penerapan manajemen risiko Perusahaan guna memastikan bahwa kegiatan operasional Perusahaan berjalan secara terukur, terkendali, dan selaras dengan prinsip kehati-hatian.

Perusahaan telah mengimplementasikan kerangka manajemen risiko yang terintegrasi melalui penyusunan peta risiko (*risk map*) yang memetakan berbagai potensi risiko strategis, operasional, keuangan, maupun kepatuhan atau hukum serta reputasi yang dapat mempengaruhi kinerja dan keberlanjutan usaha Perusahaan. Peta risiko tersebut menjadi dasar bagi manajemen dalam mengidentifikasi, menilai, serta menetapkan langkah mitigasi yang tepat terhadap setiap risiko yang dihadapi Perusahaan.

Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan, Dewan Komisaris menilai bahwa Direksi telah mengelola berbagai risiko utama Perusahaan secara memadai, termasuk risiko yang berkaitan dengan pengelolaan 5 (lima) pilar bisnis Perusahaan, yaitu kawasan industri, beton, properti, *trading*, konstruksi, serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Berbagai langkah mitigasi yang dilakukan menunjukkan komitmen manajemen dalam menjaga stabilitas operasional Perusahaan sekaligus meningkatkan ketahanan organisasi dalam menghadapi dinamika lingkungan usaha.

heightened expectations regarding environmental and social sustainability in industrial estate management.

In this context, the Board of Commissioners continues to encourage the Board of Directors to strengthen the Company's competitiveness through service innovation, enhanced operational efficiency, and the reinforcement of corporate governance practices that are adaptive to changes in the business environment.

THE BOARD OF COMMISSIONERS' VIEW AND OVERSIGHT OF THE IMPLEMENTATION OF CORPORATE GOVERNANCE

The Board of Commissioners is of the opinion that the implementation of Good Corporate Governance (GCG) principles has been carried out consistently across all aspects of the Company's management. This is reflected in transparent decision-making mechanisms, the application of accountability principles in corporate management, and strict adherence to applicable laws and regulations.

The Board of Commissioners continues to encourage the strengthening of a culture of integrity and professionalism, as well as the enhancement of human resource capacity, to ensure that all operational activities are conducted in accordance with good governance standards.

THE BOARD OF COMMISSIONERS' VIEW ON THE EFFECTIVENESS OF THE INTERNAL CONTROL SYSTEM AND RISK MANAGEMENT

The Board of Commissioners continuously supervises the effectiveness of the Company's internal control system and the implementation of risk management practices to ensure that operational activities are conducted in a measured, controlled, and prudent manner.

The Company has implemented an integrated risk management framework through the development of a risk map identifying and assessing potential strategic, operational, financial, compliance or legal, and reputational risks that may affect the Company's performance and business sustainability. The risk map serves as a key reference for management in identifying, evaluating, and determining appropriate mitigation measures for each risk faced by the Company.

Based on its supervisory review, the Board of Commissioners believes that the Board of Directors has managed the Company's principal risks in an adequate manner, including risks associated with the management of the Company's 5 (five) business pillars of industrial estate, concrete, property, trading, and construction, as well as compliance with applicable regulations. The mitigation measures undertaken demonstrate management's commitment to maintaining operational stability while enhancing organizational resilience in responding to evolving business dynamics.

Dewan Komisaris juga terus mendorong Direksi untuk memperkuat budaya sadar risiko (*risk awareness*) di seluruh lini organisasi, sehingga pengelolaan risiko tidak hanya menjadi fungsi formal, tetapi menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan strategis Perusahaan.

The Board of Commissioners further encourages the Board of Directors to strengthen a risk awareness culture throughout all levels of the organization, ensuring that risk management is not merely a formal function but an integral part of the Company's strategic decision-making processes.

PENILAIAN DEWAN KOMISARIS ATAS KINERJA KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

ASSESSMENT OF THE PERFORMANCE OF COMMITTEES UNDER THE BOARD OF COMMISSIONERS

Dalam menjalankan fungsi pengawasan secara optimal, Dewan Komisaris didukung oleh komite-komite yang berada di bawah Dewan Komisaris, termasuk Komite Audit serta Komite GCG, Manajemen Risiko dan Investasi.

In carrying out its supervisory function effectively, the Board of Commissioners is supported by committees established under its authority, including the Audit Committee and the GCG, Risk Management, and Investment Committee.

Sepanjang tahun 2025, Dewan Komisaris menilai bahwa komite-komite tersebut telah menjalankan peran dan tanggung jawabnya dengan baik dalam membantu Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap berbagai aspek penting Perusahaan, termasuk proses pelaporan keuangan, pengelolaan risiko, serta penerapan tata kelola perusahaan yang baik.

Throughout 2025, the Board of Commissioners views that these committees have duly performed their roles and responsibilities in assisting the Board of Commissioners in overseeing key aspects of the Company's operations, including the financial reporting process, risk management practices, and the implementation of Good Corporate Governance (GCG) principles.

Komposisi susunan Dewan Komisaris per tanggal 30 Juni 2024:

Composition of the Board of Commissioners as of June 30, 2024:

Nama Name	**Jabatan** Position	**Dasar Pengangkatan** Basis of Appointment	**Periode Jabatan** Terms of Office
Teguh Ismartono	Komisaris Utama President Commissioner	Berdasarkan RUPS Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 17 Januari 2023 According to Extraordinary GMS (EGMS) dated January 17, 2023	17 Januari 2023 - 16 Januari 2026 January 17, 2023 - January 16, 2026
Turkhamim	Komisaris Commissioner	Berdasarkan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham sebagai Pengganti RUPSLB tanggal 13 Mei 2024 According to Circular Resolution of Shareholders in Lieu of the EGMS dated May 13, 2024	13 Mei 2024 - 12 Mei 2027 May 13, 2024 - May 12, 2027

INFORMASI PERUBAHAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

CHANGES IN THE COMPOSITION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Tanggal 26 Agustus 2025, Pemegang Saham menyetujui untuk mengambil keputusan melalui Keputusan Sirkuler Pemegang Saham (KPS) yang diedarkan sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) untuk mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Sdr. Teguh Ismartono dari jabatannya sebagai Komisaris Utama.

On August 26, 2025, the Shareholders approved a resolution through a Circular Resolution of Shareholders in lieu of an Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) to ratify the honorable dismissal of Mr. Teguh Ismartono from his position as President Commissioner of the Company.

Komposisi susunan Dewan Komisaris per tanggal 27 Agustus 2025, menjadi:

Composition of the board of Commissioners as of August 27, 2025, as follow:

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Periode Jabatan Terms of Office
Turkhamim	Komisaris Commissioner	Berdasarkan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham sebagai Pengganti RUPSLB tanggal 13 Mei 2024 According to Circular Resolutions of Shareholders in Lieu of EGMS dated May 13, 2024	13 Mei 2024 - 12 Mei 2027 May 13, 2024 - May 12, 2027

PENUTUP

Dewan Komisaris menyampaikan apresiasi kepada Direksi dan seluruh jajaran manajemen atas komitmen dan upaya yang telah dilakukan dalam menjalankan pengelolaan Perusahaan sepanjang tahun 2025. Peningkatan kinerja Perusahaan serta berbagai langkah strategis yang telah dijalankan menunjukkan komitmen Perusahaan dalam memperkuat kapasitas organisasi dan menjaga keberlanjutan usaha.

Dewan Komisaris juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh karyawan serta para pemangku kepentingan atas dukungan yang diberikan kepada Perusahaan. Dengan fondasi organisasi yang semakin kuat serta komitmen yang terus dijalankan secara konsisten, Dewan Komisaris meyakini bahwa Perusahaan akan mampu menghadapi berbagai tantangan di masa depan serta terus memberikan kontribusi positif bagi perkembangan industri dan masyarakat.

CLOSING REMARKS

The Board of Commissioners expresses its utmost appreciation to the Board of Directors and all management for their commitments and efforts upheld in performing the Company management in 2025. The enhancement of the Company performance and numerous strategic initiatives performed reflected the Company commitment to strengthening the organization capacity and sustaining business continuity.

The Board of Commissioners also expresses its gratitude to all employees and all stakeholders for the unwavering support to the Company. With stronger business organization foundation and consistent implementation of the Company commitments, the Board of Commissioners recognizes that the Company will be able to navigate future challenges, while positively contributing to the industry and communities development.

Bontang, April 2026

Atas nama Dewan Komisaris,
On behalf of the Board of Commissioners

TURKHAMIM
Komisaris
Commissioner

Laporan Direksi
Board of Directors Report



Direksi berkomitmen menjalankan pengelolaan Perusahaan secara profesional, adaptif, dan berorientasi pada keberlanjutan, melalui penguatan kinerja operasional, peningkatan kualitas layanan, serta optimalisasi sumber daya Perusahaan.

The Board of Directors remains committed to managing the Company in a professional, adaptive, and sustainability-oriented manner, through strengthening operational performance, enhancing service quality, and optimizing the Company's resources.

Muhammad Erizza

Direktur Utama
President Director

PEMEGANG SAHAM DAN PEMANGKU KEPENTINGAN YANG SAYA HORMATI

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga PT Kaltim Industrial Estate (KIE) dapat melalui Tahun Buku 2025 dengan baik di tengah dinamika lingkungan ekonomi dan industri yang terus berkembang.

Sepanjang tahun 2025, Direksi terus berupaya menjalankan pengelolaan Perusahaan secara profesional, adaptif, dan berorientasi pada keberlanjutan usaha. Berbagai langkah strategis dilakukan untuk memperkuat kinerja operasional seluruh pilar bisnis, meningkatkan kualitas layanan kepada tenant, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perusahaan.

Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi dunia usaha, Direksi tetap berkomitmen untuk menjaga stabilitas kinerja Perusahaan sekaligus memperkuat fondasi organisasi melalui peningkatan tata kelola, penguatan sistem pengendalian internal, serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia. Upaya tersebut dilakukan agar Perusahaan mampu terus berkembang dan memberikan nilai tambah yang berkelanjutan bagi pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan.

PERKEMBANGAN KONDISI EKONOMI DAN INDUSTRI

Sepanjang tahun 2025, perekonomian global dan nasional masih menghadapi berbagai dinamika yang dipengaruhi oleh perubahan kondisi geopolitik, fluktuasi harga komoditas, serta penyesuaian kebijakan ekonomi di berbagai negara. Di tengah kondisi tersebut, sektor industri tetap menunjukkan peran penting sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi nasional, termasuk melalui peningkatan investasi dan pengembangan kawasan industri yang terintegrasi.

Sebagai pengelola kawasan industri strategis, KIE terus memantau perkembangan kondisi ekonomi dan industri guna memastikan bahwa kebijakan dan langkah operasional Perusahaan dapat menyesuaikan dengan dinamika yang terjadi. Permintaan terhadap kawasan industri yang memiliki infrastruktur memadai, layanan utilitas yang andal, serta pengelolaan kawasan yang profesional masih menjadi faktor penting dalam mendukung pertumbuhan investasi industri.

Dalam konteks tersebut, Perusahaan terus berupaya memperkuat pengelolaan kawasan industri melalui peningkatan kualitas layanan, pengembangan infrastruktur kawasan, serta penguatan sistem operasional guna menjaga daya saing kawasan industri yang dikelola Perusahaan.

DEAR VALUED SHAREHOLDERS AND STAKEHOLDERS,

First and foremost, we express our gratitude to Almighty God for His grace and blessings, which have enabled PT Kaltim Industrial Estate (KIE) to successfully navigate Fiscal Year 2025 amid an evolving economic and industrial landscape.

Throughout 2025, the Board of Directors remained committed to managing the Company in a professional, adaptive, and sustainability-oriented manner. Various strategic initiatives were performed to strengthen the operational performance of all business pillars, enhance the quality of services provided to tenants, and optimize the utilization of the Company's resources.

Amid the challenges faced by the business sector, the Board of Directors consistently prioritized maintaining the Company's performance stability while reinforcing the organizational foundation through improved corporate governance practices, strengthened internal control systems, and enhanced human resource capacity. These efforts were undertaken to ensure that the Company continues to grow and deliver sustainable value to shareholders and all stakeholders.

ECONOMIC AND INDUSTRY DEVELOPMENTS

Throughout 2025, the global and national economies continued to experience dynamic conditions influenced by geopolitical developments, commodity price fluctuations, and economic policy adjustments across various jurisdictions. Amid these circumstances, the industrial sector remained a key driver of national economic growth, supported in part by increased investment and the development of integrated industrial estates.

As a strategic industrial estate management, KIE continuously monitors economic and industry developments to ensure that its policies and operational measures remain responsive and adaptive to prevailing conditions. Demand for industrial estates equipped with adequate infrastructure, reliable utility services, and professional estate management continues to be a critical factor in supporting industrial investment growth.

In this context, the Company remains committed to strengthening the management of its industrial estate through enhanced service quality, infrastructure development, and the reinforcement of operational systems to maintain the competitiveness of the estate under its management.

PROSPEK USAHA DAN TARGET PERUSAHAAN UNTUK TAHUN 2025

Direksi memandang bahwa prospek usaha Perusahaan pada tahun 2025 tetap memiliki peluang yang baik seiring dengan meningkatnya kebutuhan pengembangan kawasan industri yang terintegrasi dan berkelanjutan. Posisi Perusahaan sebagai pengelola kawasan industri strategis memberikan peluang bagi Perusahaan untuk terus mendukung pertumbuhan sektor industri serta menarik investasi baru ke kawasan industri yang dikelola Perusahaan.

Mengacu pada prospek usaha tahun 2025, Perusahaan menargetkan peningkatan kinerja operasional dan keuangan melalui pengelolaan usaha yang lebih optimal. Fokus utama diarahkan pada peningkatan kualitas layanan, efisiensi operasional, serta pengembangan unit usaha yang mendukung keberlanjutan kinerja Perusahaan. Dengan demikian, Perusahaan optimistis dapat menjaga pertumbuhan usaha yang sehat dan berkesinambungan.

Target tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan kinerja Perusahaan sekaligus memperkuat kontribusi Perusahaan dalam mendukung pengembangan industri dan pertumbuhan ekonomi di wilayah operasional Perusahaan.

STRATEGI DAN KEBIJAKAN STRATEGIS PERUSAHAAN TAHUN 2025

Untuk mencapai target yang telah ditetapkan, Perusahaan menerapkan berbagai strategi dan kebijakan strategis yang berfokus pada penguatan fondasi operasional dan peningkatan daya saing kawasan industri.

Strategi tersebut antara lain meliputi optimalisasi pengelolaan kawasan dan peningkatan kualitas pelayanan, mengoptimalkan aset *idle*, melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan sumber-sumber pendapatan baru, pengembangan sistem manajemen kinerja, serta penguatan sistem sistem tata kelola dan manajemen risiko. Selain itu, Perusahaan juga terus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai bagian dari upaya meningkatkan efektivitas operasional Perusahaan.

Melalui strategi tersebut, Perusahaan berupaya memastikan bahwa pengelolaan kawasan industri dilakukan secara terintegrasi dan mampu memberikan nilai tambah bagi para tenant serta pemangku kepentingan lainnya.

PERANAN DIREKSI DALAM PERUMUSAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN STRATEGIS PERUSAHAAN

Direksi memiliki peran utama dalam merumuskan strategi dan kebijakan strategis Perusahaan guna memastikan bahwa Perusahaan mampu menjalankan kegiatan usaha secara efektif dan berkelanjutan. Dalam proses tersebut, Direksi mempertimbangkan berbagai faktor strategis, termasuk

BUSINESS OUTLOOK AND COMPANY TARGETS FOR 2025

The Board of Directors believes that the Company's business outlooks in 2025 remain favorable, supported by growing demand for integrated and sustainable industrial estate development. The Company's position as a strategic industrial estate management provides opportunities to further support industrial sector growth and attract new investment to the estates under its management.

Referring to the 2025 business outlook, the Company targets enhancement in operational and financial performance through optimal business management. Main Focus of the Company is directed toward service quality enhancement, operational efficiency, and business units development that supports the Company sustainability performance. Accordingly, the Company is optimistic to maintain healthy and continuous development.

These targets are expected to drive improved corporate performance while strengthening the Company's contribution to industrial development and economic growth within its operational region.

COMPANY STRATEGY AND STRATEGIC POLICIES IN 2025

To achieve the established targets, the Company implemented a series of strategies and strategic policies focused on strengthening its operational foundation and enhancing the competitiveness of its industrial estate.

These strategies include the optimization of estate management and service quality enhancement; the optimization of idle assets; initiatives to increase new revenue streams; the development of a performance management system; and the reinforcement of corporate governance and risk management systems. In addition, the Company continues to prioritize the improvement of human resource quality as part of its broader efforts to enhance overall operational effectiveness.

Through these strategic initiatives, the Company seeks to ensure that the management of its industrial estate is conducted in an integrated manner and capable of delivering added value to tenants and other stakeholders.

ROLE OF THE BOARD OF DIRECTORS IN FORMULATING COMPANY STRATEGY AND STRATEGIC POLICIES

The Board of Directors plays a primary role in formulating the Company's strategy and strategic policies to ensure that the Company conducts its business activities effectively and sustainably. In this process, the Board of Directors takes into consideration various strategic factors, including industry

perkembangan kondisi industri, peluang investasi, serta potensi risiko yang dapat mempengaruhi keberlangsungan usaha Perusahaan.

Perumusan strategi Perusahaan juga dilakukan melalui proses koordinasi yang melibatkan berbagai unit kerja di lingkungan Perusahaan, sehingga setiap kebijakan yang diambil dapat mencerminkan kebutuhan operasional serta arah pengembangan Perusahaan secara menyeluruh.

Direksi juga secara berkala melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan strategi Perusahaan guna memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil tetap relevan dengan dinamika lingkungan bisnis yang berkembang.

PROSES YANG DILAKUKAN DIREKSI UNTUK MEMASTIKAN IMPLEMENTASI STRATEGIS

Untuk memastikan bahwa strategi Perusahaan dapat diimplementasikan secara efektif, Direksi menerapkan berbagai mekanisme pengendalian dan koordinasi dalam pengelolaan Perusahaan.

Direksi secara rutin melakukan rapat manajemen guna memantau perkembangan kinerja Perusahaan, mengevaluasi pelaksanaan program kerja, serta memastikan bahwa setiap unit kerja menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Selain itu, Direksi juga memastikan bahwa setiap kebijakan strategis yang diambil didukung oleh sistem pengendalian internal yang memadai serta mekanisme pelaporan yang transparan, sehingga pelaksanaan strategi Perusahaan dapat dipantau secara berkelanjutan.

TARGET PADA TAHUN 2025 DAN UPAYA PENCAPAIANNYA

Dalam rangka meningkatkan kinerja Perusahaan, Direksi menetapkan berbagai target kinerja yang mencakup aspek operasional maupun keuangan Perusahaan. Target tersebut antara lain diarahkan pada peningkatan pendapatan Perusahaan, pengembangan proyek strategis, optimalisasi pemanfaatan aset, serta peningkatan kualitas layanan kepada tenant.

Untuk mendukung tercapainya target tersebut, Perusahaan menjalankan berbagai langkah strategis yang dirancang secara terarah dan terukur. Berbagai upaya tersebut dilaksanakan melalui penguatan implementasi 5 (lima) pilar bisnis Perusahaan sebagai fondasi dalam pengembangan dan pengelolaan kegiatan usaha. Selain itu, Perusahaan juga terus mendorong peningkatan kapasitas serta kompetensi sumber daya manusia melalui berbagai program pengembangan profesionalisme kerja guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan dan efektivitas operasional Perusahaan.

developments, investment opportunities, and potential risks that may affect the Company's business continuity.

The formulation of the Company strategy is carried out through a coordinated process involving various organizational units, thereby ensuring that adopted policies reflect operational requirements and the Company's overall development direction.

The Board of Directors also conducts periodic evaluations of the implementation of corporate strategies to ensure that strategic initiatives remain relevant and responsive to evolving business dynamics.

PROCESSES PERFORMED BY THE BOARD OF DIRECTORS TO ENSURE STRATEGIC EXECUTION

To ensure the effective implementation of the Company's strategies, the Board of Directors has established numerous control and coordination mechanisms within its management framework.

The Board of Directors conducts regular management meetings to monitor the Company's performance developments, evaluate the execution of work programs, and ensure that each business unit carries out its duties and responsibilities in accordance with established plans.

In addition, the Board of Directors ensures that each strategic policy is supported by an adequate internal control system and transparent reporting mechanisms, enabling continuous monitoring and oversight of the Company's strategic implementation.

TARGETS FOR 2025 AND IMPLEMENTATION EFFORTS

In an effort to enhance corporate performance, the Board of Directors established performance targets encompassing operational and financial aspects. These targets are directed toward increasing the Company's revenue, developing strategic projects, optimizing asset utilization, and enhancing service quality for tenants.

To support the achievement of these targets, the Company implemented a series of structured and measurable strategic initiatives. These efforts were executed through the strengthening of the Company's 5 (five) business pillars as the foundation for the development and management of its business activities. In parallel, the Company continued to enhance the capacity and competencies of its human resources through various professional development programs aimed at improving service quality and operational effectiveness.

Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan kinerja Perusahaan secara berkelanjutan sekaligus memperkuat posisi Perusahaan sebagai pengelola kawasan industri yang kompetitif dan terpercaya.

KENDALA YANG DIHADAPI PERUSAHAAN

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perusahaan juga menghadapi berbagai tantangan yang berasal dari dinamika lingkungan bisnis maupun faktor eksternal lainnya. Tantangan tersebut antara lain berkaitan dengan perubahan kondisi ekonomi global, dinamika investasi industri, serta tuntutan yang semakin tinggi terhadap pengelolaan kawasan industri yang berkelanjutan.

Selain itu, Perusahaan juga perlu terus meningkatkan efisiensi operasional serta memperkuat sistem pengelolaan kawasan guna memastikan bahwa Perusahaan tetap kompetitif di tengah persaingan industri yang semakin berkembang.

Direksi terus melakukan berbagai langkah antisipatif dan perbaikan berkelanjutan guna mengatasi berbagai kendala tersebut serta menjaga stabilitas kinerja Perusahaan.

PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK YANG TELAH DILAKSANAKAN OLEH PERUSAHAAN

KIE senantiasa berkomitmen untuk menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam seluruh aspek pengelolaan Perusahaan. Penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, serta kewajaran menjadi landasan utama dalam setiap proses pengambilan keputusan di lingkungan Perusahaan.

Berbagai upaya juga dilakukan untuk memperkuat sistem pengendalian internal, meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta membangun budaya integritas di seluruh lini organisasi.

Melalui penerapan tata kelola perusahaan yang baik, Direksi berupaya memastikan bahwa Perusahaan dapat menjalankan kegiatan usahanya secara profesional, bertanggung jawab, serta mampu memberikan nilai tambah yang berkelanjutan bagi para pemangku kepentingan.

These initiatives are expected to drive sustainable performance improvement while reinforcing the Company's position as a competitive and reliable industrial estate management.

CHALLENGES FACED BY THE COMPANY

In conducting its business activities, the Company encountered various challenges arising from evolving business dynamics and other external factors. These challenges include shifts in global economic conditions, fluctuations in industrial investment trends, and increasing demands for sustainable industrial estate management.

Furthermore, the Company must continuously improve operational efficiency and strengthen estate management systems to maintain competitiveness within an increasingly dynamic industry environment.

The Board of Directors continues to undertake anticipatory measures and continuous improvement initiatives to address these challenges and safeguard the Company's performance stability.

IMPLEMENTATION OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE

KIE remains firmly committed to implementing Good Corporate Governance (GCG) principles across all aspects of corporate management. The principles of transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness serve as the fundamental foundation in every decision-making process within the Company.

Various initiatives have been carried out to strengthen the internal control system, enhance compliance with prevailing laws and regulations, and cultivate a culture of integrity throughout all levels of the organization.

Through the consistent application of good corporate governance practices, the Board of Directors seeks to ensure that the Company conducts its business activities in a professional and responsible manner, while delivering sustainable value to shareholders and other stakeholders.

Komposisi susunan Direksi per tanggal 18 Maret 2024:

Composition of the Board of Directors as of March 18, 2024:

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Periode Jabatan Terms of Office
Muhammad Erriza	Direktur Utama President Director	Berdasarkan RUPS Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 05 Januari 2024 According to the Extraordinary GMS (EGMS) dated January 5, 2024	05 Januari 2024 - 04 Januari 2027 January 5 - January 4, 2027
Dianti Citra Agustin	Direktur Keuangan Director of Finance	Berdasarkan RUPSLB tanggal 15 Agustus 2022 According to the EGMS dated August 15, 2022	15 Agustus 2022 - 14 Agustus 2025 August 15, 2022 - August 14, 2025
Indra Kusumawardhana	Direktur Operasional & Bisnis Director of Operations and Business	Berdasarkan RUPSLB tanggal 18 Maret 2024 According to the EGMS dated January March 18, 2024	18 Maret 2024 - 17 Maret 2027 March 18, 2024 - March 17, 2027

INFORMASI PERUBAHAN KOMPOSISI DIREKSI

Sepanjang tahun buku 2025, terdapat perubahan dalam komposisi Direksi Perusahaan yang terjadi sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan Direktur Keuangan Perusahaan.

Masa jabatan Sdri. Dianti Citra Agustin selaku Direktur Keuangan Perusahaan berakhir pada tanggal 14 Agustus 2025. Sehubungan dengan hal tersebut dan untuk memastikan keberlangsungan pelaksanaan fungsi Direksi sesuai dengan yang diatur dalam pasal 9 ayat 26 huruf b, bahwa selama jabatan direksi lowong dan RUPS belum mengisi jabatan anggota Direksi. Dewan Komisaris Perusahaan melalui Surat Dewan Komisaris Nomor 19/DEKOM/KIE/VIII/2025 tanggal 19 Agustus 2025 menunjuk Sdr. Muhammad Erriza dalam jabatannya sebagai Direktur Utama Perusahaan untuk menjalankan tugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Keuangan Perusahaan, terhitung sejak 19 Agustus 2025 sampai dengan ditetapkannya Direktur Keuangan Perusahaan yang definitif melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Selanjutnya, untuk memastikan kelancaran pengelolaan fungsi keuangan Perusahaan, RUPS menetapkan penunjukkan Sdri. Dianti Citra Agustin untuk melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Keuangan Perusahaan sesuai dengan Keputusan Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa terhitung sejak 28 November 2025 sampai dengan ditetapkannya Direktur Keuangan Perusahaan yang definitif melalui RUPS.

INFORMATION ON CHANGES IN THE COMPOSITION OF THE BOARD OF DIRECTORS

Throughout Fiscal Year 2025, there was a change in the composition of the Company's Board of Directors due to the expiration of the term of office of the Company's Director of Finance.

The term of office of Mrs. Dianti Citra Agustin as Director of Finance ended on August 14, 2025. In connection therewith, and to ensure continuity in the execution of the Board of Directors' functions in accordance with Article 9 paragraph 26 letter b, stipulating that in the event of a vacancy in the Board of Directors and prior to the GMS appointing a replacement, the Board of Commissioners, through Letter No. 19/DEKOM/KIE/VIII/2025 dated August 19, 2025, appointed Mr. Muhammad Erriza, in his capacity as President Director, to serve concurrently as Acting Director of Finance, effective August 19, 2025, until the appointment of a definitive Director of Finance by resolution of the General Meeting of Shareholders (GMS).

Subsequently, to ensure the continued and orderly management of the Company's financial function, the GMS resolved to appoint Mrs. Dianti Citra Agustin to serve as Acting Director of Finance pursuant to a Shareholders' Resolution in lieu of an Extraordinary General Meeting of Shareholders, effective November 28, 2025, until the definitive Director of Finance is appointed through a GMS resolution.

Komposisi susunan Direksi per tanggal 15 Agustus 2025: Composition of the Board of Directors as of August 15, 2025:

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Periode Jabatan Terms of Office
Muhammad Erriza	Direktur Utama President Directors	Berdasarkan RUPSLB tanggal 05 Januari 2024 According to the EGMS dated January 5, 2024	05 Januari 2024 - 04 Januari 2027 January 5, 2024 - January 4, 2027
Indra Kusumawardhana	Direktur Operasional & Bisnis Director of Operations and Business	Berdasarkan RUPSLB tanggal 18 Maret 2024 According to the EGMS dated March 18, 2024	18 Maret 2024 - 17 Maret 2027 March 18, 2024 - March 17, 2027
-	Direktur Keuangan Director of Finance	-	-

Komposisi susunan Direksi per tanggal 19 Agustus 2025: Composition of the Board of Directors as of August 19, 2025:

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Periode Jabatan Terms of Office
Muhammad Erriza	Direktur Utama President Directors	Berdasarkan RUPSLB tanggal 05 Januari 2024 According to the EGMS dated January 5, 2024	05 Januari 2024 - 04 Januari 2027 January 5, 2024- January 4, 2027
Muhammad Erriza	Plt. Direktur Keuangan Acting Director of Finance	Surat Dewan Komisaris Nomor 19/DEKOM/KIE/VIII/2025 tanggal 19 Agustus 2025 Board of Commissioners Letter No. 19/DEKOM/KIE/VIII/2025 dated August 19, 2025	19 Agustus 2025 - sampai RUPS menetapkan Direktur Keuangan Perusahaan yang definitif. August 19, 2025- until the GMS to appoint definitive Director of Finance
Indra Kusumawardhana	Direktur Operasional & Bisnis Director of Operations and Business	Berdasarkan RUPSLB tanggal 18 Maret 2024 According to the EGMS dated January March 18, 2024	18 Maret 2024 - 17 Maret 2027 March 18, 2024 - March 17, 2027

Komposisi susunan Direksi per tanggal 28 November 2025: Composition of the Board of Directors as of November 28, 2025:

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Periode Jabatan Terms of Office
Muhammad Erriza	Direktur Utama President Directors	Berdasarkan RUPSLB tanggal 05 Januari 2024 According to the EGMS dated January 5, 2024	05 Januari 2024 - 04 Januari 2027 January 5, 2024- January 4, 2027
Dianti Citra Agustin	Plt. Direktur Keuangan Acting Director of Finance	Keputusan Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa terhitung sejak 28 November 2025 Shareholders Resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders as of November 28, 2025	28 November 2025 sampai dengan ditetapkannya Direktur Keuangan Perusahaan yang definitif November 28, 2025- until the appointment of definitive Director of Finance
Indra Kusumawardhana	Direktur Operasional & Bisnis Director of Operations and Business	Berdasarkan RUPSLB tanggal 18 Maret 2024 According to the EGMS dated January March 18, 2024	18 Maret 2024 - 17 Maret 2027 March 18, 2024 - March 17, 2027

PENUTUP

Direksi meyakini bahwa langkah-langkah strategis yang telah dijalankan sepanjang tahun 2025 menjadi bagian penting dalam memperkuat kapasitas organisasi serta meningkatkan daya saing Perusahaan di tengah dinamika industri yang terus berkembang.

Ke depan, Direksi akan terus mendorong penguatan pengelolaan kawasan industri, peningkatan kualitas layanan kepada tenant, serta pengembangan infrastruktur dan sistem operasional yang lebih terintegrasi. Upaya tersebut diharapkan dapat mendukung pertumbuhan kinerja Perusahaan sekaligus memperkuat kontribusi Perusahaan dalam mendukung pengembangan industri dan perekonomian daerah.

Direksi menyampaikan apresiasi kepada Dewan Komisaris atas arahan dan pengawasannya, serta kepada seluruh karyawan atas dedikasi dan kerja keras yang telah diberikan sepanjang tahun 2025. Direksi juga mengucapkan terima kasih kepada pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan atas dukungan dan kepercayaan yang terus diberikan kepada Perusahaan.

Dengan komitmen dan kerja sama yang kuat dari seluruh pihak, Direksi optimistis Perusahaan akan terus berkembang secara berkelanjutan dan mampu menghadapi berbagai tantangan di masa mendatang.

CLOSING REMARKS

The Board of Directors believes that the strategic initiatives implemented throughout 2025 constitute a critical foundation for strengthening the Company's organizational capacity and enhancing its competitiveness amid an evolving industrial landscape.

Looking ahead, the Board of Directors will continue to prioritize the enhancement of industrial estate management, the improvement of tenant service quality, and the development of more integrated infrastructure and operational systems. These initiatives are expected to support the Company's performance growth while reinforcing its contribution to industrial development and regional economic advancement.

The Board of Directors extends its sincere appreciation to the Board of Commissioners for its guidance and oversight, and to all employees for their dedication and hard work throughout 2025. The Board of Directors also conveys its gratitude to the shareholders and all stakeholders for their continued trust and support.

With strong commitment and collaboration from all parties, the Board of Directors remains confident that the Company will continue to grow sustainably and effectively address future challenges.

Bontang, April 2026

Atas nama Direksi,
On behalf of Board of Directors

MUHAMMAD ERRIZA
Direktur Utama
President Director

Pernyataan Tanggung Jawab
Statement of Responsibility

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS ATAS LAPORAN TAHUNAN 2025 KIE

Kami, yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa semua informasi material dalam Laporan Tahunan KIE 2025 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan Perusahaan. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

STATEMENT OF RESPONSIBILITY OF THE BOARD OF COMMISSIONERS FOR THE 2025 ANNUAL REPORT OF KIE

We, the undersigned, hereby declare that all material information contained in the 2025 Annual Report of KIE has been fully disclosed, and we accept full responsibility for the accuracy of the contents of the Company's Annual Report. This statement is made truthfully and in good faith.

Bontang, April 2026

Dewan Komisaris,
Board of Commissioners

TURKHAMIM
Komisaris
Commissioner

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI ATAS LAPORAN TAHUNAN 2025 KIE

Kami, yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa semua informasi material dalam Laporan Tahunan KIE tahun 2025 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan Perusahaan. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

STATEMENT OF RESPONSIBILITY OF THE BOARD OF DIRECTORS FOR THE 2025 ANNUAL REPORT OF KIE

We, the undersigned, hereby declare that all material information contained in the 2025 Annual Report of KIE has been fully disclosed, and we accept full responsibility for the accuracy of the contents of the Company's Annual Report. This statement is made truthfully and in good faith.

Bontang, April 2026

Direksi,
Board of Directors

MUHAMMAD ERRIZA
Direktur Utama
President Director

DIANTI CITRA AGUSTIN
Plt Direktur Keuangan
Acting Director of Finance

INDRA KUSUMAWARDHANA
Direktur Operasional & Bisnis
Director of Operations & Business



03 →

Profil Perusahaan

Company Profile


KIE

Informasi Umum dan Identitas Perusahaan
General Information and Company Identity



Nama Perusahaan | Name of the Company

PT Kaltim Industrial Estate
Tidak ada perubahan nama Perusahaan pada tahun buku 2025
No changes on the Company name in fiscal year 2025

Alamat Kantor Pusat | Head Office Address

Kantor Pusat | Head Office
Wisma KIE Lt. 3, Jl. Ammonia Bontang,
Kalimantan Timur 75313 Indonesia.

Alamat Kantor Manajemen | Management Office Address

Kantor Perwakilan Jakarta | Jakarta Representative Office
Jl. Kebon Sirih Raya No. 6A Jakarta Pusat 10110 Indonesia

Telepon | Telephone

(+62 548) 41368



Email | Email

contact@kie.co.id

Website | Website

www.kie.co.id

Tanggal Pendirian | Date of Establishment

29 Agustus 1990 | August 29, 1990

Badan Hukum | Legal Entity

Swasta | Privately Owned

Tahun Beroperasi Komersial | Years of Commercial Operation

1990

Kepemilikan Saham | Ownership

99,99% PT Pupuk Kalimantan Timur
0,01% Yayasan Kesejahteraan Hari Tua Pupuk Kaltim

Makna Logo Perusahaan
Meaning of the Company Logo

Sampai dengan 31 Desember 2025, Perusahaan tidak melakukan perubahan terhadap logo.

As of December 31, 2025, the Company did not undergo logo change.

BENTUK LOGO



MAKNA LOGO

Logo type dibentuk dari akronim Kaltim Industrial Estate yaitu KIE, dengan stilasi huruf yang mencerminkan fleksibilitas, namun serba terukur dengan komposisi harmonis, menggambarkan tata pengelolaan kawasan industri yang modern dan tertata baik, luwes, dinamis dan memiliki cakupan luas. Logo *type* disusun dari multi elemen grafis yang menggambarkan multi bisnis yang menjadi objek pengelolaan kawasan, Keseluruhan bentuk logo yang *bold*, memberi kesan teguh, percaya diri, semangat dan optimisme. Penambahan elemen daun pada bagian atas logo menggambarkan komitmen dan kepedulian perusahaan kepada lingkungan hidup, yang menjadi ciri perusahaan modern.

MEANING OF THE LOGO

The logotype is derived from the acronym Kaltim Industrial Estate (KIE), with stylized lettering that reflects flexibility while maintaining precision and harmonious composition. It symbolizes a modern and well-organized approach to industrial estate management, flexible, dynamic, and far-reaching in scope. The logotype is composed of multiple graphic elements, representing the Company's diverse business segments within the estate. Its bold overall design conveys strength, confidence, enthusiasm, and optimism. The addition of a leaf element at the top of the logo illustrates the Company's commitment to and concern for the environment, a hallmark of a modern enterprise.

MAKNA WARNA

Warna logo gradasi hijau biru mencerminkan usaha dinamis dan semangat yang terus tumbuh. Hijau juga mewakili warna keasrian dan keserasian lingkungan hidup, sedangkan biru mewakili warna kemajuan dan kedalaman teknologi serta kompetensi sumber daya.

MEANING OF THE COLORS

The logo's green-to-blue gradient represents dynamic effort and a spirit of continuous growth. Green symbolizes natural harmony and environmental sustainability, while blue reflects progress, technological depth, and the competence of human resources.



Riwayat Singkat Perusahaan
The Company at a Glimpse

PT Kaltim Industrial Estate merupakan anak perusahaan dari PT Pupuk Kalimantan Timur dengan kepemilikan saham sebesar 99,99% dan 0,01% lainnya milik Yayasan Kesejahteraan Hari Tua (YKHT) PKT. Sejak berdiri, Perusahaan tidak pernah melakukan perubahan nama Perusahaan. PT Kaltim Industrial Estate adalah Perseroan Terbatas, suatu badan hukum Indonesia yang berdomisili di Bontang dan didirikan pada tanggal 29 Agustus 1990 berdasarkan Akta Notaris No. 25, tanggal 29 Agustus 1990 oleh Notaris Hj. Ny. Ayu Woelan Hartono S.H., Notaris di Jakarta yang kemudian diubah dengan Akta No. 4, tanggal 11 Juni 1991 oleh notaris yang sama. Anggaran Dasar Perusahaan telah mendapat pengesahan dari Kementerian Kehakiman Republik Indonesia No. C2-2800.HT.01.01 TH.91, tanggal 8 Juli 1991 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 20, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 1031, tanggal 10 Maret 1992. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan terakhir mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha berdasarkan akta notaris Cintya Ayu Rishanty S.H., MKn notaris di Bontang, No. 13 tanggal 25 Januari 2023 yang telah mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan No. AHU.0004845.AH.01.02. Tahun 2023.

Awalnya PT Kaltim Industrial Estate memulai bisnis dengan menyediakan dan mengelola lahan kawasan industri bagi perusahaan berbasis gas bumi di Kawasan Bontang dengan total lahan kelolaan seluas 214,08 Ha yang terdiri dari Kawasan Tursina 137,66 Ha, Kawasan Tanjung Harapan 48,67 Ha dan Kawasan Equator 27,75 Ha. Seiring dengan tuntutan perkembangan dunia bisnis, KIE berkembang dan tumbuh tidak hanya menyediakan dan mengelola kawasan industri, KIE telah bertransformasi menjadi perusahaan multilevel. Dengan berpegang teguh pada prinsip profesional, komitmen dan mengedepankan kualitas, KIE siap bersaing dan memberikan manfaat maksimal untuk setiap jenis layanan dan produk yang berbasis 5 (lima) pilar bisnis yaitu Kawasan Industri, Konstruksi, Properti, Beton dan Trading, yang meliputi bidang-bidang usaha sebagai berikut:

PT Kaltim Industrial Estate is a subsidiary of PT Pupuk Kalimantan Timur, with a shareholding structure comprising 99.99% owned by PT Pupuk Kalimantan Timur and 0.01% owned by the Yayasan Kesejahteraan Hari Tua (YKHT) PKT. Since its establishment, the Company has never undergone name change. PT Kaltim Industrial Estate is a limited liability company, a legal entity under Indonesian law, domiciled in Bontang, and was established on August 29, 1990, based on Notarial Deed No. 25, dated August 29, 1990, by Notary Hj. Ny. Ayu Woelan Hartono, S.H. in Jakarta. This deed was later amended by Deed No. 4, dated June 11, 1991, by the same notary. The Company's Articles of Association were approved by the Ministry of Justice of the Republic of Indonesia under Decree No. C2-2800.HT.01.01.TH.91, dated July 8, 1991, and published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 20, Supplement No. 1031, dated March 10, 1992. The Articles of Association have undergone several amendments, with the most recent amendment concerning the Company's purpose and business activities reflected in Notarial Deed No. 13, dated January 25, 2023, by Cintya Ayu Rishanty, S.H., MKn, a Notary in Bontang. This amendment received official approval from the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decree No. AHU.0004845.AH.01.02. Year 2023.

PT Kaltim Industrial Estate (KIE) initially began its business by providing and managing industrial estate land for natural gas-based companies in the Bontang area. The Company managed a total area of 214.08 hectares, comprising Tursina Estate of 137.66 ha, Tanjung Harapan Estate of 48.67 ha, and Equator Estate of 27.75 ha. In response to evolving business demands, KIE has expanded beyond industrial estate management and transformed into a multi-level. Guided by professionalism, strong commitment, and a focus on quality, KIE is well-positioned to compete and deliver optimal value across all its products and services enterprise built on five core business pillars, particularly Industrial Estate, Construction, Property, Concrete, and Trading. These pillars encompass a diverse range of business activities:

KAWASAN INDUSTRI | INDUSTRIAL ESTATE

- Jasa Pengelolaan Kawasan Industri
- Instalasi Pengelolaan Air Limbah
- Water Treatment Plant
- Sea Water Reverse Osmosis
- Pengurusan Dokumen AMDAL
- Industrial Estate Management Services
- Wastewater Treatment Plant
- Water Treatment Plant
- Seawater Reverse Osmosis
- Environmental Impact Assessment (AMDAL) Documentation Services



BETON | CONCRETE

- Ready Mix Concrete
- Precast, Mini Pile
- U ditch
- Concrete Ready Mix
- Precast, Mini Pile
- U ditch



PROPERTI | PROPERTY

- Persewaan Ruang Perkantoran
- Persewaan dan Pengelolaan Pergudangan
- Persewaan dan Penjualan Lahan Serta Rumah
- Pengelolaan Perhotelan
- Office Space Leasing
- Warehouse Leasing and Management
- Land and Residential Unit Sales and Leasing
- Hotel Management Services



TRADING | TRADING

- Material Konstruksi
- Bahan Baku Pupuk
- Jasa *Operational & Maintenance*
- Construction Materials
- Fertilizer Raw Materials
- Operations & Maintenance (O&M) Services



KONSTRUKSI | CONSTRUCTION

- Proyek Konstruksi (EPC)
- Cut & Fill
- Land Clearing & Reclamation
- Construction Project (EPC)
- Cut & Fill
- Land Clearing & Reclamation





Jejak Langkah
Milestone

1990 - 2001

1990
Pendirian PT Kaltim Industrial Estate.
Establishment of PT Kaltim Industrial Estate.

1991
Pembentukan KIE sebagai Pengelola Kawasan Industri.
Establishment of KIE as of Industrial Estate Company.

1991 - 1993
Pembangunan Gedung Perkantoran di Bontang, yang diberi nama Wisma KIE.
Construction of an office building in Bontang, to be known as Wisma KIE.

1992
Penetapan KIE sebagai Perusahaan Tetap Kawasan Industri dari Menteri Perindustrian RI No. 163/M/SK/IX/1992.
Establishment of KIE as a Permanent Industrial Estate Company by the Indonesian Minister of Industry, Decree No. 163/M/SK/IX/1992.

1994 - 2001
Pembangunan Perumahan Bukit Sekatup Damai (BSD) Bontang Tahap IV untuk perumahan karyawan PKT, Anper dan JVC.
Construction of the Bukit Sekatup Damai (BSD) Housing Development Bontang Stage IV for PKT, Anper and JVC employees.

1995 - 2003

1995
- **Pembentukan Perusahaan afiliasi PT Bintang Sintuk Hotel (BSH) yang bergerak di bidang perhotelan, dengan kepemilikan saham KIE sebesar 20%.**
- **Pembentukan perusahaan afiliasi PT Kaltim Daya Mandiri (KDM) yang bergerak di bidang Penyedia Utilitas dan Bahan Baku Industri, dengan kepemilikan saham KIE sebesar 20%.**
- Establishment of an affiliated company PT Bintang Sintuk Hotel (BSH) engaged in the hospitality sector, with KIE's share ownership of 20%.
- Establishment of an affiliated company PT Kaltim Daya Mandiri (KDM) which operates in the Industrial Utilities and Raw Material Providers, with KIE's share ownership of 20%.

1998
Restrukturisasi saham Perusahaan di PT Kaltim Daya Mandiri (KDM) yang bergerak di bidang Penyedia Utilitas dan Bahan Baku Industri. Kepemilikan saham KIE sebesar 20% menjadi 100%.
Restructuring of company shares at PT Kaltim Daya Mandiri (KDM), which operates in the provision of utilities and industrial raw materials. Ownership of KIE shares increased from 20% to 100%.

2001 - 2003
Pembangunan Perumahan Bukit Sekatup Damai (BSD) Bontang Tahap V untuk perumahan karyawan PKT, Anper dan JVC.
Construction of the Bukit Sekatup Damai (BSD) Housing Development Stage V for PKT, Anper and JVC employees.

2002 - 2003

2002
- **Pembentukan anak perusahaan PT Kaltim Jasa Sekuriti (KJS) yang bergerak di bidang penyedia jasa keamanan, dengan kepemilikan saham KIE sebesar 70%.**
- **Restrukturisasi saham perusahaan di PT Kaltim Daya Mandiri (KDM) yang bergerak di bidang Penyedia Utilitas dan Bahan Baku Industri. Kepemilikan saham KIE sebesar 100% menjadi 95%.**
- Establishment of a subsidiary company PT Kaltim Jasa Sekuriti (KJS) which operates in the Security Service Provider, with KIE's share ownership of 70%.
- Restructuring of company shares at PT Kaltim Daya Mandiri (KDM), which operates in the provision of utilities and industrial raw materials. Ownership of KIE shares decreased from 100% to 95%.

2003
- **Restrukturisasi saham Perusahaan di PT Kaltim Daya Mandiri (KDM) yang bergerak di bidang Penyedia Utilitas dan Bahan Baku Industri. Kepemilikan saham KIE sebesar 95% menjadi 80,75%.**
- **Pembentukan afiliasi PT Pukati Niaga Sejahtera (PNS) yang bergerak di bidang Perdagangan Ekspor Impor, dengan kepemilikan saham KIE sebesar 55%.**
- **Restrukturisasi saham Perusahaan di PT Pukati Niaga Sejahtera (PNS), yang bergerak di bidang Perdagangan Ekspor Impor. Kepemilikan saham KIE sebesar 55% menjadi 19%.**
- Restructuring of company shares in PT Kaltim Daya Mandiri (KDM), which operates in the provision of utilities and industrial raw materials. KIE's share ownership decreased from 95% to 80.75%.
- Establishment of an affiliate, PT Pukati Niaga Sejahtera (PNS), engaged in the import and export trade, with KIE holding 55% of the shares.
- Restructuring of company shares in PT Pukati Niaga Sejahtera (PNS), which operates in the import and export trade. KIE's share ownership decreased from 55% to 19%.



2003 - 2016

2003 - 2004
Pembangunan Perumahan Bukit Sekatup Damai (BSD) Bontang Tahap VI untuk perumahan karyawan PKT, Anper dan JVC.
Construction of the Bukit Sekatup Damai (BSD)
Housing Development Bontang Stage VI for PKT, Anper and JVC employees.

2004 - 2010
Pembangunan Perumahan Bukit Sekatup Damai (BSD) Bontang Tahap VII dan VIII untuk perumahan karyawan KIE, Anper dan JVC.
Construction of the Bukit Sekatup Damai (BSD)
Housing Development Bontang Stage VII and VIII for KIE, Anper and JVC employees.

2005 - 2007
Pembangunan Kantor Perwakilan KIE di Jakarta (Plaza Pupuk Kaltim).
Construction of KIE Representative Office in Jakarta (Plaza Pupuk Kaltim).

2010
- **Pembangunan Perumahan Griya Temputu Indah Bontang untuk perumahan karyawan KIE, Anper, dan JVP.**
- **Pembangunan Batching Plant KIE.**
- Construction of Griya Temputu Indah Bontang Housing for KIE, Anper and JVC employees.
- Construction of KIE's Batching Plant.

2016
Restrukturisasi saham Perusahaan di PT Kaltim Daya Mandiri (KDM) yang bergerak di bidang Penyedia Utilitas dan Bahan Baku Industri. Kepemilikan saham KIE sebesar 80,75% menjadi 29,75%.
Restructuring of company shares at PT Kaltim Daya Mandiri (KDM), which operates in the provision of utilities and industrial raw materials. Ownership of KIE shares decreased from 80.75% to 29.75%.

2018 - 2022

2018
Perusahaan melakukan pembelian saham di PT Kaltim Adhiguna Dermaga (KAD) yang bergerak di bidang Bongkar Muat Barang, dengan kepemilikan saham KIE sebesar 50,99%.
The company purchased shares in PT Kaltim Adhiguna Dermaga (KAD) which is engaged in loading and unloading of goods, with KIE's share ownership of 50.99%.

2019
Penyiapan Lahan dan Pembangunan Gudang Tursina Barat Bontang.
Land Preparation and Construction of West Tursina Bontang Warehouse.

2020
Restrukturisasi saham Perusahaan di PT Kaltim Daya Mandiri (KDM) yang bergerak di bidang Penyedia Utilitas dan Bahan Baku Industri. Kepemilikan saham KIE sebesar 29,75% menjadi 44%.
Restructuring of company shares in PT Kaltim Daya Mandiri (KDM), which operates in the provision of utilities and industrial raw materials. KIE's share ownership increased from 29.75% to 44%.

2022
- **Restrukturisasi saham Perusahaan di PT Pukati Niaga Sejahtera (PNS) yang bergerak di bidang Perdagangan Ekspor Impor, dengan kepemilikan saham KIE sebesar 19% menjadi 12%.**
- **Perusahaan melakukan pembelian saham di PT Kaltim Medika Utama (KMU) yang bergerak di bidang jasa Rumah Sakit sebesar 26,29%.**
- Restructuring of company shares in PT Pukati Niaga Sejahtera (PNS), which operates in the import and export trade, with KIE's share ownership decreasing from 19% to 12%.
- The Company also acquired a 26.29% stake in PT Kaltim Medika Utama (KMU), which operates in the hospital services sector.

2023 - 2025

2023
Proses Komersialisasi Lahan di Sei Siring Samarinda.
Samarinda Sei Siring land commercialization process.

2024
Penyiapan Lahan Industri untuk Pabrik Soda Ash PKT.
Preparation of Industrial Land for the PKT Soda Ash Plant.

2025
Pembangunan Infrastruktur Suplai CO2 PT Kaltim Methanol Industri.
Development of CO2 Supply Infrastructure for PT Kaltim Methanol Industri.



Visi, Misi dan Tata Nilai Perusahaan
Vision, Mission, and Corporate Governance

VISI | VISION

Menjadi perusahaan yang sehat dan stabil secara keuangan, melalui peningkatan efisiensi dengan mengoptimalkan sinergi bisnis, dan tumbuh secara berkelanjutan melalui perluasan pasar.

To become a financially sound and stable company, by increasing efficiency by optimizing business synergies, and growing sustainably through market expansion.

KIE mengimplementasikan visi Perusahaan dengan penjabaran sebagai berikut:
KIE implements the Company's vision with the following descriptions:

Penjelasan Visi | Vision Explanation

- **Yang dimaksud "perusahaan yang sehat dan stabil secara keuangan" adalah Perusahaan yang memiliki kondisi keuangan yang sehat, baik dari sisi likuiditas, solvabilitas, maupun profitabilitas. Perusahaan dapat bertahan dalam kondisi ekonomi apapun, yang terlihat dari kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban finansialnya dan melaksanakan operasinya dengan stabil serta dapat menjaga kontinuitas perkembangan usahanya dari waktu ke waktu.**
  The term "financially sound and stable company" refers to a company with a sound financial condition in terms of liquidity, solvency, and profitability. It signifies the Company's ability to remain resilient under any economic condition, demonstrated by its capacity to meet financial obligations, maintain stable operations, and ensure the continuity of its business growth over time.

- **Yang dimaksud "peningkatan efisiensi dengan mengoptimalkan sinergi bisnis" adalah pengembangan dan pengelolaan Kawasan Industri yang di dalamnya dikembangkan juga area bisnis dan atau kegiatan bisnis di luar kawasan industri. Perusahaan juga dapat menghasilkan produk-produk yang dapat memenuhi kebutuhan pelanggan/tenan/investor, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas.**
  The term "improving efficiency by optimizing business synergies" refers to the development and management of an industrial estate incorporating additional business areas or activities outside the core industrial zone. The Company is expected to produce goods and services that meet the needs of its customers/tenants/investors in terms of both quality and quantity.

- **Yang dimaksud "tumbuh secara berkelanjutan melalui perluasan pasar" adalah sebagai pelaku usaha yang bergerak pada sektor kawasan industri, laju pertumbuhan perusahaan sangat dipengaruhi dari pasar yang dilayani.**
  The term "growing sustainability through market expansion" refers to the Company's role as an industrial estate operator, where its growth is highly influenced by development of the markets it serves.

- **Perusahaan mengintegrasikan aspek keberlanjutan ke dalam strategi bisnis, dengan tujuan untuk menyeimbangkan antara kepentingan saat ini dan masa yang akan datang dengan fokus pada pengembangan ekspansi geografis. Perusahaan juga menyediakan fasilitas infrastruktur, fasilitas penunjang, sarana dan prasarana di Kawasan Industri KIE, diantaranya Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), Water Treatment Plant (WTP), jaringan listrik (utilitas), jalan kawasan, saluran drainase, ruang terbuka hijau, jasa pengamanan, perkantoran, perhotelan, dermaga, pergudangan, rumah sakit, sekolah, tempat ibadah, sarana olahraga, dan lain-lain.**
  The Company integrates sustainability aspects into its business strategy with the goal of balancing present and future interests, focusing particularly on geographic expansion. It also provides infrastructure and supporting facilities within the KIE Industrial Estate, including a Effluent Treatment Plant (IPAL), Water Treatment Plant (WTP), utility power networks, estate roads, drainage systems, green open spaces, security services, office buildings, hospitality facilities, docks, warehouses, hospitals, schools, places of worship, sports facilities, and more.

Penjelasan Misi | Mission Explanation

- **Mewujudkan kawasan industri modern yang inovatif berwawasan lingkungan.**
  Creating an innovative, environmentally friendly modern industrial estate.
- **Memanfaatkan secara optimal kompetensi dan jaringan bisnis yang ada dalam portofolio untuk kepuasan konsumen dan pengembangan bisnis.**
  Make optimal use of competencies and business networks in the portfolio for customer satisfaction and business development.
- **Mengutamakan nilai-nilai profesionalisme dalam pengelolaan bisnis.**
  Prioritizing professionalism values in business management.
- **Mengembangkan bisnis untuk peningkatan *corporate value* atas portofolio bisnis dengan tetap berprinsip pada *sustainable development*.**
  Developing a business to increase corporate value for the business portfolio while adhering to the principles of sustainable development.
- **Melakukan semua kegiatan operasi perusahaan yang berorientasi pada kaidah manajemen modern dan *operational excellence*.**
  Carry out all company operations that are oriented towards modern management principles and operational excellence.
- **Meningkatkan nilai tambah yang optimal serta berkelanjutan bagi *Shareholder & Stakeholder*.**
  Increase the optimal and sustainable added value for Shareholders & Stakeholders.



Perusahaan mengintegrasikan aspek keberlanjutan ke dalam strategi bisnis, dengan tujuan untuk menyeimbangkan antara kepentingan saat ini dan masa yang akan datang dengan fokus pada pengembangan ekspansi geografis. Perusahaan juga menyediakan fasilitas infrastruktur, fasilitas penunjang, sarana dan prasarana di Kawasan Industri KIE, diantaranya Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), Water Treatment Plant (WTP), jaringan listrik (utilitas), jalan kawasan, saluran drainase, ruang terbuka hijau, jasa pengamanan, perkantoran, perhotelan, dermaga, pergudangan, rumah sakit, sekolah, tempat ibadah, sarana olahraga, dan lain-lain.

BUDAYA DAN NILAI-NILAI PERUSAHAAN

KIE mengimplementasikan budaya dan nilai-nilai Perusahaan dengan penjabaran sebagai berikut:

1. Segenap jajaran manajemen dan karyawan KIE menjunjung nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, disiplin dan profesional.
2. Kepuasan pelanggan (*customer satisfaction*) merupakan orientasi utama KIE dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan di setiap bidang usaha, baik produk maupun jasa. Budaya perusahaan tersebut di dalamnya terkandung nilai-nilai Perusahaan yang menjadi kesadaran seluruh insan KIE dan menjadi pedoman perilaku agar mampu mencapai tujuan Perusahaan, yaitu:
   a. Unggul karena ketersediaan fasilitas dan *network* KIE selalu berusaha menyediakan fasilitas dan produk terbaik bagi seluruh pelanggan sehingga dapat menciptakan jaringan bisnis yang kuat dan dapat dipercaya.
   b. Kesatuan untuk bersama mencapai tujuan KIE percaya bahwa untuk maju dan berkembang haruslah memiliki rasa kebersamaan tim kerja untuk mencapai tujuan Perusahaan.
   c. Kuat menghadapi segala tantangan pantang menyerah dan selalu tangguh menghadapi persaingan global, menjadikan KIE sebagai salah satu perusahaan terkemuka di wilayah timur Indonesia.
   d. Berwawasan lingkungan dalam menjalankan aktivitas bisnis KIE senantiasa berkomitmen untuk melindungi dan menjaga lingkungan sekitar Perusahaan.

The Company integrates sustainability aspects into its business strategy with the goal of balancing present and future interests, focusing particularly on geographic expansion. It also provides infrastructure and supporting facilities within the KIE Industrial Estate, including a Effluent Treatment Plant (IPAL), Water Treatment Plant (WTP), utility power networks, estate roads, drainage systems, green open spaces, security services, office buildings, hospitality facilities, docks, warehouses, hospitals, schools, places of worship, sports facilities, and more.

CORPORATE CULTURE AND VALUES

KIE implements its corporate culture and values through the following principles:

1. All levels of management and employees at KIE uphold the core values of honesty, responsibility, discipline, and professionalism.
2. Customer satisfaction is a primary focus for KIE in delivering services across all business areas, both in products and services. The Corporate's culture embodies corporate values that are embraced by all members of KIE and serve as a behavioral guide to help achieve the Company's goals, including:
   a. Excellence through facilities and networks, KIE is committed to providing the best facilities and products for all customers, fostering a strong and trustworthy business network.
   b. Unity in achieving shared goals, KIE believes that progress and growth require teamwork and a strong sense of unity to reach the Company's objectives.
   c. Resilience in facing challenges with a never-give-up attitude and strength in facing global competition, KIE continues to establish itself as one of the leading companies in Eastern Indonesia.
   d. Environmental consciousness in conducting its business activities, KIE remains committed to protecting and preserving the environment surrounding the Company.

Kegiatan dan Bidang Usaha
Business Activities and Sector

KEGIATAN USAHA YANG DIJALANKAN PADA TAHUN BUKU SERTA JENIS BARANG DAN/ATAU JASA YANG DIHASILKAN

KIE merupakan perusahaan multilevel yang bergerak dalam penyediaan dan pengelolaan kawasan industri, dengan lima pilar bisnis utama meliputi Kawasan Industri, Properti, Trading, Beton, dan Konstruksi. Didukung pengalaman dan komitmen terhadap keunggulan operasional, KIE menghadirkan solusi bisnis yang komprehensif serta berkontribusi nyata dalam mendorong pertumbuhan industri dan pembangunan berkelanjutan.

BUSINESS ACTIVITIES CARRIED OUT IN THE FISCAL YEAR AND THE TYPES OF GOODS AND/OR SERVICES PRODUCED

KIE is a multi-level enterprise engaged in the development and management of industrial estates, supported by five core business pillars: Industrial Estate, Property, Trading, Concrete, and Construction. Supported by extensive experience and a commitment to operational excellence, KIE delivers comprehensive business solutions while making a meaningful contribution to industrial growth and sustainable development.

Kawasan Industri
Industrial Estate

KIE merupakan pemilik dan pengelola kawasan industri seluas 214,08 Ha yang berlokasi strategis serta didukung infrastruktur terpadu dan layanan utilitas yang andal. Dalam menjalankan operasionalnya, KIE menyediakan rangkaian produk dan layanan terintegrasi yang meliputi Jasa Perawatan Kawasan untuk memastikan kelancaran fungsi infrastruktur dan kenyamanan lingkungan industri, Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang dikelola sesuai standar dan regulasi lingkungan yang berlaku, Suplai Air Bersih melalui Water Treatment Plant (WTP) dengan jaminan kualitas dan kontinuitas distribusi, serta layanan SWRO dan pengelolaan Dokumen Lingkungan Tenant guna mendukung kebutuhan air industri dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Melalui pengelolaan profesional dan komitmen terhadap keberlanjutan, KIE menghadirkan solusi kawasan industri terpadu yang memberikan nilai tambah dan mendukung operasional tenant secara optimal.

KIE owns and manages a strategically located industrial estate covering a total area of 214.08 hectares, supported by integrated infrastructure and reliable utility services. In the conduct of its operations, KIE provides a comprehensive range of integrated products and services, including: Estate Maintenance Services, ensuring the proper functioning of infrastructure facilities and maintaining a conducive industrial environment; Effluent Treatment Plant (ETP) Services, operated in accordance with applicable environmental standards and regulatory requirements; Clean Water Supply through a Water Treatment Plant (WTP), ensuring water quality assurance and continuity of distribution; and SWRO Services and Tenant Environmental Document Management, supporting industrial water requirements and regulatory compliance obligations. Through professional management practices and a strong commitment to sustainability principles, KIE delivers an integrated industrial estate solution that creates added value and optimally supports tenant operations.

Properti
Property

KIE mengembangkan Pilar Properti yang menghadirkan portofolio properti di lokasi yang strategis untuk mendukung kawasan industri dan aktivitas bisnis di sekitarnya. Produk yang ditawarkan meliputi sewa ruang perkantoran dan sewa gudang dengan fasilitas representatif, jasa pergudangan, serta layanan sewa dan penjualan lahan untuk kebutuhan pengembangan usaha. Selain itu, Perusahaan mengelola SBU Perhotelan guna mendukung kebutuhan akomodasi di kawasan, serta menyediakan layanan sewa dan penjualan rumah yang dirancang untuk menciptakan lingkungan hunian yang nyaman dan bernilai investasi. Melalui Pilar Properti, Perusahaan berkomitmen menghadirkan portofolio aset yang produktif, berdaya saing, dan memberikan nilai tambah berkelanjutan bagi pelanggan dan pemangku kepentingan.

KIE develops its Property Pillar by offering a strategically located property portfolio designed to support the industrial estate and surrounding business activities. The products and services provided include office space leasing and warehouse leasing with representative facilities, warehousing services, as well as land leasing and land sales for business expansion purposes. In addition, the Company manages a Hospitality Strategic Business Unit (SBU) to support accommodation needs within the industrial area. KIE also provides residential leasing and property sales services designed to create a comfortable living environment with long-term investment value. Through its Property Pillar, the Company is committed to developing a productive and competitive asset portfolio that delivers sustainable added value to customers and stakeholders.

Trading
Trading

KIE mengembangkan Pilar Trading sebagai lini usaha yang berfokus pada kegiatan perdagangan bahan material konstruksi, bahan baku, serta bahan penolong pupuk guna mendukung kebutuhan industri dan operasional pelanggan. Selain aktivitas perdagangan, Pilar ini juga menyediakan layanan Operation & Maintenance (O&M) yang dikelola secara profesional untuk memastikan keandalan fasilitas dan keberlangsungan operasional pelanggan.

KIE develops its Trading Pillar as a business line focused on the trading of construction materials, raw materials, and supporting materials for fertilizer production to support industrial and customer operational requirements. In addition to trading activities, this Pillar provides professionally managed Operation & Maintenance (O&M) services to ensure facility reliability and the continuity of customer operations.

Beton
Concrete

KIE mengembangkan Pilar Beton melalui penyediaan produk Ready Mix Concrete yang diproduksi dengan standar mutu tinggi untuk memenuhi kebutuhan konstruksi di dalam maupun di luar kawasan industri. Didukung oleh fasilitas *batching plant* yang andal serta sistem kontrol kualitas yang ketat, KIE mampu menyediakan berbagai spesifikasi beton sesuai kebutuhan proyek, mulai dari konstruksi infrastruktur, bangunan industri, hingga proyek komersial. Dengan jaminan ketepatan waktu pengiriman, konsistensi mutu, dan layanan teknis yang responsif, Pilar Beton menjadi bagian dari komitmen Perusahaan dalam menghadirkan solusi material konstruksi yang berdaya saing.

KIE develops its Concrete Pillar through the provision of Ready Mix Concrete products manufactured in accordance with high-quality standards to meet construction needs both within and outside the industrial estate. Supported by reliable batching plant facilities and stringent quality control systems, KIE is capable of delivering a wide range of concrete specifications tailored to project requirements, including infrastructure construction, industrial buildings, and commercial projects. With assurance of timely delivery, consistent product quality, and responsive technical services, the Concrete Pillar forms an integral part of the Company's commitme

Konstruksi
Construction

KIE mengembangkan Pilar Konstruksi yang menyediakan jasa konstruksi untuk berbagai proyek komersil, seperti pembuatan dan pelaksanaan rancang bangun baik sipil, mechanical dan elektrikal. Pengalaman pekerjaan ini antara lain pembangunan gudang, pembangunan infrastruktur Pemerintah, penyiapan lahan industri dan pekerjaan sipil lainnya.

KIE develops its Construction Pillar by providing comprehensive construction services for a wide range of commercial projects, including engineering design and build services covering civil, mechanical, and electrical works. The Company's project experience includes warehouse construction, development of government infrastructure projects, industrial land preparation, and various other civil works.



Wilayah Operasional
Operational Area



Kantor Pusat | Head Office
Wisma KIE Lt. 3,
Jl. Ammonia Kav. 79, Komplek Kawasan Industri KIE,
Bontang Kalimantan Timur 75314
Telepon (+62 548) 41368

Kantor Perwakilan Jakarta | Jakarta Representative Office
Jl. Kebon Sirih Raya No. 6A Jakarta Pusat 10110 Indonesia.

Persebaran Jasa Pergudangan
- Gudang Wajo, Sulawesi Selatan
- Gudang Pangkep, Sulawesi Selatan
- Gudang Pontianak, Kalimantan Barat
- Gudang Malinau, Kalimantan Utara
- Gudang Sakra, Lombok Timur

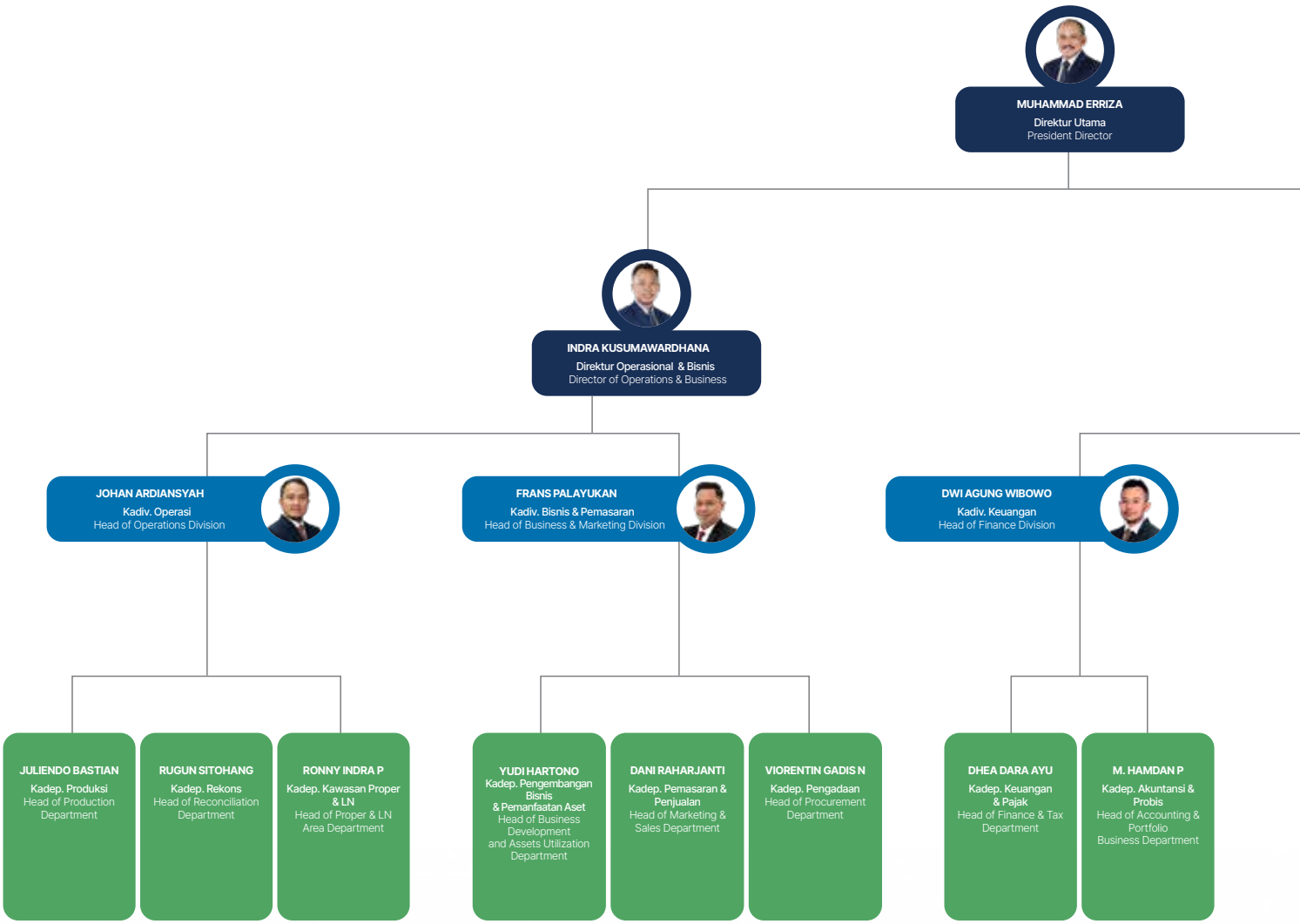
Aset Komersial
- Maros, Sulawesi Selatan
- Bontang, Kalimantan Timur
- Samarinda, Kalimantan Timur
- Purwakarta, Jawa Barat
- Jakarta, DKI Jakarta
- Cikarang, Jawa Barat
- Purwakarta, Jawa Barat
- Sangatta, Kutai Timur, Kalimantan Timur

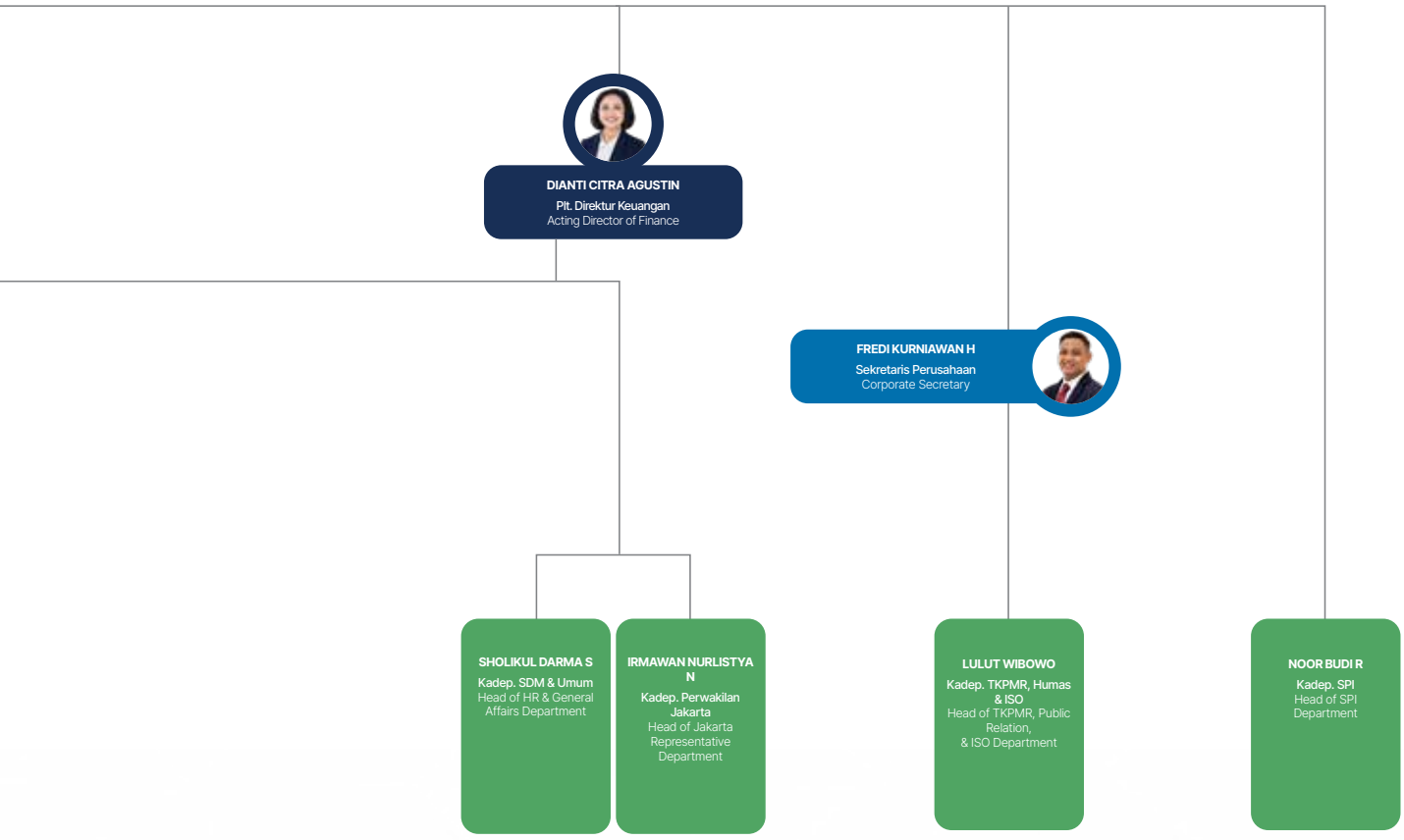
Warehouse Services Distribution
- Wajo Warehouse, South Sulawesi
- Pangkep Warehouse, South Sulawesi Selatan
- Pontianak Warehouse, West Kalimantan
- Malinau Warehouse, North Kalimantan Utara
- Sakra Warehouse, East Lombok

Commercial Assets
- Maros, South Sulawesi
- Bontang, East Kalimantan
- Samarinda, East Kalimantan
- Purwakarta, West Java
- Jakarta, DKI Jakarta
- Cikarang, West Java
- Purwakarta, West Java
- Sangatta, East Kutai, East Kalimantan



Struktur Organisasi
Structure of Organization




DIANTI CITRA AGUSTIN
Plt. Direktur Keuangan
Acting Director of Finance
FREDI KURNIAWAN H
Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary
SHOLIKUL DARMA S
Kadep. SDM & Umum
Head of HR & General Affairs Department
IRMAWAN NURLISTYAN
Kadep. Perwakilan Jakarta
Head of Jakarta Representative Department
LULUT WIBOWO
Kadep. TKPMR, Humas & ISO
Head of TKPMR, Public Relation, & ISO Department
NOOR BUDI R
Kadep. SPI
Head of SPI Department

Profil Komisaris
Board of Commissioners Profile



Turkhamim

Komisaris
Commissioner

Periode Jabatan Term of Office	2024 - 2027 2024 - 2027
Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Menjabat sebagai Komisaris KIE berdasarkan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham 13 Mei 2024. Appointed as Commissioner of KIE based on the Shareholders' Circular Resolution dated May 13, 2024.
Usia Age	51 Tahun 51 years old
Kewarganegaraan Nationality	Indonesia Indonesia
Domisili Domicile	Bontang Bontang
Riwayat Pendidikan Educational Background	Sarjana (S1) Akuntansi dari Universitas Brawijaya (1998). Bachelor's Degree in Accounting, University of Brawijaya (1998).
Riwayat Jabatan Career Experience	• Komisaris PT Kaltim Industrial Estate periode (2024-sekarang). • SPM Financial Mgmt. & Bisnis Opt PT Pupuk Kalimantan Timur periode (2023-sekarang). • Project Financing Administrasi Keuangan periode (2020). • Commissioner, PT Kaltim Industrial Estate (2024-Present). • SPM Financial Management & Business Opt, PT Pupuk Kalimantan Timur (2023-Present). • Project Financing & Finance Administration (2020).
Rangkap Jabatan Concurrent Position	Pada saat menduduki jabatan sebagai Komisaris, juga menjabat sebagai SPM Financial Management & Business Opt PT Pupuk Kalimantan Timur periode (2023-sekarang). While serving as Commissioner, he serves as SPM Financial Management & Business Optimization at PT Pupuk Kalimantan Timur for the period of (2023-Present).
Pendidikan dan Pelatihan Education and Training	Disajikan terpisah yaitu diuraikan pada Bab GCG sub bab Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini. Presented separately and elaborated in the GCG Chapter, sub-section on the Board of Commissioners, in this Annual Report.
Hubungan Afiliasi Affiliation	Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pemegang saham utama dan/atau pengendali lainnya. He has no affiliation with any members of the Board of Commissioners, the Board of Directors, or the major shareholders and/or other controlling entities.

Profil Direksi
Board of Directors Profile

Muhammad Erriza

Direktur Utama
President Director



Periode Jabatan Term of Office	2024 - 2027 2024-2027
Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Menjabat sebagai Direktur Utama KIE berdasarkan RUPSLB 05 Januari 2024. Appointed as President Director of KIE based on the resolution of the EGMS January 05, 2024.
Usia Age	56 tahun 56 years old
Kewarganegaraan Nationality	Indonesia Indonesia
Domisili Domicile	Bontang Bontang
Riwayat Pendidikan Educational Background	Sarjana (S1) Teknik Kimia dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran (1996). Bachelor's Degree in Chemical Engineering, University of Pembangunan Nasional Veteran (1996).
Riwayat Jabatan Career Experience	• Direktur Utama PT Kaltim Industrial Estate periode (2024-sekarang). • SPV SBU Jasa Pelayanan Pabrik periode (2021-2023). • Direktur Operasional & Bisnis PT Kaltim Industrial Estate periode (2016-2020). • President Director, PT Kaltim Industrial Estate (2024-Present). • SVP of Plant Services SBU (2021-2023). • Director of Operations & Business, PT Kaltim Industrial Estate (2016-2020).
Rangkap Jabatan Concurrent Position	Pada saat menduduki jabatan sebagai Direktur Utama, tidak merangkap jabatan di Perusahaan manapun. While serving as President Director, he does not hold concurrent positions in any other company.
Pendidikan dan Pelatihan Education and Training	Disajikan terpisah yaitu diuraikan pada Bab GCG sub bab Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini. Presented separately and elaborated in the GCG Chapter, sub-section on the Board of Commissioners, in this Annual Report.
Hubungan Afiliasi Affiliation	Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pemegang saham utama dan/atau pengendali lainnya. He has no affiliation with any members of the Board of Commissioners, the Board of Directors, or the major shareholders and/or other controlling entities.



Indra Kusumawardhana

Direktur Operasional & Bisnis
Director of Operations & Business

Periode Jabatan Term of Office	2024 - 2027 2024 - 2027
Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Menjabat sebagai Direktur Operasional dan Bisnis KIE berdasarkan RUPSLB 18 Maret 2024. Appointed as Director of Operations & Business of KIE based on the resolution of the EGMS March 18, 2024.
Usia Age	40 tahun 40 years old
Kewarganegaraan Nationality	Indonesia Indonesia
Domisili Domicile	Bontang Bontang
Riwayat Pendidikan Educational Background	• Sarjana (S1) Arsitektur dari Universitas Islam Indonesia (2008). • Magister (S2) Manajemen dari Universitas Bina Nusantara (2022). • Bachelor's Degree in Architecture, University of Islam Indonesia (2008). • Master's Degree in Management, University of Bina Nusantara (2022).
Riwayat Jabatan Career Experience	• Direktur Operasional dan Bisnis PT Kaltim Industrial Estate periode (2024-sekarang). • VP Strategic Delivery Unit periode (2022-2024). • PM Adm & Project Control Pengembangan Infrastruktur PT Pupuk Kalimantan Timur periode (2022). • Director of Operations and Business, PT Kaltim Industrial Estate (2024-Present). • VP Strategic Delivery Unit (2022-2024). • PM Administration & Project Control Infrastructure Development, PT Pupuk Kalimantan Timur (2022).
Rangkap Jabatan Concurrent Position	Pada saat menduduki jabatan sebagai Direktur Operasional dan Bisnis, tidak merangkap jabatan di Perusahaan manapun. While serving as Director of Operations and Business, he does not hold concurrent positions in any other company.
Pendidikan dan Pelatihan Education and Training	Disajikan terpisah yaitu diuraikan pada Bab GCG sub bab Direksi dalam Laporan Tahunan ini. Presented separately and elaborated in the GCG Chapter, sub-section on the Board of Directors, in this Annual Report.
Hubungan Afiliasi Affiliation	Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pemegang saham utama dan/atau pengendali lainnya. He has no affiliation with any members of the Board of Commissioners, the Board of Directors, or the major shareholders and/or other controlling entities.

Dianti Citra Agustin

Plt. Direktur Keuangan
Acting Director of Finance



Periode Jabatan Term of Office	2022 - 2025 2022 - 2025
Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Menjabat sebagai Direktur Keuangan KIE berdasarkan RUPSLB 15 Agustus 2022. Appointed as Director of Finance of KIE based on the resolution of the EGMS August 15, 2022.
Usia Age	43 tahun 43 years old
Kewarganegaraan Nationality	Indonesia Indonesia
Domisili Domicile	Bontang Bontang
Riwayat Pendidikan Educational Background	• Sarjana (S1) Akuntansi dari Universitas Airlangga (2005). • Magister (S2) Manajemen dari Universitas Gadjah Mada (2015). • Bachelor's Degree in Accounting, University of Airlangga (2005). • Master's Degree in Management, University of Gadjah Mada (2015).
Riwayat Jabatan Career Experience	• Direktur Keuangan PT Kaltim Industrial Estate periode (2022-sekarang). • VP Keuangan PT Pupuk Kalimantan Timur periode (2018-2022). • Director of Finance, PT Kaltim Industrial Estate (2022-Present). • VP of Finance, PT Pupuk Kalimantan Timur (2018-2022).
Rangkap Jabatan Concurrent Position	Pada saat menduduki jabatan sebagai Direktur Keuangan, tidak merangkap jabatan di Perusahaan manapun. While serving as Director of Finance, she does not hold concurrent positions in any other company.
Pendidikan dan Pelatihan Education and Training	Disajikan terpisah yaitu diuraikan pada Bab GCG sub bab Direksi dalam Laporan Tahunan ini. Presented separately and elaborated in the GCG Chapter, sub-section on the Board of Directors, in this Annual Report.
Hubungan Afiliasi Affiliation	Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pemegang Saham utama dan/atau Pengendali lainnya. She has no affiliation with any members of the Board of Commissioners, the Board of Directors, or the major Shareholders and/or other Controlling Entities.

Profil Dewan Komisaris dan Direksi
Board Of Commissioners' and Board of Directors Profile

1. **Indra Kusumawardhana**
   Direktur Operasional & Bisnis
   Director of Operations & Business

2. **Turkhamim**
   Komisaris
   Commissioner





3. Muhammad Erriza
Direktur Utama
President Director

4. Dianti Citra Agustin
Plt. Direktur Keuangan
Acting Director of Finance

Profil Pejabat Executive
Executive Profile



FREDI KURNIAWAN HASTARI
Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary

Usia
44 tahun

Pendidikan
Sarjana (S1) Teknik Mesin dari Universitas Muhammadiyah Surakarta (2006).

Dasar hukum Pengangkatan
SK. No. 05/SKK/DIR/VII-2024.

Age
44 years old

Educational Background
Bachelor's degree in Mechanical Engineering, University of Muhammadiyah Surakarta (2006).

Assignment Basis
SK. No. 05/SKK/DIR/VII-2024.



NOOR BUDI RACMADDANSYAH
Kepala Departemen Satuan Pengawasan Internal
Manager of Internal Audit Unit

Usia
46 tahun

Pendidikan
Sarjana (S1) Akuntansi dari Universitas Mulawarman (2005).

Dasar hukum Pengangkatan
SK No. 07/SKK/DIR/IV-2023.

Age
46 years old

Educational Background
Bachelor's degree in Accounting, University of Mulawarman (2005).

Assignment Basis
SK No. 07/SKK/DIR/IV-2023.



JOHAN ARDIANSYAH
Kepala Divisi Operasi
Head of Operations Division

Usia
44 tahun

Pendidikan
Sarjana (S1) Teknik Elektro dari Universitas Gadjah Mada (2006).

Dasar hukum Pengangkatan
SK No. 09/SKK/DIR/X-2024.

Age
44 years old

Educational Background
Bachelor's degree in Electrical Engineering, University of Gadjah Mada (2006).

Assignment Basis
SK No. 09/SKK/DIR/X-2024.



FRANS PALAYUKAN
Kepala Divisi Bisnis & Pemasaran
Head of Business & Marketing Division

Usia
42 tahun

Pendidikan
Sarjana (S1) Teknik Mesin dari Universitas Gadjah Mada (2007).

Dasar hukum Pengangkatan
SK No. 09/SKK/DIR/X-2024.

Age
42 years old

Educational Background
Bachelor's degree in Mechanical Engineering, University of Gadjah Mada (2007).

Assignment Basis
SK No. 09/SKK/DIR/X-2024.



DWI AGUNG WIBOWO
Kepala Divisi Keuangan
Head of Finance Division

Usia
43 tahun

Pendidikan
Sarjana (S1) Akuntansi dari Universitas Diponegoro (2007).

Dasar hukum Pengangkatan
SK No. 134/SKK/XI-2023.

Age
43 years old

Educational Background
Bachelor's degree in Accounting, University of Diponegoro (2007).

Assignment Basis
SK No. 134/SKK/XI-2023.

Sumber Daya Manusia
Human Resources

KIE memandang Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai aset penting dalam mendukung keberlanjutan usaha dengan senantiasa mengedepankan pendekatan *human capital* dalam setiap pengambilan keputusan. SDM diposisikan sebagai mitra strategis yang dikelola dan dikembangkan secara konsisten guna mendorong pertumbuhan Perusahaan yang berkelanjutan.

KIE meyakini bahwa keberlangsungan dan kesuksesan sebuah perusahaan akan selalu didukung oleh kontribusi karyawan. Oleh karena itu, KIE secara konsisten memfasilitasi pengembangan diri karyawan guna menjaga dan meningkatkan keandalan SDM. Pengelolaan karyawan dilakukan berdasarkan target kinerja, pencapaian standar kompetensi, serta pengembangan nilai tambah bagi organisasi. Insan KIE yang unggul, termotivasi dan profesional menjadi pendorong dalam pencapaian target Perusahaan, serta pembuka peluang usaha dan area bisnis baru yang diharapkan.

KIE recognizes Human Resources ("HR") as a critical asset in supporting long-term business sustainability and consistently applies a human resource–based approach in its decision-making processes. The Company positions its human resources as a strategic partner, managed and developed systematically to drive sustainable corporate growth.

KIE firmly believes that the continuity and success of the Company are inherently supported by the active contribution and engagement of its employees. Accordingly, the KIE consistently facilitates employee development initiatives aimed at maintaining and enhancing workforce capability and reliability. Employee management is conducted based on clearly defined performance targets, achievement of competency standards, and the creation of added value for the organization. High-performing, motivated, and professional KIE personnel serve as key drivers in achieving corporate targets, while also enabling the exploration of new business opportunities and strategic growth areas.

Profil Sumber Daya Manusia
Human Resources Profile

KIE merupakan anak perusahaan PT Pupuk Kalimantan Timur yang bergerak di beberapa bidang yaitu kawasan industri, rekayasa & konstruksi, properti, beton dan trading. Dalam menjalankan usahanya, KIE dipimpin oleh individu yang kompeten dan berpengalaman sesuai bidangnya. KIE menyadari bahwa karyawan merupakan aset Perusahaan yang sangat vital, baik sebagai modal utama maupun sebagai penggerak sistem operasional dalam mendukung keberlangsungan usaha. Oleh karena itu, KIE memberikan perhatian serius terhadap aspek-aspek pengelolaan SDM, antara lain melalui peningkatan kompetensi yaitu pelatihan dan *sharing knowledge*, penilaian kinerja berbasis kompetensi, serta penerapan sistem remunerasi yang terstruktur.

Sampai dengan 31 Desember 2025, jumlah sumber daya manusia Perusahaan tercatat sebanyak 66 orang, meningkat 8% dibandingkan tahun 2024 yang berjumlah 61 orang. Peningkatan ini disebabkan oleh penyesuaian jumlah tenaga kerja seiring dengan kebutuhan dan perkembangan kegiatan operasional Perusahaan.

KIE is a subsidiary of PT Pupuk Kalimantan Timur, operates across multiple business sectors, including industrial estate management, engineering & construction, property, concrete, and trading. In conducting its business activities, KIE is led by competent and experienced professionals with expertise aligned to their respective fields. KIE recognizes that employees constitute a vital corporate asset, serving as primary capital and as the driving force of its operational systems in supporting business continuity. Accordingly, KIE places strong emphasis on human resource management practices, including competency enhancement through structured training programs and knowledge-sharing initiatives, competency-based performance evaluations, and the implementation of a structured remuneration system.

As of December 31, 2025, the Company employed a total of 66 personnel, representing an increase of 8.2% compared to 2024 with 61 personnel. This increase reflects adjustments in workforce capacity in line with the Company's operational requirements and business expansion initiatives.

Status Kepegawaian Employment Status	2025	2024	2023
Karyawan Organik Direct Hire Employees			
Karyawan Tetap Permanent Employees	66	61	56
Sub Total Sub Total	66	61	56
Karyawan Non Organik Non-Direct Hire Employees			
Penyedia Jasa Tenaga Kerja Manpower Service Provider	135	148	117
Sub Total Sub Total	135	148	117
Jumlah **Total**	**201**	**209**	**173**

DEMOGRAFI KARYAWAN BERDASARKAN LEVEL ORGANISASI
EMPLOYEE DEMOGRAPHICS BY ORGANIZATION LEVEL

Jabatan Struktural Structural Position	Grade Grade	2025		2023		2022	
		Laki-Laki Male	Perempuan Female	Laki-Laki Male	Perempuan Female	Laki-Laki Male	Perempuan Female
Kepala Divisi Head of Division	I A	4	-	4	-	3	-
Staf Utama Senior Staff	I B	2	-	1	-	1	-
Manager, Staf Madya I Manager, Intermediate Staff I	II A	6	2	6	2	7	2
Staf Madya II Intermediate Staff II	II B	1	-	-	-	1	-
Kabag, Staf Muda Head of Department, Junior Staff	III	7	4	9	4	7	2
Staf Pratama Associate Staff	IV	23	4	16	1	5	3
Pelaksana Operator	V	13	-	18	-	25	-
Sub Total Sub Total		56	10	54	7	49	7
Jumlah **Total**			**66**		**61**		**56**

DEMOGRAFI KARYAWAN BERDASARKAN JENIS KELAMIN
EMPLOYEE DEMOGRAPHICS BY GENDER

Jenis Kelamin Gender	2025	2024	2023
Laki-laki Male	56	54	49
Perempuan Female	10	7	7
Jumlah **Total**	**66**	**61**	**56**

DEMOGRAFI KARYAWAN BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN
EMPLOYEE DEMOGRAPHICS BY EDUCATION LEVEL

Tingkat Pendidikan Level of Education	2025	2024	2023
Pasca Sarjana Postgraduate Degree	-	-	-
Sarjana (S1) Bachelor's Degree	32	27	22
Sarjana Muda (D1-D4) Diploma	5	4	4
SMA Senior High School	29	30	30
SMP Junior High School	-	-	-
SD Elementary School	-	-	-
Jumlah **Total**	**66**	**61**	**56**

DEMOGRAFI KARYAWAN BERDASARKAN KELOMPOK USIA
EMPLOYEE DEMOGRAPHICS BY AGE GROUP

Kelompok Usia Age Group	2025	2024	2023
17 - 30	10	5	-
31 - 40	28	28	32
41 - 50	22	24	22
51 - 56	6	4	2
Jumlah **Total**	**66**	**61**	**56**

Perencanaan dan Sistem Rekrutmen Sumber Daya Manusia
Human Resource Planning and Recruitment System

KIE menganggap pengelolaan sumber daya manusia sebagai aspek krusial dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional Perusahaan. Sebagai penggerak utama perusahaan, karyawan perlu dikelola dengan optimal agar dapat memberikan kontribusi terbaik. Perencanaan tenaga kerja diawali dengan menganalisis kebutuhan jumlah serta kompetensi yang diperlukan. Selanjutnya, Perusahaan melaksanakan proses perekrutan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan tersebut. Dalam menjalankan proses rekrutmen dan seleksi, KIE senantiasa mematuhi regulasi yang berlaku untuk memastikan transparansi dan profesionalisme.

KIE considers human resource management a critical component in enhancing operational effectiveness and efficiency. As the primary drivers of the Company's business activities, employees are managed strategically to ensure optimal contribution and performance. Workforce planning begins with a comprehensive assessment of manpower requirements, including the number of personnel and the competencies required to support operational and business objectives. Based on this assessment, the Company conducts recruitment processes aligned with identified needs. In implementing recruitment and selection procedures, KIE strictly adheres to prevailing laws and regulations to ensure transparency, fairness, and professionalism.

Sistem Pengembangan Karir
Career Development System

Manajemen karir merupakan proses pengenalan diri, eksplorasi, dan pengambilan keputusan yang berperan dalam membentuk serta mengembangkan karir individu secara berkelanjutan. Di KIE, pengelolaan dan pengembangan karir dilaksanakan dengan menyelaraskan aspirasi karyawan dengan arah pertumbuhan Perusahaan, serta berfokus pada peningkatan kompetensi.

Pengembangan karir dilakukan melalui berbagai program, antara lain pelatihan di tempat kerja (*on-the-job training*), mutasi, rotasi jabatan, pendampingan (*coaching*), serta promosi jabatan sesuai kebutuhan dan kinerja.

Career management is a continuous process involving self-assessment, career exploration, and decision-making that shapes and advances individual professional growth. At KIE, career development and management are carried out by aligning employees' aspirations with the Company's growth strategy, with a strong emphasis on competency enhancement.

Career development initiatives are implemented through various structured programs, including on-the-job training, job transfers, job rotations, coaching and mentoring, as well as promotions based on organizational needs and performance.

Sistem Manajemen Kinerja, Remunerasi, dan Merit Sistem
Performance Management, Remuneration, and Merit System

KIE menerapkan sistem manajemen kinerja berbasis kompetensi yang mencakup evaluasi KPI individu serta penilaian *soft competency* karyawan. Penilaian kinerja dilakukan berdasarkan pencapaian target yang telah ditetapkan bagi masing-masing karyawan dan menjadi dasar dalam penerapan sistem merit.

Sistem merit tersebut digunakan sebagai acuan dalam penyesuaian upah karyawan, sehingga sistem remunerasi dapat mencerminkan pencapaian kinerja secara objektif dan adil.

KIE implements a competency-based performance management system that includes the evaluation of individual KPIs as well as assessments of employees' soft competencies. Performance evaluations are conducted based on the achievement of predefined targets for each employee and serve as the foundation for the implementation of the merit system.

The merit system functions as a reference framework for salary adjustments and remuneration decisions, ensuring that the Company's compensation structure is objective and fair.

Program Pengembangan Kompetensi Karyawan dan Sertifikasi
Employee Competency Development and Certification Programs

KIE mengembangakan kompeteni karyawan melalui program pelatihan dan sertifikasi yang selaras dengan perubahan strategi bisnis Perusahaan, khususnya dalam meningkatkan penguasaan keterampilan teknis serta perolehan sertifikasi yang dibutuhkan untuk mendukung operasional.

KIE continuously enhances employee competencies through structured training and professional certification programs aligned with the Company's evolving business strategies. These initiatives are designed to strengthen technical expertise and facilitate the attainment of required certifications to effectively support operational activities.

Selain itu, penguatan kompetensi inti dan kemampuan manajerial juga menjadi aspek *fundamental* yang harus dimiliki karyawan pada setiap jenjang jabatan guna mendukung kinerja organisasi secara keseluruhan.

In addition to technical capability development, the strengthening of core competencies and managerial capabilities constitutes a fundamental requirement at every level of position within the organization.

PELATIHAN UNTUK MASING-MASING GRADE
TRAINING PARTICIPANT IN EACH GRADE

Pekerja Employees	2025	2024	2023
I A	3	6	3
I B	6	-	-
II A	20	14	23
II B	3	-	-
III	17	20	39
IV	140	35	65
V	25	29	89
Jumlah **Total**	**214**	**104**	**219**

Realisasi Pelatihan Karyawan di Tahun 2025
Employee Training Realization in 2025

Realisasi anggaran untuk pengembangan kompetensi karyawan untuk tahun 2025 sebesar Rp575 juta. Perusahaan melakukan peninjauan dan prioritas program pengembangan kompetensi untuk memastikan setiap kegiatan memberikan dampak yang lebih terukur terhadap kebutuhan organisasi.

The realization of the budget for employee competency development in 2025 amounted Rp575 million. The Company reviewed and prioritized competency development to ensure every activity provides measurable impact to the organization needs.

Realisasi Pengembangan Kompetensi Karyawan
Employee Competency Development Realization in 2025

Judul Pelatihan Training Title	Unit Kerja Work Unit
Monitoring & Control Keberjalanan Proyek File Baseline Ms Project Monitoring & Control Of Project Progress Using Ms Project Baseline File	Rekons
CHRP (Certified Human Resources Professional)	SDM HR
Pelatihan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Domestic Component Level (TKDN) Training	All Dept.
Project Manager	Bisnis dan Pemasaran Business and Marketing
Project Manager	Rekons
Perpanjangan Sertifikat OLB3 BNSP Renewal of OLB3 BNSP Certificate	K3LH

Judul Pelatihan Training Title	**Unit Kerja** Work Unit
Pelatihan & Sertifikasi Online PLB3 (Level Manager) Online PLB3 Training & Certification (Managerial Level)	K3LH
Pelatihan Microsoft Excel Microsoft Excel Training	All Dept.
Pelatihan Gada Utama Mabes Polri & Assessment BNSP Gada Utama National Police Training & BNSP Assessment	SDM HR
Pelatihan Gada Utama Mabes Polri & Assessment BNSP Gada Utama National Police Training & BNSP Assessment	K3 OHS
Basic Human Resources for Professional	SDM HR
Certified Practitioner of Internal Audit (CPIA)	SPI Internal Audit Unit
Pelatihan Audit SMP SMP Audit Training	Pengamanan Security
Pelatihan Audit SMP SMP Audit Training	SPI Internal Audit Unit
Ahli K3 Lingkungan kerja OHS Expert Work Environment	K3 OHS
Building Web Application with Laravel	IT
Gada Pratama	Pengamanan Security
Purchasing Management	Pengadaan Procurement
AI-Powered Business Intelligence	Bisnis Business
Gada Madya	Pengamanan Security
Business Acumen for Everyone	Akuntansi Accounting
Business Acumen for Everyone	Bisnis Business
Business Acumen for Everyone	Keuangan Finance
Sertifikasi Damkar A Firefighter Certification Level A	K3 OHS
Financial Modeling for Feasibility Study	Bisnis Business
Supply Chain Management	Pengadaan Procurement
Computer Hacking Forensic Investigator (CHFI) + Exam - ecourseware	IT
Advanced Human Capital Accomplished (AHCA)	SDM & Umum HR & General Affairs
Pelatihan Teknis OSS OSS Technical Training	Sekper Corporate Secretary
Pelatihan AK3 Umum General OHS Expert Training	SDM & Umum HR & General Affair
Training of Trainers Level 3 Sertifikasi BNSP	K3 OHS
Negotiation Skill for Sales	Pemasaran Marketing
Sertifikasi Operator K3 BNSP BNSP OHS Operator Certification	Produksi Production

Judul Pelatihan Training Title	Unit Kerja Work Unit
Problem Solving & Decision Making (Prosdem)	Pemasaran Marketing
Accounting Decision Making	Keuangan Finance
Perpanjangan Sertifikasi Coating Level 1 Renewal of Coating Certification Level 1	Rekons
AK3 Umum General OHS Expert	KPJ
Sertifikasi Profesi Kode Etik (Arsitek) Professional Certification Code of Conduct (Architect)	Pemasaran Marketing
IHT Digital Transformation	All Dept.
Sertifikasi Kemnaker AK3 Umum Ministry of Manpower General OHS Expert Certification	SDM & Umum HR & General Affairs
Mini BHRP	SDM HR
PKA (Syarat Pengajuan STR Arsitek) PKA (Requirement for Architect STR Application)	Pemasaran Marketing
UPDATE PPh DTP PMK-10/25 & PMK-72/25 Update on Income Tax DTP Regulation PMK-10/25 & PMK-72/25	Keuangan Marketing

Rencana Pengembangan Kompetensi Karyawan 2026
Employee Competency Development Plan in 2026

Pada tahun 2026, Perusahaan memfokuskan pengembangan Sumber Daya Manusia pada penguatan kompetensi, penyempurnaan sistem kinerja, percepatan digitalisasi, serta penguatan manajemen talenta guna mendukung peningkatan kualitas layanan kawasan industri dan keberlanjutan bisnis.

In 2026, KIE will focus its Human Resources development strategy on strengthening competencies, refining the performance management system, accelerating digitalization initiatives, and enhancing talent management practices to support improved service quality within the industrial estate and long-term business sustainability.

Pertama, Perusahaan akan melakukan pemutakhiran peta kompetensi jabatan serta melaksanakan program pelatihan dan sertifikasi berbasis kebutuhan organisasi. Langkah ini bertujuan memastikan terpenuhinya standar kompetensi yang relevan dengan tuntutan operasional dan pengembangan usaha.

First, the Company will update its job competency mapping framework and implement training and certification programs aligned with organizational needs. This initiative is intended to ensure that competency standards remain relevant to operational requirements and business expansion objectives.

Kedua, sistem manajemen kinerja akan terus dimatangkan melalui penyelarasan KPI individu dan unit kerja dengan sasaran strategis perusahaan. Evaluasi kinerja dimanfaatkan secara objektif sebagai dasar pembinaan, pengembangan, dan pengambilan keputusan SDM, guna memperkuat budaya kerja yang berorientasi hasil.

Second, the performance management system will be further refined through KPI alignment of individual and work units with the Company strategic goals. Performance evaluation will be utilized objectively as a basis for mentoring, development, and HR decision-making, to strengthen the result-oriented corporate culture.

Ketiga, Perusahaan mempercepat integrasi dan digitalisasi pengelolaan SDM melalui penguatan sistem HRIS yang terpusat dan berbasis data. Inisiatif ini meningkatkan efisiensi

Third, the Company will accelerate the integration and digitalization of HR management through the enhancement of a centralized, data-driven HRIS. This initiative is expected

proses, akurasi informasi, serta mendukung pengambilan keputusan manajerial yang lebih tepat.

Keempat, pengembangan manajemen talenta dan perencanaan suksesi akan diperkuat melalui penyusunan *talent pool* serta program pengembangan kepemimpinan secara bertahap. Langkah ini memastikan kesinambungan kepemimpinan dan kesiapan organisasi dalam menghadapi dinamika bisnis ke depan.

Melalui rencana ini, Perusahaan optimis dapat membangun SDM yang profesional, adaptif, dan berdaya saing, sekaligus memperkuat peran KIE sebagai pengelola kawasan industri yang andal dan berkelanjutan. Dalam rangka mencapai target yang tercantum dalam *strategic plan* Perusahaan, Perusahaan mengalokasikan anggaran pengembangan SDM tahun 2026 sebesar Rp1 miliar yang diproyeksikan untuk mendukung 113 program pengembangan kompetensi.

to improve process efficiency, increase data accuracy, and support more informed managerial decision-making.

Fourth, talent management development and succession planning will be strengthened through the establishment of a structured talent pool and the phased implementation of leadership development programs. These initiatives are designed to ensure leadership continuity and organizational readiness in responding to future business dynamics.

Through this plan, the Company is optimistic to ensure HR empowerment that are professional, adaptive, and competitive, while at the same time strengthening KIE as a competent and sustainable industrial estate operator. In order to achieve the targets set forth in the Company's strategic plan, the Company has allocated a HR development budget for 2026 amounting to Rp1 billion, which is projected to support 113 competency development programs.

Kesetaraan Gender dan Kesempatan Kerja
Gender Equality and Work Opportunities

KIE memandang pengembangan diri dan kesempatan karier sebagai bagian dari hak setiap insan Perusahaan. Kebijakan pengembangan dan promosi di KIE didasarkan pada kontribusi, inovasi karyawan, serta pencapaian kompetensi karyawan. Dengan demikian, setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan bersaing tanpa membedakan agama, ras, maupun gender.

KIE recognizes personal development and career opportunities as part of the Company personnel's rights. The development and promotion policy within KIE is grounded on the contribution, employee innovation, and employee competency achievement. Accordingly, each individual has the same opportunity to develop and compete without distinction to religion, race, and gender.

Komposisi Pemegang Saham
Shareholder Composition

Nama Pemegang Saham Shareholder Name	**Status Pemegang Saham** Shareholder Status	**Jumlah Saham (lembar)** Number of Shares	**Modal ditempatkan dan Disetor Penuh (Rp)** Issued and Fully Paid-Up Capital (Rp)	**Persentase Kepemilikan (%)** Percentage Ownership (%)
Nilai Nominal Saham = Rp1.000.000,-/lembar | Par Value = Rp1,000,000,-/share				
Kepemilikan Saham 5% atau lebih | Ownership of Shares of 5% or more				
PT Pupuk Kalimantan Timur	Perseroan Terbatas Limited Liability Company	58.306	Rp58.306.000.000	99,99%
Kepemilikan di bawah 5% | Ownership below 5%				
Yayasan Kesejahteraan Hari Tua (YKHT) Pupuk Kalimantan Timur	Yayasan Foundation	1	Rp1.000.000	0,01%
Jumlah Total		**58.307**	**Rp58.307.000.000**	**100%**

Informasi Tentang Kepemilikan Saham Perusahaan oleh Manajemen Kunci

Information on the Company Shareholding by Key Managements

Sampai dengan 31 Desember 2025, tidak terdapat anggota Dewan Komisaris maupun Direksi yang memiliki saham di Perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

As of December 31, 2025, there were no members of the Board of Commissioners or Board of Directors holding the Company shares, whether directly or indirectly.

Nama Name	**Jabatan** Position	**2025**		**2024**	
		Jumlah Saham (lembar) Number of Shares	**Persentase Kepemilikan (%)** Ownership Percentage (%)	**Jumlah Saham (lembar)** Number of Shares	**Persentase Kepemilikan (%)** Ownership Percentage (%)
Komisaris Board of Commissioners					
Turkhamim	Komisaris Commissioner	x	x	x	x
Direksi Board of Directors					
Muhammad Erriza	Direktur Utama President Director	x	x	x	x
Indra Kusumawardhana	Direktur Operasional & Bisnis Director of Operation & Business	x	x	x	x
Dianti Citra Agustin	Plt. Direktur Keuangan Acting Director of Finance	x	x	x	x

x = Nihil/tidak memiliki saham di PT Kaltim Industrial Estate
x = Owns / does not own PT Kaltim Industrial Estate shares

INFORMASI TENTANG PEMEGANG SAHAM UTAMA/PENGENDALI HINGGA NAMA PEMILIK AKHIR

INFORMATION ON MAJORITY/CONTROLLING SHAREHOLDERS TO THE ULTIMATE BENEFICIAL OWNER



PT Pupuk Kalimantan Timur
99,99%

Yayasan Kesejahteraan Hari Tua Pupuk Kaltim
0,01%

Struktur Grup Perusahaan
Company Group Structure

PT Pupuk Kalimantan Timur
99,99%

Yayasan Kesejahteraan Hari Tua Pupuk Kaltim
0,01%

PT Kaltim Industrial Estate

PT Kaltim Jasa Sekuriti
70%
Penyedia Jasa Keamanan
Security Service Provider
- Primer Koperasi Kartika Wira Karya Bontang: 10%
- Primer Koperasi Kartika Arda Cusema Bontang: 10%
- Primer Koperasi Polres Bontang: 10%

PT Kaltim Adhiguna Dermaga
50,99%
Bongkar Muat Barang
Unloading Goods
- Yayasan Kesejahteraan Hari Tua PKT: 34%
- Yayasan Kesejahteraan Pensiunan Karyawan
- PT Pelayaran Bahtera Adhiguna: 15,01%

PT Kaltim Daya Mandiri
44%
Penyedia Utilitas dan Bahan Baku Industri
Utilities and Industrial Raw Materials Provider
- PT Pupuk Indonesia Utilitas: 51%
- Yayasan Pupuk Kaltim: 5%

PT Kaltim Medika Utama
26,29%
Rumah Sakit
Hospital
- Yayasan Kesejahteraan Hari Tua PKT: 72,98%
- Koperasi Karyawan Rumah Sakit PKT: 0,73%

PT Bintang Sintuk Hotel
20%
Perhotelan
Hospitality
- PT Citra Damai Lestari: 80%

PT Prakarsa Nusa Sinergi
12%
Perdagangan ekspor Impor
Import Export Trade
- Yayasan Kesejahteraan Hari Tua PKT: 88%

Daftar Entitas Anak dan Informasi Tentang Entitas Asosiasi, Penyertaan Saham, Ventura Bersama dan Kerjasama Operasi

List of Subsidiaries and Information on Associates, Equity Participation, Joint Ventures, and Operational Cooperation

Anak Perusahaan Subsidiaries	Tahun Pendirian Year of Establishment	Status Status	Jenis Usaha Business Type	Persentase Kepemilikan Saham (%) Percentage of Share Ownership	Jumlah Total Aset (Rp Miliar) Total Asset (Rp Billion)		Lokasi Location
					2025	2024	
PT Kaltim Jasa Sekuriti	2002	Aktif Active	Penyedia Jasa Keamanan Security Service Provider	70%	59,86	50,16	Bontang, Kaltim
PT Kaltim Adhiguna Dermaga	1988	Aktif Active	Bongkar Muat Barang Unloading Goods	50,99%	88,75	78,76	Bontang, Kaltim

PT KALTIM JASA SEKURITI (70%)

Wisma KIE Lt. 2, Jl. Ammonia Kav. 79, Kawasan Industri, Kota Bontang Telp. (0548) 41102.

PT Kaltim Jasa Sekuriti merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengamanan. Penyediaan tenaga keamanan ini sangatlah mendukung dan selaras dengan kegiatan KIE selaku induk dan sekaligus merupakan pengelola Kawasan Industri. Selain dalam hal penyediaan jasa pengamanan, kini PT Kaltim Jasa Sekuriti juga mulai melakukan kegiatan usaha di bidang trading.

PT KALTIM ADHIGUNA DERMAGA (50,99%)

Wisma KIE Lt. 1, Jl. Ammonia Kav. 79, Kawasan Industri, Kota Bontang Telp. (0548) 41177.

PT Kaltim Adhiguna Dermaga adalah perusahaan bongkar muat yang mulai diakuisisi oleh PT Kaltim Industrial Estate sejak tahun 2018. Seiring perkembangan perusahaan saat ini PT Kaltim Adhiguna Dermaga telah melakukan diversifikasi usahanya dengan menambah bidang usaha jasa lainnya seperti Jasa Pengurusan Transportasi, Jasa Pengurusan Kepabeanan, Jasa Sewa Alat Berat, dan beberapa kegiatan usaha jasa lainnya.

PT KALTIM JASA SEKURITI (70%)

Wisma KIE Lt. 2, Jl. Ammonia Kav. 79, Kawasan Industri, Kota Bontang Telp. (0548) 41102

PT Kaltim Jasa Sekuriti is a company engaged in the security services sector. The provision of security personnel plays a significant role in supporting and aligning with the operations of KIE as the parent company and manager of the industrial estate. In addition to providing security services, PT Kaltim Jasa Sekuriti has also begun expanding its business activities into the trading sector.

PT KALTIM ADHIGUNA DERMAGA (50.99%)

Wisma KIE Lt. 1, Jl. Ammonia Kav. 79, Kawasan Industri, Kota Bontang Telp. (0548) 41177

PT Kaltim Adhiguna Dermaga is a stevedoring company that has been under the ownership of PT Kaltim Industrial Estate since 2018. Along with the Company's growth, PT Kaltim Adhiguna Dermaga has diversified its business activities by expanding into other service sectors, including Freight Forwarding Services, Customs Clearance Services, Heavy Equipment Lease Services, and several other service-related business activities.

Afiliasi
Affiliates

Anak Perusahaan Subsidiaries	Tahun Pendirian Year of Establishment	Status Status	Jenis Usaha Business Type	Persentase Kepemilikan Saham (%) Percentage of Share Ownership	Jumlah Total Aset (Rp Miliar) Total Asset (Rp Billion)		Lokasi Location
					2025	2024	
PT Kaltim Daya Mandiri	1995	Aktif Active	Penyedia Utilitas dan Bahan Baku Industri Utilities and Industrial Raw Materials Provider	44%	663,02	669,72	Bontang, Kaltim
PT Kaltim Medika Utama	2012	Aktif Active	Rumah Sakit Hospital	26,29%	223,95	235,03	Bontang, Kaltim
PT Bintang Sintuk Hotel	1995	Aktif Active	Perhotelan Hospitality	20%	14,58	15,76	Bontang, Kaltim
PT Prakarsa Nusa Sinergi	2003	Tidak Aktif (2023) Inactive (2023)	Perdagangan Ekspor Impor Import Export Trade	12%	1,10	1,15	Bontang, Kaltim

PT KALTIM DAYA MANDIRI (44%)

Wisma KIE Lt. 2, Jl. Ammonia Kav. 79, Kawasan Industri, Kota Bontang Telp. (0548) 41850

Bisnis PT Kaltim Daya Mandiri adalah produksi dan distribusi listrik, dengan kapasitas 34 MW, serta menyediakan steam, nitrogen, dan demineralized water. Perusahaan-perusahaan yang beroperasi di kawasan industri yang dikelola oleh KIE adalah konsumen PT Kaltim Daya Mandiri. Keberadaan PT Kaltim Daya Mandiri di kawasan industri menjadi salah satu elemen penting penunjang kelancaran operasi perusahaan yang ada di kawasan industri.

PT KALTIM MEDIKA UTAMA (26,29%)

Jl. Oxygen No. 01 Kota Bontang Kalimantan Timur - Bontang Telp. (0548) 41273

PT Kaltim Medika Utama (KMU) adalah perusahaan berbasis Rumah Sakit berdiri pada tahun 2012. PT KMU mengelola Rumah Sakit Pupuk Kaltim (RS-PKT) Group, jaringan Rumah Sakit dan klinik yang beroperasi di Kota Bontang, Samarinda, Balikpapan dan Kabupaten Kutai Timur. KMU menjadi pusat pengembangan SDM dengan standar kompetensi nasional, pengelola kesehatan, trading sediaan farmasi, konsultan bisnis perumahsakitan, provider CSR serta pengelolaan limbah. Didukung dengan lebih dari 1000 karyawan yang profesional dan berpengalaman dibidangnya.

PT KALTIM DAYA MANDIRI (44%)

Wisma KIE Lt. 2, Jl. Ammonia Kav. 79, Kawasan Industri, Kota Bontang Telp. (0548) 41850

PT Kaltim Daya Mandiri's business operates in the production and distribution of electricity with a capacity of 34 MW, as well as the supply of steam, nitrogen, and demineralized water. Companies operating within the industrial estate managed by KIE are the main consumers of PT Kaltim Daya Mandiri's services. The presence of PT Kaltim Daya Mandiri within the estate serves as a critical element in supporting the seamless operations of businesses in the industrial area.

PT KALTIM MEDIKA UTAMA (26,29%)

Jl. Oxygen No. 01 Kota Bontang Kalimantan Timur - Bontang Telp. (0548) 41273

PT Kaltim Medika Utama (KMU) is a hospital-based company established in 2012. PT KMU manages Pupuk Kaltim Hospital (RS-PKT) Group, a network of hospitals and clinics operating in Bontang City, Samarinda, Balikpapan and East Kutai Regency. KMU is a center for human resource development with national competency standards, health management, pharmaceutical supply trading, hospital business consultants, CSR providers and waste management. Supported by 1000 professional and experienced employees in their respective fields.

PT BINTANG SINTUK HOTEL (20%)

Komp. Kawasan Lapangan Golf Sintuk PKT Jl. Urea, Lok uan, Bontang Utara, Kota Bontang, Kalimantan Timur Telp. (0548) 26268

Bintang Sintuk Hotel adalah penginapan hotel bintang tiga di Bontang, Kalimantan Timur. Hotel ini merupakan salah satu fasilitas penginapan/hotel di kawasan industri bontang yang dimiliki oleh KIE. Dengan fasilitas yang lengkap dan pelayanan yang bagus, ditambah jarak yang dekat menuju pusat-pusat strategis menjadikan hotel ini pilihan yang utama bagi tamu-tamu serta calon investor di Kawasan Industri KIE.

PT PRAKARSA NUSA SINERGI (12%)

Jl. Oxygen No. 01 Kota Bontang Kalimantan Timur - Bontang Telp. (0548) 41273

PT Pukati Niaga Sejahtera adalah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan yang meliputi kegiatan ekspor-impor bahan pertanian dan perkebunan, kegiatan distribusi, perdagangan bidang agrobisnis, perdagangan komoditas pertanian/perkebunan, energi, dsb. Pada tahun 2023, PT Pukati Niaga Sejahtera tidak aktif.

PT BINTANG SINTUK HOTEL (20%)

Komp. Kawasan Lapangan Golf Sintuk PKT Jl. Urea, Lok uan, Bontang Utara, Kota Bontang, Kalimantan Timur Telp. (0548) 26268

Bintang Sintuk Hotel is a three-star hotel located in Bontang, East Kalimantan. It is one of the hospitality facilities within the Bontang industrial estate and is owned by KIE. With its comprehensive amenities, excellent service, and strategic proximity to key locations, the hotel serves as a preferred accommodation choice for guests and prospective investors visiting the KIE Industrial Estate.

PT PRAKARSA NUSA SINERGI (12%)

Jl. Oxygen No. 01 Kota Bontang Kalimantan Timur - Bontang Telp. (0548) 41273

PT Pukati Niaga Sejahtera is a trading company engaged in activities including the export and import of agricultural and plantation products, distribution services, agribusiness trade, and the trading of agricultural/plantation commodities, energy, and more. As of 2023, PT Pukati Niaga Sejahtera was inactive.

Kronologi Penerbitan dan Pencatatan Saham
Share Listing Chronology

Sampai dengan 31 Desember 2025, KIE belum melakukan penawaran saham kepada masyarakat serta tidak mencatatkan maupun memperdagangkan sahamnya di bursa efek mana pun. Struktur Kepemilikan saham Perusahaan didominasi oleh PT Pupuk Kalimantan Timur dengan kepemilikan sebanyak 58.306 lembar saham atau sebesar 99,99%, sedangkan di Yayasan Kesejahteraan Hari Tua Pupuk Kalimantan Timur memiliki 1 lembar saham atau setara dengan 0,01%.

Sehubungan dengan hal tersebut, tidak terdapat informasi mengenai kapitalisasi pasar KIE berdasarkan harga saham di bursa, termasuk data harga saham tertinggi, terendah, maupun harga penutupan. Selain itu, tidak tersedia informasi mengenai volume perdagangan saham ataupun grafik pergerakan harga dan volume perdagangan sebagaimana lazimnya tercatat di bursa efek.

Lebih lanjut, Perusahaan juga tidak memiliki catatan terkait penghentian sementara perdagangan saham (*suspensi*) maupun penghapusan pencatatan saham (*delisting*) pada bursa efek mana pun.

As of December 31, 2025, KIE has not conducted a public offering of its shares and has not listed or traded its shares on any stock exchange. The Company's shareholding structure is predominantly controlled by PT Pupuk Kalimantan Timur, which holds 58,306 shares, representing 99.99% of the total issued and fully paid-up capital. The remaining 1 share, equivalent to 0.01%, is held by Yayasan Kesejahteraan Hari Tua Pupuk Kalimantan Timur.

In connection with the foregoing, there is no available information regarding the Company's market capitalization based on exchange-traded share prices, including data on the highest, lowest, or closing stock prices. Furthermore, no information is available regarding share trading volume or price and trading volume movement charts, as would customarily apply to publicly listed companies.

Additionally, the Company has no record of any trading suspension (suspension) or delisting of its shares on any stock exchange.

Kronologi Penerbitan dan Pencatatan Efek Lainnya
Chronology of Issuance and Listing of Other Securities

Sampai dengan 31 Desember 2025, KIE tidak melakukan penerbitan maupun pencatatan efek lainnya melalui bursa efek mana pun. Perusahaan juga tidak menerbitkan instrumen pasar modal seperti obligasi, sukuk, atau efek bersifat utang lainnya. Dengan demikian, tidak terdapat aktivitas penerbitan dan pencatatan efek lainnya selama periode pelaporan.

As of December 31, 2025, KIE did not issue or list any other securities on any stock exchange. The Company also did not issue any capital market instruments, including bonds, sukuk, or other debt securities. Accordingly, there were no activities related to the issuance or listing of other securities during the reporting period.

Lembaga Profesi Penunjang Pasar Modal
Capital Market Supporting Institutions and Professions

Sampai dengan 31 Desember 2025, KIE tidak melakukan pencatatan saham maupun penerbitan obligasi di pasar modal, sehingga tidak terdapat informasi penggunaan jasa lembaga dan/atau profesi penunjang pasar modal selama periode pelaporan.

As of December 31, 2025, KIE has neither listed its shares nor issued bonds or other capital market instruments. Accordingly, there was no engagement of capital market supporting institutions and/or capital market supporting professionals during the reporting period.

Akuntan Perusahaan
Public Accounting Firm

Kantor Akuntan Publik Public Accounting Firm	**Alamat** Address	**Tahun Audit** Year of Audit	**Akuntan** Accountant	**Jasa yang diberikan** Provided Services	**Jasa Lainnya** Other Services	**Biaya** Fees
PricewaterhouseCoopers (PwC)	WTC 3, Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920	2025	Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan Rintis, Jumadi, Rianto & Partners	Audit Laporan Keuangan Financial Audit	-	Rp390.720.000
PricewaterhouseCoopers (PwC)	WTC 3, Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920-Indonesia	2024	Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan Rintis, Jumadi, Rianto & Partners	Audit Laporan Keuangan Financial Audit	-	Rp390.720.000
PricewaterhouseCoopers (PwC)	WTC 3, Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920-Indonesia	2023	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partners	Audit Laporan Keuangan Financial Audit	-	Rp380.730.000
PricewaterhouseCoopers (PwC)	WTC 3, Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920-Indonesia	2022	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partners	Audit Laporan Keuangan Financial Audit	-	Rp372.900.000
PricewaterhouseCoopers (PwC)	WTC 3, Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920-Indonesia	2021	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partners	Audit Laporan Keuangan Financial Audit	-	Rp330.000.000

Nama dan Alamat Biro Administrasi Efek dan Perusahaan Pemeringkat Efek
Name and Address of the Securities Administration Bureau and Securities Rating Agency

Sampai dengan 31 Desember 2025, KIE tidak mencatatkan dan menerbitkan saham maupun efek lainnya. Sehingga tidak terdapat informasi mengenai jasa Biro Administrasi Efek dan Perusahaan Pemeringkat Efek.

As of December 31, 2025, KIE has not listed or issued any shares or other securities. Accordingly, there is no applicable information regarding the engagement of a Securities Administration Bureau or a Credit Rating Agency.

Daftar Keanggotaan Asosiasi Industri
List of Industry Association Memberships

Asosiasi Association	**Masa Berlaku Hingga** Validity Period
Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) Real Estate Developers Association of Indonesia (REI)	31 Desember 2025 December 31, 2025
Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) Indonesia Industrial Estate Association (HKI)	10 Januari 2026 January 10, 2026
Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia Chamber of Commerce and Industry (KADIN)	12 Juli 2026 July 12, 2026
Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI) Association of Indonesian National Construction Contractors	24 Juni 2026 June 24, 2026
Asosiasi Pengusaha Indonesia Indonesian Employers Association	31 Desember 2025 December 31, 2025

Informasi Pada Situs Website Perusahaan
Information on the Company's Website

Sebagai bentuk komitmen terhadap prinsip transparansi dan keterbukaan informasi, serta untuk mempermudah akses publik dan para pemangku kepentingan terhadap informasi perusahaan, KIE menyediakan dan mengelola situs *web* resmi yang memuat berbagai informasi terkini mengenai kegiatan dan kinerja perusahaan.

Website tersebut dirancang dengan tampilan yang informatif serta sistem navigasi yang mudah digunakan, sehingga memudahkan masyarakat dan para pemangku kepentingan dalam mengakses berbagai informasi terkait perusahaan secara cepat, akurat, dan transparan.

As part of its commitment to transparency and disclosure principles, and to facilitate public and stakeholder access to corporate information, KIE provides and manages an official corporate website containing up-to-date information regarding its activities and performance.

The website is designed with an informative interface and user-friendly navigation system, enabling the public and stakeholders to access relevant corporate information in a timely, accurate, and transparent manner.

Melalui *platform* digital ini, masyarakat dan pemangku kepentingan dapat memperoleh berbagai informasi, antara lain:

1. Informasi umum perusahaan, yang mencakup visi dan misi perusahaan, sejarah singkat pendirian dan perkembangan perusahaan, uraian kegiatan usaha, budaya dan nilai-nilai perusahaan, serta profil Dewan Komisaris dan Direksi. Selain itu, disajikan pula informasi mengenai struktur manajemen dan tata kelola perusahaan sebagai bagian dari komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas.
2. Informasi bagi investor, berupa berbagai laporan resmi yang disampaikan kepada pemangku kepentingan, seperti Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan.
3. Informasi kegiatan usaha, yang menjelaskan ruang lingkup operasional perusahaan beserta pilar-pilar bisnis yang menjadi fokus dan landasan dalam menjalankan aktivitas usaha. Uraian ini memberikan gambaran mengenai bidang usaha utama yang dikelola Perusahaan sebagai sumber penciptaan nilai dan pertumbuhan berkelanjutan.
4. Publikasi dan komunikasi Perusahaan, yang mencakup berita terbaru, kegiatan dan acara perusahaan, serta penerbitan majalah elektronik Perusahaan yang diperbarui secara berkala.
5. Informasi tata kelola dan layanan publik, termasuk program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), Sistem Pelaporan Pelanggaran, kanal terkait *Good Corporate Governance* (GCG), serta informasi terkait proses pengadaan barang dan jasa (*procurement*) yang dilaksanakan Perusahaan.

Through this digital platform, stakeholders may obtain, among others, the following information:

1. General Corporate Information, including the Company's vision and mission, brief history of establishment and development, business activities, corporate culture and values, as well as profiles of the Board of Commissioners and the Board of Directors. Information regarding the Company's management structure and corporate governance framework is also provided as part of the Company's commitment to transparency and accountability.
2. Investor Information, consisting of official reports submitted to stakeholders, including the Annual Report and Sustainability Report.
3. Business Activities Information, describing the scope of the Company's operations and the business pillars that serve as the foundation for its operational activities. This section provides an overview of the Company's core business sectors as sources of value creation and sustainable growth.
4. Corporate Publications and Communications, including the latest news, corporate events and activities, as well as the Company's electronic magazine, which is updated periodically.
5. Governance and Public Service Information, including Corporate Social and Environmental Responsibility (TJSL) programs, the Whistleblowing System, Good Corporate Governance (GCG) channels, and information related to the procurement of goods and services conducted by the Company.





04 →

Analisis dan Pembahasan Manajemen

Management Discussion and Analysis



Tinjauan Umum Ekonomi Makro dan Industri
Macroeconomic and Industry Overview

Pada tahun 2025, perekonomian global masih dihadapkan pada dinamika ketidakpastian yang dipengaruhi oleh faktor geopolitik, fluktuasi harga komoditas, serta penyesuaian kebijakan moneter di berbagai negara. Meskipun demikian, aktivitas ekonomi global menunjukkan tren pemulihan yang bertahap, yang turut berdampak positif terhadap perekonomian nasional. Di tengah kondisi tersebut, ekonomi domestik tetap menunjukkan ketahanan yang baik, didukung oleh konsumsi masyarakat yang stabil, peningkatan investasi, serta pertumbuhan sektor industri pengolahan. Berbagai kebijakan Pemerintah dalam mendorong hilirisasi industri, pengembangan kawasan industri, serta peningkatan daya saing investasi juga menjadi faktor pendukung yang memperkuat prospek pertumbuhan ekonomi nasional ke depan.

In 2025, the global economy continued to face uncertainty driven by geopolitical factors, commodity price fluctuations, and monetary policy adjustments across various countries. Nevertheless, global economic activity showed a gradual recovery trend, which had a positive impact on the national economy. Amid these conditions, the domestic economy demonstrated strong resilience, supported by stable consumer spending, increased investment, and growth in the manufacturing sector. Government policies aimed at promoting industrial downstreaming, developing industrial estates, and enhancing investment competitiveness have also contributed to strengthening the outlook for national economic growth.

Sejalan dengan perkembangan tersebut, industri kawasan industri menunjukkan prospek yang positif, didorong oleh meningkatnya kebutuhan akan kawasan industri yang terintegrasi, efisien, dan berkelanjutan serta meningkatnya minat investasi baik dari dalam maupun luar negeri. Kebijakan Pemerintah yang mendukung pengembangan kawasan industri sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru semakin memperkuat daya tarik industri ini. Namun demikian, industri kawasan industri juga dihadapkan pada berbagai tantangan, antara lain meningkatnya persaingan antar pengelola kawasan, perkembangan teknologi industri yang pesat, serta tuntutan terhadap penerapan prinsip keberlanjutan lingkungan dan sosial.

In line with these developments, the industrial estate sector showed positive prospects, driven by increasing demand for integrated, efficient, and sustainable industrial areas, as well as growing investment interest from domestic and international investors. Government policies supporting the development of industrial estates as new economic growth centers further enhance the attractiveness of this sector. However, the industrial estate industry also faces several challenges, including intensifying competition among estate operators, rapid technological advancements, and increasing expectations for the implementation of environmental and social sustainability principles.

Tinjauan Operasi Per Segmen Usaha
Operational Review by Business Segment

Realisasi pendapatan Perusahaan tahun 2025 sebesar Rp520,04 miliar atau 95,71% dari RKAP 2025 sebesar Rp543,33 miliar dengan rincian sebagai berikut:

The Company recorded revenue realization in 2025 of Rp520.04 billion, or 95.71% of the 2025 Corporate Work Plan and Budget (RKAP) target of Rp543.33 billion, with the following details:

dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lain
in millions of Rupiah, unless otherwise stated

Uraian Description	2025		2024		Pertumbuhan (%) Growth (%)
	Jumlah Total	% RKAP 2025	Jumlah Total	% RKAP 2024	
Kawasan Industri Industrial Estate	28.931	103,17%	29.086	116,50%	-0,53%
Beton Concrete	63.706	111,12%	54.441	118,89%	17,02%
Properti Property	128.089	84,94%	111.392	88,71%	14,99%
Trading Trading	13.013	101,62%	8.744	54,74%	48,82%
Konstruksi Construction	56.024	64,83%	88.460	119,54%	-36,67%

KAWASAN INDUSTRI

Realisasi pendapatan pilar kawasan industri sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp28,93 miliar atau 103,17% dari target RKAP 2025 sebesar Rp28,04 miliar, turun 0,53% dari capaian tahun 2024, sebesar Rp29,09 miliar.

BETON

Realisasi pendapatan pilar beton sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp63,71 miliar atau 111,12% dari target RKAP 2025 sebesar Rp57,33 miliar, naik 17,02% dibanding capaian tahun 2024, sebesar Rp54,44 miliar.

PROPERTI

Realisasi pendapatan pilar properti sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp128,09 miliar atau 84,94% dari target RKAP 2025 sebesar Rp150,80 miliar, naik 14,99% dari capaian tahun 2024, sebesar Rp111,39 miliar.

TRADING

Realisasi pendapatan pilar trading sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp13,01 miliar atau 101,62% dari target RKAP 2025 sebesar Rp12,81 miliar, naik 48,82% dari capaian tahun 2024, sebesar Rp8,74 miliar.

KONSTRUKSI

Realisasi pendapatan pilar konstruksi sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp56,02 miliar atau 64,83% dari target RKAP 2025 sebesar Rp86,41 miliar, turun 36,67% dari capaian tahun 2024, sebesar Rp88,46 miliar.

INDUSTRIAL ESTATE

Revenue realization from the industrial estate pillar as of December 31, 2025 amounted to Rp28.93 billion, or 103.17% of the 2025 RKAP target of Rp28.04 billion, a decrease of 0.53% compared to the 2024 achievement of Rp29.09 billion.

CONCRETE

Revenue realization from the concrete pillar as of December 31, 2025 amounted to Rp63.71 billion, or 111.12% of the 2025 RKAP target of Rp57.33 billion, an increase of 17.02% compared to the 2024 achievement of Rp54.44 billion.

PROPERTY

Revenue realization from the property pillar as of December 31, 2025 amounted to Rp128.09 billion, or 84.94% of the 2025 RKAP target of Rp150.80 billion, an increase of 14.99% compared to the 2024 achievement of Rp111.39 billion.

TRADING

Revenue realization from the trading pillar as of December 31, 2025 amounted to Rp13.01 billion, or 101.62% of the 2025 RKAP target of Rp12.81 billion, an increase of 48.82% compared to the 2024 achievement of Rp8.74 billion.

CONSTRUCTION

Revenue realization from the construction pillar as of December 31, 2025 amounted to Rp56.02 billion, or 64.83% of the 2025 RKAP target of Rp86.41 billion, a decrease of 36.67% compared to the 2024 achievement of Rp88.46 billion.

Analisis Keuangan
Financial Analysis

STANDAR PENYAJIAN INFORMASI DAN KESESUAIAN TERHADAP STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN

Uraian kinerja keuangan KIE disusun berdasarkan Laporan Keuangan Perusahaan yang telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia (SAK). Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) PricewaterhouseCoopers (Akuntan: Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan), dengan laporan auditor independen yang diterbitkan pada tanggal 06 Maret 2026 dan memperoleh opini "wajar dalam semua hal yang material".

Laporan Keuangan lengkap beserta catatannya disajikan pada bagian tersendiri dalam Laporan Tahunan ini.

DISCLOSURE STANDARDS AND COMPLIANCE WITH FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS

The financial performance discussion of KIE is prepared based on the Company's Financial Statements, which have been presented in accordance with the Indonesian Financial Accounting Standards (SAK). The Financial Statements for the year ended December 31, 2025 have been audited by the Public Accounting Firm (KAP) PricewaterhouseCoopers (Accountant: Rintis, Jumadi, Rianto & Partners), with the independent auditor's report issued on March 6, 2026, expressing "unqualified opinion."

The complete Financial Statements, including its notes, are presented in a separate section of this Annual Report.

LABA (RUGI) DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN
CONSOLIDATED PROFIT (LOSS) AND COMPREHENSIVE INCOME

dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lain
in millions of Rupiah, unless otherwise stated

Uraian Description	**Nilai** Amount		**Naik (Turun)** Increase (Decrease)		**Nilai** Amount
	2025	**2024**	**Nilai** Amount	**%**	**2023**
Pendapatan Revenue	520.047	504.283	15.764	3,13%	382.982
Beban Pokok Pendapatan Cost of Revenue	(387.006)	(385.906)	(1.100)	0,29%	(285.685)
Laba Bruto Gross Profit	133.041	118.377	14.664	12,39%	97.297
Beban Usaha Operating Expenses	(62.529)	(60.037)	(2.492)	4,15%	(56.201)
Laba Usaha Operating Profit	70.512	58.340	12.172	20,86%	41.096
Pendapatan Keuangan/(Beban) / Financial Income/(Expenses)	17.020	13.232	3.788	28,63%	5.656
Bagian Laba Entitas Asosiasi Share of Profit of Associates	38.561	42.621	(4.060)	(9,52%)	38.967
Laba Sebelum Pajak Profit Before Income Tax	126.094	114.193	11.901	10,42%	85.719
Beban Pajak Penghasilan Income Tax Expenses	(14.061)	(12.759)	(1.302)	10,20%	(8.051)
Laba (Rugi) Tahun Berjalan Profit (Loss) for the Year	112.033	101.434	10.599	10,45%	77.668
Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan Comprehensive Income for the Year	(12.538)	(2.238)	(10.301)	460,28%	(1.170)

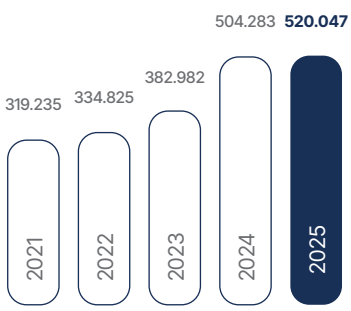
LABA (RUGI) DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN
CONSOLIDATED PROFIT (LOSS) AND COMPREHENSIVE INCOME

dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lain
in millions of Rupiah, unless otherwise stated

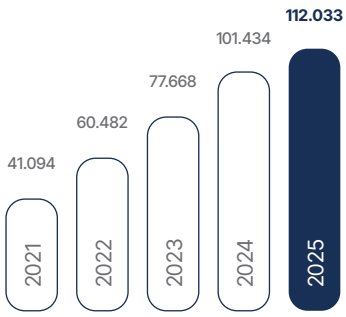
Uraian Description	Nilai Amount		Naik (Turun) Increase (Decrease)		Nilai Amount
	2025	2024	Nilai Amount	%	2023
Laba Tahun Berjalan yang Diatribusikan Pada: Profit For The Year Attributed to:					
Pemilik Entitas Induk Owners of the Parent Entity	96.343	89.867	6.476	7,21%	71.336
Kepentingan Non Pengendali Non-Controlling Interest	15.690	11.567	4.123	35,64%	6.332
Jumlah Penghasilan Komprehensif yang Diatribusikan pada: Total Comprehensive Income Attributed to:					
Penghasilan Komprehensif Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Comprehensive Income Attributed to Owners of the Parent Entity	86.827	87.870	(1.043)	(1,19%)	70.559
Penghasilan Komprehensif Diatribusikan Kepada Kepentingan Non Pengendali Comprehensive Income Attributed to Non-controlling Interest	12.668	11.326	1.342	11,85%	5.939
Laba Rugi Komprehensif: Comprehensive Profit (Loss):					
Laba Sebelum Pajak Profit Before Tax	126.094	114.193	11.901	10,42%	85.719
Laba Sebelum Bunga & Pajak Profit Before Interest & Tax	109.074	100.961	8.113	8,04%	80.063
Laba Sebelum Bunga, Pajak, Depresiasi dan Amortisasi Profit Before Interest, Tax, Depreciation, and Amortization	131.657	120.932	10.725	8,87%	99.789
Arus Kas dari Aktivitas Operasi Cash Flows From Operating Activities	94.867	86.476	8.391	9,70%	82.265
Dividen Dividend	35.000	0	35.000	100%	-

GRAFIK PERBANDINGAN PENDAPATAN DAN LABA
CHART OF REVENUE AND PROFIT COMPARISON

PENDAPATAN
REVENUE



LABA
PROFIT



PENDAPATAN

Pendapatan tahun 2025 tercatat Rp520,05 miliar atau naik 3,13% dari tahun sebelumnya sebesar Rp504,28 miliar.

REVENUE

Revenue in 2025 amounted to Rp520.05 billion, an increase of 3.13% compared to previous year with Rp504.28 billion.

BEBAN POKOK PENJUALAN

Beban pokok penjualan tahun 2025 tercatat Rp387,01 miliar atau naik 0,29% dari tahun sebelumnya sebesar Rp385,91 miliar. Kenaikan ini sejalan dengan peningkatan pendapatan Perusahaan pada periode yang sama.

COST OF GOODS SOLD

Cost of Goods Sold in 2025 amounted to Rp387.01 billion, an increase of 0.29% from previous year with Rp385.91 billion. This increase was in line with the increase in the Company's Revenue in the same period.

LABA USAHA

Laba usaha tahun 2025 tercatat Rp70,51 atau naik 20,86% dari tahun sebelumnya sebesar Rp58,34 miliar. Kenaikan ini sejalan dengan peningkatan laba bruto pada periode yang sama.

OPERATING REVENUE

Operating Revenue in 2025 amounted to Rp70.51 billion, an increase of 20.86% compared to previous year with Rp58.34 billion. This increase was in line with the increase in gross profit in the same period.

PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN
OTHER INCOME AND EXPENSES

Uraian Description	Nilai Amount	
	2025	2024
Pos pendapatan dan beban lain-lain terdiri dari: Other income and expenses consist of:		
Pendapatan Keuangan Finance Income	19,83	15,82
Beban Keuangan Finance Expenses	(3,18)	(2,29)
Bagian Atas Laba Bersih Entitas Asosiasi Share of Net Profit from Associates	38,56	42,62
Beban Lain-Lain, Bersi Other Expenses, Net	0,37	(0,3)

Pos pendapatan dan beban lain-lain terdiri dari pendapatan dan beban keuangan serta bagian atas laba bersih entitas asosiasi.

Other income and expenses consist of financial income and expenses, as well as the Company's share of net profit from associates.

LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN

Laba sebelum pajak penghasilan tahun 2025 tercatat Rp126,09 miliar atau naik 10,42% dari tahun sebelumnya sebesar Rp114,19 miliar.

PROFIT BEFORE INCOME TAX

Profit before income tax in 2025 amounted to Rp126.09 billion, an increase of 10.42% compared to Rp114.19 billion in the previous year.

BEBAN PAJAK PENGHASILAN

Beban pajak penghasilan tahun 2025 tercatat Rp14,06 miliar atau naik 10,20% dari tahun sebelumnya sebesar Rp12,76 miliar.

INCOME TAX EXPENSE

Income tax expense in 2025 amounted to Rp14.06 billion, an increase of 10.20% compared to Rp12.76 billion in the previous year.

KEPENTINGAN NON PENGENDALI

Kepentingan non pengendali atas Anak Perusahaan 2025 tercatat Rp15,69 miliar atau naik 35,64% dari tahun sebelumnya sebesar Rp11,57 miliar. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh membaiknya kinerja keuangan entitas anak,

NON-CONTROLLING INTERESTS

Non-controlling interests in the Company Subsidiaries in 2025 amounted to Rp15.69 billion, an increase of 35.64% compared to Rp11.57 billion in the previous year. This increase was primarily driven by improved financial performance of

sehingga meningkatkan porsi laba yang diatribusikan kepada kepentingan non-pengendali.

LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN

Perusahaan mencatat laba komprehensif 2025 sebesar Rp99,50 miliar atau naik 3% dari tahun sebelumnya sebesar Rp99,20 miliar.

PROFITABILITAS

Sampai akhir 31 Desember 2025 Perusahaan memperoleh margin laba bruto konsolidasian sebesar 25,58% meningkat sebesar 2,11% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 23%.

subsidiaries, resulting in a higher portion of profit attributable to non-controlling interests.

COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR

The Company recorded comprehensive income in 2025 of Rp99.50 billion, an increase of 3% compared to Rp99.20 billion in the previous year.

PROFITABILITY

As of December 31, 2025, the Company recorded a consolidated gross profit margin of 25.58%, an increase of 2.11% compared to 23% in the previous year.

POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
CONSOLIDATED FINANCIAL POSITION

dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lain
in millions of Rupiah, unless otherwise stated

Uraian Description	**Nilai** Amount		**Naik (Turun)** Increase (Decrease)		**Nilai** Amount
	2025	**2024**	**Nilai** Amount	**%**	**2023**
Aset Assets					
Aset Lancar Current Assets	687.293	608.477	78.816	12,95%	496.664
Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama Investment in Associates and Joint Venture	260.700	251.861	8.839	3,51%	227.824
Aset Tidak Lancar Non-Current Assets	487.101	480.871	6.230	1,30%	479.298
Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya Other Non-Current Financial Assets	344	14.915	(14.571)	(97,69%)	15.815
Jumlah Aset Total Assets	1.435.438	1.356.124	79.314	5,85%	1.219.601
Liabilitas Liabilities					
Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities	140.157	125.369	14.788	11,80%	84.273
Liabilitas Jangka Panjang Non-Current Liabilities	20.577	12.358	8.219	66,51%	13.881
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	160.734	137.727	23.007	16,70%	98.154
Ekuitas Equity					
Modal Saham Share Capital	58.307	58.307	0	0,00%	58.307
Saldo Laba Retained Earnings	1.034.469	973.126	61.343	6,30%	883.259
Ekuitas Lainnya Other Equity	(27.063)	(27.063)	0	0,00%	(27.063)
Penghasilan Komprehensif Lainnya / Beban Other Comprehensive Income/(Loss)	170.228	179.744	(9.516)	(5,29%)	181.741
Kepentingan Non-Pengendali Non-Controlling Interest	38.763	34.283	4.480	13,07%	25.203

POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
CONSOLIDATED FINANCIAL POSITION

dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lain
in millions of Rupiah, unless otherwise stated

Uraian Description	Nilai Amount		Naik (Turun) Increase (Decrease)		Nilai Amount
	2025	2024	Nilai Amount	%	2023
Jumlah Ekuitas Total Equity	1.274.704	1.218.397	56.307	4,62%	1.121.447
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas Total Liabilities and Equity	1.435.438	1.356.124	79.314	5,85%	1.219.601

ASET

Aset Perusahaan adalah sumber daya yang dimiliki oleh Perusahaan dan dapat dikalkulasi secara finansial, terdiri dari aset lancar dan aset tidak lancar. Total aset Perusahaan pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp1.435,44 miliar.

ASSETS

The Company's assets are resources owned by the Company that can be calculated financially, consisting of current assets and non-current assets. Total of the Company assets in 2025 amounted to Rp1,435.44 billion.

dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lain
in millions of Rupiah, unless otherwise stated

Uraian Description	Nilai Amount		Naik (Turun) Increase (Decrease)		Komposisi Composition		Nilai Amount
	2025	2024	Nilai Amount	%	2025	2024	2023
Aset Lancar Current Assets	687.293	608.477	78.816	12,95%	47,88%	44,87%	496.664
Aset Tidak Lancar Non-Current Assets	748.145	747.647	498	0,07%	52,12%	55,13%	722.937
Jumlah Aset Total Assets	1.435.438	1.356.124	79.314	5,85%	100,00%	100,00%	1.219.601

ASET LANCAR

Aset lancar adalah sumber daya finansial yang diharapkan memiliki tingkat likuiditas tinggi kurang dari 1 (satu) tahun.

Saldo aset lancar 2025 adalah Rp687,29 miliar atau naik 12,95% dari tahun sebelumnya sebesar Rp608,48 miliar.

CURRENT ASSETS

Current assets are financial resources expected to possess a high liquidity level below 1 (one) year.

The 2025 current assets amounted to Rp687.29 billion or an increase of 12.95% compared to previous year with Rp608.48 billion.

dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lain
in millions of Rupiah, unless otherwise stated

Uraian Description	Nilai Amount		Naik (Turun) Increase (Decrease)		Komposisi Composition		Nilai Amount
	2025	2024	Nilai Amount	%	2025	2024	2023
Kas dan Setara Kas Cash and Cash Equivalents	257.793	346.766	(88.973)	(25,66%)	37,51%	56,99%	236.518
Kas yang Dibatasi Penggunaannya Restricted Cash	21.693	28.982	(7.289)	(25,15%)	3,16%	4,76%	25.765
Piutang Usaha Account Receivable	99.123	86.671	12.452	(14,37%)	14,42%	14,24%	63.148

dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lain
in millions of Rupiah, unless otherwise stated

Uraian Description	Nilai Amount		Naik (Turun) Increase (Decrease)		Komposisi Composition		Nilai Amount
	2025	2024	Nilai Amount	%	2025	2024	2023
Piutang Lain-Lain Other Receivables	1.819	382	1.437	376,18%	0,26%	0,06%	1.305
Aset Lancar Lainnya Other Current Assets	306.865	145.676	161.189	110,65%	44,65%	23,94%	94.928
Jumlah Aset Lancar Total Current Assets	687.293	608.477	78.816	12,95%	100,00%	100,00%	496.664

ASET TIDAK LANCAR

Aset tidak lancar tahun 2025 tercatat Rp748,15 miliar atau naik 0,07% dari tahun sebelumnya sebesar Rp747,65 miliar.

NON-CURRENT ASSETS

Non-current Assets in 2025 amounted to Rp748.15 billion or an increase of 0.07 compared to previous year with Rp747.65 billion.

dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lain
in millions of Rupiah, unless otherwise stated

Uraian Description	Nilai Amount		Naik (Turun) Increase (Decrease)		Komposisi Composition		Nilai Amount
	2025	2024	Nilai Amount	%	2025	2024	2023
Investasi pada Entitas Asosiasi Investment in Associates	260.700	251.861	8.839	3,51%	34,85%	33,69%	227.824
Pajak dibayar di muka Prepaid taxes	-	-	-	-	-	-	2.308
Properti Investasi Investment Properties	209.425	210.614	(1.189)	(0,56%)	27,99%	28,17%	214.273
Aset Tetap Fixed Assets	262.955	256.822	6.133	2,39%	35,15%	34,35%	249.838
Aset Pajak Tangguhan Assets Deferred Tax Assets	5.477	4.191	1.286	30,68%	0,73%	0,56%	3.635
Uang Muka dan Beban Dibayar di Muka Down Payments and Prepaid Expenses	-	-	-	-	-	-	-
Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya Other Non-Current Financial Assets	344	14.915	(14.571)	(97,69%)	0,05%	1,99%	15.815
Goodwill Goodwill	9.244	9.244	0	0%	1,24%	1,24%	9.244
Jumlah Total	748.145	747.647	498	0,07%	100,00%	100,00%	722.937

LIABILITAS

Liabilitas Perusahaan terdiri dari liabilitas jangka pendek dan jangka panjang. Pada tahun 2025 tercatat Rp160,73 miliar atau naik 16,70% dari tahun sebelumnya sebesar Rp137,73 miliar.

LIABILITIES

The Company's liabilities consist of current and non-current liabilities. In 2025, this amounted to Rp160.73 billion, an increase of 16.70% compared to Rp137.73 billion in the previous year.

Komposisi liabilitas tahun 2025 terdiri dari 87,20% liabilitas jangka pendek dan 12,80% liabilitas jangka panjang. Sedangkan pada tahun 2024, komposisi liabilitas terdiri dari 91% liabilitas jangka pendek dan 9% liabilitas jangka panjang.

The composition of liabilities in 2025 consisted of 87.20% current liabilities and 12.80% non-current liabilities. Meanwhile, in 2024, the composition of liabilities comprised 91% current liabilities and 9% non-current liabilities.

dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lain
in millions of Rupiah, unless otherwise stated

Uraian Description	Nilai Amount		Naik (Turun) Increase (Decrease)		Komposisi Composition		Nilai Amount
	2025	2024	Nilai Amount	%	2025	2024	2023
Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities	140.157	125.369	14.788	11,80%	87,20%	91,03%	84.273
Liabilitas Jangka Panjang Non-Current Liabilities	20.577	12.358	8.219	66,51%	12,80%	8,97%	13.881
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	160.734	137.727	23.007	16,70%	100,00%	100,00%	98.154

EKUITAS

Total ekuitas tahun 2025 tercatat Rp1.274,70 miliar atau naik 4,62% dari tahun sebelumnya sebesar Rp1.218,40 miliar.

EQUITY

In 2025, total equity amounted to Rp1,274.70 billion, an increase of 4.62% compared to previous year with Rp1,218.40 billion.

dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lain
in millions of Rupiah, unless otherwise stated

Uraian Description	Nilai Amount		Naik (Turun) Increase (Decrease)		Komposisi Composition		Nilai Amount
	2025	2024	Nilai Amount	%	2025	2024	2023
Modal Saham Share Capital	58.307	58.307	0	0%	4,57%	4,79%	58.307
Saldo Laba Retained Earnings	1.034.469	973.126	61.343	6,30%	81,15%	79,87%	883.259
Ekuitas Lainnya Other Equity	(27.063)	(27.063)	0	0%	(2,12%)	(2,22%)	(27.063)
Penghasilan Komprehensif Lainnya Other Comprehensive Income	170.228	179.744	(9.516)	(5,29%)	13,35%	14,75%	181.741
Kepentingan Non Pengendali Non Controlling Interest	38.763	34.283	4.480	13,07%	3,04%	2,81%	25.203
Jumlah Total	1.274.704	1.218.397	56.307	4,62%	100,00%	100,00%	1.121.447

LAPORAN ARUS KAS

Pada tahun 2025, saldo kas dan setara kas Perusahaan tercatat sebesar Rp257,80 miliar pada akhir tahun, menurun dibandingkan saldo awal tahun sebesar Rp346,77 miliar.

CASH FLOWS STATEMENT

In 2025, the Company's cash and cash equivalents balance amounted to Rp257.80 billion at the end of the year, a decrease compared to the beginning balance of Rp346.77 billion.

ARUS KAS KONSOLIDASIAN
CONSOLIDATED CASH FLOWS

dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lain
in millions of Rupiah, unless otherwise stated

Uraian Description	Nilai Amount		Naik (Turun) Increase (Decrease)		Nilai Amount
	2025	2024	Nilai Amount	%	2023
Arus Kas dari (digunakan untuk) Aktivitas Operasi Cash Flows From (used in) Operating Activities	94.867	86.476	8.391	9,70%	82.265
Arus Kas dari (digunakan untuk) Aktivitas Investasi Cash Flows From (used in) Investing Activities	(138.513)	23.855	(162.368)	(680,65%)	(68.983)
Arus Kas dari (digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan Cash Flows From (used in) Financing Activities	(45.284)	(34)	(45.250)	133.088,24%	(7.529)
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas Net Increase (Decrease) in Cash and Cash Equivalents	(88.930)	110.297	(199.227)	(180,63%)	5.753
Pengaruh Perubahan Kurs Mata Uang Asing Effect of Foreign Exchange Rate Change	(43)	(49)	6	(12,24%)	(23)
Kas dan Setara Kas pada Awal Tahun Cash and Cash Equivalents at the Beginning of the Year	346.766	236.518	110.248	46,61%	230.788
Kas dan Setara Kas pada Akhir Tahun Cash and Cash Equivalents at the End of the Year	257.793	346.766	(88.930)	(25,66%)	236.518

ARUS KAS DIGUNAKAN UNTUK AKTIVITAS INVESTASI
CASH FLOWS USED IN INVESTING ACTIVITIES

dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lain
in millions of Rupiah, unless otherwise stated

Uraian Description	2025	2024
Perolehan Aset Tetap Acquisition of Fixed Assets	(36.493)	(21.164)
Arus Kas dari (digunakan untuk) Aktivitas Investasi Cash Flows from (used in) Investing Activities	(138.513)	23.855

ARUS KAS DIGUNAKAN UNTUK AKTIVITAS KEUANGAN
CASH FLOWS USED IN FINANCING ACTIVITIES

dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lain
in millions of Rupiah, unless otherwise stated

Uraian Description	2025	2024
Penerimaan Pinjaman Jangka Pendek Proceeds from Short-Term Loans	16.040	22.974
Pembayaran Pinjaman Jangka Pendek Repayment of Short-Term Loans	(20.638)	(18.203)
Penerimaan Pinjaman Jangka Panjang Proceeds from Long-Term Loans	6.156	-
Pembayaran Pinjaman Jangka Panjang Repayment of Long-Term Loans	(1.651)	(2.176)

ARUS KAS DIGUNAKAN UNTUK AKTIVITAS KEUANGAN
CASH FLOWS USED IN FINANCING ACTIVITIES

dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lain
in millions of Rupiah, unless otherwise stated

Uraian Description	2025	2024
Pembayaran Dividen Payment of Dividend	(43.188)	(2.246)
Pembayaran Liabilitas Sewa Payment of Lease Liabilities	(2.003)	(383)
Arus Kas dari (digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan Cash Flows from (used in) Financing Activities	(45.284)	(34)

Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan: Solvabilitas, Likuiditas, dan Kolektibilitas
Analysis of Company Financial Performance: Solvency, Liquidity and Collectibility

ASPEK SOLVABILITAS

Dalam rangka menjaga kemampuan membayar utang, manajemen memiliki kebijakan berupa evaluasi berkala terhadap rasio *Debt to Equity Ratio, Debt to Asset Ratio,* dan *Interest Coverage Ratio*

SOLVENCY ASPECT

In maintaining the Company's ability to meet its obligations, management implements policies in the form of periodic evaluations of key financial ratios, including the Debt to Equity Ratio, Debt to Asset Ratio, and Interest Coverage Ratio.

dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lain
in millions of Rupiah, unless otherwise stated

Uraian Description	Nilai Amount		Naik (Turun) Increase (Decrease)		Nilai Amount
	2025	2024	Nilai Amount	%	2023
Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities	140.157	125.369	14.788	11,80%	84.273
Liabilitas Jangka Panjang Non-Current Liabilities	20.577	12.358	8.219	66,51%	13.881
Jumlah Ekuitas yang Dapat Diatribusikan Total Equity Attributable to	1.235.941	1.184.114	51.826	4,38%	1.096.244
Kepentingan Non Pengendali Non-Controlling Interest	38.763	34.283	4.480	13,07%	25.203
Total Liabilitas dan Ekuitas Total Liabilities and Equity	1.435.438	1.356.124	79.314	5,85%	1.219.601

ASPEK LIKUIDITAS

Dalam rangka menjaga tingkat likuiditas dalam batas wajar, Perusahaan memiliki kebijakan berupa evaluasi berkala terhadap kondisi kas, termasuk profil jatuh tempo pinjaman serta mencermati kondisi pasar keuangan untuk memperoleh fasilitas pinjaman dengan bunga yang ekonomis. Selain itu,

LIQUIDITY ASPECT

In maintaining liquidity at an adequate level, the Company implements policies involving periodic evaluations of cash conditions, including the loan maturity profile, as well as monitoring financial market conditions to obtain financing facilities at competitive interest rates. In addition, the Company

Perusahaan juga memiliki fasilitas *stand-by loan* yang dapat digunakan sesuai permintaan untuk mendanai kegiatan operasional pada saat diperlukan.

maintains stand-by loan facilities that can be utilized as needed to support operational activities when required.

dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lain
in millions of Rupiah, unless otherwise stated

Uraian Description	Nilai Amount		Naik (Turun) Increase (Decrease)		Nilai Amount
	2025	2024	Nilai Amount	%	2023
Rasio Lancar Current Ratio	490%	485%	5,37%	1%	589%
Rasio Cepat Quick Ratio	409%	414%	(5,25%)	(1%)	484%
Rasio Kas Cash Ratio	184%	277%	(93,07%)	(0,34%)	281%

KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG DAN TINGKAT KOLEKTIBILITAS PIUTANG

ABILITY TO PAY DEBT AND RECEIVABLES COLLECTIBILITY LEVEL

ASPEK KOLEKTIBILITAS

Dalam rangka menjaga tingkat kolektibilitas piutang dan meminimalkan eksposur risiko kredit, Perusahaan memiliki kebijakan yang selektif dalam mengusahakan seluruh transaksi penjualan dengan cash atau dengan jaminan yang meminimalkan penjualan kredit.

COLLECTIBILITY ASPECT

In maintaining receivables collectibility and minimizing credit risk exposure, the Company implements a selective policy by prioritizing sales transactions on a cash basis or requiring adequate guarantees to limit credit sales.

Uraian Description	Nilai Amount		Naik (Turun) Increase (Decrease)		Nilai Amount
	2025	2024	Nilai Amount	%	2023
Hari Pelunasan Rata-Rata Piutang Usaha Average Payment Days of Accounts Receivable	58	53	5	9,43%	61

ASPEK PROFITABILITAS

Dalam rangka tingkat profitabilitas Perusahaan, ukuran yang dievaluasi adalah margin operasi, margin laba bersih, EBITDA (*earning before interest, tax, depreciation and amortisation*).

PROFITABILITY ASPECT

In assessing the Company's level of profitability, the key metrics evaluated include operating margin, net profit margin, and EBITDA (earnings before interest, tax, depreciation, and amortization)

Uraian Description	Nilai Amount		Naik (Turun) Increase (Decrease)		Nilai Amount
	2025	2024	Nilai Amount	%	2023
Rasio Laba (Rugi) terhadap Aset (%) Return on Asset Ratio (%)	8%	7%	0,80%	111%	6%
Rasio Laba (Rugi) terdapat Ekuitas (%) Return on Equity Ratio (%)	9%	8%	0,79%	110%	7%
Rasio Laba (Rugi) terhadap Investasi (%) Return on Investment Ratio (%)	8%	7%	0,80%	111%	6%

Uraian Description	Nilai Amount		Naik (Turun) Increase (Decrease)		Nilai Amount
	2025	2024	Nilai Amount	%	2023
Rasio Laba (Rugi) terhadap Pendapatan (%) Net Profit Margin Ratio (%)	22%	20%	1,54%	108%	20%
Margin Operasi (%) Operating Margin (%)	21%	20%	(6,44%)	68%	20%
Margin Laba Kotor (%) Gross Profit Margin (%)	26%	23%	2,58%	104%	25%

ASPEK PERPUTARAN/ AKTIVITAS

Dalam aspek perputaran/aktivitas ini, Perusahaan menerapkan kebijakan penilaian yakni melakukan evaluasi terhadap persediaan akhir Perusahaan dan aset-aset *idle* Perusahaan yang nantinya akan dijadikan bahan evaluasi evaluasi terhadap tingkat perputaran persediaan dan perputaran aset.

ACTIVITY/TURNOVER ASPECT

Under the activity/turnover aspect, the Company implements an assessment policy by evaluating ending inventory and idle assets, which serve as the basis for assessing inventory turnover and asset turnover levels.

Uraian Description	Nilai Amount		Naik (Turun) Increase (Decrease)		Nilai Amount
	2025	2024	Nilai Amount	%	2023
Perputaran Persediaan (hari) Inventory Turnover (days)	96	84	12	14,29%	112
Rata-rata Penerimaan Piutang (hari) Average Receipt of Receivables (days)	58	53	5	9,43%	61
Perputaran Total Aset (%) Total Asset Turnover (%)	36%	37%	(1%)	(2,70%)	31%

Struktur Modal dan Kebijakan Manajemen Atas Struktur Modal

Capital Structure and Management Policy on Capital Structure

KEBIJAKAN MANAJEMEN ATAS STRUKTUR MODAL PERUSAHAAN

Dalam pengelolaan modal Perusahaan, Manajemen menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memastikan struktur modal yang optimal bagi Pemegang Saham, efisiensi penggunaan modal berdasarkan kondisi kas operasi dan belanja modal, serta mempertimbangkan kebutuhan modal di masa mendatang untuk mempertahankan kelangsungan usaha. Dasar pemilihan kebijakan tersebut adalah pertimbangan kondisi bisnis, tingkat pengembalian investasi, dan dividen yang dibagikan. Selain itu, Manajemen juga berusaha mempertahankan keseimbangan antara tingkat pinjaman dan posisi ekuitas untuk memastikan struktur modal yang optimal. Informasi mengenai efek dan obligasi tidak tersedia karena Perusahaan tidak mencatatkan sahamnya di pasar saham mana pun serta tidak menerbitkan obligasi atau sukuk.

MANAGEMENT POLICY ON THE COMPANY'S CAPITAL STRUCTURE

In managing the Company's capital, Management applies the principle of prudence to ensure an optimal capital structure for Shareholders, efficient utilization of capital based on operating cash flow and capital expenditure, and consideration of future capital requirements to sustain business continuity. The policy is determined by considering business conditions, return on investment, and dividend distribution. In addition, Management strives to maintain a balance between debt levels and equity position to ensure an optimal capital structure. Information regarding securities and bonds is not available, as the Company is not listed on any stock exchange and does not issue bonds or sukuk.

dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lain
in millions of Rupiah, unless otherwise stated

Uraian Description	**Nilai** Amount		**Komposisi** Composition		**Nilai** Amount
	2025	**2024**	**2025**	**2024**	**2023**
Kewajiban Liabilities	160.734	137.727	11,20%	10%	98.154
Kewajiban Jangka Pendek Short-Term Liabilities	140.157	125.369	9,76%	9%	84.273
Kewajiban Jangka Panjang Long-Term Liabilities	20.577	12.358	1,43%	1%	13.881
Ekuitas Equity	1.274.704	1.218.397	88,80%	90%	1.121.447
Total Kewajiban dan Ekuitas Total Liabilities and Equity	1.435.438	1.356.124	100,00%	100%	1.219.601
Perbandingan Kewajiban: Ekuitas Comparison of Liabilities: Equity	1:8	1:9	-	-	1:10

Ikatan Material Untuk Investasi Barang Modal
Material Commitment for Capital Expenditure

Sampai dengan 31 Desember 2025, tidak ada ikatan material untuk investasi barang modal di Perusahaan. Perikatan yang dilakukan tidak bersifat material dan bersifat rutin.

As of December 31, 2025, there was no material commitment for capital expenditure in the Company. Commitments made are not material and routine in nature.

Investasi Barang Modal, Divestasi, dan Restrukturisasi
Information On Capital Expenditure, Divestment and Restructuring

Sampai dengan 31 Desember 2025, tidak ada investasi barang modal, divestasi, dan restrukturisasi di Perusahaan, investasi yang dilakukan tidak bersifat material dan bersifat rutin.

1. Investasi penyertaan
   Sampai dengan 31 Desember 2025 belum terdapat realisasi investasi penyertaan.
2. Investasi pengembangan
   Sampai dengan 31 Desember 2025 terdapat realisasi investasi pengembangan sebesar Rp11,38 miliar.
3. Investasi rutin
   Pada bulan Desember 2025 realisasi investasi rutin sebesar Rp16,81 miliar.

As of December 31, 2025, there were no material capital expenditures, divestments, or restructuring activities within the Company. Investments undertaken were non-material and routine in nature.

1. Equity Investment
   As of December 31, 2025, there was no realization of equity investment.
2. Development Investment
   As of December 31, 2025, development investment realization amounted to Rp11.38 billion.
3. Routine Investment
   In December 2025, the realization of routine investment amounted to Rp16.81 billion.

Informasi Keuangan yang Mengandung Kejadian yang Bersifat Luar Biasa dan Jarang Terjadi
Financial Information Containing Extraordinary and Rare Events

Sampai dengan 31 Desember 2025 tidak terdapat informasi keuangan yang mengandung kejadian yang bersifat luar biasa dan jarang terjadi.

As of December 31, 2025, there was no financial information containing extraordinary and infrequent events.

Dampak Perubahan Harga yang Berpengaruh Terhadap Pendapatan dan Kinerja Perusahaan
The Impact of Price Changes on Revenue and Company Performance

Sampai dengan 31 Desember 2025 tidak terdapat perubahan harga yang berpengaruh terhadap pendapatan dan kinerja Perusahaan.

As of December 31, 2025, there were no price changes that affected the Company's revenue and performance.

Informasi dan Fakta Material yang Terjadi Setelah Tanggal Laporan Akuntan
Material Information and Facts Occurred After the Accounting Report Date

Sampai dengan 31 Desember 2025 tidak terdapat informasi dan fakta material yang terjadi antara periode setelah tanggal laporan akuntan hingga tanggal disahkannya Laporan Tahunan ini.

As of December 31, 2025, there were no material information or facts occurring in the period after the date of the accountant's report up to the date of approval of this Annual Report.

Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025
Comparison of Targets and Realization in 2025

dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lain
in millions of Rupiah, unless otherwise stated

Uraian Description	**Realisasi 2025** 2025 Realization	**Pencapaian (%)** Achievement (%)
Laporan Laba (Rugi) Komprehensif Comprehensive Profit (Loss) Statement		
Pendapatan Revenue	520.047	95,71%
Beban Pokok Pendapatan Cost of Revenue	(387.006)	90,91%
Laba Kotor Gross Profit	133.041	113,10%
Beban Umum General Expenses	(62.529)	98,65%
Pendapatan (Beban) Lain Other Income (Expense)	55.582	98,26%
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan (Laba Bruto) Profit (Loss) Before Income Tax (Gross Profit)	126.094	113,80%
Pajak Penghasilan Income Tax	(14.061)	130,15%

POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN DAN STRUKTUR MODAL
CONSOLIDATED FINANCIAL POSITION AND CAPITAL STRUCTURE

dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lain
in millions of Rupiah, unless otherwise stated

Uraian Description	**Realisasi 2025** 2025 Realization	**Pencapaian (%)** Achievement (%)
Aset Lancar Current Assets	687.293	110,66%
Aset Tidak Lancar Non- Current Assets	748.145	84,63%
Jumlah Aset Total Assets	1.435.438	95,37%
Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities	140.157	100,42%
Liabilitas Jangka Panjang Non-Current Liabilities	20.577	35,03%
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	160.734	81,05%
Jumlah Ekuitas Total Equity	1.274.704	97,55%
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas Total Liabilities and Equity	1.435.438	95,37%



Proyeksi Usaha Tahun 2026
2026 Business Outlook

Mengawali tahun 2026, perekonomian nasional dan global menunjukkan arah pertumbuhan yang lebih stabil dan adaptif sebagai hasil penyesuaian terhadap tantangan geopolitik serta transformasi struktural global. Kinerja sektor manufaktur dan realisasi investasi, khususnya pada pembangunan infrastruktur strategis, diproyeksikan terus meningkat, didorong oleh keberlanjutan kebijakan pemerintah, penguatan iklim investasi, serta akselerasi adopsi teknologi yang meningkatkan efisiensi dan daya saing industri. Kondisi ini membuka peluang yang signifikan bagi pengembangan kawasan industri sebagai simpul utama aktivitas ekonomi dan manufaktur.

Entering 2026, both the national and global economies are expected to demonstrate more stable and adaptive growth, reflecting adjustments to geopolitical challenges and ongoing global structural transformation. The performance of the manufacturing sector and investment realization, particularly in strategic infrastructure development, is projected to continue improving, supported by sustained government policies, a strengthening investment climate, and accelerated adoption of technologies that enhance efficiency and industrial competitiveness. These conditions present significant opportunities for the development of industrial estates as key hubs of economic and manufacturing activities.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2026 diperkirakan tetap ditopang oleh permintaan domestik yang solid, peningkatan mobilitas dan aktivitas ekonomi, serta keberlanjutan penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN). Momentum ini dimanfaatkan oleh Perusahaan untuk menangkap peluang pasar melalui penyediaan produk dan layanan yang relevan, kompetitif, serta selaras dengan kebutuhan investor dan *end-user*.

Indonesia's economic growth in 2026 is expected to remain supported by solid domestic demand, increased mobility and economic activities, as well as the continued completion of National Strategic Projects (PSN). The Company leverages this momentum to capture market opportunities by offering relevant, competitive products and services aligned with the needs of investors and end-users.

Sebagai pengelola kawasan industri, KIE berkomitmen untuk terus memperkuat perannya sebagai mitra strategis bagi pelaku industri nasional maupun internasional. Optimisme tersebut didukung oleh prospek pertumbuhan sektor manufaktur dan peningkatan investasi industri yang diperkirakan berlanjut seiring dengan penguatan fundamental ekonomi global dan domestik, serta meningkatnya minat terhadap kawasan industri yang terintegrasi dan berkelanjutan.

As an industrial estate management, KIE remains committed to strengthening its role as a strategic partner for national and international industry players. This optimism is supported by the projected growth of the manufacturing sector and increasing industrial investment, in line with strengthening global and domestic economic fundamentals and rising demand for integrated and sustainable industrial estates.

Pengembangan kawasan industri tidak hanya berfokus pada penataan dan pertumbuhan industri pengolahan (manufaktur), tetapi juga mencakup pengembangan kegiatan pendukung seperti pergudangan (*warehousing*), pusat logistik dan distribusi, aktivitas perdagangan, serta layanan bernilai tambah lainnya. Selain itu, peningkatan kualitas fasilitas dan infrastruktur kawasan meliputi akses jalan, pasokan listrik, ketersediaan air bersih, serta layanan digital menjadi prioritas utama guna mendukung kelancaran dan efisiensi operasional industri. Perusahaan juga akan terus memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan pemerintah serta mitra strategis dalam rangka mendorong masuknya investasi asing dan domestik yang berkelanjutan.

Industrial estate development is not solely focused on the expansion of manufacturing activities but also encompasses supporting activities such as warehousing, logistics and distribution centers, trading activities, and other value-added services. In addition, improving the quality of estate facilities and infrastructure, including road access, electricity supply, clean water availability, and digital services, remains a top priority to ensure operational efficiency. The Company will also continue to strengthen synergies and collaboration with the government and strategic partners to attract foreign and domestic sustainable investments.

Aspek Pemasaran
Marketing Aspect

Pada tahun 2025, kegiatan pemasaran Perusahaan difokuskan pada optimalisasi sumber pendapatan melalui penguatan lini bisnis utama yang mencakup sektor beton siap pakai (*Ready Mix Concrete*/RMC), properti, trading, serta pengelolaan kawasan industri. Pendekatan pemasaran dilakukan secara terintegrasi dengan menyesuaikan kebutuhan pasar dan karakteristik masing-masing segmen usaha.

Pada lini bisnis beton siap pakai, Perusahaan mencatat realisasi suplai RMC sebesar 32.864m³. Pencapaian ini mencerminkan keberlanjutan permintaan dari proyek-proyek konstruksi serta upaya Perusahaan dalam menjaga kualitas produk dan keandalan distribusi. Strategi pemasaran pada segmen ini difokuskan pada penguatan hubungan dengan pelanggan eksisting serta perluasan pasar melalui peningkatan daya saing produk.

Di sektor properti, Perusahaan mengembangkan berbagai sumber pendapatan melalui penyewaan dan pengelolaan aset, meliputi sewa gedung kantor, sewa gudang dan jasa pengelolaan gudang, serta penjualan dan penyewaan lahan dan rumah. Selain itu, Perusahaan juga mengoptimalkan kontribusi dari unit usaha strategis, termasuk pengelolaan SBU Grand Equator Hotel (GEH). Diversifikasi portofolio properti tersebut menjadi salah satu pilar dalam menjaga stabilitas pendapatan Perusahaan.

Sementara itu, pada pengelolaan kawasan industri, Perusahaan menyediakan layanan yang terintegrasi untuk mendukung aktivitas tenant, antara lain pemeliharaan infrastruktur kawasan seperti akses jalan, pengelolaan limbah cair, serta penyediaan air bersih untuk kebutuhan industri. Layanan ini diberikan kepada tenant di kawasan industri serta pihak terkait lainnya, sehingga memperkuat posisi Perusahaan sebagai pengelola kawasan industri yang memberikan nilai tambah bagi ekosistem industri.

Melalui pengelolaan kegiatan pemasaran yang terdiversifikasi dan terintegrasi, Perusahaan berupaya untuk meningkatkan kontribusi masing-masing lini bisnis sekaligus memperkuat daya saing dalam mendukung pertumbuhan pendapatan secara berkelanjutan.

In 2025, the Company's marketing activities focused on optimizing revenue streams through strengthening its core business lines, including Ready Mix concrete (RMC), property, trading, and industrial estate management. The marketing approach was implemented in an integrated manner by aligning with market needs and the characteristics of each business segment.

In the ready mix concrete segment, the Company recorded an RMC supply realization of 32,864 m³. This achievement reflects sustained demand from construction projects and the Company's efforts to maintain product quality and reliable distribution. Marketing strategies in this segment focus on strengthening relationships with existing customers while expanding market reach through enhanced product competitiveness.

In the property sector, the Company diversified its revenue streams through leasing and asset management, including office building rentals, warehouse leasing and management services, as well as land and housing sales and rentals. In addition, the Company optimized contributions from strategic business units, including the management of the Grand Equator Hotel (GEH). This diversified property portfolio serves as a key pillar in maintaining revenue stability.

Meanwhile, in industrial estate management, the Company provides integrated services to support tenant activities, including infrastructure maintenance such as road access, effluent management, and clean water supply for industrial needs. These services are delivered to tenants within the industrial estate and other related parties, reinforcing the Company's position as an industrial estate operator that delivers added value to the industrial ecosystem.

Through diversified and integrated marketing management, the Company aims to enhance the contribution of each business line while strengthening competitiveness to support sustainable revenue growth.

Informasi Kelangsungan Usaha
Information on Business Continuity

Perusahaan memandang bahwa kelangsungan usaha tetap terjaga dengan baik, didukung oleh kinerja positif pada sebagian besar lini bisnis yang mampu mencapai dan melampaui target, serta peningkatan profitabilitas pada beberapa pilar utama. Hal ini mencerminkan kemampuan Perusahaan dalam memanfaatkan peluang pasar dan mengoptimalkan sumber pendapatan.

Di sisi lain, Perusahaan tetap menghadapi sejumlah tantangan, antara lain belum optimalnya pencapaian pada beberapa lini usaha serta adanya tekanan biaya operasional. Untuk itu, Perusahaan terus melakukan penguatan strategi melalui peningkatan efektivitas pemasaran, optimalisasi operasional, serta pengendalian biaya secara disiplin.

Dengan kondisi tersebut, Manajemen meyakini bahwa Perusahaan memiliki kemampuan yang memadai untuk mempertahankan kelangsungan usaha dan mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan.

The Company believes that its business continuity remains well maintained, supported by positive performance across most business lines that have achieved and exceeded targets, as well as improved profitability in several key pillars. This reflects the Company's ability to capitalize on market opportunities and optimize its revenue sources.

Conversely, the Company continues to face several challenges, including suboptimal performance in certain business lines and pressures on operational costs. To address these challenges, the Company continues to strengthen its strategy through enhanced marketing effectiveness, operational optimization, and disciplined cost control.

Based on these conditions, Management is confident that the Company has adequate capability to sustain its business continuity and support sustainable growth.

Uraian Dividen
Dividend Description

KEBIJAKAN DIVIDEN

Peraturan dan perundangan yang berlaku di Indonesia mengatur mengenai penggunaan laba dan berkaitan dengan kebijakan dividen yang dituangkan berdasarkan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas khususnya Pasal 70 dan 71 sebagaimana berikut:

PASAL 70

1. Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan.
2. Kewajiban penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.
3. Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai cadangan mencapai paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor.
4. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dapat dipenuhi oleh cadangan lain.

DIVIDEND POLICY

Applicable laws and regulations in Indonesia govern the use of profits and dividend policy as stipulated under Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies, particularly Articles 70 and 71, as follows:

ARTICLE 70

1. The Company is obliged to allocate a certain portion of its net profit each fiscal year to reserves.
2. The obligation to allocate reserves as in paragraph (1) applies if the Company has a positive retained earnings balance.
3. The allocation of net profit as stated in paragraph (1) shall be carried out until the reserves reach at least 20% (twenty percent) of the issued and paid-up capital.
4. Reserves as referred to in paragraph (1) that have not yet reached the required level may only be used to cover losses that cannot be covered by other reserves.

PASAL 71

1. Penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) diputuskan oleh RUPS.
2. Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen, kecuali ditentukan lain dalam RUPS.
3. Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.

ARTICLE 71

1. The use of net profit, including the determination of the amount allocated to reserves as referred to in Article 70 paragraph (1), shall be decided by the GMS.
2. All net income after deduction for reserves as stated in Article 70 paragraph (1) shall be distributed to shareholders as dividends, unless otherwise decided by the GMS.
3. Dividends as stated in paragraph (2) may only be distributed if the Company has a positive retained earnings balance.

Uraian Description	Nilai Amount		Naik (Turun) Increase (Decrease)		Nilai Amount
	2025	2024	Nilai Amount	%	2023
Laba Bersih Net Profit	112.033	101.434	10.599	10,45%	77.668
Rasio Pembayaran Dividen Dividend Payout Ratio	34,51%	-	(34,51%)	100%	-
Dividen yang dibagikan Distributed Dividend	35.000	-	35.000	100%	-
Jumlah Saham Total Shares	58.307	58.307	-	0%	58.307
Dividen Kas per Saham Cash Dividend per Share	0,60	-	0,60	100%	-

Informasi Material Untuk Investasi, Ekspansi, Divestasi, Penggabungan/Peleburan Usaha, Akuisisi, dan Restrukturisasi Utang/Modal

Material Information on Investment, Expansion, Divestment, Merger/Consolidation, Acquisition, and Debt/Capital Restructuring

Sampai dengan 31 Desember 2025 tidak terdapat informasi material terkait investasi, ekspansi, divestasi, penggabungan usaha, akuisisi, serta restrukturisasi utang/modal.

As of December 31, 2025, there was no material information related to investment, expansion, divestment, merger/consolidation, acquisition, or debt/capital restructuring.

Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi Dengan Pihak Afiliasi/Pihak Berelasi

Information on Material Transactions Containing Conflicts of Interest or Transactions with Affiliated/Related Parties

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, Perusahaan melakukan berbagai transaksi, baik yang bersifat usaha maupun non-usaha, dengan pihak-pihak berelasi yang memiliki hubungan afiliasi dengan Perusahaan melalui kepemilikan langsung maupun tidak langsung, serta/atau berada di bawah pengendalian pihak yang sama. Penentuan harga jual maupun harga beli dalam transaksi dengan pihak berelasi tersebut didasarkan pada kesepakatan yang telah disetujui oleh masing-masing pihak, yang dapat berbeda dengan ketentuan transaksi yang dilakukan dengan pihak yang tidak memiliki hubungan berelasi.

In the course of its operations, the Company engages in various transactions, both business and non-business in nature, with related parties that have an affiliated relationship with the Company through direct or indirect ownership and/or are under common control. The determination of selling and purchasing prices in transactions with related parties is based on mutual agreement between the parties, which may differ from the terms applied in transactions with non-related parties.

Informasi mengenai nama pihak terkait, bentuk hubungan, serta dasar dilakukannya Transaksi Pihak Afiliasi dapat dilihat pada Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian nomor 24 mengenai Informasi Pihak Berelasi, yang disajikan sesuai dengan ketentuan PSAK No. 224.

Information regarding the names of related parties, the nature of the relationships, and the basis for conducting related party transactions is disclosed in Note 24 to the Consolidated Financial Statements on Related Party Information, presented in accordance with PSAK No. 224.

Rincian nama pihak, sifat hubungan dan alasan dilakukan Transaksi Pihak Afiliasi dapat dilihat pada Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian poin ke-24 tentang Informasi Pihak Berelasi dan disajikan sesuai dengan PSAK No. 224. Berikut informasi pihak-pihak berelasi berdasarkan sifat hubungan dan sifat transaksi.

Details of the related parties, the nature of relationships, and the rationale for conducting such transactions are also presented in Note 24 to the Consolidated Financial Statements on Related Party Information, in accordance with PSAK No. 224. The following provides information on related parties based on the nature of relationships and transactions.

Sifat Hubungan Nature of Relationship	**Entitas Berelasi** Related Party	**Jenis Transaksi** Type of Transaction
Entitas Berelasi Dengan Pemerintah Government-Related Entities	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Penempatan giro, penempatan deposito, kredit investasi, kas yang dibatasi penggunaannya dan pendapatan sewa. Current account placements, time deposits, investment loans, restricted cash, and rental income.
	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Penempatan giro, penempatan deposito dan pendapatan sewa. Current account placements, time deposits, and rental income.
	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Penempatan giro, penempatan deposito, kas yang dibatasi penggunaannya, kredit modal kerja dan pendapatan sewa. Current account placements, time deposits, restricted cash, working capital loans, and rental income.

Sifat Hubungan Nature of Relationship	Entitas Berelasi Related Party	Jenis Transaksi Type of Transaction
	PT Bank Syariah Indonesia Tbk	Penempatan giro dan penempatan deposito, kredit modal penempatan giro dan penempatan deposito, kredit modal kerja. Current account and time deposit placements, financing for current account and time deposit placements, and working capital loans.
	PT Bank Tabungan Negara Tbk	Penempatan deposito. Time deposit placements.
	PT Mandiri Tunas Finance	Kredit investasi. Investment loans.
Entitas Induk Parent Entity	PT Pupuk Kalimantan Timur	Pendapatan sewa, jasa pengelolaan gudang dan pembelian bahan baku serta beban umum dan administrasi. Rental income, warehouse management services, raw material purchases, and general and administrative expenses.
Entitas Sepengendali Entities Under Common Control	PT Pupuk Indonesia Logistik	Pendapatan tenaga alih daya dan jasa pengelolaan gudang. Outsourced manpower services income and warehouse management services.
	PT Petrokimia Gresik	Pendapatan sewa, jasa pengelolaan gudang dan pembelian bahan baku serta beban umum dan administrasi. Rental income, warehouse management services, raw material purchases, and general and administrative expenses.
	PT Pupuk Sriwijaya Palembang	Pendapatan jasa pengelola Gudang dan sewa. Warehouse management services and rental income.
	PT Yasa Industri Nusantara	Pendapatan atas ready-mix concrete. Ready-mix concrete revenue.
	PT Pupuk Kujang Cikampek	Pendapatan jasa pelayanan bongkar muat. Stevedoring services revenue.
	PT Kaltim Amonium Nitrat	Pendapatan sewa, jasa pengelolaan gudang dan pembelian bahan baku serta beban umum dan administrasi. Rental income, warehouse management services, raw material purchases, and general and administrative expenses.
Entitas Asosiasi Associates	PT Bintang Sintuk Hotel	Penyertaan saham. Equity investment.
	PT Kaltim Daya Mandiri	Penyertaan saham, pendapatan sewa dan beban pokok pendapatan atas penyaluran listrik. Equity investment, rental income, and cost of revenue from electricity distribution.
	PT Kaltim Medika Utama	Penyertaan saham dan utang usaha atas jasa medis. Equity investment and trade payables for medical services.
Personal Manajemen Kunci Key Management Personnel	Dewan Komisaris dan Direksi Board of Commissioners and Board of Directors	Gaji dan Imbalan Kerja. Salaries and employee benefits.

Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Realization of the Use of Public Offering Proceedings

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 Perusahaan tidak melaksanakan penawaran obligasi atau efek keuangan lain. Dengan demikian, informasi seputar total perolehan dana, rencana dan rincian penggunaan dana, saldo dana, serta tanggal persetujuan RUPS/RUPO atas perubahan penggunaan dana tidak tersedia.

As of December 31, 2025, the Company did not conduct any public offering of bonds or other financial instruments. Accordingly, information regarding total proceeds, planned and detailed use of funds, remaining balances, and the dates of approval by the GMS/RUPO for any changes in the use of proceeds is not available.

Perubahan Peraturan Perundang-Undangan yang Berpengaruh Signifikan Terhadap Perusahaan
Regulatory Changes with Significant Impact on the Company

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG TERKAIT

Dalam menjalankan kegiatan bisnis dan operasional perusahaan, KIE senantiasa berkomitmen patuh terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang relevan. Dalam rangka upaya pemenuhan tersebut, Perusahaan terus melakukan kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang baru diterbitkan maupun yang mengalami perubahan.

RELEVANT LAWS AND REGULATIONS

In conducting its business and operational activities, KIE remains committed to complying with all prevailing laws and regulations. As part of this commitment, the Company continuously reviews newly issued regulations as well as amendments to existing regulations.

Nomor dan Nama Peraturan dan/ atau Perundang-undangan yang Diberlakukan Number and Name of Regulation and/or Enacted Legislation	**Penjelasan atas Peraturan dan/ atau Perundang-undangan yang Diberlakukan** Explanation of Regulations and/or Legislation that Enacted	**Dampak terhadap Perusahaan** Impact on the Company
Permen ATRBPN No. 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 2025 tentang Pelimpahan Kewenangan Penetapan Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah. Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency Regulation No. 9 of 2025 concerning Amendments to Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of National Land Agency Regulation No. 5 of 2025 on Delegation of Authority for the Determination of Land Rights and Land Registration Activities.	Penetapan Hak Atas Tanah & Kegiatan Pendaftaran Tanah Pembagian kewenangan BPN Pusat, Kanwil, dan Kantah jadi lebih rinci & teknis. Determination of Land Rights & Land Registration Activities This regulation provides a more detailed and technical division of authority among the Central BPN, Regional Offices, and Land Offices (Kantah).	Akan mempengaruhi efektivitas dan efisiensi proses pembaharuan legalitas tanah (perpanjangan sertifikat) yang awalnya hanya ditingkat kantor Pertanahan kota/ kabupaten saat ini beralih ke provinsi/ pusat. This change affects the effectiveness and efficiency of land legal renewal processes (such as certificate extensions), which were previously handled at the municipal/ regency land office level but are now shifted to the provincial/central level.

Nomor dan Nama Peraturan dan/ atau Perundang-undangan yang Diberlakukan Number and Name of Regulation and/or Enacted Legislation	Penjelasan atas Peraturan dan/ atau Perundang-undangan yang Diberlakukan Explanation of Regulations and/or Legislation that Enacted	Dampak terhadap Perusahaan Impact on the Company
PP No. 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Government Regulation No. 28 of 2025 concerning the Implementation of Risk-Based Business Licensing.	Pada Peraturan Pemerintah terbaru ini lebih mengatur terkait teknis dan eksekusi pada sistem Online Single Submission (OSS). This Government regulation further elaborates technical aspects and execution within the Online Single Submission (OSS) system.	Adanya beberapa penyesuaian terhadap perizinan berusaha KIE yang mempengaruhi kepatuhan atas pemenuhan perizinan sesuai dengan regulasi. There are several adjustments to KIE's business licensing processes, affecting compliance with regulatory requirements.
Permen No. 20 tahun 2024 tentang Perwilayahan Industri dan Permen ESDM No. 14 tahun 2024 tentang Penyelenggara Izin Pengusahaan Air Tanah dan Persetujuan Penggunaan Air Tanah. Minister of Industry Regulation No. 20 of 2024 concerning Industrial Zoning and Minister of Energy and Mineral Resources Regulation No. 14 of 2024 concerning the Administration of Groundwater Exploitation Licenses and Groundwater Utilization Approvals.	Setiap perusahaan industri yang berlokasi di dalam kawasan industri harus memelihara daya dukung lingkungan sekitar termasuk tidak melakukan kegiatan pengambilan air tanah, sehingga untuk sumur yang dimiliki perusahaan industri yang berada dalam kawasan industri menjadi tanggung jawab dan kewenangan pengelola kawasan industri. Industrial companies located within industrial estates are required to maintain environmental carrying capacity, including restrictions on groundwater extraction. As a result, groundwater wells within industrial estates fall under the responsibility and authority of the estate management.	Menuntut pengelola kawasan untuk memenuhi standar kawasan industri yang lebih komprehensif dan optimalisasi izin lingkungan dan tata ruang. This regulation requires industrial estate operators to meet more comprehensive industrial estate standards, including optimization of environmental and spatial planning licensing.

Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Dampaknya Terhadap Perusahaan

Changes in Accounting Policies and Their Impact on the Company

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK-IAI) Ikatan Akuntan Indonesia.

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan penggunaan estimasi dan asumsi. Hal tersebut juga mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Grup. Area yang kompleks atau memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi atau area dimana asumsi dan estimasi dapat berdampak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasian Audited.

Kecuali dinyatakan pada di bawah ini, kebijakan akuntansi telah diterapkan secara konsisten dengan laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 yang telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

The consolidated financial statements have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, which comprise the Statements of Financial Accounting Standards (PSAK) and Interpretations of Financial Accounting Standards (ISAK) issued by the Financial Accounting Standards Board (DSAK-IAI) of the Indonesian Institute of Accountants.

The preparation of consolidated financial statements in accordance with SAK requires the use of estimates and assumptions. It also requires management to exercise judgment in the process of applying the Group's accounting policies. Areas that are complex or require a higher degree of judgment, as well as areas where assumptions and estimates may have a significant impact on the consolidated financial statements, are disclosed in the Audited consolidated financial statements.

Unless otherwise stated below, the accounting policies have been applied consistently with the consolidated financial statements for the years ended December 31, 2025 and 2024, which have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

KIE memenuhi standar akuntansi sesuai peraturan dan undang-undang yang berlaku. Berikut adalah Amandemen dan penyesuaian atas Standar Akuntansi Keuangan (SAK) serta standar baru yang berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2025 , tidak menghasilkan perubahan kebijakan akuntansi grup dan tidak memiliki dampak material terhadap jumlah yang dilaporkan di periode berjalan atau sebelumnya, yaitu:

1. PSAK 117, "Kontrak Asuransi";
2. Amandemen PSAK 117, "Kontrak Asuransi" tentang Penerapan Awal PSAK 117 dan PSAK 109 – Informasi Komparatif";
3. Amandemen PSAK 221, "Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing" tentang Kekurangan Ketertukaran.

Penerapan dari interpretasi dan amandemen terhadap standar akuntansi yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2025 tidak menyebabkan perubahan signifikan atas kebijakan akuntansi Grup dan tidak memberikan dampak yang material terhadap jumlah yang dilaporkan di laporan keuangan konsolidasian pada tahun berjalan.

KIE complies with applicable accounting standards in accordance with prevailing laws and regulations. The following amendments and improvements to Financial Accounting Standards (SAK), as well as new standards effective for financial years beginning on or after January 1, 2025, did not result in changes to the Group's accounting policies and had no material impact on the amounts reported in the current or prior periods:

1. PSAK 117, "Insurance Contracts";
2. Amendments to PSAK 117, "Insurance Contracts" regarding Initial Application of PSAK 117 and PSAK 109 - Comparative Information;
3. Amendments to PSAK 221, "The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates" regarding Lack of Exchangeability.

The adoption of interpretations and amendments to accounting standards effective from January 1, 2025 did not result in significant changes to the Group's accounting policies and did not have a material impact on the amounts reported in the consolidated financial statements for the year.

Manajemen Risiko Keuangan
Financial Risk Management

Berbagai aktivitas yang dilakukan membuat Perusahaan terekspos terhadap berbagai risiko keuangan: risiko pasar (termasuk risiko nilai tukar mata uang asing dan risiko tingkat suku bunga), risiko kredit dan risiko likuiditas. Tujuan dari manajemen risiko Perusahaan adalah untuk mengidentifikasi, mengukur, mengawasi dan mengelola risiko dasar dalam upaya melindungi kesinambungan bisnis dalam jangka panjang dan meminimalkan dampak yang tidak diharapkan pada kinerja keuangan Perusahaan.

Fungsi manajemen risiko keuangan dijalankan oleh Departemen Manajemen Risiko di bawah kebijakan-kebijakan yang disetujui oleh Direksi. Departemen Manajemen Risiko mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko-risiko keuangan.

1. Risiko pasar
   a. Risiko nilai tukar mata uang asing
      Pendapatan, pengeluaran operasional, aset dan liabilitas keuangan Grup secara substansial didenominasi dalam mata uang Rupiah. Oleh karena itu, manajemen berkeyakinan jika Grup tidak memiliki eksposur signifikan terhadap fluktuasi nilai tukar mata uang asing.
   b. Risiko suku bunga
      Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Grup tidak memiliki utang yang dikenakan bunga yang signifikan. Risiko suku bunga yang timbul dari kas di bank dan aset keuangan relevan lainnya juga tidak dianggap signifikan. Oleh karena itu, manajemen berkeyakinan bahwa Grup tidak terpengaruh risiko suku bunga secara signifikan.

The Company's activities expose it to various financial risks, including market risk (comprising foreign exchange risk and interest rate risk), credit risk, and liquidity risk. The objective of the Company's risk management is to identify, measure, monitor, and manage these risks in order to safeguard long-term business sustainability and minimize adverse impacts on the Company's financial performance.

The financial risk management function is carried out by the Risk Management Department under policies approved by the Board of Directors. The department is responsible for identifying and evaluating financial risks.

1. Market Risk
   a. Foreign Exchange Risk
      The Group's revenue, operating expenses, and financial assets and liabilities are substantially denominated in Rupiah. Accordingly, management believes that the Group does not have significant exposure to foreign exchange fluctuations.

   b. Interest Rate Risk
      As of December 31, 2025 and 2024, the Group did not have significant interest-bearing debt. Interest rate risk arising from cash in banks and other relevant financial assets is also considered insignificant. Therefore, management believes that the Group is not significantly exposed to interest rate risk.

c. Risiko harga
Operasi Grup tidak terekspos terhadap risiko pasar terkait dengan fluktuasi harga karena penyelesaian aset dan liabilitas keuangan berdasarkan harga yang tercantum dalam kontrak jual beli yang ditentukan dengan pelanggan.

2. Risiko kredit
Grup yakin akan kemampuannya untuk terus mengendalikan dan mempertahankan eksposur yang minimal terhadap risiko kredit mengingat kas di bank dan deposito berjangka ditempatkan di bank yang memiliki reputasi baik dan Grup memiliki kebijakan yang jelas dalam pemilihan pelanggan dan perjanjian yang mengikat secara hukum untuk transaksi penjualannya.

Eksposur maksimum atas risiko kredit untuk Grup adalah sebesar nilai tercatat dari aset keuangan yang tertera pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

Semua kas di bank, deposito berjangka, kas yang dibatasi penggunaannya dan deposito berjangka jatuh tempo di atas 3 bulan dan kurang dari 1 tahun ditempatkan di bank yang memiliki kualitas kredit yang baik. Oleh karena itu Grup berkeyakinan bahwa risiko kredit atas aset keuangan ini adalah minimal.

Kualitas kredit dari piutang usaha, piutang lain-lain dan aset keuangan lainnya yang belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai dapat diperkirakan dengan mengacu pada data historis terkait tingkat gagal bayar penerbit aset keuangan.

Pada tanggal 31 Desember 2025, sekitar 76% (2024: 90%) dari piutang usaha Grup merupakan piutang dari pihak berelasi. Selanjutnya, pada tanggal 31 Desember 2025, sekitar 24% (2024: 10%) dari piutang usaha Perusahaan merupakan piutang dari pelanggan pihak ketiga yang telah bertransaksi dengan Grup selama lebih dari lima tahun.

Perusahaan terus memantau kinerja dan umur piutang serta eksposur kredit dari para pelanggannya sebagai bagian dari penilaian kerugian kredit ekspektasian berdasarkan PSAK 109 dan menyimpulkan bahwa risiko kredit tidak signifikan berdasarkan kolektibilitas historis yang disesuaikan dengan faktor-faktor perkiraan masa depan.

Grup menerapkan sebagian kerugian ekspektasian seumur hidup untuk seluruh piutang usaha dan piutang lain-lain. Untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian, piutang usaha dan piutang lain-lain telah dikelompokkan berdasarkan karakteristik risiko kredit dan waktu jatuh tempo yang serupa.

Seluruh saldo terutang dari piutang usaha dan piutang lain-lain di atas yang belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai sebagian besar berasal dari pelanggan pihak ketiga dan pihak berelasi yang sudah ada lebih dari

c. Price Risk
The Group's operations are not exposed to market risks related to price fluctuations, as the settlement of financial assets and liabilities is based on prices stipulated in sales and purchase agreements with customers.

2. Credit Risk
The Group is confident in its ability to control and maintain minimal exposure to credit risk, as cash in banks and time deposits are placed with reputable banks, and the Group applies clear policies in customer selection and legally binding agreements for its sales transactions.

The maximum exposure to credit risk is represented by the carrying amount of financial assets as presented in the consolidated statement of financial position.

All cash in banks, time deposits, restricted cash, and time deposits with maturities of more than 3 months and less than 1 year are placed with banks that have strong credit quality. Accordingly, the Group believes that credit risk related to these financial assets is minimal.

The credit quality of trade receivables, other receivables, and other financial assets that are neither past due nor impaired is assessed based on historical data on default rates of the respective counterparties.

As of December 31, 2025, approximately 76% (2024: 90%) of the Group's trade receivables were due from related parties. Furthermore, as of December 31, 2025, approximately 24% (2024: 10%) of the Company's trade receivables were from third-party customers that have transacted with the Group for more than five years.

The Company continuously monitors receivables performance, maturity, and customer credit exposure as part of its expected credit loss (ECL) assessment in accordance with PSAK 109, and concludes that credit risk is not significant based on historical collectibility adjusted for forward-looking factors.

The Group applies a lifetime expected credit loss approach for all trade receivables and other receivables. To measure expected credit losses, receivables are grouped based on similar credit risk characteristics and maturity profiles.

All outstanding balances of trade receivables and other receivables that are neither past due nor impaired are largely derived from a broad base of long-standing third-party and related-party customers that have existed for

12 bulan yang tersebar merata atas jumlah pelanggan yang besar. Grup juga melakukan evaluasi kredit berkelanjutan atas kondisi keuangan piutang secara berkala.

more than 12 months, evenly distributed over a large number of customers.. The Group also conducts ongoing credit evaluations of receivables' financial conditions on a periodic basis.

3. Risiko likuiditas
Risiko likuiditas merupakan risiko yang muncul dalam situasi dimana posisi arus kas Grup mengindikasikan bahwa arus kas masuk dari pendapatan jangka pendek tidak cukup untuk memenuhi arus kas keluar untuk pengeluaran jangka pendek. Untuk mengelola risiko likuiditas, Grup memonitor dan menjaga tingkat kas dan setara kas yang diperkirakan cukup untuk mendanai kegiatan operasional Grup dan mengurangi pengaruh fluktuasi arus kas. Manajemen Grup juga secara rutin memonitor perkiraan arus kas dan arus kas aktual, termasuk profil jatuh tempo pinjaman, dan secara terus-menerus menilai kondisi pasar keuangan untuk kesempatan memperoleh dana.

3. Liquidity Risk
Liquidity risk arises in situations where the Group's cash flow position indicates that short-term cash inflows from revenue are insufficient to meet short-term cash outflows for expenditures. To manage this risk, the Group monitors and maintains adequate levels of cash and cash equivalents to fund its operational activities and mitigate the impact of cash flow fluctuations. The Group's management also regularly monitors projected and actual cash flows, including loan maturity profiles, and continuously assesses financial market conditions to identify funding opportunities.

Tabel di bawah ini menganalisis liabilitas keuangan Grup pada tanggal pelaporan berdasarkan kelompok jatuh temponya dari sisa tahun hingga tanggal jatuh tempo kontraktual. Jumlah yang diungkapkan dalam tabel ini adalah nilai arus kas kontraktual yang tidak terdiskonto termasuk estimasi pembayaran bunga.

The table below analyzes the Group's financial liabilities at the reporting date based on maturity groupings from the remaining period to contractual maturity. The amounts disclosed represent undiscounted contractual cash flows, including estimated interest payments.

4. Estimasi nilai wajar
Nilai tercatat dari aset dan liabilitas keuangan dengan jatuh tempo kurang dari satu tahun, termasuk kas dan setara kas, kas yang dibatasi penggunaannya, piutang usaha, aset keuangan lancar lainnya, piutang lain-lain, aset keuangan tidak lancar lainnya, utang usaha, utang lain-lain, beban akrual, pinjaman jangka pendek, pinjaman jangka panjang, dan liabilitas sewa diperkirakan mendekati nilai wajarnya karena bersifat jangka pendek. Nilai tercatat liabilitas sewa dan pinjaman jangka panjang dengan jatuh tempo lebih dari satu tahun juga mendekati nilai wajarnya karena dampak pendiskontoan tidak signifikan.

4. Fair Value Estimation
The carrying amounts of financial assets and liabilities with maturities of less than one year, including cash and cash equivalents, restricted cash, trade receivables, other current financial assets, other receivables, other non-current financial assets, trade payables, other payables, accrued expenses, short-term loans, long-term loans, and lease liabilities, are considered to approximate their fair values due to their short-term nature. The carrying amounts of lease liabilities and long-term loans with maturities exceeding one year also approximate their fair values, as the impact of discounting is not significant.

5. Manajemen modal
Dalam mengelola permodalannya, Grup senantiasa mempertahankan kelangsungan usaha serta memaksimalkan manfaat bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

5. Capital Management
In managing its capital, the Group consistently maintains business continuity while maximizing benefits for shareholders and other stakeholders.

Grup secara aktif dan rutin menelaah dan mengelola permodalannya untuk memastikan struktur modal dan pengembalian yang optimal bagi pemegang saham, dengan mempertimbangkan efisiensi penggunaan modal berdasarkan arus kas operasi dan belanja modal, serta mempertimbangkan kebutuhan modal di masa yang akan datang.

The Group actively and regularly reviews and manages its capital to ensure an optimal capital structure and returns for shareholders, taking into account the efficient use of capital based on operating cash flows and capital expenditures, as well as future capital requirements.

Grup juga berusaha mempertahankan keseimbangan antara tingkat pinjaman dan posisi ekuitas untuk memastikan struktur modal dan pengembalian yang optimal. Tidak ada perubahan pada pendekatan Grup dalam mengelola permodalannya selama tahun berjalan.

The Group also strives to maintain a balance between debt levels and equity position to ensure an optimal capital structure and returns. There were no changes in the Group's approach to capital management during the year.

05 →

Tata Kelola Perusahaan (Governansi Perusahaan)

Corporate Governance





Penerapan Tata Kelola Perusahaan
The Implementation of Corporate Governance

KOMITMEN PENERAPAN PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) merupakan fondasi utama dalam memastikan kinerja yang konsisten dan pencapaian tujuan jangka panjang Perusahaan. Dengan menjunjung tinggi prinsip Keterbukaan, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Kemandirian, serta Kesetaraan, Perusahaan terus memperkuat sistem pengelolaan yang mendukung pengambilan keputusan strategis, pengelolaan risiko yang efektif, dan keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang.

Penerapan tata kelola perusahaan yang baik merupakan bentuk nyata komitmen KIE menjaga keseimbangan antara kebutuhan Perusahaan dengan para pemangku kepentingan, seperti Pemegang Saham, Karyawan, Pelanggan, Pemasok, Otoritas, maupun masyarakat umum. Perusahaan meyakini bahwa penerapan prinsip-prinsip GCG yang baik secara konsisten, komprehensif, dan berkesinambungan di setiap kegiatan usaha juga berperan penting dalam meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap Perusahaan. Selain itu, manajemen berharap dapat meningkatkan kinerja dan nilai (*value*) Perusahaan untuk tumbuh dan berkesinambungan di tengah iklim bisnis yang semakin kompetitif dan dinamis.

Komitmen Perusahaan pada tata kelola perusahaan yang baik tertuang dalam pernyataan komitmen yang ditandatangani seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan. Pernyataan tersebut tercantum dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Code of Corporate Governance)* KIE.

PRINSIP-PRINSIP DAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Setiap elemen yang ada di KIE bertanggung jawab dalam memastikan prinsip dasar GCG diterapkan pada setiap aspek bisnis. Prinsip-prinsip dasar GCG tersebut berdasarkan PER-2/MBU/03/2023 meliputi:

TRANSPARANSI

Transparansi merupakan prinsip keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan serta penyampaian informasi yang relevan mengenai perusahaan. Melalui prinsip ini, informasi yang material disampaikan secara jelas, akurat, dan tepat waktu kepada para pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KIE melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi material dan relevan mengenai Perusahaan kepada Pemegang Saham,

COMMITMENT TO THE IMPLEMENTATION OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE PRINCIPLES

Good Corporate Governance ("GCG") constitutes a fundamental foundation in ensuring consistent performance and the achievement of the Company's long-term objectives. By upholding the principles of Transparency, Accountability, Responsibility, Independence, and Fairness, the Company continues to strengthen its governance framework to support strategic decision-making, effective risk management, and long-term business sustainability.

Good Corporate Governance implementation is a form of KIE's commitment to maintaining a balance between the Company needs and stakeholder needs, such as Shareholders, Employees, Customers, Suppliers, Authorities, and Public Communities. The Company believes that the consistent, comprehensive, and sustainable application of GCG principles across all business activities plays a vital role in enhancing stakeholder trust. Furthermore, Management aims to enhance the Company's performance and value creation, enabling sustainable growth amid an increasingly competitive and dynamic business environment.

The Company's commitment to Good Corporate Governance is formalized in a written statement signed by all members of the Board of Commissioners and the Board of Directors. This commitment is incorporated in the Company's Code of Corporate Governance.

PRINCIPLES AND IMPLEMENTATION OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Every element within KIE bears responsibility for ensuring that GCG principles are implemented across all aspects of the Company's business activities. In accordance with PER-2/MBU/03/2023, the fundamental GCG principles include the following:

TRANSPARENCY

Transparency refers to openness in the decision-making process and the disclosure of relevant corporate information. Under this principle, material information is conveyed clearly, accurately, and in a timely manner to stakeholders in accordance with applicable regulations.

KIE implements transparency through open decision-making processes and the disclosure of material and relevant information to Shareholders, stakeholders, employees,

pemangku kepentingan, karyawan, masyarakat, dan rekanan sesuai dengan kebijakan pengelolaan informasi Perusahaan.

AKUNTABILITAS

Akuntabilitas mengacu pada kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban setiap organ perusahaan dalam pengelolaan perusahaan. Dengan pembagian peran yang jelas, setiap pihak dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif guna mendukung pengelolaan perusahaan yang baik.

KIE menerapkan prinsip akuntabilitas melalui kejelasan hak, kewenangan, dan tanggung jawab antara Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi. RUPS berperan sebagai forum pengambilan keputusan bagi Pemegang Saham dalam menentukan kebijakan strategis Perusahaan, termasuk persetujuan rencana kerja dan pengesahan laporan tahunan. Direksi bertanggung jawab atas pengelolaan Perusahaan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sementara Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasan serta memberikan nasihat kepada Direksi. Selain itu, setiap karyawan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan deskripsi pekerjaan yang telah ditetapkan.

PERTANGGUNGJAWABAN

Pertanggungjawaban merupakan prinsip yang menekankan kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan serta norma dan standar yang berlaku dalam kegiatan usaha.

Perusahaan menerapkan prinsip responsibilitas dengan menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta standar tata kelola perusahaan yang baik. Prinsip ini diwujudkan melalui kepatuhan terhadap regulasi, pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan, serta komitmen untuk menjalankan kegiatan usaha secara etis dan berkelanjutan.

INDEPENDENSI/ KEMANDIRIAN

Independensi menekankan bahwa pengelolaan Perusahaan dilakukan secara profesional tanpa adanya benturan kepentingan maupun pengaruh dari pihak manapun.

Perusahaan menerapkan prinsip independensi dengan memastikan setiap organ Perusahaan menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional sesuai dengan kewenangan masing-masing, tanpa adanya benturan kepentingan maupun pengaruh dari pihak manapun. Penerapan prinsip ini mendukung terciptanya proses pengambilan keputusan yang objektif dan transparan dalam pengelolaan Perusahaan.

KESETARAAN

Kesetaraan merupakan prinsip yang menekankan perlakuan yang adil dan setara terhadap seluruh pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

the public, and business partners in accordance with the Company's information disclosure policies.

ACCOUNTABILITY

Accountability refers to the clarity of functions, implementation, and responsibility of each corporate organ in managing the Company. With clearly defined roles, each party is able to perform its duties and responsibilities effectively in support of sound corporate management.

KIE applies the principle of accountability through a clear delineation of rights, authority, and responsibilities among Shareholders, the Board of Commissioners, and the Board of Directors. The General Meeting of Shareholders (GMS) serves as the decision-making forum for Shareholders in determining the Company's strategic policies, including approval of the corporate work plan and ratification of the annual report. The Board of Directors is responsible for managing the Company in accordance with prevailing laws and regulations, while the Board of Commissioners performs a supervisory and advisory role. In addition, each employee carries out their respective duties and responsibilities in accordance with established job descriptions.

RESPONSIBILITY

Responsibility emphasizes the Company's compliance with applicable laws and regulations, as well as prevailing norms and standards governing its business activities.

The Company implements this principle by conducting its business operations in accordance with applicable laws and sound corporate governance standards. This commitment is demonstrated through regulatory compliance, the implementation of Corporate Social and Environmental Responsibility (CSR) programs, and adherence to ethical and sustainable business practices.

INDEPENDENCE

Independence underscores that corporate management must be conducted professionally and free from conflicts of interest or undue influence from any party.

The Company upholds the principle of independence by ensuring that each corporate organ performs its duties and functions professionally, within the scope of its respective authority, and free from conflicts of interest or external influence. The application of this principle supports objective and transparent decision-making processes in the management of the Company.

FAIRNESS

Fairness emphasizes equitable and equal treatment of all stakeholders arising from agreements and applicable laws and regulations.

Perusahaan menerapkan prinsip kewajaran melalui pemenuhan hak-hak para pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal, secara adil dan tanpa diskriminasi, dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan, kebijakan dan peraturan Perusahaan, serta prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik

LANDASAN PENERAPAN GCG

Perusahaan telah mengembangkan struktur dan sistem tata kelola perusahaan dengan memperhatikan prinsip-prinsip GCG serta *best practice* yang berlaku baik secara nasional maupun internasional. Landasan penerapan GCG tersebut mencakup:

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
2. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-01/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
3. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-02/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.
4. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-03/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.
5. Pedoman Umum GCG Indonesia yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) sebagai acuan dalam mengembangkan pengelolaan dan penerapan GCG.
6. Anggaran Dasar Perusahaan dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
7. Peraturan dan Kebijakan Perusahaan.

The Company implements the principle of fairness by fulfilling the rights of both internal and external stakeholders in an equitable and non-discriminatory manner, in accordance with applicable laws and regulations, corporate policies, and established Good Corporate Governance principles.

GCG FRAMEWORKS

The Company has established a corporate governance system and structure by considering GCG principles and best practices prevail in the International and National basis. Basis of GCG implementation covers:

1. Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, as amended by Law No. 6 of 2023 on the Ratification of Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2022 on Job Creation into Law.
2. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-01/MBU/03/2023 concerning Special Assignments and Corporate Social and Environmental Responsibility Programs of State-Owned Enterprises.
3. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-02/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises.
4. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-03/MBU/03/2023 concerning Corporate Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises.
5. Indonesia's General Guidelines for Good Corporate Governance (GCG) issued by the National Committee on Governance Policy (KNKG) as a reference for the development and implementation of GCG practices.
6. The Company's Articles of Association and Resolutions of General Meeting of Shareholders (GMS)
7. The Company Regulations and Policies.

Momen Penting GCG
Key GCG Moments

2015
1. Pedoman Kode Etik Perusahaan
2. Penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik
3. Pedoman Dewan Komisaris dan Direksi

2016
Pedoman Pengawasan Intern

2017
1. Pedoman Penerapan Manajemen Risiko
2. Pembentukan Tim Pemantau Penerapan GCG dan Manajemen Risiko
3. Pelaksanaan *Assessment* GCG KIE Tahun 2017

2015
1. Code of Conduct
2. Refinement of the Code of Good Corporate Governance
3. Board Manual

2016
Internal Audit Guidelines

2017
1. Guidelines for the Implementation of Risk Management
2. Establishment of the GCG and Risk Management Monitoring Team.
3. Implementation of KIE's GCG Assessment in 2017

4. Kebijakan Pengendalian Informasi
5. Kebijakan Teknologi Informasi dan Komunikasi
6. Kebijakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Anak Perusahaan
7. Kebijakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Dewan Komisaris
8. Piagam Komite Audit Dewan Komisaris

2018
1. Penandatanganan Piagam Pakta Integritas Dewan Komisaris, Direksi & Karyawan KIE 2018
2. Kebijakan Gratifikasi
3. Kebijakan Benturan Kepentingan
4. Kebijakan Penyampaian LHKPN
5. Pembaharuan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko
6. Pembaharuan Pembentukan Tim Pemantau Penerapan GCG dan Manajemen Risiko
7. Pedoman Penyusunan Prosedur
8. Pembentukan Tim Penyusunan *Annual Report*
9. Piagam Komite GCG, Pemantauan Manajemen Risiko dan Investasi Dewan Komisaris

2019
1. Tata Tertib Rapat Dewan Komisaris
2. Tata Tertib Rapat Korporat

2020
1. Pembaharuan Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik
2. Pembaharuan Pedoman Kode Etik Perusahaan
3. Pembaharuan Pedoman Dewan Komisaris & Direksi
4. Pembentukan Tim Pencapaian PROPER Hijau
5. Pedoman Penerapan Sistem Pengaduan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) KIE

2021
1. Pembaharuan Pedoman Pengendalian Gratifikasi
2. Pedoman Sistem Pengendalian Internal Perusahaan
3. Pembaharuan Struktur Organisasi Perusahaan
4. Kebijakan Perusahaan tentang Mutu, Keselamatan &
5. Pembentukan Tim Penyusunan *Annual Report*

2022
1. Pembaharuan Tim Pemantau Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan Manajemen Risiko
2. Pembaharuan Pedoman Kode Etik
3. Kebijakan Pelatihan & Pembelajaran Keberlanjutan Anggota Direksi
4. Pedoman Rencana Keselamatan Kerja dan Lingkungan di Area KIE

2023
1. Pembuatan Tim Penerapan Sistem Manajemen Terintegrasi
2. Pembuatan Tim Penyusunan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP)
3. Sosialisasi SIRKEL (Sistem Lapor Keluhan) untuk melaporkan keluhan yang ada di Kawasan Industri KIE

4. Information Control Policy
5. Information and Communication Technology Policy
6. Good Corporate Governance Policy of Subsidiaries
7. Good Corporate Governance Policy of the Board of Commissioners
8. Audit Committee Charter of the Board of Commissioners

2018
1. Signing of the 2018 KIE Board of Commissioners, Directors & Employees Integrity Pact Charter
2. Gratification Policy
3. Conflict of Interest Policy
4. LHKPN Submission Policy
5. Renewal of Risk management Implementation Guidelines
6. Update on the Establishment of GCG and Risk Management Monitoring Team
7. Procedure Preparation Guidelines
8. Establishment of Annual Report Preparation Team
9. Charter of the GCG, Risk Management Monitoring and Investment Committee of the Board of Commissioners

2019
1. Rules of Procedure for the Board of Commissioners Meeting
2. Rules of Procedure for Corporate Meetings

2020
1. Update of Code of Good Corporate Governance
2. Update on the Company's Code of Conduct
3. Update of the Board Manual for Board of Commissioners & Board of Directors
4. Formation of Green Proper Achievement Team
5. KIE Whistleblowing System Guideline

2021
1. Update of Gratification Control Guidelines
2. Guidelines for the Company's Internal Control System
3. Renewal of the Company's Organizational Structure
4. Company Policy on Quality, Occupational Health & Safety, and Environment in 2021
5. Formation of Annual Report Preparation Team

2022
1. Restructuring of Corporate Governance Implementation Monitoring and Risk Management Team
2. Update on the Code of Conduct
3. Board of Directors' Sustainability Learning & Training Policy
4. Guidelines for Occupational Safety and Environmental Plan in the KIE Area

2023
1. Formation of Integrated Management System Implementation Team
2. Formation of the Corporate Long Term Plan (RJPP) Preparation Team
3. Socialization of SIRKEL (Grievances Reporting System) to report complaints in the KIE Industrial Estate

2024
1. Penyusunan Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Business Plan Periode KIE
2. Internalisasi & Sosialisasi Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan di Lingkungan KIE
3. Pelaksanaan Audit Sertifikasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan

2025
1. Memperoleh sertifikat Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016
2. Penyusunan IT Masterplan tahun 2025-2029

PENERAPAN GCG 2025

TUJUAN PENERAPAN GCG 2025

Penerapan prinsip GCG yang dilaksanakan oleh Perusahaan, terutama diharapkan menciptakan keselarasan hubungan antara Perusahaan dengan para pemangku kepentingan. Dengan demikian, penerapan GCG diharapkan dapat memberikan nilai tambah. Lebih rinci tentang tujuan penerapan GCG di lingkungan Perusahaan adalah:

1. Mendorong setiap organ Perusahaan dalam mengambil keputusan dan menjalankan tindakan berdasarkan nilai moral yang tinggi, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran akan tanggung jawab sosial dan kelestarian lingkungan
2. Meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan keberlanjutan usaha Perusahaan sehingga memberikan nilai tambah bagi pemegang saham, karyawan, dan para pemangku kepentingan
3. Mewujudkan pengelolaan Perusahaan yang transparan, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan guna meningkatkan legitimasi dan kepercayaan pemangku kepentingan
4. Mengakui dan melindungi hak-hak pemegang saham serta para pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
5. Mendorong kontribusi Perusahaan terhadap perekonomian nasional serta pelaksanaan mandat yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia

2024
1. Preparation of the Corporate Long-Term Plan and Business Plan of KIE
2. Internalization of Risk Management Practices within the KIE Environment
3. Implementation of Certification Audit for ISO 3700:2016 Anti-Bribery Management System

2025
1. ISO 3700:2016 Anti-Bribery Management System certification acquisition
2. Development of IT Masterplan 2025 - 2029

GCG IMPLEMENTATION IN 2025

OBJECTIVES OF GCG IMPLEMENTATION IN 2025

The implementation of GCG principles by the Company is primarily intended to foster alignment between the Company and its stakeholders. Accordingly, the Company seeks to create sustainable added value. More specifically, the objectives of GCG implementation within the Company include the following:

1. To encourage each corporate organ to make decisions and undertake actions based on high ethical standards, compliance with applicable laws and regulations, and awareness of social responsibility and environmental sustainability
2. To enhance the efficiency, effectiveness, and sustainability of the Company's business operations, thereby generating added value for shareholders, employees, and other stakeholders
3. To realize transparent, fair, and accountable corporate management practices in order to strengthen legitimacy and stakeholder trust
4. To recognize and protect the rights of shareholders and other stakeholders in accordance with applicable regulations
5. To promote the Company's contribution to the national economy and the fulfillment of mandates entrusted by the Government of Indonesia

PENGHARGAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN 2025
CORPORATE GOVERNANCE AWARD IN 2025

Tanggal Date	Nama Penghargaan Award Name	Diberikan Oleh Awarder
23 September 2025 September 23, 2025	Tata Kelola Layak Tahun 2025 Good Corporate Governance in 2025	Disnaker Kota Bontang Bontang City Manpower Office
15 Januari 2025 January 15, 2025	TJSL Award	Walikota Bontang Mayor of Bontang
23 Juni 2025 June 23, 2025	Penghargaan Properda Emas Properda Gold Award	Gubernur Kalimantan Timur Governor of East Kalimantan
07 April 2026 April 7, 2026	Penghargaan Propernas Biru Propernas Blue Award	Kementerian Lingkungan Hidup Ministry of Environment

Struktur dan Mekanisme Tata Kelola Perusahaan
Corporate Governance Structure

Struktur dan mekanisme Tata Kelola Perusahaan disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar Perusahaan dan *best practices*. Struktur dan mekanisme Tata Kelola ditetapkan untuk memastikan penyelenggaraan Tata Kelola Perusahaan dapat berjalan efektif dengan pembagian peran, tugas dan tanggung jawab yang jelas. Struktur Tata Kelola Perusahaan yang dimiliki KIE terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Organ Utama meliputi Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi.
2. Organ Pendukung meliputi Sekretaris Dewan Komisaris, Komite Audit, Komite GCG, Manajemen Risiko dan Investasi dibawah garis koordinasi Dewan Komisaris serta Satuan Pengawasan Intern (SPI), Sekretaris Perusahaan, dan unit lain Organ Perusahaan di bawah garis koordinasi Direksi. Tim Pemantau Penerapan Tata Kelola Perusahaan dan Manajemen Risiko di bawah Koordinasi Sekretaris Perusahaan.

The Company's Corporate Governance structure and mechanisms are established in accordance with applicable laws and regulations, the Company's Articles of Association, and recognized best practices. This governance structure and mechanism is designed to ensure that corporate governance is implemented effectively, supported by a clear delineation of roles, duties, and responsibilities. KIE's Corporate Governance Structure is divided into 2 (two) parts:

1. Main Organs, which include the Shareholders, the Board of Commissioners, and the Board of Directors.
2. Supporting Organs, which include the Secretary to the Board of Commissioners, the Audit Committee, and the GCG, Risk Management, and Investment Committee under the coordination of the Board of Commissioners; as well as the Internal Audit Unit (SPI), Corporate Secretary, and other corporate units under the coordination of the Board of Directors. The GCG and Risk Management Monitoring Team operates under the coordination of the Corporate Secretary.

PENANGGUNG JAWAB PENERAPAN GCG

Direktur Keuangan adalah penanggung jawab dalam penerapan dan pemantauan GCG di Perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 1B/SKD/DIR/I-2022. Organ Perusahaan tersebut memainkan peran kunci dalam keberhasilan pelaksanaan GCG. Organ Perusahaan menjalankan fungsinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, Anggaran Dasar Perusahaan, dan ketentuan lainnya atas dasar prinsip bahwa masing-masing organ mempunyai independensi dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya untuk kepentingan Perusahaan. RUPS, Dewan Komisaris, dan Direksi saling menghormati tugas, tanggung jawab, dan wewenang masing-masing sesuai Peraturan Perundang-undangan dan Anggaran Dasar.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah orang atau badan hukum yang secara sah memiliki satu atau lebih saham pada Perusahaan. Dalam hal ini pemegang saham Perusahaan adalah PT Pupuk Kalimantan Timur dan Yayasan Kesejahteraan Hari Tua Pupuk Kaltim.

PARTY RESPONSIBLE FOR GCG IMPLEMENTATION

The Director of Finance serves as the person in charge for the implementation and monitoring of GCG within the Company, pursuant to Board of Directors Decree No. 1B/SKD/DIR/I-2022.The Company's organs play a key role in the successful implementation of GCG. Each organ performs its functions in accordance with prevailing laws and regulations, the Company's Articles of Association, and other relevant provisions, based on the principle that each organ exercises independence in carrying out its duties, functions, and responsibilities in the best interests of the Company. The GMS, the Board of Commissioners, and the Board of Directors mutually respect their respective duties, responsibilities, and authorities in accordance with prevailing laws and regulations and the Articles of Association.

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (GMS)

The General Meeting of Shareholders (GMS) represents the individual or legal entity that legally holds one or more shares in the Company. The Company's shareholders are PT Pupuk Kalimantan Timur and Yayasan Kesejahteraan Hari Tua Pupuk Kaltim.

DEWAN KOMISARIS
Dewan Komisaris meliputi keseluruhan anggota Dewan Komisaris dan bertindak sebagai suatu kesatuan Dewan (*Board*) yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan Perusahaan.

DIREKSI
Direksi Perusahaan meliputi keseluruhan anggota Direksi maupun masing-masing yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan.

ORGAN-ORGAN PENDUKUNG
Organ Pendukung Dewan Komisaris adalah perangkat Dewan Komisaris yang berfungsi membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya. Organ Pendukung Dewan Komisaris terdiri dari Komite Audit, Komite GCG, Manajemen Risiko dan Investasi, dan Sekretaris Dewan Komisaris. Sedangkan Organ Pendukung Direksi terdiri dari Satuan Pengawasan Intern (SPI), Sekretaris Perusahaan, dan unit kerja lainnya.

MEKANISME TATA KELOLA PERUSAHAAN

KIE memiliki kebijakan, pedoman, prosedur dan hubungan yang jelas antara Dewan Komisaris dan Direksi dalam pengambilan keputusan sesuai dengan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya sebagai bentuk mekanisme dalam proses penerapan GCG. KIE senantiasa mengkaji dan menyempurnakan *soft-structure* GCG secara berkala guna memastikan penerapan GCG sejalan dengan kebutuhan proses bisnis maupun peraturan yang berlaku. Seluruh *soft-structure* penerapan GCG tersebut dipublikasikan dalam portal *Document Management System* dengan alamat www.kanstein.kie.co.id dan website KIE dengan alamat www.kie.co.id.

KEBIJAKAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Dalam penerapan GCG, KIE didukung oleh berbagai kebijakan yang menjadi pedoman bagi seluruh elemen Perusahaan dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG. Beberapa hal yang diatur dalam kebijakan meliputi:

1. Hubungan antara Perusahaan dengan Pemegang Saham
2. Tugas dan fungsi kerja masing-masing organ Perusahaan
3. Hubungan antara Perusahaan dengan Pemangku Kepentingan seperti karyawan, masyarakat, vendor dan pemasok
4. Prinsip-prinsip mengenai kebijakan Perusahaan seperti kebijakan Manajemen Risiko, Teknologi Informasi, Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Akuntansi, serta prinsip-prinsip
5. Kebijakan Perusahaan lainnya.

Berbagai kebijakan Tata Kelola Perusahaan telah disusun KIE dengan memperhatikan perkembangan regulasi dan

BOARD OF COMMISSIONERS
The Board of Commissioners comprises all members of the Board acting collectively as a Board. It is tasked with supervising and providing advice to the Board of Directors in managing the Company's business activities.

BOARD OF DIRECTORS
The Board of Directors consists of all members of the Board, each of whom bears full responsibility for managing the Company in accordance with its purposes and objectives, and for representing the Company both within and outside the court of law.

SUPPORTING ORGANS
The supporting organs of the Board of Commissioners are established to assist the Board of Commissioners in carrying out its supervisory duties. These include the Audit Committee, the GCG, Risk Management and Investment Committee, and the Secretary to the Board of Commissioners. The supporting organs of the Board of Directors consist of the Internal Audit Unit (SPI), the Corporate Secretary, and other organizational work units.

CORPORATE GOVERNANCE MECHANISM

KIE maintains clear policies, guidelines, procedures, and defined working relationships between the Board of Commissioners and the Board of Directors in decision-making processes, in accordance with their respective duties, functions, and responsibilities as part of the GCG implementation mechanism. KIE periodically reviews and refines its GCG soft structure to ensure that governance practices remain aligned with evolving business processes and applicable regulations. All GCG soft-structure documents are published on the Company's Document Management System portal at www.kanstein.kie.co.id and on the Company's official website at www.kie.co.id

CORPORATE GOVERNANCE POLICIES

In implementing GCG, KIE is supported by various corporate policies that serve as guidelines for all Company elements in applying GCG principles. These policies regulate, among others:

1. The relationship between the Company and its Shareholders
2. The duties and functions of each corporate organ
3. The relationship between the Company and its stakeholders, including employees, communities, vendors, and suppliers
4. Corporate principles and policies, including Risk Management, Information Technology, Occupational Health and Safety, Accounting policies, and other principles
5. Other corporate policies.

The Company's governance policies are developed by KIE with due consideration of regulatory developments and

perkembangan bisnis Perusahaan. Kebijakan tersebut menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam strategi Perusahaan yang sejalan dengan visi dan budaya KIE serta dimutakhirkan secara berkala. *Soft-structure* Tata Kelola Perusahaan KIE terdiri dari:

business evolution. These policies form an integral part of the Company's strategy, aligned with KIE's vision and corporate culture, and are updated periodically. KIE's GCG soft structure consists of the following:

Kebijakan Dan Prosedur Policies and Procedures	**Penetapan** Appointment
Anggaran Dasar Perusahaan Company's Articles of Association	Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan terakhir dalam Akta tertanggal 24 Oktober 2024 nomor 23 yang dibuat dihadapan Notaris Silvia Eny Kristiani, SH., MKn, notaris di Bontang yang mana akta tersebut telah mendapat persetujuan perubahan anggaran dasar perusahaan terbatas dari Kementerian Hukum Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan No. AHU.0068829.AH.01.02 tahun 2024. The Company's Articles of Association have undergone several amendments, with the most recent change recorded in Deed No. 23 dated October 24, 2024, drawn up before Notary Silvia Eny Kristiani, SH., MKn, a notary based in Bontang. The amendment has been approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decree No. AHU.0068829.AH.01.02 Year 2024.
Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik Code of Good Corporate Governance	Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG Code) dalam Surat Keputusan Direksi No. 30/SKD/DIR/XI-2020. Code of Good Corporate Governance (GCG), as stipulated in Board of Directors Decree No. 30/SKD/DIR/XI-2020.
Pedoman kerja Direksi dan Dewan Komisaris Board Manual (Board of Directors and Board of Commissioners work guidelines)	Pedoman kerja Dewan Komisaris dan Direksi KIE atau disebut Board manual dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi No. 31/SKD/DIR/XI-2020 yang ditandatangani pada 10 November 2020. Board Manual for the Board of Commissioners and Board of Directors of KIE, established by Board of Directors Decree No. 31/SKD/DIR/XI-2020, signed on November 10, 2020.
Pedoman Perilaku Code of Conduct	Surat Keputusan Direksi PT Kaltim Industrial Estate No. 32/SKD/DIR/XI-2020. Board of Directors Decree PT Kaltim Industrial Estate No. 32/SKD/DIR/XI-2020.
Pedoman Benturan Kepentingan Conflict of Interest Guideline	Surat Keputusan Direksi PT Kaltim Industrial Estate No. 6/SKD/DIR/III-2018 tentang Kebijakan Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*). Board of Directors Decree PT Kaltim Industrial Estate No. 6/SKD/DIR/III-2018 concerning Conflict of Interest Policy.
Pedoman Penanganan Gratifikasi Gratification Management Guideline	Surat Keputusan Direksi PT Kaltim Industrial Estate No. 07/SKD/DIR/VI-2021 Tanggal 10 Juni 2021. Board of Directors Decree PT Kaltim Industrial Estate No. 07/SKD/DIR/VI-2021, dated June 10, 2021.
Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran Whistleblowing System Guidelines	Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Kaltim Industrial Estate No. KEP-03/DEKOM/KIE/VI/2020 dan 13/SKD/DIR/KIE/V-2020 Tanggal 29 Mei 2020. Joint Decree of the Board of Commissioners and Board of Directors No. KEP-03/DEKOM/KIE/VI/2020 and No. 13/SKD/DIR/KIE/V-2020, dated May 29, 2020.
Pedoman LHKPN State Wealth Report (LHKPN) Guideline	Surat Keputusan Direksi PT Kaltim Industrial Estate No. 24/SKD/DIR/VIII-2018 Tanggal 6 Agustus 2018. Board of Directors PT Kaltim Industrial Estate Decree No. 24/SKD/DIR/VIII-2018, dated August 6, 2018.
Pedoman Sistem Pengendalian Internal Internal Control System Guideline	Surat Keputusan Direksi (SKD) No. 22/DIR/XII-2016 tentang Pedoman Pengawasan Intern. Board of Directors Decree No. 22/DIR/XII-2016 concerning the Internal Control Guidelines.
Pedoman Manajemen Risiko Risk Magement Guideline	Surat Keputusan Direksi PT Kaltim Industrial Estate No. 17/SKD/DIR/VIII-2018. Board of Directors Decree PT Kaltim Industrial Estate No. 17/SKD/DIR/VIII-2018.
Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Guidelines for Procurement of Goods and Services	• PPU-PCR-01 tanggal 16 November 2020 tentang Prosedur Pengadaan Jasa. • PPU-PCR-01B tanggal 30 November 2020 tentang Prosedur Pengadaan Barang. • PPU-PCR-01, dated November 16, 2020, concerning Procurement Procedures for Services. • PPU-PCR-01B, dated November 30, 2020, concerning Procurement Procedures for Goods.
Piagam Internal Audit Internal Audit Charter	Piagam Satuan Pengawasan Intern PT Kaltim Industrial Estate ditetapkan di Bontang tanggal 09 Januari 2019. Ditandatangani oleh Komisaris Utama, Direktur Utama dan Kepala SPI. Internal Audit Charter of PT Kaltim Industrial Estate, enacted in Bontang on January 9, 2019, and signed by the President Commissioner, President Director, and Head of the Internal Audit Unit.

Kebijakan Dan Prosedur Policies and Procedures	Penetapan Appointment
Piagam Komite Audit Audit Committee Charter	Keputusan Dewan Komisaris No. KEP 01/Dekom/KIE/III/2017 tentang Piagam Komite. Board of Commissioners Decree No. KEP-01/DEKOM/KIE/III/2017, regarding the Audit Committee Charter.
Piagam Komite GCG, Manajemen Risiko & Investasi Charter of GCG, Risk Management & Investment Committee	Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-01/Dekom/KIE/X/2018 tentang Piagam Komite GCG, Manajemen Risiko dan Investasi. Board of Commissioners Decree No. KEP-01/DEKOM/KIE/X/2018, regarding the GCG, Risk Management, and Investment Committee Charter.

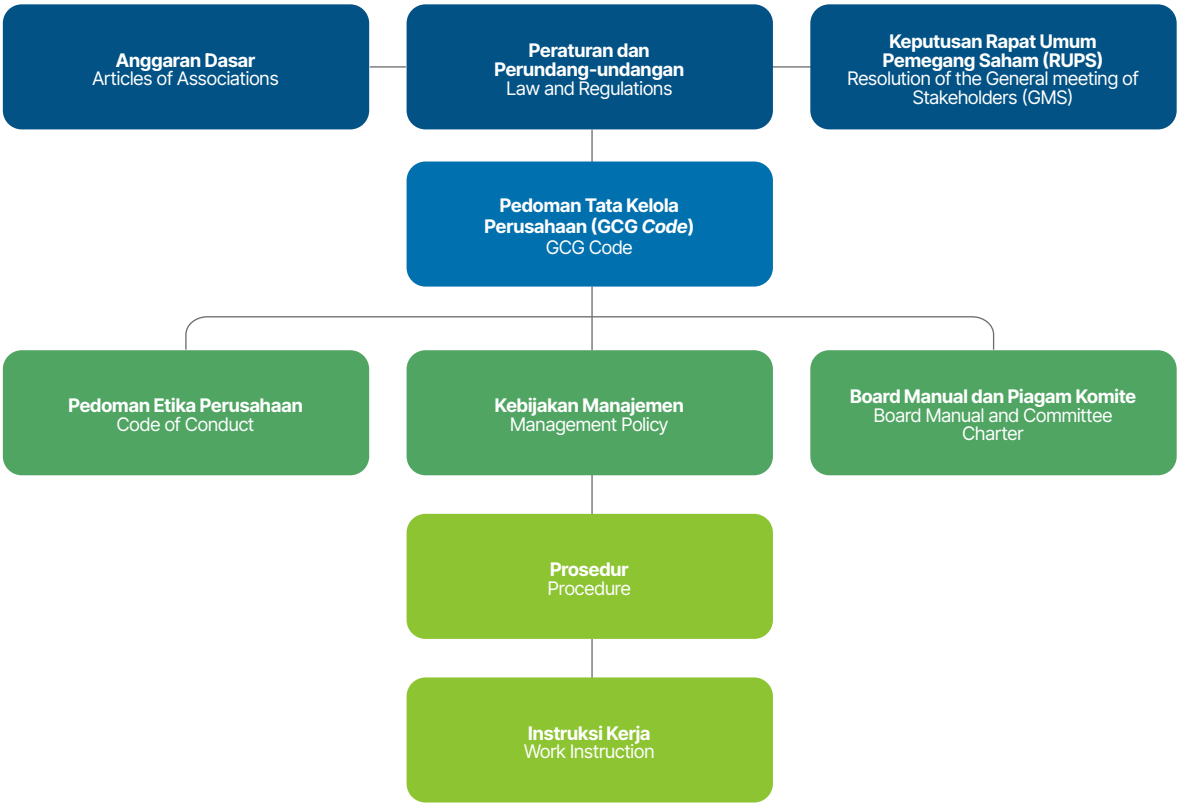
SOSIALISASI KEBIJAKAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Sosialisasi kebijakan Tata Kelola Perusahaan dilaksanakan sebagai bentuk komitmen Perusahaan untuk senantiasa mengingatkan seluruh Pemangku Kepentingan betapa pentingnya implementasi GCG dalam setiap aktivitas pekerjaan. Sosialisasi dilakukan melalui situs *web* Perusahaan, *e-mail* dan sosialisasi langsung kepada karyawan dan Pemangku Kepentingan lainnya.

SOCIALIZATION OF CORPORATE GOVERNANCE POLICY

The socialization of Corporate Governance policies is carried out as a form of the Company's commitment to consistently remind all Stakeholders of the importance of implementing GCG in every work activity. The socialization is conducted through the Company's website, email, and direct socialization to employees and other Stakeholders.

HIRARKI KEBIJAKAN DAN PROSEDUR OPERASIONAL
HIERARCHY OF OPERATIONAL POLICIES AND PROCEDURES



Pengukuran Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik
Good Corporate Governance Assessment

Penilaian penerapan GCG di lingkup Perusahaan dilakukan dengan mengacu pada peraturan atau keputusan Kementerian BUMN, sebagaimana terakhir diubah melalui Peraturan Menteri BUMN Republik Indonesia (RI) No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.

Adapun terkait indikator penilaian, sebelumnya Perusahaan mengacu pada Surat Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN RI No. SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara yang kemudian dicabut berdasarkan Salinan Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN RI No. SK-12/S.MBU/08/2023 tanggal 16 Agustus 2023, tentang Pencabutan Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara No. SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara.

Dengan dicabutnya Keputusan Sekretaris Menteri BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 dan arahan Pemegang Saham dengan Surat Nomor 01198/D/MR/D11400/IT/2024 perihal Pencabutan Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-16 tanggal 18 Oktober 2023, menyampaikan bahwa pelaksanaan penilaian dan evaluasi GCG di KIE sampai dengan tahun 2025 dengan menggunakan kriteria penilaian Kementerian BUMN untuk dihentikan dahulu sampai dengan terbitnya keputusan dari Kementerian BUMN sehingga pada kinerja tahun 2025 Perusahaan belum melakukan pengukuran GCG secara khusus dengan parameter yang berlaku. Namun, dalam pelaksanaan monitoring pelaksanaan GCG KIE telah melakukan upaya tindak lanjut atas hasil penilaian yang dilaksanakan pada tahun sebelumnya sesuai capaian hasil penilaian pada tahun 2022 sebagai berikut:

The assessment of the GCG implementation within the Company refers to the prevailing regulations and decrees of the Ministry of State-Owned Enterprises (SOEs), most recently amended by Regulation of the Minister of SOEs of the Republic of Indonesia No. PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines on Governance and Significant Corporate Actions of State-Owned Enterprises.

With respect to assessment indicators, the Company previously referred to the Decree of the Secretary of the Ministry of SOEs of the Republic of Indonesia No. SK-16/S.MBU/2012 dated June 6, 2012, concerning Indicators/Parameters for the Assessment and Evaluation of the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises. This decree was subsequently revoked pursuant to the Copy of the Decree of the Secretary of the Ministry of SOEs of the Republic of Indonesia No. SK-12/S.MBU/08/2023 dated August 16, 2023, regarding the Revocation of the Decree of the Secretary of the Ministry of SOEs No. SK-16/S.MBU/2012 on Indicators/Parameters for the Assessment and Evaluation of the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises.

Following the revocation of Decree No. SK-16/S.MBU/2012 and the directive of the Shareholder through Letter No. 01198/D/MR/D11400/IT/2024 concerning the Revocation of the Decree of the Secretary of the Ministry of SOEs No. SK-16 dated October 18, 2023, it was conveyed that the implementation of GCG assessment and evaluation at KIE, using the Ministry of SOEs assessment criteria, would be temporarily suspended until further decision is issued by the Ministry of SOEs. Accordingly, for the 2025 performance year, the Company did not conduct a specific GCG assessment using the previously applicable parameters. Nevertheless, in monitoring the implementation of GCG, KIE has undertaken follow-up actions based on the results of the most recent assessment conducted in 2022, as follows:

Aspek Aspect	Aspek Tata Kelola Governance Aspects	Bobot Weight	Capaian GCG 2022 GCG Achievement 2022		Predikat Predicate
			Aktual Actual	%	
I	Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Commitment to the Implementation of Good Corporate Governance	7,000	6,41	91,54%	Sangat Baik Very Good
II	Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal Shareholders and GMS/ Capital Owners	9,000	7,28	80,93%	Baik Good
III	Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas Board of Commissioners/Supervisory Board	35,000	31,17	89,06%	Sangat Baik Very Good
IV	Direksi Directors	35,000	32,63	93,23%	Sangat Baik Very Good
V	Pengungkapan dan Keterbukaan Informasi Disclosure and Transparency of Information	9,000	7,33	81,44%	Baik Good
VI	Aspek Lainnya Other Aspects	5,000	N/A	N/A	N/A
	TOTAL	100	84,82		Baik Good

Penilaian Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik
Assessment of The Implementation of Good Corporate Governance

DASAR PENILAIAN DAN METODE

Sebagai Anak Perusahaan yang erat dalam lingkungan BUMN, KIE melaksanakan pengukuran GCG pada tahun 2022 berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara, Perusahaan melakukan penilaian terhadap penerapan GCG sebagai berikut:

1. Penilaian (*assessment*) yaitu program untuk mengidentifikasi pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik melalui pengukuran pelaksanaan dan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dilaksanakan secara berkala setiap 2 (dua) tahun.
2. Evaluasi (*review*), yaitu program untuk mendeskripsikan tindak lanjut pelaksanaan dan penerapan GCG yang dilakukan pada tahun berikutnya setelah penilaian sebagaimana dimaksud pada point 1, yang meliputi evaluasi terhadap hasil penilaian dan tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan.

Metode pengukuran penerapan GCG di lingkungan Perusahaan secara kuantitatif mengacu pada Salinan Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN Nomor SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter

ASSESSMENT BASIS AND METHOD

As a Subsidiary closely integrated within the SOEs environment, KIE carries out GCG assessments based on Article 44 paragraph (1) of the Minister of SOEs Regulation Number PER-09/MBU/2012 dated July 6, 2012 concerning Amendments to the Minister of State-Owned Enterprises Regulation Number PER-01/MBU/2011 dated August 1, 2011 concerning Implementation of GCG in State-Owned Enterprises, the Company conducts assessments on the GCG implementation as follows:

1. Assessment, a program to identify the implementation of Good Corporate Governance through the measurement of practices and application of Good Corporate Governance, which is carried out periodically every 2 (two) years.

2. Evaluation (Review), a program to describe the follow-up actions taken on the implementation and application of GCG in the year following the assessment referred to in point 1, including evaluation of assessment results and follow-up actions on improvement recommendations.

The method used to quantitatively measure the implementation of GCG within the Company refers to the copy of the Decree of the Secretary of the Ministry of SOEs Number SK-16/S.MBU/2012 dated June 6, 2012 concerning

Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN. Metode penilaian dan evaluasi ini dilakukan dengan menggunakan alat ukur yang terdiri dari 6 (enam) aspek dengan bobot yang telah ditentukan sebagaimana diatur dalam Salinan Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara No. SK16/S.MBU/2012.

Indicators/Parameters for the Assessment and Evaluation of the Implementation of Good Corporate Governance in SOEs. This assessment and evaluation method is carried out using a measurement tool consisting of 6 (six) aspects with predetermined weightings as stipulated in the copy of the Decree of the Secretary of the Ministry of State-Owned Enterprises No. SK-16/S.MBU/2012.

6 ASPEK ASSESSMENT GCG (KEPUTUSAN SEKRETARIS MENTERI BUMN NO. SK-16/S.MBU/2012)
6 GCG ASPECT ASSESSMENT (DECREE OF THE SECRETARY OF THE MINISTER OF SOES NO. SK-16/S.MBU/2012)



Jenis Penilaian Type of Assessment	:	Penilaian Assessment
Penilai Assessor	:	PT Dinamika Pasifik Solusindo
Periode Penerapan Implementation Period	:	1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 January 1, 2022 until December 31, 2022
Tahun Ukur Measurement Year	:	2022
Waktu Pengukuran Measurement Time	:	11 Januari sampai dengan 21 Februari 2023 January 11 to February 21, 2023

SKOR ASSESSMENT GCG 2025

Tahun 2025 KIE tidak melakukan pengukuran terhadap penerapan GCG dengan metode kuantitatif. Hasil skor terakhir yang disajikan merupakan penilaian yang dilakukan pada tahun 2022 ketika SK-16 masih berlaku.

GCG ASSESSMENT SCORE 2025

In 2025, KIE did not carry out GCG assessment with quantitative method. The latest score disclosed was assessment in 2022 when the SK-16 is still valid.

PENCAPAIAN ASSESSMENT PENERAPAN GCG 5 TAHUN TERAKHIR
ACHIEVEMENT OF GCG IMPLEMENTATION ASSESSMENT IN THE LAST 5 YEARS

Tahun Penilaian Year of Assessment	Metode dan Pelaksana Penilaian Method and the Assessor	Skor Score	Klasifikasi Classification
2025	N/A	N/A	N/A
2024	N/A	N/A	N/A
2023	N/A	N/A	N/A
2022	Penilaian – oleh PT Dinamika Pasifik Solusindo Assessment – by PT Dinamika Pasifik Solusindo	84,82	Baik Good
2021	Penilaian – oleh PT Dinamika Pasifik Solusindo Assessment – by PT Dinamika Pasifik Solusindo	80,60	Baik Good
2020	Penilaian Mandiri – oleh Tim TKPMR PT Pupuk Kaltim Self Assessment - by the PT Pupuk Kaltim TKPMR Team	80,325	Baik Good
2019	Penilaian Mandiri – oleh Tim TKPMR PT Pupuk Kaltim Self Assessment - by the PT Pupuk Kaltim TKPMR Team	77,135	Baik Good

RINCIAN HASIL PENILAIAN PER ASPEK 5 TAHUN TERAKHIR
DETAILS OF ASSESSMENT RESULTS PER ASPECT FOR THE LAST 5 YEARS

No	Aspek Pengujian/Indikator/ Parameter Assessment Aspect/Indicator/ Parameter	Bobot Weight	Hasil Result					
			2025	2024	2023	2022	2021	2020
1	Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan Commitment to the Sustainable Implementation of Good Corporate Governance	7.00	N/A	N/A	N/A	6,41	6,81	6,404
2	Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal Shareholders and GMS/Investors	9.00	N/A	N/A	N/A	7,28	7,41	7,327
3	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Board of Commissioners/Supervisory Board	35.00	N/A	N/A	N/A	31,17	29,00	29,109
4	Direksi Board of Directors	35.00	N/A	N/A	N/A	32,63	30,23	31,619
5	Pengungkapan Informasi dan Transparansi Information Disclosure and Transparency	9.00	N/A	N/A	N/A	7,33	7,14	5,866
6	Aspek Lainnya Other Aspects	5.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL		100.00	N/A	N/A	N/A	84,82	80,60	80,325
Klasifikasi Classification						BAIK GOOD	BAIK GOOD	BAIK GOOD

Hasil penilaian tersebut menunjukkan konsistensi yang sangat baik atas penerapan GCG di Perusahaan yang selalu memperhatikan etika bisnis serta mengungkapkan data/ informasi yang material dan relevan secara transparan, akurat, terpercaya, dan tepat waktu.

The assessment results demonstrated a strong consistency in the GCG implementation within the Company, consistently upholding business ethics and disclosing material and relevant data/information in a transparent, accurate, reliable, and timely manner.

TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PENILAIAN GCG

Di tengah kekosongan alat ukur atas penerapan GCG yang ditetapkan oleh Pemegang Saham, untuk menjaga konsistensi penerapan GCG Perusahaan terus melaksanakan pemenuhan atas *Area of Improvement* (AoI) serta melakukan monitoring atas tindak lanjut rekomendasi hasil penilaian tahun 2022 sebagai berikut:

FOLLOW-UP RECOMMENDATION OF GCG ASSESSMENT RESULT

In the absence of a formal GCG measurement tool designated by the Shareholders, the Company remains committed to maintaining consistency in the GCG implementation by continuing to fulfill the identified Areas of Improvement (AoI) and monitoring the follow-up actions to the recommendations from the 2022 GCG assessment, as outlined below:

No	Rekomendasi Recommendations	Tindak Lanjut Follow-Up Action
Aspek 1: Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan Aspect 1: Commitment to Corporate Governance Implementation		
1	Pemutakhiran *Code* of GCG sesuai dengan pedoman/ peraturan terkini. Update the GCG Code in accordance with the latest guidelines/regulations.	Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG *Code*) saat ini masih mengacu pada pedoman yang berlaku dan akan dilakukan pemutakhiran secara bertahap dengan mempertimbangkan perkembangan peraturan perundang-undangan serta praktik tata kelola yang berlaku. The Company's Good Corporate Governance (GCG) Code currently refers to the prevailing guidelines and will be updated progressively by taking into account regulatory developments and applicable governance practices.

No	Rekomendasi Recommendations	Tindak Lanjut Follow-Up Action
2	Melengkapi muatan *Code of Conduct* terkait pengaturan hubungan dengan PS dan hubungan dengan Pemerintah. Complete the content of the Code of Conduct related to the regulation of relations with Shareholders and relations with the Government.	Telah dilakukan pembaharuan Pedoman Etika dan Perilaku yang mengatur hubungan dengan Pemegang Saham dan hubungan dengan Pemerintah atau stakeholder lainnya. *Evidence*: SK Direksi No. 1A/SKD/DIR/I-2022 tentang Pedoman Kode Etik (*Code of Conduct*) KIE. An update of the Code of Ethics and Conduct has been carried out, which regulates the relations with Shareholders and the relations with the Government or other stakeholders. Evidence: Board of Directors Decree No. 1A/SKD/DIR/I-2022 concerning the Code of Conduct of KIE.
3	Melaksanakan evaluasi penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*self assessment*) yang dilakukan pada tahun berikutnya setelah penilaian. Conduct an evaluation of the implementation of Good Corporate Governance (self-assessment) in the year following the assessment.	Telah dilakukan evaluasi terhadap penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, sebagai program untuk mendeskripsikan tindak lanjut pelaksanaan dan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di perusahaan yang dilakukan pada tahun berikutnya setelah penilaian. *Evidence*: Tindak lanjut *Area of Improvement* (AOI) Per Triwulan yang disampaikan ke Pemegang Saham dan Dewan Komisaris. An evaluation of the implementation of Good Corporate Governance has been conducted as a program to describe the follow-up on the implementation of GCG within the Company, carried out in the year following the assessment. Evidence: Follow-up on Areas of Improvement (AOI) on Quarterly Basis.
4	Pejabat wajib lapor diharapkan menyusun LHKPN secara tepat waktu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Reporting officials are expected to submit their State Officials' Wealth Report (LHKPN) in a timely manner in accordance with the prevailing laws and regulations.	Seluruh pejabat wajib lapor telah menyusun LHKPN secara tepat waktu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. *Evidence*: Bukti Lapor LHKPN Dewan Komisaris - Direksi periode 2024. All reporting officials have submitted their LHKPN on time and in compliance with the prevailing legal provisions. Evidence: LHKPN Submission Proof for the Board of Commissioners and Directors for the 2024 period.
Aspek 2: Pemegang Saham dan RUPS Aspect 2: Shareholders and GMS		
1	Memastikan adanya pengaturan pengunduran diri Direksi dari rangkap jabatan dengan mekanisme waktu paling lambat 30 hari sejak terjadi perangkapan jabatan tersebut. Ensure the regulation of the resignation of Directors from concurrent positions is in place, with a mechanism that mandates resignation within a maximum of 30 days from the occurrence of such concurrent positions.	Proses tindak lanjut atas hal ini sedang dalam tahap pembahasan di Pemegang Saham. The follow-up process for this matter is currently under discussion at the Shareholders level.
2	Mendokumentasikan pelaksanaan pencarian usulan dan penilaian calon anggota Dewan Komisaris di KIE. Document the implementation of the nomination search and assessment process for prospective members of the Board of Commissioners at KIE.	Proses tindak lanjut atas hal ini sedang dalam tahap pembahasan di Pemegang Saham. The follow-up process for this matter is currently under discussion at the Shareholders level.

No	Rekomendasi Recommendations	Tindak Lanjut Follow-Up Action
3	Melaksanakan penetapan anggota Dewan Komisaris oleh RUPS selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak masa jabatan tersebut berakhir dan memastikan adanya penetapan Komisaris Independen secara eksplisit oleh RUPS. Appoint members of the Board of Commissioners by the GMS no later than 30 (thirty) days after the expiration of their term of office and ensure the explicit appointment of an Independent Commissioner by the GMS.	Proses tindak lanjut atas hal ini sedang dalam tahap pembahasan di Pemegang Saham. The follow-up process for this matter is currently under discussion at the Shareholders level.
4	Menetapkan jumlah maksimum jabatan Dewan Komisaris yang boleh dipegang oleh seorang anggota Dewan Komisaris. Set a maximum number of positions that a member of the Board of Commissioners may hold.	Proses tindak lanjut atas hal ini sedang dalam tahap pembahasan di Pemegang Saham. The follow-up process for this matter is currently under discussion at the Shareholders level.
5	Melakukan pembahasan dan memberikan pengesahan/ persetujuan rancangan RJPP atau Revisi RJPP tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam SK 16 dan KEP102/ MBU/2002. Discuss and grant ratification/approval of the Corporate Long-TermPlan (RJPP) draft or RJPP revisions in a timely manner as stipulated in SK-16 and KEP-102/MBU/2002.	Proses tindak lanjut atas hal ini sedang dalam tahap pembahasan di Pemegang Saham. The follow-up process for this matter is currently under discussion at the Shareholders level.
6	Menetapkan pedoman penilaian dan target kinerja Direksi (individu). Establish guidelines for the performance evaluation and individual performance targets of the Board of Directors.	Proses tindak lanjut atas hal ini sedang dalam tahap pembahasan di Pemegang Saham. The follow-up process for this matter is currently under discussion at the Shareholders level.
7	Menetapkan Pedoman gaji/honorarium, tunjangan dan fasilitas serta Pedoman tantiem/insentif kinerja Direksi dan Dewan Komisaris yang memuat formulasi perhitungannya. Establish guidelines for salaries/honorarium, allowances and facilities, as well as guidelines for performance-based bonuses/incentives for the Board of Directors and Board of Commissioners, including the formulation for their calculation.	Proses tindak lanjut atas hal ini sedang dalam tahap pembahasan di Pemegang Saham. The follow-up process for this matter is currently under discussion at the Shareholders level.
8	Menindaklanjuti AoI atas assessment pelaksanaan GCG di KIE dengan persentase tindak lanjut sebesar 85%. Follow up on the AoI from the GCG implementation assessment at KIE with a follow-up completion rate of 85%.	Proses tindak lanjut atas hal ini sedang dalam tahap pembahasan di Pemegang Saham. The follow-up process for this matter is currently under discussion at the Shareholders level.
Aspek 3: Dewan Komisaris Aspect 3: Board of Commissioners		
1	Merealisasikan kegiatan pelatihan untuk masing-masing anggota Dewan Komisaris sesuai dengan RKAT Dewan Komisaris. Implement training activities for each member of the Board of Commissioners in accordance with the Board of Commissioners' RKAT	Proses tindak lanjut atas hal ini sedang dalam tahap pembahasan. The follow-up process for this matter is currently under discussion.
2	Mengatur tingkat kesegeraan untuk mengkomunikasikan keputusan Dewan Komisaris kepada Direksi, maksimal 7 hari sejak ditandatangani. Regulate the maximum time frame to communicate decisions of the Board of Commissioners to the Board of Directors, which is no later than 7 days after being signed.	Proses tindak lanjut atas hal ini sedang dalam tahap pembahasan. The follow-up process on this matter is currently under discussion.
3	Melakukan proses telaah atas rancangan RJPP dan perlu menggunakan seluruh perangkat (Organ Pendukung Dewan Komisaris) secara optimal dalam proses telaah rancangan RJPP. Conduct a review process of the RJPP draft and ensure the optimal use of all tools (Supporting Organs of the Board of Commissioners) in the process of reviewing the RJPP draft.	Proses tindak lanjut atas hal ini sedang dalam tahap pembahasan. The follow-up process on this matter is currently under discussion.
4	Menyusun rencana kerja terkait penunjukan calon auditor dalam RKAT Dewan Komisaris. Develop a work plan related to the appointment of auditor candidates in the RKAT of the Board of Commissioners.	Proses tindak lanjut atas hal ini sedang dalam tahap pembahasan. The follow-up process on this matter is currently under discussion.

No	Rekomendasi Recommendations	Tindak Lanjut Follow-Up Action
5	Melakukan penilaian kinerja Direksi berdasarkan telaahan kriteria, target dan indikator kinerja utama yang tercakup dalam Kontrak Manajemen Direksi secara individu dengan realisasi pencapaian masing-masing. Assessing the performance of the Board of Directors based on a review of the criteria, targets and key performance indicators included in the Management Contract of the Board of Directors individually with the realization of their respective achievements.	Proses tindak lanjut atas hal ini sedang dalam tahap pembahasan. The follow-up process on this matter is currently under discussion.
6	Menyusun rencana kerja terkait kegiatan telaah pengusulan remunerasi Direksi. Develop a work plan related to activities that have proposed the remuneration of the Board of Directors.	Proses tindak lanjut atas hal ini sedang dalam tahap pembahasan. The follow-up process on this matter is currently under discussion.
7	Membuat Pakta Integritas yang dilampirkan dalam Usulan Tindakan Direksi yang harus mendapatkan rekomendasi dari Dewan Komisaris dan persetujuan RUPS. Make an Integrity Pact attached to the Proposed Action of the Board of Directors which must obtain recommendations from the Board of Commissioners and approval from the GMS.	Proses tindak lanjut atas hal ini sedang dalam tahap pembahasan. The follow-up process on this matter is currently under discussion.
8	Mengevaluasi pencapaian kinerja masing-masing anggota Dewan Komisaris dan dituangkan dalam risalah rapat Dewan Komisaris. Evaluate the performance achievement of each member of the Board of Commissioners and set out in the minutes of the Board of Commissioners meeting.	Proses tindak lanjut atas hal ini sedang dalam tahap pembahasan. The follow-up process on this matter is currently under discussion.
9	Komite GMRI perlu menyusun program kerja tahunan memuat telaah untuk *self assessment* kinerja Komite GMRI. The GMRI Committee needs to develop an annual work program containing reviews for self-assessment of the GMRI Committee's performance.	Komite GMRI telah menyusun program kerja tahunan (RKA Komite GMRI 2024). *Evidence*: RKA Komite GMRI 2024. The GMRI Committee has developed an annual work program (RKA GMRI Committee 2024). Evidence: RKA GMRI Committee 2024.
10	Komite Dewan Komisaris perlu melaporkan laporan secara triwulanan dan tahunan kepada Dewan Komisaris, minimal memuat perbandingan realisasi kegiatan dengan program kerja tahunan serta substansi hasil kegiatan dan rekomendasinya. The Board of Commissioners Committee needs to report quarterly and annually to the Board of Commissioners, at least containing a comparison of the realization of activities with the annual work program as well as the substance of the results of activities and recommendations.	Proses tindak lanjut atas hal ini sedang dalam tahap pembahasan. The follow-up process on this matter is currently under discussion.
Aspek 4: Direksi Aspect 4: Boards of Directors		
1	Melakukan peninjauan dan penyempurnaan SOP secara berkala. To review and improve the SOPs periodically.	Sudah dibentuk Tim Evaluasi Penyusunan dan Penyempurnaan Prosedur KIE. Kemudian telah dilakukan peninjauan dan penyempurnaan SOP secara berkala (berlanjut). *Evidence*: SKD No. 06/DIR/IV-2023 An evaluation team has been formed for the preparation and improvement of KIE procedures. SOPs have been reviewed and improved periodically (ongoing). Evidence: SKD No. 06/DIR/IV-2023
2	Menetapkan Prosedur Penyusunan RJPP dan menyampaikan rancangan RJPP kepada RUPS dan/atau Dewan Komisaris tepat waktu. Establish RJPP Preparation Procedures and submit the draft RJPP to the GMS and/or Board of Commissioners on time.	• Telah disusun Prosedur penyusunan RJPP. Prosedur RJPP No. PPU-RJP-001 tanggal 6 September 2023. • RJPP KIE berlaku 2020-2024, saat ini dalam proses update/ pembaharuan RJPP perusahaan. • The procedure for preparing the RJPP has been prepared. RJPP Procedure No. PPU-RJP-001 dated September 6, 2023. • KIE's RJPP is valid for 2020-2024, currently in the process of updating the Company's RJPP.

No	Rekomendasi Recommendations	Tindak Lanjut Follow-Up Action
3	Melakukan telaah atas rancangan RKAP yang disusun oleh Tim Penyusun RKAP dan menindaklanjuti hasil telaahan berupa tanggapan/pendapat Dewan Komisaris atas rancangan RKAP tersebut. Reviewing the draft RKAP prepared by the RKAP Compilation Team and following up on the results of the review in the form of responses/opinions of the Board of Commissioners on the draft RKAP.	Telah dilakukan proses telaah rancangan RKAP yang disusun oleh Tim Penyusun RKAP dan menindaklanjuti hasil telaahan berupa tanggapan/pendapat Dewan Komisaris atas rancangan RKAP. *Evidence*: Buku RKAP 2024 dan surat Dewan Komisaris No. 02B/DEKOM/KIE/II/2024 tanggal 29 Januari 2024 perihal Tanggapan Dewan Komisaris atas Usulan RKAP 2024. There has been a process of reviewing the draft RKAP prepared by the RKAP Compilation Team and following up on the results of the review in the form of responses/opinions of the Board of Commissioners on the draft RKAP. Evidence: RKAP 2024 book and letter from the Board of Commissioners No. 03B/DEKOM/ KIE/I/2023 dated January 29, 2024 regarding the Board of Commissioners' Response to the Proposed RKAP 2024.
4	Memastikan adanya peningkatan objektivitas dan transparansi dalam proses penempatan karyawan pada setiap level jabatan. Ensure increased objectivity and transparency in the employee placement process at every position level.	Memastikan tingkat objektivitas & transparansi yang memadai dalam proses penempatan karyawan pada setiap level jabatan sesuai prosedur yang berlaku. *Evidence*: • Prosedur No. SDM-001 perihal Rotasi, Mutasi, Promosi Jabatan dan Penugasan • Hasil asesmen karyawan Ensure an adequate level of objectivity & transparency in the process of placing employees at each position level in accordance with applicable procedures. Evidence: • Procedure No. HR-001 regarding Rotation, Mutation, Promotion and Assignment. • Employee assessment result
5	Memastikan adanya mekanisme untuk merespon usulan peluang bisnis dari manajemen di bawah Direksi/anggota Direksi/Dewan Komisaris. Ensuring there is a mechanism to respond to proposals for business opportunities from management under the Board of Directors / members of the Board of Directors / Board of Commissioners.	Telah disusun mekanisme untuk merespon usulan peluang bisnis dari manajemen di bawah Direksi/anggota Direksi/Dewan Komisaris. *Evidence*: Prosedur No. IKJ-BIS-005 tanggal 1 Februari 2023. A mechanism has been developed to respond to proposals for business opportunities from management under the Board of Directors / members of the Board of Directors / Board of Commissioners. Evidence: Procedure No. IKJ-BIS-005 dated February 1, 2023
6	Menetapkan *Information Technology Detail Plan* sebagai penjabaran lebih lanjut dari *Information Technology Master Plan* dan melaporkan pelaksanaan sistem TI secara tertulis kepada Dewan Komisaris, termasuk hasil audit TI. Establish the Information Technology Detail Plan as a further elaboration of the Information Technology Master Plan and report the implementation of the IT system in writing to the Board of Commissioners, including the results of IT audits.	Telah disusun *Information Technology Detail Plan* sebagai penjabaran lebih lanjut dari *Information Technology Master Plan.* *Evidence*: Master Plan TI tanggal 20 Mei 2022. An Information Technology Detail Plan has been prepared as a further elaboration of the Information Technology Master Plan. Evidence: IT Master Plan dated May 20, 2022.

No	Rekomendasi Recommendations	Tindak Lanjut Follow-Up Action
7	Memastikan SOP dan SPM diinformasikan secara terbuka kepada publik (pelanggan/ pemasok) dan memastikan survei pelanggan memuat unsur kemudahan layanan dan *fairness* untuk melihat tingkat kualitas yang diberikan KIE kepada pelanggan. Ensure SOPs and SPM are openly shared with the public (customers/suppliers) and ensure customer surveys include elements of service convenience and fairness to see the level of quality provided by KIE to customers.	SOP dan SPM telah diinformasikan secara terbuka kepada publik melalui *website* KIE (kie.co.id). SOPs and SPM have been openly informed to the public through the KIE website (kie.co.id).
8	Menyusun kebijakan/program pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan efektivitas kinerja karyawan dan kebijakan evaluasi kinerja pasca pendidikan untuk mengukur hasil-hasil pendidikan dan pelatihan serta memastikan adanya tingkat keadilan yang memadai atas kesempatan pendidikan dan pelatihan bagi karyawan. Develop education and training policies/programs to improve the effectiveness of employee performance and post-education performance evaluation policies to measure education and training outcomes and ensure an adequate level of equity in education and training opportunities for employees.	Telah terdapat kebijakan/ program pendidikan dan pelatihan untuk memberikan peningkatan *knowledge*, skill, dan ability yang dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas kinerja karyawan dan kebijakan evaluasi kinerja pasca pendidikan untuk mengukur hasil-hasil pendidikan dan pelatihan. *Evidence*: SKD No. 11A/SKD/DIR/IV-2020 tentang Pelatihan dan Pengembangan Karyawan. There is an education and training policy/program to provide increased knowledge, skills and abilities that can be used to improve the effectiveness of employee performance and a post-education performance evaluation policy to measure the results of education and training. Evidence: SKD No. 11A/SKD/DIR/IV-2020 on Employee Training and Development.
9	Memastikan adanya kegiatan sosialisasi kebijakan remunerasi ke seluruh karyawan. Ensure the socialization of remuneration policies to all employees.	Telah terdapat sosialisasi kebijakan remunerasi berupa penyampaian surat ke Ketua Serikat Pekerja untuk selanjutnya disampaikan ke karyawan. *Evidence*: Surat sosialisasi pengupahan No. 118.01/SDM/KIE/B.I/ 2023 tanggal 12 Januari 2023 There has been a socialization of the remuneration policy in the form of submitting a letter to the Head of Sepkar to be conveyed to employees. Evidence: Wage socialization letter No. 118.01/SDM/KIE/B.I/ 2023 dated January 12, 2023.
10	Memastikan adanya cascading atas sertifikasi terhadap laporan keuangan kepada tingkatan di bawah Direksi yang menjadi entitas akuntansi dan pelaporan atas laporan keuangan yang akan dikonsolidasikan. Ensure cascading of certification of financial statements to levels below the Board of Directors that are accounting and reporting entities for the financial statements to be consolidated.	Akan dilakukan *cascading* atas sertifikasi terhadap laporan keuangan kepada tingkatan di bawah Direksi yang menjadi entitas akuntansi dan pelaporan atas laporan keuangan yang akan dikonsolidasikan. There will be cascading of the certification of the financial statements to the level below the Board of Directors which is the accounting and reporting entity for the financial statements to be consolidated.
11	Memastikan adanya evaluasi atas penerapan sistem pengendalian internal dan memastikan penyusunan *Internal Control Report* memuat pernyataan bahwa manajemen bertanggung jawab untuk menetapkan dan memelihara suatu struktur pengendalian intern dan prosedur pelaporan keuangan yang memadai serta penilaian atas efektivitas struktur pengendalian intern dan prosedur pelaporan keuangan pada akhir tahun buku Perusahaan. Ensure an evaluation of the implementation of the internal control system and ensure that the preparation of the Internal Control Report contains a statement that management is responsible for establishing and maintaining an adequate internal control structure and financial reporting procedures and an assessment of the effectiveness of the internal control structure and financial reporting procedures at the end of the Company's financial year.	Telah disusun *Internal Control Report* yang memuat pernyataan bahwa manajemen bertanggung jawab untuk menetapkan dan memelihara suatu struktur pengendalian intern dan prosedur pelaporan keuangan yang memadai serta penilaian atas efektivitas struktur pengendalian intern dan prosedur pelaporan keuangan pada akhir tahun buku Perusahaan. *Evidence*: Laporan Keuangan KIE 2024 (KAP). An Internal Control Report has been prepared which contains a statement that management is responsible for establishing and maintaining an adequate internal control structure and financial reporting procedures and an assessment of the effectiveness of the internal control structure and financial reporting procedures at the end of the Company's financial year. Evidence: KIE 2024 Financial Statements (KAP).

No	Rekomendasi Recommendations	Tindak Lanjut Follow-Up Action
12	Memastikan adanya rencana kerja dan pelaksanaan program kemitraan dengan usaha kecil. Ensure there is a work plan and implementation of partnership programs with small businesses.	Telah disusun rencana kerja terkait program kemitraan dengan usaha kecil yaitu bantuan pinjam pakai lahan untuk kegiatan umkm. *Evidence*: Laporan CSR KIE 2024. A work plan has been developed related to the partnership program with small businesses, namely land borrowing assistance for MSMEs activities. Evidence: KIE CSR Report 2024
13	Memastikan penyusunan Piagam Pengawasan telah mempertimbangkan saran-saran dari Dewan Komisaris. Ensure that the preparation of the Supervisory Charter has taken into account the suggestions of the Board of Commissioners.	Telah dilakukan penyusunan Piagam Pengawasan dan telah mempertimbangkan saran-saran dari Dewan Komisaris, namun masih menggunakan yang lama karena belum ada masukan/ saran dari Dewan Komisaris. The Supervisory Charter has been prepared and has considered suggestions from the Board of Commissioners, but is still using the old one because there has been no input/suggestions from the Board of Commissioners.
14	Memastikan bahwa pimpinan fungsi Audit Internal memiliki keahlian yang diakui dalam profesi auditor internal dengan mendapatkan sertifikasi profesi yang tepat (*Certified Internal Auditor/Qualified Internal Auditor*). Ensure that the head of the Internal Audit function has recognized expertise in the internal auditor profession by obtaining appropriate professional certification (Certified Internal Auditor/Qualified Internal Auditor).	Pimpinan fungsi Audit Internal telah memiliki keahlian yang diakui dalam profesi auditor internal dengan mendapatkan sertifikasi profesi yang tepat (*Qualified Internal Auditor* (QIA) Tingkat Manajerial). *Evidence*: Sertifikat Qualified Internal Auditor (QIA) Tingkat Manajerial. The head of the Internal Audit function has recognized expertise in the internal auditor profession by obtaining the appropriate professional certification (Qualified Internal Auditor (QIA) Tingkat Manajerial). Evidence: Qualified Internal Auditor (QIA) Tingkat Manajerial certificate.
15	Memastikan Kepala SPI/Fungsi Audit Internal melaksanakan program jaminan kualitas dan peningkatan Fungsi Audit Internal yang mencakup seluruh aspek dari aktivitas fungsi pengawasan intern dan melakukan penilaian atas program jaminan kualitas dan peningkatan fungsi audit internal secara keseluruhan melalui *review/assessment* yang dilakukan oleh asesor independen sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun. Ensure that the Head of Internal Audit Function implements a quality assurance program and improvement of the Internal Audit Function which covers all aspects of the internal control function activities and conducts an assessment of the quality assurance program and improvement of the internal audit function as a whole through a review/assessment conducted by an independent assessor at least once every 5 (five) years.	Telah dilaksanakan evaluasi Sistem Pengendalian Internal Perusahaan (SPIP). *Evidence*: • Pembahasan SPIP Direksi-Dewan Komisaris. • Dokumen hasil survei penerapan SPIP. An evaluation of the Company's Internal Control System (SPIP) has been carried out. Evidence: • Board of Directors-Board of Commissioners SPIP discussion. • Survey result document on SPIP implementation.
16	Memastikan bahwa PKPT (rencana audit tahunan) dilakukan dengan pendekatan risiko yang kemudian disetujui oleh Direktur Utama dan dikomunikasikan kepada Dewan Komisaris cq Komite Audit. Ensure that PKPT (annual audit plan) is conducted with a risk approach which is then approved by the President Director and communicated to the Board of Commissioners cq Audit Committee.	PKPT (rencana audit tahunan) telah dilakukan dengan pendekatan risiko yang kemudian disetujui oleh Direktur Utama dan dikomunikasikan kepada Dewan Komisaris cq Komite Audit. *Evidence*: • Notulen rapat komite audit Triwulan II 2024. • PKPT tahun 2024. PKPT (annual audit plan) has been carried out with a risk approach which is then approved by the President Director and communicated to the Board of Commissioners cq Audit Committee. Evidence: • Minutes of the audit committee meeting Q2 2024. • PKPT in 2024.

No	Rekomendasi Recommendations	Tindak Lanjut Follow-Up Action
Aspek 5: Pengungkapan Informasi dan Transparansi Aspect 5: Information Disclosure and Transparency		
1	Meningkatkan kepatuhan Perusahaan terhadap kebijakan pengendalian informasi Perusahaan secara berkelanjutan. Improve the Company's compliance with the company's information control policy on an ongoing basis.	Perusahaan telah melakukan kepatuhan terhadap kebijakan pengendalian informasi Perusahaan secara berkelanjutan baik melalui sarana media online, *website* maupun laporan ke instansi/ dinas terkait. *Evidence*: *Website* KIE, Media online KIE, laporan ke instansi/dinas terkait. The Company has complied with the company's information control policy on an ongoing basis both through online media facilities, websites and reports to relevant agencies / offices. Evidence: KIE website, KIE online media, reports to relevant agencies/offices.
2	Melakukan pertemuan/*gathering* dengan *Stakeholders* (pemasok) baik secara daring maupun lurin dan bentuk lainnya. Conduct meetings/gatherings with stakeholders (suppliers) both online and offline and other forms.	Telah dilakukan tenant gathering terkait sosialisasi estate *regulation* dan *launching* aplikasi Sistem Lapor Keluh (Sirkel). A tenant gathering has been held regarding the socialization of estate regulations and the launching of the Complaint Report System (Sirkel) application.
3	Penyusunan *Annual Report*: (a) Mencantumkan identitas perusahaan berupa nama perusahaan di samping dan di halaman belakang (sampul), (b) Mencantumkan penjelasan visi misi perusahaan, (c) Mencantumkan pelatihan yang akan dilakukan di tahun yang akan datang, (d) Memuat dampak perubahan harga terhadap penjualan atau pendapatan bersih perusahaan serta laba operasi perusahaan selama 2 tahun, (e) Mengungkapkan uraian tentang aspek pemasaran atas produk dan jasa perusahaan, antara lain meliputi pangsa pasar, (f) Mencantumkan informasi mengenai aktivitas dan biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan TJSLP terutama mengenai "*community development program*" yang telah dilakukan, mencakup antara lain informasi tentang Mitra Usaha Binaan Perusahaan dan Program Pengembangan Seni Budaya. Preparation of Annual Report: (a) Include the company's identity in the form of the company name on the side and on the back page (cover), (b) Include an explanation of the company's vision and mission, (c) Include training that will be carried out in the coming year, (d) Contain the impact of price changes on sales or net income of the company and the company's operating profit for 2 years, (e) Disclose a description of the marketing aspects of the company's products and services, including market share, (f) Include information on activities and costs incurred related to TJSLP, especially regarding the "community development program" that has been carried out, including information on the Company's Assisted Business Partners and the Cultural Arts Development Program.	Akan dicantumkan informasi mengenai biaya yang telah dikeluarkan berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan terutama mengenai komitmen perusahaan terhadap perlindungan konsumen ke dalam Laporan Tahunan. Information on costs incurred in relation to corporate social responsibility, especially the company's commitment to consumer protection, will be included in the Annual Report.
4	Mengikuti dan memenangkan kejuaraan Annual Report Award (ARA). Participated and won the Annual Report Award (ARA) championship.	Perusahaan telah mendaftar untuk mengikuti Annual Report Award (ARA) tahun buku 2023 dan akan mengikuti kembali ARA di tahun 2024. *Evidence*: Sertifikat ARA 2023. The company has registered to participate in the Annual Report Award (ARA) for the fiscal year 2023 and will participate in the 2024 ARA. Evidence: ARA 2023 certificate.

Rapat Umum Pemegang Saham
General Meeting of Shareholders

Rapat Umum Pemegang Saham merupakan lembaga tertinggi Perusahaan. Dengan berpedoman pada Anggaran Dasar dan Board Manual Perusahaan, Pemegang Saham memegang peran sentral dalam sistem tata kelola Perusahaan. Sebagai pemegang otoritas tertinggi, Pemegang Saham berwenang menentukan arah strategis dan pengembangan Perusahaan. Pelaksanaan kewenangan tersebut dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), baik yang diselenggarakan secara tatap muka maupun melalui mekanisme sirkuler. Melalui RUPS, Pemegang Saham menjalankan hak-haknya, menetapkan keputusan strategis, serta memutuskan berbagai agenda yang berada di luar kewenangan Dewan Komisaris dan Direksi, guna mendorong peningkatan nilai Perusahaan bagi Pemegang Saham.

RUPS memiliki wewenang tersebut antara lain adalah meminta pertanggungjawaban Dewan Komisaris dan Direksi terkait dengan pengelolaan Perusahaan, mengubah Anggaran Dasar, mengangkat dan memberhentikan Direktur dan anggota Dewan Komisaris, dan keputusan penting lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

JENIS-JENIS RUPS

Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Anggaran Dasar Perusahaan terdapat 2 (dua) jenis RUPS di Perusahaan, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa (RUPSLB).

RUPS TAHUNAN

1. RUPS Tahunan untuk menyetujui Laporan Tahunan diadakan paling lambat bulan Juni setelah penutupan tahun buku dan dalam RUPS ini Direksi menyampaikan:
   a. Laporan Tahunan Perusahaan.
   b. Usulan Penggunaan Laba Bersih Perusahaan.
   c. Hal-hal lainnya yang memerlukan persetujuan RUPS.
2. RUPS Tahunan untuk mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RUPS RKAP) dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah 1 tahun anggaran berjalan. Dalam pelaksanaan RUPS ini, Direksi menyampaikan:
   a. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan termasuk proyeksi Laporan Keuangan.
   b. Hal-hal lain yang perlu persetujuan RUPS untuk kepentingan Perusahaan yang belum dicantumkan dalam RKAP.

The General Meeting of Shareholders (GMS) constitutes the highest governing body of the Company. In accordance with the Company's Articles of Association and Board Manual, the Shareholders hold a central role within the corporate governance framework. As the ultimate authority, the Shareholders determine the Company's strategic direction and development. The exercise of such authority is conducted through the General Meeting of Shareholders (GMS), whether held physically or through a circular resolution mechanism. Through the GMS, Shareholders exercise their rights, adopt strategic resolutions, and determine matters beyond the authority of the Board of Commissioners and the Board of Directors, with the objective of enhancing shareholder value.

Among its authorities, the GMS is entitled to request accountability from the Board of Commissioners and the Board of Directors in relation to the management of the Company, amend the Articles of Association, appoint and dismiss members of the Board of Directors and the Board of Commissioners, and resolve other significant matters in accordance with prevailing laws and regulations.

TYPES OF GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Pursuant to Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and the Company's Articles of Association, the Company recognizes 2 (two) types of GMS, namely the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) and the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS).

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

1. The AGMS for the approval of the Annual Report shall be convened no later than June following the close of the fiscal year. At such meeting, the Board of Directors presents:
   a. The Company's Annual Report.
   b. The proposal for the appropriation of the Company's net profit.
   c. Other matters requiring GMS approval.
2. The AGMS for the ratification of the Corporate's Work Plan and Budget (RKAP) shall be convened no later than 30 (thirty) days after the commencement of 1 fiscal year. In this meeting, the Board of Directors presents:
   a. The Corporate's Work Plan and Budget, including projected financial statements.
   b. Other matters requiring GMS approval for the benefit of the Company that have not been included in the RKAP.

RUPSLB

RUPS Luar Biasa (RUPSLB) dapat diadakan sewaktu-waktu jika dipandang perlu oleh Direksi, Dewan Komisaris atau Pemegang saham untuk menetapkan hal-hal yang tidak dilakukan dalam RUPS Tahunan.

HAK-HAK PEMEGANG SAHAM

Pemegang Saham sebagai pemilik modal memiliki hak atas Perusahaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Hak-hak Pemegang Saham berdasarkan undang-undang No. 40 Tahun 2007 Pasal 52 dan 85 meliputi:

1. Pemegang Saham, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa, berhak menghadiri RUPS dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya.
2. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh Pemegang Saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya.
3. Mengambil keputusan tertinggi pada Perusahaan, khusus bagi pemilik modal Perusahaan.
4. Memperoleh informasi material Perusahaan secara tepat waktu, terukur, dan teratur.
5. Menerima pembagian dari keuntungan Perusahaan yang diperuntukkan bagi Pemegang Saham dalam bentuk dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, sebanding dengan jumlah saham yang dimilikinya.
6. Hak lainnya berdasarkan Anggaran Dasar.

Beberapa di antara hak-hak Pemegang Saham tersebut di atas, mekanisme pelaksanaannya dilakukan dalam RUPS.

WEWENANG RUPS

Kewenangan RUPS Perusahaan sesuai Undang-Undang No. 40 tahun 2007 Pasal 41, 44, dan 94 serta Anggaran Dasar Perusahaan menjelaskan wewenang yang dimiliki RUPS yang tidak diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi, antara lain:

1. Mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
2. Penambahan Modal Perusahaan. Penambahan modal sebagaimana dimaksud wajib diberitahukan kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perusahaan.
3. Memutuskan besaran gaji dan tunjangan anggota Direksi.
4. Menyetujui pengajuan Direksi dalam mengalihkan kekayaan Perusahaan atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perusahaan yang merupakan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih Perusahaan.
5. Menyetujui dapat atau tidaknya Direksi mengajukan permohonan pailit atas Perusahaan, dan penetapan perubahan Anggaran Dasar.
6. Pemeriksaan, persetujuan, dan pengesahan Laporan Tahunan.

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

The Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) may be convened at any time as deemed necessary by the Board of Directors, the Board of Commissioners, or the Shareholders, to resolve matters that are not addressed in the Annual GMS.

RIGHTS OF SHAREHOLDERS

Shareholders, as investors, are entitled to certain rights in accordance with the provisions of Prevailing Laws and Regulations. Shareholders' rights under Law No. 40 of 2007 Articles 52 and 85 include:

1. Shareholders, either in person or represented by proxy, are entitled to attend the GMS and exercise their voting rights in accordance with the number of shares they own.
2. In voting, the votes cast by a Shareholder apply to all shares they own.
3. Make the highest decisions in the Company, particularly for shareholders.
4. Obtain material information about the Company in a timely, measurable, and orderly manner.
5. Receive distributions of the Company's profits allocated to Shareholders in the form of dividends and remaining assets from liquidation, proportional to the number of shares owned.
6. Other rights as stated in the Articles of Association.

The implementation of several of the rights mentioned above is carried out through the GMS.

AUTHORITY OF GMS

As stipulated under Law No. 40 of 2007 Articles 41, 44, and 94, as well as the Company's Articles of Association, the GMS holds certain authorities not granted to the Board of Commissioners and the Board of Directors, including:

1. Appointing and Dismissing members of the Board of Commissioners and the Board of Directorsi.
2. Increasing the Company's capital. Such capital increases must be reported to the Minister to be recorded in the Company Registeri.
3. Determining the amount of salary and benefits for the Board of Directorsi.
4. Approving proposals from the Board of Directors to transfer company assets or use them as debt collateral, if such assets exceed 50% of the Company's total net assetsi.
5. Approving whether or not the Board of Directors may file for bankruptcy on behalf of the Companyi.
6. Determining amendments to the Articles of Association.

KETENTUAN PENYELENGGARAAN RUPS

Tata cara pelaksanaan RUPS di KIE sesuai Anggaran Dasar dilaksanakan sebagai berikut:

1. RUPS diadakan di tempat kedudukan KIE atau di tempat KIE melakukan kegiatan usahanya yang utama yang terletak di wilayah Republik Indonesia.
2. Penyelenggaraan RUPS Tahunan dan RUPSLB oleh Direksi dengan didahului pemanggilan RUPS. Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu 15 hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima.
3. Pelaksanaan RUPS dapat pula dilaksanakan atas permintaan:
   a. Seorang atau lebih pemegang saham yang mewakili 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan KIE dengan hak suara yang sah.
   b. Dewan Komisaris.
4. Semua keputusan yang diambil RUPS Berdasarkan Musyawarah untuk Mufakat.
5. Hasil keputusan Pemegang Saham didokumentasi oleh Sekretaris Perusahaan dan ditindaklanjuti dalam bentuk Akta Notaris apabila diperlukan sesuai peraturan yang berlaku.
6. Pemegang Saham juga dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan RUPS secara fisik.

KETENTUAN RUPS & KUORUM

KETENTUAN RUPS

1. Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perusahaan adalah:
   a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Anggaran Dasar ini;
   b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya yang selanjutnya dalam Anggaran Dasar disebut Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yaitu Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Anggaran Dasar ini.
2. Yang dimaksud dengan Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran Dasar ini berarti kedua-duanya yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.
3. Rapat Umum Pemegang Saham, dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan, kecuali semua Pemegang Saham hadir dan/atau diwakili dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan menyetujui penambahan mata acara rapat.
4. Keputusan atas mata acara Rapat Umum Pemegang Saham yang ditambahkan harus disetujui dengan suara bulat.

PROVISIONS FOR THE GMS

The implementation procedures for the GMS at KIE, as stipulated in the Articles of Association, are as follows:

1. The GMS is held at the registered office of KIE or at the Company's main place of business located within the territory of the Republic of Indonesia.
2. The Annual GMS and Extraordinary GMS are organized by the Board of Directors following formal GMS invitations. The Board of Directors must issue the invitations within 15 days from the date of receipt of the GMS request.
3. A GMS may also be convened at the request of:
   a. One or more shareholders representing 1/10 of the total shares issued by KIE with valid voting rights.
   b. The Board of Commissioners.
4. All GMS decisions are made based on deliberation to reach consensus.
5. The resolutions adopted by the Shareholders are documented by the Corporate Secretary and, if necessary under prevailing regulations, formalized in a Notarial Deed.
6. Shareholders may also adopt valid resolutions without physically convening a GMS.

GMS PROVISIONS AND QUORUM REQUIREMENTS

GMS PROVISIONS

1. The General Meeting of Shareholders ("GMS") within the Company consists of:
   a. The Annual General Meeting of Shareholders (AGMS), as referred to in Article 20 of the Company's Articles of Association;
   b. Other General Meetings of Shareholders, hereinafter referred to in the Articles of Association as the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS), convened at any time as necessary pursuant to Article 21 of the Articles of Association.
2. The term General Meeting of Shareholders in these Articles of Association means both the Annual General Meeting of Shareholders and the Extraordinary General Meeting of Shareholders, unless expressly stated otherwise.
3. The General Meeting of Shareholders shall not be authorized to adopt resolutions under any other business agenda items unless all Shareholders are present and/or duly represented at the GMS and unanimously approve the addition of such agenda items.
4. Any resolution concerning an additional agenda item must be approved unanimously.

KETENTUAN KUORUM

1. a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar ini menentukan lain.
   b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat kedua.
   c. Dalam pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua harus disebutkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum.
   d. Rapat Umum Pemegang Saham kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat ini sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham paling sedikit 50% (lima puluh persen) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali anggaran dasar ini menentukan lain.
   e. Dalam hal kuorum Rapat kedua sebagaimana dimaksud pada huruf d ayat ini tidak tercapai, Perusahaan dapat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perusahaan atas permohonan Perusahaan agar ditetapkan kuorum untuk Rapat Umum Pemegang Saham ketiga.
   f. Dalam pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga harus disebutkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum, serta Rapat Umum Pemegang Saham ketiga akan dilangsungkan dengan kuorum yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri.
   g. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua dan ketiga dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham kedua atau ketiga dilangsungkan.
   h. Rapat Umum Pemegang Saham kedua dan ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah tanggal Rapat Umum Pemegang Saham yang mendahuluinya dilangsungkan.
2. Pemegang Saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa, berhak menghadiri RUPS dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya.
3. Ketua rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili Pemegang Saham diperlihatkan kepadanya pada waktu Rapat diadakan.
4. Dalam Rapat, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
5. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat.

QUORUM REQUIREMENTS

1. a. GMS shall be validly convened and entitled to adopt resolutions if at least 51% (fifty-one percent) of the total shares with voting rights are present or duly represented, unless otherwise stipulated by applicable laws and regulations and/or the Articles of Association.
   b. If the quorum as referred to in paragraph (a) is not achieved, a second GMS may be convened.
   c. The notice for the second General Meeting of Shareholders must state that the first General Meeting of Shareholders was held and failed to meet the required quorum.
   d. The second General Meeting of Shareholders as stated in point (c) shall be valid and entitled to adopt resolutions if at (50%) least fifty percent of the total shares with voting rights are present or duly represented, unless otherwise stipulated in the Articles of Association.
   e. If the quorum for the second General Meeting of Shareholders is not achieved, the Company may petition the Chairperson of the District Court having jurisdiction over the Company's domicile to determine the quorum requirement for a third General Meeting of Shareholders.
   f. The notice for the third General Meeting of Shareholders must state that the second General Meeting of Shareholders was held and failed to meet the quorum, and that the third General Meeting of Shareholders will be convened with the quorum as determined by the Chairperson of the District Court.
   g. The notice for the second and third General Meeting of Shareholders shall be issued no later than 7 (seven) days prior to the date of the respective meeting.
   h. The second and third General Meeting of Shareholders shall be held no earlier than 10 (ten) days and no later than (21) twenty-one days after the preceding General Meeting of Shareholders.
2. Shareholders, either in person or represented by a valid power of attorney, are entitled to attend the GMS and exercise voting rights in proportion to the number of shares held.
3. The Chairperson of the meeting is entitled to request that any power of attorney be presented for verification at the time of the meeting.
4. At the GMS, each share confers the right to cast 1 (one) vote.
5. Voting on matters concerning individuals shall be conducted by unsigned written ballot, while voting on other matters shall be conducted verbally, unless the Chairperson determines otherwise without objection from the attending Shareholders.

6. Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
7. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat 6 pasal ini tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar ini menentukan lain, dengan ketentuan, pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani.
8. Dalam hal usulan lebih dari dua alternatif dan hasil pemungutan suara belum mendapatkan satu alternatif dengan suara lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, maka dilakukan pemilihan ulang terhadap dua usulan yang memperoleh suara terbanyak sehingga salah satu usulan memperoleh suara lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.
9. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS.
10. Pemegang Saham juga dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Umum pemegang Saham secara fisik, dengan ketentuan semua Pemegang Saham telah diberitahu secara tertulis dan semua Pemegang Saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

PENYELENGGARAAN RUPS TAHUNAN TAHUN BUKU 2025

Pada 2025, Perusahaan menyelenggarakan 2 (dua) kali RUPS Tahunan, yaitu RUPS Pengesahan RKAP 2025 dan RUPS Persetujuan Kinerja 2024. Agenda RUPS telah disusun dan dicantumkan dalam undangan RUPS. Selama RUPS berlangsung acara dipimpin oleh Pemegang Saham.

KIE menyelenggarakan RUPS sesuai dengan Anggaran Dasar yang menyebutkan bahwa Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 14 hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima dari Pemegang Saham. Surat pemanggilan RUPS mencakup informasi dari tanggal, waktu, tempat, dan agenda yang akan dibicarakan dalam RUPS.

6. All resolutions shall, in principle, be adopted based on deliberation to reach consensus.
7. If consensus as stated in paragraph (6) cannot be achieved, a resolution shall be valid if approved by more than ½ (one-half) of the total votes cast, unless otherwise stipulated in the Articles of Association. Voting concerning individuals shall, in such a case, be conducted by unsigned written ballot.
8. If more than two alternatives are proposed and no alternative obtains more than ½ (one-half) of the total votes cast, a re-vote shall be conducted between the two proposals receiving the highest votes, until one proposal obtains more than ½ (one-half) of the total votes cast.
9. Blank votes or invalid votes shall be deemed null and void and shall not be counted in determining the total votes cast at the GMS.
10. Shareholders may also adopt valid resolutions without convening a physical General Meeting of Shareholders, provided that all Shareholders have been notified in writing and have provided written approval of the proposed resolution, duly signing such approval. Resolutions adopted in this manner shall have the same legal force and effect as resolutions validly adopted at a duly convened General Meeting of Shareholders.

CONVENING OF THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETINGS OF SHAREHOLDERS

In 2025, the Company convened 2 (two) Annual GMS, namely: the AGMS for the ratification of the 2025 Corporate Work Plan and Budget (RKAP), and the AGMS for the approval of the Company's 2024 performance. The agendas were duly prepared and set forth in the formal notices of the AGMS. During the meetings, the proceedings were chaired by the Shareholder.

KIE convened the AGMS in accordance with the Company's Articles of Association, which stipulate that the Board of Directors is required to issue a notice of GMS no later than 14 (fourteen) days from the date the request to convene the GMS is received from the Shareholder. The notice of the GMS includes detailed information regarding the date, time, venue, and agenda items to be discussed at the meeting.

IMPLEMENTASI RUPS KIE DI 2025
IMPLEMENTATION OF KIE GMS IN 2025

Uraian Description	**Rups RKAP 2025** Gms on the 2025 Rkap	**RUPS Kinerja Tahun Buku 2024** GMS on the 2024 Fiscal Year Performance
Permintaan Penyelenggaraan RUPS Request for GMS Convening	Pada 29 Januari 2025, PT Pupuk Kalimantan Timur menyampaikan permintaan pelaksanaan RUPS RKAP 2025 KIE melalui surat No. 01295/D/HM/D51200/ET/2025. On January 29, 2025, PT Pupuk Kalimantan Timur submitted a request for the convening of KIE's 2025 RKAP GMS through Letter No. 01295/D/HM/D51200/ET/2025.	Pada 29 Juni 2025, PT Pupuk Kalimantan Timur menyampaikan permintaan pelaksanaan RUPS Kinerja Tahun Buku 2024 KIE melalui surat No. 08700/D/HM/D51200/ET/2025. On June 29, 2025, PT Pupuk Kalimantan Timur submitted a request for the convening of KIE's GMS on the 2024 Fiscal Year Performance through Letter No. 08700/D/HM/D51200/ET/2025.
Pemanggilan RUPS Notice of GMS	Pada 30 Januari 2025, KIE melakukan pemanggilan RUPS RKAP Tahun 2025 melalui surat No. 0157/D1/TR/KEU/ET/2025. On January 30, 2025, KIE issued the notice for the 2025 RKAP GMS through Letter No. 0157/D1/TR/KEU/ET/2025.	Pada 30 Juni 2025, KIE melakukan pemanggilan RUPS Kinerja Tahun Buku 2024 KIE melalui surat No. 0939/D1/TR/KEU/ET/2025. On June 30, 2025, KIE issued the notice for the GMS on the 2024 Fiscal Year Performance through Letter No. 0939/D1/TR/KEU/ET/2025.
Pelaksanaan RUPS Gms IMPLEMENTATION	RUPS RKAP 2025 dilaksanakan pada 30 Januari 2025 di Jakarta. The 2025 RKAP GMS was held on January 30, 2025 in Jakarta.	RUPS Kinerja KIE tahun buku 2024 dilaksanakan pada 30 Juni 2025 di Jakarta. The GMS on KIE's 2024 Fiscal Year Performance was held on June 30, 2025 in Jakarta.
Risalah RUPS Minutes of Meeting	Risalah RUPS RKAP KIE 2025 telah ditandatangani oleh seluruh Pemegang Saham, Direksi & Dewan Komisaris KIE. The Minutes of the 2025 RKAP GMS of KIE were signed by all Shareholders, the Board of Directors, and the Board of Commissioners of KIE.	Risalah RUPS Kinerja KIE Tahun Buku 2024 telah ditandatangani oleh seluruh Pemegang Saham, Direksi & Dewan Komisaris KIE. The Minutes of the GMS on KIE's 2024 Fiscal Year Performance were signed by all Shareholders, the Board of Directors, and the Board of Commissioners of KIE.

Sepanjang tahun 2025, Pemegang Saham secara aktif telah memberikan arahan strategis, meminta klarifikasi atas hal-hal tertentu, serta menetapkan keputusan penting melalui forum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Seluruh proses pengambilan keputusan berlangsung dengan mengedepankan prinsip tata kelola perusahaan yang baik serta partisipasi yang konstruktif dari para pemegang saham.

Sebagai bentuk komitmen terhadap akuntabilitas dan transparansi, Perusahaan telah merealisasikan seluruh keputusan yang ditetapkan dalam RUPS, termasuk persetujuan atas Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2025, serta penyampaian Laporan kinerja tahun Buku 2024. Implementasi atas keputusan-keputusan tersebut dilaksanakan secara konsisten sebagai bagian dari upaya Perusahaan untuk mencapai sasaran strategis dan meningkatkan kinerja berkelanjutan.

Throughout 2025, the Shareholders actively provided strategic direction, requested clarifications on specific matters, and adopted significant resolutions through the General Meeting of Shareholders (GMS). All decision-making processes were conducted in accordance with the principles of Good Corporate Governance (GCG) and were characterized by constructive shareholder participation.

As part of the Company's commitment to accountability and transparency, all resolutions adopted at the GMS have been duly implemented, including the approval of the 2025 Corporate Work Plan and Budget (RKAP) and the submission of the Fiscal Year 2024 performance report. The implementation of these resolutions has been carried out consistently as part of the Company's efforts to achieve its strategic objectives and enhance sustainable performance.

RUPS RKAP TAHUN BUKU 2025

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan Pasal 16, RUPS RKAP diselenggarakan untuk membahas sekurang-kurangnya misi, sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan Perusahaan, program kerja, anggaran Perusahaan, proyeksi keuangan Perusahaan dan anak Perusahaan, serta hal-hal lain yang membutuhkan persetujuan dalam RUPS. KIE menyelenggarakan RUPS RKAP tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut:

RKAP GMS FISCAL YEAR 2025

Pursuant to Article 16 of the Company's Articles of Association, the GMS for the ratification of the RKAP is convened to deliberate, at a minimum, the Company's mission, business objectives, business strategies, corporate policies, work programs, corporate budget, financial projections of the Company and its subsidiaries, as well as other matters requiring approval by the GMS. KIE convened the GMS for the ratification of the 2025 RKAP with the following details:

Hari/Tanggal : Day/Date	Kamis, 30 Januari 2025 Thursday, January 30, 2025
Waktu : Time	13.31 - 14.03 WIB
Peserta RUPS : GMS Participants	Pemegang Saham PT Kaltim Industrial Estate • PT Pupuk Kalimantan Timur • Yayasan Kesejahteraan Hari Tua Pupuk Kaltim Dewan Komisaris PT Kaltim Industrial Estate • Teguh Ismartono • Turkhamim Direksi PT Kaltim Industrial Estate • Muhammad Erriza • Dianti Citra Agustin • Indra Kusumawardhana Shareholders of PT Kaltim Industrial Estate • PT Pupuk Kalimantan Timur • Yayasan Kesejahteraan Hari Tua Pupuk Kaltim Board of Commissioners of PT Kaltim Industrial Estate • Teguh Ismartono • Turkhamim Board of Directors of PT Kaltim Industrial Estate • Muhammad Erriza • Dianti Citra Agustin • Indra Kusumawardhana
Pihak Independen dalam Penghitungan Suara Independent Party in Vote Calculation	Tidak ada None

MATA ACARA DAN KEPUTUSANNYA SERTA TINDAK LANJUT ATAS HASIL KEPUTUSAN RAPAT
AGENDA AND RESOLUTIONS AND FOLLOW-UP ON THE RESULTS OF THE MEETING DECISIONS

Agenda	Keputusan Resolutions	Tindak Lanjut Follow-Up
Mata Acara Pertama Persetujuan dan pengesahan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan Tahun 2025. **First Agenda Item** Approval and ratification of the 2025 Corporate Work and Budget Plan.	Mengesahkan dan menyetujui RKAP Tahun Buku 2025 yang telah disampaikan Direksi Perusahaan. Ratification and approval of the RKAP 2025 Fiscal Year by the Company's Board of Directors.	RKAP tahun 2025 PT Kaltim Industrial Estate telah disahkan. PT Kaltim Industrial Estate's RKAP 2025 Fiscal Year has been ratified.
Mata Acara Kedua Penetapan Kontrak Manajemen Tahunan yang memuat target KPI Direksi secara kolegial dan Dewan Komisaris Tahun 2025. **Second Agenda Item** Determination of the Annual Management Contract, which includes the 2025 KPI targets for the Board of Directors and the Board of Commissioners.	Menetapkan Kontrak Manajemen Tahunan yang memuat target KPI direksi secara kolegial dan dewan komisaris tahun 2025. Determination of the Annual Management Contract, which includes the 2025 KPI targets for the Board of Directors and the Board of Commissioners.	KPI Direksi secara kolegial dan Dewan Komisaris Tahun 2025 telah disahkan. The 2025 KPI targets for the Board of Directors and the Board of Commissioners have been ratified.

RUPS KINERJA TAHUN BUKU 2024

KIE menyelenggarakan RUPS Kinerja Tahun Buku 2024 berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan Pasal 17 untuk melaporkan Laporan Tahunan Perusahaan kepada Pemegang Saham, yang meliputi laporan keuangan, laporan laba rugi, laporan kegiatan Perusahaan, gaji, dan tunjangan/fasilitas bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Agenda dan keputusan RUPS Kinerja KIE adalah sebagai berikut:

PERFORMANCE GMS FISCAL YEAR 2024

KIE convened the GMS for the approval of Fiscal Year 2024 performance in accordance with Article 17 of the Company's Articles of Association. The Annual Report presented at the GMS included, among others, the financial statements, statement of profit or loss, report on the Company's operational activities, as well as information regarding salaries and allowances/facilities provided to members of the Board of Directors and the Board of Commissioners. The agenda and resolutions adopted at the GMS for the approval of KIE's Fiscal Year 2024 performance are as follows:

Hari/Tanggal : Day/Date	Senin, 30 Juni 2025 Monday, June 30, 2025
Waktu : Time	23.48 - 23.59 WIB
Peserta RUPS : GMS Participants	Pemegang Saham PT Kaltim Industrial Estate • PT Pupuk Kalimantan Timur • Yayasan Kesejahteraan Hari Tua Pupuk Kaltim Dewan Komisaris PT Kaltim Industrial Estate • Teguh Ismartono • Turkhamim Direksi PT Kaltim Industrial Estate • Muhammad Erriza • Dianti Citra Agustin • Indra Kusumawardhana Shareholders of PT Kaltim Industrial Estate • PT Pupuk Kalimantan Timur • Yayasan Kesejahteraan Hari Tua Pupuk Kaltim Board of Commissioners of PT Kaltim Industrial Estate • Teguh Ismartono • Turkhamim Board of Directors of PT Kaltim Industrial Estate • Muhammad Erriza • Dianti Citra Agustin • Indra Kusumawardhana
Pihak Independen dalam Penghitungan Suara Independent Party in Vote Calculation	Tidak ada None

MATA ACARA DAN KEPUTUSANNYA SERTA TINDAK LANJUT ATAS HASIL KEPUTUSAN RAPAT
AGENDA AND RESOLUTIONS AND FOLLOW-UP ON THE RESULTS OF THE MEETING DECISIONS

Agenda	Keputusan Resolutions	Tindak Lanjut Follow-Up
Mata Acara Pertama Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan Perusahaan, persetujuan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*Volledig Acquit et De Charge*) kepada Direksi atas tindakan pengurusan Perusahaan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perusahaan yang dijalankan selama Tahun 2024. **First Agenda Item** Approval of the Annual Report and Ratification of the Company's Financial Statements, Approval of the Supervisory Report of the Board of Commissioners, and Granting of Full Release and Discharge (Volledig Acquit et De Charge) to the Board of Directors and the Board of Commissioners for the 2024 Fiscal Year.	1. Menyetujui laporan tahunan Perusahaan dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2024. 2. Mengesahkan laporan keuangan konsolidasian Perusahaan Tahun Buku 2024 yang berakhir pada 31 Desember 2024, yang diaudit oleh KAP Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (PwC) sebagaimana dimuat dalam laporannya No. 00226/2.1457/AU.1/03/1782-1/1/III/2025 tanggal 04 Maret 2025 dengan opini "Wajar dalam semua hal yang material". 3. Mengesahkan Laporan yang telah diaudit oleh KAP Hadori Sugiarto Adi & Rekan yang terdiri dari: a. Laporan Auditor Independen atas Laporan Key Performance Indicators (KPI) yang telah diaudit No. 01/Sby.1/KT/05/1272/1/III/2025 tanggal 25 Maret 2025 dengan predikat "Sukses" dengan total skor 105,97%; b. Laporan Auditor Independen atas Laporan Evaluasi Kinerja No. 02.Sby.1/KT/05/1272/1/III/2025 tanggal 25 Maret 2025 dengan kategori "SEHAT A" dengan total skor 79,00. 4. Dengan telah disetujuinya Laporan Tahunan Perusahaan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan disahkannya Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan, seluruhnya untuk Tahun Buku 2024 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, maka RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan Perusahaan dan pengawasan Perusahaan yang telah dijalankan selama tahun buku 2024.	Laporan Tahunan Perusahaan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris telah disahkan oleh Pemegang Saham. The Company's Annual Report, including the Supervisory Report of the Board of Commissioners, has been duly approved by the Shareholders.

MATA ACARA DAN KEPUTUSANNYA SERTA TINDAK LANJUT ATAS HASIL KEPUTUSAN RAPAT
AGENDA AND RESOLUTIONS AND FOLLOW-UP ON THE RESULTS OF THE MEETING DECISIONS

Agenda	Keputusan Resolutions	Tindak Lanjut Follow-Up
	1. Approved the Company's Annual Report and the Supervisory Report of the Board of Commissioners for the 2024 Fiscal Year. 2. Ratified the Company's Consolidated Financial Statements for the fiscal year ended December 31, 2024, audited by KAP Rintis, Jumadi, Rianto & Partners (PwC), as stated in its report No. 00226/2.1457/AU.1/03/1782-1/1/III/2025 dated March 4, 2025, with an "unqualified opinion." 3. Ratified the reports audited by KAP Hadori Sugiarto Adi & Partners, consisting of: a. Independent Auditor's Report on the audited Key Performance Indicators (KPI) Report No. 01/Sby.1/KT/05/1272/1/III/2025 dated March 25, 2025, with a "Successful" rating and a total score of 105.97%; b. Independent Auditor's Report on the Performance Evaluation Report No. 02.Sby.1/KT/05/1272/1/III/2025 dated March 25, 2025, with a "HEALTHY A" category and a total score of 79.00. 4. With the approval of the Company's Annual Report, including the Supervisory Report of the Board of Commissioners, and the ratification of the Company's Consolidated Financial Statements for the fiscal year ended December 31, 2024, the GMS granted full release and discharge (volledig acquit et de charge) to the Board of Directors and the Board of Commissioners for their management and supervisory actions during the 2024 fiscal year.	
Mata Acara Kedua Penetapan penggunaan Laba Bersih Perusahaan Tahun Buku 2024. **Second Agenda Item** Determination of the Appropriation of the Company's Net Profit for the 2024 Fiscal Year.	Menyetujui dan menetapkan penggunaan laba tahun berjalan konsolidasi yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Approved and determined the use of consolidated net profit attributable to the owners of the Parent Entity for the fiscal year ended December 31, 2024.	KIE telah merealisasikan hasil keputusan rapat ini melalui pembayaran dividen dengan besaran sesuai hasil keputusan rapat ini. KIE has realized the resolution of this meeting through dividend payments in accordance with the approved amount.
Mata Acara Ketiga Penetapan tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan atas Kinerja Tahun Buku 2024 dan Penetapan Jasa Operasi Karyawan atas Kinerja Tahun 2024. **Third Agenda Item** Determination of Tantiem for the Board of Directors and the Board of Commissioners for the 2024 Fiscal Year Performance and Determination of Employee Service Incentives for 2024 Performance.	1. Tantiem Dekom dan Direksi atas kinerja tahun buku 2024 akan ditetapkan secara terpisah. 2. Menyetujui dan menetapkan Jasa Operasi Karyawan atas Kinerja Tahun Buku 2024. 1. The tantiem for the Board of Commissioners and the Board of Directors for the 2024 fiscal year performance will be determined separately. 2. Approved and determined the Employee Service Incentives for the 2024 Fiscal Year Performance.	PT Pupuk Kaltim telah mengeluarkan surat perihal penetapan penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris KIE tahun 2024. PT Pupuk Kaltim has issued a letter regarding the determination of remuneration for the Board of Directors and the Board of Commissioners of KIE for 2024.
Mata Acara Keempat Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perusahaan untuk Tahun Buku 2025. **Fourth Agenda Item** Appointment of a Public Accounting Firm to Audit the Company's Financial Statements for the 2025 Fiscal Year.	Penunjukan KAP untuk mengaudit laporan keuangan Perusahaan Tahun Buku 2025 ditetapkan secara terpisah dan tersendiri. The appointment of a Public Accounting Firm (KAP) to audit the Company's financial statements for the 2025 fiscal year was determined separately.	Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (*PricewaterhouseCoopers* - PwC) sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan. Appointed KAP Rintis, Jumadi, Rianto & Partners (PwC) as the Public Accounting Firm to audit the Company's Consolidated Financial Statements.

RUPSLB TAHUN BUKU 2025

Pemegang Saham menerbitkan Keputusan Pemegang Saham sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tentang Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Pengangkatan Anggota Direksi, mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Sdr. Teguh Ismartono dari jabatannya sebagai Komisaris Utama terhitung sejak tanggal 26 Agustus 2025.

EGMS FISCAL YEAR 2025

The Shareholders issued a Shareholders' Resolution in lieu of an Extraordinary General Meeting of Shareholders regarding the dismissal of a member of the Board of Commissioners and the appointment of a member of the Board of Directors, ratifying the honorable dismissal of Mr. Teguh Ismartono from his position as President Commissioner effective August 26, 2025.

KOMPOSISI SUSUNAN DEWAN KOMISARIS PER TANGGAL 26 AGUSTUS 2025, MENJADI:
THE COMPOSITION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AS OF AUGUST 26, 2025 IS AS FOLLOWS:

Komisaris : Sdr Turkhamim Commissioner: Mr. Turkhamim

RUPSLB TAHUN BUKU 2025

28 NOVEMBER 2025

Tanggal 28 November 2025, Pemegang Saham menerbitkan Keputusan Pemegang Saham sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tentang Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Pengangkatan Anggota Direksi, mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Sdri. Dianti Citra Agustin dari jabatannya sebagai Direktur Keuangan serta menunjuk Sdri. Dianti Citra Agustin untuk melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Keuangan sampai dengan ditetapkannya Direktur Keuangan definitif.

EGMS FISCAL YEAR 2025

NOVEMBER 28, 2025

On November 28, 2025, the Shareholders issued a Shareholders' Resolution in lieu of an Extraordinary General Meeting of Shareholders regarding the dismissal of a member of the Board of Commissioners and the appointment of a member of the Board of Directors, ratifying the honorable dismissal of Mrs. Dianti Citra Agustin from her position as Director of Finance and appointing Mrs. Dianti Citra Agustin to serve as Acting Director of Finance until the appointment of a definitive Finance Director.

KOMPOSISI SUSUNAN DIREKSI PER TANGGAL 28 NOVEMBER 2025, MENJADI:
THE COMPOSITION OF THE BOARD OF DIRECTORS AS OF NOVEMBER 28, 2025 IS AS FOLLOWS:

Direktur Utama : Muhammad Erriza President Director: Muhammad Erriza
Dirktur Operasional dan Bisnis : Indra Kusumawardhana Director of Operations and Business: Indra Kusumawardhana
Plt. Direktur Keuangan : Dianti Citra Agustin Acting Director of Finance: Dianti Citra Agustin

PELAKSANAAN RUPS TAHUN SEBELUMNYA

Sepanjang tahun 2024, Perusahaan menyelenggarakan 2 (dua) kali RUPS yaitu 1 (satu) kali RUPS Pengesahan RKAP 2024 serta RUPS Persetujuan Kinerja 2023. Perusahaan menjalankan prosedur terbuka dengan mengambil keputusan rapat berdasarkan musyawarah untuk mufakat antara Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan.

IMPLEMENTATION OF GENERAL MEETINGS OF SHAREHOLDERS IN THE PREVIOUS YEAR

Throughout 2024, the Company conducted 2 (two) GMS, consisting of 1 (one) meeting for the approval of the 2024 RKAP and 1 (one) meeting for the approval of the Company's 2023 performance. The Company implemented an open procedure by making decisions based on deliberation to reach consensus among the Shareholders, the Board of Commissioners, and the Board of Directors.

URAIAN DESCRIPTION	**RUPS RKAP 2024** RKAP GMS 2024	**RUPS KINERJA TAHUN BUKU 2023** PERFORMANCE GMS FISCAL YEAR 2023
Permintaan Penyelenggaraan RUPS Request For Holding a GMS	Pada 29 Januari 2024, PT Pupuk Kalimantan Timur menyampaikan permintaan pelaksanaan RUPS RKAP 2024 KIE melalui surat No. 01425/D/TR/D44400/ET/2024.	Pada 22 Juli 2024, PT Pupuk Kalimantan Timur menyampaikan permintaan pelaksanaan RUPS Kinerja Tahun Buku 2023 KIE melalui surat No. 10647/D/TR/D44400/ET/2024.

URAIAN DESCRIPTION	RUPS RKAP 2024 RKAP GMS 2024	RUPS KINERJA TAHUN BUKU 2023 PERFORMANCE GMS FISCAL YEAR 2023
	On January 29, 2024, PT Pupuk Kalimantan Timur submitted a request for the convening of the KIE 2024 RKAP GMS through Letter No. 01425/D/TR/D44400/ET/2024.	On July 22, 2024, PT Pupuk Kalimantan Timur submitted a request for the convening of the KIE General Meeting of Shareholders (GMS) for the 2023 Fiscal Year Performance, through Letter No. 10647/D/TR/D44400/ET/2024.
Pemanggilan RUPS Notice of GMS	Pada 30 Januari 2024, KIE melakukan pemanggilan RUPS RKAP Tahun 2024 melalui surat No. 203/D1/TR/KEU/ET/2024. On January 30, 2024, KIE issued the invitation for the 2024 RKAP GMS through Letter No. 203/D1/TR/KEU/ET/2024.	Pada 22 Juli 2024, KIE melakukan pemanggilan RUPS Kinerja Tahun Buku 2023 KIE melalui surat No. 1105/D1/TR/KEU/ET/2024. On July 22, 2024, KIE issued the invitation for the GMS on the 2023 Fiscal Year Performance, through Letter No. 1105/D1/TR/KEU/ET/2024.
Pelaksanaan RUPS Implementation of GMS	RUPS RKAP 2024 dilaksanakan pada 30 Januari 2024 di Jakarta. The 2024 RKAP GMS was held on January 30, 2024, in Jakarta.	RUPS Kinerja KIE tahun buku 2023 dilaksanakan pada 22 Juli 2024 di Jakarta. The GMS on the 2023 Fiscal Year Performance of KIE was held on July 22, 2024, in Jakarta.
Risalah RUPS Minutes of The GMS	Risalah RUPS RKAP KIE 2024 telah ditanda tangani oleh seluruh Pemegang Saham, Direksi & Dewan Komisaris KIE. The Minutes of the 2024 RKAP GMS have been signed by all Shareholders, the Board of Directors, and the Board of Commissioners of KIE.	Risalah RUPS Kinerja KIE Tahun Buku 2023 telah ditanda tangani oleh seluruh Pemegang Saham, Direksi & Dewan Komisaris KIE. The Minutes of the GMS on the 2023 Fiscal Year Performance have been signed by all Shareholders, the Board of Directors, and the Board of Commissioners of KIE.

RUPS RKAP TAHUN 2024

Tahapan Penyelenggaraan RUPS Pengesahan RKAP Tahun 2024.

RKAP GMS FISCAL YEAR 2024

Stages of Convening GMS for Ratification of the 2024 Fiscal Year RKAP.

MATA ACARA DAN KEPUTUSANNYA SERTA TINDAK LANJUT ATAS HASIL KEPUTUSAN RAPAT
MEETING AGENDA, RESOLUTIONS, AND FOLLOW-UP UPON THE MEETING RESOLUTIONS

Agenda Agenda	Keputusan Resolutions	Tindak Lanjut Follow-Up
Mata Acara Pertama Persetujuan dan Pengesahan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) KIE Tahun 2024. **First Meeting Agenda** Approval and ratification of KIE's 2024 Corporate Budget Work Plan (RKAP).	Mengesahkan dan menyetujui Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) KIE Tahun Buku 2024. Ratified and approved the Corporate Work Plan and Budget (RKAP) of KIE for Fiscal Year 2024.	RKAP tahun 2024 PT Kaltim Industrial Estate telah disahkan. The Corporate Work Plan and Budget (RKAP) of KIE for Fiscal Year 2024 has been ratified.
Mata Acara Kedua Persetujuan dan Pengesahan Kontrak Manajemen (*Key Performance Indicator*) antara Direksi dan dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Tahun 2024. **Second Meeting Agenda** Approval and Ratification of the Management Contract (Key Performance Indicator) between the Board of Directors and the Board of Commissioners with Shareholders for 2024.	Menyetujui dan mengesahkan Kontrak Manajemen (*Key Performance Indicator*) Direksi dan Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Tahun 2024. Approved and ratified the Management Contract (Key Performance Indicators) between the Board of Directors and Board of Commissioners and the Shareholders for the year 2024.	KPI Direksi secara kolegial dan Dewan Komisaris Tahun 2024 telah disahkan. The collegial KPI of the Board of Directors and Board of Commissioners for fiscal Year 2024 has been ratified.
Mata Acara Ketiga Persetujuan dan Pengesahan Kontrak Manajemen (*Key Performance Indicator*) antara Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Tahun 2024. **Second Meeting Agenda** Approval and Ratification of the Management Contract (Key Performance Indicator) between the Board of Commissioners and Shareholders for 2024.	Menetapkan *Key Performance Indicator* (KPI) Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap Direksi atas pelaksanaan RKAP KIE 2024. Established the Key Performance Indicators (KPIs) for the Board of Commissioners in overseeing the Board of Directors' implementation of the 2024 KIE RKAP.	KPI Dewan Komisaris Tahun 2024 telah disahkan. The collegial KPI of the Board of Commissioners has been ratified.

RUPS KINERJA TAHUN BUKU 2023

Tahapan Penyelenggaraan RUPS Kinerja tahun buku 2023.

PERFORMANCE GMS FISCAL YEAR 2023

Stages of Convening GMS for Ratification of the 2023 Fiscal Year RKAP.

MATA ACARA DAN KEPUTUSANNYA SERTA TINDAK LANJUT ATAS HASIL KEPUTUSAN RAPAT
MEETING AGENDA, RESOLUTIONS, AND FOLLOW-UP UPON THE MEETING RESOLUTIONS

Agenda Agenda	**Keputusan** Resolutions	**Tindak Lanjut** Follow-Up
Mata Acara Pertama Persetujuan Laporan Tahunan Perusahaan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan Tahun Buku 2023 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan Tahun Buku 2023. **First Meeting Agenda** Approval of the Company's Annual Report and Ratification of the Company's Consolidated Financial Statements for the 2023 Fiscal Year, including the Supervisory Report of the Board of Commissioners, and Ratification of the Company's Consolidated Financial Statements for the 2023 Fiscal Year.	1. Menyetujui Laporan Tahunan KIE mengenai keadaan dan jalannya KIE selama Tahun Buku 2023 dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2023. 2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian KIE yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PwC). 3. Mengesahkan Laporan yang telah diaudit oleh KAP Hadori Sugiarto Adi dan Rekan. 4. Memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya dari tanggung jawab kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas Tindakan Pengurusan dan Pengawasan KIE yang telah dijalankan selama tahun 2023. 5. Menyetujui usulan ratifikasi terhadap realisasi biaya di atas pagu anggaran dalam RKAP tahun 2023. 1. Approved the KIE Annual Report concerning the condition and performance of the Company for the 2023 Fiscal Year and the Supervisory Report of the Board of Commissioners for the 2023 Fiscal Year. 2. Ratified the KIE Consolidated Financial Statements audited by the Public Accounting Firm (KAP) Tanudiredja, Wibisana, Rintis & partners (PwC). 3. Ratified the report audited by KAP Hadori Sugiarto Adi & Rekan. 4. Granted full release and discharge (acquit et de charge) to the Board of Directors and Board of Commissioners for the management and supervisory actions carried out during the 2023 Fiscal Year. 5. Approved the ratification of expenditures exceeding the 2023 RKAP budget ceiling.	Laporan Tahunan Perusahaan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris telah disahkan oleh Pemegang Saham. The Shareholders approved and ratified the Company's Annual Report, including the Supervisory Report of the Board of Commissioners.
Mata Acara Kedua Penetapan Penggunaan Laba Bersih Konsolidasian Perusahaan Tahun Buku 2023. **Second Meeting Agenda** Determination of the Allocation of the Company's Consolidated Net Profit for the 2023 Fiscal Year.	Menyetujui dan menetapkan penggunaan laba tahun berjalan konsolidasi yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk KIE untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Approved and determined the appropriation of consolidated profit for the year attributable to the owners of the parent entity of KIE for the Fiscal Year ended December 31, 2023.	KIE telah merealisasikan hasil keputusan rapat ini melalui pembayaran dividen dengan besaran sesuai hasil keputusan rapat ini. KIE has implemented the resolutions of the meeting, including the distribution of dividends in the amount determined in accordance with the resolutions adopted at the meeting.

MATA ACARA DAN KEPUTUSANNYA SERTA TINDAK LANJUT ATAS HASIL KEPUTUSAN RAPAT
MEETING AGENDA, RESOLUTIONS, AND FOLLOW-UP UPON THE MEETING RESOLUTIONS

Agenda Agenda	Keputusan Resolutions	Tindak Lanjut Follow-Up
Mata Acara Ketiga Penetapan Gaji/Honorarium berikut fasilitas dan tunjangan lainnya untuk Direksi dan Dewan Komisaris Tahun Buku 2024, serta penetapan Tantiem dan Jasa Operasi Karyawan atas Kinerja Tahun Buku 2023. **Third Meeting Agenda** Determination of Salaries/Honorariums along with other facilities and allowances for the Board of Directors and the Board of Commissioners for the 2024 Fiscal Year, as well as the determination of Tantiem (performance bonuses) and Employee Operational Incentives based on the Company's Performance for the 2023 Fiscal Year.	1. Tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris tahun buku 2023 serta Gaji Direksi dan Honorarium Dewan Komisaris berikut fasilitas dan tunjangan untuk Tahun Buku 2024 akan ditetapkan secara terpisah dan tersendiri oleh PKT selaku Pemegang Saham Mayoritas. 2. Menyetujui dan menetapkan Jasa Operasi Karyawan atas Kinerja Tahun Buku 2023. 1. Tantiem (performance bonuses) for the Board of Directors and Board of Commissioners for the 2023 Fiscal Year as well as salaries for Directors and honorariums for the Board of Commissioners including benefits and allowances for the 2024 Fiscal Year shall be determined separately by PKT as the Majority Shareholder. 2. Approved and determined employee operational incentives.	PT Pupuk Kaltim telah mengeluarkan surat perihal penetapan penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris KIE tahun 2024. PT Pupuk Kalimantan Timur has issued a formal letter stipulating the remuneration of the Board of Directors and the Board of Commissioners of KIE for Fiscal Year 2024.
Mata Acara Keempat Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan Keuangan Perusahaan Tahun Buku 2024. **Fourth Meeting Agenda** Appointment of a Public Accounting Firm (KAP) to audit the Company's Financial Statements for the 2024 Fiscal Year.	1. Menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik (KAP) Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan untuk Tahun Buku 2024. 2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perusahaan menetapkan imbalan jasa audit atau persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut, serta menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan, karena sebab apapun, tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan untuk tahun buku 2024, termasuk menetapkan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut. 1. Reappointed Public Accounting Firm (KAP) Rintis, Jumadi, Rianto & partners as the auditor of the Company's Consolidated Financial Statements for the 2024 Fiscal Year. 2. Authorized the Company's Board of Commissioners to determine the audit fee or other conditions for the Public Accounting Firm and to appoint a replacement Public Accounting Firm in the event that Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan, for any reason, is unable to complete the audit of the Company's Consolidated Financial Statements for the 2024 Fiscal Year, including determining audit fees and other conditions for the replacement auditor.	Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (PricewaterhouseCoopers - PwC) sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan. The meeting also resolved to appoint Public Accounting Firm Rintis, Jumadi, Rianto & Partners (PricewaterhouseCoopers - PwC) as the independent public accounting firm to audit the Company's Consolidated Financial Statements.

INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM

Dalam rangka penerapan tata kelola Perusahaan yang baik, prinsip transparansi harus dijalankan dengan memberikan keterbukaan informasi khususnya kepada Pemegang Saham. Beragam fasilitas disiapkan KIE guna memudahkan Pemegang Saham dalam mengakses informasi terkait Perusahaan, fasilitas tersebut diantaranya:

1. RUPS, baik Tahunan dan RUPSLB, sebagai forum untuk Pemegang Saham dapat berkomunikasi dengan pengelola Perusahaan (Direksi dan Dewan Komisaris) untuk mendapatkan informasi mengenai Perusahaan sebagai dasar pengambilan keputusan.
2. Laporan Tahunan, merupakan media yang menyampaikan informasi mengenai kinerja dan kondisi keuangan KIE secara berkala dalam setiap Tahun Buku.
3. Media Sosial KIE seperti situs *Website*, Facebook, dan Instagram yang menyampaikan informasi terbaru dan relevan seperti laporan, pengumuman dan publikasi mengenai KIE kepada Pemegang Saham.
4. Media komunikasi lainnya, yaitu *video conference*, rapat internal dan kunjungan lapangan.

INFORMATION TO SHAREHOLDERS

As part of implementing good corporate governance, the principle of transparency must be upheld by ensuring the disclosure of information, particularly to Shareholders. KIE has prepared various facilities to facilitate shareholders' access to Company-related information. These facilities include:

1. GMS, both AGMS and EGMS, serve as forums for shareholders to communicate directly with Company management (Board of Directors and Board of Commissioners) to obtain information about the Company as a basis for decision-making.
2. Annual Report, serves as a medium for delivering periodic information on KIE's performance and financial condition for each fiscal year.
3. KIE Social Media Platforms, including the Website, Facebook, and Instagram, which provide shareholders with the latest and relevant updates such as reports, announcements, and publications related to KIE.
4. Other communication channels, such as video conferences, internal meetings, and site visits.

Dewan Komisaris
Board of Commissioners

Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas, Dewan Komisaris merupakan organ Perseroan yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar, memberi nasihat kepada Direksi, serta memastikan pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola terselenggara dalam setiap kegiatan usaha di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

Pursuant to Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, the Board of Commissioners is a corporate organ vested with the duty and responsibility to conduct general and/or specific supervision in accordance with the Company's Articles of Association, provide advice to the Board of Directors, and ensure that the principles of good corporate governance are implemented in all business activities across every level of the organization.

DASAR HUKUM PENGANGKATAN

Dasar hukum pengangkatan Dewan Komisaris KIE adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Anggaran Dasar Perusahaan PT Kaltim Industrial Estate.

LEGAL BASIS FOR APPOINTMENT

The legal basis for the appointment of the Board of Commissioners of KIE is as follows:

1. Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.
2. The Articles of Association of PT Kaltim Industrial Estate.

PERSYARATAN DAN KEANGGOTAAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang calon anggota Dewan Komisaris meliputi persyaratan formal dan persyaratan material. Persyaratan formal merupakan persyaratan yang bersifat umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sedangkan persyaratan material merupakan persyaratan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan sifat bisnis Perusahaan.

REQUIREMENTS AND MEMBERSHIP OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

The eligibility requirements for candidates for the Board of Commissioners consist of formal and material requirements. Formal requirements refer to general requirements stipulated by applicable laws and regulations, while material requirements are tailored to the Company's business characteristics and operational needs.

1. Persyaratan Formal
   Persyaratan formal bagi anggota Dewan Komisaris adalah:

   a. Orang perseorangan;
   b. Cakap melakukan perbuatan hukum;
   c. Tidak pernah dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonan;
   d. Tidak pernah menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah dan menyebabkan suatu Perusahaan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonan;
   e. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonan;
   f. Tidak boleh ada hubungan keluarga sedarah sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping atau hubungan semenda (menantu atau ipar) dengan anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi lainnya;
   g. Anggota Dewan Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengurus partai politik dan/atau calon anggota legislatif dan/ atau calon Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah; dan
   h. Memiliki komitmen untuk menyediakan waktu yang cukup.
2. Persyaratan Materiil
   a. Memiliki integritas dan moral dalam arti yang bersangkutan tidak pernah terlibat:
      i. Perbuatan rekayasa dan praktek-praktek menyimpang dalam pengurusan Perusahaan/ Anak Perusahaan/ Lembaga tempat yang bersangkutan bekerja sebelum pencalonan (berbuat tidak jujur);
      ii. Perbuatan cidera janji yang dapat dikategorikan tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati dengan Perusahaan/Anak Perusahaan/Lembaga tempat yang bersangkutan bekerja sebelum pencalonan (berperilaku tidak baik);
      iii. Perbuatan yang dikategorikan dapat memberikan keuntungan secara melawan hukum kepada yang bersangkutan dan/atau pihak lain sebelum pencalonan (berperilaku tidak baik);
      iv. Perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan yang berkaitan dengan prinsip-prinsip pengurusan perusahaan yang sehat (perilaku tidak baik);
   b. Memiliki dedikasi;
   c. Memahami masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
   d. Memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan dimana yang bersangkutan dicalonkan; serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya; dan
   e. Memiliki kemauan yang kuat (antusias) untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan dimana yang bersangkutan dicalonkan.

1. Formal Requirements
   Formal requirements of a candidate of the Board of Commissioners:
   a. Be an individual;
   b. Have legal capacity to perform legal acts;
   c. Not have been declared bankrupt within 5 (five) years prior to nomination;
   d. Not have served as a member of the Board of Directors or Board of Commissioners who was found guilty and caused a company to be declared bankrupt within 5 (five) years prior to nomination;
   e. Not have been convicted of a criminal offense causing loss to state finances and/or relating to the financial sector within 5 (five) years prior to nomination;

   f. Not have any familial relationship up to the third degree, either in a direct line or collateral line, or affinity relationship (in-law) with any member of the Board of Commissioners and/or Board of Directors;

   g. Not hold concurrent positions prohibited under applicable laws and regulations, including as an official of a political party, candidate for legislative office, and/or candidate for Regional Head/Deputy Regional Head; and
   h. Demonstrate a commitment to allocate sufficient time to perform their duties.
2. Material Requirements
   a. Possess integrity and moral character, meaning that the individual has never been involved in:
      i. Manipulative acts or improper practices in the management of a Company/Subsidiary/Institution where the individual was previously employed (dishonest conduct);

      ii. Acts of breach of contract that may be categorized as failure to fulfill agreed commitments with a Company/Subsidiary/Institution where the individual was previously employed (misconduct);

      iii. Acts that may be categorized as providing unlawful benefit to the individual and/or other parties prior to nomination (misconduct);

      iv. Acts categorized as violations of good corporate management principles (misconduct);

   b. Demonstrate dedication;
   c. Possess understanding of corporate management issues related to at least one management function;
   d. Have adequate knowledge in the Company's line of business and be able to allocate sufficient time to perform their duties; and

   e. Demonstrate strong commitment and enthusiasm to advance and develop the Company.

3. Persyaratan lain
   Persyaratan lain, yang meliputi:
   a. Bukan pengurus partai politik dan/atau anggota legislatif dan/atau tidak sedang mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif;
   b. Bukan kepala/wakil kepala daerah dan/atau tidak sedang mencalonkan diri sebagai calon kepala/wakil kepala daerah;
   c. Tidak sedang menduduki jabatan yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan dengan perusahaan yang bersangkutan kecuali menandatangani surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatan tersebut jika terpilih sebagai anggota Dewan Komisaris;
   d. Tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota Dewan Komisaris kecuali menandatangani surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatan tersebut jika terpilih sebagai anggota Dewan Komisaris;
   e. Tidak menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris pada perusahaan yang bersangkutan selama 2 (dua) periode berturut-turut;
   f. Sehat jasmani dan rohani, tidak sedang menderita suatu penyakit yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai anggota Dewan Komisaris yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari rumah sakit pemerintah;
   g. Pertimbangan lainnya adalah keberagaman komposisi anggota Dewan Komisaris dapat digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam proses nominasi dan suksesi anggota Dewan Komisaris dengan memperhatikan:
      i. Pengetahuan/Pendidikan (Bidang Studi), keahlian dan pengalaman kerja yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Perusahaan sehingga mendapatkan komposisi yang optimal serta efektivitas dalam pengambilan keputusan;
      ii. KIE menghargai dan menghormati setiap perbedaan dalam sudut pandang, pengetahuan, kemampuan dan pengalaman masing-masing individu, serta tidak membeda - bedakan ras, etnis, jenis kelamin dan agama.

MASA JABATAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Masa jabatan Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi kewenangan RUPS untuk memberhentikan para anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu. Setelah masa jabatannya berakhir, anggota Dewan Komisaris dapat diangkat kembali oleh RUPS untuk satu kali masa jabatan. Ketentuan ini juga berlaku untuk Komisaris Independen yang diangkat sesuai keputusan RUPS.

3. Other Requirements
   Other requirements, includes:
   a. Not be an official of a political party and/or a member of the legislature and/or currently running as a legislative candidate;
   b. Not serve as a Regional Head/Deputy Regional Head and/or currently running as a candidate for such office;
   c. Not hold a position that may create a conflict of interest with the Company, unless the candidate signs a statement of willingness to resign from such position if elected as a member of the Board of Commissioners;
   d. Not hold a position that is legally prohibited from being concurrently held with a position as a member of the Board of Commissioners, unless the candidate signs a statement of willingness to resign from such position if elected;
   e. Not have served as a member of the Board of Commissioners of the Company for 2 (two) consecutive terms;
   f. Be physically and mentally fit, not suffering from any illness that may hinder the performance of duties as a member of the Board of Commissioners, as evidenced by a medical certificate issued by a government hospital;
   g. Diversity in the composition of the Board of Commissioners may be considered in the nomination and succession process, taking into account:
      i. Educational background (field of study), expertise, and professional experience aligned with the Company's needs and conditions to achieve optimal composition and effective decision-making;
      ii. KIE is committed to respecting and valuing diversity in perspectives, knowledge, capabilities, and experience, without discrimination based on race, ethnicity, gender, or religion.

TERM OF OFFICE OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

The term of office of the Board of Commissioners is 5 (five) years, without prejudice to the authority of the GMS to dismiss members of the Board of Commissioners at any time. Upon the expiration of their term, members of the Board of Commissioners may be reappointed by the GMS for one additional term of office. This provision also applies to Independent Commissioners appointed pursuant to a resolution of the GMS.

Mengacu pada Board Manual Perusahaan, jabatan Dewan Komisaris berakhir apabila :

1. Meninggal dunia;
2. Masa jabatan berakhir;
3. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;
4. Tidak lagi memenuhi persyaratan atau karena alasan tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Anggaran Dasar.

PENGUNDURAN DIRI DEWAN KOMISARIS

Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada KIE dengan tembusan kepada Pemegang Saham, anggota Dewan Komisaris lainnya dan Direksi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. Apabila dalam surat pengunduran diri disebutkan tanggal efektif kurang dari 30 (tiga puluh) hari dari tanggal surat diterima, maka dianggap tidak menyebutkan tanggal efektif pengunduran diri.

Apabila sampai dengan tanggal yang diminta oleh anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan atau dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat permohonan pengunduran diri diterima dalam hal tidak disebutkan tanggal efektif pengunduran diri, tidak ada keputusan dari RUPS, maka anggota Dewan Komisaris tersebut berhenti dengan sendirinya pada tanggal yang diminta tersebut di atas atau dengan lewatnya waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat permohonan pengunduran diri diterima tanpa memerlukan persetujuan RUPS.

SUSUNAN DAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

Komposisi dan jumlah anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS untuk mendukung pengambilan keputusan yang efektif, tepat dan cepat, serta terhindar dari benturan kepentingan dengan memperhatikan visi misi KIE. Komposisi Dewan Komisaris KIE tahun 2025 adalah sebagai berikut:

In accordance with the Company's Board Manual, the tenure of a member of the Board of Commissioners shall terminate if:

1. The member passes away;
2. The term of office expires;
3. The member is dismissed pursuant to a resolution of the GMS;
4. The member no longer satisfies the applicable eligibility or for the reasons stipulated under prevailing laws and regulations and/or the Company's Articles of Association.

RESIGNATION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

A member of the Board of Commissioners is entitled to resign from their position by submitting a written notice of resignation to KIE, with copies addressed to the Shareholders, other members of the Board of Commissioners, and the Board of Directors, at least 30 (thirty) days prior to the intended effective date of resignation. If the resignation letter specifies an effective date that is less than 30 (thirty) days from the date of receipt, such letter shall be deemed not to specify an effective resignation date.

If, by the effective date requested by the respective member of the Board of Commissioners, or within 30 (thirty) days from the date the resignation letter is received in the event no effective date is specified, no resolution has been issued by the GMS, the member of the Board of Commissioners shall automatically cease to hold office on the requested date or upon the lapse of 30 (thirty) days from the receipt of the resignation letter, without requiring approval from the GMS.

STRUCTURE AND COMPOSITION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

The composition and number of members of the Board of Commissioners are determined by the GMS to support effective, accurate, and timely decision-making, while preventing conflicts of interest and aligning with KIE's vision and mission. The composition of KIE's Board of Commissioners in 2025 is as follows:

Nama Name	**Jabatan** Position	**Dasar Pengangkatan** Basis of Appointment	**Periode Jabatan** Term of Office
Teguh Ismartono*	Komisaris Utama President Commissioner	Berdasarkan RUPSLB 17 Januari 2023. Based on EGMS date January 17, 2023.	2023 - 2026
Turkhamim	Komisaris Commissioner	Berdasarkan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham sebagai Pengganti RUPS Luar Biasa Tanggal 13 Mei 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dewan Komisaris PT Kaltim Industrial Estate. Based on Circular Resolution of Shareholders in Lieu of the Extraordinary GMS dated May 13, 2024 on the Dismissal and Appointment of the Board of Commissioners PT Kaltim Industrial Estate.	2024 - 2027

Keterangan:
*) Teguh Ismartono tidak lagi menjabat sebagai Komisaris Utama sejak tanggal 26 Agustus 2025 sesuai dengan Keputusan Pemegang Saham Sirkuler tanggal 28 November 2025.
Notes:
*) Teguh Ismartono no longer served as President Commissioner since August 26, 2025 as stipulated in the Circular Resolution of Shareholders dated November 28, 2025.

INDEPENDENSI DEWAN KOMISARIS

Sebagai organ yang berperan mengawasi pengelolaan Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris menjunjung tinggi prinsip independensi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya guna memastikan tidak adanya benturan kepentingan dan senantiasa mengutamakan kepentingan Perusahaan di atas kepentingan pribadi.

Sebagai wujud etika jabatan, setiap anggota Dewan Komisaris membuat pernyataan independensi dan bebas dari benturan kepentingan setiap tahunnya. Anggota Dewan Komisaris juga wajib melaporkan kepada KIE mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada KIE dan Perusahaan lain, termasuk setiap perubahannya. Sekretaris Dewan Komisaris bertugas memastikan bahwa praktik ini telah diterapkan sejalan dengan prinsip GCG.

INDEPENDENCE OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

As the corporate organ responsible for supervising the management of the Company by the Board of Directors, the Board of Commissioners upholds the principle of independence in the performance of its duties and responsibilities to ensure the absence of conflicts of interest and to consistently prioritize the interests of the Company over personal interests.

As a matter of professional ethics, each member of the Board of Commissioners executes an annual statement of independence and conflict-of-interest disclosure. Members of the Board of Commissioners are also required to report to the Company any share ownership held by themselves and/or their family members in KIE and in other companies, including any of its changes. The Secretary to the Board of Commissioners is responsible for ensuring that these practices are implemented in accordance with the principles of GCG.

KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS

Tidak terdapat perubahan kepemilikan saham Perusahaan yang dimiliki Dewan Komisaris.

SHARE OWNERSHIP OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

There were no changes in the Company's share ownership held by members of the Board of Commissioners.

Nama Name	**Jabatan** Position	**Kepemilikan Saham** Share Ownership		
		Pribadi Pada KIE Personal on KIE	**Keluarga Pada KIE** Family on KIE	**Pribadi Pada Perusahaan Lain** Personal on Other Company
Teguh Ismartono*	Komisaris Utama President Commissioner	x	x	x
Turkhamim	Komisaris Commissioner	x	x	x

✓ = Memiliki Saham | Own Shares
X = Tidak Memiliki Saham | Does Not Own Any Shares
Keterangan:
*) Teguh Ismartono tidak lagi menjabat sebagai Komisaris Utama sejak tanggal 26 Agustus 2025 sesuai dengan Keputusan Pemegang Saham Sirkuler tanggal 28 November 2025.
Notes:
*) Teguh Ismartono no longer served as President Commissioner since August 26, 2025 as stipulated in the Circular Resolution of Shareholders dated November 28, 2025.

RANGKAP JABATAN DEWAN KOMISARIS

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan Pasal 13 ayat (32), anggota Dewan Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:

1. Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara;
2. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengurus partai politik dan/atau calon anggota legislatif, dan/atau calon Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah;
3. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

Anggota Dewan Komisaris KIE tidak ada yang merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (32) dari Anggaran Dasar Perusahaan. Kepengurusan Dewan Komisaris KIE di Perusahaan/Instansi lain sebagai berikut:

CONCURRENT POSITIONS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Pursuant to Article 13 paragraph (32) of the Company's Articles of Association, members of the Board of Commissioners are prohibited from holding concurrent positions as:

1. Members of the Board of Directors of a State-Owned Enterprise;
2. Any other position prohibited under prevailing laws and regulations, including as officials of political parties and/ or candidates for legislative office, and/or candidates for Regional Head/Deputy Regional Head;
3. Any other position that may give rise to a conflict of interest.

During the reporting period, none of the members of KIE's Board of Commissioners held concurrent positions as referred to in Article 13 paragraph (32) of the Company's Articles of Association. The positions held by members of the Board of Commissioners of KIE in other companies/institutions are as follows:

Nama Name	**Jabatan di KIE** Position in KIE	**Jabatan Rangkap Sesuai Anggaran Dasar Perusahaan Pasal 13 Ayat (32)** Concurrent Position in Accordance with Articles of Association Article 13 Paragraph (32)
Teguh Ismartono*	Komisaris Utama President Commissioner	Tidak ada None
Turkhamim	Komisaris Commissioner	Tidak ada None

Keterangan :
*) Teguh Ismartono tidak lagi menjabat sebagai Komisaris Utama sejak tanggal 26 Agustus 2025 sesuai dengan Keputusan Pemegang Saham Sirkuler tanggal 28 November 2025.
Notes
*) Teguh Ismartono no longer served as President Commissioner since August 26, 2025 as stipulated in the Circular Resolution of Shareholders dated November 28, 2025.

PEDOMAN TATA KERJA DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris KIE telah memiliki pedoman dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya dalam mengawasi jalannya usaha untuk memenuhi kepentingan para Pemangku Kepentingan. Pedoman kerja Dewan Komisaris dan Direksi KIE atau disebut Board Manual telah ditandatangani pada 10 November 2020 yang merupakan pemutakhiran dari pedoman sebelumnya pada 21 Januari 2015.

Board Manual telah dicetak dan diberikan kepada Dewan Komisaris pada masa pengenalan Perusahaan dan telah dipublikasikan di situs web KIE. Board Manual tersebut disusun berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan dievaluasi secara berkala sesuai kebutuhan Perusahaan.

BOARD MANUAL FOR THE BOARD OF COMMISSIONERS

The Board of Commissioners of KIE has established guidelines for carrying out their duties, responsibilities, and authorities in overseeing the Company's operations to serve the interests of stakeholders. The Board Manual, which governs the working guidelines of the Board of Commissioners and the Board of Directors of KIE, was signed on November 10, 2020, as an update to the previous guidelines dated January 21, 2015.

The Board Manual has been printed and distributed to the Board of Commissioners during the Company's orientation period and has also been published on KIE's website. The Board Manual was developed based on prevailing laws and regulations and is evaluated periodically in accordance with the Company's needs.

CAKUPAN BOARD MANUAL

1. Pendahuluan
2. Prinsip-Prinsip Hubungan Dewan Komisaris dan Direksi

THE SCOPE OF THE BOARD MANUAL

1. Introduction
2. Principles of the Board of Commissioners and Directors Relationship

3. Dewan Komisaris
   a. Komposisi
   b. Persyaratan
   c. Komisaris Independen
   d. Keanggotaan
   e. Masa Jabatan
   f. Pengisian Jabatan yang Lowong
   g. Pengunduran Diri
   h. Rangkap Jabatan
   i. Program Pengenalan
   j. Program Pembelajaran Berkelanjutan
   k. Tugas, Wewenang, Kewajiban, dan Hak
   l. Pelaporan Etika Jabatan
   m. Pembagian Kerja
   n. Rapat Organ Pendukung
   o. Evaluasi Kinerja
4. Direksi
5. Hubungan Kerja Antara Direksi Dengan Dewan Komisaris dan Direksi Dengan RUPS
6. Hak dan Tunjangan Dewan Komisaris dan Direksi
7. Rapat Umum Pemegang Saham

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris bertugas mengawasi dan memberikan nasihat kepada Direksi sebagai pengurus Perusahaan yang pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan kewenangannya dilaporkan kepada RUPS. Setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris. Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, lingkup pekerjaan Dewan Komisaris berdasarkan Board Manual antara lain:

TUGAS BERKAITAN DENGAN RUPS

1. Memberi saran kepada RUPS tentang rencana pengembangan KIE rencana kerja dan anggaran tahunan termasuk perubahannya, laporan berkala dan laporan-laporan lain dari Direksi.
2. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja KIE termasuk anggaran yang sudah disahkan dan juga membuat serta menyampaikan penilaian kinerja dan pendapatnya dalam RUPS.
3. Mengikuti perkembangan kegiatan KIE, dan dalam hal KIE menunjukkan gejala kemunduran, segera melaporkan kepada RUPS dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh.
4. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengurusan KIE.
5. Melakukan tugas-tugas pengawasan lainnya yang ditentukan RUPS.

3. Board Of Commissioners
   a. Composition
   b. Requirements
   c. Independent Commissioner
   d. Membership
   e. Term of Office
   f. Appointment to Fill Vacant Positions
   g. Resignation
   h. Concurrent Position
   i. Orientation Program
   j. Continuous Learning Program
   k. Duties, Authorities, Obligations, and Rights
   l. Position Ethics Reporting
   m. Division of Work
   n. Supporting Organ Meetings
   o. Performance Evaluation
4. Director
5. Working Relationship Between the Board of Directors and the Board of Commissioners and the Board of Directors with the GMS
6. Rights and Benefits of the Board of Commissioners and the Board of Directors
7. General Meeting of Shareholders

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

The Board of Commissioners is tasked with supervising and providing advice to the Board of Directors in its management of the Company. The execution of the duties, responsibilities, and authorities of the Board of Commissioners is reported to the GMS. Each member of the Board of Commissioners may not act individually but must act pursuant to resolutions of the Board of Commissioners. In carrying out its duties and responsibilities, the scope of work of the Board of Commissioners, as stipulated in the Company's Board Manual, includes the following:

DUTIES RELATED TO THE GMS

1. To provide recommendations to the GMS regarding KIE's development plan, annual work plan and budget including its amendments, periodic reports, and other reports submitted by the Board of Directors.
2. To supervise the implementation of KIE's approved work plan and budget, and to prepare and present performance evaluations and opinions at the GMS.
3. To monitor the development of KIE's business activities and, in the event of indications of deterioration, to promptly report such matters to the GMS along with recommendations for corrective actions.
4. To provide opinions and recommendations to the GMS on other matters deemed significant for the management of KIE.
5. To perform other supervisory duties as determined by the GMS.

TUGAS BERKAITAN DENGAN DIREKSI

1. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Tata Kelola Perusahaan maupun usaha KIE yang dilakukan oleh Direksi.
2. Memberikan nasihat kepada Direksi tentang kepengurusan jalannya KIE.
3. Menilai kinerja Direksi dan melaporkan hasil penilaian kinerja kepada Pemegang Saham.
4. Mengusulkan remunerasi Direksi sesuai ketentuan yang berlaku dan penilaian kinerja Direksi.

TUGAS BERKAITAN DENGAN STRATEGI DAN PROGRAM KERJA KIE

1. Mengkaji dan ikut mengesahkan tujuan strategis, rencana operasional, dan keuangan KIE sebelum disahkan oleh RUPS;
2. Mengkaji dan memberi pendapat atas rencana kerja KIE, rencana strategis, anggaran kerja tahunan, dan rencana usaha yang dipersiapkan oleh Direksi;
3. Mengawasi penerapan rencana usaha dan kinerja KIE, termasuk mengawasi pengeluaran barang modal yang materiil, pengambilalihan, dan pemisahan KIE;
4. Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk mengawasi dan memberikan nasihat kepada Direksi secara berkala serta memonitor risiko-risiko penting yang dihadapi KIE, dan bilamana perlu memberi saran untuk mengubah pengelolaan kebijakan Manajemen Risiko;
5. Untuk menjalankan tanggung jawab ini, Dewan Komisaris dapat membentuk Komite Pemantauan Manajemen Risiko.

TUGAS BERKAITAN DENGAN PELAKSANAAN GCG DAN PENGELOLAAN MANAJEMEN RISIKO

1. Memantau secara berkelanjutan efektivitas praktik GCG yang diterapkan KIE dan bilamana perlu melakukan penyesuaian;
2. Memberikan pendapat dan saran atas pelaksanaan GCG di dalam KIE;
3. Mengkaji dan ikut mengesahkan budaya KIE dan Kode Etik KIE yang memuat nilai-nilai KIE yang diinginkan serta melakukan pengawasan untuk memastikan bahwa manajemen telah melakukan komunikasi kepada seluruh anggota Dewan Komisaris beserta stafnya.

TUGAS BERKAITAN DENGAN NOMINASI ANGGOTA DEKOM DAN DIREKSI ANAK PERUSAHAAN

Dalam nominasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Anak Perusahaan, Direksi KIE mengusulkan kepada Dewan Komisaris wakil Perusahaan yang menjadi calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada perusahaan patungan dan/atau anak perusahaan yang memberikan kontribusi signifikan

DUTIES RELATED TO THE BOARD OF DIRECTORS

1. To supervise management policies and the overall conduct of management, including the implementation of corporate governance and the Company's business operations carried out by the Board of Directors.
2. To provide advice to the Board of Directors regarding the management of KIE.
3. To evaluate the performance of the Board of Directors and report the results of such evaluation to the Shareholders.
4. To propose the remuneration of the Board of Directors in accordance with prevailing regulations and based on performance evaluation.

DUTIES RELATED TO KIE'S STRATEGY AND WORK PROGRAMS

1. To review and approve of KIE's strategic objectives, operational plans, and financial plans prior to their ratification by the GMS;
2. To review and provide opinions on KIE's work plan, strategic plan, annual budget, and business plan prepared by the Board of Directors;
3. To supervise the implementation of the business plan and performance of KIE, including oversight of material capital expenditures, acquisitions, and spin-offs;
4. To periodically supervise and advise the Board of Directors and monitor significant risks faced by KIE, and where necessary, provide recommendations to adjust Risk Management policies;
5. In carrying out these responsibilities, to establish a Risk Management Monitoring Committee, if deemed necessary.

DUTIES RELATED TO THE IMPLEMENTATION OF GCG AND RISK MANAGEMENT

1. To continuously monitor the effectiveness of GCG practices implemented by KIE and where necessary to recommend adjustments;
2. To provide opinions and recommendations on the implementation of GCG within KIE;
3. To review and approve KIE's corporate culture and Code of Conduct, which contain the Company's core values, and to supervise management to ensure proper communication of such values to all members of the organization.

DUTIES RELATED TO THE NOMINATION OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS OF SUBSIDIARIES

In the nomination process for members of the Board of Commissioners and Board of Directors of subsidiaries, the Board of Directors of KIE proposes to the Board of Commissioners the Company's representatives to be nominated as candidates for the Board of Directors and Board

kepada Perusahaan dan/atau bernilai strategis. Dewan Komisaris akan memberikan tanggapan tertulis atas usulan Direksi untuk selanjutnya ditetapkan dalam RUPS.

of Commissioners of joint ventures and/or subsidiaries that make significant contributions to the Company and/or are of strategic value. The Board of Commissioners shall provide written responses to the proposals submitted by the Board of Directors, which shall subsequently be determined through a resolution of the GMS.

PEMBAGIAN TUGAS DEWAN KOMISARIS

Dalam rangka meningkatkan efektivitas fungsi pengawasan yang lebih baik, disepakati pembagian tugas Dewan Komisaris. Untuk tahun 2025, berikut pembagian tugas Dewan Komisaris:

DIVISION OF DUTIES OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

In order to enhance the effectiveness of its supervisory function, the Board of Commissioners has agreed upon a division of responsibilities among its members. For Fiscal Year 2025, the division of duties among the members of the Board of Commissioners is as follows:

Dewan Komisaris Board of Commissioners	**Tugas** Duties
Teguh Ismartono	1. Melakukan pengawasan dan nasihat terhadap kebijakan pengurusan serta jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Tata Kelola Perusahaan maupun usaha KIE yang dilakukan oleh Direksi. 2. Memantau secara berkelanjutan efektivitas praktik GCG yang diterapkan di seluruh tingkatan organisasi. 3. Mengawasi, mengkaji mengarahkan tujuan strategis, rencana kerja, rencana strategis, anggaran kerja tahunan, dan rencana usaha yang dipersiapkan oleh Direksi. 4. Memberikan tanggapan atas nominasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Anak Perusahaan. 5. Mengawasi dan memberikan nasihat kepada Direksi terkait pengelolaan risiko. 6. Menilai kinerja Direksi dan melaporkan hasil penilaian kinerja kepada Pemegang Saham. 7. Mengusulkan remunerasi Direksi sesuai ketentuan yang berlaku dan penilaian kinerja Direksi. 8. Melaksanakan tugas Dewan Komisaris di Bidang SDM, Korporasi, Operasi, dan Pengembangan. 9. Menjabat sebagai Ketua Komite GCG, Pemantauan Manajemen Risiko dan Investasi. 1. Supervising and advising on management policies and the course of management in general, both regarding Corporate Governance and KIE business carried out by the Board of Directors. 2. Continuously monitoring the effectiveness of GCG practices implemented at all levels of the organization. 3. Supervising, reviewing and directing strategic objectives, work plans, strategic plans, annual work budgets, and business plans prepared by the Board of Directors. 4. Responding to the nominations of members of the Board of Commissioners and Directors of Subsidiaries. 5. Supervising and providing advice to the Board of Directors regarding risk management. 6. Assessing the performance of the Board of Directors and reporting the results of the performance assessment to the Shareholders. 7. Proposing remuneration for the Board of Directors in accordance with applicable regulations and the performance assessment of the Board of Directors. 8. Carrying out the duties of the Board of Commissioners in the areas of HR, Corporate Affairs, Operations, and Business Development. 9. Serving as Chairman of the GCG, Risk Management, and Investment Monitoring Committee.
Turkhamim	1. Melakukan pengawasan dan nasihat terhadap kebijakan pengurusan serta jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Tata Kelola Perusahaan maupun usaha KIE yang dilakukan oleh Direksi. 2. Memantau secara berkelanjutan efektivitas praktik GCG yang diterapkan di seluruh tingkatan organisasi. 3. Mengawasi, mengkaji mengarahkan tujuan strategis, rencana kerja, rencana strategis, anggaran kerja tahunan, dan rencana usaha yang dipersiapkan oleh Direksi. 4. Memberikan tanggapan atas nominasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Anak Perusahaan. 5. Mengawasi dan memberikan nasihat kepada Direksi terkait pengelolaan risiko. 6. Menilai kinerja Direksi dan melaporkan hasil penilaian kinerja kepada Pemegang Saham. 7. Mengusulkan remunerasi Direksi sesuai ketentuan yang berlaku dan penilaian kinerja Direksi. 8. Melaksanakan tugas Dewan Komisaris di bidang Keuangan, Pemasaran, dan Umum. 9. Menjabat sebagai Ketua Komite Audit.

Dewan Komisaris Board of Commissioners	Tugas Duties
	1. Supervising and advising on management policies and the course of management in general, both regarding Corporate Governance and KIE business carried out by the Board of Directors. 2. Continuously monitoring the effectiveness of GCG practices implemented at all levels of the organization. 3. Supervising, reviewing and directing strategic objectives, work plans, strategic plans, annual work budgets, and business plans prepared by the Board of Directors. 4. Responding to the nominations of members of the Board of Commissioners and Directors of Subsidiaries. 5. Supervising and providing advice to the Board of Directors regarding risk management. 6. Assessing the performance of the Board of Directors and reporting the results of the performance assessment to the Shareholders. 7. Proposing remuneration for the Board of Directors in accordance with applicable regulations and the performance assessment of the Board of Directors. 8. Carrying out the duties of the Board of Commissioners in the areas of Finance, Marketing, and General Affairs. 9. Serving as Chairperson of the Audit Committee.

Dewan Komisaris membentuk komite-komite yang di dalamnya, setiap anggota Dewan Komisaris diangkat menjadi ketua dan wakil ketua pada Komite yang telah dibentuk. Pendelegasian anggota Dewan Komisaris ke dalam sejumlah Komite mempertimbangkan kompetensi dan dianggap mampu melaksanakan tugas pada masing-masing Komite tersebut yaitu:

The Board of Commissioners established committees in which each member of the BOC is appointed as chairman and vice chairman of the Committee that has been established. The delegation of members of the BOC to a number of Committees considers competence and is considered capable of carrying out the duties of each Committee, particularly:

KOMITE COMMITTEE	KETUA CHAIRMAN	ANGGOTA MEMBER
Komite Audit Audit Committee	Turkhamim	Rizky Eka Septianto** Fakhrurrazi
Komite GCG, Manajemen Risiko & Investasi GCG, Risk Management & Investment Committee	Teguh Ismartono*	Irfan Setiawan

Keterangan :
*) Teguh Ismartono tidak lagi menjabat sebagai Komisaris Utama sejak tanggal 26 Agustus 2025 sesuai dengan Keputusan Pemegang Saham Sirkuler tanggal 28 November 2025.
**) Sdr. Fakhrurrazi menggantikan Sdr. Rizky Eka Septianto berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor KEP-03/DEKOM/KIE/X/2025.
Notes:
*) Teguh Ismartono no longer served as President Commissioner since August 26, 2025 as stipulated in the Circular Resolution of Shareholders dated November 28, 2025.
**) Mr. Fakhrurrazi replaced Mr. Rizky Eka Septiantio based on the Board of Commissioners Decree No. KEP-03/DEKOM/KIE/X/2025.

HAK DEWAN KOMISARIS

Sesuai Board Manual, Dewan Komisaris berhak untuk:

1. Baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri pada setiap waktu yang dianggap perlu, memasuki bangunan, halaman dan tempat lain yang dipergunakan atau dikuasai oleh Perusahaan, serta berhak memeriksa pembukuan, surat-surat bukti, persediaan barang, memeriksa, dan mencocokkan keadaan uang kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain, surat berharga, serta mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi;
2. Meminta bantuan tenaga ahli atau konsultan untuk jangka waktu terbatas atas beban Perusahaan, jika dianggap perlu;
3. Meminta penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan kepada Direksi dan Direksi wajib memberikan penjelasan yang menyangkut pengelolaan Perusahaan;

RIGHTS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

According to the Board Manual, the Board of Commissioners is entitled to:

1. Either collectively or individually, at any time deemed necessary, enter buildings, premises, and other places utilized or controlled by the Company, and has the right to inspect accounting records, supporting documents, inventories, verify and reconcile cash balances, securities, and to ascertain all actions undertaken by the Board of Directors;
2. Engage experts or consultants for a limited period at the expense of the Company, if deemed necessary;
3. Request explanations regarding any matters inquired from the Board of Directors, and the Board of Directors is obligated to provide clarifications related to the management of the Company;

4. Dengan suara terbanyak, memberhentikan sewaktu-waktu untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi jika mereka bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar, melalaikan kewajibannya, atau alasan lainnya yang mendesak;
5. Memberikan persetujuan tertulis untuk tindakan-tindakan Direksi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan.

WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Komisaris mempunyai kewenangan antara lain:

1. Melihat buku-buku, surat-surat, serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain, surat berharga, dan memeriksa kekayaan KIE;
2. Memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang dipergunakan oleh KIE;
3. Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan KIE;
4. Mengetahui segala kebijakan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi;
5. Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris;
6. Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Dewan Komisaris, jika dianggap perlu;
7. Memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;
8. Membentuk Komite-Komite Dewan Komisaris lain selain Komite Audit, jika dianggap perlu dengan memperhatikan kemampuan KIE;
9. Menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas beban KIE, jika dianggap perlu.
10. Melakukan tindakan pengurusan KIE dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;
11. Menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan;
12. Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan RUPS.

PENDELEGASIAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris dapat melakukan pendelegasian wewenang melalui surat kuasa khusus untuk keperluan dimaksud dan pendelegasian tersebut tidak melepaskan tanggung jawab Dewan Komisaris secara kolektif. Pada 2025, tidak terdapat pendelegasian wewenang melalui surat kuasa khusus untuk terpenuhinya kuorum pengambilan keputusan dalam rapat Dewan Komisaris.

4. With a majority vote, suspend at any time temporarily one or more members of the Board of Directors if they act contrary to the Articles of Association, neglect their obligations, or for other urgent reasons;
5. Provide written approval for the actions of the Board of Directors as stipulated in the Company's Articles of Association.

AUTHORITY OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

In performing its duties, the Board of Commissioners has authorities to:

1. View books, letters, and other documents, examining cash for verification purposes and others, securities, and inspecting KIE's assets;
2. Enter the grounds, buildings and offices used by KIE;
3. Request an explanation from the Board of Directors and/or other officials regarding all issues related to the management of KIE;
4. Know all the policy actions that have been and will be carried out by the Board of Directors;
5. Request the Board of Directors and/or other officials with the knowledge of the Board of Directors to attend the Board of Commissioners meeting;
6. Appoint and dismiss the Secretary to the Board of Commissioners, if deemed necessary;
7. Temporarily dismiss members of the Board of Directors in accordance with the provisions of the Articles of Association;
8. Establish other Board of Commissioners Committees other than the Audit Committee, if deemed necessary by taking into account the capabilities of KIE;
9. Use experts for certain matters and for a certain period of time at the expense of KIE, if deemed necessary;
10. Take action to manage KIE in certain circumstances for a certain period of time in accordance with the provisions of the Articles of Association;
11. Attend Board of Directors meetings and provide views on the matters discussed;
12. Carry out other supervisory authority as long as it does not conflict with the laws and regulations, Articles of Association, and/or GMS resolutions.

DELEGATION OF THE AUTHORITY OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

The Board of Commissioners may delegate authority through a special power of attorney for the intended purpose, provided that such delegation does not release the Board of Commissioners from its collective responsibility. In 2025, there was no delegation of authority through a special power of attorney to fulfill the quorum for decision-making at the meetings of the Board of Commissioners.

KEWAJIBAN DEWAN KOMISARIS

Sesuai dengan Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan Anggaran Dasar Perusahaan, Dewan Komisaris memiliki kewajiban dalam:

1. Memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan KIE;
2. Meneliti dan menelaah serta menandatangani Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang disiapkan Direksi, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar KIE;
3. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai Rencana Jangka Panjang KIE dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan mengenai alasan Dewan Komisaris menandatangani Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan;
4. Mengikuti perkembangan kegiatan KIE, memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengurusan KIE;
5. Melaporkan dengan segera kepada RUPS apabila terjadi gejala menurunnya kinerja KIE;
6. Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tahunan;
7. Memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan, apabila diminta RUPS;
8. Menyusun program kerja tahunan yang dibuat secara terpisah untuk dimintakan persetujuan RUPS bersamaan dengan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan;
9. Membentuk Komite Audit;
10. Mengusulkan Akuntan Publik kepada RUPS;
11. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyerahkan yang asli kepada Direktur Utama serta menyimpan salinannya;
12. Melaporkan kepada KIE mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada KIE dan perusahaan lain;
13. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS;
14. Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan RUPS;
15. Melaporkan kegiatan pengawasan setiap triwulan kepada Pemegang Saham.

RENCANA KERJA DEWAN KOMISARIS 2025

Setiap tahunnya, Dewan Komisaris menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) untuk memenuhi Anggaran Dasar Perusahaan Pasal 14 angka 2 huruf b ayat (8) yang selanjutnya disampaikan kepada Pemegang Saham. Dewan Komisaris dengan organ pendukungnya fokus, proaktif, intensif, serta konsisten dalam melakukan pengawasan yang bersifat strategis maupun rutin di bidang proyek komersil dan investasi,

OBLIGATIONS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

In accordance with the Board Manual of Commissioners' and the Company's Articles of Association, the Board of Commissioners is obligated to:

1. Provide advice to the Board of Directors in managing KIE;
2. Review, examine, and sign the Corporate's Long-Term Plan and the Work Plan and Budget prepared by the Board of Directors, in accordance with the provisions of KIE's Articles of Association;
3. Provide opinions and recommendations to the GMS regarding the Corporate's Long-Term Plan and the Work Plan and Budget, including the basis for the Board of Commissioners' endorsement thereof;
4. Monitor the development of KIE's business activities and provide opinions and recommendations to the GMS on matters deemed significant to the management of KIE;
5. Promptly report to the GMS any indications of a decline in KIE's performance;
6. Review and examine periodic reports and the Annual Report prepared by the Board of Directors and sign the Annual Report;
7. Provide explanations, opinions, and recommendations to the GMS regarding the Annual Report, if requested by the GMS;
8. Prepare a separate annual work program of the Board of Commissioners for approval by the GMS simultaneously with the Corporate's Work Plan and Budget;
9. Establish an Audit Committee;
10. Propose the appointment of a Public Accountant to the GMS;
11. Prepare minutes of meetings of the Board of Commissioners, submit the original to the President Director, and retain copies thereof;
12. Report to the Company any share ownership held by the respective member and/or their family members in KIE and other companies;
13. Submit a report to the GMS regarding the supervisory duties performed during the preceding fiscal year;
14. Perform other obligations in the context of supervisory and advisory duties, provided that such obligations do not conflict with prevailing laws and regulations, the Articles of Association, and/or resolutions of the GMS;
15. Submit quarterly reports on supervisory activities to the Shareholders.

2025 WORK PLAN OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Each year, the Board of Commissioners prepares its Annual Work Plan and Budget (RKA) in compliance with Article 14 paragraph 2 letter b point (8) of the Company's Articles of Association, which is subsequently submitted to the Shareholders. Together with its supporting organs, the Board of Commissioners remains focused, proactive, intensive, and consistent in carrying out both strategic and routine

mutu dan layanan, investasi dan pengadaan, umum dan SDM, GCG dan manajemen risiko, teknologi informasi, CSR, serta meningkatkan sinergi internal dan eksternal Dewan Komisaris.

supervision across strategic areas, including commercial projects and investments, quality and service, investment and procurement, general affairs and human resources, GCG and risk management, information technology, CSR, as well as strengthening internal and external synergy of the Board of Commissioners.

PROGRAM PENGENALAN BAGI DEWAN KOMISARIS BARU

KIE telah memiliki ketentuan berkenaan dengan program pengenalan Perusahaan bagi anggota Dewan Komisaris baru. Tujuan kegiatan tersebut untuk memberikan gambaran tentang aktivitas bisnis, rencana Perusahaan kedepan, pedoman kerja dan hal lainnya yang menjadi tanggung jawab Dewan Komisaris. Program pengenalan telah diatur dalam *Board Manual*.

Program pengenalan disiapkan oleh Sekretaris Perusahaan, yaitu berupa kajian dokumen Board Manual, Kode Etik KIE, Laporan Tahunan, Pedoman GCG, Profil KIE, Pedoman dan peraturan perundangan lainnya yang terkait proses bisnis KIE serta kunjungan ke lokasi pabrik dan beberapa daerah kantor pemasaran.

Pada tahun 2025, tidak terdapat pengangkatan anggota Dewan Komisaris baru.

ORIENTATION PROGRAM FOR NEWLY APPOINTED COMMISSIONERS

KIE has established provisions regarding an orientation program for newly appointed members of the Board of Commissioners. The purpose of this program is to provide an overview of the Company's business activities, future plans, governance framework, and other matters within the scope of responsibilities of the Board of Commissioners. The orientation program is regulated under the Company's Board Manual.

The orientation program is prepared by the Corporate Secretary and includes a review of key corporate documents, such as the Board Manual, KIE Code of Conduct, Annual Report, GCG Guidelines, Company Profile, as well as other relevant policies and regulations related to KIE's business processes. The program may also include site visits to operational facilities and selected marketing offices.

In 2025, there were no appointments of new members to the Board of Commissioners.

PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI DEWAN KOMISARIS

KIE memiliki kebijakan program pelatihan Dewan Komisaris yang diatur dalam Board Manual. Dewan Komisaris melaksanakan program pelatihan dan sertifikasi dalam rangka meningkatkan kompetensi Anggota Dewan Komisaris sesuai dengan kebutuhan. Program pelatihan yang diikuti Dewan Komisaris sepanjang tahun 2025 adalah sebagai berikut:

COMPETENCY DEVELOPMENT PROGRAM OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

KIE maintains a training policy for the Board of Commissioners as stipulated in the Board Manual. Members of the Board of Commissioners participate in training and certification programs to enhance their competencies in accordance with the Company's needs. The training programs attended by members of the Board of Commissioners during 2025 are as follows:

Nama dan Jabatan Name and Position	**Kegiatan** Activities	**Penyelenggara** Organizer	**Waktu Pelaksanaan** Time of Implementation
Teguh Ismartono	Webinar Manajemen Risiko "Dive into Sustainability Disclosure" Risk Management Webinar "Dive into Sustainability Disclosure"	FMR BUMN	11 Juni 2025 June 11, 2025
Teguh Ismartono	BSE Masterclass Global Trade Tensions Turning Crisis into Opportunity	BUMN School of Excellence (BSE)	28 Mei 2025 May 28, 2025
Turkhamim	Argus Asia Fertilizer 2025 Conference	Argus Media	23 April 2025 April 23, 2025

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS 2025

Dewan Komisaris telah melaksanakan dan melaporkan tugas dan tanggung jawab pengawasan sebagaimana tercantum dalam Board Manual sesuai dengan RKA Dewan Komisaris. Berikut adalah pelaksanaan tugas Dewan Komisaris selama 2025:

1. Membuat Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris Tahun Buku 2025;
2. Menyelenggarakan rapat internal Dewan Komisaris;
3. Menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris mengundang Direksi;
4. Melakukan kunjungan kerja ke unit kerja Wilayah KIE;
5. Menyampaikan surat saran dan rekomendasi kepada Direktur Utama Perusahaan;
6. Melaksanakan pengkajian kebijakan, prosedur dan Visi Misi Perusahaan, serta Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan Anak Perusahaan/Perusahaan patungan;
7. Menugaskan Komite Dewan Komisaris untuk melakukan rapat dengan Manajemen/ staf Perusahaan terkait permasalahan yang dihadapi Perusahaan, pengkajian kebijakan, serta prosedur yang dilaksanakan secara periodik;
8. Memberikan persetujuan tertulis atas permintaan Direksi yang sejalan dengan Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

JENIS KEPUTUSAN YANG MEMERLUKAN PERSETUJUAN DEWAN KOMISARIS

Sesuai dengan tugas dan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Board Manual, Dewan Komisaris juga memberikan tanggapan dan persetujuan tertulis atas usulan yang disampaikan oleh Direksi. Selama 2025, tanggapan, persetujuan, dan nasihat yang dikeluarkan oleh Dewan Komisaris sebagai berikut:

1. Tanggapan tertulis atas Rencana Likuidasi PT Prakarsa Nusa Sinergi (PNS);
2. Tanggapan tertulis terkait Pengajuan Biaya Overrun Tahun 2025;
3. Tanggapan tertulis atas Permohonan Penghapusan Piutang Macet KIE;
4. Tanggapan Persetujuan Penyesuaian Struktur Organisasi KIE;
5. Tanggapan Dekom atas Usulan RKAP 2025;
6. Tanggapan atas Kinerja KIE Tahun 2024;
7. Tanggapan Tertulis Terkait Penambahan Anggaran dan Pelaksanaan Investasi Pembangunan Jaringan Infrastruktur Supply CO_2;
8. Persetujuan Tertulis atas Penghapusbukuan dan Scrap Aset Tetap Bergerak, Persediaan Barang Mati dan Material Sisa Tahun 2025;

IMPLEMENTATION OF DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE BOARD OF COMMISSIONERS 2025

The Board of Commissioners has carried out and reported on the supervisory duties and responsibilities as stated in the Board Manual in accordance with the RKA of the Board of Commissioners. The following is the implementation of the duties of the Board of Commissioners during 2025:

1. Prepared the Board of Commissioners Work Plan and Budget for the Financial Year 2025;
2. Organized internal meetings of the Board of Commissioners;
3. Organized Board of Commissioners meetings inviting the Board of Directors;
4. Conducted a working visit to the work unit in the KIE Region;
5. Submitted letters of advice and recommendations to the President Director of the Company;
6. Performed review of policies, procedures and the Company's Vision and Mission, as well as Supervision of the implementation of policies on the management of Subsidiaries/Joint Companies;
7. Assigned the Committee of the Board of Commissioners to hold meetings with the management/staff of the Company regarding the problems faced by the Company, review of policies, and procedures carried out periodically;
8. Provided written approval at the request of the Board of Directors in line with the Company's Articles of Association and the prevailing laws and regulations;

TYPES OF DECISIONS REQUIRING APPROVAL OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

In accordance with its duties and authorities as stipulated in the Company's Articles of Association and Board Manual, the Board of Commissioners provides written responses and approvals to proposals submitted by the Board of Directors. Throughout 2025, the written responses, approvals, and advisory opinions issued by the Board of Commissioners included the following:

1. Written response to the proposed liquidation plan of PT Prakarsa Nusa Sinergi (PNS);
2. Written response regarding the Proposed 2025 Cost Overrun;
3. Written response to the proposal for the Write-off of Uncollectible Receivables of KIE;
4. Written approval of the adjustment to the organizational structure of KIE;
5. Written response to the proposed 2025 Corporate Work Plan and Budget (RKAP);
6. Written response to KIE's 2024 performance;
7. Written response regarding the additional budget and implementation of the CO_2 Supply Infrastructure Network Development Investment;
8. Written approval for the Write-off and Scrapping of Movable Fixed Assets, Obsolete Inventories, and Residual Materials for 2025;

PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris melakukan evaluasi tahunan secara objektif untuk menentukan efektivitas Dewan Komisaris. Evaluasi tahunan didasarkan pada tolok ukur atau kriteria penilaian yang spesifik, terukur, dapat dicapai, dan relevan. Evaluasi tahunan disampaikan oleh Dewan Komisaris kepada RUPS. Penilaian kinerja Dewan Komisaris didasarkan pada target kinerja yang telah disepakati bersama dalam Kontrak Manajemen berdasarkan *Key Performance Indikator* dan dievaluasi secara kolegial oleh Pemegang Saham dalam RUPS Kinerja Tahunan.

PENILAIAN KINERJA DIREKSI

Dewan Komisaris berperan memberikan pandangan, arahan, serta masukan strategis kepada Direksi guna memastikan pengelolaan Perusahaan berjalan secara akuntabel, transparan, dan selaras dengan kepentingan para pemangku kepentingan serta investor. Pengukuran atas kinerja Direksi dilakukan oleh Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dengan mengacu pada pencapaian kontrak manajemen yang telah disepakati bersama antara Direksi dan Pemegang Saham dalam RUPS terkait pengesahan dan penetapan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).

PENILAIAN KINERJA KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Dalam mendukung kinerja Dewan Komisaris, Dewan Komisaris dibantu oleh 2 (dua) komite yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris. Hingga 31 Desember 2025, komite di bawah Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Komite Audit;
2. Komite GCG, Manajemen Risiko & Investasi;

Evaluasi terhadap kinerja Komite Dewan Komisaris dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali secara kolegial. Penilaian kinerja Komite Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan realisasi dan penyelesaian program kerja yang telah tersusun dalam RKA tahunan, saran, rekomendasi, dan masukan yang diberikan oleh Komite Dewan Komisaris serta tingkat kehadiran rapat.

PELAKSANAAN RAPAT DEWAN KOMISARIS

KEBIJAKAN RAPAT DEWAN KOMISARIS

Kebijakan Rapat Dewan Komisaris dalam Board Manual dan/atau Anggaran Dasar Perusahaan telah mengatur antara lain:

1. Rapat Dewan Komisaris harus diadakan secara berkala, sekurang-kurangnya sekali dalam setiap bulan, dan dalam rapat tersebut Dewan Komisaris dapat mengundang Direksi.

PERFORMANCE EVALUATION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

The Board of Commissioners conducts an annual objective evaluation to assess its effectiveness. The evaluation is based on specific, measurable, achievable, and relevant performance criteria. The results of the annual evaluation are reported by the Board of Commissioners to the GMS. The performance evaluation of the Board of Commissioners is based on performance targets mutually agreed upon in the Management Contract, referring to Key Performance Indicators (KPIs), and is evaluated collectively by the Shareholders at the Annual GMS for Performance Review.

PERFORMANCE EVALUATION OF THE BOARD OF DIRECTORS

The Board of Commissioners provides views, direction, and strategic input to the Board of Directors to ensure that the management of the Company is conducted in an accountable, transparent manner and aligned with the interests of stakeholders and investors. The performance of the Board of Directors is evaluated by the Shareholders through the GMS, based on the achievement of the Management Contract agreed upon between the Board of Directors and the Shareholders in connection with the approval and determination of the Company's Annual Work Plan and Budget (RKAP).

PERFORMANCE EVALUATION OF COMMITTEES UNDER THE BOARD OF COMMISSIONERS

In supporting the performance of the Board of Commissioners, 2 (two) committees operate under and report directly to the Board of Commissioners. As of December 31, 2025, the committees under the Board of Commissioners were as follows:

1. Audit Committee;
2. GCG, Risk Management & Investment Committee;

The performance of the committees is evaluated collectively on an annual basis. The evaluation is based on the realization and completion of programs outlined in the Work Plan and Budget (RKA), the quality of advice, recommendations, and input provided by the committees, as well as meeting attendance levels.

MEETINGS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

POLICY ON MEETINGS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

The policy governing meetings of the Board of Commissioners, as stipulated in the Board Manual and/or the Company's Articles of Association, provides, among others, that:

1. Meetings of the Board of Commissioners must be held periodically, at least once every month, and the Board of Commissioners may invite members of the Board of Directors to attend such meetings.

2. Rapat Dewan Komisaris dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan dibantu oleh Sekretaris Dewan Komisaris untuk melakukan pencatatan risalah rapat. Apabila dipandang perlu Rapat Dewan Komisaris dapat diperluas dengan mengundang anggota Direksi, Sekretaris Perusahaan, Komite-komite Dewan Komisaris atau undangan lainnya.
3. Dewan Komisaris dapat mengadakan rapat sewaktu-waktu atas permintaan 1 (satu) atau beberapa anggota Dewan Komisaris, permintaan Direksi, atau atas permintaan tertulis dari 1 (satu) atau beberapa Pemegang Saham yang mewakili sekurang-kurangnya 1/10 (satu per sepuluh) dari jumlah saham dengan hak suara, dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan.
4. Dalam setiap rapat Dewan Komisaris harus dibuat risalah rapat yang berisi hal-hal yang dibicarakan (termasuk pendapat berbeda (*dissenting opinion*) anggota Dewan Komisaris, jika ada) dan hal-hal yang diputuskan.
5. Asli risalah rapat Dewan Komisaris disampaikan kepada Direksi untuk disimpan dan dipelihara, sedangkan Dewan Komisaris menyimpan salinannya
6. Prosedur Kehadiran :
   a. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari ½ (satu per dua) jumlah anggota Dewan Komisaris.
   b. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam rapat hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan kuasa tertulis (*proxy*) yang diberikan khusus untuk keperluan tersebut
   c. Seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat mewakili seorang anggota Dewan Komisaris lainnya.
7. Prosedur Rapat Dewan Komisaris
   a. Sekretaris Dewan Komisaris mempersiapkan bahan-bahan yang akan digunakan dalam Rapat Dewan Komisaris. Bahan-bahan tersebut antara lain dokumen/laporan manajemen KIE yang diperoleh dari Sekretaris Perusahaan antara lain berupa Laporan Bulanan KIE, Laporan Triwulanan KIE, Laporan Tahunan KIE, dan laporan-laporan lainnya yang diperlukan, serta dokumen/laporan dari Komite Dewan Komisaris.
   b. Sekretaris Dewan Komisaris mendokumentasikan bahan-bahan yang diterima tersebut sesuai prosedur administrasi.
   c. Sekretaris Dewan Komisaris menyampaikan bahan-bahan tersebut kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.
   d. Dewan Komisaris mempelajari bahan-bahan tersebut dan memberikan arahan kepada Sekretaris Dewan Komisaris untuk ditindaklanjuti.
   e. Jika arahan tersebut harus ditindaklanjuti dengan rapat, Sekretaris Dewan Komisaris segera menyusun agenda rapat sesuai arahan Dewan Komisaris.
   f. Sekretaris Dewan Komisaris mengedarkan agenda rapat beserta bahan-bahan yang akan dibahas dalam rapat kepada para anggota Dewan Komisaris untuk mendapatkan masukan-masukan atas agenda rapat tersebut.

2. Meetings are attended by members of the Board of Commissioners and assisted by the Secretary to the Board of Commissioners, who is responsible for preparing minutes of meeting. If deemed necessary, meetings may be expanded to include members of the Board of Directors, the Corporate Secretary, committees under the Board of Commissioners, or other invitees.
3. The Board of Commissioners may convene meetings at any time upon the request of 1 (one) or more members of the Board of Commissioners, at the request of the Board of Directors, or upon a written request from 1 (one) or more Shareholders representing at least 1/10 (one-tenth) of the total voting shares, specifying the matters to be discussed.
4. Minutes of each Board of Commissioners meeting must be prepared, documenting the matters discussed (including any dissenting opinions of members of the Board of Commissioners, if any) and the resolutions adopted.
5. The original minutes of the meeting are submitted to the Board of Directors for archive, while copies are retained by the Board of Commissioners.
6. Attendance Procedures:
   a. Meetings of the Board of Commissioners are valid and may adopt binding resolutions if attended by more than ½ (one-half) of the total members of the Board of Commissioners.
   b. A member of the Board of Commissioners may only be represented at a meeting by another member of the Board of Commissioners based on a written proxy granted specifically for such purpose.
   c. Each member of the Board of Commissioners may represent only one other member.
7. Meeting Procedures
   a. The Secretary to the Board of Commissioners prepares the materials for the meeting. Such materials include management documents/reports of KIE obtained from the Corporate Secretary, including KIE Monthly Reports, KIE Quarterly Reports, KIE Annual Reports, and other relevant reports, as well as documents/reports from committees under the Board of Commissioners.
   b. The Secretary to the Board of Commissioners documents the materials received in accordance with established administrative procedures.
   c. The Secretary to the Board of Commissioners distributes such materials to all members of the Board of Commissioners.
   d. The Board of Commissioners reviews the materials and provides directions to the Secretary to undertake the necessary follow-up actions.
   e. If such directions require the convening of a meeting, the Secretary promptly prepares the meeting agenda in accordance with the Board of Commissioners instructions.
   f. The Secretary to the Board of Commissioners circulates the meeting agenda along with the relevant supporting materials to the members of the Board of Commissioners to obtain their input on the proposed agenda.

g. Anggota Dewan Komisaris menerima, membaca dan mempelajari agenda rapat beserta bahan-bahannya. Setelah selesai, agenda tersebut dikirimkan kembali kepada Sekretaris Dewan Komisaris beserta masukan masukan dari anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dan membubuhkan paraf sebagai tanda menyetujui agenda rapat tersebut.
h. Sekretaris Dewan Komisaris membuat surat undangan rapat setelah menerima semua masukan yang ada dari anggota Dewan Komisaris.
i. Dalam surat undangan tersebut, Sekretaris Dewan Komisaris menyusun butir-butir masalah yang akan dibicarakan dalam rapat.
j. Jika rapat tersebut mengundang pihak lain, Sekretaris Dewan Komisaris bertugas untuk membuat surat undangan yang telah ditandatangani oleh Komisaris Utama kepada pihak yang dimaksud.
k. Peserta rapat menerima undangan dan bahan-bahan rapat.

8. Prosedur Pembahasan Masalah dan Pengambilan Keputusan
   a. Semua keputusan dalam rapat Dewan Komisaris harus berdasarkan itikad baik, pertimbangan rasional dan telah melalui investigasi mendalam terhadap berbagai hal-hal yang relevan, informasi yang cukup dan bebas dari benturan kepentingan serta dibuat secara independen oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris.
   b. Setiap anggota Dewan Komisaris berhak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dan ditambah 1 (satu) suara untuk anggota Dewan Komisaris yang diwakilinya.
   c. Jika terdapat anggota Dewan Komisaris yang mempunyai pendapat yang berbeda terhadap keputusan yang dibuat, maka pendapat tersebut harus dicantumkan dalam risalah rapat sebagai bentuk dari pendapat berbeda (*dissenting opinion*).
   d. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan secara sirkuler.
   e. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak menghadiri rapat, anggota Dewan Komisaris tersebut wajib memberikan pendapat (setuju atau tidak setuju) terhadap keputusan rapat dimaksud dan apabila tidak memberikan pendapat dianggap menyetujui keputusan rapat.
9. Pembuatan Risalah Rapat
   a. Setiap rapat Dewan Komisaris harus dibuatkan risalah rapat, yang berisi hal-hal yang dibicarakan, termasuk pendapat berbeda (*dissenting opinion*) Dewan Komisaris, jika ada dan hal-hal yang diputuskan.
   b. Risalah rapat dibuat dan diadministrasikan oleh Sekretaris Dewan Komisaris atau Staf Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris dan memberikan salinannya kepada semua peserta rapat.
   c. Risalah rapat harus dilampiri surat kuasa yang diberikan khusus oleh anggota Dewan Komisaris yang tidak hadir kepada anggota Dewan Komisaris lainnya (*proxy*).

g. Members of the Board of Commissioners receive, review, and study the meeting agenda and supporting materials. Upon completion of their review, the agenda is returned to the Secretary to the Board of Commissioners together with any comments or input, and each member's initials the agenda as evidence of approval.
h. After receiving all input from the members, the Secretary to the Board of Commissioners prepares and issues the formal meeting invitation.
i. In the meeting invitation, the Secretary to the Board of Commissioners sets forth the matters to be discussed at the meeting.
j. If the meeting requires the attendance of other parties, the Secretary to the Board of Commissioners prepares the invitation letter, duly signed by the President Commissioner, addressed to the relevant invitees.
k. Meeting participants receive the invitation and the accompanying meeting materials in advance of the meeting.

8. Discussion and Decision-Making Procedures
   a. All resolutions adopted at meetings of the Board of Commissioners must be made in good faith, based on rational judgment, and supported by thorough review of relevant matters, sufficient information, and freedom from conflicts of interest. Each resolution must be determined independently by each member of the Board of Commissioners.
   b. Each member of the Board of Commissioners is entitled to cast 1 (one) vote and an additional 1 (one) vote for each member represented by proxy.
   c. If any member of the Board of Commissioners holds a dissenting view regarding a resolution, such dissenting opinion must be recorded in the minutes of the meeting.
   d. The Board of Commissioners may also adopt resolutions by way of circular resolution.
   e. In the event that a member of the Board of Commissioners does not attend a meeting, such member is required to provide a written opinion (agree or disagree) regarding the proposed resolution. Failure to provide such opinion shall be deemed approval of the resolution.
9. Preparation of Minutes of Meeting
   a. Minutes must be prepared for every meeting of the Board of Commissioners, documenting the matters discussed, including any dissenting opinions, and the resolutions adopted.
   b. The minutes shall be prepared and administered by the Secretary to the Board of Commissioners or by staff designated by the Board of Commissioners and distributed to all meeting participants.
   c. The minutes must be accompanied by any written proxy granted specifically by an absent member of the Board of Commissioners to another member.

d. Risalah rapat asli ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir.

e. Setiap anggota Dewan Komisaris berhak menerima salinan risalah rapat Dewan Komisaris.
f. Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pengiriman risalah rapat tersebut, setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan harus menyampaikan persetujuan atau keberatannya dan/atau usul perbaikannya, bila ada, atas apa yang tercantum dalam risalah rapat Dewan Komisaris kepada pimpinan rapat Dewan Komisaris tersebut.
g. Jika keberatan dan/atau usul perbaikan tidak diterima dalam jangka waktu tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa memang tidak ada keberatan dan/atau perbaikan terhadap risalah rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan.
h. Risalah rapat Dewan Komisaris harus disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direktur Utama paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah rapat dilaksanakan.

d. The original minutes must be signed by all members of the Board of Commissioners who were present at the meeting.
e. Each member of the Board of Commissioners is entitled to receive a copy of the minutes.
f. Within 14 (fourteen) days from the date of circulation of the minutes, each member of the Board of Commissioners who was present and/or represented at the relevant Board of Commissioners meeting must submit their approval, objection, and/or proposed revision, if any, upon contents of the Minute of the Meeting to the chair of the Board of Commissioners meeting.
g. If no objection and/or proposed revision is received within such period, it shall be deemed that there are no objections or revisions to the minutes of the meeting of the Board of Commissioners Meeting.

h. The minutes of the meeting must be delivered to all members of the Board of Commissioners and to the President Director no later than 5 (five) business days after the meeting is held.

PELAKSANAAN RAPAT DEWAN KOMISARIS

Pada tahun 2025, Dewan Komisaris KIE menyelenggarakan 9 (sembilan) rapat internal Dewan Komisaris, dengan rincian sebagai berikut:

CONDUCT OF THE BOARD OF COMMISSIONERS MEETING

In 2025, the Board of Commissioners of KIE held 9 (nine) internal Board of Commissioners Meeting with the following details:

TABEL AGENDA RAPAT INTERNAL DEWAN KOMISARIS 2025
BOARD OF COMMISSIONERS' MEETING AGENDA 2025

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Agenda
1	20 Januari 2025 January 20, 2025	1. Laporan dan Evaluasi Kinerja Sebelumnya 2. Program Strategis Perusahaan 3. RKAP 2025 4. Implementasi Manajemen Risiko 1. Previous Performance Report and Evaluation 2. Company Strategic Programs 3. 2025 Corporate Work Plan and Budget 4. Implementation of Risk Management
2	27 Februari 2025 February 27, 2025	1. Laporan dan Evaluasi Kinerja Sebelumnya 2. Program Strategis Perusahaan 3. Struktur Organisasi KIE 1. Previous Performance Report and Evaluation 2. Company Strategic Programs 3. KIE Organizational Structure
3	25 Maret 2025 March 25, 2025	1. Laporan dan Evaluasi Kinerja Sebelumnya 2. Program Strategis Perusahaan 3. Kebijakan Mutu dan Layanan 1. Previous Performance Report and Evaluation 2. Company Strategic Programs 3. Quality and Service Policy
4	30 April 2025 April 30, 2025	1. Laporan dan Evaluasi Kinerja Sebelumnya 2. Program Strategis Perusahaan 3. Strategi Perusahaan untuk Pencapaian Laba 1. Previous Performance Report and Evaluation 2. Company Strategic Programs 3. Company Strategy for Profit Achievement

TABEL AGENDA RAPAT INTERNAL DEWAN KOMISARIS 2025
BOARD OF COMMISSIONERS' MEETING AGENDA 2025

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Agenda
5	27 Mei 2025 May 27, 2025	1. Laporan dan Evaluasi Kinerja Sebelumnya 2. Program Strategis Perusahaan 3. Strategi Perusahaan untuk Pencapaian Pendapatan 1. Previous Performance Report and Evaluation 2. Company Strategic Programs 3. Company Strategy for Revenue Achievement
6	30 juni 2025 June 30 2025	1. Laporan dan Evaluasi Kinerja Sebelumnya 2. Program Strategis Perusahaan 3. Optimalisasi Aset *Idle* KIE 1. Previous Performance Report and Evaluation 2. Company Strategic Programs 3. Optimization of KIE Idle Assets
7	31 Juli 2025 July 31, 2025	1. Laporan dan Evaluasi Kinerja Sebelumnya 2. Program Strategis Perusahaan 3. Kebijakan Investasi dan Pengadaan 1. Previous Performance Report and Evaluation 2. Company Strategic Programs 3. Investment and Procurement Policy
8	25 September 2025 September 25, 2025	1. Laporan dan Evaluasi Kinerja Sebelumnya 2. Program Strategis Perusahaan 3. Kebijakan SDM 1. Previous Performance Report and Evaluation 2. Company Strategic Programs 3. Human Resources Policy
9	4 Desember 2025 December 4, 2025	1. Laporan dan Evaluasi Kinerja Sebelumnya 2. Program Strategis Perusahaan 3. Usulan RKAP 2026 4. Profil Risiko Pilar Bisnis 1. Previous Performance Report and Evaluation 2. Company Strategic Programs 3. Proposed 2026 RKAP 4. Business Pillar Risk Profile

TABEL FREKUENSI KEHADIRAN DEWAN KOMISARIS PADA RAPAT INTERNAL
TABLE OF ATTENDANCE FREQUENCY OF THE BOARD OF COMMISSIONERS IN INTERNAL MEETINGS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Nama Name	Jabatan Position	Kehadiran Rapat Internal Internal Meeting Attendance		
		Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Persentase Kehadiran dalam Rapat Attendance Percentage in Meeting
Teguh Ismartono*	Komisaris Utama President Commissioner	7	7	100%
Turkhamim	Komisaris Commissioner	9	9	100%

Keterangan:
*) Teguh Ismartono tidak lagi menjabat sebagai Komisaris Utama sejak tanggal 26 Agustus 2025 sesuai dengan Keputusan Pemegang Saham Sirkuler tanggal 28 November 2025.
Note:
*) Teguh Ismartono no longer served as President Commissioner since August 26, 2025 as stipulated in the Circular Resolution of Shareholders dated November 28, 2025.

Direksi
Board of Directors

Direksi merupakan organ yang melaksanakan pengurusan Perusahaan, dalam rangka mencapai visi dan misi Perusahaan. Direksi bertanggung jawab mewakili Perusahaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan, sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi bertanggung jawab kepada RUPS sebagai bentuk perwujudan akuntabilitas pengelolaan Perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola Perusahaan. Direksi akan bertindak secara cermat, berhati-hati, dan dengan mempertimbangkan berbagai aspek penting yang relevan dalam pelaksanaan tugasnya. Direksi akan menggunakan wewenang yang dimiliki untuk kepentingan Perusahaan semata.

DASAR HUKUM PENGANGKATAN

Pengangkatan Direksi KIE memperhatikan dasar hukum sebagai berikut:
1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Anggaran Dasar Perusahaan PT Kaltim Industrial Estate;

PERSYARATAN DAN KEANGGOTAAN ANGGOTA DIREKSI

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang calon anggota Direksi meliputi persyaratan formal dan persyaratan material. Persyaratan formal merupakan persyaratan yang bersifat umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan persyaratan material yang merupakan persyaratan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan sifat bisnis Perusahaan.

1. Persyaratan Formal
   Setiap calon anggota Direksi harus memenuhi persyaratan, sebagaimana tersebut dibawah ini:
   a. Mampu melaksanakan perbuatan hukum;
   b. Tidak pernah dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonan;
   c. Tidak pernah menjadi anggota Direksi atau anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonan;
   d. Tidak pernah dihukum karena merugikan keuangan negara dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonan.
2. Persyaratan Materiil
   Setiap calon anggota Direksi harus memenuhi persyaratan, sebagaimana tersebut dibawah ini:
   a. Memiliki Integritas dan moral yaitu:

The Board of Directors is the corporate organ responsible for managing the Company in order to achieve its vision and mission. The Board of Directors represents the Company both in and out of court, in accordance with the Company's Articles of Association and prevailing laws and regulations. In performing its duties, the Board of Directors is accountable to the GMS as a manifestation of corporate accountability in line with the principles of Corporate Governance. The Board of Directors shall act prudently, diligently, and with due consideration of all relevant material aspects in the execution of its duties. The authority vested in the Board of Directors shall be exercised solely in the best interests of the Company.

LEGAL BASIS FOR APPOINTMENT

The appointment of the Board of Directors of KIE is based on the following legal framework:
1. Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies;
2. The Articles of Association of PT Kaltim Industrial Estate;

REQUIREMENTS AND MEMBERSHIP OF THE BOARD OF DIRECTORS

The eligibility requirements for candidates for the Board of Directors consist of formal and material requirements. Formal requirements are general requirements in accordance with prevailing laws and regulations, while material requirements are tailored to the Company's business characteristics and operational needs.

1. Formal Requirements
   Each candidate for the Board of Directors must:
   a. Have legal capacity to perform legal acts;
   b. Not have been declared bankrupt within 5 (five) years prior to nomination;
   c. Not have served as a member of the Board of Directors or Board of Commissioners who was declared at fault in causing a company to be declared bankrupt within 5 (five) years prior to nomination;
   d. Not have been convicted of a criminal offense causing loss to state finances within 5 (five) years prior to nomination.
2. Material Requirements
   Each candidate for the Board of Directors must meet the following criteria:
   a. Integrity and Moral Character, meaning the individual has never engaged in:

i. Perbuatan rekayasa dan praktik-praktik menyimpang dalam pengurusan Perusahaan tempat yang bersangkutan bekerja (berbuat tidak jujur);
ii. Perbuatan cidera janji yang dapat dikategorikan tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati dengan Perusahaan tempat yang bersangkutan bekerja dan/atau Pemegang Saham (berperilaku tidak baik);
iii. Perbuatan yang dikategorikan dapat memberikan keuntungan kepada pribadi calon anggota Direksi, karyawan Perusahaan tempat yang bersangkutan bekerja (berperilaku tidak baik);
iv. Perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan yang berkaitan dengan prinsip pengurusan Perusahaan yang sehat (berperilaku tidak baik).

b. Kompetensi teknis/keahlian, bahwa yang bersangkutan memiliki:
i. Pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perusahaan;
ii. Pengalaman dan keahlian di bidang pengurusan Perusahaan;
iii. Kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Perusahaan;
iv. Pemahaman masalah-masalah manajemen Perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
v. Dedikasi dan menyediakan waktu sepenuhnya untuk melakukan tugasnya.

c. Memiliki tingkat intelegensi dan tingkat emosional yang memadai untuk melaksanakan tugasnya sebagai anggota Direksi;
d. Persyaratan lain yang ditetapkan oleh RUPS.

3. Persyaratan lain
Persyaratan lain, yang meliputi:
a. Bukan pengurus partai politik dan/atau anggota legislatif dan/atau tidak sedang mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif;
b. Bukan kepala/wakil kepala daerah dan/atau tidak sedang mencalonkan diri sebagai calon kepala/wakil kepala daerah;
c. Berusia tidak melebihi 58 tahun ketika akan menjabat Direksi;
d. Tidak sedang menjabat sebagai pejabat pada Lembaga, Anggota Dewan Komisaris pada BUMN, anggota Direksi pada BUMN dan/atau Direksi Anak Perusahaan BUMN, kecuali menandatangani surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatan tersebut jika terpilih sebagai anggota Direksi KIE;
e. Tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota Direksi, kecuali menandatangani surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatan tersebut jika terpilih sebagai anggota Direksi;
f. Tidak menjabat sebagai anggota Direksi KIE selama 2 (dua) periode berturut-turut;

i. Manipulative acts or improper practices in the management of a company where the individual was employed (dishonest conduct);
ii. Acts constituting breach of commitment agreed upon with the company and/or its shareholders (misconduct);
iii. Acts categorized as providing improper benefit to the candidate or employees of the Company where the individual was employed (misconduct);
iv. Acts constituting violations of healthy corporate governance principles (misconduct).

b. Technical Competence and Expertise, including:
i. Adequate knowledge in the Company's line of business;
ii. Experience and expertise in corporate management;
iii. The ability to undertake strategic management for corporate development;
iv. Understanding of corporate management issues related to at least one management function; and
v. Dedication and full-time commitment to perform duties.

c. Candidates must also possess adequate intellectual capacity and emotional maturity to carry out their responsibilities as members of the Board of Directors;
d. Other Requirements established by the GMS.

3. Other Requirements
Other requirements include:
a. Not be an official of a political party and/or a member of the legislature and/or currently running as a legislative candidate;
b. Not serve as a Regional Head/Deputy Regional Head and/or currently running as a candidate for such office;
c. Not exceed 58 years of age at the time of appointment;
d. Not concurrently hold a position as an official in a government institution, member of the Board of Commissioners of a SOE, member of the Board of Directors of an SOE, and/or Director of an SOE subsidiary, unless the candidate signs a statement of willingness to resign if appointed as a Director of KIE;
e. Not hold any position prohibited by law from being concurrently held with the office of Director, unless the candidate signs a statement of willingness to resign if appointed as a member of the Board of Directors;
f. Not have served as a member of the Board of Directors of KIE for 2 (two) consecutive terms;

g. Sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita suatu penyakit yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai anggota Direksi) yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari rumah sakit pemerintah;
h. Pertimbangan lainnya adalah keberagaman komposisi anggota Direksi dapat digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam proses nominasi dan suksesi anggota Direksi dengan memperhatikan:
   i. Pengetahuan/Pendidikan (Bidang Studi), keahlian dan pengalaman kerja yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Perusahaan sehingga mendapatkan komposisi yang optimal serta efektivitas dalam pengambilan keputusan;
   ii. KIE menghargai dan menghormati setiap perbedaan dalam sudut pandang, pengetahuan, kemampuan dan pengalaman masing-masing individu, serta tidak membeda-bedakan ras, etnis, jenis kelamin dan agama.

MASA JABATAN ANGGOTA DIREKSI

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan dan Board Manual, masa jabatan anggota Direksi ditetapkan 5 (lima) tahun sejak RUPS mengangkatnya dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Namun demikian, anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS.

Alasan pemberhentian anggota Direksi oleh RUPS sebelum masa jabatannya berakhir adalah sebagai berikut:
1. Tidak dapat memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam kontrak manajemen;
2. Tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik;
3. Tidak melaksanakan ketentuan peraturan Perundangan dan/atau Anggaran Dasar;
4. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan;
5. Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang harus dihormati;
6. Dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
7. Mengundurkan diri.

PENGUNDURAN DIRI DIREKSI

Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pemegang Saham dengan tembusan kepada Dewan Komisaris dan anggota Dewan Direksi lainnya paling lambat 30 hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

SUSUNAN DAN KOMPOSISI DIREKSI

Komposisi dan jumlah anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan visi, misi, dan rencana strategis KIE untuk mendukung pengambilan keputusan yang efektif, tepat dan cepat, serta terhindar dari benturan kepentingan.

g. Be physically and mentally fit (not currently suffering from an illness that could hinder the performance of duties as member of the Board of Directors), as evidenced by a medical certificate issued by a government hospital;
h. Diversity in the composition of the Board of Directors may also be considered in the nomination and succession process, taking into account:
   i. Educational background, expertise, and professional experience aligned with the Company's needs to ensure optimal composition and effective decision-making;
   ii. The Company's commitment to valuing differences in perspectives, knowledge, capabilities, and experience without discrimination based on race, ethnicity, gender, or religion.

TERM OF OFFICE OF THE BOARD OF DIRECTORS

Pursuant to the Company's Articles of Association and Board Manual, members of the Board of Directors serve a term of 5 (five) years from the date of appointment by the GMS and may be reappointed for 1 (one) additional term. However, members of the Board of Directors may be dismissed at any time pursuant to a resolution of the GMS.

The reasons for the dismissal of members of the Board of Directors by the GMS before their tenure ends are as follows:
1. Failure to fulfill obligations agreed upon in the management contract;
2. Inability to perform duties properly;
3. Failure to comply with statutory regulations and/or the Articles of Association;
4. Involvement in actions detrimental to KIE;
5. Engaging in behavior that violates ethics and/or propriety that must be upheld;
6. Being declared guilty by a court decision with permanent legal force;
7. Resignation.

THE RESIGNATION OF DIRECTORS

Members of the Board of Directors are entitled to resign by notifying in writing of their intention to the Shareholders with a copy to the Board of Commissioners and other members of the Board of Directors at least 30 days prior to the date of their resignation.

COMPOSITION OF THE BOARD OF DIRECTORS

The composition and number of members of the Board of Directors are determined by the GMS with due consideration of the vision, mission, and strategic plans of KIE to support effective, accurate, and prompt decision-making, as well as to avoid conflicts of interest.

Sepanjang tahun 2025, telah terjadi perubahan pada susunan Direksi KIE sesuai dengan hasil keputusan RUPS, sebagaimana disampaikan pada tabel berikut:

Throughout 2025, there have been changes to the composition of the KIE Board of Directors in accordance with the results of the GMS decisions, as presented in the following table:

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Periode Jabatan Tenure
Muhammad Erriza	Direktur Utama President Director	Berdasarkan RUPSLB 05 Januari 2024 Based on the resolution of the EGMS January 05, 2024	05 Januari 2024 - 04 Januari 2027 January 05, 2024 - January 4, 2027
Muhammad Erriza**	Plt. Direktur Keuangan Acting Director of Finance	Surat Dewan Komisaris Nomor 19/DEKOM/KIE/VIII/2025 tanggal 19 Agustus 2025 Based on the Board of Commissioners Decree No. 19/DEKOM/KIE/VIII/2025 dated August 19, 2025	19 Agustus 2025 - 27 November 2025 August 19, 2025- November 27, 2025
Dianti Citra Agustin*	Direktur Keuangan Director of Finance	Berdasarkan RUPSLB 15 Agustus 2022 Based on the resolution of the EGMS August 15, 2022	15 Agustus 2022 - 14 Agustus 2025 August 15, 2022- August 14, 2025
Dianti Citra Agustin***	Plt. Direktur Keuangan Acting Director of Finance	Berdasarkan RUPSLB 28 November 2025 Based on the resolution of the EGMS November 28, 2025	28 November 2025 - sampai dengan ditetapkannya Direktur Keuangan Perusahaan yang definitif. November 28, 2025 until the appointment of definitive Director of the Company
Indra Kusumawardhana	Direktur Operasional & Bisnis Director of Operations & Business	Berdasarkan RUPSLB 18 Maret 2024 Based on the resolution of the EGMS March 24, 2024	2024-2027

Keterangan
*) 14 Agustus 2025, masa jabatan Sdri. Dianti Citra Agustin sebagai Direktur Keuangan telah berakhir sesuai dengan masa jabatan yang termaktub dalam RUPSLB 15 Agustus 2022.
**) Tanggal 19 Agustus 2025 Surat Dewan Komisaris mengangkat Muhammad Erriza sebagai Plt. Direktur Keuangan.
***) Tanggal 28 November 2025 Pemegang Saham menerbitkan Keputusan Pemegang Saham sebagai pengganti RUPSLB menunjuk Sdri. Dianti Citra Agustin sebagai Plt. Direktur Keuangan.
Notes
*) On August 14, 2025, Mrs. Dianti Citra Agustin's term of office as Director of Finance ended in accordance with the term of office stipulated in the EGMS on August 15, 2022.
**) On August 19, 2025, a letter from the Board of Commissioners appointed Muhammad Erriza as Acting Director of Finance.
***) On November 28, 2025, the Shareholders issued a Shareholder Resolution in lieu of an EGMS appointing Mrs. Dianti Citra Agustin as Acting Director of Finance.

INDEPENDENSI DIREKSI

Anggota Direksi wajib melaporkan kepada KIE mengenai saham yang dimiliki anggota Direksi yang bersangkutan dan/atau keluarganya dalam KIE dan Perusahaan lain untuk selanjutnya dicatat dalam Daftar Khusus, termasuk setiap perubahannya.

INDEPENDENCE OF THE BOARD OF DIRECTORS

Members of the Board of Directors are required to report to KIE any shares owned by the respective Director and/or their family members in KIE and other companies. Such ownership, including any changes thereto, shall be recorded in a Special Register maintained by the Company.

KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI

Selama 2025, tidak terdapat kepemilikan saham Perusahaan yang dimiliki Direksi dan tidak terdapat situasi dengan potensi benturan kepentingan yang dihadapi oleh anggota Direksi dalam pengambilan keputusan. Hal tersebut dibuktikan dengan pernyataan Direksi yang ditandatangani setiap tahunnya.

SHARE OWNERSHIP OF THE BOARD OF DIRECTORS

Throughout 2025, none of the members of the Board of Directors held shares in the Company, and there were no circumstances giving rise to potential conflicts of interest in the decision-making process of the Board of Directors. This condition is evidenced by annual statements duly executed by each member of the Board of Directors.

Nama Name	Jabatan Position	Kepemilikan Saham Share Ownership		
		Pribadi Pada KIE Personal on KIE	Keluarga Pada KIE Family on KIE	Pribadi Pada Perusahaan Lain Personal on Other Company
Muhammad Erriza	Direktur Utama President Director	x	x	x
Dianti Citra Agustin*	Plt. Direktur Keuangan Acting Director of Finance	x	x	x
Indra Kusumawardhana	Direktur Operasional & Bisnis Director of Operations & Business	x	x	x

✓ = MEMILIKI SAHAM | OWN SHARES
X = TIDAK MEMILIKI SAHAM| DOES NOT OWN ANY SHARES
Keterangan:
*) 14 Agustus 2025, masa jabatan Sdri. Dianti Citra Agustin sebagai Direktur Keuangan telah berakhir sesuai dengan masa jabatan yang termaktub dalam RUPSLB 15 Agustus 2022
*) Tanggal 28 November 2025 Pemegang Saham menerbitkan Keputusan Pemegang Saham sebagai pengganti RUPSLB menunjuk Sdri. Dianti Citra Agustin sebagai Plt. Direktur Keuangan.
Notes:
*) On August 14, 2025, Mrs. Dianti Citra Agustin's term of office as Director of Finance ended in accordance with the term of office stipulated in the EGMS on August 15, 2022.
*) On November 28, 2025, the Shareholders issued a Shareholder Resolution in lieu of an EGMS appointing Mrs. Dianti Citra Agustin as Acting Director of Finance.

RANGKAP JABATAN DIREKSI

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan Pasal 9 ayat 34, anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:

1. Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta;
2. Anggota Dewan Komisaris BUMN;
3. Jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/ lembaga pemerintah pusat dan atau daerah;
4. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengurus partai politik dan/atau calon anggota legislatif, dan/atau calon Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah;
5. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

Selama 2025, anggota Direksi KIE tidak ada yang merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 9 ayat 34 Anggaran Dasar Perusahaan. Kepengurusan Direksi KIE sebagai berikut :

CONCURRENT POSITION OF THE BOARD OF DIRECTORS

Based on Article 9 paragraph 34 of the Company's Articles of Association, members of the Board of Directors are prohibited from holding concurrent positions as:

1. Member of the Board of Directors at State-Owned Enterprises, Regional-Owned Enterprises, Private-Owned Enterprises;
2. Member of the Board of Commissioners of SOEs;
3. Other structural and functional positions at central and/or regional government agencies/institutions;
4. Other positions in accordance with the provisions of laws and regulations, political party administrators and/ or legislative candidates, and/or candidates for Regional Head / Deputy Regional Head;
5. Other positions that may cause a conflict of interest.

During 2025, no member of the KIE Board of Directors held concurrent positions as referred to in Article 9 paragraph 34 of the Company's Articles of Association. The management of KIE's Board of Directors is as follows:

Nama Name	Jabatan di KIE Position in KIE	Jabatan Rangkap Sesuai Anggaran Dasar Perusahaan Pasal 9 Ayat (34) Concurrent Position in Accordance With Articles of Association Article 9 Paragraph (34)
Muhammad Erriza	Direktur Utama President Director	Tidak ada None
Dianti Citra Agustin*	Plt. Direktur Keuangan Acting Director of Finance	Tidak ada None

Nama Name	Jabatan di KIE Position in KIE	Jabatan Rangkap Sesuai Anggaran Dasar Perusahaan Pasal 9 Ayat (34) Concurrent Position in Accordance With Articles of Association Article 9 Paragraph (34)
Indra Kusumawardhana	Direktur Operasional & Bisnis Director of Operations & Business	Tidak ada None

Keterangan:
*) 14 Agustus 2025, masa jabatan Sdri. Dianti Citra Agustin sebagai Direktur Keuangan telah berakhir sesuai dengan masa jabatan yang termaktub dalam RUPSLB 15 Agustus 2022.
*) Tanggal 28 November 2025 Pemegang Saham menerbitkan Keputusan Pemegang Saham sebagai pengganti RUPSLB menunjuk Sdri. Dianti Citra Agustin sebagai Plt. Direktur Keuangan.
Notes:
*) On August 14, 2025, Mrs. Dianti Citra Agustin's term of office as Director of Finance ended in accordance with the term of office stipulated in the EGMS on August 15, 2022.
*) On November 28, 2025, the Shareholders issued a Shareholder Resolution in lieu of an EGMS appointing Mrs. Dianti Citra Agustin as Acting Director of Finance.

PEDOMAN TATA KERJA DIREKSI

Dalam menjalankan fungsinya, Direksi mengacu pada Pedoman Kerja Direksi (Board Manual), yang berisi teknis tugas pengelolaan Perusahaan. Board Manual merupakan hasil kodifikasi dari berbagai peraturan yang berlaku bagi Perusahaan dan praktik-praktik terbaik (*best practices*) prinsip-prinsip GCG, prinsip-prinsip hukum korporasi, peraturan perundang-undangan yang berlaku, arahan dari Pemegang Saham, serta ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan yang mengatur tata kerja Direksi.

CAKUPAN BOARD MANUAL

1. Pendahuluan
2. Prinsip-Prinsip Hubungan Dewan Komisaris Dan Direksi
3. Dewan Komisaris
4. Direksi
   a. Komposisi Direksi
   b. Persyaratan Direksi
   c. Masa Jabatan Direksi
   d. Pemberhentian untuk Sementara Waktu
   e. Pengunduran Diri Direksi
   f. Pengisian Jabatan yang Lowong
   g. Keadaan KIE tidak mempunyai seorang pun anggota Direksi
   h. Rangkap Jabatan
   i. Program Pengenalan
   j. Program Pembelajaran Berkelanjutan
   k. Tugas, Wewenang, Kewajiban, dan Hak
   l. Pelaporan Etika Jabatan
   m. Hubungan dengan *Stakeholder*
   n. Penetapan kebijakan pengelolaan KIE oleh Direksi
   o. Rapat Direksi
   p. RUPS Anak Perusahaan
   q. Sekretaris Perusahaan
   r. Satuan Pengawasan Intern
   s. Evaluasi Kinerja
5. Hubungan Kerja Antara Direksi Dengan Dewan Komisaris dan Direksi dengan RUPS

BOARD OF MANUAL FOR THE BOARD OF DIRECTORS

In performing its functions, the Board of Directors refers to the Board Manual for the Board of Directors, which sets forth the technical guidelines for managing the Company. The Board Manual constitutes a codification of applicable regulations governing the Company, best practices of principles of GCG, principles of corporate law, prevailing laws and regulations, directives from the Shareholders, and the provisions of the Company's Articles of Association that regulate the working procedures of the Board of Directors.

THE SCOPE OF THE BOARD MANUAL

1. Introduction
2. Principles of Board of Commissioners and Directors Relationship
3. Board of Commissioners
4. Director
   a. Board of Directors Composition
   b. Qualifications of the Board of Directors
   c. Term of Office of the Board of Directors
   d. Temporary Dismissal
   e. Resignation of a Director
   f. Appointment for Vacant Positions
   g. Circumstances in which KIE Has No Serving Director
   h. Concurrent Positions
   i. Orientation Program
   j. Continuous Learning Program
   k. Duties, Authorities, Obligations, and Rights
   l. Reporting of Ethical Conduct in Office
   m. Relations with Stakeholders
   n. Determination of KIE Management Policies by the Board of Directors
   o. Board of Directors Meetings
   p. Subsidiary GMS
   q. Corporate Secretary
   r. Internal Audit Unit
   s. Performance Evaluation
5. Working Relationship Between the Board of Directors and the Board of Commissioners and the Board of Directors With the GMS

6. Hak Dan Tunjangan Dewan Komisaris dan Direksi

7. Rapat Umum Pemegang Saham

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Direksi bertugas dan bertanggung jawab secara kolegial dalam mengelola Perusahaan. Tugas dan tanggung jawab Direksi tertuang dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan Board Manual. Secara umum, tugas dan kewajiban Direksi dalam mengurus Perusahaan adalah:

1. Tugas Berkaitan dengan RUPS
   a. Menyampaikan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan kepada RUPS untuk disetujui dan disahkan.
   b. Memberikan penjelasan kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan.
   c. Menjalankan segala keputusan yang ditetapkan oleh RUPS.
2. Tugas Berkaitan dengan Komisaris
   a. Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta anggota Dewan Komisaris.
   b. Menghadiri rapat undangan Dewan Komisaris.
   c. Meminta persetujuan Dewan Komisaris atas perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh Anggaran Dasar ditentukan harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris.
3. Tugas Berkaitan dengan Penyusunan RJP
   a. Menyiapkan pada waktunya Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJP) dan perubahannya serta menyampaikannya kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham untuk mendapatkan pengesahan RUPS.
   b. Menyiapkan RJP yang merupakan rencana strategis yang memuat sasaran dan tujuan yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
   c. Menyusun dan menetapkan *blue print* organisasi KIE dengan berdasarkan tanggapan tertulis Dewan Komisaris dan persetujuan RUPS.
4. Tugas Berkaitan Penyusunan RKAP
   a. Menyiapkan RKAP sebagai penjabaran tahunan dari RJP.
   b. RKAP sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) sekurang-kurangnya memuat:
      i. Misi, sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan KIE dan program kerja/kegiatan;
      ii. Anggaran KIE yang dirinci atas setiap anggaran program kerja/kegiatan;
      iii. Proyeksi keuangan KIE dan anak perusahaannya; dan
      iv. Hal-hal lain yang memerlukan keputusan RUPS.
5. Tugas Berkaitan Pelaporan Keuangan
   Menyusun Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan menyerahkan kepada Akuntan Publik untuk diaudit.

6. Rights and Benefits of the Board of Commissioners and the Board of Directors
7. GMS

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS

The Board of Directors is collectively responsible for managing the Company. The duties and responsibilities of the Board of Directors are set forth in the Company's Articles of Association and the Board Manual. In general, the duties and obligations of the Board of Directors in managing the Company are as follows:

1. Duties Related to the GMS
   a. To submit the Annual Report, including the Financial Statements, to the GMS for approval and ratification.
   b. To provide explanations to the GMS regarding the Annual Report.
   c. To implement all resolutions adopted by the GMS.
2. Duties Related to the Board of Commissioners
   a. To provide explanations regarding any matters inquired about or requested by members of the Board of Commissioners.
   b. To attend meetings upon invitation by the Board of Commissioners.
   c. To obtain the approval of the Board of Commissioners for certain actions which, under the Articles of Association, require such approval.
3. Duties Related to the Preparation of the Long-Term Plan
   a. To prepare, in a timely manner, the Company's Long-Term Plan (RJP) and its amendments, and to submit the same to the Board of Commissioners and the Shareholders for approval by the GMS.
   b. To prepare the RJP as a strategic plan setting out the goals and objectives to be achieved over a period of 5 (five) years.
   c. To prepare and establish KIE's organizational blueprint based on the written response of the Board of Commissioners and approval of the GMS.
4. Duties Related to the Preparation of the RKAP
   a. To prepare the RKAP as the annual elaboration of the RJP.
   b. The RKAP as stipulated in point 1 (one) shall at a minimum include.
      i. KIE's mission, business objectives, business strategies, corporate policies, and work programs/activities;
      ii. The Company's budget, broken down by each work program/activity;
      iii. Financial projections of KIE and its subsidiaries; and
      iv. Other matters requiring resolution of the GMS.
5. Duties Related to Financial Reporting
   To prepare the Financial Statements in accordance with Financial Accounting Standards and submit them to a Public Accountant for audit.

6. Tugas Berkaitan Pengelolaan Manajemen Risiko
   a. Direksi dalam setiap pengambilan keputusan/tindakan, harus mempertimbangkan risiko usaha.
   b. Direksi wajib membangun dan melaksanakan program manajemen risiko korporasi secara terpadu yang merupakan bagian dari pelaksanaan program GCG.
   c. Direksi wajib menyampaikan laporan profil manajemen risiko dan penanganannya bersamaan dengan laporan berkala KIE.
7. Tugas Berkaitan Pengendalian Intern
   a. Direksi harus menetapkan suatu sistem pengendalian intern yang efektif untuk mengamankan Investasi dan aset KIE.
   b. Sistem pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) antara lain mencakup hal-hal sebagai berikut:
      i. Lingkungan pengendalian intern dalam KIE yang dilaksanakan dengan disiplin dan terstruktur;
      ii. Pengkajian terhadap pengelolaan risiko usaha (*risk assessment*), yaitu suatu proses untuk mengidentifikasi, menganalisis, menilai pengelolaan risiko yang relevan;
      iii. Aktivitas pengendalian, yaitu tindakan-tindakan yang dilakukan dalam suatu proses pengendalian terhadap kegiatan KIE pada setiap tingkat dan unit dalam struktur organisasi KIE antara lain mengenai kewenangan, otorisasi, verifikasi, rekonsiliasi, penilaian atas prestasi kerja, pembagian tugas, dan keamanan terhadap aset KIE;
      iv. Sistem informasi dan komunikasi, yaitu suatu proses penyajian laporan mengenai kegiatan operasional, finansial, serta ketaatan dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
      v. *Monitoring*, yaitu proses penilaian terhadap kualitas sistem pengendalian intern, termasuk fungsi internal audit pada setiap tingkat dan unit dalam struktur organisasi KIE sehingga dapat dilaksanakan secara optimal.

PEMBAGIAN TUGAS ANGGOTA DIREKSI

Direksi bertugas secara kolegial, namun agar lebih efisien dan efektif dalam melaksanakan tugas, dilakukan pembidangan tugas di antara anggota Direksi. Pembidangan tugas di antara Direksi tidak menghilangkan tanggung jawab Direksi secara kolegial dalam pengurusan Perusahaan. Berikut pembagian tugas Direksi:

6. Duties Related to Risk Management
   a. In every decision/action taken, the Board of Directors must consider business risks.
   b. The Board of Directors is required to establish and implement an integrated corporate risk management program as part of the implementation of GCG.
   c. The Board of Directors must submit reports on the Company's risk management profile and its mitigation measures together with KIE's periodic reports.
7. Duties Related to Internal Control
   a. The Board of Directors must establish an effective internal control system to safeguard KIE's investments and assets.
   b. Such internal control system as in point 1 (one) includes, among others, the following elements:
      i. An internal control environment within KIE that is implemented in a disciplined and structured manner;
      ii. Risk assessment, being a process to identify, analyze, and evaluate the management of relevant business risks;
      iii. Control activities, particularly actions undertaken within the control process over KIE's activities at every level and organizational unit, including authority, authorization, verification, reconciliation, performance evaluation, segregation of duties, and safeguarding of KIE's assets;
      iv. Information and communication systems, being processes for presenting reports on operational and financial activities, as well as compliance with applicable laws and regulations;
      v. Monitoring, being the process of evaluating the quality of the internal control system, including the internal audit function at each level and organizational unit within KIE, so that such controls may be implemented optimally.

DIVISION OF DUTIES AMONG MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS

The Board of Directors performs its duties on a collegial basis. However, in order to carry out its responsibilities more efficiently and effectively, specific areas of responsibility are allocated among the members of the Board of Directors. Such allocation of duties does not diminish the collective responsibility of the Board of Directors for the overall management of the Company. The division of duties among the members of the Board of Directors is as follows:

Direksi Board of Directors	Tugas Duties
Direktur Utama President Director	1. Memimpin dan mengusahakan serta menjamin terselenggaranya kegiatan Perusahaan sesuai dengan tujuan dan kegiatan usaha Perusahaan serta berdasarkan Anggaran Dasar. 2. Mewakili Perusahaan dalam mengkoordinasi, mengawasi, memimpin dan mengusahakan serta menjamin terselenggaranya usaha Perusahaan sesuai dengan tujuan dan kegiatan usaha Perusahaan serta berdasarkan Anggaran Dasar. 3. Melakukan hal-hal yang diperlukan agar keputusan yang dibuat sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku. 4. Melaporkan pelaksanaan pengelolaan Perusahaan kepada Dewan Komisaris sekurang-kurangnya setiap triwulan baik secara tertulis maupun melalui suatu pertemuan. 5. Memberikan pertanggungjawaban dan segala keterangan tentang keadaan dan jalannya Perusahaan dalam laporan tahunan termasuk laporan keuangan pada RUPS. 6. Mengkoordinasikan tugas-tugas yang dilakukan oleh dan merupakan tanggung jawab dari Direktur Keuangan dan Direktur Operasional & Bisnis. 7. Mengarahkan, menetapkan, dan mengendalikan sistem manajemen terpadu. 8. Mengarahkan dan menetapkan sistem pengendalian internal untuk memastikan jalannya kegiatan operasional dan pencapaian kinerja Perusahaan sesuai dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan RJP. 9. Membuat Laporan Tahunan serta laporan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku. 10. Memberikan penjelasan tentang segala hal yang diminta oleh Anggota Dewan Komisaris dan Pemegang Saham. 1. Leading, seeking and ensuring the implementation of company activities in accordance with the objectives and business activities of the company and based on the articles of association. 2. Representing the Company in coordinating, supervising, leading and managing and ensuring the implementation of the Company's business in accordance with the objectives and business activities of the company and based on the articles of association. 3. Doing things that are necessary so that decisions are made in accordance with applicable laws and regulations. 4. Reporting the implementation of company management to the Board of Commissioners at least every quarter, either in writing or through a meeting. 5. Providing accountability and all information regarding the condition and operation of the company in the annual report including the financial report at the GMS. 6. Coordinating the tasks performed by and are the responsibility of the Finance Director and the Operation & Business Director. 7. Directing and establishing an internal control system to ensure that operational activities and performance achievements of the Company are in accordance with policies and laws and regulations, the Articles of Association, and the Corporate Long-Term Plan. 8. Directing, establishing and controlling an integrated management system. 9. Preparing Annual Reports and other reports in accordance with applicable regulations. 10. Providing explanations on all matters requested by Members of the Board of Commissioners and Shareholders.
Direktur Keuangan Director of Finance	1. Memimpin dan melaksanakan keseluruhan tugas pokok Perusahaan dalam bidang keuangan, sumber daya manusia dan umum. 2. Mengembangkan rencana kerja untuk setiap bidang tanggung jawab dan unit kerja yang dipimpinnya. 3. Mengkoordinasi dan mengawasi setiap alokasi tanggung jawab unit kerja yang dipimpinnya. 4. Melakukan seluruh hal-hal yang diperlukan untuk meyakinkan bahwa keputusan yang dibuat oleh Direktur Keuangan sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku. 5. Menyampaikan laporan mengenai pengelolaan perusahaan kepada Pemegang Saham sekurang-kurangnya 1 kali dalam setahun dalam bentuk laporan tahunan dengan tetap memperhatikan pada Anggaran Dasar Perusahaan. 6. Melaporkan pelaksanaan pengelolaan Perusahaan kepada Dewan Komisaris sekurang-kurangnya setiap triwulan baik secara tertulis maupun melalui suatu pertemuan. 7. Mengoordinasikan, mengendalikan, serta mengawasi proses penyusunan dan pelaksanaan arus kas Perusahaan yang berpedoman pada RKAP, guna mendukung upaya peningkatan laba Perusahaan 8. Mengkoordinasikan dan mengawasi pengembangan aplikasi teknologi informasi yang bertujuan mendukung terciptanya inovasi dalam kegiatan bisnis. 9. Memimpin proses penyusunan dan pengembangan kebijakan organisasi Perusahaan, sekaligus mengarahkan kegiatan pembinaan dan perencanaan strategis terkait pengelolaan sumber daya manusia Perusahaan. 1. Leading and carrying out all of the company's main tasks in finance, human resources and general affairs. 2. Developing work plans for each area of responsibility and the work unit they lead. 3. Coordinating and supervising each allocation of responsibilities of the work unit he leads. 4. Doing all necessity to ensure that the decisions made by the Finance Director are in accordance with the applicable laws and regulations. 5. Submitting a report on the management of the company to the Shareholders at least once a year in the form of an annual report with due observance of the company's articles of association. 6. Reporting the implementation of company management to the Board of Commissioners at least every quarter, either in writing or through a meeting.

Direksi Board of Directors	Tugas Duties
	7. Coordinating, controlling, and supervising the preparation and implementation of the Company's cash flow based on the Corporate's Work Plan and Budget (RKAP), to support efforts to increase the Company's profits. 8. Coordinating and supervising the development of information technology applications aimed at supporting innovation in business activities. 9. Leading the process of formulating and developing the Company's organizational policies, while also directing strategic development and planning activities related to the Company's human resource management.
Direktur Operasional & Bisnis Director of Operations & Business	1. Memimpin dan melaksanakan keseluruhan tugas pokok Perusahaan dalam bidang operasional dan bisnis untuk senantiasa meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perusahaan. 2. Mengembangkan rencana kerja untuk setiap bidang tanggung jawab dan unit kerja yang dipimpinnya. 3. Mengkoordinasi dan mengawasi setiap alokasi tanggung jawab unit kerja yang dipimpinnya. 4. Melaporkan pelaksanaan pengelolaan Perusahaan kepada Dewan Komisaris sekurang-kurangnya setiap triwulan baik secara tertulis maupun melalui suatu pertemuan. 5. Melaksanakan proyek-proyek baik komersil maupun non komersil yang berpedoman pada RAB yang telah ditetapkan. 6. Mengambil peran kepemimpinan untuk proses pemasaran produk dan jasa serta mencari sumber pendapatan lainnya yang memberikan keuntungan pada Perusahaan. 7. Memberikan pertanggungjawaban dan segala keterangan tentang keadaan dan jalannya Perusahaan dalam laporan tahunan termasuk laporan keuangan pada RUPS. 1. Leading and carrying out all of the company's main tasks in the operational and business fields to continuously improve the efficiency and effectiveness of the Company. 2. Developing work plans for each area of responsibility and the work unit they lead. 3. Coordinating and supervising each allocation of responsibilities of the work unit he leads. 4. Reporting the implementation of company management to the Board of Commissioners at least every quarter, either in writing or through a meeting. 5. Implementing projects both commercial and non-commercial based on the RAB that has been determined. 6. Marketing products and services and looking for other sources of income that provide benefits to the Company. 7. Providing accountability and all information regarding the condition and operation of the company in the annual report including the financial report at the GMS.

WEWENANG DIREKSI

Dalam menjalankan tugasnya, Direksi mempunyai hak dan wewenang antara lain:

1. Menetapkan kebijakan kepengurusan KIE;
2. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau beberapa orang anggota Direksi untuk mengambil keputusan atas nama Direksi atau mewakili KIE di dalam dan di luar pengadilan;
3. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau beberapa orang pekerja KIE baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang lain untuk mewakili KIE di dalam dan di luar pengadilan;
4. Mengatur ketentuan-ketentuan kepegawaian KIE termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua, dan penghasilan lain bagi pekerja KIE berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan ketentuan penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua, dan penghasilan lain bagi pekerja yang melampaui kewajiban yang ditetapkan peraturan perundang-undangan wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Komisaris;
5. Mengangkat dan memberhentikan pekerja KIE berdasarkan peraturan kepegawaian KIE dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Perusahaan serta membentuk Satuan Pengawas Intern;

AUTHORITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS

The authorities of the Board of Directors in managing the Company are as follows:

1. Establishing management policies for KIE;
2. Regulating the delegation of authority from the Board of Directors to one or more members of the Board to make decisions on behalf of the Board of Directors or to represent KIE in and outside of court;
3. Regulating the delegation of authority from the Board of Directors to one or more KIE employees, either individually or jointly, or to other parties to represent KIE in and outside of court;
4. Regulating KIE's personnel provisions, including the determination of salaries, pensions or retirement benefits, and other income for KIE employees based on the prevailing laws and regulations, provided that the determination of salaries, pensions or retirement benefits, and other income for employees exceeding the obligations stipulated in the regulations must first obtain approval from the Board of Commissioners;
5. Appointing and dismissing KIE employees based on KIE's employment regulations and prevailing laws and regulations;
6. Appointing and dismissing the Corporate Secretary and establishing the Internal Audit Unit;

7. Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun kepemilikan kekayaan KIE, mengikat KIE dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan KIE serta mewakili KIE di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau keputusan RUPS.

PENDELEGASIAN WEWENANG DIREKSI

Pada 2025, tidak terdapat pendelegasian wewenang melalui surat kuasa khusus untuk terpenuhinya kuorum rapat.

PENILAIAN KINERJA KOMITE DIBAWAH DIREKSI

KIE tidak memiliki Komite yang berada di bawah Direksi. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi didukung oleh satuan kerja yang dipimpin oleh Kepala Divisi serta organ fungsional.

PROGRAM PENGENALAN BAGI DIREKSI BARU

Program pengenalan bagi anggota Direksi baru dilaksanakan untuk memberikan anggota Direksi baru pemahaman tentang KIE dalam waktu singkat sehingga anggota Direksi baru tersebut dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Direksi dengan sebaik-baiknya. Panduan pelaksanaan program pengenalan bagi anggota Direksi baru telah diatur dalam Board Manual Perusahaan yang menyatakan bahwa anggota Komisaris dan Direksi yang baru ditunjuk wajib diberikan program pengenalan mengenai Perusahaan dan dilakukan sesegera mungkin setelah pengangkatannya.

Tahun 2025 tidak dilaksanakan program pengenalan perusahaan bagi Direksi dikarenakan tidak adanya perubahan susunan anggota Direksi.

PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI DIREKSI

Kebijakan pelatihan Direksi diatur dalam Board Manual melaksanakan program pelatihan/pengembangan kompetensi dalam rangka meningkatkan kompetensi anggota Direksi sesuai kebutuhan yang dapat bermanfaat dalam meningkatkan efektivitas fungsi Direksi.

Program pelatihan yang diikuti Direksi sepanjang tahun 2025 adalah sebagai berikut:

7. Carrying out all actions and activities related to the management and ownership of KIE's assets, binding KIE with other parties and/or binding other parties with KIE, and representing KIE in and outside of court regarding all matters and events, subject to the limitations as regulated by prevailing laws and regulations, the Articles of Association, and/or resolutions of the GMS.

TENURE OF THE BOARD OF DIRECTORS

In 2025, there was no delegation of authority through a special power of attorney to fulfill the meeting quorum.

ASSESSMENT ON THE PERFORMANCE OF COMMITTEES UNDER THE BOARD OF DIRECTORS

KIE does not have a Committee under the Board of Directors. The implementation of the duties and responsibilities of the Board of Directors is supported by working units led by Division Heads and functional organs.

ORIENTATION PROGRAM FOR NEWLY APPOINTED DIRECTORS

The orientation program for newly appointed members of the Board of Directors is intended to provide them with a prompt and adequate understanding of KIE, enabling them to perform their duties and responsibilities as members of the Board of Directors effectively and in a timely manner. The guidelines for the implementation of the orientation program are set forth in the Company's Board Manual, which stipulates that newly appointed members of the Board of Commissioners and the Board of Directors must be provided with an orientation program regarding the Company as soon as practicable following their appointment.

In 2025, no corporate orientation program was conducted for the Board of Directors, as there was no change in the composition of the Board of Directors.

COMPETENCY DEVELOPMENT PROGRAM FOR THE BOARD OF DIRECTORS

The training policy for the Board of Directors is governed by the Board Manual, under which the Company implements training and competency development programs to enhance the capabilities of members of the Board of Directors in accordance with the Company's needs and to support the effective performance of the Board's functions.

The training programs attended by the Board of Directors throughout 2025 are as follows:

Nama dan Jabatan Name and Position	**Kegiatan** Activity	**Penyelenggara** Organizer	**Waktu Pelaksanaan** Implementation Date
Muhammad Erriza	• *Workshop* Falsafah Forensik dan Hukum-hukum Grafonomi • Workshop on Forensic Philosophy and Graphonomic Laws	PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT)	06 Mei 2025 May 6, 2025
	• *Unlocking Employee Potential with Personalized* AI-Driven *Development* • Unlocking Employee Potential with Personalized AI-Driven Development	PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT)	27 Agustus 2025 August 27, 2025
Dianti Citra Agustin	Pelatihan Komposit Risiko bidang Manajemen Risiko dan Keuangan Composite Risk Training in Risk Management and Finance	PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT)	23 September 2025 September 23, 2025
Indra Kusumawardhana	• *Ending Plastic Pollution* • Ending Plastic Pollution	PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT)	29 Juli 2025 July 29, 2025
	• Emerging Leaders Talk - Reliability Games	PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT)	24 Juni 2025 June 24, 2025
	• *Emerging Leader Talk* - Mitos & Fakta Pengadaan: Dari Spek Dewa Sampai Harga Surga • Emerging Leaders Talk - Procurement Myths & Facts: From Godly Specs to Heaven-Spanning Prices	PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT)	14 Maret 2025 March 14, 2025
	• *Risk Culture Forum*	PT Surveyor Indonesia	1 Desember 2025 December 1, 2025

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI 2025

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi selama 2025 yang bersifat strategis antara lain:

1. Menyiapkan RKAP tahun 2025;
2. Melaksanakan RUPS RKAP tahun buku 2025;
3. Melaksanakan RUPS Kinerja Tahun Buku 2024;
4. Menjamin terselenggaranya kegiatan Perusahaan secara maksimal dan efisien sesuai dengan standar ISO 9001, ISO 14001, ISO 37001 dan 45001;
5. Mengimplementasikan proses *safety management*;
6. Melakukan evaluasi Anak Perusahaan sesuai dengan Kebijakan Pengelolaan Anak Perusahaan;
7. Menetapkan calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan dan melaporkannya kepada Dewan Komisaris;
8. Melakukan penjualan produk dan jasa kegiatan bisnis/ usaha Perusahaan;
9. Melakukan program inovasi internal;
10. Melakukan kajian atas usulan keputusan bisnis anak Perusahaan.

EVALUASI ATAS STRATEGI PERUSAHAAN

Direksi dan jajaran manajemen KIE secara berkelanjutan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan strategi Perusahaan guna memastikan bahwa arah kebijakan dan inisiatif strategis yang dijalankan telah selaras dengan visi, misi, serta tujuan jangka panjang Perusahaan. Evaluasi ini dilakukan melalui penelaahan terhadap implementasi rencana strategis, capaian

IMPLEMENTATION OF DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS IN 2025

The implementation of strategic duties and responsibilities of the Board of Directors during 2025 include:

1. Prepared the Company's 2025 RKAP;
2. Conducted the RKAP GMS for the 2025 fiscal year;
3. Conducted the 2024 Performance GMS;
4. Ensured the implementation of company activities optimally and efficiently in accordance with ISO 9001, ISO 14001, and SMK3 standards;
5. Implemented safety management processes;
6. Evaluated Subsidiaries in accordance with the Subsidiary Management Policy;
7. Determined candidates for members of the Board of Directors and prospective members of the Board of Commissioners of Subsidiaries and reported them to the Board of Commissioners;
8. Sold products and services for the Company's business/ business activities;
9. Conducted internal innovation programs;
10. Reviewed the proposed business decisions of subsidiaries.

EVALUATION OF THE COMPANY'S STRATEGY

The Board of Directors and KIE's management team continuously evaluate the implementation of the Company's strategy to ensure that the policy direction and strategic initiatives undertaken remain aligned with the Company's vision, mission, and long-term objectives. This evaluation is carried out through a review of the execution of the strategic

kinerja operasional dan keuangan, serta efektivitas berbagai program strategis yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi tersebut menjadi dasar bagi Direksi untuk melakukan penyesuaian dan penguatan strategi agar tetap relevan, adaptif, dan mampu mendukung pencapaian tujuan jangka panjang Perusahaan. Melalui proses ini, Direksi berupaya memastikan bahwa setiap langkah strategis dilaksanakan secara efektif, terukur, dan selaras dengan kepentingan para pemangku kepentingan.

plan, the achievement of operational and financial performance targets, and the effectiveness of the strategic programs that have been established. The results of such evaluation serve as the basis for the Board of Directors to refine and strengthen the Company's strategy so that it remains relevant, adaptive, and capable of supporting the achievement of the Company's long-term objectives. Through this process, the Board of Directors seeks to ensure that each strategic initiative is implemented effectively, measurably, and in alignment with the interests of the Company's stakeholders.

PELAKSANAAN RAPAT DIREKSI

KEBIJAKAN RAPAT DIREKSI

Sebagaimana diatur dalam Board Manual, maka Direksi wajib menyelenggarakan rapat secara berkala sekurang-kurangnya satu kali dalam sebulan serta dapat dilaksanakan sewaktu-waktu apabila dipandang perlu oleh Direksi, atas permintaan Dewan Komisaris, maupun pemegang saham sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan rapat dapat dilakukan secara tatap muka maupun melalui sarana elektronik seperti videokonferensi yang memungkinkan seluruh peserta berpartisipasi secara langsung.

Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama atau anggota Direksi yang ditunjuk apabila Direktur Utama berhalangan hadir. Pemanggilan rapat dilakukan secara tertulis dengan mencantumkan agenda, waktu, dan tempat rapat, serta setiap anggota Direksi berhak mengusulkan agenda rapat. Selain melalui rapat, keputusan Direksi juga dapat diambil secara tertulis sepanjang disetujui oleh seluruh anggota Direksi.

Di sepanjang tahun 2025, Direksi melaksanakan rapat sebanyak 12 (dua belas) kali dan tingkat rata-rata kehadiran anggota Direksi dalam setiap rapat mencapai 100%. Berikut disampaikan agenda, risalah rapat, kehadiran, serta rekapitulasi tingkat kehadiran Direksi dalam rapat-rapat tersebut.

MEETINGS OF THE BOARD OF DIRECTORS

POLICY ON MEETINGS OF THE BOARD OF DIRECTORS

As stipulated in the Board Manual, the Board of Directors is required to convene meetings on a regular basis at least once each month and may also convene meetings at any time if deemed necessary by the Board of Directors, upon request of the Board of Commissioners, or upon request of the Shareholders in accordance with applicable provisions. Meetings may be conducted in person or through electronic means, such as videoconference, that allow all participants to take part directly.

Meetings of the Board of Directors are chaired by the President Director or, in the event of the President Director's absence, by a member of the Board of Directors designated for that purpose. Notice of meeting must be issued in writing, specifying the agenda, date, time, and venue of the meeting, and each member of the Board of Directors has the right to propose agenda items. In addition to meetings, resolutions of the Board of Directors may also be adopted in writing, provided that such resolutions are approved by all members of the Board of Directors.

Throughout 2025, the Board of Directors held 12 (twelve) meetings, with the average attendance rate of members of the Board of Directors reaching 100% at each meeting. Presented below are the meeting agendas, minutes of meeting, attendance records, and the summary of attendance rates of the Board of Directors at such meetings.

TABEL AGENDA RAPAT INTERNAL DIREKSI 2025
INTERNAL BOARD OF DIRECTORS MEETING AGENDA TABLE 2025

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda
1	25 Januari 2025 January 25, 2025	Program Pemilikan Rumah Karyawan (PPRK) PT Pupuk Kaltim Employee Housing Ownership Program (PPRK) of PT Pupuk Kaltim
2	20 Februari 2025 February 20, 2025	Rencana Kerjasama Pembangunan Klinik Satelit 1 KMU Cooperation Plan for the Development of KMU Satellite Clinic 1
3	30 Maret 2025 March 30, 2025	Pengelolaan Limbah B3 Hazardous Waste Management
4	26 April 2025 April 26, 2025	Pembangunan Infrastruktur Suplai CO_2 PT Kaltim Methanol Industri Development of CO_2 Supply Infrastructure of PT Kaltim Methanol Industri
5	31 Mei 2025 May 31, 2025	Pembangunan Gate Baru dan Pemindahan Gate Kawasan Jl. NPK Pelangi Construction of a New Gate and Relocation of the Area Gate on Jl. NPK Pelangi

TABEL AGENDA RAPAT INTERNAL DIREKSI 2025
INTERNAL BOARD OF DIRECTORS MEETING AGENDA TABLE 2025

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda
6	30 Juni 2025 June 30, 2025	Pengembangan Rumah PPRK di Pesona Sintuk Development of PPRK Housing in Pesona Sintuk
7	31 Juli 2025 July 31, 2025	Percepatan Pembangunan Perumahan KPKNL Acceleration of Housing Development for KPKNL
8	25 Agustus 2025 August 25, 2025	Rencana Pengembangan Lahan Sei Siring Land Development Plan for Sei Siring
9	28 September 2025 September 28, 2025	Update Timeline Proyek Soda Ash Update on Soda Ash Project Timeline
10	31 Oktober 2025 October 31, 2025	Rencana Divestasi Saham PT KMU, PT BSH, dan PT KJS Share Divestment Plan of PT KMU, PT BSH, and PT KJS
11	5 November 2025 November 5, 2025	Rencana Likuidasi PT PNS Liquidation Plan of PT PNS
12	10 Desember 2025 December 10, 2025	Pelaksanaan Audit Eksternal Implementation of External Audit

TABEL FREKUENSI KEHADIRAN DIREKSI PADA RAPAT INTERNAL
TABLE OF ATTENDANCE FREQUENCY OF THE BOARD OF DIRECTORS IN INTERNAL MEETINGS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Nama Name	Jabatan Position	Kehadiran Rapat Internal Internal Meeting Attendance		
		Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Persentase Kehadiran dalam Rapat Attendance Percentage in Meeting
Muhammad Erriza	Direktur Utama President Director	12	12	100%
Muhammad Erriza**	Plt. Direktur Keuangan Acting Director of Finance	4	4	100%
Dianti Citra Agustin*	Direktur Keuangan Director of Finance	7	7	100%
Dianti Citra Agustin***	Plt. Direktur Keuangan Acting Director of Finance	1	1	100%
Indra Kusumawardhana	Direktur Operasional & Bisnis Director of Operations & Business	12	12	100%

Keterangan:
*) 14 Agustus 2025, masa jabatan Sdri. Dianti Citra Agustin sebagai Direktur Keuangan telah berakhir sesuai dengan masa jabatan yang termaktub dalam RUPSLB 15 Agustus 2022.
**) Tanggal 19 Agustus 2025 Surat Dewan Komisaris mengangkat Muhammad Erriza sebagai Plt. Direktur Keuangan.
***) Tanggal 28 November 2025 Pemegang Saham menerbitkan Keputusan Pemegang Saham sebagai pengganti RUPSLB menunjuk Sdri. Dianti Citra Agustin sebagai Plt. Direktur Keuangan.
Notes:
*) On August 14, 2025, Mrs. Dianti Citra Agustin's term of office as Director of Finance ended in accordance with the term of office stipulated in the EGMS on August 15, 2022.
**) On August 19, 2025, a letter from the Board of Commissioners appointed Muhammad Erriza as Acting Director of Finance.
***) On November 28, 2025, the Shareholders issued a Shareholder Resolution in lieu of an EGMS appointing Mrs. Dianti Citra Agustin as Acting Director of Finance.

Rapat Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2025
Joint Meetings of the Board of Commissioners and Board of Directors 2025

Tanggal Date	Agenda Meeting Agenda
22 Januari 2025 January 22, 2025	1. Laporan dan Evaluasi Kinerja Sebelumnya 2. Program Strategis Perusahaan 3. RKAP 2025 4. Implementasi Manajemen Risiko 1. Previous Performance Report and Evaluation 2. Company Strategic Programs 3. 2025 Corporate Work Plan and Budget (RKAP) 4. Implementation of Risk Management
27 Februari 2025 February 27, 2025	1. Laporan dan Evaluasi Kinerja Sebelumnya 2. Program Strategis Perusahaan 3. Struktur Organisasi KIE 1. Previous Performance Report and Evaluation 2. Company Strategic Programs 3. KIE Organizational Structure
26 Maret 2025 March 26, 2025	1. Laporan dan Evaluasi Kinerja Sebelumnya 2. Program Strategis Perusahaan 3. Kebijakan Mutu dan Layanan 1. Previous Performance Report and Evaluation 2. Company Strategic Programs 3. Quality and Service Policy
30 April 2025 April 30, 2025	1. Laporan dan Evaluasi Kinerja Sebelumnya 2. Program Strategis Perusahaan 3. Strategi Perusahaan untuk Pencapaian Laba 1. Previous Performance Report and Evaluation 2. Company Strategic Programs 3. Company Strategy for Profit Achievement
27 Mei 2025 May 27, 2025	1. Laporan dan Evaluasi Kinerja Sebelumnya 2. Program Strategis Perusahaan 3. Strategi Perusahaan untuk Pencapaian Pendapatan 1. Previous Performance Report and Evaluation 2. Company Strategic Programs 3. Company Strategy for Revenue Achievement
30 Juni 2025 June 30, 2025	1. Laporan dan Evaluasi Kinerja Sebelumnya 2. Program Strategis Perusahaan 3. Optimalisasi Aset Idle KIE 1. Previous Performance Report and Evaluation 2. Company Strategic Programs 3. Optimization of KIE Idle Assets
01 Agustus 2025 August 1, 2025	1. Laporan dan Evaluasi Kinerja Sebelumnya 2. Program Strategis Perusahaan 3. Kebijakan Investasi dan Pengadaan 1. Previous Performance Report and Evaluation 2. Company Strategic Programs 3. Investment and Procurement Policy
30 September 2025 September 30, 2025	1. Laporan dan Evaluasi Kinerja Sebelumnya 2. Program Strategis Perusahaan 3. Kebijakan SDM 1. Previous Performance Report and Evaluation 2. Company Strategic Programs 3. Human Resources Policy
5 Desember 2025 December 5, 2025	1. Laporan dan Evaluasi Kinerja Sebelumnya 2. Program Strategis Perusahaan 3. Usulan RKAP 2026 4. Profil Risiko Pilar Bisnis 1. Previous Performance Report and Evaluation 2. Company Strategic Programs 3. Proposed 2026 RKAP 4. Business Pillar Risk Profile

FREKUENSI DAN TINGKAT KEHADIRAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI DALAM RAPAT GABUNGAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI TAHUN 2024

FREQUENCY AND ATTENDANCE OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS IN THE JOINT MEETING OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS IN 2024

TABEL FREKUENSI KEHADIRAN DIREKSI PADA RAPAT GABUNGAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
ATTENDANCE FREQUENCY OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS IN THE JOINT MEETING OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS

Nama Name	**Jabatan** Position	**Kehadiran Rapat Dewan Komisaris dan Direksi** Board of Commissioners and Board of Directors Attendance		
		Jumlah Rapat Number of Meetings	**Jumlah Kehadiran** Number of Attendance	**Persentase Kehadiran dalam Rapat** Attendance Percentage in Meeting
Teguh Ismartono*	Komisaris Utama President Commissioner	7	7	100%
Turkhamim	Komisaris Commissioner	9	9	100%
Rata-Rata Kehadiran Dewan Komisaris Average Board of Commissioners Attendance				100%
Muhammad Erriza	Direktur Utama President Director	9	9	100%
Muhammad Erriza***	Plt. Direktur Keuangan Acting Director of Finance	1	1	100%
Dianti Citra Agustin**	Direktur Keuangan Director of Finance	8	8	100%
Dianti Citra Agustin****	Plt. Direktur Keuangan Acting Director of Finance	1	1	100%
Indra Kusumawardhana	Direktur Operasional & Bisnis Director of Operations & Business	9	9	100%
Rata-Rata Kehadiran Direksi Average Board of Directors Attendance				100%

Keterangan:
*) Sdr.Teguh Ismartono tidak lagi menjabat sebagai Komisaris Utama sejak tanggal 26 Agustus 2025 sesuai dengan Keputusan Pemegang Saham Sirkuler tanggal 28 November 2025.
**) 14 Agustus 2025, masa jabatan Sdri. Dianti Citra Agustin sebagai Direktur Keuangan telah berakhir sesuai dengan masa jabatan yang termaktub dalam RUPSLB 15 Agustus 2022.
***) Tanggal 19 Agustus 2025 Surat Dewan Komisaris mengangkat Muhammad Erriza sebagai Plt. Direktur Keuangan.
****) Tanggal 28 November 2025 Pemegang Saham menerbitkan Keputusan Pemegang Saham sebagai pengganti RUPSLB menunjuk Sdri. Dianti Citra Agustin sebagai Plt. Direktur Keuangan.
Notes :
*) Teguh Ismartono no longer served as President Commissioner since August 26, 2025 as stipulated in the Circular Resolution of Shareholders dated November 28, 2025.
**) On August 14, 2025, Mrs. Dianti Citra Agustin's term of office as Director of Finance ended in accordance with the term of office stipulated in the EGMS on August 15, 2022.
***) On August 19, 2025, a letter from the Board of Commissioners appointed Muhammad Erriza as Acting Director of Finance.
****) On November 28, 2025, the Shareholders issued a Shareholder Resolution in lieu of an EGMS appointing Mrs. Dianti Citra Agustin as Acting Director of Finance.

Kebijakan Suksesi Direksi
Succession Policy of the Board of Directors

Direksi juga telah menyiapkan program kaderisasi atau suksesi untuk calon Sekretaris Perusahaan yang disaring dari pejabat satu level di bawah Direksi. Calon Sekretaris Perusahaan telah diseleksi melalui serangkaian proses sebelum diusulkan ke Dewan Komisaris untuk tercapainya pemilihan dan penggantian Sekretaris Perusahaan yang transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan.

The Board of Directors has also prepared a regeneration or succession program for Corporate Secretary candidates who are screened from officials one level below the Board of Directors. Candidates for Corporate Secretary have been selected through a series of processes before being proposed to the Board of Commissioners to achieve transparent, accountable and accountable selection and replacement of the Corporate Secretary.

Proses suksesi calon Sekretaris Perusahaan dijelaskan sebagai berikut:

The succession process for the candidate for Corporate Secretary is explained as follows:



Pengungkapan Hubungan Afiliasi Antara Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali
Disclosure of Affiliation Relationships Among the Board of Directors, Board of Commissioners, and Majority and/or Controlling Shareholders

Sebagai wujud komitmen Perusahaan terhadap prinsip transparansi, Perusahaan mengungkapkan informasi mengenai hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris, Direksi, serta Pemegang Saham Pengendali. Pengungkapan tersebut disusun berdasarkan beberapa kriteria, yaitu:

1. Hubungan afiliasi antar anggota Direksi;
2. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;
3. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama dan/atau Pemegang Saham Pengendali.

As part of the Company's commitment to the principle of transparency, the Company discloses information regarding affiliation relationships among members of the Board of Commissioners, the Board of Directors, and the Controlling Shareholder. Such disclosure is prepared based on the following criteria:

1. Affiliation relationships among members of the Board of Directors;
2. Affiliation relationships between members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners;
3. Affiliation relationships between members of the Board of Directors and the Majority and/or Controlling Shareholder.

Nama Anggota Dewan Komisaris/Direksi Name of Board of Commissioners/Directors	Hubungan Afiliasi Affiliate Relationships					
	Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Director		Pemegang Saham Shareholders	
	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No
Dewan Komisaris Board of Commissioners						
Teguh Ismartono	-	✓	-	✓	-	✓
Turkhamim	-	✓	-	✓	-	✓
Direksi Board of Directors						
Muhammad Erriza	-	✓	-	✓	-	✓
Dianti Citra Agustin	-	✓	-	✓	-	✓
Indra Kusumawardhana	-	✓	-	✓	-	✓

PENGUNGKAPAN RANGKAP JABATAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
DISCLOSURE OF CONCURRENT POSITION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS

Nama Anggota Dewan Komisaris/Direksi Name of Board of Commissioners/Directors	Jabatan Pada Perusahaan/Institusi Lain Position in Another Company/Institution					
	Sebagai Dewan Komisaris As Board of Commissioners		Sebagai Direksi As a Director		Jabatan Lain Other Positions	
	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No
Dewan Komisaris Board of Commissioners						
Teguh Ismartono	-	✓	-	✓	✓	-
Turkhamim	-	✓	-	✓	✓	-
Direksi Board of Directors						
Muhammad Erriza	-	✓	-	✓	-	✓
Dianti Citra Agustin	-	✓	-	✓	-	✓
Indra Kusumawardhana	-	✓	-	✓	-	✓

Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi
Board of Commissioners and Board of Directors Remuneration

KEBIJAKAN PENETAPAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

RUPS menetapkan besaran remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi dengan mempertimbangkan beberapa kriteria, antara lain pencapaian KPI dan tingkat kesehatan Perusahaan, skala usaha, tingkat inflasi, kondisi dan kemampuan Perusahaan, serta pencapaian jangka panjang sebagai hasil dari sistem yang telah dibangun di dalam Perusahaan.

PROSEDUR PENETAPAN REMUNERASI

Remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 Pasal 96 yang mengatur besarnya gaji dan tunjangan Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS dan Pasal 113 yang mengatur besarnya gaji dan honorarium serta tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.

PROSES PENETAPAN REMUNERASI

Proses penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi KIE telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DEWAN KOMISARIS
1. Melakukan kajian penetapan remunerasi.
2. Mengusulkan remunerasi kepada RUPS.

RUPS
1. Mempelajari usulan remunerasi.
2. Memberikan persetujuan dan menetapkan remunerasi untuk Dewan Komisaris dan Direksi.

POLICY FOR DETERMINING REMUNERATION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS

The remuneration for the Board of Commissioners and the Board of Directors is determined by the GMS, taking into account several key criteria, including the achievement of KPIs, the Company's financial soundness, business scale, inflation rate, the Company's condition and capacity, as well as the long-term performance outcomes derived from systems established within the Company.

REMUNERATION DETERMINATION PROCEDURE

The remuneration for the Board of Commissioners and the Board of Directors is determined in accordance with the provisions of Limited Liability Companies Law No. 40 of 2007 Article 96 stipulating the amount of salary and allowances for the Board of Directors shall be determined by the GMS and Article 113 stipulating the amount of salary, honorarium, and allowances for members of the Board of Commissioners shall also be determined by the GMS.

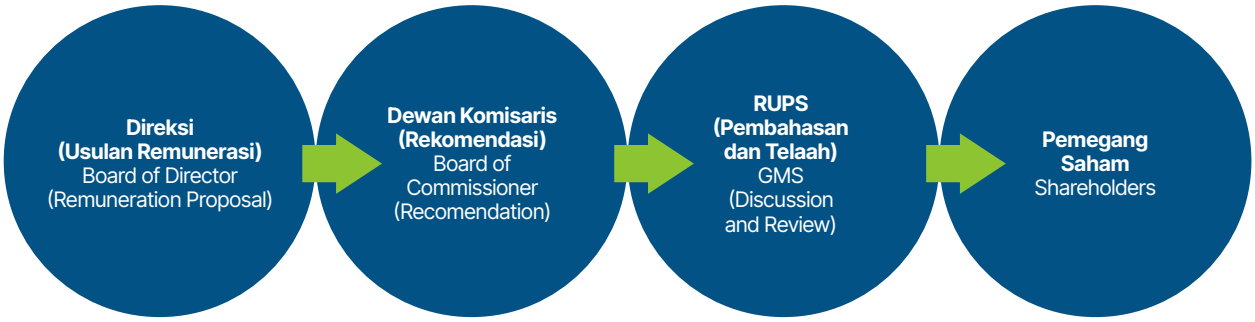
REMUNERATION DETERMINATION PROCESS

The process for determining the remuneration of the Board of Commissioners and the Board of Directors of KIE complies with the prevailing laws and regulations.

BOARD OF COMMISSIONERS
1. Conducts a review of the proposed remuneration.
2. Submits a remuneration proposal to the GMS.

GMS
1. Reviews the remuneration proposal.
2. Grants approval and formally sets the remuneration for the Board of Commissioners and the Board of Directors.

ALUR PENETAPAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
FLOW OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS' REMUNERATION



STRUKTUR DAN KOMPONEN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Struktur remunerasi yang diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris mencakup Gaji/Honorarium, Tunjangan, dan Fasilitas.

Pada Tahun 2025, Perusahaan tidak memberikan insentif jangka panjang (*Long Term Incentive*) kepada anggota Direksi maupun anggota Dewan Komisaris.

Berdasarkan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham yang mulai berlaku efektif pada tanggal 01 Januari 2024, struktur remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi KIE adalah sebagai berikut:

STRUCTURE AND COMPONENTS OF REMUNERATION FOR THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS

The remuneration structure provided to the Board of Directors and the Board of Commissioners consists of Salary/ Honorarium, Allowances, and Facilities.

In 2025, the Company did not provide any long-term incentives to members of the Board of Directors or the Board of Commissioners.

Based on the Shareholders' Resolution Outside the General Meeting of Shareholders, effective as of January 1, 2024, the remuneration structure for the Board of Commissioners and the Board of Directors of KIE is as follows:

Struktur dan Komponen Remunerasi Dewan Komisaris Board of Commissioners' Remuneration Structure and Component	**Struktur dan Komponen Remunerasi Dewan Direksi** Board of Directors' Remuneration Structure and Component
Honorarium Dewan Komisaris **Board of Commissioners' Honorarium** Komisaris Utama: 45% dari gaji Direktur Utama President Commissioner: 45% of the salary of the President Director Komisaris: 90% dari honorarium Komisaris Utama Commissioner: 90% of the honorarium of the President Director	**Gaji Direksi** **Board of Directors' Salary** Direktur Utama: 100% President Director: 100% Direksi: 90% dari gaji Direktur Utama. 90% of the President Director salary
Asuransi Purna Jabatan **Post-Employment Insurance** Premi asuransi paling banyak 25% dari honorarium Insurance premium 25% of honorarium at most Tunjangan Allowance Tunjangan Hari Raya Holiday allowance Tunjangan Komunikasi Communication allowance	**Asuransi Purna Jabatan** **Post-Employment Insurance** Premi asuransi paling banyak 25% dari honorarium Insurance premium 25% of honorarium at most One honorarium Tunjangan Allowance Tunjangan Hari Raya Holiday allowance, Tunjangan Komunikasi Communication allowance Tunjangan pengganti kendaraan dinas Allowance for replacement of official vehicles

Struktur dan Komponen Remunerasi Dewan Komisaris Board of Commissioners' Remuneration Structure and Component	Struktur dan Komponen Remunerasi Dewan Direksi Board of Directors' Remuneration Structure and Component
Fasilitas **Facilities** Kesehatan Medical At cost At cost Bantuan Hukum Legal Assistance Sesuai dengan kebutuhan dan peraturan yang berlaku In accordance with the applicable requirements and regulations.	**Fasilitas** **Facilities** Perumahan Dinas Official Housing Perumahan Dinas Official Housing Kesehatan Health At cost At cost Bantuan Hukum Legal Assistance Sesuai dengan kebutuhan dan peraturan yang berlaku In accordance with the applicable requirements and regulations
Lain-Lain **Others** Biaya operasional dianggarkan untuk pakaian seragam sesuai dengan kemampuan Perusahaan Operational costs are budgeted for uniforms accordance with the Company's capabilities	**Lain-Lain** **Others** Cuti Leave 15 hari kerja 15 working days Biaya Operasional Operational Cost Biaya operasional dianggarkan untuk pakaian seragam sesuai dengan kemampuan Perusahaan Operational costs are budgeted for uniforms accordance with the Company's capabilities

INFORMASI TENTANG RASIO GAJI

Informasi mengenai rasio gaji Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan Perusahaan adalah sebagai berikut:

INFORMATION ON SALARY RATIO

The following information presents the salary ratio between the Board of Commissioners, the Board of Directors, and the employees of the Company:

PERBANDINGAN COMPARISON	2025	2024
Direktur Utama terhadap Direktur President Director to Director	1.11	1.10
Komisaris Utama terhadap Anggota Dewan Komisaris President Commissioner to Board of Commissioners' Members	1.11	1.11
Direktur Utama terhadap Komisaris Utama President Director to President Commissioners	2.22	2.22
Direktur Utama terhadap Karyawan Tertinggi President Director to the Highest Employee	3.48	3.93
Direktur Utama terhadap Karyawan Terendah President Director to the Lowest Employee	10.97	13.17
Karyawan Tertinggi terhadap Karyawan Terendah Highest Employee to Lowest Employee	3.15	3.35
Karyawan Terendah terhadap UMP Lowest Employee to UMP	1.79	1.59

Sekretaris Dewan Komisaris
Secretary to the Board Of Commissioners

Dewan Komisaris membentuk Sekretaris Dewan Komisaris sebagai organ pendukung yang memiliki peran strategis dalam membantu kelancaran pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris, termasuk dalam aspek administratif, koordinasi agenda, serta penyampaian informasi yang relevan kepada dan dari Dewan Komisaris.

PERSYARATAN SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh Sekretaris Dewan Komisaris sebagai Organ Pendukung Dewan Komisaris diantaranya:

1. Memahami sistem pengelolaan, pengawasan, dan pembinaan KIE;
2. Memiliki integritas yang baik ;
3. Memahami fungsi kesekretariatan;
4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik.

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS

Pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Dewan Komisaris sesuai dengan Board Manual KIE, yang terdiri dari:

1. Dewan Komisaris dapat membentuk Sekretaris Dewan Komisaris yang dipimpin oleh Sekretaris Dewan Komisaris dibantu staf Sekretaris Dewan Komisaris;
2. Sekretaris Dewan Komisaris dan staf Sekretaris Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris;
3. Sekretaris Dewan Komisaris berasal dari luar KIE.

Masa jabatan Sekretaris Dewan Komisaris ditetapkan oleh Dewan Komisaris paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali selama 2 (dua) tahun masa jabatan namun dapat pula diberhentikan sewaktu-waktu apabila tidak memenuhi kinerja yang telah ditetapkan dan/atau tidak kompeten dalam melaksanakan tugasnya.

REMUNERASI SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS

Penetapan remunerasi bagi Sekretaris Dewan Komisaris ditetapkan oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan.

The Board of Commissioners has established the Secretary to the Board of Commissioners as a supporting organ with a strategic role in facilitating the effective discharge of the Board of Commissioners' duties, responsibilities, and authorities, including in administrative matters, agenda coordination, and the communication of relevant information to and from the Board of Commissioners.

QUALIFICATIONS OF THE SECRETARY OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Qualification required to serve as a supporting organ to the Board of Commissioners, the Secretary must meet the following qualifications:

1. Demonstrates a sound understanding of KIE's management, supervision, and internal development systems;
2. Possesses strong integrity;
3. Understands secretarial functions;
4. Exhibits effective communication and coordination skills.

APPOINTMENT AND DISMISSAL OF THE SECRETARY TO THE BOARD OF COMMISSIONERS

The appointment and dismissal of the Secretary to the Board of Commissioners is in accordance with the KIE Board Manual, which consists of:

1. The Board of Commissioners may establish a Secretariat to the Board of Commissioners, headed by the Secretary to the Board of Commissioners and supported by relevant staff;
2. The Secretary to the Board of Commissioners and supporting staff are appointed and dismissed by the Board of Commissioners;
3. The Secretary to the Board of Commissioners shall be recruited from outside of KIE.

The term of office of the Secretary to the Board of Commissioners is determined by the Board of Commissioners for a maximum of 3 (three) years and can be extended 1 (one) time for 2 (two) years of tenure but can also be dismissed at any time if it does not meet the predetermined performance and/or is not competent in carrying out its duties.

REMUNERATION OF THE SECRETARY TO THE BOARD OF COMMISSIONERS

The remuneration of the Secretary to the Board of Commissioners is determined by the Board of Commissioners, taking into consideration the Company's financial capability.

PROFIL SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS

PROFILE OF SECRETARY TO THE BOARD OF COMMISSIONERS



GANDA PRATAMA
Sekretaris Dewan Komisaris
Secretary to the Board of Commissioners

Dasar Pengangkatan: Keputusan Dewan Komisaris KIE No. KEP-02/DEKOM/KIE/X/2024.

Periode: 18 Oktober 2024 - 17 Oktober 2027.

Usia
38 Tahun

Kewarganegaraan
Indonesia

Domisili
Bontang

Riwayat Pendidikan
- Meraih gelar D3 Akuntansi - Universitas Airlangga (2008).
- Magister Manajemen Keuangan - Universitas Mulawarman (2020).

Pengalaman Kerja
- AVP Akuntansi Biaya PT Pupuk Kaltim (2020-2022).
- Staf Pengembangan Audit PT Pupuk Kaltim (2023-2023).
- VP Pelaporan Manajemen PT Pupuk Kaltim (2023-sekarang).

Rangkap Jabatan
Pada saat menduduki jabatan sebagai Sekretaris Dewan Komisaris, juga menjabat sebagai VP Pelaporan Manajemen PT Pupuk Kaltim (2023-sekarang).

Basis of Appointment: Decree of the Board of Commissioners of KIE No. KEP-02/DEKOM/KIE/X/2024

Period: October 18, 2024 - October 17, 2027

Age
38 years old

Nationality
Indonesian

Domicile
Bontang

Educational Background
- Diploma in Accounting, University of Airlangga (2008).
- Master's Degree in Financial Management, University of Mulawarman (2020).

Work Experience
- AVP of Cost Accounting, PT Pupuk Kaltim (2020-2022).
- Audit Development Staff, PT Pupuk Kaltim (2023-2023).
- VP of Management Reporting, PT Pupuk Kaltim (2023-present).

Concurrent Positions
In addition to serving as Secretary to the Board of Commissioners, he also holds the position of VP of Management Reporting at PT Pupuk Kaltim (2023-present).

PELAKSANAAN TUGAS SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS

Sekretaris Dewan Komisaris mempunyai tanggung jawab sesuai dengan Board Manual KIE sebagai berikut:

1. Sekretariat Dewan Komisaris bertugas melakukan kegiatan untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya berupa:
   a. Mempersiapkan rapat, termasuk bahan rapat (*briefing sheet*) Dewan Komisaris;
   b. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris sesuai ketentuan Anggaran Dasar KIE;
   c. Mengadministrasikan dokumen Dewan Komisaris, baik surat masuk, surat keluar, risalah rapat maupun dokumen lainnya;
   d. Menyusun rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris;
   e. Menyusun rancangan laporan-laporan Dewan Komisaris dan tugas lainnya.

DUTIES PERFORMED BY THE SECRETARY TO THE BOARD OF COMMISSIONERS

Pursuant to the KIE Board Manual, the Secretary to the Board of Commissioners has the following responsibilities:

1. The Secretariat to the Board of Commissioners is tasked with supporting the Board of Commissioners in the performance of its duties through the following activities:
   a. Preparing meetings of the Board of Commissioners, including meeting materials (briefing sheets);
   b. Preparing the minutes of meetings of the Board of Commissioners in accordance with the provisions of KIE's Articles of Association;
   c. Administering documents of the Board of Commissioners, including incoming correspondence, outgoing correspondence, minutes of meetings, and other documents;
   d. Preparing the draft Work Plan and Budget of the Board of Commissioners;
   e. Preparing draft reports of the Board of Commissioners and performing other related duties.

2. Sekretaris Dewan Komisaris selaku Pimpinan Sekretariat, melaksanakan tugas lain berupa:
   a. Memastikan bahwa Dewan Komisaris mematuhi peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip-prinsip GCG.
   b. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Dewan Komisaris secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta.
   c. Mengkoordinasikan anggota Komite, jika diperlukan dalam rangka memperlancar tugas Dewan Komisaris.
   d. Sebagai penghubung antara Dewan Komisaris (termasuk organ pendukung Dewan Komisaris) dengan Direksi atau pihak lain.
   e. Dalam hal komunikasi formal antara Sekretaris Dewan Komisaris dengan Direksi dilakukan melalui Sekretaris Perusahaan.

2. As Head of the Secretariat, the Secretary to the Board of Commissioners also performs the following functions:
   a. Ensuring that the Board of Commissioners complies with prevailing laws and regulations and implements the GCG principles.
   b. Providing information required by the Board of Commissioners on a periodic basis and/or at any time upon request.
   c. Coordinating with committee members, where necessary, to support the effective performance of the Board of Commissioners' duties.
   d. Acting as a liaison between the Board of Commissioners (including its supporting organs) and the Board of Directors or other parties.
   e. In the case of formal communication between the Secretary to the Board of Commissioners and the Board of Directors, such communication is conducted through the Corporate Secretary.

Komite Audit
Audit Committee

Dewan Komisaris membentuk Komite Audit dengan tujuan untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan Perusahaan yang mencakup sistem pengendalian internal, kecukupan pelaporan dan pengungkapan laporan keuangan serta memantau perencanaan dan pelaksanaan program investasi dan tugas lainnya seperti yang tercantum dalam Piagam Komite Audit, dengan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal dan pemenuhan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam menjalankan tugasnya.

KUALIFIKASI KOMITE AUDIT

Anggota Komite Audit harus memiliki kualifikasi sebagai berikut:

1. Anggota Komite Audit harus memenuhi persyaratan:
   a. Memiliki integritas yang baik dan pengetahuan serta pengalaman kerja yang cukup dibidang pengawasan/ pemeriksaan;
   b. Tidak memiliki kepentingan/ keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan terhadap KIE;
   c. Mampu berkomunikasi secara efektif;
   d. Dapat menyediakan waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugasnya;
   e. Persyaratan lain yang ditetapkan dalam Piagam Komite Audit.

The Board of Commissioners has established the Audit Committee to assist in carrying out its supervisory duties and functions over the Company, including oversight of the internal control system, the adequacy of financial reporting and disclosures, and the monitoring of the planning and implementation of investment programs, as well as other duties set forth in the Audit Committee Charter. In performing its role, the Audit Committee supports the Board of Commissioners in ensuring the effectiveness of the internal control system and compliance with the GCG principles.

QUALIFICATIONS OF THE AUDIT COMMITTEE

Members of the Audit Committee must meet the following qualifications:

1. Members of the Audit Committee must meet the following requirements:
   a. They must possess integrity, as well as adequate knowledge and work experience in the field of supervision/audit;
   b. They must not have any personal interest or affiliation that may adversely affect KIE or give rise to a conflict of interest;
   c. They must be able to communicate effectively;
   d. They must be able to devote sufficient time to perform their duties;
   e. They must satisfy any other requirements stipulated in the Audit Committee Charter.

2. Salah seorang dari anggota Komite Audit harus memiliki latar belakang pendidikan atau memiliki keahlian dibidang akuntansi atau keuangan, dan salah seorang harus memahami industri/ bisnis KIE.
3. Jika ada anggota Komite berasal dari sebuah institusi tertentu, maka institusi dimana anggota Komite tersebut berasal tidak boleh memberikan jasa pada Perusahaan yang bersangkutan.
4. Anggota Komite yang berasal dari luar Perusahaan dilarang mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis kesamping dengan Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Perusahaan.

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KOMITE AUDIT

Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris. Pemberhentian anggota Komite Audit dapat dilakukan apabila masa jabatannya telah berakhir dan diberhentikan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris apabila tidak memenuhi kinerja yang telah ditetapkan dan/atau tidak kompeten dalam melaksanakan tugasnya.

Masa jabatan anggota Komite Audit yang bukan anggota Dewan Komisaris paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.

Pada tanggal 20 Oktober 2025, memberhentikan Sdr. Rizky Eka Septianto menjadi Komite Audit dan mengangkat Sdr. Fakhrurrazi menjadi Komite Audit sesuai Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor KEP-03/DEKOM/KIE/X/2025.

SUSUNAN KOMITE AUDIT

Masa jabatan anggota Komite tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode berikutnya. Pengaturan tersebut tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

2. At least one member of the Audit Committee must have an educational background in, or expertise in, accounting or finance, and at least one member must have an understanding of KIE's industry/business.
3. If any committee member is affiliated with a particular institution, such institution must not provide services to the relevant Company.
4. Committee members from outside the Company must not have any familial relationship or affinity relationship up to the third degree, whether in the direct line or collateral line, with members of the Board of Commissioners or the Board of Directors of the Company.

APPOINTMENT AND DISMISSAL OF THE AUDIT COMMITTEE

The Audit Committee is appointed and dismissed by the Board of Commissioners. Dismissal of a member may occur upon the expiration of their term of office or through a resolution of the Board of Commissioners if the member fails to meet performance standards and/or is deemed incompetent in fulfilling their duties.

The term of office for Audit Committee members who are not members of the Board of Commissioners shall not exceed 3 (three) years and may be reappointed for only 1 (one) additional term.

On October 25, 2025, Mr. Rizky Eka Septiano was dismissed as an Audit Committee, and Mr. Fakhrurrazi was appointed as an Audit Committee pursuant to the Board of Commissioners Decree KEP-03/DEKOM/KIE/X/2025.

COMPOSITION OF THE AUDIT COMMITTEE

The term of office of Committee members may not exceed the term of office of the Board of Commissioners as stipulated in the Company's Articles of Association and may be renewed for only one subsequent term. Such provision shall not prejudice the right of the Board of Commissioners to dismiss Committee members at any time.

NAMA NAME	JABATAN POSITION	MASA JABATAN TERM OF SERVICE
Turkhamim	Ketua Chairman	25 Oktober 2024 - 24 Oktober 2027 October 25, 2024- October 25, 2027
Rizky Eka Septianto*	Anggota Member	25 Oktober 2024 – 20 Oktober 2025 October 25, 2024- October 20, 2025
Fakhrurrazi	Anggota Member	21 Oktober 2025 – 20 Oktober 2028 October 21, 2025- October 20, 2028

Keterangan:
*) Sudah tidak menjabat sebagai anggota Komite Audit per-tanggal 21 Oktober 2025 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor KEP- KEP-03/DEKOM/KIE/X/2025 tanggal 21 Oktober 2025.
Note:
*) No longer serves as a member of the Audit Committee as of October 21, 2025, based on the Decree of the Board of Commissioners Number KEP-KEP-03/DEKOM/KIE/X/2025 dated October 21, 2025.

PROFIL KOMITE AUDIT

Profil ringkas masing-masing anggota Komite Audit adalah sebagai berikut:

PROFILE OF THE AUDIT COMMITTEE

The brief profile of each member of the Audit Committee is as follows:



TURKHAMIM
Ketua Komite Audit
Chairman of the Audit Committee

Dasar Pengangkatan: Berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris KIE No. KEP-04/DEKOM/KIE/X/2024.	Basis of Appointment: Pursuant to the Decree of the Board of Commissioners of KIE No. KEP-04/DEKOM/KIE/X/2024
Periode: 25 Oktober 2024 - 24 Oktober 2027	Term: October 25, 2024 - October 25, 2027
Profil: Profil Turkhamim dapat dilihat pada Profil Dewan Komisaris yang terdapat di Bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.	Profile: The profile of Turkhamim is presented in the Board of Commissioners' Profile section under Company Profile in this Annual Report.



RIZKY EKA SEPTIANTO
Anggota Komite Audit*
Member of the Audit Committee*

Dasar Pengangkatan: Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-05/DEKOM/KIE/X/2024 tanggal 25 Oktober 2024.	Basis of Appointment: Decree of the Board of Commissioners No. KEP-05/DEKOM/KIE/X/2024, dated October 25, 2024.
Periode: 25 Oktober 2024 - 20 Oktober 2025	Term: October 25, 2024 - October 20, 2025
Usia 37 Tahun	**Age** 37 years old
Kewarganegaraan Indonesia	**Nationality** Indonesian
Domisili Bontang	**Domicile** Bontang
Riwayat Pendidikan Meraih gelar Sarjana/S1 Akuntansi dari Universitas Airlangga (2012), Pasca Sarjana Administrasi Bisnis dari Institut Teknologi Bandung (2020).	**Educational Background** Bachelor's Degree in Accounting, University of Airlangga (2012), Master's Degree in Business Administration, Bandung Institute of Technology (2020).
Pengalaman Kerja • Staf Pengawasan Operasional 2 PT Pupuk Kaltim (2015-2018). • Staf Pengawasan Keuangan 2 PT Pupuk Kaltim (2020). • AVP Pengawasan Keuangan 1 PT Pupuk Kaltim (2020–2023). • Bendahara Kopkar PT Pupuk Kaltim (2023-sekarang).	**Work Experience** • Operational Supervision Staff 2, PT Pupuk Kaltim (2015-2018). • Financial Supervision Staff 2, PT Pupuk Kaltim (2020). • AVP of Financial Supervision 1, PT Pupuk Kaltim (2020-2023). • Treasurer Kopkar, PT Pupuk Kaltim (2023-present).
Rangkap Jabatan Pada saat menduduki jabatan sebagai anggota Komite Audit, juga menjabat sebagai Bendahara Kopkar PT Pupuk Kaltim (2023-sekarang).	**Concurrent Positions** While serving as a member of the Audit Committee, he concurrently holds the position of Treasurer at Kopkar PT Pupuk Kaltim (2023-present).



FAKHRURRAZI
Anggota Komite Audit
Member of the Audit Committee

Dasar Pengangkatan: Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-KEP-03/DEKOM/KIE/X/2025 tanggal 21 Oktober 2025	Basis of Appointment: Decree of the Board of Commissioners No. KEP- KEP-03/DEKOM/KIE/X/2025, dated October 21, 2025
Periode: 21 Oktober 2025 – 20 Oktober 2028	Term: October 21, 2025-October 20, 2028
Usia 39 Tahun	**Age** 39 years old
Kewarganegaraan Indonesia	**Nationality** Indonesian
Domisili Bontang	**Domicile** Bontang
Riwayat Pendidikan Meraih gelar Sarjana/S1 Akuntansi dari Universitas Mulawarman (2009).	**Educational Background** Acquired Bachelor's Degree in Accounting from University of Mulawarman (2009).
Pengalaman Kerja • Manajer Komersil Kalianusa (2022-2024). • VP Konsultasi dan Jaminan Kualitas (2024-saat ini).	**Work Experience** • Commercial Manager, Kalianusa (2022-2024). • VP of Consulting and Quality Assurance, PT Pupuk Kaltim (2024-present).
Rangkap Jabatan Pada saat menduduki jabatan sebagai anggota Komite Audit, juga menjabat sebagai VP Konsultasi dan Jaminan Kualitas PT Pupuk Kaltim (2024-sekarang).	**Concurrent Positions** While serving as a member of the Audit Committee, also holds the position of VP of Consulting and Quality Assurance at PT Pupuk Kaltim (2024-present).

Keterangan:
*) Sudah tidak menjabat sebagai anggota Komite Audit per-tanggal 21 Oktober 2025 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor KEP- KEP-03/DEKOM/KIE/X/2025 tanggal 21 Oktober 2025.
Note:
*) No longer serves as a member of the Audit Committee as of October 21, 2025, based on the Decree of the Board of Commissioners Number KEP-KEP-03/DEKOM/KIE/X/2025 dated October 21, 2025.

INDEPENDENSI KOMITE AUDIT

Seluruh anggota Komite Audit adalah pihak independen yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau Pemegang Saham, maupun hubungan usaha dengan KIE yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Seluruh anggota Komite Audit menjalankan tugasnya secara independen tanpa adanya intervensi dari pihak manapun.

INDEPENDENCE OF THE AUDIT COMMITTEE

All members of the Audit Committee are independent parties who have no financial, management, share ownership, and/or familial relationship with members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, and/or the Shareholders, nor any business relationship with KIE that could impair their ability to act independently. All members of the Audit Committee perform their duties independently and without interference from any party.

Kriteria Independensi Independence Criteria	Turkhamim	Rizky Eka Septianto	Fakhrurrazi
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi . Do not have any financial relationship with the BOC and BOD.	X	X	X
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di KIE, Anak Perusahaan, maupun Perusahaan afiliasi. Do not have any management relation in KIE, subsidiary, or affiliated company.	X	X	X

Kriteria Independensi Independence Criteria	Turkhamim	Rizky Eka Septianto	Fakhrurrazi
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di KIE. Do not have any share ownership relations in KIE.	X	X	X
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Audit. Do not have any familial relationships with the Board of Commissioners, Board of Directors, and/or other members of the Audit Committee.	X	X	X
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik dan pejabat Pemerintah Daerah. Do not serve as a political party official and local government official.	X	X	X

PEDOMAN KERJA KOMITE AUDIT

Komite Audit KIE telah memiliki Pedoman Kerja berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor. KEP-01/DEKOM/KIE/ III/2017 tanggal 29 Maret 2017 tentang Piagam Komite Audit. Dokumen tersebut disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Piagam Komite Audit mencakup keanggotaan, persyaratan keanggotaan termasuk persyaratan kompetensi dan independensi, wewenang dan tanggung jawab, tugas dan fungsi, rencana kerja dan anggaran, rapat-rapat, pelaporan, masa jabatan, penghasilan anggota, serta evaluasi kerja.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE AUDIT

Komite Audit bertugas untuk memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris. Secara rinci, tugas Komite Audit adalah:

1. Komite Audit bekerja secara kolektif dalam melaksanakan tugasnya membantu Dewan Komisaris.
2. Komite Audit bersifat mandiri dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan, dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris.
3. Komite Audit bertugas untuk:
   a. Membantu Dewan Komisaris untuk memastikan efektivitas sistem pengendalian intern maupun auditor eksternal;
   b. Menilai pelaksanaan kegiatan dan hasil audit yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawasan Intern maupun auditor eksternal;
   c. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pengendaliannya;
   d. Memastikan telah terdapat prosedur evaluasi yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan KIE;
   e. Melakukan identifikasi mengenai hal-hal yang

AUDIT COMMITTEE CHARTER

KIE Audit Committee has a Charter based on the Decree of the Board of Commissioners Number. KEP-01/DEKOM/KIE/ III/2017 dated March 29, 2017 concerning the Audit Committee Charter. The document was prepared based on the prevailing laws and regulations. The Audit Committee Charter covers membership, membership requirements including competency and independence requirements, authority and responsibility, duties and functions, work plan and budget, meetings, reporting, term of office, members' income, and work evaluation.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE AUDIT COMMITTEE

The Audit Committee is tasked with providing opinions to the Board of Commissioners on reports or matters submitted by the Board of Directors to the Board of Commissioners, identifying matters requiring the attention of the Board of Commissioners, and carrying out other duties related to the responsibilities of the Board of Commissioners. More specifically, the duties of the Audit Committee are as follows:

1. The Audit Committee works collectively in carrying out its duties to assist the Board of Commissioners.
2. The Audit Committee acts independently in the performance of its duties and in its reporting and is directly accountable to the Board of Commissioners.
3. The Audit Committee is responsible for:
   a. Assisting the Board of Commissioners in ensuring the effectiveness of the internal control system and the performance of the external auditor;
   b. Evaluating the implementation and results of audits conducted by the Internal Audit Unit and the external auditor;
   c. Providing recommendations regarding improvements to the management control system and its oversight;
   d. Ensuring that satisfactory evaluation procedures are in place for all information disclosed by KIE;

memerlukan perhatian Dewan Komisaris serta tugas-tugas Dewan Komisaris lainnya.

4. Dewan Komisaris dapat memberikan penugasan lain kepada Komite Audit yang ditetapkan dalam Piagam Komite Audit.

WEWENANG KOMITE AUDIT

Komite Audit memiliki wewenang yang tercantum dalam Piagam Komite Audit, sebagai berikut:

1. Dalam melaksanakan tugasnya, komite audit mempunyai akses penuh terhadap catatan atau informasi tentang karyawan, dana, aset dan sumber daya perusahaan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas.
2. Dalam melaksanakan wewenangnya, Komite Audit diberikan surat tugas dari Dewan Komisaris dan wajib bekerja sama dengan pihak yang melaksanakan fungsi internal audit.
3. Komite Audit bersifat mandiri, baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris. Komite Audit bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap proses pelaporan keuangan Perusahaan serta melakukan pengawasan dan mengevaluasi proses pelaksanaan audit oleh auditor internal dan eksternal.

LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE AUDIT

Komite Audit menyerahkan laporan triwulanan dan tahunan kepada Komisaris Utama atas kegiatan pengawasan dan pemberian nasihat terhadap pengelolaan usaha. Realisasi Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit adalah sebagai berikut :

1. Melakukan pembahasan tindak lanjut hasil audit eksternal terkait audit tahun buku 2024.
2. Melakukan penelaahan program kerja pemeriksaan (Program Kerja Pengawasan Tahunan – PKPT) unit SPI tahun 2024.
3. Melakukan pembahasan hasil pengawasan SPI tahun 2024, tindak lanjut arahan RUPS kinerja dan RUPS RKAP.
4. Melakukan penelaahan pengendalian intern atas pelaksanaan investasi dan pengembangan/ proyek-proyek di lingkungan perusahaan.
5. Melakukan penelaahan efektivitas pengendalian intern perusahaan.
6. Melakukan penelaahan kecukupan tindak lanjut arahan Dewan Komisaris oleh Manajemen.
7. Pembahasan kinerja tahun 2024 dan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris.
8. Bersama manajemen menyusun jadwal topikal untuk dibahas dalam rapat Dewan Komisaris-Direksi selama periode 2025.

e. Identifying matters requiring the attention of the Board of Commissioners and carrying out other duties of the Board of Commissioners.

4. The Board of Commissioners may assign additional duties to the Audit Committee as stipulated in the Audit Committee Charter.

AUTHORITY OF THE AUDIT COMMITTEE

The Audit Committee has the authority stated in the Audit Committee Charter, as follows:

1. In carrying out its duties, the audit committee has full access to records or information about employees, funds, assets and other company resources related to the implementation of tasks.
2. In implementing its authority, the Audit Committee is given a letter of assignment from the Board of Commissioners and must cooperate with those who carry out the internal audit function.
3. The Audit Committee is independent, both in carrying out its duties and in reporting and reporting directly to the Board of Commissioners. The Audit Committee is responsible for supervising the Company's financial reporting process as well as supervising and evaluating the audit implementation process by internal and external auditors.

AUDIT COMMITTEE REPORT ON THE IMPLEMENTATION OF DUTIES AND RESPONSIBILITIES

The Audit Committee submits quarterly and annual reports to the President Commissioner, providing supervisory and advisory input regarding the Company's business operations. The realization of the Audit Committee's duties and responsibilities during the reporting period is summarized as follows:

1. Reviewed follow-up actions to external audit findings for the 2024 fiscal year.
2. Reviewed the 2024 Annual Audit Plan of the Internal Audit Unit.
3. Discussed the 2024 supervisory report of the Internal Audit Unit, follow-up on GMS directives related to performance. and the Company's RKAP.
4. Conducted a review of internal controls over investment execution and the implementation of corporate development projects in the Company
5. Evaluated the overall effectiveness of the Company's internal control systems.
6. Reviewed the adequacy of Management's responses to the Board of Commissioners' directives.
7. Discussed the Company's 2024 performance and identified matters requiring the Board of Commissioners' attention.
8. Collaborated with Management to develop a topical agenda for Board of Commissioners-Board of Directors joint meetings throughout 2025.

Rapat Komite Audit
Audit Committee Meeting

Ketentuan pelaksanaan Rapat Komite Audit tercantum dalam Piagam Komite Audit. Komite Audit sekurang-kurangnya mengagendakan rapat minimal 3 (tiga) bulan sekali. Kehadiran dalam rapat komite audit sekurang-kurangnya dihadiri 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota. Setiap hasil keputusan yang dihasilkan dalam rapat Komite Audit wajib dituangkan dalam risalah rapat dan ditandatangani oleh seluruh anggota yang hadir dan risalah rapat tersebut dilaporkan kepada Dewan Komisaris.

Audit Committee meetings are scheduled at least once every 3 (three) months in accordance with the Audit Committee Charter. Attendance at the audit committee meeting shall be at least 2/3 (two thirds) of the total number of members. Every decision made at the Audit Committee meeting must be set out in the minutes of the meeting and signed by all members present and the minutes of the meeting are reported to the Board of Commissioners.

TANGGAL PELAKSANAAN IMPLEMENTATION DATE	AGENDA RAPAT MEETING AGENDA
Januari 2025 January 2025	Rapat Pengawasan Bidang Audit Internal, Keuangan & SDM Tw IV 2024 Internal Audit, Finance & Human Resources Supervisory Meeting for Q4 2024
Februari 2025 February 2025	1. Rapat Pembahasan Progress Audit Laporan Keuangan 2024 oleh KAP PwC 2. Rapat Closing Laporan Keuangan Tahun 2024 dengan KAP PwC 1. Discussion Meeting on the Progress of the 2024 Financial Statement Audit by KAP PwC 2. Closing Meeting of the 2024 Financial Statements with KAP PwC
April 2025 April 2025	1. Rapat Pengawasan Bidang Audit Internal, Keuangan & SDM Tw I 2025 2. Diskusi Terkait Progress Audit Internal dan Kondisi-Kondisi Terkini 1. Internal Audit, Finance & Human Resources Supervisory Meeting for Q1 2025 2. Discussion on Internal Audit Progress and Current Conditions
Juli 2025 July 2025	1. Rapat Pengawasan Bidang Audit Internal, Keuangan & SDM Tw II 2025 2. Diskusi Terkait Progress Audit Internal dan Kondisi-Kondisi Terkini 1. Internal Audit, Finance & Human Resources Supervisory Meeting for Q2 2025 2. Discussion on Internal Audit Progress and Current Conditions
Oktober 2025 October 2025	Rapat Pengawasan Bidang Audit Internal, Keuangan & SDM Tw III 2025 Internal Audit, Finance & Human Resources Supervisory Meeting for Q3 2025

FREKUENSI KEHADIRAN ANGGOTA KOMITE DALAM RAPAT

Frekuensi Kehadiran anggota Komite Audit dalam Rapat selama tahun 2025 adalah sebagai berikut:

ATTENDANCE FREQUENCY OF THE INTERNAL AUDIT MEMBERS ON MEETINGS

Attendance Frequency of the Internal Audit Members on Meetings in 2025 is as follow:

TABEL FREKUENSI KEHADIRAN RAPAT KOMITE AUDIT
TABLE OF ATTENDANCE FREQUENCY OF THE INTERNAL AUDIT MEETINGS

Nama Name	Jabatan Position	Kehadiran Rapat Internal Internal Meeting Attendance		
		Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Persentase Kehadiran dalam Rapat Attendance Percentage in Meeting
Rapat dengan Dewan Komisaris Meeting with the Board of Commissioners				
Turkhamim	Ketua Chairman	9	9	100%
Rizky Eka Septianto*	Anggota Member	8	8	100%

TABEL FREKUENSI KEHADIRAN RAPAT KOMITE AUDIT
TABLE OF ATTENDANCE FREQUENCY OF THE INTERNAL AUDIT MEETINGS

Nama Name	**Jabatan** Position	**Kehadiran Rapat Internal** Internal Meeting Attendance		
		Jumlah Rapat Number of Meetings	**Jumlah Kehadiran** Number of Attendance	**Persentase Kehadiran dalam Rapat** Attendance Percentage in Meeting
Fakhrurrazi	Anggota Member	1	1	100%
Rapat dengan Dewan Komisaris dan Direksi Meeting with the Board of Commissioners and Board of Directors				
Turkhamim	Ketua Chairman	9	9	100%
Rizky Eka Septianto*	Anggota Member	8	8	100%
Fakhrurrazi	Anggota Member	1	1	100%
Rapat dengan SPI KIE Meeting with the KIE Internal Audit Unit				
Turkhamim	Ketua Chairman	5	5	100%
Rizky Eka Septianto*	Anggota Member	5	5	100%
Fakhrurrazi	Anggota Member	1	1	100%

Keterangan:
*) Sudah tidak menjabat sebagai anggota Komite Audit per-tanggal 21 Oktober 2025 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor KEP- KEP-03/DEKOM/KIE/X/2025 tanggal 21 Oktober 2025.
Note:
*) No longer serves as a member of the Audit Committee as of October 21, 2025, based on the Decree of the Board of Commissioners Number KEP-KEP-03/DEKOM/KIE/X/2025 dated October 21, 2025.

PENILAIAN KINERJA KOMITE AUDIT

Kinerja Komite Audit dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali oleh Dewan Komisaris sesuai yang tercantum dalam Piagam Komite Audit No. KEP-01/Dekom/KIE/III/2017. Metode penilaian kinerja tersebut berdasarkan pada realisasi dan penyelesaian program kerja yang telah tersusun dalam rencana kerja dan anggaran tahunan Komite Audit yang dilaporkan secara triwulanan maupun tahunan dalam laporan Komite Audit.

REMUNERASI KOMITE AUDIT

Penghasilan anggota Komite Audit ditetapkan oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan. Penghasilan Komite Audit berupa honorarium dengan ketentuan pajak ditanggung Perusahaan sesuai surat Dewan Komisaris No. 39/DEKOM/KIE/VII/2019 tanggal 10 Juli 2019 perihal Honorarium Organ Pendukung Perusahaan.

AUDIT COMMITTEE PERFORMANCE ASSESSMENT

The performance of the Audit Committee is evaluated annually by the Board of Commissioners, in accordance with the Audit Committee Charter No. KEP-01/DEKOM/KIE/III/2017. The evaluation method is based on the realization and completion of the work programs outlined in the Audit Committee's annual work plan and budget. Performance is assessed through quarterly and annual reports submitted by the Audit Committee.

AUDIT COMMITTEE REMUNERATION

The remuneration of Audit Committee members is determined by the Board of Commissioners, taking into account the financial capability of the Company. Audit Committee members receive an honorarium, with applicable taxes borne by the Company, in accordance with the Board of Commissioners' Decree No. 39/DEKOM/KIE/VII/2019 dated July 10, 2019, concerning the Honorarium for Supporting Organs of the Company.

Komite Nominasi dan Remunerasi
Nomination and Remuneration Committee

Selama tahun 2025 tidak terdapat Komite Nominasi dan Remunerasi pada Organ Pendukung Dewan Komisaris KIE. Fungsi pengawasan terkait SDM menjadi tugas Komisaris Utama.

In 2025, the Nomination and Remuneration Committee was not established as part of the supporting organs of the KIE Board of Commissioners. The supervision function related to HR was carried out by the President Commissioner.

Komite GCG, Manajemen Risiko dan Investasi
GCG, Risk Management and Investment Committee

Komite GCG, Manajemen Risiko dan Investasi dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk membantu tugas pengawasan Dewan Komisaris terkait penerapan GCG, Manajemen Risiko dan Investasi yang efektif dan efisien serta sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku.

KUALIFIKASI KOMITE GCG, MANAJEMEN RISIKO DAN INVESTASI

Berdasarkan *Board Manual* anggota Komite harus memiliki kualifikasi sebagai berikut :

1. Memiliki integritas yang baik dan pengetahuan serta pengalaman kerja yang cukup yang berhubungan dengan tugas Komite;
2. Tidak memiliki kepentingan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan terhadap KIE;
3. Memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha KIE, dan dapat menyediakan waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugasnya;
4. Mampu bekerjasama dan berkomunikasi secara efektif;
5. Persyaratan lain yang ditetapkan dalam Piagam Komite GRI.
6. Jika ada anggota Komite berasal dari sebuah institusi tertentu, maka institusi dimana anggota Komite tersebut berasal tidak boleh memberikan jasa pada Perusahaan yang bersangkutan.
7. Anggota Komite yang berasal dari luar Perusahaan dilarang mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis kesamping dengan Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Perusahaan.

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KOMITE GCG, MANAJEMEN RISIKO DAN INVESTASI

Sesuai dengan *Board Manual* pengangkatan dan pemberhentian Komite GCG, Manajemen Risiko, dan Investasi diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.

The GCG, Risk Management and Investment Committee was established by the Board of Commissioners to assist the Board of Commissioners' supervisory duties related to the effective and efficient implementation of GCG, Risk Management and Investment in accordance with prevailing laws and regulations.

GCG, RISK MANAGEMENT AND INVESTMENT COMMITTEE QUALIFICATIONS

Based on the GCG, Risk Management and Investment Charter, Committee members must have the following qualifications:

1. Have good integrity and adequate skills and understanding of GCG principles and corporate experiences relevant to the duties of the Committee.
2. Do not have any personal interests/relationships that can have a negative impact and conflict of interest on the Company.
3. Have adequate knowledge of the KIE business field, and provide adequate time to complete the duties.
4. Able to communicate effectively.
5. Any other requirements as stipulated in the Charter of the GRI Committee.
6. If any Committee member is affiliated with a particular institution, such institution must not provide services to the relevant Company.
7. Committee members from outside the Company must not have any familial relationship or affinity relationship up to the third degree, whether in the direct line or collateral line, with members of the Board of Commissioners or the Board of Directors of the Company.

APPOINTMENT AND DISMISSAL OF GCG-RISK MANAGEMENT AND INVESTMENT COMMITTEE

In accordance with the Charter of the GCG-Risk Management and Investment Committee, the appointment and dismissal of the GCG, Risk Management and Investment Committee is appointed and dismissed by the Board of Commissioners.

Masa Jabatan anggota Komite GCG, Manajemen Risiko, dan Investasi yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris paling lama 3 (tiga) tahun dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan Dewan Komisaris apabila tidak memenuhi kinerja yang telah ditetapkan dan/atau tidak kompeten dalam melaksanakan tugas dan dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.

The term of service of members of the GCG, Risk Management and Investment Committee who are not members of the Board of Commissioners is a maximum of 3 (three) years and can be dismissed at any time based on the decision of the Board of Commissioners if they do not meet the predetermined performance and/or are not competent in carrying out their duties and are reappointed only for the next 1 (one) period.

KOMPOSISI KOMITE GCG, MANAJEMEN RISIKO DAN INVESTASI
COMPOSITION OF THE GCG, RISK MANAGEMENT AND INVESTMENT COMMITTEE

NAMA NAME	JABATAN POSITION	MASA JABATAN TERM OF SERVICE
Teguh Ismartono*	Ketua Chairman	25 Oktober 2024 - 24 Oktober 2027 October 25, 2024 - October 24, 2027
Irfan Setiawan	Anggota Member	25 Oktober 2024 - 24 Oktober 2027 October 25, 2024 - October 24, 2027

Keterangan
*) Dikarenakan Sdr. Teguh Ismartono tidak lagi menjabat sebagai Komisaris Utama sejak tanggal 26 Agustus 2025, maka sesuai dengan ketentuan dalam Piagam Komite GCG, Pemantauan Manajemen Risiko dan Investasi, jabatan Ketua Komite digantikan oleh anggota Dewan Komisaris lainnya.
Note
*) Due to the fact that Mr. Teguh Ismartono no longer serves as President Commissioner as of August 26, 2025, in accordance with the provisions of the GCG, Risk Management and Investment Monitoring Committee Charter, the position of Chairman of the Committee is replaced by another member of the Board of Commissioners.

PROFIL KOMITE GCG, MANAJEMEN RISIKO DAN INVESTASI

Profil ringkas masing-masing anggota Komite GCG, Manajemen Risiko dan Investasi adalah sebagai berikut:

THE PROFILE OF THE GCG, RISK MANAGEMENT AND INVESTMENT COMMITTEE

A brief profile of each member of the GCG, Risk Management and Investment Committee is as follows:



TEGUH ISMARTONO
Ketua GCG, Manajemen Risiko dan Investasi*
Chairman of the GCG, Risk Management and Investment Committee

Dasar Pengangkatan: Berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris KIE No. KEP-05/DEKOM/KIE/X/2024.	Basis of Appointment: Pursuant to the Decree of the Board of Commissioners of KIE No. KEP-04/DEKOM/KIE/X/2024
Periode: 25 Oktober 2024 - 25 Oktober 2027	Term: October 25, 2024 - October 25, 2027
Profil: Profil Teguh Ismartono dapat dilihat pada Profil Dewan Komisaris yang terdapat di Bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.	Profile: The profile of Turkhamim is presented in the Board of Commissioners' Profile section under Company Profile in this Annual Report.



IRFAN SETIAWAN
Anggota Komite GCG, Manajemen Risiko dan Investasi
Member of the GCG, Risk Management and Investment Committee

Dasar Pengangkatan: Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-04/DEKOM/KIE/X/2024 tanggal 25 Oktober 2024 Periode: 25 Oktober 2024 - 24 Oktober 2027	Basis of Appointment: Decree of the Board of Commissioners No. KEP-04/DEKOM/KIE/X/2024, dated October 25, 2024 Term: October 25, 2024 - October 24, 2027
Usia 33 Tahun	**Age** 33 years old
Kewarganegaraan Indonesia	**Nationality** Indonesian
Domisili Bontang	**Domicile** Bontang
Riwayat Pendidikan Meraih gelar Sarjana S1 Ilmu Hukum dari Universitas Gajah Mada (2014).	**Educational Background** Bachelor's Degree in Law, University of Gadjah Mada (2014).
Pengalaman Kerja • AVP Hukum Advokasi & Litigasi PT Pupuk Kaltim (2022-2023). • AVP Hukum Bisnis & Pengembangan Usaha PT Pupuk Kaltim (2023-2024). • Staf VP Hukum PT Pupuk Kaltim (2024-Sekarang).	**Work Experience** • AVP of Advocacy & Litigation Legal Affairs, PT Pupuk Kaltim (2022-2023). • AVP of Business & Corporate Development Legal Affairs, PT Pupuk Kaltim (2023-2024). • Legal Affairs VP Staff, PT Pupuk Kaltim (2024-present).
Rangkap Jabatan Pada saat menduduki jabatan sebagai anggota Komite GCG, Manajemen Risiko dan Investasi, juga menjabat sebagai Staf VP Hukum PT Pupuk Kaltim (2024-sekarang).	**Concurrent Positions** While serving as a member of the GCG, Risk Management, and Investment Committee, he also holds the position of Legal Affairs VP Staff at PT Pupuk Kaltim (2024-present).

Keterangan
*) Sdr. Teguh Ismartono tidak lagi menjabat sebagai Komisaris Utama sejak tanggal 26 Agustus 2025, maka sesuai dengan ketentuan dalam Piagam Komite GCG, Pemantauan Manajemen Risiko dan Investasi, jabatan Ketua Komite digantikan oleh anggota Dewan Komisaris lainnya
Notes:
*) Mr. Teguh Ismartono no longer served as President Commissioner since August 26 2025, so in accordance with the provisions of the GCG Committee Charter, Risk Management and Investment Monitoring, the position of Chairman of the Committee is replaced by another member of the Board of Commissioners

Independensi Komite GCG, Manajemen Risiko dan Investasi

Independence of The GCG, Risk Management, and Investment Committee

Seluruh anggota Komite GCG, Manajemen Risiko dan Investasi adalah pihak independen yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau Pemegang Saham, maupun hubungan usaha dengan KIE yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Seluruh anggota Komite GCG, Manajemen Risiko dan Investasi menjalankan tugasnya secara independen tanpa adanya intervensi dari pihak manapun.

All members of the GCG, Risk Management, and Investment Committee are independent parties who have no financial, management, share ownership, and/or familial relationship with members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, and/or the Shareholders, nor any business relationship with KIE that could impair their ability to act independently. All members of the GCG, Risk Management, and Investment Committee perform their duties independently and without interference from any party.

NO	ASPEK INDEPENDENSI INDEPENDENCE ASPECT	TEGUH ISMARTONO	IRFAN SETIAWAN
1	Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi . Do not have any financial relationship with the BOC and BOD.	X	X
2	Tidak memiliki hubungan kepengurusan di KIE, Anak Perusahaan, maupun Perusahaan afiliasi. Do not have any management relation in KIE, subsidiary, or affiliated company.	X	X
3	Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di KIE. Do not have any share ownership relations in KIE.	X	X
4	Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Audit. Do not have any familial relationships with the Board of Commissioners, Board of Directors, and/or other members of the Audit Committee.	X	X
5	Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik dan pejabat Pemerintah Daerah. Do not serve as a political party official and local government official.	X	X

PEDOMAN KERJA KOMITE GCG, MANAJEMEN RISIKO DAN INVESTASI

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite GCG, Manajemen Risiko dan Investasi berpedoman pada Piagam Komite GCG, Manajemen Risiko dan Investasi No. KEP-01/DEKOM/KIE/X/2018 tanggal 01 Oktober 2018 yang berisikan pedoman fungsi, masa jabatan, dan program kerja masing-masing anggota agar menjalankan fungsi pengawasan yang kompeten dan independen di KIE.

GCG COMMITTEE WORKING GUIDELINES, RISK MANAGEMENT AND INVESTMENT

In conducting its duties, the GCG, Risk Management and Investment Committee is guided by the Charter of the GCG, Risk Management and Investment Committee No. KEP-01/DEKOM/KIE/X/2018 dated October 1, 2018 which contains guidelines for the functions, term of office, and work program of each member in order to carry out a competent and independent supervisory function in KIE.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE GCG, MANAJEMEN RISIKO DAN INVESTASI

Tugas dan Fungsi Komite GCG, Manajemen Risiko dan Investasi KIE adalah membantu tugas Dewan Komisaris dalam bidang GCG, Manajemen Risiko dan Investasi sesuai yang tercantum dalam Piagam Komite GCG, Manajemen Risiko dan Investasi, yaitu:

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE GCG COMMITTEE, RISK MANAGEMENT AND INVESTMENT

The duties and responsibilities of the KIE GCG, Risk Management and Investment Committee are to assist the duties of the Board of Commissioners in the field of GCG, Risk Management and Investment as stated in the Charter of the GCG, Risk Management and Investment Committee, as follows:

1. Membantu Dewan Komisaris untuk memastikan efektivitas pelaksanaan GCG di lingkungan Perusahaan.
2. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan dan kelengkapan GCG dalam Perusahaan serta manajemen risiko dan pelaksanaannya.
3. Memastikan dan memonitor implementasi kebijakan, strategi dan program investasi Perusahaan.
4. Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris serta tugas-tugas Dewan Komisaris.
5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris sepanjang terkait dengan fungsi Dewan Komisaris.

LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE GCG, MANAJEMEN RISIKO DAN INVESTASI

Pelaksanaan tugas Komite GCG, Manajemen Risiko dan Investasi dilaporkan dalam rapat yang dilakukan secara berkala. Berikut adalah laporan pelaksanaan tugas Komite GCG, Manajemen Risiko dan Investasi selama tahun 2025.

1. Melakukan pembahasan dan review atas efektivitas pelaksanaan GCG yaitu monitoring *area of improvement* sesuai hasil *assessment* GCG tahun 2022.
2. Menyiapkan tindak lanjut perbaikan implementasi GCG yang menjadi porsi Dewan Komisaris.
3. Melakukan pembahasan kinerja bidang Manajemen Risiko yang meliputi mereviu implementasi manajemen risiko di Perusahaan, reviu kebijakan/pedoman/prosedur dalam manajemen risiko yang telah disusun oleh Perusahaan.
4. Membantu Dewan Komisaris dengan memberi masukan terkait aspek manajemen risiko dan GCG atas rencana tindakan Direksi, baik yang memerlukan persetujuan tertulis Dewan Komisaris maupun bersifat rekomendasi tertulis (pendapat dan saran) kepada Pemegang Saham.
5. Melakukan pembahasan kinerja investasi, anak Perusahaan dan proyek-proyek yang sedang berjalan yang meliputi reviu/monitoring progress, kendala yang dihadapi dan efektivitas tindak lanjutnya.
6. Melakukan reviu atas kebijakan SDM, investasi, pengadaan, manajemen risiko dan mutu layanan.
7. Membantu menyusun laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris tahun 2025 mengenai bidang GCG, Manajemen Risiko dan Investasi.

RAPAT KOMITE GCG , MANAJEMEN RISIKO DAN INVESTASI

Ketentuan pelaksanaan Rapat Komite GCG, Manajemen Risiko dan Investasi tercantum dalam Pedoman Kerja Komite GCG, Manajemen Risiko dan Investasi. Komite GCG, Manajemen Risiko dan Investasi mengagendakan rapat minimal 3 (tiga) bulan sekali. Kehadiran dalam rapat komite audit sekurang kurangnya dihadiri 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota. Setiap hasil keputusan yang dihasilkan dalam rapat Komite GCG, Manajemen Risiko dan Investasi wajib dituangkan dalam

1. Assisting the board of commissioners to ensure the effectiveness of GCG implementation within the Company.
2. Providing recommendations regarding the improvement and completeness of GCG in the Company as well as risk management and its implementation.
3. Ensuring and monitoring the implementation of the company's investment policies, strategies and programs.
4. Identifying matters that require the attention of the Board of Commissioners as well as the duties of the Board of Commissioners.
5. Carrying out other tasks assigned by the Board of Commissioners as long as they are related to the functions of the Board of Commissioners.

REPORT ON THE IMPLEMENTATION OF THE DUTIES OF THE GCG COMMITTEE, RISK MANAGEMENT AND INVESTMENT

The implementation of the duties of the GCG, Risk Management and Investment Committee is reported in regular meetings. The following is a report on the implementation of the duties of the GCG, Risk Management and Investment Committee throughout 2025.

1. Conducted discussions and reviews on the effectiveness of GCG implementation, including monitoring improvement areas identified in the 2022 GCG assessment.
2. Prepared follow-up actions related to GCG implementation improvements that fall under the purview of the Board of Commissioners.
3. Reviewed the performance of the Risk Management function, which included evaluating the Company's risk management implementation and reviewing related policies, guidelines, and procedures.
4. Assisted the Board of Commissioners by providing input on risk management and GCG aspects related to the Board of Directors' action plans, whether requiring written Board approval or submitted as written recommendations and opinions to shareholders.
5. Reviewed the performance of investments, subsidiaries, and ongoing projects, including monitoring progress, identifying encountered challenges, and evaluating the effectiveness of follow-up actions.
6. Reviewed policies related to human resources, investment, procurement, risk management, and service quality.
7. Assisted in preparing the 2025 Board of Commissioners supervisory task report on GCG, Risk Management and Investment.

MEETINGS OF THE GCG, RISK MANAGEMENT, AND INVESTMENT COMMITTEE

The procedures governing meetings of the GCG, Risk Management, and Investment Committee are set forth in the Charter of the GCG, Risk Management, and Investment Committee. The Committee schedules meetings at least once every 3 (three) months. A quorum for Committee meetings requires the attendance of no less than 2/3 (two-thirds) of the total members. All resolutions adopted at meetings of the GCG, Risk Management, and Investment Committee must be

risalah rapat dan ditandatangani oleh seluruh anggota yang hadir dan risalah rapat tersebut dilaporkan kepada Dewan Komisaris.

documented in minutes of meeting and signed by all members present. Such minutes shall subsequently be reported to the Board of Commissioners.

Waktu Pelaksanaan Date	Agenda Rapat Meeting Agenda
April 2025 April 2025	1. Reviu Penetapan Kebijakan Mutu dan Layanan 2. Kinerja Investasi 1. Review of the Determination of Quality and Service Policy 2. Investment Performance
Juli 2025 July 2025	1. Reviu Penerapan Manajemen Risiko 2. Reviu Penerapan GCG 1. Review of Risk Management Implementation 2. Review of GCG Implementation
Oktober 2025 October 2025	1. Reviu Kepatuhan Direksi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Perjanjian dengan Pihak Ke-3 2. Reviu Kebijakan SDM 1. Review of Directors' Compliance with Laws and Regulations and Agreements with Third Parties 2. Review of Human Resources Policy
Desember 2025 December 2025	Reviu Kebijakan Prosedur Perusahaan Review of Company Policy and Procedures

FREKUENSI KEHADIRAN ANGGOTA KOMITE GCG, MANAJEMEN RISIKO DAN INVESTASI DALAM RAPAT SELAMA TAHUN 2025 ADALAH SEBAGAI BERIKUT:
ATTENDANCE FREQUENCY OF THE GCG, RISK MANAGEMENT AND INVESTMENT MONITORING COMMITTEE MEMBERS ON MEETINGS IN 2025 IS AS FOLLOW:

Nama Name	Dewan Komisaris Board Of Commissioners	Dewan Komisaris-Direksi Board of Commissioners-Directors	Komite GMRI GMRI Committee
Teguh Ismartono*	7	7	2
Irfan Setiawan	9	9	4

Keterangan | Note
*) Sdr. Teguh Ismartono tidak lagi menjabat sebagai Komisaris Utama sejak tanggal 26 Agustus 2025, maka sesuai dengan ketentuan dalam Piagam Komite GCG, Pemantauan Manajemen Risiko dan Investasi, jabatan Ketua Komite digantikan oleh anggota Dewan Komisaris lainnya.
*) Due to the fact that Mr. Teguh Ismartono no longer serves as President Commissioner as of August 26, 2025, in accordance with the provisions of the GCG, Risk Management and Investment Monitoring Committee Charter, the position of Chairman of the Committee is replaced by another member of the Board of Commissioners.

PENILAIAN KINERJA KOMITE GCG, MANAJEMEN RISIKO DAN INVESTASI

Berdasarkan Piagam, penilaian kinerja Komite GCG, Manajemen Risiko dan Investasi dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali oleh Dewan Komisaris. Metode penilaian kinerja tersebut berdasarkan realisasi dan penyelesaian program kerja yang telah tersusun dalam RKA tahunan Komite GCG, Manajemen Risiko, dan Investasi yang dilaporkan triwulanan maupun tahunan dalam laporan Komite GCG, Manajemen Risiko dan Investasi.

EVALUATION OF PERFORMANCE OF THE GCG, RISK AND INVESTMENT MANAGEMENT COMMITTEE

Based on the Charter, the performance appraisal of the GCG Committee, Risk and Investment Management is conducted once a year by the Board of Commissioners. The performance appraisal method is based on the realization and completion of the work program that has been compiled in the annual RKA of the GCG, Risk Management and Investment Committee, which is reported quarterly or annually in the report of the GCG, Risk Management and Investment Committee.

KEBIJAKAN REMUNERASI KOMITE GCG, MANAJEMEN RISIKO DAN INVESTASI

Sesuai yang tercantum pada Piagam GCG, Manajemen Risiko dan Investasi, penghasilan anggota Komite GCG, Manajemen Risiko dan Investasi ditetapkan oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan. Penghasilan anggota Komite GCG, Manajemen Risiko dan Investasi

REMUNERATION POLICY FOR THE GCG, RISK MANAGEMENT AND INVESTMENT COMMITTEE

As stated in the GCG Charter, Risk and Investment Management, the remuneration of members of the GCG, Risk and Investment Management Committee is determined by the Board of Commissioners by taking into account the Company's capabilities. The remuneration of members of the

ditetapkan oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan. Penghasilan Komite GCG, Manajemen Risiko dan Investasi berupa honorarium dengan ketentuan pajak ditanggung Perusahaan sesuai surat Dewan Komisaris No. 39/DEKOM/KIE/VII/2019 tanggal 10 Juli 2019 perihal Honorarium Organ Pendukung Perusahaan.

Audit Committee is determined by the Board of Commissioners by considering the ability of the Company. The Audit Committee's remuneration is in the form of an honorarium with tax provisions borne by the Company in accordance with the letter of the Board of Commissioners No. 39/DEKOM/KIE/VII/2019 dated July 10, 2019 regarding the Honorarium for the Company's Supporting Organs.

Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary

Sekretaris Perusahaan merupakan bagian dari organ yang mendukung Direksi dalam skema tata kelola Perusahaan yang memiliki peran sentral dalam memastikan tersedianya informasi untuk berbagai pihak pemangku kepentingan. Sekretaris Perusahaan menjalankan fungsi aktivitas komunikasi yang meliputi pengendalian dan keterbukaan informasi, memastikan Perusahaan mematuhi peraturan berdasarkan ketentuan dan perundang-undangan, memastikan Perusahaan menerapkan prinsip tata kelola Perusahaan yang baik, menatausahakan dan menyimpan dokumen Perusahaan serta memastikan kebijakan Perusahaan yang mengatur segala hal tentang Sekretaris Perusahaan.

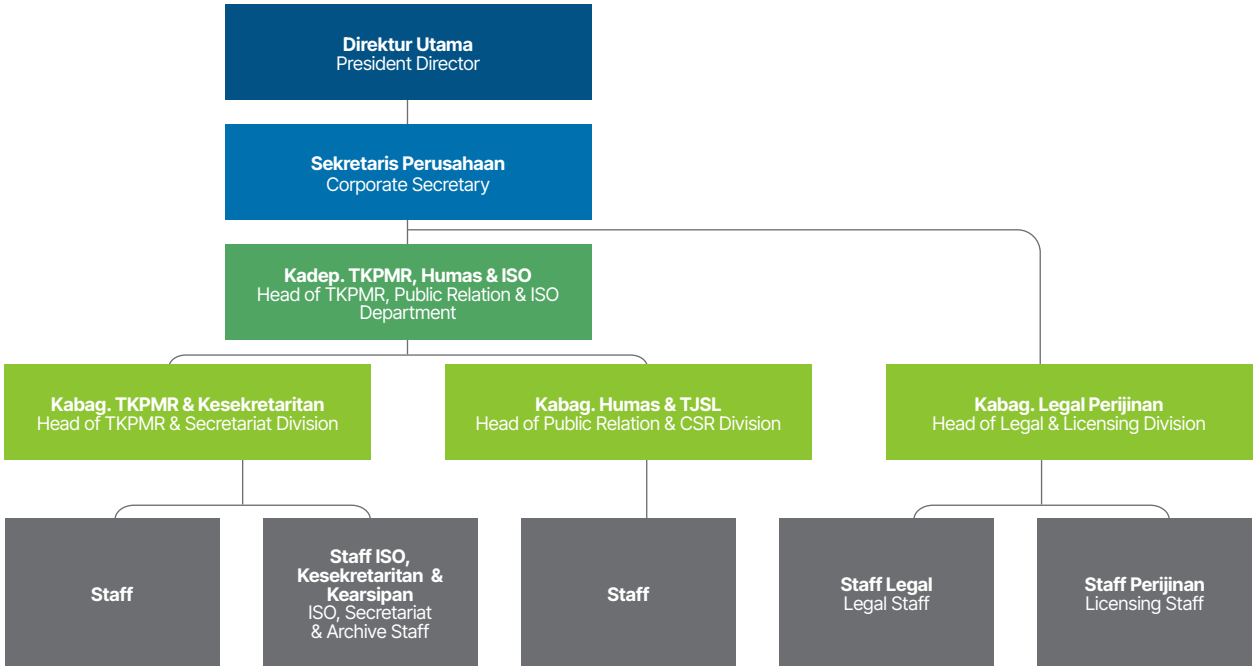
The Corporate Secretary forms part of the supporting organ of the Board of Directors within the Company's corporate governance framework and plays a central role in ensuring the availability of information to various stakeholders. The Corporate Secretary carries out communication functions that include information control and disclosure, ensuring the Company's compliance with applicable regulations and laws, ensuring the implementation of Good Corporate Governance principles, administering and safeguarding corporate documents, and ensuring the implementation of Company policies governing all matters related to the Corporate Secretary function.

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIS PERUSAHAAN

Guna mendukung kebijakan Perusahaan dan mengoptimalkan kinerja serta mendukung implementasi tata kelola Perusahaan yang lebih baik, berikut adalah struktur organisasi Sekretaris Perusahaan di tahun 2025.

ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF THE CORPORATE SECRETARY

To support the Company's policies, optimize performance, and strengthen the implementation of good corporate governance, the organizational structure of the Corporate Secretary function in 2025 is as follows:



PROFIL SEKRETARIS PERUSAHAAN

Direktur Utama KIE menunjuk Sdr. Fredi Kurniawan Hastari sebagai Sekretaris Perusahaan dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama sesuai SK No. 05/SKK/DIR/VII-2024 tanggal 13 Juli 2024.

PROFILE OF THE SECRETARY OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

The President Director of KIE appointed Mr. Fredi Kurniawan Hastari as the Corporate Secretary, reporting directly to the President Director, pursuant to Decree No. 05/SKK/DIR/VII-2024 dated July 13, 2024.



FREDI KURNIAWAN HASTARI
Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary

Dasar Pengangkatan: Surat Keputusan Direksi No. 05/SKK/DIR/VII-2024 tanggal 13 Juli 2024.	Basis of Appointment: Decree of the President Director No. 05/SKK/DIR/VII-2024, dated July 13, 2024
Periode: 13 Juli 2024 - Sekarang	Term: July 13, 2024 - Present
Usia 44 Tahun	**Age** 44 years old
Kewarganegaraan Indonesia	**Nationality** Indonesian
Domisili Bontang	**Domicile** Bontang
Riwayat Pendidikan Meraih gelar Sarjana Teknik Mesin dari Universitas Muhammadiyah Surakarta (2006).	**Educational Background** Bachelor's Degree in Mechanical Engineering, University of Muhammadiyah Surakarta (2006).
Pengalaman Kerja • Kepala SBU Pengelolaan Air (2011). • Manager Utility (2013). • Manager Trading (2014-2015). • Manager Procurement (2016). • Manager Perencanaan Logistik (2017). • Sekretaris Perusahaan (2024-sekarang).	**Work Experience** • Head of Water Management SBU (2011). • Utility Manager (2013). • Trading Manager (2014-2015). • Procurement Manager (2016). • Logistics Planning Manager (2017). • Corporate Secretary (2024-present).
Rangkap Jabatan Pada saat menduduki jabatan sebagai Sekretaris Perusahaan, tidak merangkap jabatan di Perusahaan manapun.	**Concurrent Positions** Does not hold concurrent positions in any other company while serving as Corporate Secretary.

PERSYARATAN SEKRETARIS PERUSAHAAN

Dalam rangka memastikan pelaksanaan fungsi Sekretaris Perusahaan berjalan secara optimal serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Perusahaan menetapkan sejumlah persyaratan umum yang harus dipenuhi sesuai dengan Board Manual. Sekretaris Perusahaan memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Perusahaan. Selain itu, Sekretaris Perusahaan juga memiliki pengalaman profesional dan kompetensi yang relevan, yang mencakup bidang hukum, pasar modal, manajemen keuangan, serta komunikasi perusahaan. Kompetensi tersebut mendukung pelaksanaan tugas Sekretaris Perusahaan dalam menjaga kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku serta

QUALIFICATIONS OF THE CORPORATE SECRETARY

In order to ensure that the Corporate Secretary function is carried out optimally and in accordance with applicable requirements, the Company has established a number of general qualifications to be met, as set forth in the Board Manual. The Corporate Secretary possesses educational qualifications that are aligned with the standards established by the Company. In addition, the Corporate Secretary has relevant professional experience and competencies, including in the areas of law, capital markets, financial management, and corporate communications. These competencies support the effective discharge of the Corporate Secretary's duties in maintaining compliance with applicable regulations and

memfasilitasi komunikasi yang efektif antara Perusahaan dengan para pemangku kepentingan.

PEDOMAN KERJA SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sekretaris Perusahaan sebagai pihak penghubung yang menjembatani kepentingan Perusahaan antara pihak internal maupun eksternal Perusahaan, Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab atas pembentukan citra positif Perusahaan. Dalam pelaksanaanya, Sekretaris Perusahaan memiliki pedoman kerja dan prosedur unit kerja dibawah Sekretaris Perusahaan diantaranya:

1. Pedoman No. 30/SKD/DIR/XI-2020 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
2. Pedoman No. 07/SKD/DIR/VI-2021 tentang Pengendalian Gratifikasi.
3. Pedoman No. 1A/SKD/DIR/I-2022 tentang Kode Etik.
4. Pedoman No. 13/SKD/DIR/KIE/V-2020 tentang Penerapan Sistem Pengaduan Pelanggaran (WBS).
5. Pedoman No. 17/SKD/DIR/VIII-2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko.
6. Pedoman No. 06/SKD/DIR/III-2018 tentang Kebijakan Benturan Kepentingan.
7. Pedoman No. 24/SKD/DIR/VIII-2018 tentang Kewajiban Penyampaian LHKPN.
8. Prosedur No. PPU-MGT-007 tentang Komunikasi.
9. Instruksi Kerja No. IKJ-SEK-003 tentang Pembuatan Surat Perjanjian.
10. Instruksi Kerja No. IKJ-SEK-010 tentang Surat Izin Tanda daftar Perusahaan.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SEKRETARIS PERUSAHAAN

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan tercantum dalam Board Manual dan *job description* Sekretaris Perusahaan. Tugas dan tanggung jawab tersebut di antaranya:

1. Memastikan bahwa Perusahaan mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan sejalan dengan penerapan prinsip-prinsip GCG.
2. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta.
3. Sebagai penghubung (*liaison officer*) antara Direksi dengan Dewan Komisaris dan pemangku kepentingan.
4. Menatausahakan serta menyimpan dokumen perusahaan, termasuk tetapi tidak terbatas pada Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, serta Risalah Rapat Direksi, Rapat Dewan Komisaris, dan RUPS.
5. Menyiapkan seluruh aspek penyelenggaraan RUPS agar acara RUPS dapat berjalan dengan baik dan lancar.
6. Mengendalikan penyampaian informasi kinerja Perusahaan dan *corporate action* kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
7. Menganalisis dan mengawasi pengelolaan strategi komunikasi untuk membangun citra korporat berdasarkan *key performance indicator.*

facilitating effective communication between the Company and its stakeholders.

CORPORATE SECRETARY GUIDELINE

As the liaison bridging the interests of the Company with both internal and external parties, the Corporate Secretary is responsible for fostering and maintaining the Company's positive corporate image. In carrying out this role, the Corporate Secretary is guided by the following policies and work procedures applicable to the units under the Corporate Secretary function:

1. Guideline No. 30/SKD/DIR/XI-2020 on Good Corporate Governance.
2. Guideline No. 07/SKD/DIR/VI-2021 on Gratification Control.
3. Guideline No. 1A/SKD/DIR/I-2022 on the Code of Conduct.
4. Guideline No. 13/SKD/DIR/KIE/V-2020 on the Implementation of the Whistleblowing System (WBS).
5. Guideline No. 17/SKD/DIR/VIII-2018 on the Implementation of Risk Management.
6. Guideline No. 06/SKD/DIR/III-2018 on the Conflict of Interest Policy.
7. Guideline No. 24/SKD/DIR/VIII-2018 on the Obligation to Submit State Officials' Wealth Reports (LHKPN).
8. Procedure No. PPU-MGT-007 on Communication.
9. Work Instruction No. IKJ-SEK-003 on the Preparation of Agreement Letters.
10. Work Instruction No. IKJ-SEK-010 on Business Registration Certificate Licensing.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE CORPORATE SECRETARY

The duties and responsibilities of the Corporate Secretary are listed in the Board Manual and the job description of the Corporate Secretary. These duties and responsibilities include:

1. Ensuring that the Company complies with regulations on disclosure requirements in line with the implementation of GCG principles.
2. Providing information required by the Board of Directors and Board of Commissioners periodically and/or at any time upon request.
3. Serving as a liaison officer between the Board of Directors, the Board of Commissioners and Stakeholders.
4. Organizing and storing company documents, including but not limited to the Register of Shareholders, Special Register, and Minutes of the Board of Directors Meeting, Board of Commissioners Meeting, and GMS.
5. Preparing all aspects of organizing the GMS so that the GMS event can run well and smoothly.
6. Controlling the delivery of Company performance information and corporate actions to interested parties.
7. Analyzing and supervising the management of communication strategies to build corporate image based on key performance indicators.

8. Mengkoordinasikan penyelenggaraan rapat Direksi, rapat Direksi dengan Dewan Komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham, mengkoordinasikan pencatatan notulen rapat serta mengendalikan administrasi kesekretariatan Direksi.
9. Melakukan koordinasi pengamanan kawasan secara berkala.
10. Memberikan usulan dan konsultasi kepada Direksi terkait dengan aspek hubungan kemasyarakatan, aspek hukum dan kesekretariatan dengan mengedepankan prinsip "*win-win solution*" dan efisiensi sesuai dengan kepentingan perusahaan dan seluruh *Strategic Business Unit* (SBU).
11. Menganalisa dan menyelesaikan permasalahan hukum terhadap permasalahan perusahaan, perizinan, perjanjian dan kerja sama sesuai dengan kaidah hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Memastikan pemutakhiran, ketersediaan segala jenis peraturan perundang-undangan, format dan standardisasi untuk kesekretariatan, kehumasan dan Hukum terkait lingkup usaha (Agraria, Properti, Perjanjian/Kontrak Kerjasama, Perizinan, dll) untuk Perusahaan.
13. Mengkoordinasikan, memonitor, dan mengevaluasi aspek GCG, regulasi Manajemen Risiko aktivitas perusahaan.
14. Meminimalkan risiko terkait masalah yang muncul baik menyangkut masalah kesekretariatan, kehumasan dan pelaksanaan proyek agar tidak menyimpang dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Coordinating the organization of Board of Directors meetings, Board of Directors meetings with the Board of Commissioners and the General Meeting of Shareholders, coordinate the recording of meeting minutes and control the administration of the secretariat of the Board of Directors.
9. Coordinating area security on a regular basis.
10. Providing suggestions and consultations to the Board of Directors related to community relations, legal and secretarial aspects by prioritizing the principle of "win-win solution" and efficiency in accordance with the interests of the company and all Strategic Business Units (SBU).
11. Analyzing and resolving legal issues on corporate issues, licensing, agreements and cooperation in accordance with legal principles and applicable laws and regulations.
12. Ensuring the updating, availability of all types of laws and regulations, formats and standardization for secretarial, public relations and Law related to the scope of business (Agrarian, Property, Cooperation Agreements/Contracts, Licensing, etc.) for corporate.
13. Coordinating, monitoring, and evaluating aspects of GCG, Risk Management regulations of corporate activities.
14. Minimizing risks related to problems that arise both concerning secretarial matters, public relations and project implementation so as not to deviate from applicable laws and regulations.

PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI SEKRETARIS PERUSAHAAN

Selama 2025, Sekretaris Perusahaan mengikuti program pengembangan kompetensi sebagai berikut:

COMPETENCY DEVELOPMENT PROGRAM FOR THE CORPORATE SECRETARY

Throughout 2025, the Corporate Secretary actively participated in the following competency development programs:

No	Judul Pelatihan Training Subject	Tanggal Date	Pelaksana Organizer
1	Informasi Kearsipan di Era Digital Archiving Information in the Digital Era	27 Mei 2025 May 27, 2025	PT Pupuk Kalimantan Timur
2	Pelatihan Komposit Risiko bidang Manajemen Risiko dan Keuangan Composite Risk Training in Risk Management and Finance	23 September 2025 September 23, 2025	PT Pupuk Kalimantan Timur
3	*Measuring The Impact of IT on Business Process Efficiency* Measuring The Impact of IT on Business Process Efficiency	14 Oktober 2025 October 14, 2025	Lembaga Saniskara

REALISASI PROGRAM KERJA SEKRETARIS PERUSAHAAN PADA 2025

Selama tahun 2025, Sekretaris Perusahaan telah melaksanakan program kerja pada bidang-bidang berikut ini:

THE REALIZATION OF THE CORPORATE SECRETARY'S 2025 WORK PROGRAM

Throughout 2025, the Corporate Secretary has implemented work programs in the following areas:

BIDANG TATA KELOLA PERUSAHAAN DAN MANAJEMEN RISIKO

1. Melakukan penyusunan Rencana RKAP Tahun 2026.
2. Melaksanakan RUPST Pengesahan Laporan Tahunan Tahun 2024 dan RUPST Persetujuan RKAP Tahun Buku 2025.
3. Mempersiapkan dan mendokumentasikan Rapat Monitoring bersama Pemegang Saham..
4. Mempersiapkan dan mendokumentasikan Rapat Dewan Komisaris dan Direksi.
5. Mempersiapkan dan menyampaikan Laporan Tata Kelola dan Manajemen Risiko kepada Pemegang Saham dan Dewan Komisaris.
6. Memantau penerapan kepatuhan Perusahaan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Mengakomodir kajian yang dibutuhkan dalam proses aksi korporasi seperti kajian risiko.
8. Melakukan penyusunan register risiko masing-masing unit kerja.
9. Melakukan monitoring dan penyampaian laporan atas pengaduan gratifikasi.
10. Melakukan monitoring dan penyampaian laporan *whistle blowing system* (WBS).
11. Melakukan pengendalian dan penyampaian laporan terhadap benturan kepentingan dan pakta integritas.
12. Melakukan penyusunan *Annual Report* dan *Sustainability Report* tahun buku 2025.
13. Memantau penerapan kepatuhan Perusahaan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

BIDANG HUMAS

1. Menyelenggarakan kegiatan komunikasi dan menjalin keterlibatan dengan para pemangku kepentingan.
2. Melakukan pemantauan terhadap pemberitaan dan publikasi media.
3. Melaksanakan kegiatan *corporate event* sesuai dengan kebijakan Perusahaan.
4. Melaksanakan komunikasi perusahaan secara efektif.
5. Menangani isu sosial yang berkaitan dengan kegiatan dan reputasi Perusahaan.

BIDANG TJSL

1. Menyusun dan menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan Program TJSL kepada Pemerintah Kota Bontang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan program TJSL bersama unit kerja terkait agar kegiatan berjalan secara terarah dan memberikan manfaat bagi masyarakat serta lingkungan.
3. Mengelola komunikasi dan publikasi kegiatan TJSL kepada para pemangku kepentingan melalui berbagai media komunikasi perusahaan guna mendukung transparansi serta memperkuat reputasi Perusahaan.
4. Membangun dan memelihara hubungan yang baik dengan masyarakat, lembaga sosial, pemerintah daerah,

CORPORATE GOVERNANCE AND RISK MANAGEMENT FUNCTION

1. Prepared the 2026 Corporate Work Plan and Budget (RKAP).
2. Conducted the Annual GMS for the ratification of the 2024 Annual Report and the approval of the 2025 RKAP.
3. Prepared and documented monitoring meetings with Shareholders.
4. Prepared and documented meetings of the Board of Commissioners and the Board of Directors.
5. Prepared and submitted Corporate Governance and Risk Management reports to the Shareholders and the Board of Commissioners.
6. Monitored the Company's compliance with prevailing laws and regulations.
7. Facilitated studies required in corporate actions, including risk assessments.
8. Prepared risk registers for each work unit.
9. Monitored and reported gratification complaints.
10. Monitored and reported the whistleblowing system (WBS).
11. Controlled and reported conflicts of interest and integrity pacts.
12. Prepared the 2025 Annual Report and Sustainability Report.
13. Monitored the Company's compliance with applicable laws and regulations.

PUBLIC RELATIONS FUNCTION

1. Organized communication activities and maintained engagement with stakeholders.
2. Monitored media coverage and publications.
3. Conducted corporate events in accordance with Company policies.
4. Implemented effective corporate communications.
5. Addressed social issues related to the Company's activities and reputation.

TJSL FUNCTION

1. Prepared and submitted reports on the realization of the CSR Program to the Bontang City Government in accordance with applicable regulations.
2. Coordinated the planning and implementation of CSR programs with related work units to ensure that activities were well-directed and beneficial to the community and the environment.
3. Managed communication and publication of CSR activities to stakeholders through the Company's various communication media in support of transparency and enhancement of the Company's reputation.
4. Built and maintained good relationships with communities, social institutions, local governments, and other

serta pemangku kepentingan lainnya dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan program TJSL.
5. Mengelola dan menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat di wilayah *buffer zone* maupun masyarakat umum sebagai bagian dari implementasi program TJSL Perusahaan.

BIDANG KESEKRETARIATAN

1. Mempersiapkan dan mendokumentasikan rrapat monitoring bersama Pemegang Saham, serta rapat Dewan Komisaris dan Direksi.
2. Menyusun dan mengarsipkan risalah rapat serta dokumen pendukung kegiatan rapat Perusahaan.
3. Mengelola administrasi surat menyurat dan korespondensi resmi Perusahaan.
4. Mengelola pengarsipan dokumen dan keputusan manajemen Perusahaan.
5. Mengkoordinasikan penjadwalan rapat dan kegiatan manajemen Perusahaan.
6. Menyiapkan bahan dan dokumen pendukung untuk pelaksanaan rapat Perusahaan.

BIDANG HUKUM

1. Mengakomodasi kajian hukum yang dibutuhkan dalam proses aksi korporasi, termasuk penyusunan legal opinion dan kajian risiko hukum.
2. Memastikan ketersediaan pendampingan hukum dalam kegiatan operasional maupun proses pengambilan keputusan Perusahaan.
3. Mengelola dan memantau penanganan perkara hukum yang melibatkan Perusahaan.
4. Melakukan penelaahan dan penyusunan dokumen hukum Perusahaan, termasuk perjanjian dan dokumen kerja sama.
5. Memantau kepatuhan Perusahaan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Mengelola dokumentasi dan pengarsipan dokumen hukum Perusahaan.

PENILAIAN KINERJA SEKRETARIS PERUSAHAAN

Penilaian kinerja Sekretaris Perusahaan dinilai berdasarkan 3 (tiga) aspek, yaitu strategis, pekerjaan rutin, dan task force dengan bobot KPI yang berbeda-beda. Terdapat beberapa indikator penilaian kinerja Sekretaris Perusahaan dari masing-masing aspek tersebut, antara lain:

1. STRATEGI
   a. Pelaksanaan efisiensi biaya operasional.
   b. Pelaksanaan TJSL dan CSV Perusahaan berjalan dengan baik.
   c. Peningkatan hubungan yang positif dan harmonis dengan seluruh *stakeholder* perusahaan.
   d. Pembuatan & Evaluasi Dokumen Kerjasama dengan Pihak Eksternal (Perjanjian, MoU).

stakeholders to support the successful implementation of CSR programs.
5. Managed and distributed social assistance to communities in the buffer zone as well as the general public as part of the implementation of the Company's CSR programs.

SECRETARIAT FUNCTION

1. Prepared and documented internal coordination meetings, Shareholders monitoring meetings, and meetings of the Board of Commissioners and the Board of Directors.
2. Prepared and archived minutes of meetings and supporting documents for corporate meeting activities.
3. Managed the administration of official correspondence and corporate communications.
4. Managed the filing of corporate documents and management resolutions.
5. Coordinated the scheduling of meetings and management activities.
6. Prepared supporting materials and documents for the implementation of corporate meetings.

LEGAL FUNCTION

1. Facilitated legal reviews required in corporate actions, including the preparation of legal opinions and legal risk assessments.
2. Ensured the availability of legal assistance in operational activities and in the corporate decision-making process.
3. Managed and monitored the handling of legal cases involving the Company.
4. Reviewed and prepared the Company's legal documents, including agreements and cooperation documents.
5. Monitored the Company's compliance with applicable laws and regulations.
6. Managed the documentation and filing of the Company's legal documents.

ASSESSMENT OF CORPORATE SECRETARY'S PERFORMANCE

Performance assessment of the Corporate Secretary is assessed based on 3 (three) aspects such as strategic, routine work, and task force with different KPI weights. There are several indicators for evaluating the performance of the Corporate Secretary from each of these aspects, including:

1. STRATEGIC
   a. Implementation of operational cost efficiency.
   b. The Company's TJSL and CSV implementation is running well.
   c. Improvement of positive and harmonious relationships with all company stakeholders.
   d. Preparation & Evaluation of Cooperation Documents with External Parties (Agreements, MOUs).

e. Pengamanan di lingkup Perusahaan beserta seluruh asetnya.
f. Tingkat Kecelakaan Kerja Nihil di unit kerja Sekretaris Perusahaan.
g. Pelaksanaan dan pencapaian proper lingkungan.

2. PEKERJAAN RUTIN
a. Penyelenggaraan agenda manajemen dan korporasi.
b. Penyelesaian kewajiban perusahaan (pelaporan dan perizinan).
c. Pengelolaan arsip dan dokumen vital perusahaan.
d. Penanganan permasalahan hukum di Perusahaan.
e. Penyusunan laporan tahunan korporasi.
f. Penyampaian laporan manajemen risiko.
g. Penyampaian laporan GCG.

3. TASK FORCE
a. Komite SDM
b. Penyusunan RJPP
c. Pemantau dan Penerapan GCG & MR
d. Unit Pengendali Gratifikasi
e. Investigasi WBS
f. Penyusunan AR & SR
g. Audit Internal ISO & SMK3
h. *Program Manage Care* Karyawan

e. Security throughout the Company and all its assets
f. Zero Work Accident Rate in the Corporate Secretary work unit.
g. Implementation and achievement of environmental proper.

2. ROUTINE WORKS
a. Implementing management and corporate agendas.
b. Completion of company obligations (reporting and licensing).
c. Management of archives and vital company documents.
d. Handling of legal issues in the Company.
e. Preparation of corporate annual reports.
f. Submission of risk management reports.
g. Submission of GCG report.

3. TASK FORCE
a. HR Committee
b. RJPP Development
c. GCG & MR Monitoring and Implementation
d. Gratification Control Unit
e. WBS Investigation
f. AR & SR Preparation
g. ISO & OHSMS Internal Audit
h. Employee Care Management Program

Audit Internal
Internal Audit

Audit Internal merupakan organ pendukung Direksi dalam tata kelola Perusahaan berperan penting dalam sistem pengendalian internal Perusahaan. Secara garis besar, keberadaan Audit Internal bertujuan membantu manajemen merealisasikan objektif/sasarannya melalui pemeriksaan kecukupan dan pelaksanaan proses pengendalian internal, manajemen risiko dan tata kelola perusahaan.

Fungsi Audit Internal di lingkup Perusahaan dijalankan oleh Satuan Pengawasan Intern (SPI). Satuan Pengawasan Intern dibentuk untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan kepastian (*assurance*) dan konsultasi secara independen dan obyektif serta dirancang untuk menambah nilai dan meningkatkan kinerja Perusahaan.

STRUKTUR ORGANISASI AUDIT INTERNAL

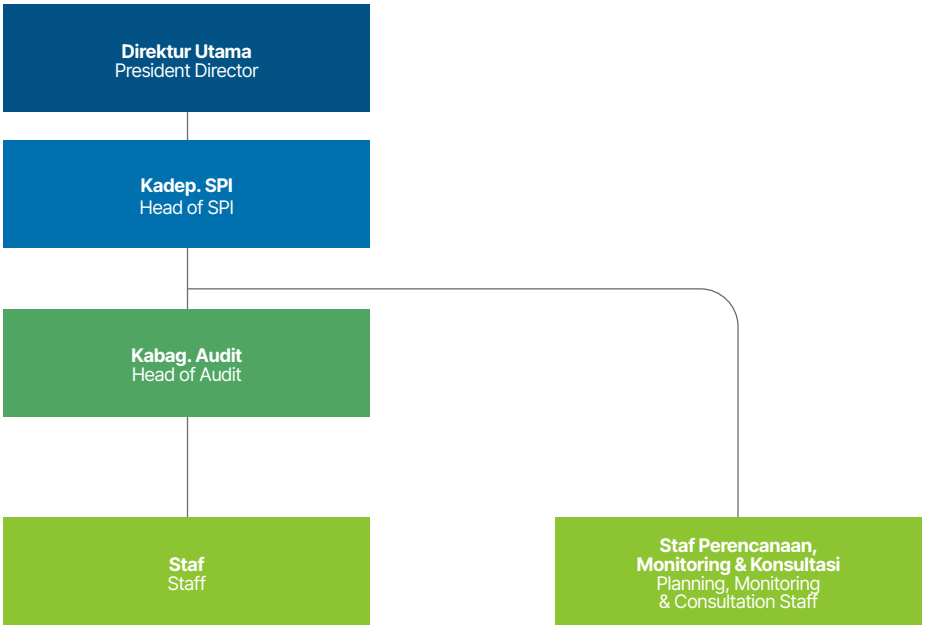
Fungsi Audit Internal di Perusahaan dijalankan oleh Satuan Pengawasan Intern (SPI). Dalam struktur organisasi Perusahaan, Satuan Pengawasan Intern (SPI) bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.

Internal Audit is a supporting organ of the Board of Directors within the Company's governance framework and plays an important role in the Company's internal control system. In general, the existence of the Internal Audit function is intended to assist management in achieving its objectives through the examination of the adequacy and implementation of internal control processes, risk management, and corporate governance.

Within the Company, the Internal Audit function is carried out by the Internal Audit Unit (SPI). The Internal Audit Unit was established to perform independent and objective assurance and consulting activities designed to add value and improve the Company's performance.

ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF INTERNAL AUDIT

The Internal Audit function within the Company is carried out by the Internal Audit Unit (SPI). Within the Company's organizational structure, the Internal Audit Unit reports directly to the President Director.



FUNGSI SATUAN PENGAWASAN INTERN

Melaksanakan evaluasi atas efektivitas pelaksanaan pengendalian intern, manajemen risiko, dan proses Tata Kelola Perusahaan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan KIE.

Melaksanakan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, operasional, sumber daya manusia, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya.

PERSYARATAN AUDITOR INTERNAL

Piagam SPI mengharuskan auditor memenuhi kualifikasi untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan audit, sebagai berikut:

1. Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan obyektif dalam pelaksanaan tugas.
2. Memiliki pengetahuan dan pengalaman teknis audit dan disiplin ilmu yang relevan dengan bidang tugas.
3. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundangan terkait lainnya.
4. Memiliki kecakapan berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis secara efektif, baik dengan pihak internal maupun eksternal Perusahaan.
5. Mematuhi standar profesi yang dikeluarkan oleh Asosiasi Audit Internal.
6. Mematuhi Kode Etik Audit Internal.
7. Menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data Perusahaan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab audit internal, kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau penetapan atau putusan pengadilan.
8. Memahami prinsip-prinsip pengendalian internal, GCG, dan manajemen risiko.
9. Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.

FUNCTION OF INTERNAL CONTROL UNIT

Carrying out an evaluation of the effectiveness of the implementation of internal control, risk management, and Corporate Governance processes, in accordance with laws and regulations and KIE policies.

Carrying out examinations and assessments of efficiency and effectiveness in the fields of finance, operations, human resources, information technology, and other activities.

QUALIFICATION OF INTERNAL AUDITOR

The SPI Charter requires auditors to meet the following qualifications to support the successful conduct of audits:

1. Have integrity and professional behavior, independent, honest, and objective in carrying out their duties.
2. Have technical audit knowledge and experience and disciplines relevant to the field of duty.
3. Have knowledge of laws and regulations in the field of capital markets and other related laws and regulations.
4. Have the ability to interact and communicate orally and in writing effectively, both with internal and external parties of the Company.
5. Comply with professional standards issued by the Internal Audit Association.
6. Comply with the Internal Audit Code of Ethics.
7. Maintain the confidentiality of Company information and/or data related to the implementation of internal audit duties and responsibilities, unless required by laws and regulations or court decisions.
8. Understand the principles of internal control, GCG, and risk management.
9. Willing to continuously improve his/her knowledge, skills, and professionalism abilities.

PROFIL KEPALA SATUAN PENGAWASAN INTERNAL

Kepala Departemen Satuan Pengawasan Internal diangkat oleh Direktur Utama melalui persetujuan Dewan Komisaris berdasarkan Surat Keputusan No. 07/SKK/DIR/IV-2023 tanggal 04 April 2023.

PROFILE OF THE HEAD OF INTERNAL AUDIT

The Head of the Internal Audit Unit Department was appointed by the President Director with the approval of the Board of Commissioners, pursuant to Decree No. 07/SKK/DIR/IV-2023, dated April 4, 2023.



NOOR BUDI RACMADDANSYAH
Kepala Departemen Satuan Pengawasan Internal
Head of the Internal Audit Unit Department

Dasar Pengangkatan: Surat Keputusan Direksi No. 07/SKK/DIR/IV-2023 tanggal 04 April 2023.	Basis of Appointment: Decree of the President Director No. 07/SKK/DIR/IV-2023, dated April 4, 2023
Periode : 24 April 2023 - sekarang	Term: April 24, 2023 - Present
Usia 46 Tahun	**Age** 46 years old
Kewarganegaraan Indonesia	**Nationality** Indonesian
Domisili Bontang	**Domicile** Bontang
Riwayat Pendidikan Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Mulawarman (2005).	**Educational Background** Bachelor's Degree in Economics, University of Mulawarman (2005).
Pengalaman Kerja Manager Keuangan & Anggaran (2014-2019).	**Work Experience** Finance & Budget Manager (2014-2019).
Rangkap Jabatan Pada saat menduduki jabatan sebagai Kepala Satuan Pengawasan Internal, tidak merangkap jabatan di Perusahaan manapun.	**Concurrent Positions** While serving as Head of the Internal Audit Unit, he does not hold any concurrent positions in other companies.

JUMLAH PERSONIL, KUALIFIKASI SERTA SERTIFIKASI SATUAN PENGAWASAN INTERNAL

Dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya, Satuan Pengawasan Internal memiliki 3 (tiga) personil.

NUMBER OF PERSONNEL, QUALIFICATIONS, AND CERTIFICATIONS OF THE INTERNAL AUDIT UNIT

In carrying out its roles and responsibilities, the Internal Audit Unit consists of 3 (three) personnel.

SERTIFIKASI PROFESI SATUAN PENGAWASAN INTERN

Berikut adalah rincian sertifikasi yang telah dimiliki oleh personel SPI KIE:

PROFESSIONAL CERTIFICATIONS OF THE INTERNAL AUDIT UNIT

The following are the details of the certifications held by KIE's Internal Audit Unit personnel:

SERTIFIKAT PERSONEL SPI
SPI PERSONNEL CERTIFICATE

No	Nama Name	Sertifikasi Certification
1	Noor Budi R.	• Qualified Internal Auditor (QIA) Tingkat Dasar • Qualified Internal Auditor (QIA) Tingkat Lanjutan • Qualified Internal Auditor (QIA) Tingkat Manajerial • Certified Practitioner of Internal Audit (CPIA) - (BNSP) • Auditor SMP Obvitnas dan Objek Tertentu - (BNSP) • Qualified Internal Auditor (QIA) Basic Level • Qualified Internal Auditor (QIA) Advanced Level • Qualified Internal Auditor (QIA) Managerial Level • Certified Practitioner of Internal Audit (CPIA) - (BNSP) • Junior Auditor for National Vital Objects and Specific Objects - (BNSP)
2	Andri Ansarullah	• Qualified Internal Auditor (QIA) Tingkat Dasar • Qualified Internal Auditor (QIA) Tingkat Lanjutan • Certified Practitioner of Internal Audit (CPIA) - (BNSP) • Qualified Internal Auditor (QIA) Basic Level • Qualified Internal Auditor (QIA) Advanced Level • Certified Practitioner of Internal Audit (CPIA) - (BNSP)

PEDOMAN KERJA SATUAN PENGAWASAN INTERNAL

KIE telah memiliki Piagam SPI yang telah ditandatangani oleh Kepala SPI, Direktur Utama, dan Dewan Komisaris pada tanggal 9 Januari 2019 Hal-hal yang dimuat dalam Piagam SPI adalah posisi fungsi audit internal dalam organisasi, struktur dan kedudukan, tugas dan tanggung jawab, wewenang, kode etik auditor, persyaratan auditor internal, pertanggungjawaban, dan larangan perangkapan tugas.

SPI juga memiliki pedoman kerja lainnya, yaitu Prosedur Audit Internal yang ditetapkan Direktur Utama pada 14 Juli 2018 Prosedur Audit Internal berisikan susunan organisasi tim audit, peran dan tanggung jawab, serta perencanaan dan pelaksanaan audit. Piagam SPI dan Prosedur Audit Internal telah disosialisasikan agar diketahui oleh seluruh Insan KIE dan pihak lain yang terkait.

INTERNAL AUDIT UNIT CHARTER

KIE has an SPI Charter which was signed by the Head of SPI, President Director, and Board of Commissioners on January 9, 2019. Matters contained in the SPI Charter are the position of the internal audit function in the organization, structure and position, duties and responsibilities, authority, auditor code of conduct, internal auditor requirements, accountability, and prohibition of concurrent duties.

SPI also has another work guideline, particularly the Internal Audit Procedure established by the President Director on July 14, 2018. The Internal Audit Procedure contains the organization of the audit team, roles and responsibilities, as well as audit planning and implementation. The SPI Charter and Internal Audit Procedures have been socialized to be known by all KIE personnel and other related parties.

KODE ETIK AUDITOR INTERNAL

Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, Auditor Internal telah memiliki Kode Etik yang terdiri dari:

1. Menunjukkan kejujuran, objektivitas, dan kesungguhan dalam melaksanakan tugas dan memenuhi tanggung jawabnya;
2. Menunjukkan loyalitas terhadap Perusahaan dan tidak boleh ikut terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang menyimpang peraturan Perusahaan atau undang-undang yang berlaku;
3. Tidak boleh terlibat dalam tindakan atau kegiatan yang dapat mendiskreditkan jabatan ataupun Perusahaan;
4. Menahan diri dari kegiatan-kegiatan yang dapat

INTERNAL AUDITOR CODE OF CONDUCT

In carrying out their functions and duties, Internal Auditors have a Code of Conduct consisting of:

1. Demonstrate honesty, objectivity, and sincerity in carrying out their duties and fulfilling their responsibilities;
2. Show loyalty to the Company and must not be involved in activities that deviate from company regulations or applicable laws;
3. Not be involved in actions or activities that may discredit the position or the Company;
4. Refrain from activities that may conflict with the interests

menimbulkan konflik dengan kepentingan Perusahaan atau kegiatan yang dapat menimbulkan prasangka yang meragukan kemampuannya untuk dapat melaksanakan tugas dan memenuhi tanggung jawab jabatannya yang obyektif;
5. Tidak boleh menerima imbalan dalam bentuk apapun dari karyawan, klien, pelanggan, pemasok, ataupun mitra bisnis Perusahaan sehingga dapat mempengaruhi pertimbangan profesionalnya;
6. Hanya melakukan jasa-jasa yang dapat diselesaikan dengan menggunakan kompetensi profesional yang dimilikinya;
7. Mengusahakan berbagai upaya agar senantiasa memenuhi standar yang dikeluarkan asosiasi audit internal;
8. Bersikap hati-hati dan bijaksana dalam menggunakan informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan tugasnya dan tidak boleh menggunakan informasi tersebut untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau berakibat timbulnya kerugian Perusahaan;
9. Dalam melaporkan hasil pekerjaannya, Auditor Internal harus mengungkapkan semua fakta-fakta penting yang diketahuinya, yaitu fakta-fakta yang jika tidak diungkap dapat (i) mendistorsi kinerja kegiatan yang ditinjau atau (ii) menutupi adanya praktik-praktik yang melanggar hukum.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SATUAN PENGAWASAN INTERNAL

SPI memiliki tugas dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Piagam SPI, yaitu:
1. Menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang fleksibel, apabila mungkin dengan metodologi yang berbasis risiko yang memadai serta menyampaikan kepada Direktur Utama;
2. Mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai kebijakan dan aturan Perusahaan;
3. Melakukan pemeriksaan dan penilaian bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia dan kegiatan lainnya;
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen atas kondisi, sebab dan akibat yang ditimbulkan dari kelemahan pengendalian internal maupun manajemen risiko;
5. Menyampaikan Laporan Pelaksanaan Pengawasan kepada Direktur Utama;
6. Memantau dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
7. Melaksanakan audit khusus bila diperlukan, sepanjang terkait dengan bisnis Perusahaan;
8. Mendorong dan memonitor tindak lanjut audit dari pihak terkait, baik hasil audit internal maupun eksternal;
9. Melakukan pemantauan tindak lanjut atas arahan pemegang saham perusahaan dan/atau pemegang saham anak perusahaan;
10. Sebagai mitra kerja auditor eksternal, yang antara lain terkait dengan pengendalian, evaluasi manajemen risiko, dan tata kelola Perusahaan;

of the Company or activities that may cause prejudice that casts doubt on his/her ability to carry out duties and fulfill the responsibilities of his/her position objectively;
5. Shall not accept any form of remuneration from employees, clients, customers, suppliers, or business partners of the Company that may influence his/her professional judgment;
6. Only perform services that can be completed using his/her professional competence;
7. Make every effort to meet the standards issued by the internal audit association;
8. Be careful and prudent in using information obtained in the performance of their duties and shall not use such information to obtain personal gain or result in loss to the Company;
9. In reporting the results of their work, Internal Auditors must disclose all important facts known to them, namely facts that if not disclosed can (i) distort the performance of the activities being reviewed or (ii) cover up the existence of practices that violate the law.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE INTERNAL AUDIT UNIT

The SPI has duties and responsibilities as stated in the SPI Charter, specifically:
1. Preparing a flexible Annual Supervisory Work Program (PKPT) with an adequate risk-based approach and submitting it to the President Director;
2. Testing and evaluating the implementation of internal control and risk management systems in accordance with Company policy and provisions;
3. Examining and assessing the efficiency and effectiveness in finance, accounting, operations, human resources, and other activities;
4. Providing suggestions for improvement and objective information about the activities examined at all levels of Management upon the condition, reason, and results of its occurrence due to weaknesses in internal control and risk management;
5. Submitting the Supervisory Report to the President Director;
6. Monitoring and reporting on the implementation of follow-up improvements that have been suggested;
7. Developing a special audit program if required in relation to the Company business.
8. Promoting and monitoring audit follow-up from related parties, on internal and external audit results;
9. Monitoring follow-up on directives from the Company's shareholders and/or subsidiary shareholders;
10. Serving as a working partner for external auditors, including those related to controls, risk management evaluation, and corporate governance of the Company;

11. Sebagai mitra kerja Komite Audit;
12. Memelihara profesionalisme auditor dengan pengetahuan, keterampilan, pengalaman serta program sertifikasi yang memadai melalui pendidikan-pendidikan profesional yang berkesinambungan serta keterlibatan dalam organisasi profesi.

WEWENANG SATUAN PENGAWASAN INTERN

Berdasarkan Piagam SPI, wewenang SPI dalam melaksanakan tugasnya adalah sebagai berikut:

1. Mengalokasikan sumber daya audit, menentukan fokus, ruang lingkup, jadwal audit dan menerapkan Teknik audit yang memadai untuk mencapai tujuan audit;
2. Mendapatkan akses seluruh informasi yang relevan dari manajemen maupun karyawan terkait pelaksanaan tugas-tugas audit;
3. Memanggil manajemen unit kerja untuk dimintakan penjelasan apabila yang bersangkutan tidak melakukan tindakan koreksi sesuai kesepakatan.

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN SATUAN PENGAWASAN INTERNAL

Pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yaitu Kantor Perwakilan Jakarta (Plaza PKT), Kawasan Industri KIE, Properti, Proyek Komersil serta Proyek Investasi. Kemudian sebagai *counterpart* Audit Eksternal (KAP). Pelaksanaan konsultasi unit kerja. Melakukan evaluasi Sistem Pengendalian Internal Perusahaan (SPIP) Tahun 2025. Joint Audit Anak Perusahaan PKT (KIE) dengan Satuan Audit Internal (SAI) PKT. Monitoring tindak lanjut arahan RUPS RKAP dan RUPS Kinerja. Rapat Koordinasi Internal dengan Direksi setiap bulan.

11. Serving as a working partner for the Audit Committee;
12. Maintaining auditor professionalism with adequate knowledge, skills, experience, and certification programs through ongoing professional education and involvement in professional organizations.

AUTHORITY OF INTERNAL CONTROL UNIT

Based on the SPI Charter, the authority of SPI in carrying out its duties is as follows:

1. Allocating audit resources, determining the focus, scope, audit schedule and applying adequate audit techniques to achieve audit objectives;
2. Obtaining access to all relevant information from management and employees related to the implementation of audit tasks;
3. Calling the management of the work unit to ask for clarification if the person concerned does not take corrective action according to the agreement / agreement.

INTERNAL AUDIT UNIT ACTIVITY IMPLEMENTATION REPORT

Implementation of the Annual Supervisory Work Program (PKPT) namely the Jakarta Representative Office (Plaza PKT), KIE Industrial Estate, Property, Commercial Projects and Investment Projects.. Then as a counterpart to External Audit (KAP). Implementation of work unit consultation. Evaluating the Company's Internal Control System (SPIP) in 2023. Joint Audit of KIE's operations & finances with PKT's Internal Audit Unit (SAI). Monitoring the follow-up of the RKAP GMS and Performance GMS directives.

Auditor Eksternal
External Auditor

PENUNJUKAN AUDITOR EKSTERNAL

Fungsi pengawasan independen terhadap aspek keuangan Perusahaan dilakukan dengan melaksanakan pemeriksaan Audit Eksternal yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP). Auditor Eksternal untuk pemeriksaan laporan keuangan KIE adalah Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ditetapkan melalui RUPS Tahunan dengan mempertimbangkan rekomendasi Dewan Komisaris dan Komite Audit. Untuk menjamin independensi dan kualitas hasil pemeriksaan, Auditor Eksternal yang ditunjuk tidak boleh memiliki benturan kepentingan dengan KIE.

Menindaklanjuti hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) hari Senin, 30 Juni 2025 Pemegang Saham menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (PwC) sebagai auditor eksternal dalam melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan KIE tahun buku 2025.

APPOINTMENT OF THE EXTERNAL AUDITOR

The independent oversight function over the Company's financial aspects is carried out through an External Audit conducted by a Public Accounting Firm (KAP). The External Auditor for the audit of KIE's financial statements is the Public Accounting Firm appointed through the Annual GMS, taking into account the recommendation of the Board of Commissioners and the Audit Committee. To ensure independence and the quality of the audit results, the appointed External Auditor must not have any conflict of interest with KIE.

Following the resolution of the General Meeting of Shareholders (GMS) held on Monday, June 30, 2025, the Shareholders appointed Public Accounting Firm Rintis, Jumadi, Rianto & Partners (PwC) as the External Auditor to audit KIE's Financial Statements for fiscal year 2025.

BIAYA, JASA DAN OPINI AUDIT

KAP yang telah mengaudit Laporan Keuangan KIE dari 2021 sampai 2025 adalah sebagai berikut:

AUDIT FEES, SERVICES, AND AUDIT OPINION

The Public Accounting Firms that have audited KIE's Financial Statements from 2021 to 2025 are as follows:

Tahun Buku Fiscal Year	**Kantor Akuntan Publik** Public Accounting Firm	**Biaya Audit** Audit Cost	**Jasa yang Diberikan** Services Provided	**Jasa Lain** Other Services	**Opini Audit** Auditors' Opinion
2025	Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (PricewaterhouseCoopers - PwC)	Rp390.720.000	Audit Laporan Keuangan Financial Statement Audit	-	Wajar Tanpa Pengecualian Unqualified Opinion
2024	Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (PricewaterhouseCoopers - PwC)	Rp390.720.000	Audit Laporan Keuangan Financial Statement Audit	-	Wajar Tanpa Pengecualian Unqualified Opinion
2023	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PricewaterhouseCoopers - PwC	Rp380.730.000	Audit Laporan Keuangan Financial Statement Audit	-	Wajar Tanpa Pengecualian Unqualified Opinion
2022	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PricewaterhouseCoopers - PwC)	Rp372.900.000	Audit Laporan Keuangan Financial Statement Audit	-	Wajar Tanpa Pengecualian Unqualified Opinion
2021	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PricewaterhouseCoopers - PwC)	Rp330.000.000	Audit Laporan Keuangan Financial Statement Audit	-	Wajar Tanpa Pengecualian Unqualified Opinion

Sistem Pengendalian Internal Perusahaan
Company Internal Control System

KIE telah memiliki Pedoman Sistem Pengendalian Intern Perusahaan (SPIP) KIE No. P-SPI-01 tanggal 20 Juli 2021. Sistem Pengendalian internal Perusahaan (SPIP) merupakan unsur penting dalam pengelolaan perusahaan dan menjadi dasar bagi kegiatan operasional perusahaan yang sehat dan aman, yang dapat membantu manajemen perusahaan meningkatkan kepatuhan Perusahaan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyelenggaraan SPIP di lingkungan KIE sebagai berikut:

1. Pemahaman Pengendalian rutin diselenggarakan oleh manajemen dan seluruh karyawan setiap hari. Risiko yang perlu dikendalikan dalam penyelenggaraan pengendalian rutin antara lain; aspek organisasi, aspek produksi, aspek jaminan kualitas, aspek pemeliharaan.
2. Pengendalian Berkala.
3. Pengelolaan Risiko.

KEBIJAKAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi (SKD) No. 22/DIR/XII-2016 tentang Pedoman Pengawasan Intern. Pedoman Pengawasan Intern ini disusun dengan referensi peraturan pada KIE dan standar-standar yang berlaku umum, sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. Per-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara.
2. Surat Keputusan Direksi (SKD) No. 22/DIR/XII-2016 tentang Pedoman Pengawasan Intern.
3. Keputusan Direksi KIE tentang Organisasi Tata Kerja KIE.
4. Piagam Satuan Pengawasan Intern (*Internal Audit Charter*) KIE.
5. SKD Standard Penyusunan Prosedur.

MEKANISME KERJA PENGENDALIAN INTERNAL

Secara umum prosedur pengendalian yang baik sesuai Pedoman Pengawasan Intern KIE, terdiri dari:

1. Penggunaan wewenang secara tepat untuk melakukan suatu kegiatan atau transaksi.
2. Pembagian tugas.
3. Pembuatan dan penggunaan dokumen dan catatan yang memadai.
4. Keamanan yang memadai terhadap aset dan catatan.
5. Pengecekan independen terhadap kinerja.

KIE has KIE's Corporate Internal Control System (SPIP) Guidelines No. P-SPI-01 dated July 20, 2021: P-SPI-01 dated July 20, 2021. The Company's internal control system (SPIP) is an important element in company management and is the basis for healthy and safe company operations, which can help company management improve the Company's compliance with prevailing laws and regulations.

The implementation of SPIP within PT Kaltim Industrial Estate is as follows:

1. Understanding Routine control is carried out by management and all employees every day. Risks that need to be controlled in the implementation of routine controls include; organizational aspects, production aspects, quality assurance aspects, and maintenance aspects.
2. Periodic Control.
3. Risk Management.

INTERNAL CONTROL SYSTEM POLICY

Based on the Decree of the Board of Directors (SKD) No. 22/DIR/XII-2016 on Internal Audit Guidelines. This Internal Audit Guideline is prepared with reference to KIE regulations and generally accepted standards, as follows:

1. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. Per-01/MBU/2011 dated August 1, 2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises.
2. Decree of the Board of Directors (SKD) No. 22/DIR/XII-2016 on Internal Audit Guidelines
3. Decree of the Board of Directors of KIE on the Organization of Work Procedures of KIE.
4. Internal Audit Charter of KIE.
5. Decree of the Board of Directors (SKD) on Standardized Procedure Development.

INTERNAL CONTROL WORKING MECHANISM

In general, a good control procedure in accordance with the KIE Internal Control Guidelines, consists of:

1. Appropriate use of authority to carry out an activity or transaction.
2. Division of duties.
3. Creation and use of adequate documents and records.
4. Adequate security of assets and records.
5. Independent checks on performance.

PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL OPERASIONAL

Beberapa pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Operasional, antara lain:

1. Pengendalian Persediaan
   Adanya kebijakan *Minimum Stock* untuk material produksi (Pasir, Koral, Semen dan BBM) dan pelaksanaan stock opname secara berkala untuk Material Produksi, Spare Part dan Properti.
2. Pengendalian Keuangan
   Terdapat SKD kewenangan otorisasi dokumen keuangan dan perbankan serta penggunaan anggaran biaya dan investasi. Pelaporan Keuangan dan Perpajakan rutin. Pemisahan fungsi Akuntansi dan Keuangan.
3. Pengendalian operasional Produksi (kualitas produk) Beton cair, WTP dan IPAL Terdapat standar yang disahkan oleh otorisator berupa spek dan komposisi yang sesuai standar mutu, secara berkala dilakukan uji mutu (Mockup test, kubus test, uji mutu air baku) dan evaluasi harga pokok produksi.

4. Pengendalian Lingkungan dan Kesehatan Kerja Menerapkan kebijakan dan prosedur yang berhubungan dengan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dan dilakukan Audit SMK3 secara berkala.

EVALUASI ATAS EFEKTIVITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Evaluasi atas penerapan Sistem Pengendalian internal Perusahaan (SPIP) pada KIE yang mencakup 5 (lima) komponen sistem pengendalian internal perusahaan yaitu: Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, dan Pemantauan telah dilaksanakan, dengan terbitnya Laporan Hasil Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Internal Perusahaan.

Evaluasi atas penerapan sistem pengendalian internal dilakukan dengan menggunakan *scorecard* yang mengacu kepada referensi dan ketentuan dari Sistem Pengendalian Internal yang dipublikasikan oleh *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* (COSO), yaitu COSO-*Internal Control Framework*.

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan, penerapan sistem pengendalian internal KIE mengalami peningkatan dengan predikat "Sangat Baik". Hal tersebut artinya sistem pengendalian internal telah distandarisasi dan telah dievaluasi secara periodik.

IMPLEMENTATION OF OPERATIONAL INTERNAL CONTROL SYSTEM

Multiple implementation of the Operational Internal Control System, among others:

1. Inventory Control
   The existence of a Minimum Stock policy for production materials (Sand, Coral, Cement and Fuel) and the implementation of a regular stock-opname for Production Materials, Spare Parts and Property.
2. Financial Control
   There is a SKD on the authority to authorize financial and banking documents and the use of cost and investment budgets. Regular financial and tax reporting. Separation of Accounting and Finance functions.
3. Operational Control Production (product quality) of liquid concrete, WTP and WWTP There are standards authorized by the authorizer in the form of specs and compositions that are in accordance with quality standards, periodically carried out quality tests (Mockup tests, cube tests, raw water quality tests) and evaluation of the cost of goods produced. Environmental Control and Occupational Health
4. Implement policies and procedures related to occupational health and safety (OHS) and conduct periodic OHSMS audits.

EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF INTERNAL CONTROL SYSTEM

Evaluation of the implementation of the Company's Internal Control System (SPIP) at KIE which includes 5 (five) components of the Company's internal control system, specifically: Control Environment, Risk Assessment, Control Activities, Information and Communication, and Monitoring have been implemented, with the issuance of the Evaluation Report on the Implementation of the Company's Internal Control System.

Evaluation of the implementation of the internal control system was conducted using a scorecard based on the references and provisions outlined in the Internal Control System published by the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO), namely the COSO-Internal Control Framework.

Based on the results of the evaluation, the implementation of KIE's internal control system showed improvement and was rated as "Very Good". It indicates that the internal control system has been standardized and is subject to periodic evaluation.

SISTEM PENGENDALIAN INTERN

INTERNAL CONTROL SYSTEM

Komponen Component	Penerapan Implementation	
Lingkungan Pengendalian: Seperangkat standar, proses dan struktur yang memberikan dasar untuk melakukan pengendalian internal. Control Environment: A set of standards, processes, and structures as the basis to conduct internal control	1. Penegakan integritas dan Nilai Etika dengan menandatangani Pakta Integritas dan Kode Etik oleh seluruh karyawan 2. Komitmen terhadap kompetensi, adanya pelatihan dari unit SDM untuk seluruh unit kerja 3. Kepemimpinan yang kondusif 4. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan 5. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat 6. Penyusunan dan penerapan Kebijakan yang sehat tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia 7. Perwujudan	1. Enforcement of integrity and Ethical Values by signing the Integrity Pact and Code of Ethics by all employees 2. Commitment to competence, training from the HR unit for all work units 3. Conducive leadership 4. Establishment of an organizational structure that suits the needs 5. Appropriate delegation of authority and responsibility 6. Formulation and implementation of a sound Policy on Human Resource Development 7. Realization
Penilaian Risiko: Dasar untuk menentukan bagaimana risiko harus dikelola oleh Perusahaan. Risk Assessment: A foundation to determine the management of risks faced by the Company.	1. Penetapan tujuan Perusahaan secara keseluruhan 2. Penetapan tujuan pada tingkatan kegiatan 3. Identifikasi risiko 4. Analisis risiko	1. Establishment of the Company's comprehensive objectives 2. Goal setting at the activity level 3. Risk identification 4. Risk analysis
Aktivitas Pengendalian: Tindakan-tindakan yang ditetapkan melalui kebijakan dan prosedur yang memastikan bahwa arahan manajemen untuk mengurangi risiko terhadap pencapaian tujuan telah dilakukan. Control Activity: Measures specified through policies and procedures to ensure the performance of managerial directives to reduce the risks against the purpose	1. Reviu atas Kinerja Perusahaan 2. Pembinaan Sumber Daya Manusia 3. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi 4. Pengendalian fisik atas aset 5. Penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja 6. Pemisahan fungsi 7. Otoritas atas transaksi dan kejadian penting 8. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas kejadian transaksi 9. Pembatasan akses dan akuntabilitas atas Sumber Daya dan pencatatannya 10. Dokumentasi yang baik atas kejadian dan transaksi pengendalian	1. Review of Company Performance 2. Human Resources Development 3. Control over information system management 4. Physical control over assets 5. Establishment and review of performance indicators and measures 6. Separation of functions 7. Authority over significant transactions and events 8. Accurate and timely recording of transaction events 9. Restriction of access to and accountability for Resources and their record keeping 10. Good documentation of control events and transactions
Informasi dan Komunikasi: Informasi yang diperlukan Perusahaan adalah informasi yang relevan dan berkualitas baik, yang berasal dari proses komunikasi antara pihak internal maupun eksternal. Information and Communication: Information required by the Company is relevant and qualified information sourced from the communication between internal or external parties.	1. Informasi 2. Komunikasi 3. Bentuk dan sarana komunikasi	1. Information 2. Communication 3. Forms and means of communication
Kegiatan Pemantauan: Kegiatan evaluasi yang digunakan untuk memastikan masing-masing dari kelima komponen ada dan berfungsi. Monitoring Activity: Evaluation measures to secure the presence and performance of the five components.	1. Pemantauan berkelanjutan 2. Evaluasi terpisah 3. Penyelesaian audit	1. Continuous monitoring 2. Split evaluation 3. Completion of audit

PERNYATAAN DIREKSI DAN/ATAU DEWAN KOMISARIS ATAS KECUKUPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Direksi dengan pengawasan Dewan Komisaris telah melakukan penelaahan atas pengendalian yang bersifat material, mencakup aspek operasional, keuangan, maupun kepatuhan, serta menelaah penerapan sistem manajemen risiko.

Direksi dan Dewan Komisaris menilai bahwa Sistem Pengendalian Intern Perusahaan telah memadai dan berjalan secara efektif dalam mendukung Tata Kelola Perusahaan yang baik. Direksi dan Dewan Komisaris akan terus memastikan bahwa Sistem Pengendalian Internal tetap diperkuat dan ditingkatkan guna mendukung pencapaian tujuan strategis Perusahaan secara berkelanjutan.

STATEMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS AND/OR THE BOARD OF COMMISSIONERS ON THE ADEQUACY OF THE INTERNAL CONTROL SYSTEM

The Board of Directors, under the supervision of the Board of Commissioners, has reviewed material controls covering operational, financial, and compliance aspects, as well as the implementation of the risk management system.

The Board of Directors and the Board of Commissioners views that the Company's Internal Control System is adequate and has operated effectively in supporting Good Corporate Governance. The Board of Directors and the Board of Commissioners will continue to ensure that the Internal Control System is further strengthened and enhanced in order to support the sustainable achievement of the Company's strategic objectives.

Manajemen Risiko
Risk Management

GAMBARAN UMUM MENGENAI MANAJEMEN RISIKO PERUSAHAAN

KIE berkomitmen untuk mengelola risiko secara efektif dan efisien untuk memastikan keberlanjutan dan pertumbuhan bisnis inti melalui pengelolaan risiko secara proaktif, berfokus pada risiko utama yang berkaitan dengan bisnis inti perusahaan serta tata kelola Perusahaan yang baik. Pengelolaan risiko Perusahaan dilakukan secara terkoordinasi dan terintegrasi.

Dalam melakukan pengawasan dan pengelolaan risiko bisnis Perusahaan, KIE telah memiliki Kebijakan Manajemen Risiko berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 17/SKD/DIR/VIII-2018. Kebijakan Manajemen Risiko digunakan untuk memastikan bahwa semua level manajemen Perusahaan selalu mempertimbangkan aspek pengelolaan risiko dalam menjalankan proses pengambilan keputusan. Kebijakan Manajemen Risiko bertujuan untuk meningkatkan budaya sadar risiko dengan menetapkan tahapan-tahapan proses standar pengelolaan risiko yang berlaku di Perusahaan.

PROFIL SATUAN MANAJEMEN RISIKO

Fungsi pengelolaan Manajemen Risiko berada di bawah Sekretaris Perusahaan c.q Departemen TKPMR, Humas & ISO sebagai pejabat kepatuhan Perusahaan. Perusahaan juga memiliki Tim Pemantau Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dan Manajemen Risiko.

Sekretaris Perusahaan memiliki fungsi sebagai Ketua Tim Pemantau Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dan Manajemen Risiko, bertanggung jawab untuk:

GENERAL OVERVIEW OF THE COMPANY'S RISK MANAGEMENT

KIE is committed to managing risks effectively and efficiently in order to ensure the sustainability and growth of its core business through proactive risk management, with a focus on key risks related to the Company's core business and Good Corporate Governance. The Company's risk management is carried out in a coordinated and integrated manner.

In supervising and managing the Company's business risks, KIE has established a Risk Management Policy pursuant to Board of Directors Decree No. 17/SKD/DIR/VIII-2018. This Risk Management Policy is intended to ensure that all levels of the Company's management consistently take risk management aspects into account in the decision-making process. The Risk Management Policy also aims to strengthen risk awareness culture by establishing standard stages of the risk management process applicable throughout the Company.

PROFILE OF RISK MANAGEMENT UNIT

The Risk Management function is under the Corporate Secretary, particularly TKPMR, Public Relations & ISO Department as the Company's compliance officer. The Company also has a Good Corporate Governance and Risk Management Implementation Monitoring Team.

The Corporate Secretary who serves as the Chairman of the Good Corporate Governance and Risk Management Implementation Monitoring Team, responsible for:

1. Menyusun rencana kerja yang diperlukan untuk memastikan Perusahaan memenuhi Pedoman Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik;
2. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Perusahaan tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku;
3. Memantau dan menjaga kepatuhan Perusahaan terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Perusahaan dengan Pihak ketiga;
4. Melakukan Evaluasi pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan dan Manajemen Risiko (*assessment*);
5. Detail profil dapat dilihat pada bagian Sekretaris Perusahaan.

1. Developing the necessary work plan to ensure the Company complies with the Good Corporate Governance Implementation Guidelines;
2. Monitoring and maintaining that the Company's business activities do not deviate from applicable regulations;
3. Monitoring and maintaining the Company's compliance with all agreements and commitments made by the Company with third parties;
4. Evaluating the implementation of Corporate Governance and Risk Management (assessment);
5. Detail profile can be seen in the Corporate Secretary profile.

Kebijakan Manajemen Risiko
Risk Management Policy

Perusahaan menyusun kebijakan manajemen risiko sebagai satu kesatuan dari proses bisnis dan pengambilan keputusan yang dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan tepat waktu berdasarkan informasi terbaik yang tersedia yang disesuaikan dengan kondisi internal dan eksternal Perusahaan. Sesuai dengan penerapan manajemen risiko berbasis SNI ISO 31000 tercantum dalam Kebijakan Manajemen Risiko yang telah dimutakhirkan dengan penandatangan oleh Direksi No. 17/ SKD/ DIR/VIII-2018 pada 10 Agustus 2018.

The Company develops risk management policy as a singular unit of business process and decision-making process that are systematic, structured, and targeted in accordance with best information available adjusted to internal and external conditions. In accordance with the implementation of SNI ISO 31000-based risk management as stated in the Risk Management Policy which has been updated with the signing by the Board of Directors No. 17/SKD/DIR/VIII-2018 on August 10, 2018.

DASAR PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Dasar penerapan manajemen risiko di KIE mengacu pada:
1. Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/ MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) pada BUMN. Kedudukan Manajemen Risiko diatur dalam bagian tersendiri yaitu BAB V, Bagian keenam tentang Manajemen Risiko Pasal 25.
2. Arahan RUPS KIE Tahun 2022; Pemegang Saham meminta peningkatan performa GCG (Manajemen Risiko termasuk di dalamnya) dengan menindaklanjuti area of improvement 2021.
3. Surat Keputusan Direksi KIE No. 30/ SKD/DIR/XI/2020 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
4. Surat Keputusan Direksi KIE No. 17/SKD/ DIR/VIII-2018 Tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko.

BASIS FOR RISK MANAGEMENT IMPLEMENTATION

The basis for implementing risk management in KIE refers to:
1. Regulation of the Minister of SOEs No. PER-01/MBU/2011 on the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) in SOEs. The position of Risk Management is regulated in a separate section, particularly Chapter V, Sixth Section on Risk Management Article 25.
2. Direction of the 2022 KIE GMS; Shareholders requested an improvement in GCG performance (including Risk Management) by following up on the 2021 areas of improvement.
3. KIE Board of Directors Decree No. 30/SKD/DIR/XI/2020 concerning the Implementation of Good Corporate Governance.
4. KIE Board of Directors Decree No. 17/SKD/DIR/VIII-2018 Regarding Risk Management Implementation Guidelines.

KERANGKA MANAJEMEN RISIKO PERUSAHAAN

Kerangka Manajemen Risiko di lingkungan KIE mengacu pada Standar ISO 31000:2018 yang memiliki prinsip:
1. Terintegrasi
   Manajemen risiko harus menjadi bagian integral dari semua aktivitas organisasi, termasuk pengambilan keputusan dan perencanaan strategis.
2. Terstruktur dan Komprehensif
   Manajemen risiko dijalankan dengan sistematis dan

COMPANY RISK MANAGEMENT FRAMEWORK

The risk management framework implemented at KIE refers to ISO 31000:2018, which is based on the following principles:
1. Integrated
   Risk management must form an integral part of all organizational activities, including decision-making and strategic planning.
2. Structured and Comprehensive
   Risk management is carried out in a systematic and

menyeluruh sehingga hasil akhirnya konsisten dan dapat diandalkan.

3. Disesuaikan
   Kerangka kerja dan proses manajemen risiko harus disesuaikan dengan konteks eksternal dan internal organisasi, serta tujuan yang ingin dicapai.
4. Inklusif
   Melibatkan pemangku kepentingan secara tepat waktu dan memadai agar pengetahuan dan perspektif mereka dapat memperkaya proses manajemen risiko.
5. Dinamis
   Risiko bersifat berubah-ubah, sehingga manajemen risiko harus mampu merespons perubahan secara cepat dan tepat.
6. Informasi Terbaik yang Tersedia
   Keputusan manajemen risiko harus didasarkan pada data historis, informasi terkini, dan proyeksi masa depan yang relevan dan dapat diakses.
7. Faktor Insani dan Budaya
   Perilaku manusia dan budaya organisasi sangat mempengaruhi efektivitas manajemen risiko di semua tingkatan.
8. Peningkatan Berkelanjutan
   Proses manajemen risiko harus terus ditingkatkan melalui pembelajaran dari pengalaman dan evaluasi berkala

comprehensive manner so that the resulting outcomes are consistent and reliable.

3. Customized
   The risk management framework and process must be tailored to the organization's external and internal context, as well as to the objectives to be achieved.
4. Inclusive
   Stakeholders are involved in a timely and appropriate manner so that their knowledge and perspectives may enrich the risk management process.
5. Dynamic
   Risks are subject to change; therefore, risk management must be capable of responding to change in a timely and appropriate manner.
6. Best Available Information
   Risk management decisions must be based on historical data, current information, and relevant and accessible future projections.
7. Human and Cultural Factor
   Human behavior and organizational culture greatly influence the effectiveness of risk management at all levels.
8. Continual Improvement
   The risk management process must be continuously improved through learning from experience and periodic evaluation.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UNIT PENGELOLA RISIKO

Berdasarkan Pedoman Manajemen Risiko, tugas dan tanggung jawab Unit Pengelola Risiko sebagai berikut:

1. Menyusun dan mengkoordinasikan strategi pengembangan kerangka kerja dan metodologi manajemen risiko agar pengelolaan risiko di Perusahaan selalu selaras dengan perkembangan bisnis Perusahaan dan dapat diaplikasikan;
2. Merencanakan dan mengusulkan kebijakan, pedoman, dan prosedur Manajemen Risiko kepada Direksi;
3. Memastikan pelaksanaan proses identifikasi, pengelolaan, penanganan, dan pemantauan risiko di setiap fungsi organisasi;
4. Memberikan arahan dan koordinasi terkait proses penentuan risiko strategis sehingga manajemen lebih fokus dalam mengelola risiko;
5. Mengoordinasikan dan memberikan arahan proses analisis kajian risiko terkait keputusan bisnis yang bersifat strategis sehingga memberikan keyakinan Manajemen dalam pengambilan keputusan;
6. Memberikan arahan dan evaluasi pada proses pengelolaan indikator kunci risiko sehingga Manajemen dapat memiliki informasi *early warning value* sebagai langkah antisipasi meminimalkan risiko;
7. Melakukan koordinasi dan pemantauan kegiatan manajemen risiko untuk memastikan bahwa seluruh rencana kerja telah dijalankan dengan baik.
8. Mengembangkan budaya sadar risiko di seluruh level Perusahaan dan para Pemangku Kepentingan.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE RISK MANAGEMENT UNIT

Based on the Risk Management Guidelines, the duties and responsibilities of the Risk Management Unit are as follows:

1. Developing and coordinating the strategy in development of the risk management framework and methodology so that risk management in the Company is always in line with the Company's business development and is applicable;
2. Planning and proposing Risk Management policies, guidelines and procedures to the Board of Directors;
3. Ensuring the implementation of risk identification, management, handling, and monitoring processes in each organizational function;
4. Providing direction and coordination related to the process of determining strategic risks so that management is more focused in managing risks;
5. Coordinating and providing direction on the risk assessment analysis process related to strategic business decisions so as to provide management confidence in decision making;
6. Providing direction and evaluation on the process of managing key risk indicators so that Management can have early warning value information as an anticipatory step to minimize risk;
7. Coordinating and monitoring risk management activities to ensure that all work plans are well executed;
8. Developing a risk-aware culture at all levels of the Company and Stakeholders.

PERAN DAN TANGGUNG JAWAB MASING-MASING PIHAK DALAM PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

1. Dewan Komisaris dan Komite GCG Manajemen Risiko, Nominasi, Remunerasi, Pengembangan SDM, dan Investasi berperan dalam mengawasi dan memberikan saran perbaikan atas penerapan Kebijakan Manajemen Risiko;
2. Direksi berperan dalam menetapkan, melaksanakan, dan mengevaluasi *soft structure* manajemen risiko, memantau program manajemen risiko, melaporkan pelaksanaan manajemen risiko kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham, memastikan manajemen risiko selaras dengan sasaran Perusahaan, dan mengembangkan budaya manajemen risiko;
3. General Manager berperan dalam mengawasi penerapan manajemen risiko di unit kerja;
4. SPI berperan dalam mengevaluasi kepatuhan dan efektivitas penerapan manajemen risiko dan menggunakan hasil manajemen risiko sebagai dasar pemeriksaan (audit berbasis risiko).

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN UNIT KERJA MANAJEMEN

Selain menerapkan proses manajemen risiko pada masing-masing unit kerja, Perusahaan juga menerapkan manajemen risiko dalam proses bisnis (investasi) dan keuangan. Pada pengajuan rencana investasi rutin yang dituangkan dalam RKAP perusahaan, masing-masing unit kerja dipersyaratkan untuk membuat *Cost & Benefit*, sedangkan untuk investasi pengembangan maupun investasi penyertaan, Divisi Bisnis diharuskan untuk membuat Kajian Risiko berkoordinasi dengan Divisi Sekretaris Perusahaan (unit kerja TKPMR) sebagai salah satu dokumen pendukung yang akan disertakan pada saat mengajukan permohonan tanggapan tertulis Dewan Komisaris dan persetujuan oleh Pemegang Saham.

Sampai dengan Tahun 2025 terdapat beberapa kajian risiko pada proses bisnis dan keuangan sebagai berikut:

1. Kajian Risiko Hibah Aset Lahan KIE untuk Pembuatan Jalan Alternatif Kelurahan Guntung;
2. Kajian Risiko Pembangunan Infrastruktur Pabrik Soda Ash;
3. Kajian Risiko Pembangunan Infrastruktur Suplai CO_2 KIE;
4. Kajian Risiko Divestasi Saham PT Kaltim Jasa Sekuriti milik KIE;
5. Kajian Risiko Divestasi Saham PT Kaltim Medika Utama milik KIE;
6. Kajian Risiko Divestasi Saham PT Bintang Sintuk Hotel milik KIE;
7. Kajian Risiko Likuidasi PT Prakarsa Nusa Sinergi;
8. Kajian Risiko Penghapusbukuan Piutang Macet KIE;

THE ROLES AND RESPONSIBILITIES OF EACH PARTY IN THE IMPLEMENTATION OF RISK MANAGEMENT

1. The Board of Commissioners and the GCG Risk Management, Nomination, Remuneration, HR Development, and Investment Committees play a role in overseeing and providing suggestions for improvements to the implementation of the Risk Management Policy;
2. The Board of Directors plays a role in establishing, implementing, and evaluating the risk management soft-structure, monitoring the risk management program, reporting the implementation of risk management to the Board of Commissioners and Shareholders, ensuring risk management is aligned with the Company's objectives, and developing a risk management culture;
3. The General Manager plays a role in overseeing the implementation of risk management in the work unit;
4. SPI plays a role in evaluating compliance and effectiveness of risk management implementation and uses risk management results as the basis for audit (risk-based audit).

MANAGEMENT WORK UNIT ACTIVITY IMPLEMENTATION REPORT

In addition to implementing risk management processes in each work unit, the Company also implements risk management in business (investment) and financial processes. In the submission of routine investment plans as outlined in the company's RKAP, each work unit is required to make a Cost & Benefit, while for development investment and investment participation, the Business Division is required to make a Risk Assessment in coordination with the Corporate Secretariat Division (TKPMR work unit) as one of the supporting documents that will be included when applying for a written response from the Board of Commissioners and approval by the Shareholders.

As of 2025, there were several risk assessments on business and financial processes as follows:

1. Risk Assessment of the Land Asset Grant of KIE for the Construction of an Alternative Road in Guntung Subdistrict;
2. Risk Assessment of the Construction of Soda Ash Plant Infrastructure;
3. Risk Assessment of the Development of CO_2 Supply Infrastructure of KIE;
4. Risk Assessment of the Divestment of PT Kaltim Jasa Sekuriti Shares Owned by KIE;
5. Risk Assessment of the Divestment of PT Kaltim Medika Utama Shares Owned by KIE;
6. Risk Assessment of the Divestment of PT Bintang Sintuk Hotel Shares Owned by KIE;
7. Risk Assessment of the Liquidation of PT Prakarsa Nusa Sinergi;
8. Risk Assessment of the Write-Off of Bad Debts of KIE;

9. Kajian Risiko Pemusnahan dan Penghapusbukuan Aset Tetap Bergerak, Persediaan Barang Mati dan Material Sisa; dan
10. Kajian Risiko Penjaminan Aset KIE untuk Digunakan sebagai Agunan Fasilitas Kredit oleh PKT.

PROFIL DAN MITIGASI RISIKO

KIE secara berkala menyusun profil risiko sebagai bagian integral dari Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP). Penetapan Risiko Utama Perusahaan dilakukan melalui kombinasi pendekatan *bottom-up*, yang berasal dari entitas/unit kerja, serta pendekatan *top-down*, di mana Satuan Manajemen Risiko terlebih dahulu memfasilitasi Direksi dalam mengidentifikasi dan memahami risiko strategis Perusahaan. Hasil identifikasi tersebut kemudian dikomunikasikan kepada seluruh entitas/unit hingga tingkat direktorat agar masing-masing dapat memahami risiko sesuai lingkup tanggung jawabnya.

Berdasarkan hasil identifikasi dan analisis, terdapat 14 risiko utama yang berpotensi menghambat pencapaian target program kerja yang telah ditetapkan. Adapun profil dan rencana mitigasi *Risk That Matters* tahun 2025 adalah sebagai berikut:

9. Risk Assessment of the Disposal and Write-Off of Movable Fixed Assets, Obsolete Inventories, and Residual Materials; and
10. Risk Assessment of the Encumbrance of KIE Assets to Be Used as Collateral for Credit Facilities by PKT.

RISK PROFILE AND MITIGATION

KIE periodically prepares a risk profile as an integral part of the Company's Work Plan and Budget (RKAP). The determination of the Company's principal risks is carried out through a combination of a bottom-up approach, originating from the relevant entities/work units, and a top-down approach, whereby the Risk Management Unit first facilitates the Board of Directors in identifying and understanding the Company's strategic risks. The results of such identification are then communicated to all entities/work units up to the directorate level so that each may understand the risks within its respective scope of responsibility.

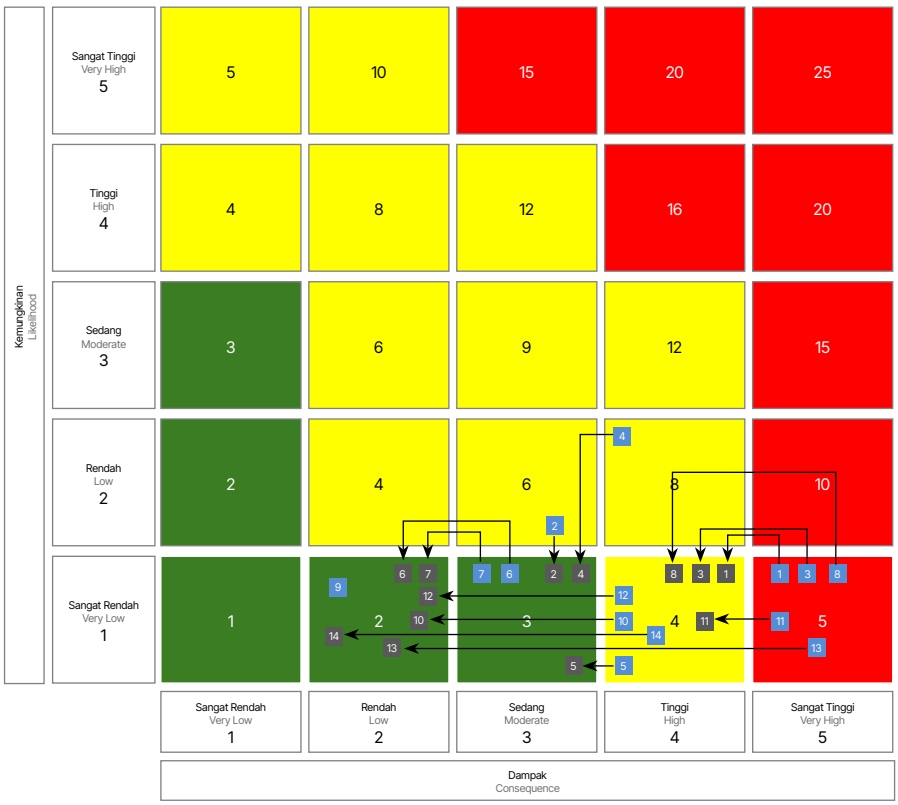
Based on the results of the identification and analysis process, there are 14 (fourteen) principal risks that may potentially hinder the achievement of the established work program targets. The Risk That Matters profile and mitigation plan for 2025 are as follows:

No	Kejadian Risiko Risk Event	Strategi Mitigasi Mitigation Strategy
1	Terdapat selisih antara pencatatan stok dengan jumlah fisik yang ada di gudang. Discrepancies between recorded inventory and actual physical stock in the warehouse	1. Melakukan audit (*stock opname*) secara berkala. 2. Penerapan SOP penerimaan dan pengeluaran barang yang ketat dan terdokumentasi. 3. Meningkatkan pengawasan aktivitas gudang dengan pengoperasian CCTV. 1. Conduct periodic audits (stock opname) 2. Implement strict and well-documented SOPs for goods receipt and issuance 3. Enhance warehouse supervision through CCTV monitoring
2	Rusaknya fasilitas-fasilitas dalam kawasan yang tidak diperbaiki tepat waktu. Damage to facilities within the industrial estate not repaired in a timely manner	1. Membuat kontrak pemeliharaan fasilitas kawasan untuk mempercepat proses pengadaan jasa perbaikan/ pemeliharaan. 2. Meningkatkan pengawasan secara berkala terhadap kondisi fasilitas. 3. Meningkatkan komunikasi secara aktif dengan tenant terkait pelayanan perusahaan sebagai pengelola kawasan industri. 1. Establish maintenance contracts to accelerate procurement of repair/maintenance services 2. Increase periodic monitoring of facility conditions 3. Strengthen active communication with tenants regarding services as the Industrial Estate Operator
3	Tidak terpenuhinya hak dan kewajiban antara tenant dan KIE (tidak sesuai dengan Tata Tertib Kawasan) serta kegiatan tenant tidak sesuai dengan master plan yang berlaku. Non-fulfillment of rights and obligations between tenants and KIE (non-compliance with estate regulations) and tenant activities not aligned with the master plan	1. Mereviu laporan lingkungan tenant dan memastikan kesesuaian dengan izin lingkungan yang dimiliki. 2. Melakukan pengawasan/patroli terhadap kegiatan tenant untuk memastikan kesesuaian dengan masterplan dan ketentuan kawasan. 1. Review tenant environmental reports and ensure compliance with environmental permits 2. Conduct supervision/patrols to ensure alignment with the master plan and estate regulations

No	Kejadian Risiko Risk Event	Strategi Mitigasi Mitigation Strategy
4	Kerugian proyek Project losses	1. Pembuatan RAB berdasarkan standar harga satuan yang ditetapkan pemerintah (SNI/AHSP). 2. Membuat database harga satuan yang kompetitif dan selalu diupdate di dalam sistem. 3. Melaksanakan dan monitoring proyek dengan efektif dan efisien untuk penggunaan biaya. 1. Prepare cost estimates (RAB) based on government standard unit prices (SNI/AHSP). 2. Develop and regularly update a competitive unit price database in the system. 3. Execute and monitor projects effectively and efficiently.
5	Kualitas material batu dan pasir dari supplier tidak sesuai standar. Stone and sand material quality from suppliers does not meet standards	1. Memperketat penentuan spesifikasi minimum yang dapat diterima serta menentukan metode yang baku dalam pengujian kualitas. 2. Dilakukan uji mutu material sebelum dan setelah dilakukan pengiriman oleh tenaga yang kompeten. 3. Kunjungan lapangan untuk memastikan treatment supplier terhadap material (ke lokasi sumber material). 1. Strengthen minimum specification requirements and standardized testing methods 2. Conduct quality testing before and after delivery by competent personnel 3. Perform site visits to suppliers (to material sources location)
6	Mutu produk beton tidak memenuhi standar. Concrete product quality does not meet standards	1. Melakukan *trial mix* setiap kedatangan material bahan baku untuk memastikan komposisi campuran dapat memenuhi standar kualitas beton. 2. Pengawasan ketat terhadap bahan baku, proses pencampuran, dan uji mutu beton secara berkala 1. Conduct trial mixes for each arrival of raw materials to ensure proper composition 2. Implement strict supervision over raw materials, mixing processes, and periodic quality testing
7	Terjadi gangguan keamanan terhadap tenant di gedung KIE. Security disturbances affecting tenants within KIE premises	1. Upgrade sistem dan infrastruktur keamanan (Kontrol akses, dan pola pengamanan). 2. Audit keamanan secara berkala dan review kebijakan keamanan yang berlaku. 3. Pelatihan rutin & simulasi keadaan darurat bagi petugas keamanan 1. Upgrade security systems and infrastructure (access control and security patterns) 2. Conduct periodic security audits and policy reviews 3. Provide regular training and emergency simulations for security personnel
8	Tidak dimenangkannya proses tender pekerjaan yang telah diikuti Failure to win participated tenders	1. Melakukan evaluasi komponen biaya secara detail untuk memastikan keakuratan dan kewajaran harga penawaran. 2. Melakukan benchmarking harga sebelum menyusun penawaran. 1. Conduct detailed cost component evaluations to ensure accurate and reasonable pricing 2. Perform price benchmarking prior to proposal submission
9	Tidak tercapainya PROPER HIJAU yang ditargetkan Perusahaan Failure to achieve the targeted GREEN PROPER rating	1. Berkoordinasi secara rutin dengan DLH Bontang, Provinsi dan KLHK terkait penilaian PROPER. 2. Melakukan pemantauan dan pengelolaan lingkungan secara berkala sesuai dengan periode waktu yang ditentukan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 3. Melakukan review terhadap dokumen lingkungan dengan cara pelaporan rutin setiap semester kepada instansi pemerintah terkait 1. Coordinate regularly with DLH Bontang, Provincial authorities, and KLHK regarding PROPER assessment 2. Conduct periodic environmental monitoring and management in accordance with regulations 3. Review environmental documents and report regularly to relevant government agencies

No	Kejadian Risiko Risk Event	Strategi Mitigasi Mitigation Strategy
10	Dicabutnya sertifikat SMK3 dan *Zero Accident* pada periode tahun penilaian. Revocation of OHSMS and Zero Accident certifications during the assessment period	1. Koordinasi dan review manajemen atas kinerja setiap departemen dan penyelesaian tindak lanjut setiap masalah yang timbul pada rapat P2K3. 2. Sertifikasi Tim penanggulangan tanggap darurat. 3. Memberikan pemahaman tentang K3 dengan "*Safety Induction*" dan/atau "*Safety Refresh*" secara periodik 1. Conduct management coordination and review of departmental performance and follow-up actions in P2K3 meetings 2. Certify emergency response teams 3. Provide periodic OHS understanding through Safety Induction and/or Safety Refresh training
11	Terdapat Keterlambatan dan/atau gagal pembayaran piutang oleh rekanan atau *customer*. Delays and/or failure in receivables collection from partners or customers	Melakukan *due diligence* lebih mendalam terhadap kondisi keuangan pihak ketiga untuk memitigasi risiko ketidaksesuaian atau kesalahan dalam jaminan pembayaran. Conduct more in-depth due diligence on third parties' financial conditions to mitigate payment risks
12	Keterlambatan penyediaan dana untuk operasional dan investasi perusahaan. Delays in funding availability for operations and investments	Melakukan monitoring kondisi pasar dan sumber pendanaan secara terus-menerus untuk memastikan ketersediaan dana tepat waktu. Continuously monitor market conditions and funding sources to ensure timely availability of funds
13	Terganggunya pelaksanaan proyek pengembangan dikarenakan tidak teridentifikasinya risiko Disruptions in development project execution due to unidentified risks	1. Melakukan evaluasi risiko secara periodik dan membentuk forum koordinasi risiko. 2. Meningkatkan kapasitas SDM terkait manajemen risiko melalui pelatihan 1. Conduct periodic risk evaluations and establish risk coordination forums 2. Enhance Human Resources capacity in risk management through training
14	Terjadi kesalahan pengambilan keputusan oleh manajemen/ Direksi. Errors in decision-making by management/Board of Directors	Penguatan implementasi pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan berbasis digital, agar meningkatkan kualitas data & analisis melalui sistem informasi manajemen. Strengthen the implementation of digitally based corporate governance to improve data quality and analysis through management information systems

PETA *RISK THAT MATTERS* UNIT KERJA TAHUN 2025
RISK THAT MATTERS WORK UNIT MAPPING IN 2025



IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO UNIT KERJA

Hingga 31 Desember Tahun 2025, unit kerja memiliki 149 risiko dengan rincian 35 risiko HIGH, 106 risiko MEDIUM, dan 8 risiko LOW. Hasil pemetaan manajemen risiko unit kerja dapat kami sampaikan sebagai berikut:

IMPLEMENTATION OF RISK MANAGEMENT AT THE WORK UNIT LEVEL

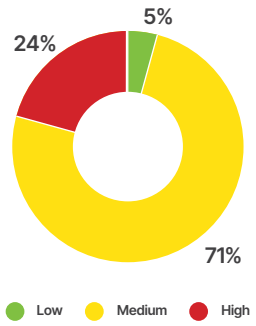
As of December 31, 2025, the work units identified a total of 149 risks, consisting of 35 HIGH risks, 106 MEDIUM risks, and 8 LOW risks. The mapping results of risk management at the work unit level are presented as follows:

IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO UNIT KERJA
IMPLEMENTATION OF RISK MANAGEMENT WORK UNITS

A. TINGKAT RISIKO
A. RISK LEVEL

NO	Tingkat Risiko Risk Level	Jumlah Total
1	Low	8
2	Medium	106
3	High	35
	Total	149

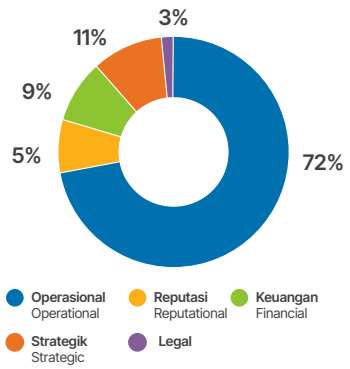
TINGKAT RISIKO
RISK LEVEL



B. SUMBER RISIKO
B. RISK SOURCE

NO	Tingkat Risiko Risk Source	Jumlah Total
1	**Risiko Operasional** Operational Risks	107
2	**Risiko Reputasi** Reputational Risks	8
3	**Risiko Keuangan** Financial Risks	13
4	**Risiko Strategik** Strategical Risks	17
5	**Risiko Legal** Legal Risks	4
	Total	149

SUMBER RISIKO
RISK SOURCE



Dari sumber risiko di atas, persentase terbesar adalah risiko-risiko yang bersumber dari kegiatan operasional sebesar 72%. Risiko operasional adalah risiko kerugian langsung maupun tidak langsung yang terkait dengan potensi penyimpangan hasil dari kegiatan operasional dan administratif yang antara lain disebabkan tidak cukupnya sumber daya manusia, kesalahan manusia, kegagalan sistem dan faktor lainnya. Berdasarkan hal ini, pelaksanaan kegiatan operasional di masing-masing unit kerja harus dilakukan pemantauan/pengawasan secara konsisten dan tetap mengacu kepada kebijakan/prosedur yang berlaku agar target/sasaran yang telah ditentukan perusahaan dapat tercapai.

Of the risk sources described above, the largest proportion consists of risks arising from operational activities, accounting for 72%. Operational risk refers to the risk of direct or indirect loss associated with potential deviations in the outcomes of operational and administrative activities, which may, among others, be caused by insufficient human resources, human error, system failures, and other factors. Accordingly, the implementation of operational activities in each work unit must be monitored/supervised consistently and must continue to refer to applicable policies/procedures so that the targets/objectives set by the Company can be achieved.

PERKEMBANGAN PROFIL RISIKO UNIT KERJA

Terdapat dinamika jumlah risiko berupa penurunan dan kenaikan risiko-risiko yang dikelola di masing-masing unit kerja. Profil risiko unit kerja 31 Desember tahun 2025 sebagai berikut:

DEVELOPMENT OF THE WORK UNIT RISK PROFILE

There were fluctuations in the number of risks managed by each work unit, both in terms of decreases and increases. The work unit risk profile as of December 31, 2025 is as follows:

No	Tingkat Risiko Risk Level	Awal Beginning	Akhir Ending	Status (Naik/Turun) Status (Increase/Decrease)
1	Risiko Rendah Low Risk	8	124	Naik Increase
2	Risiko Sedang Medium Risk	106	21	Turun Decrease
3	Risiko Tinggi High Risk	35	4	Turun Decrease
	Total	**149**	**149**	

TINJAUAN ATAS EFEKTIVITAS SISTEM MANAJEMEN RISIKO

Pada tahun 2025, Perusahaan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas Sistem Manajemen Risiko yang telah diterapkan. Evaluasi ini dilakukan untuk memastikan bahwa sistem tersebut tetap relevan dan mampu merespons perubahan dalam lingkungan bisnis maupun jenis risiko yang dihadapi. Perusahaan menilai kinerja sistem dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko secara menyeluruh. Selain itu, evaluasi ini juga menjadi sarana untuk mengidentifikasi area yang masih memerlukan perbaikan guna meningkatkan efektivitas sistem secara keseluruhan. Tinjauan atas efektivitas Sistem Manajemen Risiko ini menjadi langkah strategis bagi Perusahaan dalam menjaga kesinambungan operasional dan mendukung pencapaian tujuan jangka panjang.

PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS ATAS KECUKUPAN SISTEM MANAJEMEN RISIKO

Direksi dan Dewan Komisaris menyatakan bahwa Sistem Manajemen Risiko yang diterapkan Perusahaan sepanjang tahun 2025 telah memadai dalam menghadapi dinamika dan kompleksitas lingkungan bisnis yang terus berubah. Pernyataan ini didasarkan pada hasil tinjauan menyeluruh terhadap efektivitas sistem yang telah dilaksanakan.

REVIEW OF THE EFFECTIVENESS OF THE RISK MANAGEMENT SYSTEM

In 2025, the Company conducted a comprehensive evaluation of the effectiveness of the Risk Management System that had been implemented. This evaluation was carried out to ensure that the system remained relevant and capable of responding to changes in the business environment as well as to the types of risks faced by the Company. The Company assessed the performance of the system in identifying, analyzing, and managing risks comprehensively. In addition, the evaluation also served as a means of identifying areas that still required improvement in order to enhance the overall effectiveness of the system. This review of the effectiveness of the Risk Management System constitutes a strategic step by the Company in maintaining operational continuity and supporting the achievement of its long-term objectives.

STATEMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS AND THE BOARD OF COMMISSIONERS ON THE ADEQUACY OF THE RISK MANAGEMENT SYSTEM

The Board of Directors and the Board of Commissioners state that the Risk Management System implemented by the Company throughout 2025 was adequate in addressing the dynamics and complexity of the continuously evolving business environment. This statement is based on the results of a comprehensive review of the effectiveness of the system that has been carried out.

Pengadaan Barang & Jasa
Procurement of Goods and Services

Pengadaan barang dan jasa merupakan bagian penting dalam mendukung kelancaran kegiatan operasional Perusahaan. Prinsip-prinsip dasar yang harus dipenuhi dalam setiap tahapan pengadaan, mulai dari pemilihan penyedia, hingga penerbitan dokumen kontrak adalah efisiensi, efektivitas, kompetitif, transparan, serta harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku, guna memastikan ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan untuk mendukung pencapaian target dan tujuan perusahaan. Selain itu, pengadaan juga diarahkan untuk mendorong efisiensi biaya, menjamin kualitas barang dan jasa, serta meminimalkan risiko operasional.

The procurement of goods and services is an important part of supporting the smooth conduct of the Company's operational activities. The fundamental principles that must be fulfilled at every stage of procurement, from vendor selection, until the issuance of contract documents, effectiveness, competitiveness, transparency and such procurement must comply with the applicable regulations in order to ensure the availability of the resources required to support the achievement of the Company's targets and objectives. In addition, procurement is also directed toward promoting cost efficiency, ensuring the quality of goods and services, and minimizing operational risks.

KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

Kebijakan Pengadaan didasari oleh pemenuhan barang/jasa yang dibutuhkan melalui mekanisme yang benar dan independen (tidak mengandung unsur benturan kepentingan), dengan menjunjung prinsip-prinsip transparansi, responsibilitas, kemandirian dan kewajaran. Kebijakan pengadaan merupakan dasar bagi penyusunan seluruh kebijakan dan pengambilan keputusan Perusahaan yang terkait dengan proses pengadaan barang dan jasa.

KIE telah memiliki kebijakan pengadaan barang dan jasa yang diatur dalam beberapa prosedur, diantaranya Prosedur Pengadaan Barang No. PPU-PCR-01B-Rev1 yang dimutakhirkan pada tanggal 25 Juni 2021 dan Prosedur Pengadaan Jasa No. PPU-PCR-01-Rev4 yang dimutakhirkan pada tanggal 25 Juni 2021.

POLICY ON THE PROCUREMENT OF GOODS AND SERVICES

The procurement policy is based on fulfilling the Company's goods and services requirements through proper and independent mechanisms, free from any conflict of interest, while upholding the principles of transparency, responsibility, independence, and fairness. The procurement policy serves as the basis for the preparation of all Company policies and decision-making processes related to the procurement of goods and services.

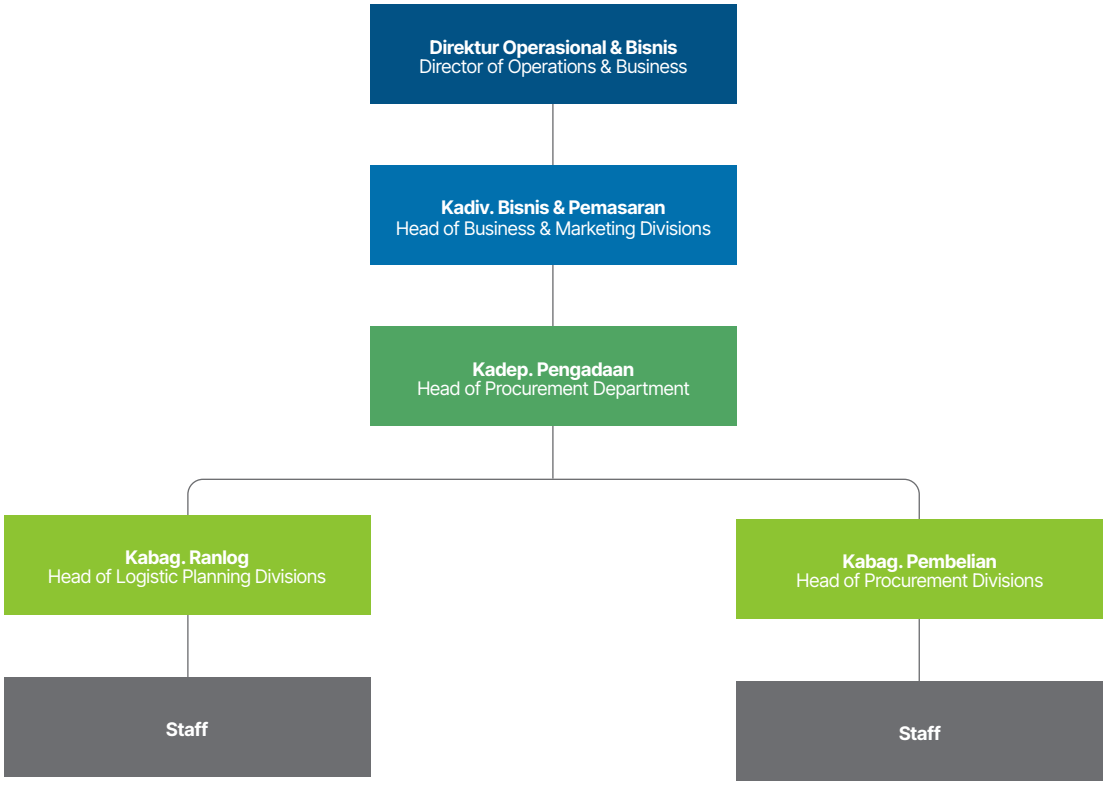
KIE has established procurement policies for goods and services as set out in several procedures, including the Goods Procurement Procedure No. PPU-PCR-01B-Rev1, last updated on June 25, 2021, and the Services Procurement Procedure No. PPU-PCR-01-Rev4, last updated on June 25, 2021.

PENGELOLA PENGADAAN BARANG DAN JASA

Pengelola pengadaan barang dan jasa di KIE dilakukan secara terpusat dalam satu Departemen Pengadaan. Sesuai dengan struktur organisasi KIE susunan pengelola pengadaan barang dan jasa adalah sebagai berikut:

MANAGEMENT OF GOODS AND SERVICES PROCUREMENT

The management of goods and services procurement at KIE is centralized under a single Procurement Department. In accordance with KIE's organizational structure, the composition of the goods and services procurement management function is as follows:



METODE PENGADAAN BARANG DAN JASA

Sesuai dengan Prosedur Pengadaan Barang No. PPU-PCR-01B-Rev1 dan Prosedur Pengadaan Jasa No. PPU-PCR-01-Rev4 metode pengadaan barang dan jasa di KIE adalah sebagai berikut:

PENGADAAN BARANG

1. Pemilihan Langsung
   Adalah metode pemilihan penyedia barang dengan membandingkan sebanyak-banyaknya penawaran atau sekurang-kurangnya 3 (tiga) penawaran yang masuk dalam database Perusahaan.
2. Penunjukan Langsung
   Adalah metode pemilihan penyedia barang yang dilakukan dengan menunjuk langsung 1 (satu) atau lebih penyedia barang atau melalui *beauty contest*. Penunjukan langsung dilakukan tanpa melalui pelelangan atau pemilihan dan penyedia barang yang ditunjuk dinilai mampu melaksanakan pekerjaan dan/atau memenuhi kualifikasi.
3. Pengadaan Langsung
   Adalah metode pemilihan penyedia barang dengan pembelian langsung terhadap barang yang ada di pasar, dengan demikian nilainya berdasarkan harga pasar dan disertai dengan tanda bukti pembelian dan kuitansi, dilakukan tanpa dokumen pengadaan, dibuktikan dengan surat instruksi kerja kepada pihak penyedia barang dan pembayarannya dilakukan secara tunai atau berjangka.

METHOD OF PROCUREMENT OF GOODS AND SERVICES

In accordance with the Goods Procurement Procedure No. PPU-PCR-01B-Rev1 and Services Procurement Procedure No. PPU-PCR-01-Rev4 the method of procurement of goods and services at KIE is as follows:

GOODS PROCUREMENT

1. Direct Election
   Is a method of selecting goods providers by comparing as many as possible offers or at least 3 (three) offers that are included in the Company database.

2. Direct Appointment
   Is a method of selecting goods providers by directly appointing 1 (one) or more goods providers or through a beauty contest. Direct appointment is carried out without going through an auction or election and the appointed goods provider is considered capable of carrying out the work and/or meeting the qualifications.
3. Direct Procurement
   Is a method of selecting goods providers by direct purchase of goods on the market, thus the value is based on market prices and is accompanied by proof of purchase and receipts, carried out without procurement documents, proven by a work instruction letter to the goods provider and payment is made in cash or term.

PENGADAAN JASA

1. Pemilihan Langsung
   Adalah metode pemilihan penyedia jasa dengan membandingkan sebanyak-banyaknya penawaran atau sekurang-kurangnya 3 (tiga) penawaran yang masuk dalam database Perusahaan.
2. Penunjukan Langsung
   Adalah metode pemilihan penyedia jasa yang dilakukan dengan menunjuk langsung 1 (satu) atau lebih penyedia barang atau melalui *beauty contest*. Penunjukan langsung dilakukan tanpa melalui pelelangan atau pemilihan dan penyedia jasa yang ditunjuk dinilai mampu melaksanakan pekerjaan dan/atau memenuhi kualifikasi.
3. Pengadaan Langsung
   Adalah metode pemilihan penyedia jasa dengan pembelian langsung terhadap jasa yang ada di pasar, dengan demikian nilainya berdasarkan harga pasar dan disertai dengan tanda bukti pembelian dan kuitansi, dilakukan tanpa dokumen pengadaan, dibuktikan dengan surat instruksi kerja kepada pihak penyedia jasa dan pembayarannya dilakukan secara tunai atau berjangka.

SERVICES PROCUREMENT

1. Direct Election
   Is a method of selecting service providers by comparing as many as possible offers or at least 3 (three) offers that are included in the Company database.

2. Direct Appointment
   Is a method of selecting service providers by directly appointing 1 (one) or more goods providers or through a beauty contest. Direct appointment is carried out without going through an auction or election and the appointed service provider is considered capable of carrying out the work and/or meeting the qualifications.
3. Direct Procurement
   Is a method of selecting service providers by direct purchase of goods on the market, thus the value is based on market prices and is accompanied by proof of purchase and receipts, carried out without procurement documents, proven by a work instruction letter to the service provider and payment is made in cash or term.

KEGIATAN PENGADAAN BARANG DAN JASA TAHUN 2025

Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa bertanggung jawab atas pemenuhan kegiatan operasional KIE sepanjang tahun 2025. Berikut adalah jumlah pengadaan yang dilakukan KIE di tahun 2025:

GOODS AND SERVICES PROCUREMENT ACTIVITIES IN 2025

The Goods and Services Procurement Unit is responsible for the implementation of KIE operational activities throughout 2025. The following is the number of procurements carried out by KIE in 2025:

URAIAN DESCRIPTION	JUMLAH PERMINTAAN (PP/PPP) TOTAL REQUEST (PP/PPP)	JUMLAH (OP/SPK) TOTAL (OP/SPK)	PERSENTASE PERCENTAGE
Pengadaan Barang Procurement of Goods	178	236	132,58%*
Pengadaan Jasa Procurement of Services	157	145	92,36%**

Keterangan | Note:
PP : Permintaan Pembelian | Purchase Request
PPP : Permintaan Pelaksanaan Pekerjaan | Job Execution Request
OP : Order Pembelian | Purchase Orders
SPK : Surat Perintah Kerja | Work Orders

* Realisasi PO lebih tinggi dibandingkan jumlah PP karena dalam satu PP dapat diterbikan menjadi beberapa PO.
** Realisasi SPK lebih rendah dibandingkan jumlah PPP karena sebagian pekerjaan mengalami carry over dan akan dilaksanakan pada tahun 2026.
* The PO realization is higher than the number of PPs because one PP can be issued as several POs.
** The SPK realization is lower than the number of PPPs due to some of the work has been carried over and will be implemented in 2026.

Selain itu telah dilakukan efisiensi selama tahun 2025 dalam proses pengadaan Barang & Jasa :

In addition, efficiencies have been made during 2025 in the procurement process of Goods & Services:

URAIAN DESCRIPTION	JUMLAH PERMINTAAN (PP/PPP) TOTAL REQUEST (PP/PPP)	REALISASI (OP/SPK) REALIZATION (OP/SPK)	EFISIENSI EFFICIENCY	PERSENTASE PERCENTAGE
Pengadaan Barang Procurement of Goods	Rp39.152.096.944	Rp29.465.612.684	Rp9.686.484.260	24,74%
Pengadaan Jasa Procurement of Service	Rp94.366.314.392	Rp86.356.467.480	Rp8.009.846.912	8,49%

Keterangan | Note:
PP : Permintaan Pembelian | Purchase Request
PPP : Permintaan Pelaksanaan Pekerjaan | Job Execution Request
OP : Order Pembelian | Purchase Orders
SPK : Surat Perintah Kerja | Work Orders

SURVEI KEPUASAN PEMASOK

Sebagai upaya Perusahaan meningkatkan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, KIE melakukan survei kepuasan pemasok untuk mengetahui tingkat kepuasan pemasok dalam bekerja sama dengan KIE. Survei kepuasan pemasok telah dilakukan kepada vendor yang mendapatkan *Purchase Order* (PO) atau Surat Perintah Kerja (SPK), diberikan bersamaan dengan penerbitan *Purchase Order* (PO) atau Surat Perintah Kerja (SPK).

Hasil tingkat kepuasan pemasok tahun 2025 sebesar 98,97% atau "SANGAT PUAS" terhadap kinerja pelaksanaan pengadaan di KIE.

AUDIT PENGADAAN BARANG DAN JASA

KIE melaksanakan audit pengadaan barang dan jasa untuk mengetahui dan memastikan bahwa kegiatan pengadaan barang dan jasa telah sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditentukan serta dilakukan secara efektif dan efisien. Audit dilakukan melingkupi kegiatan operasional, penerimaan dan pergudangan, maupun proses pengadaan barang dan jasa. Audit dilakukan oleh tim Audit Internal KIE.

TINDAK LANJUT KELUHAN PEMASOK

Terdapat keluhan dari pemasok dalam hal pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yaitu penggunaan *e-procurement* untuk menghemat waktu pelaksanaan tender, efektif, efisien dan lebih transparan. Saat ini KIE belum menggunakan *e-procurement* dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dikarenakan infrastruktur teknologi. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan sistem *e-procurement* menjadi agenda yang akan dilaksanakan dalam beberapa tahun ke depan.

SUPPLIER SATISFACTION SURVEY

In order to improve the implementation of the Company's procurement of goods and services, KIE conducts a supplier satisfaction survey to determine the level of supplier satisfaction in cooperating with KIE. Supplier satisfaction surveys have been conducted to vendors who have received Purchase Orders (PO) or Work Orders (SPK), given together with the issuance of Purchase Orders (PO) or Work Orders (SPK).

The results of the supplier satisfaction level in 2025 is 98,97% or "VERY SATISFIED" on the performance of procurement implementation in KIE.

GOODS AND SERVICES PROCUREMENT AUDIT

KIE conducts goods and services procurement audits to determine and ensure that goods and services procurement activities are in accordance with predetermined policies and procedures and are carried out effectively and efficiently. Audits are conducted on operational, receiving and warehousing activities, as well as the procurement process of goods and services. Audits are conducted by KIE's Internal Audit team.

FOLLOW-UP ON SUPPLIER COMPLAINTS

There are complaints from suppliers in terms of the implementation of the procurement of goods and services, namely the use of e-procurement to save time for tendering, be effective, efficient and more transparent. Currently, KIE has not used e-procurement in the implementation of procurement of goods and services due to technological infrastructure. The implementation of goods and services procurement with the e-procurement system is an agenda that will be implemented in the next few years.

Whistleblowing System
Whistleblowing System

Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System* (WBS)) adalah sistem pelaporan yang mendorong peran aktif insan KIE dan pihak eksternal Perusahaan untuk menyampaikan pengaduan mengenai dugaan tindak pelanggaran yang dilakukan oleh Insan KIE. Perusahaan dapat mengambil langkah-langkah yang cepat dan tepat untuk menghindarkan/menyelesaikan terjadinya penyimpangan di lingkungan Perusahaan serta mengurangi risiko yang dihadapi oleh Perusahaan akibat dari pelanggaran baik dari segi keuangan, operasi, hukum, keselamatan kerja dan image. WBS KIE dapat diakses pada alamat https://lapor.kie.co.id.

KEBIJAKAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM*

Implementasi WBS di KIE telah dilakukan di tahun 2020. KIE telah mempunyai Pedoman Pelaporan Dugaan Penyimpangan (WBS) yang ditandatangani oleh Dewan Komisaris dan Direksi dan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris dan Direksi No. KEP 03/DEKOM/KIE/VI/2020-13/SKD/DIR/KIE/V-2020 tanggal 29 Mei 2020. Pedoman Penerapan Sistem Pengaduan Pelanggaran (WBS) berisikan kebijakan umum yang terdiri dari prinsip dasar, kerahasiaan, sanksi, perlindungan bagi pelapor, tindak lanjut pemantauan serta prosedur penanganan pengaduan, dan bagan alur penanganan pengaduan.

LINGKUP KEBIJAKAN WBS DAN CAKUPAN PELAPORAN

1. Penyimpangan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan lain di luar Perusahaan
3. Pemerasan
4. Perbuatan Curang
5. Benturan Kepentingan
6. Gratifikasi yang dilarang

PIHAK YANG MENGELOLA PENGADUAN

Tugas dan tanggung jawab pengelola WBS antara lain menerima pengaduan, mengadministrasikan pengaduan dugaan penyimpangan Kode Etik Perusahaan, menerima laporan hasil konfirmasi dan klarifikasi, menjaga kerahasiaan identitas pelapor dan terlapor, serta segala sesuatu yang berhubungan dengan laporan dugaan penyimpangan. Pengelola Pengaduan Pelanggaran (WBS), adalah unit yang ditunjuk oleh Perusahaan untuk menangani setiap pelaporan pelanggaran melalui *web* aplikasi pengaduan, dan selama belum ada penunjukan, maka unit Pengelola Pengaduan Pelanggaran (WBS) dilakukan oleh Sekretaris Perusahaan. Sesuai Surat Keputusan Direksi No. 12/SKD/DIR/ KIE/V-2020

The Whistleblowing System (WBS) is a reporting mechanism that encourages the active participation of KIE personnel and external parties to report alleged violations committed by KIE personnel. Through this system, the Company is able to take prompt and appropriate measures to prevent and/or address irregularities within the Company and to reduce the risks arising from such violations, including financial, operational, legal, occupational safety, and reputational risks. KIE's WBS can be accessed at https://lapor.kie.co.id.

WHISTLEBLOWING SYSTEM POLICY

The implementation of WBS at KIE has been in place since 2020. KIE has established the Whistleblowing Reporting Guidelines, which were jointly signed by the Board of Commissioners and the Board of Directors, and ratified through Joint Decree No. KEP-03/DEKOM/KIE/VI/2020- 13/SKD/DIR/KIE/ V-2020, dated May 29, 2020. The Whistleblowing System Guidelines contain general policies including: fundamental principles, confidentiality, sanctions, whistleblower protection, follow-up monitoring procedures, as well as the complaint handling procedure and workflow.

WBS POLICY SCOPE AND REPORTING COVERAGE

1. Deviations from applicable laws and regulations
2. Abuse of position for other interests outside the Company
3. Extortion
4. Fraudulent Acts
5. Conflict of Interest
6. Prohibited Gratification

PARTY RESPONSIBLE FOR GRIEVANCE MANAGEMENT

The duties and responsibilities of the WBS manager include receiving complaints, administering complaints of alleged violations of the Company's Code of Conduct, receiving reports on the results of confirmation and clarification, maintaining the confidentiality of the identity of the reporter and the reported party, as well as everything related to reports of alleged irregularities. Whistleblowing management, is a unit appointed by the Company to handle any violation reporting through the complaint web application, and as long as there is no appointment, the Whistleblowing management unit is carried out by the Corporate Secretary. In accordance with the Decree of the Board of Directors No. 12/SKD/DIR/ KIE/V-2020

tanggal 29 Mei 2020 dibentuk Tim Investigasi Pengaduan Pelanggaran (WBS) KIE. Susunan Tim Investigasi WBS (apabila penerima pengaduan Direktur Utama dalam hal ini terlapor adalah Insan Perusahaan selain Direksi), sebagai berikut:

Penanggung Jawab	: Direktur Utama
Koordinator	: SPI
Anggota	: Sekretaris Perusahaan

Apabila penerima pengaduan Komisaris Utama dalam hal ini terlapor adalah Direksi, maka Komisaris Utama dapat menugaskan Komite Audit untuk proses selanjutnya.

PIHAK YANG DAPAT MELAPOR DAN DILAPORKAN DALAM *WHISTLEBLOWING SYSTEM*

Seluruh Insan KIE, yaitu Dewan Komisaris, Direksi, dan karyawan Perusahaan hingga pemangku kepentingan lainnya wajib melaporkan adanya dugaan penyimpangan. Sementara itu, pihak yang dapat dilaporkan sebagai pelaku dugaan penyimpangan adalah Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh karyawan KIE.

SOSIALISASI *WHISTLEBLOWING SYSTEM*

Melalui Sekretaris Perusahaan, KIE melakukan sosialisasi mengenai Pedoman Pelaporan Dugaan Penyimpangan (WBS) kepada Insan KIE dan juga Pemangku Kepentingan di luar KIE. Sosialisasi bertujuan untuk memberikan informasi bahwa Perusahaan telah memiliki media pelaporan dugaan penyimpangan yang tanggap, transparan, aman, dan bertanggung jawab. Kegiatan sosialisasi melalui berbagai media antara lain publikasi dalam situs *web* Perusahaan, Portal Perusahaan, dan surel karyawan.

AKUNTABILITAS PROSEDUR SISTEM PELAPORAN DUGAAN PENYIMPANGAN

KIE juga telah memiliki prosedur baku Penanganan Pengaduan Pelanggaran Kode Etik Perusahaan (*Whistleblowing System*) dengan No. PPU-WBS-001. Prosedur tersebut mengatur tentang pelanggaran Kode Etik Perusahaan dan di dalamnya termasuk masalah integritas, antara lain seperti penerimaan suap, korupsi, pemberian dan penerimaan hadiah, serta kegiatan lainnya yang patut diduga dapat merugikan dan mencemarkan nama baik Perusahaan. Tata cara penyampaian laporan pelanggaran dan pihak yang mengelola pengaduan adalah sebagai berikut:

1. Setiap Insan KIE dan Pemangku Kepentingan lainnya dapat melaporkan pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan, Direksi, dan Komisaris melalui media pelaporan yang tersedia.
2. Hirarki otoritas yang menangani dugaan pengaduan penyimpangan di KIE adalah sebagai berikut:

dated May 29, 2020, the KIE Whistleblowing Investigation Team was formed. The composition of the WBS Investigation Team (if the recipient of the President Director's complaint in this case the reported person is a Company Personnel other than the Board of Directors), as follows:

Person in Charge	: President Director
Coordinator	: SPI
Member	: Corporate Secretary

If the recipient of the President Commissioner's complaint, in this case the reported party, is the Board of Directors, then the President Commissioner can assign the Audit Committee for further processing.

PARTIES WHO CAN REPORT AND BE REPORTED IN THE WHISTLEBLOWING SYSTEM

All KIE personnel, particularly the Board of Commissioners, Board of Directors, and employees of the Company and other stakeholders are required to report any suspected irregularities. Meanwhile, the parties that can be reported as perpetrators of alleged irregularities are the Board of Commissioners, Board of Directors, and all KIE employees.

SOCIALIZATION OF WHISTLEBLOWING SYSTEM

Through the Corporate Secretary, KIE socializes the Guidelines for Whistleblowing to KIE personnel and stakeholders outside KIE. The socialization aims to provide information that the Company has a media for reporting suspected irregularities that is responsive, transparent, safe, and responsible. Socialization activities through various media include publication on the Company's website, Company Portal, and employee email.

ACCOUNTABILITY OF PROCEDURES FOR REPORTING SYSTEM OF ALLEGED IRREGULARITIES

KIE also has a standard procedure for handling complaints of violations of the Company's Code of Conduct (Whistleblowing System) with No. PPU-WBS-001. The procedure regulates violations of the Company's Code of Conduct and includes integrity issues, such as accepting bribes, corruption, giving and receiving gifts, and other activities that are suspected of harming and defaming the Company. The procedures for submitting reports of violations and the parties who manage complaints are as follows:

1. Every KIE personnel and other Stakeholders can report violations committed by employees, Directors, and Commissioners through the available reporting media.

2. The hierarchy of authority that handles alleged complaints of irregularities in KIE is as follows:

No	PIHAK TERLAPOR REPORTED PARTY	PIHAK YANG MENANGANI HANDLING PARTY	PENERIMA HASIL TINDAK LANJUT RECIPIENT OF FOLLOW-UP RESULTS
1	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Pemegang Saham Shareholders	Pemegang Saham Shareholders
2	Direksi Directors	Dewan Komisaris/ Komite Audit Board of Commissioners/Audit Committee	Dewan Komisaris/ Komite Audit Board of Commissioners/Audit Committee
3	Karyawan setingkat Kepala Divisi Employee at Division Head level	Tim Investigasi/ SPI Investigation Team/ SPI	Direksi Board of Directors
4	Karyawan sampai dengan setingkat Manager Employee up to the level of Manager	Tim Investigasi/ SPI Investigation Team/ SPI	Direksi Board of Directors

MEDIA PELAPORAN WBS

Pelapor menyampaikan laporan dengan disertai dokumen pendukung yang diperlukan. Pengaduan dapat dikirimkan kepada Pengelola Pengaduan Pelanggaran (WBS) melalui sarana sebagai berikut:
Telepon : 0548-41368
Website : www.lapor.kie.co.id
Email : lapor@kie.co.id

Selain itu laporan pengaduan dapat juga disampaikan melalui surat pada amplop tertutup dengan memberi kode WBS pada bagian kanan atas amplop tersebut kepada Pengelola Pengaduan Pelanggaran (WBS), dengan alamat:

PT Kaltim Industrial Estate
Wisma KIE Lt. 3,
Jl. Ammonia Kav. 79, Komplek Kawasan Industri KIE, Bontang Kalimantan Timur 75314.

MEKANISME PELAPORAN DAN PENANGANAN PELANGGARAN

Whistleblowing System Online KIE dapat diakses menggunakan alamat *website* https:///lapor.kie.co.id/ menggunakan media *browser*. Alamat tersebut hanya dapat diakses jika user memiliki perangkat yang terhubung dengan koneksi internet, baik melalui media desktop komputer, laptop maupun *smartphone*. Dalam menyampaikan pengaduan pelanggaran, Pelapor melalui mekanisme sebagai berikut:

WBS REPORTING MEDIA

The reporter submits a report accompanied by the necessary supporting documents. Complaints can be sent to the Whistleblowing Management (WBS) through the following means:
Phone : 0548-41368
Website : www.lapor.kie.co.id
Email : lapor@kie.co.id

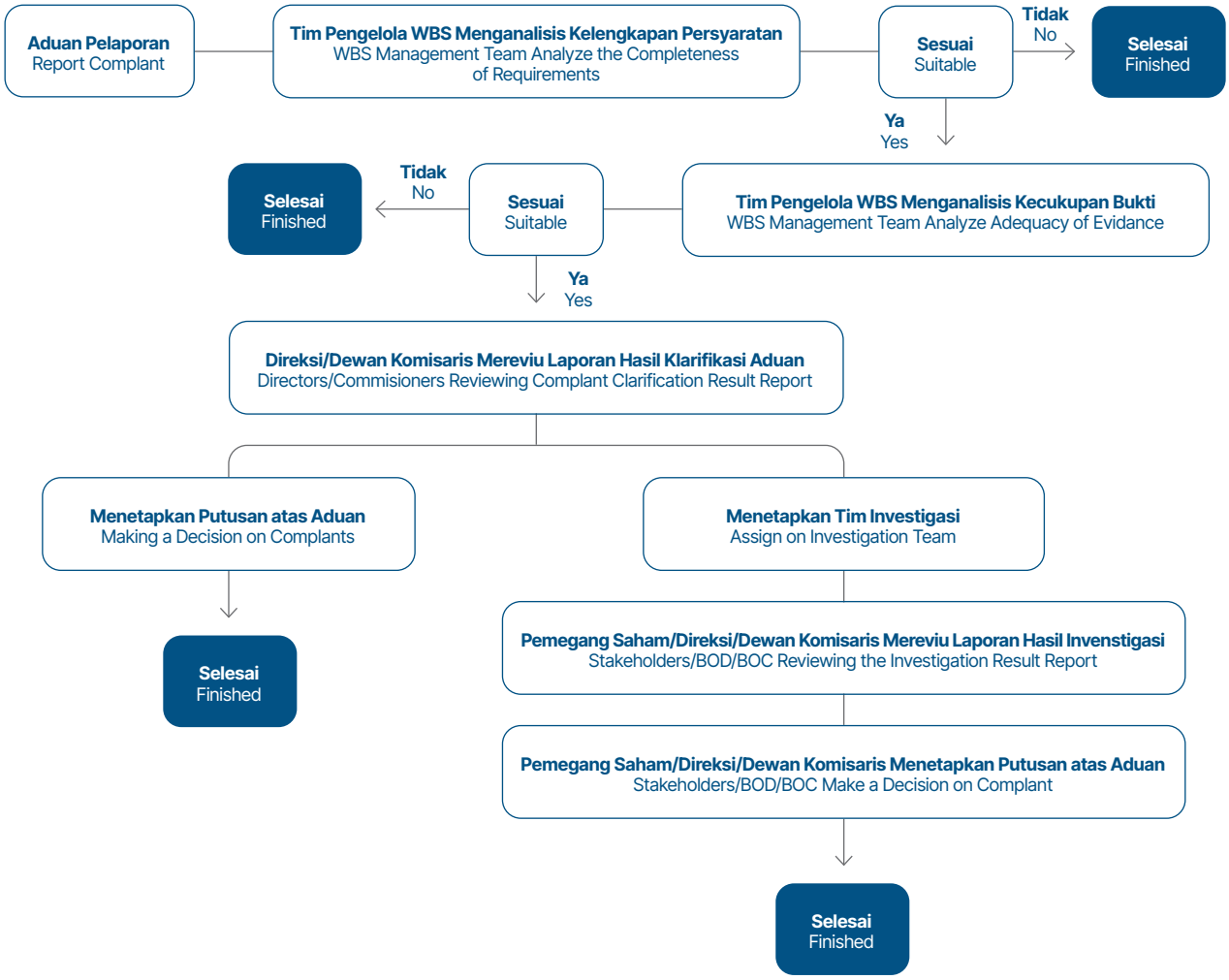
In addition, the grievances report can also be submitted by mail in a sealed envelope by giving the WBS code on the top right of the envelope to the Whistleblowing Investigation Manager (WBS), with the address:

PT Kaltim Industrial Estate
Wisma KIE, 3rd Floor
Jl. Ammonia Kav. 79, Komplek Kawasan Industri KIE, Bontang East Kalimantan
75314.

MECHANISM FOR REPORTING AND HANDLING VIOLATIONS

KIE's Online Whistleblowing System can be accessed using the website address https:/// lapor.kie.co.id/ using a media browser. The address can only be accessed if the user has a device connected to an internet connection, either through a desktop computer, laptop or smartphone. In submitting a violation complaint, the Whistleblower goes through the following mechanism:

ALUR PENANGANAN WBS KIE
WHISTLEBLOWING HANDLING PROCEDURES OF KIE



Pengaduan pada WBS menyediakan 2 (dua) macam pilihan penulisan identitas, bersedia ataupun anonim. KIE menjamin kerahasiaan identitas pelapor, baik yang mencantumkan data diri atau tidak.

KERAHASIAAN SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN

KIE menerapkan prinsip kerahasiaan yang dilaksanakan pada sistem pelaporan pelanggaran:

1. Dalam melakukan proses pemeriksaan atas setiap pelaporan pelanggaran, wajib mengedepankan kerahasiaan, asas praduga tidak bersalah, dan profesionalisme.
2. Identitas Pelapor dijamin kerahasiaannya oleh Perusahaan.
3. Data Pelapor atau informasi lainnya dari semua Pelapor akan dijaga kerahasiaannya, kecuali yang bersangkutan menyetujui pengungkapan data atau informasi tersebut dalam rangka kepentingan pelaksanaan pemeriksaan.
4. Perusahaan menjamin perlindungan terhadap Pelapor dari segala bentuk ancaman, intimidasi, hukuman, atau tindakan tidak menyenangkan dari pihak manapun selama Pelapor menjaga kerahasiaan kasus yang diadukan kepada pihak manapun.

The WBS reporting system provides 2 (two) options for identity disclosure: with identity or anonymous. KIE guarantees the confidentiality of the whistleblower's identity, regardless of whether personal information is provided.

CONFIDENTIALITY OF THE WHISTLEBLOWING SYSTEM

KIE applies the principle of confidentiality implemented in the whistleblowing system:

1. In conducting the examination process for each violation report, it must prioritize confidentiality, the principle of presumption of innocence, and professionalism.
2. The identity of the reporter is guaranteed confidentiality by the Company.
3. Whistleblower data or other information from all Whistleblowers will be kept confidential, unless the person concerned agrees to disclose the data or information in the context of carrying out the examination.
4. The Company guarantees the protection of the Whistleblower from all forms of threats, intimidation, punishment, or unpleasant actions from any party as long as the Whistleblower maintains the confidentiality of the case reported to any party.

5. Perlindungan ini juga berlaku bagi pekerja yang melaksanakan investigasi maupun pihak yang memberikan informasi terkait dengan pengaduan atau penyimpangan.
6. Pihak yang melanggar prinsip kerahasiaan tersebut akan diberikan sanksi yang berat sesuai ketentuan yang berlaku di Perusahaan.

PERLINDUNGAN BAGI PELAPOR

KIE memberikan perlindungan hukum kepada pelapor, baik dari karyawan maupun pihak eksternal, dengan rincian sebagai berikut:

1. Karyawan Pelapor harus dilindungi dari:
   a. Dihilangkannya atau ditunda hak-hak atau sanksi kepegawaian.
   b. Diskriminasi dan tekanan-tekanan dalam bentuk fisik atau psikis.
   c. Tindakan-tindakan lain sebagai respon (tindakan yang bersifat pembalasan) dari Manajemen dan pihak terlapor atas pelaporan dan pengaduan yang dilakukan.
2. Pelapor selain karyawan (masyarakat, rekanan, pelanggan dan Pemangku Kepentingan lainnya) harus dilindungi dari:

   a. Diskriminasi.
   b. Tekanan-tekanan dalam bentuk fisik psikis.
   c. Tindakan-tindakan lain sebagai respon (tindakan yang bersifat pembalasan) dari Manajemen atau pihak terlapor atas pelaporan dan pengaduan yang dilakukan.

SANKSI BAGI PELAPOR

Sanksi administrasi dan/atau sanksi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku akan dikenakan pada:

1. Pimpinan unit dan atau unit kerja yang menolak pemeriksaan oleh tim pemeriksa/ *Head of unit*.
2. Pimpinan unit dan atau unit kerja yang tidak menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil pemeriksaan atas pengaduan karyawan dan pihak berkepentingan sebagaimana mestinya.
3. Pimpinan unit dan atau unit kerja yang melindungi karyawan/pejabat yang melanggar aturan.
4. Terlapor yang terbukti melakukan pelanggaran/ penyimpangan.

PELAPORAN PELANGGARAN TAHUN 2025 DAN TINDAK LANJUT

Selama Tahun 2025 tidak terdapat laporan pengaduan melalui *Whistleblowing System* (WBS) Perusahaan maupun laporan pengaduan melalui surat yang ditujukan langsung ke Perusahaan.

5. The protection also applies to workers who carry out investigations and parties who provide information related to grievances or irregularities.
6. Parties who violate the principle of confidentiality will be given severe sanctions in accordance with applicable provisions in the Company.

PROTECTION FOR WHISTLEBLOWERS

KIE provides legal protection to whistleblowers, both from employees and external parties, with the following details:

1. Employees Whistleblowers must be protected from:
   a. Elimination or postponement of employment rights or sanctions.
   b. Discrimination and pressure in physical or psychological form.
   c. Other actions as a response (retaliation) from Management and the reported party for the reporting and complaints made.

2. Whistleblowers other than employees (communities, partners, customers and other Stakeholders) must be protected from:
   a. Discrimination.
   b. Pressure in the form of physical and psychological.
   c. Other actions as a response (retaliation) from Management or the reported party for the reporting and complaints made.

SANCTIONS FOR WHISTLEBLOWERS

Administrative sanctions and/or other sanctions in accordance with applicable laws and regulations will be imposed on:

1. Heads of units and / or work units that refuse inspection by the inspection team / Head of unit.
2. Head of unit and / or work unit that does not follow up the recommendations of the inspection report on employee complaints and interested parties as appropriate / Head of unit.
3. Head of unit and/or work unit who protects employees/ officials who violate the rules.
4. Reported parties who are proven to have committed violations/deviations.

VIOLATION REPORTING IN 2025 AND FOLLOW-UP

Throughout Year 2025, there were no complaint reports through the Company's Whistleblowing System (WBS) or grievance reports through letters addressed directly to the Company.

TINDAK LANJUT, PEMANTAUAN, DAN PENGEMBALIAN NAMA BAIK TERLAPOR

KIE melakukan tindak lanjut hasil pelaporan bagi terlapor antara lain:

1. Apabila hasil pemeriksaan terhadap pengaduan tidak mengandung kebenaran, Direksi KIE harus segera mengembalikan nama baik terlapor.
2. Apabila hasil pemeriksaan terbukti mengandung kebenaran, Direksi KIE segera mengambil tindakan sesuai pengaduan dengan ketentuan yang berlaku.

3. Apabila tidak menyangkut kerugian Perusahaan/Negara, yaitu penyimpangan administratif, maka diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Perusahaan.
4. Apabila menyangkut tindak pidana khusus yang merugikan Perusahaan dan jumlahnya cukup signifikan, kasusnya diserahkan ke kejaksaan. Namun apabila jumlahnya tidak material, cukup diselesaikan secara internal Perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku.

FOLLOW-UP, MONITORING, AND RESTORING THE GOOD NAME OF THE REPORTED PARTY

KIE follows up on the results of the reporting for the reported party, among others:

1. If the results of the examination of the complaint do not contain the truth, the KIE Board of Directors must immediately restore the good name of the reported party.
2. If the results of the examination are proven to contain the truth, the KIE Board of Directors immediately takes action in accordance with the complaint with the applicable provisions
3. If it does not involve losses to the Company / State, namely administrative irregularities, then it is resolved in accordance with the applicable provisions in the Company.
4. If it involves a special criminal offense that harms the Company and the amount is quite significant, the case is submitted to the prosecutor's office. However, if the amount is not material, it is sufficient to be resolved internally within the Company in accordance with applicable regulations.

Kebijakan Anti Korupsi
Anti-Corruption Policy

KIE dalam pengelolaan bisnis selalu menegaskan komitmennya untuk menjalankan bisnis yang bebas dari Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) yang berarti pengelolaan bisnis KIE dituntut untuk mampu memperhatikan prinsip-prinsip GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian dan kewajaran. Terkait dengan hubungan bisnis, maka hal yang sering terjadi dalam praktek kegiatan kerja sehari-hari dan tidak terhindarkan adalah adanya gratifikasi dari satu pihak kepada pihak lainnya. Oleh sebab itu untuk menjaga hubungan bisnis dengan para pemangku kepentingan, maka perlu diatur hal-hal yang terkait dengan gratifikasi dan tata cara pelaporannya di lingkungan KIE.

Salah satu wujud dari komitmen tersebut dituangkan dalam Kode Etik Perusahaan dan Pedoman Pengendalian Gratifikasi. Penerapan kebijakan ini dilakukan sebagai upaya pencegahan dan perbaikan berkelanjutan terhadap praktik korupsi di seluruh lingkungan Perusahaan.

In conducting its business activities, KIE consistently reaffirms its commitment to operating free from corruption, collusion, and nepotism (KKN). This means that KIE's business management is required to uphold the GCG principles, particularly transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness. In the context of business relationships, one issue that frequently arises in day-to-day work practices and is often unavoidable is the provision of gratification from one party to another. Therefore, in order to maintain proper business relationships with stakeholders, it is necessary to regulate matters related to gratification and the procedures for reporting them within KIE.

One manifestation of this commitment is outlined in the Company's Code of Conduct and Gratification Control Guidelines. This policy is implemented as an effort to prevent and continuously improve corrupt practices within the Company environment.

SOSIALISASI ANTI KORUPSI

Perusahaan melakukan sosialisasi anti korupsi dengan berbagai kegiatan diantaranya:

1. Sosialisasi terkait Sistem Manajemen Anti Penyuapan.
2. Sosialisasi terkait Penerapan *Whistleblowing System* di Lingkungan KIE.
3. Internalisasi *Whistleblowing System* Terintegrasi untuk Mendukung GCG di Pupuk Indonesia Group.
4. Imbauan terkait larangan Praktik Gratifikasi.

ANTI-CORRUPTION SOCIALIZATION

The Company has carried out anti-corruption socialization through various activities, including:

1. Socialization on the Anti-Bribery Management System.
2. Socialization on the implementation of the Whistleblowing System within KIE.
3. Internalization of the Integrated Whistleblowing System to support Good Corporate Governance within the Pupuk Indonesia Group.
4. Dissemination of reminders regarding the prohibition of gratification practices.

Transparansi Praktik Bad Governance
Transparency of Bad Governance Practices

Perusahaan memahami bahwa praktik-praktik *bad corporate governance* dapat mengganggu penerapan GCG, oleh karena itu sepanjang tahun 2025 KIE bertekad untuk tidak melakukan tindakan serta kebijakan yang berkaitan dengan praktik yang ditunjukkan pada tabel sebagai berikut:

The Company realizes that bad corporate governance practices can interfere with the implementation of GCG, therefore throughout 2025 KIE is determined not to take actions and policies related to the practices shown in the table below:

Keterangan Information	**Praktik** Practice
Adanya laporan sebagai perusahaan yang mencemari lingkungan. Reported as a company that pollutes the environment.	Nihil None
Perkara penting yang sedang dihadapi oleh Perusahaan, entitas anak, anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat tidak diungkapkan dalam Laporan Tahunan. Important cases faced by the Company, its subsidiaries, members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners who are currently serving are not disclosed in the Annual Report.	Nihil None
Ketidakpatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Non-compliance in fulfilling tax obligations.	Nihil None
Ketidaksesuaian penyajian Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan dengan peraturan yang berlaku dan Standar Akuntansi Keuangan. Discrepancies in the presentation of the Annual Report and Financial Statements with applicable regulations and Financial Accounting Standards.	Nihil None
Kasus terkait buruh dan karyawan. Cases related to labor and employees.	Nihil None
Tidak terdapat pengungkapan segmen operasi pada perusahaan. There is no disclosure of operating segments in the company.	Nihil None
Terdapat ketidaksesuaian antara Laporan Tahunan *hardcopy* dengan Laporan Tahunan *softcopy*. There are discrepancies between the hardcopy Annual Report and the softcopy Annual Report.	Nihil None

Perkara Penting
Significant Cases

KIE sebagai Perusahaan berstatus badan hukum yang bertumpu pada 5 pilar bisnisnya yaitu Kawasan industri, properti, trading, beton dan konstruksi. Seiring dengan berkembangnya kegiatan usaha KIE tersebut, tentu akan senantiasa bersinggungan dengan hukum baik secara korporasi maupun prosedural dalam menjalankan operasionalnya. Sehingga KIE dituntut untuk selalu berupaya mematuhi segala bentuk peraturan yang ada, baik itu perundang-undangan, Anggaran Dasar dan peraturan Perusahaan lainnya yang berlaku, dan senantiasa melakukan antisipasi dan mitigasi dari seluruh tindakan yang berpotensi menimbulkan masalah bagi Perusahaan, Direksi, dan Dewan Komisaris KIE.

KIE is a company with legal entity status that relies on 5 business pillars, particularly industrial estates, property, trading, concrete and construction. Along with the development of KIE's business activities, it will always intersect with the law both corporately and procedurally in carrying out its operations. Therefore, KIE is required to always strive to comply with all forms of existing regulations, including legislation, Articles of Association and other applicable company regulations, and always anticipate and mitigate all actions that have the potential to cause problems for the Company, the Board of Directors and the KIE Board of Commissioners.

Jenis perkara Type of Case	**Total**	**Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum)** Completed (already has legal force)	**Proses penyelesaian** Completion process
Perkara Perdata/Arbitrase Civil/Arbitration Cases	-	-	-
Perkara Pidana Criminal Cases	1	-	Dalam proses penyelidikan. Under Investigation
Kasus Hubungan Industrial Industrial Relation Cases	-	-	-

No	**Para Pihak** Parties Involved	**Pokok Perkara/ Gugatan** Case Subject/Claim	**Status Perkara/Gugatan** Case Status	**Risiko Terhadap Perusahaan** Risk to the Company
1	KIE & Pihak Eksternal KIE & External Party	Dugaan perbuatan melawan hukum berupa tindakan sewenang-wenang memasuki pekarangan milik Perusahaan tanpa izin, melakukan pengukuran dan penanaman patok secara liar, serta memasang plang klaim kepemilikan di atas lahan yang telah memiliki tanda batas yang sah. Alleged unlawful acts in the form of unauthorized entry into the Company's land, conducting illegal measurements and installation of boundary markers, and placing ownership claim signage on land that already has legally recognized boundary markers.	1. Perusahaan telah melayangkan laporan Pengaduan atas dugaan penyerobotan lahan ke Polres Bontang pada tanggal 21 November 2025. 2. Telah dimintai keterangan terhadap pelapor. 3. Telah dilakukan permintaan keterangan terhadap saksi-saksi dari Perusahaan, Kantor Pertanahan Kota Bontang, dan pihak terlapor. 1. The Company has filed a complaint regarding the alleged land encroachment to the Bontang Police on November 21, 2025. 2. Statements have been obtained from the reporting party. 3. Statements have also been obtained from witnesses, including representatives from the Company, the Bontang City Land Office, and the reported party.	Potensi hilangnya penguasaan fisik secara permanen atau sementara karena lahan menjadi objek status quo. Potential loss of physical control over the land, either permanently or temporarily, due to the land being placed under status quo.

PERKARA PENTING YANG SEDANG DIHADAPI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI YANG SEDANG MENJABAT

Dewan Komisaris dan Direksi sebagai organ utama tata kelola KIE harus cakap melakukan perbuatan hukum dan menghindari segala tindakan yang dapat merugikan serta berpengaruh terhadap reputasi Perusahaan. Sepanjang tahun 2025, tidak terdapat permasalahan hukum yang dihadapi oleh Dewan Komisaris maupun Direksi KIE yang sedang menjabat baik perdata maupun pidana.

PERKARA PENTING YANG SEDANG DIHADAPI DENGAN PERUSAHAAN LAINNYA

Pada tahun 2025, tidak terdapat perkara penting yang ada di badan peradilan atau badan arbitrase yang melibatkan Perusahaan.

PENGARUH TERHADAP KONDISI PERUSAHAAN

Secara garis besar permasalahan hukum yang dihadapi Perusahaan selama tahun 2025 tidak mempengaruhi kondisi Perusahaan secara signifikan, baik secara operasional, keuangan, dan penjualan karena telah dilakukan tindakan mitigasinya. Selain itu, tidak ada sanksi administratif yang dikenakan otoritas terkait kepada entitas, anggota Dewan Komisaris, dan Direksi terkait dengan penanganan perkara pada tahun buku 2025.

SANKSI ADMINISTRASI KEPADA PERUSAHAAN, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, DAN ANGGOTA DIREKSI OLEH OTORITAS TERKAIT

Selama tahun 2025, tidak terdapat sanksi administrasi yang dikenakan kepada KIE, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi oleh Otoritas Terkait.

SIGNIFICANT CASES FACED BY CURRENT BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

The Board of Commissioners and the Board of Directors as the main organs of KIE governance are obliged to be able to take legal actions and avoid all actions that can harm and affect the Company's reputation. Throughout 2025, there were no legal problems faced by the Board of Commissioners and Board of Directors of KIE who are currently serving, both civil and criminal.

SIGNIFICANT CASES IN DEALING WITH OTHER COMPANIES

In 2025, there were no significant cases in the legal and arbitrage institutions involving the Company.

EFFECTS ON COMPANY CONDITION

In general, the legal issues faced by the Company throughout 2025 did not have a significant impact on its operational, financial, or sales performance, as appropriate mitigation measures were implemented. Furthermore, no administrative sanctions were imposed by the relevant authorities on the entity, members of the Board of Commissioners, or the Board of Directors in connection with the handling of legal cases during the 2025 fiscal year.

ADMINISTRATIVE SANCTIONS IMPOSED ON THE COMPANY, MEMBERS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS, AND MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS BY THE RELEVANT AUTHORITIES

Throughout 2025, no administrative sanctions were imposed on KIE, members of the Board of Commissioners, or members of the Board of Directors by the relevant authorities.

Kode Etik Perusahaan
Company Code of Conduct

PEDOMAN ETIKA DAN PERILAKU

Pedoman Etika dan Perilaku (*Code of Conduct*) adalah bagian penting dari upaya Perusahaan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola, yang selama ini mendukung Perusahaan untuk mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Pedoman ini menjadi acuan bagi jajaran di lingkungan organisasi Perusahaan dalam menjalankan tugas dan kegiatan sehari - hari serta dalam melakukan hubungan bisnis dengan para pelanggan, rekanan maupun rekan kerja.

KIE menyadari pentingnya implementasi GCG sebagai salah satu alat dan cara untuk meningkatkan nilai dan pertumbuhan bisnis jangka panjang secara berkesinambungan, tidak hanya bagi *Shareholders* (Pemegang Saham) namun juga segenap *Stakeholders* (Pemangku Kepentingan) lainnya. Untuk itulah Perusahaan berkomitmen untuk mengimplementasikan GCG secara konsisten yang salah satunya dilakukan melalui penyusunan Pedoman Etika dan Perilaku (*Code of Conduct).*

TUJUAN CODE OF CONDUCT

OBJEK STANDAR ETIKA PERUSAHAAN

Kode Etik Perusahaan disusun sebagai acuan bagi:
1. Insan KIE, yaitu Dewan Komisaris, Direksi, dan karyawan KIE.
2. Karyawan non organik KIE.
3. Pemangku Kepentingan KIE seperti vendor, kontraktor, distributor, media, rekanan, dan masyarakat sekitar.

KOMITMEN KODE ETIK PERUSAHAAN

KIE telah memiliki Kode Etik Perusahaan yang digunakan sebagai landasan berperilaku bagi Insan KIE dalam melakukan tugas, tanggung jawab, dan kewenangannya masing-masing. Pedoman Kode Etik Perusahaan secara periodik dievaluasi dan disesuaikan dengan kondisi Perusahaan. Pedoman tercantum dalam Surat Keputusan Direksi No. 32/SKD/DIR/XI-2020 tanggal 10 November 2020 tentang Pedoman Kode Etik Perusahaan dan telah diperbaharui di tahun 2022 sesuai Surat Keputusan Direksi No. 1A/SKD/DIR/I-2022 tanggal 3 Januari 2022.

Komitmen terhadap Kode Etik Perusahaan tertuang dalam penandatanganan komitmen Direksi dan Dewan Komisaris yang terdapat pada Pedoman Kode Etik KIE.

CODE OF CONDUCT

The Code of Conduct is an important part of the Company's efforts to implement corporate governance principles, which have supported the Company in achieving its established Vision and Mission. This Code serves as a guideline for all personnel within the Company's organizational environment in carrying out their duties and daily activities, as well as in conducting business relationships with customers, business partners, and colleagues.

KIE recognizes the importance of implementing Good Corporate Governance as one of the tools and means to enhance long-term sustainable value and business growth, not only for Shareholders but also for all other Stakeholders. Accordingly, the Company is committed to implementing GCG consistently, one of which is carried out through the preparation of the Code of Conduct.

PURPOSE OF THE CODE OF CONDUCT

SCOPE OF THE COMPANY'S ETHICAL STANDARDS

The Company's Code of Ethics is prepared as a reference for:
1. KIE personnel, namely the Board of Commissioners, the Board of Directors, and KIE employees.
2. Non-organic employees of KIE.
3. KIE stakeholders such as vendors, contractors, distributors, media, business partners, and surrounding communities.

COMMITMENT TO THE COMPANY'S CODE OF CONDUCT

KIE has established a Company Code of Conduct, which serves as the basis of conduct for KIE personnel in carrying out their respective duties, responsibilities, and authorities. The Company's Code of Conduct is periodically evaluated and adjusted in accordance with the Company's conditions. The guideline is set out in Board of Directors Decree No. 32/SKD/DIR/XI-2020 dated November 10, 2020 concerning the Company Code of Conduct, and was updated in 2022 pursuant to Board of Directors Decree No. 1A/SKD/DIR/I-2022 dated January 3, 2022.

The commitment to the Company's Code of Conduct is reflected in the signing of the commitment statement by the Board of Directors and the Board of Commissioners as set out in the KIE Code of Conduct Guidelines.

POKOK-POKOK KODE ETIK PERUSAHAAN

Kode Etik Perusahaan merupakan pedoman perilaku bagi semua pihak di dalam Perusahaan serta pihak luar yang terkait dengan usaha Perusahaan dalam melaksanakan tugas dan pengambilan keputusan. Kode Etik KIE terbagi menjadi 2 (dua) macam yaitu:

PERILAKU KORPORASI

Perilaku korporasi panduan bagi KIE dalam berinteraksi dan berhubungan dengan pemangku kepentingan.

1. Integritas
2. Kepatuhan Terhadap Hukum dan Perundangan
3. Komitmen KIE Terhadap Karyawan
4. Penanganan Benturan Kepentingan
5. Keterlibatan Dalam Kegiatan Politik
6. Jaminan Produk
7. Komitmen Terhadap Lingkungan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja
8. Persaingan Usaha
9. Pelaporan Keuangan
10. Periklanan Promosi
11. Hubungan dengan Konsumen dan Pemasok
12. Komitmen Terhadap Hubungan Perusahaan Dengan Kreditur
13. Hak Individu
14. Komitmen Terhadap Hubungan Perusahaan Dengan Masyarakat
15. Peran Sosial Kemasyarakatan
16. Komunikasi

PERILAKU INDIVIDU

Perilaku individu adalah panduan bagi Insan KIE melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

1. Integritas
2. Kepatuhan Terhadap Hukum dan Perundangan
3. Kepatuhan Terhadap Peraturan dan Kebijakan Perusahaan
4. Penghindaran Benturan Kepentingan
5. Hak Individu
6. Kerahasiaan Informasi Perusahaan
7. Menjaga Informasi Orang Dalam
8. Gratifikasi
9. Pemanfaatan Aset Perusahaan
10. Donasi

PENGUNGKAPAN BAHWA KODE ETIK BERLAKU BAGI SELURUH LEVEL ORGANISASI

IMPLEMENTASI DAN PENEGAKAN KODE ETIK PERUSAHAAN

KIE senantiasa mendorong kepatuhan terhadap Kode Etik Perusahaan dan berkomitmen untuk mengimplementasikannya, serta mewajibkan seluruh pimpinan di Perusahaan agar bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pedoman Kode Etik Perusahaan dipatuhi dan dijalankan dengan baik pada jajaran masing-masing. Implementasi dari sikap dan perbuatan tersebut adalah sebagai berikut:

PRINCIPLES OF THE CODE OF CONDUCT

The Company's Code of Conduct applies to parties within the Company as well as external parties related to the Company's business in carrying out their duties and making decisions. KIE Code of Conduct is divided into 2 (two) types, particularly:

CORPORATE BEHAVIOR

Corporate behavior is a guide for KIE in interacting and dealing with stakeholders.

1. Integrity
2. Compliance with laws and regulations
3. KIE Commitment to Employees
4. Handling Conflict of Interest
5. Involvement in Political Activities
6. Product Guarantee
7. Commitment to Environment, Occupational Health and Safety
8. Business Competition
9. Financial Reporting
10. Promotional Advertising
11. Consumer and Supplier Relations
12. Commitment to the Company's Relationship with Creditors
13. Individual Rights
14. Commitment to the Company's Relationship with Society
15. Community Social Role
16. Communication

INDIVIDUAL BEHAVIOR

Individual behavior is a guide for KIE personnel to carry out their duties and responsibilities.

1. Integrity
2. Compliance with laws and regulations
3. Compliance with Company Regulations and Policies
4. Avoidance of Conflict of Interest
5. Individual Rights
6. Confidentiality of Company Information
7. Safeguarding Insider Information
8. Gratification
9. Utilization of Company Assets
10. Donation

DISCLOSURE THAT THE CODE OF CONDUCT APPLIES TO ALL LEVELS OF THE ORGANIZATION

IMPLEMENTATION AND ENFORCEMENT OF THE COMPANY'S CODE OF ETHICS

KIE always encourages compliance with the Company's Code of Conducts and is committed to implementing it, and requires all leaders in the Company to be responsible for ensuring that the guidelines of the Company's Code of Conducts are adhered to and properly implemented in their respective ranks. The implementation of these attitudes and actions is as follows:

PERNYATAAN KOMITMEN MANAJEMEN

Komitmen Manajemen KIE untuk menerapkan Kode Etik Perusahaan ditunjukkan dengan pernyataan komitmen seluruh Dewan Komisaris dan Direksi pada 2025 terhadap penerapan Kode Etik Perusahaan KIE sebagai acuan utama bagi perilaku korporasi dan Insan KIE sesuai ketentuan Perusahaan yang berlaku.

Selain itu, dalam pelaksanaan GCG oleh setiap Insan KIE, dibutuhkan pernyataan komitmen dan integritas kepada Perusahaan guna menghindari tindakan melawan hukum yang akan merugikan kepentingan Perusahaan. Pernyataan komitmen yang ada di Perusahaan antara lain:

1. Daftar Khusus
   Daftar Khusus yang dimaksud adalah merupakan daftar yang berisi kepemilikan saham Dewan Komisaris dan Direksi beserta keluarganya di perusahaan lainnya. Daftar Khusus diperbarui setiap tahun dan disimpan oleh Perusahaan.
2. Pernyataan Tidak Adanya Benturan Kepentingan
   Dalam rangka mendukung praktik GCG, Dewan Komisaris, Direksi, dan pihak-pihak yang terkait dalam aktivitas bisnis dan operasional Perusahaan dilarang melakukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan, baik langsung maupun tidak langsung. Setiap tahun Dewan Komisaris dan Direksi menandatangani surat pernyataan mengenai benturan kepentingan tersebut. Insan KIE yang memiliki potensi benturan kepentingan dalam salah satu kegiatan Perusahaan wajib memberitahukannya dengan menggunakan formulir yang disediakan Perusahaan.
3. Pernyataan Kepatuhan Kode Etik
   Segenap Insan KIE wajib menyatakan kepatuhannya terhadap Kode Etik Perusahaan dengan menandatangani Piagam Pakta Integritas dan Kepatuhan tahunan yang merupakan salah satu syarat bagi keberlanjutan masa bakti di Perusahaan.

MANAGEMENT COMMITMENT STATEMENT

The commitment of KIE Management to implement the Company's Code of Conducts is demonstrated by the statement of commitment of the entire Board of Commissioners and Directors in 2025 to the implementation of KIE's Code of Conducts as the main reference for corporate behavior and KIE personnel in accordance with applicable Company regulations.

In addition, in the implementation of GCG by every KIE Personnel, a statement of commitment and integrity to the Company is required to avoid illegal actions that will harm the interests of the Company. The statements of commitment that exist in the Company include:

1. Special List
   The Special List in question is a list containing the share ownership of the Board of Commissioners and Directors and their families in other companies. The Special List is updated annually and kept by the Company.

2. Statement of No Conflict of Interest
   In order to support GCG practices, the Board of Commissioners, Board of Directors, and parties involved in the Company's business and operational activities are prohibited from conducting transactions that contain conflicts of interest, either directly or indirectly. Every year the Board of Commissioners and the Board of Directors sign a statement letter regarding the conflict of interest. KIE personnel who have a potential conflict of interest in one of the Company's activities must notify it using the form provided by the Company.
3. Code of Conducts Compliance Statement
   All KIE personnel must declare their compliance with the Company's Code of Conducts by signing the annual Integrity and Compliance Pact Charter, which is one of the requirements for continued service in the Company.

UPAYA PENYEBARAN DAN SOSIALISASI PEDOMAN ETIKA DAN PERILAKU (CODE OF CONDUCT)

Perusahaan secara berkala mengadakan sosialisasi Kode Etik bagi seluruh karyawan di berbagai jenjang jabatan sebagai bagian dari upaya memperkuat penerapan standar etika yang berlaku. Sosialisasi dilakukan sebagai upaya untuk memperkenalkan, menyebarluaskan informasi mengenai Pedoman Etika dan Perilaku kepada seluruh karyawan maupun pihak eksternal KIE dengan tujuan agar setiap individu paham dan mengerti serta dapat mengimplementasikan pedoman ini. Sosialisasi ini merupakan tahapan penting dari penerapan Pedoman Etika dan Perilaku. KIE berkomitmen untuk melaksanakan sosialisasi secara efektif dan menyeluruh sebagai berikut :

1. Sosialisasi dengan media tatap muka, yaitu pembekalan kepada setiap calon karyawan baru di KIE.
2. Melalui media elektronik, diantaranya memutakhirkan informasi mengenai Kode Etik Perusahaan di portal intranet, portal GCG, penyebarluasan informasi melalui surel dan situs web Perusahaan.
3. Pembagian buku saku Kode Etik Perusahaan kepada seluruh Insan KIE dan karyawan non organik.
4. Setiap Insan KIE dapat meminta penjelasan atau menyampaikan pertanyaan terkait Kode Etik Perusahaan kepada atasan langsung.

PROGRAM AWARENESS

Guna meningkatkan pemahaman dan kesadaran Insan KIE atas Kode Etik Perusahaan, KIE menyelenggarakan sosialisasi dan program penyebarluasan wawasan mengenai Kode Etik Perusahaan secara berkala setiap tahun. Dalam mengukur tingkat pemahaman Insan KIE.

PENANDATANGANAN PAKTA INTEGRITAS

Sebagai bentuk komitmen tersebut, Standar Etika Perusahaan wajib ditandatangani oleh seluruh Insan KIE, termasuk karyawan non organik dan vendor yang melakukan kerja sama dengan Perusahaan sebagai bentuk kepatuhan dan komitmen pelaksanaan Kode Etik Perusahaan setiap tahunnya.

Penandatanganan Pakta Integritas membuktikan Insan KIE telah berkomitmen untuk menerapkan Kode Etik dan Perilaku dengan baik.

OUTREACH AND SOCIALIZATION OF THE CODE OF CONDUCT

The Company periodically conducts Code of Conduct socialization for all employees across various levels of position as part of its efforts to strengthen the implementation of applicable ethical standards. Such socialization is carried out to introduce and disseminate information regarding the Code of Conduct to all employees as well as external parties of KIE, with the aim of ensuring that each individual understands and is able to implement these guidelines. This socialization constitutes an important stage in the implementation of the Code of Conduct. KIE is committed to carrying out such socialization effectively and comprehensively through the following means:

1. Face-to-face socialization, particularly orientation sessions for all prospective new employees of KIE.
2. Electronic media, including updating information regarding the Company's Code of Conduct on the intranet portal, GCG portal, dissemination of information through email, and the Company's website.
3. Distribution of the Company's Code of Conduct handbook to all KIE personnel and non-organic employees.
4. Each KIE personnel member may request clarification or raise questions regarding the Company's Code of Conduct to their direct supervisor.

AWARENESS PROGRAM

To enhance the understanding and awareness of KIE personnel regarding the Company's Code of Conduct, KIE conducts regular annual socialization and awareness-building programs on the Company's Code of Conduct. In measuring the level of understanding among KIE personnel.

SIGNING OF THE INTEGRITY PACT

As a manifestation of this commitment, the Company's ethical standards must be signed annually by all KIE personnel, including non-organic employees and vendors cooperating with the Company, as a form of compliance with and commitment to the implementation of the Company's Code of Conduct.

The signing of the Integrity Pact demonstrates that KIE personnel have committed to properly implementing the Code of Conduct.

Jumlah Karyawan Number of Employees	**Jumlah Insan KIE yang telah menandatangani Pernyataan Komitmen** Number of KIE personnel who have signed a Statement of Commitment	**Jumlah Insan KIE yang belum menandatangani Pernyataan Komitmen** Number of KIE personnel who have not signed the Statement of Commitment
Karyawan Tetap Permanent Employees	66	0
Karyawan Non Organik Non-Organic Employees	145	0

SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK

Kode Etik Perusahaan menjadi pedoman berperilaku dalam melaksanakan tugas-tugas Perusahaan. Setiap pelanggaran terhadap pedoman perilaku yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mengakibatkan kerugian finansial maupun non finansial bagi perusahaan, sehingga patut dikenakan sanksi sesuai tingkat pelanggarannya berdasarkan peraturan yang berlaku. Ketentuan dalam pemberian sanksi atas pelanggaran Kode Etik Perusahaan antara lain:

1. Direksi menetapkan dalam Peraturan Perusahaan:
   a. Tingkatan pelanggaran;
   b. Sanksi pelanggaran;
   c. Pihak yang berwenang mengeksekusi sanksi;
2. Pengelola Sistem Pengaduan Pelanggaran KIE ditunjuk oleh Perusahaan untuk menangani setiap pelaporan pelanggaran melalui web aplikasi pengaduan dan selama belum ada penunjukan, maka unit Pengelola Pengaduan Pelanggaran (WBS) dilakukan oleh Sekretaris Perusahaan;
3. Pelanggaran terhadap Kode Etik perusahaan ini akan ditindaklanjuti secara tegas dan konsisten.

SANCTIONS FOR VIOLATION OF THE CODE OF CONDUCTS

The Company's Code of Conducts serves as a guideline for behavior in carrying out the Company's duties. Any violation of the code of conduct that can directly or indirectly result in financial or non-financial losses for the company, so it is appropriate to impose sanctions according to the level of violation based on applicable regulations. Provisions in sanctioning violations of the Company's Code of Conducts include:

1. The Board of Directors stipulates in the Company's regulations:
   a. Level of violation;
   b. Sanctions for violations;
   c. The party authorized to execute the sanction;
2. The KIE Violation Grievance System Manager is appointed by the Company to handle every violation reporting through the complaint web application and as long as there is no appointment, the Violation Complaint Management Unit (WBS) is carried out by the Corporate Secretary;
3. Violations of the Company's Code of Conducts will be followed up firmly and consistently.

Akses Informasi dan Transparansi
Information Access and Transparency

Dalam implementasi Tata Kelola Perusahaan yang baik, Perusahaan berkomitmen untuk menekankan prinsip transparansi melalui penyediaan akses informasi kepada publik melalui berbagai media, baik cetak maupun elektronik. Dengan adanya kemudahan akses informasi perusahaan, Pemangku Kepentingan dapat memiliki informasi yang dibutuhkan mengenai Perusahaan.

In the implementation of Good Corporate Governance, the Company is committed to emphasizing the principle of transparency through providing access to information to the public through various media, both print and electronic. With easy access to company information, Stakeholders can have the information they need about the Company.

KEBIJAKAN INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN

Dalam menjaga informasi dan data Perusahaan, KIE memiliki kebijakan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Direksi No. 25/SKD/DIR/XII-2017 tentang Kebijakan Pengendalian Informasi PT Kaltim Industrial Estate. Kebijakan ini mengatur mengenai:

1. Informasi apa saja yang dikategorikan informasi publik dan informasi rahasia Perusahaan.
2. Pihak-pihak yang dapat memberikan dan/atau menyampaikan informasi publik.
3. Prosedur pengungkapan informasi Perusahaan kepada stakeholders.

COMPANY INFORMATION AND DATA POLICY

To safeguard the Company's information and data, KIE has established a policy as stipulated in the Decree of the Board of Directors No. 25/SKD/DIR/XII-2017 concerning the Information Control Policy of PT Kaltim Industrial Estate. This policy regulates the following matters:

1. The classification of information into public information and confidential Company information.
2. The authorized parties are permitted to disclose and/or deliver public information.
3. The procedures for disclosing Company information to stakeholders.

MEDIA INFORMASI PERUSAHAAN

Pengungkapan informasi dan data Perusahaan dilakukan melalui media yang berfungsi sebagai saluran atas akses dan pengungkapan informasi baik secara *online* maupun *offline* diantaranya *Website*, Media Sosial, Media Internal, Media Cetak dan Media Internal dan Digital. Selain itu, informasi tentang KIE dapat pula diperoleh pada Sekretaris Perusahaan yang beralamat di:

COMPANY INFORMATION MEDIA

Disclosure of the Company's information and data is done through media that serves as a channel for access and disclosure of information both online and offline including Website, Social Media, Internal Media, Print and Internal Media; and Digital. In addition, Information about KIE can also be obtained from the Corporate Secretary whose address is at:

Kantor Pusat | Head Office
Wisma KIE Lt. 3 Jl. Ammonia Kav. 79, Komplek Kawasan Industri KIE, Bontang, Kalimantan Timur 75314 Indonesia
Telepon (+62 548) 41368

Kantor Perwakilan Jakarta | Jakarta Representative Office
Jl. Kebon Sirih Raya No. 6A Jakarta Pusat 10110 Indonesia

WEBSITE PERUSAHAAN

Website Korporat memiliki peran yang signifikan dalam tata kelola keterbukaan informasi. Pengungkapan dan ketersediaan informasi pada situs web Perusahaan akan memberikan manfaat kepada publik dan pemangku kepentingan yang menampilkan kegiatan operasional dan kinerja Perusahaan. Situs *website* ini dapat diakses melalui link https://kie.co.id/ Melalui situs tersebut para stakeholder dapat menemukan banyak konten yang memuat berbagai informasi

COMPANY WEBSITE

The Company Website plays a significant role in governance of information disclosure. Disclosure and availability of information on the Company's website will provide benefits to the public and stakeholders stakeholders who display the Company's operational activities and performance of the Company. This website can be accessed through the link https://kie.co.id/ Through this site, stakeholders can find a lot of content that contains a variety of the Company's latest information such

terkini Perusahaan seperti Profil KIE, kegiatan usaha, TJSL, Tata Kelola Perusahaan termasuk *Annual Report* maupun *Sustainability Report*. Guna meningkatkan kualitas informasi dan berita terkini mengenai Perusahaan yang disampaikan kepada publik, Perusahaan senantiasa memutakhirkan konten secara berkala dan berkelanjutan.

as KIE Profile, business activities, TJSL, Corporate Governance including Annual Report and Sustainability Report. In order to improve the quality of information and the latest news about the Company delivered to the public, the Company always updates the content regularly and continuously.

MEDIA SOSIAL

SOCIAL MEDIA

PT Kaltim Industrial Estate - KIE

@kiebontang

PT Kaltim Industrial Estate (KIE)

MEDIA CETAK

Perusahaan mengungkapkan informasi melalui media cetak umumnya masuk dalam klasifikasi informasi biasa. Akses informasi dan data melalui media cetak diantaranya berupa company profile, *leaflet*, majalah korporat/buletin, Laporan Tahunan (*Annual Report*) serta Laporan Berkelanjutan (*Sustainability Report*) yang mencakup seluruh kegiatan internal Perusahaan yang perlu diketahui oleh *Shareholders* dan *Stakeholders* maupun publik. Laporan Tahunan (*Annual Report*) dan Laporan Berkelanjutan (*Sustainability Report*) telah dipublikasikan agar dapat diakses secara luas oleh seluruh Stakeholders baik untuk laman berbahasa Indonesia maupun laman yang berbahasa Inggris yang dapat diakses melalui https://kie.co.id/.

PRINTED MEDIA

The Company discloses information through printed media, which generally falls under the classification of regular information. Access to information and data via printed media includes the company profile, leaflets, corporate magazines/bulletins, Annual Reports, and Sustainability Reports, all of which cover internal corporate activities that should be known by shareholders, stakeholders, and the general public. The Annual Report and Sustainability Report are published and made widely accessible to all stakeholders in both Indonesian and English versions, and can be accessed through the official website: https://kie.co.id/.

MEDIA INTERNAL DAN DIGITAL

Buletin merupakan majalah digital yang terbit setiap tahun yang digunakan sebagai media komunikasi seluruh karyawan Perusahaan. Buletin memuat berbagai artikel informatif terkait kegiatan KIE dalam kurun waktu satu tahun yang bertujuan menyebarkan informasi kepada karyawan mengenai informasi terkait Perusahaan.

Sebagai media internal Perusahaan, Buletin menjadi wadah dan sarana bagi jajaran manajemen untuk dapat mensosialisasikan program kerja, strategi bisnis yang dijalankan serta target yang harus tercapai oleh Perusahaan dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang. Informasi yang tercantum dalam majalah dikemas dalam bahasa informatif sehingga mudah dipahami oleh seluruh karyawan.

INTERNAL AND DIGITAL MEDIA

The E-Magazine is an annual digital magazine published as an internal communication medium for all Company employees. It features various informative articles related to KIE's activities throughout the year, aiming to disseminate corporate-related information to all employees.

As an internal corporate publication, the E-Magazine serves as a platform and communication channel for management to socialize work programs, business strategies, and short-term, medium-term, and long-term corporate targets. The content is presented in an informative and accessible manner to ensure it is easily understood by all employees.

Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
Management of State Officials' Wealth Reports

KEBIJAKAN PELAPORAN LHKPN

KIE memiliki kebijakan mengenai Penyampaian dan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 24/SKD/DIR/VIII-2018 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) bagi Pejabat di KIE. Kebijakan ini mengatur tata cara penyampaian, pengelolaan LHKPN, karyawan yang diwajibkan untuk menyampaikan LHKPN, dan sanksi bagi karyawan terkait yang tidak melaporkan LHKPN.

Kegiatan ini menjadi bagian dari strategi preventif Perusahaan dalam mengurangi potensi risiko korupsi, seiring dengan upaya lebih luas untuk menciptakan lingkungan yang bersih, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

WAJIB LAPOR LHKPN

Pejabat di lingkungan KIE yang wajib menyampaikan LHKPN adalah karyawan Pupuk Kaltim yang diperbantukan, bertugas dan ditempatkan di lingkungan KIE. KIE menetapkan pejabat yang wajib mengisi dan menyampaikan LHKPN, antara lain:

1. Dewan Komisaris PT Kaltim Industrial Estate;
2. Direksi PT Kaltim Industrial Estate;
3. Dewan Komisaris Anak Perusahaan;
4. Direksi Anak Perusahaan;
5. Pejabat Grade I/ GM/ Kepala Divisi/ setara di PT Kaltim Industrial Estate;
6. Pejabat Grade I/ GM/ Kepala Divisi/ setara di Anak Perusahaan;
7. Pejabat Grade II/ Manager/ setara di Anak Perusahaan;
8. Pejabat Grade II/ Manager/ setara di PT Kaltim Industrial Estate.

Pejabat yang ditentukan di atas berkewajiban untuk:

1. Membuat dan/atau memutakhirkan Laporan harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Menyampaikan secara langsung kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baik secara *online* maupun *offline*, dikoordinasikan oleh pengelola LHKPN yang ditunjuk oleh PT Pupuk Kaltim paling lambat 2 (dua) bulan setelah:
   a. Menduduki jabatan untuk pertama kalinya.
   b. Mengalami promosi atau mutasi.
   c. Telah menduduki jabatan 2 (dua) tahun.

POLICY ON LHKPN REPORTING

KIE has established a policy on the submission and management of the State Officials' Wealth Report (LHKPN) pursuant to Board of Directors Decree No. 24/SKD/DIR/VIII-2018 concerning the Obligation to Submit the State Officials' Wealth Report (LHKPN) for officials at KIE. This policy regulates the procedures for submission and management of LHKPN, the employees who are required to submit LHKPN, and the sanctions applicable to relevant employees who fail to submit their LHKPN.

This activity forms part of the Company's preventive strategy to reduce potential corruption risks, in line with broader efforts to create a clean, transparent environment that is consistent with the principles of Good Corporate Governance.

MANDATORY REPORTING OF LHKPN

Officials within KIE who are required to submit LHKPN are seconded employees of Pupuk Kaltim who are assigned and placed within KIE. KIE has determined the officials who are required to complete and submit LHKPN, including the following:

1. The Board of Commissioners of PT Kaltim Industrial Estate;
2. The Board of Directors of PT Kaltim Industrial Estate;
3. The Boards of Commissioners of Subsidiaries;
4. The Boards of Directors of Subsidiaries;
5. Grade I officials/General Managers/ Division Heads/ equivalent positions at PT Kaltim Industrial Estate;
6. Grade I officials/General Managers/Division Heads/ equivalent positions at Subsidiaries;
7. Grade II officials/Managers/equivalent positions at Subsidiaries;
8. Grade II officials/Managers/equivalent positions at PT Kaltim Industrial Estate.

The officials referred to above are required to:

1. Prepare and/or update the State Officials' Wealth Report; and Submit it directly to the Corruption Eradication Commission (KPK), either online or offline, coordinated by the LHKPN administrator appointed by PT Pupuk Kaltim, no later than 2 (two) months after:
   a. Assuming office for the first time.
   b. Being promoted or transferred.
   c. Having held office for 2 (two) years.

2. Bagi pejabat yang akan memasuki usia pensiun wajib menyampaikan LHKPN selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum menjalani masa bebas tugas.

PENGELOLA LHKPN

KIE menginstruksikan kepada Sekretaris Perusahaan selaku unit kerja yang membidangi Tata Kelola Perusahaan dan Kepatuhan dengan tugas untuk menyusun Laporan Rekapitulasi Penyampaian LHKPN setiap pejabat yang berkewajiban untuk menyampaikan LHKPN dan melaporkannya kepada Direktur Utama, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham.

TINGKAT KEPATUHAN

Hingga periode akhir 2025, pelaporan wajib lapor sebanyak 8 wajib lapor, dengan rincian sebagai berikut ini:

Jumlah Wajib LHKPN Number of LHKPN Obligees	**Yang telah menyampaikan** Who have submitted	**Prosentase** Percentage
8	8	100%

TATA CARA PELAPORAN LHKPN

Untuk menyampaikan data terkait LHKPN melalui aplikasi e-LHKPN pada alamat https://elhkpn.kpk.go.id. Wajib lapor dapat menggunakan aplikasi e-LHKPN untuk melaporkan LHKPN-nya setelah mendapatkan akun e-Filling.

SANKSI LAPORAN LHKPN

Perusahaan akan menindak tegas pejabat wajib lapor LHKPN yang belum melaksanakan kewajiban menyampaikan LHKPN sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan atau mengikuti ketentuan yang ditetapkan KIE.

2. Officials approaching retirement age are required to submit LHKPN no later than 2 (two) months before entering their pre-retirement leave period.

LHKPN ADMINISTRATOR

KIE has instructed the Corporate Secretary, as the work unit responsible for Corporate Governance and Compliance, to prepare the Recapitulation Report on LHKPN Submission for each official who is required to submit LHKPN and to report it to the President Director, the Board of Commissioners, and the Shareholders.

COMPLIANCE LEVEL

As of the end of 2025, mandatory reporting were 8 officials, with the following details:

PROCEDURES FOR LHKPN REPORTING

To submit data related to LHKPN, reporting officials are required to use the e-LHKPN application available at https://elhkpn.kpk.go.id. Reporting officials may use the e-LHKPN application to submit their LHKPN after obtaining an e-Filing account.

SANCTION OF LHKPN REPORT

The company will take firm action against officials required to report LHKPN who have not fulfilled their obligation to submit LHKPN in accordance with statutory provisions or in accordance with the provisions stipulated by KIE.

Pengendalian Gratifikasi
Gratification Control

KIE berkomitmen dan menerapkan aturan untuk setiap bentuk pemberian, permintaan dan penerimaan gratifikasi. Para Insan KIE dilarang mencemarkan nama baik Perusahaan melalui tindakan penyelewengan atau tindakan yang merugikan citra Perusahaan. Pelanggaran dari aturan ini dapat berakibat pada diberikannya sanksi oleh Perusahaan mulai dari sanksi ringan sampai dengan sanksi berat. Kebijakan ini merupakan upaya dalam menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* secara konsisten dan berkelanjutan dalam setiap aktivitas bisnis Perusahaan.

KEBIJAKAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI

KIE berkomitmen untuk tidak memberi dan menerima hadiah dari dan kepada setiap pihak yang memiliki hubungan bisnis dengan Perusahaan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan. Hal tersebut merupakan wujud implementasi pengendalian gratifikasi yang tertuang pada Surat Keputusan Direksi No. 07/SKD/DIR/VI-2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi KIE. Implementasi pedoman pengendalian gratifikasi selaras dengan pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik, Pedoman Perilaku, serta nilai-nilai yang berlaku di Perusahaan. Pengendalian gratifikasi sangat penting bagi penerapan di Perusahaan agar Insan KIE dapat bersikap independen, objektif, dan profesional. Gratifikasi berisiko untuk mengarah pada pidana suap yang dapat berdampak pada konsekuensi hukum yang merugikan citra Perusahaan.

UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI

Pengelolaan pelaporan, analisis, dan tindak lanjut gratifikasi dilakukan oleh Unit Pengendali Gratifikasi (UPG). Direksi KIE menetapkan Sekretaris Perusahaan sebagai Ketua UPG dengan dibantu staf Sekper Bidang GCG & Manajemen Risiko selaku Sekretaris.

Secara garis besar, tugas dan tanggung jawab UPG adalah:
1. Menerima, mereview dan mengadministrasikan laporan penerimaan, penolakan dan pemberian gratifikasi dari Insan KIE.
2. Menyalurkan laporan penerimaan, penolakan dan pemberian Gratifikasi kepada KPK untuk dilakukan analisis dan penetapan status kepemilikan gratifikasinya oleh KPK.
3. Menyampaikan hasil pengelolaan laporan gratifikasi dan usulan Pedoman Pengendalian Gratifikasi kepada Direksi.
4. Memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada Satuan Pengawas Intern jika terjadi pelanggaran atas Peraturan ini oleh Insan KIE.

KIE is committed to and implements rules governing every form of giving, requesting, and receiving gratification. All KIE personnel are prohibited from tarnishing the good name of the Company through misconduct or actions that may harm the Company's reputation. Violations of these rules may result in sanctions imposed by the Company, ranging from minor sanctions to severe sanctions. This policy constitutes part of the Company's efforts to implement the principles of Good Corporate Governance consistently and sustainably in every business activity.

GRATIFICATION CONTROL POLICY

KIE is committed to not giving and receiving gifts from and to any party that has a business relationship with the Company that may cause a conflict of interest. This is a form of implementation of gratification control as stated in the Board of Directors Decree No. 07/SKD/DIR/VI-2021 concerning Gratification Control Guidelines of KIE. The implementation of the gratification control guidelines is in line with the Good Corporate Governance guidelines, Code of Conduct, and values prevailing in the Company. Gratification control is very important for implementation in the Company so that KIE personnel can be independent, objective and professional. Gratuities are at risk of leading to the crime of bribery which can have an impact on legal consequences that are detrimental to the Company's image.

GRATIFICATION CONTROL UNIT

The management of gratification reporting, analysis and follow-up is carried out by the Gratification Control Unit (UPG). The KIE Board of Directors appointed the Corporate Secretary as the Chairman of the UPG with the assistance of the GCG & Risk Management Staff Secretary as the Secretary.

Broadly speaking, the duties and responsibilities of the UPG are:
1. Receiving, reviewing and administering reports on the acceptance, rejection and provision of gratuities from KIE personnel.
2. Channeling reports on the acceptance, rejection and provision of gratuities to the KPK for analysis and determination of the status of gratuity ownership by the KPK.
3. Submitting the results of the management of gratification reports and the proposed Gratification Control Guidelines to the Board of Directors.
4. Providing follow-up recommendations to the Internal Supervisory Unit in the event of a violation of this Regulation by KIE Personnel.

5. Mengusulkan Kebijakan/Pedoman pengelolaan, pembentukan lingkungan anti gratifikasi dan pencegahan korupsi di lingkungan Perusahaan.
6. Mengkoordinasikan kegiatan diseminasi aturan etika gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal instansi.
7. Dalam implementasinya, UPG dapat mengusulkan dan membuat sistem pengelolaan gratifikasi berbasis Teknologi Informasi.
8. Memberikan informasi yang jelas kepada pihak manapun terkait dengan ketentuan yang terdapat dalam Pedoman Pengendalian Gratifikasi.
9. Memonitor pelaksanaan/implementasi Pedoman ini dan memberikan laporan secara berkala 6 (enam) bulan sekali kepada Direksi termasuk laporan-laporan yang timbul setelah adanya ketentuan ini.

RUANG LINGKUP PELAPORAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI

1. Pengendalian Gratifikasi KIE
2. Penolakan Gratifikasi
3. Penerimaan Gratifikasi
4. Pemberian Gratifikasi
5. Permintaan Gratifikasi

PERLINDUNGAN PELAPORAN GRATIFIKASI

KIE memberikan upaya perlindungan bagi pelapor yang patuh terhadap ketentuan gratifikasi berupa:

1. Perlindungan dari tindakan balasan atau perlakuan yang bersifat administratif kepegawaian yang tidak objektif dan merugikan pelapor, antara lain namun tidak terbatas pada penurunan peringkat jabatan, penurunan penilaian, usulan pemindahan tugas/mutasi, atau hambatan karir lainnya.
2. Pemindahtugasan/mutasi bagi Pelapor dalam hal timbul intimidasi atau ancaman fisik terhadap pelapor.
3. Bantuan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Perusahaan.

SANKSI ATAS PELANGGARAN

KIE menerapkan secara tegas kebijakan pengendalian gratifikasi di lingkungan Perusahaan. Sebagai konsekuensinya, setiap pelanggaran terhadap ketentuan dalam pedoman pengendalian gratifikasi akan dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku di Perusahaan dan berpotensi dikenakan tindak pidana suap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

LAPORAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Pada tahun 2025 terdapat 51 (lima puluh satu) penerimaan gratifikasi, yang statusnya dikembalikan kepada pemberi.

LAPORAN PENGADUAN GRATIFIKASI

Berikut hasil monitoring pengaduan Gratifikasi Tahun 2025, sebagai berikut:

5. Proposing Policies/Guidelines for management, establishment of an anti-gratification environment and prevention of corruption within the Company.
6. Coordinating dissemination activities of gratification ethics rules to internal and external parties of the agency.
7. In its implementation, UPG can propose and create a gratification management system based on Information Technology.
8. Providing clear information to any party related to the provisions contained in the Gratification Control Guidelines.
9. Monitoring the implementation of these Guidelines and provide periodic reports every 6 (six) months to the Board of Directors including reports arising after this provision.

SCOPE OF GRATIFICATION CONTROL REPORTING

1. KIE Gratification Control
2. Gratification Rejection
3. Gratification Acceptance
4. Giving Gratification
5. Gratification Request

GRATIFICATION REPORTING PROTECTION

KIE provides protection efforts for reporters who comply with gratification provisions in the form of:

1. Protection from retaliation or treatment of an administrative nature of employment that is not objective and detrimental to the whistleblower, including but not limited to a decrease in position rank, a decrease in assessment, a proposal for transfer of duties/mutation, or other career obstacles.
2. Reassignment/mutation for the whistleblower in the event of intimidation or physical threat to the whistleblower.
3. Legal assistance in accordance with the applicable provisions in the Company.

SANCTIONS FOR VIOLATIONS

KIE strictly implements the gratification control policy within the Company. As a consequence, any violation of the provisions in the gratification control guidelines will be subject to sanctions in accordance with applicable regulations in the Company and potentially subject to criminal acts of bribery in accordance with applicable laws and regulations.

GRATIFICATION CONTROL REPORT

In 2025 there were 51 (fifty-one) gratification receipts, whose status was returned to the giver.

GRATIFICATION CONTROL REPORT

The following are monitoring results of Gratification in 2025:

Bulan Month	Jumlah Pengadaan Total Procurement	Keterangan Remarks
Januari January	1	Gratifikasi yang Tidak wajib dilaporkan Gratification that are not required to be reported
Februari February	0	Gratifikasi yang Tidak wajib dilaporkan Gratification that are not required to be reported
Maret March	11	Gratifikasi yang Tidak wajib dilaporkan Gratification that are not required to be reported
April April	1	Gratifikasi yang Tidak wajib dilaporkan Gratification that are not required to be reported
Mei May	2	Gratifikasi yang Tidak wajib dilaporkan Gratification that are not required to be reported
Juni June	1	Gratifikasi yang Tidak wajib dilaporkan Gratification that are not required to be reported
Juli July	1	Gratifikasi yang Tidak wajib dilaporkan Gratification that are not required to be reported
Agustus August	19	Gratifikasi yang Tidak wajib dilaporkan Gratification that are not required to be reported
September September	4	Gratifikasi yang Tidak wajib dilaporkan Gratification that are not required to be reported
Oktober October	0	Gratifikasi yang Tidak wajib dilaporkan Gratification that are not required to be reported
November November	0	Gratifikasi yang Tidak wajib dilaporkan Gratification that are not required to be reported
Desember December	11	Gratifikasi yang Tidak wajib dilaporkan Gratification that are not required to be reported
TOTAL	**51**	

STATUS PENANGANAN

Berdasarkan hasil evaluasi dan tindak lanjut di atas, berikut kami sampaikan status penanganan atas pemberian gratifikasi yang terjadi sampai dengan semester II Tahun 2025:

HANDLING STATUS

Based on the results of the evaluation and follow-up above, here we convey the status of handling of gratification that occurred until the second semester of 2025:

No	Status Penanganan Handling Status	Jumlah Total
1.	Selesai/Finished	51
2.	Proses/In the Process	0

HASIL EVALUASI DAN TINDAK LANJUT

Dari data di atas, Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) telah melakukan evaluasi terkait penerimaan gratifikasi sampai dengan semester II Tahun 2025, sebagai berikut:

1. Sesuai SK Direksi No. 07/SKD/DIR/VI-2021 tentang Kebijakan Gratifikasi KIE, terdapat gratifikasi yang termasuk dalam kategori gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan, yaitu gratifikasi yang berlaku umum, tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku, dipandang sebagai wujud ekspresi keramahtamahan/penghormatan dalam hubungan sosial dalam batasan nilai yang wajar serta pemberian yang berada dalam ranah adat istiadat, kebiasaan, dan norma yang ada dalam masyarakat dalam batasan nilai yang wajar.

EVALUATION RESULTS AND FOLLOW-UP

Based on the data above, the Gratification Control Unit (UPG) conducted an evaluation of reported gratifications up to the second semester of 2025, with the following conclusions:

1. In accordance with the Director's Decree No. 07/SKD/DIR/VI-2021 concerning the KIE Gratification Policy, certain types of gratification fall under the category of non-reportable gratifications. These include common forms of gratification that do not conflict with prevailing laws and regulations, are considered expressions of hospitality/respect in social relations within reasonable value limits, or are given in accordance with prevailing customs, traditions, and societal norms within acceptable limits.

2. Berdasarkan SKD tersebut juga terdapat gratifikasi terkait kedinasan, yaitu gratifikasi dalam acara resmi kedinasan atau penugasan yang dilaksanakan oleh Insan KIE, pemberian-pemberian seperti plakat, *goody bags* berseberangan dengan standar etika yang berlaku. Penerimaan tersebut juga dipandang dalam konteks hubungan antar Perusahaan/Lembaga/Instansi. Secara filosofis, gratifikasi yang diterima oleh Insan KIE tersebut ditujukan atau diperuntukkan kepada Perusahaan, bukan kepada personal yang mewakili Perusahaan.
3. Berdasarkan hal tersebut, maka Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) tidak melanjutkan proses laporan yang telah diterima sampai dengan Semester II Tahun 2025 dikarenakan laporan gratifikasi tersebut masuk dalam kategori gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan maupun gratifikasi terkait kedinasan, sehingga laporan dinyatakan selesai (ditutup).
4. Atas penerimaan gratifikasi tersebut, dapat diterima dan dimiliki pemanfaatannya oleh Perusahaan maupun personal yang mewakili perusahaan.

2. The decree also recognizes official duty-related gratifications, such as those received in formal events or assignments carried out by KIE personnel. Such items may include plaques or goody bags, which ,although potentially inconsistent with general ethical standards, are understood to be part of Inter-Company/Institutional Relations. Philosophically, such gratifications are deemed to be directed to the Company, not to the individuals representing the Company.

3. Based on this understanding, the Gratification Control Unit (UPG) decided not to proceed with further reporting processes for the submissions received up to the second semester of 2025. The reports were closed as the gratifications were classified as either non-reportable or duty-related gratifications.

4. As such, the gratifications received may be accepted and utilized either by the Company or by the individual representatives of the Company.

Benturan Kepentingan
Conflict of Interest

KEBIJAKAN BENTURAN KEPENTINGAN

Benturan kepentingan adalah keadaan dimana terdapat perbedaan antara kepentingan ekonomis Perusahaan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau pemegang saham utama, atau pengendali yang dapat merugikan Perusahaan. Kegiatan bisnis KIE pada umumnya tidak terlepas dari hubungan dan interaksi antara para pihak baik internal maupun eksternal. Hal yang sering terjadi dalam hubungan kegiatan bisnis sehari-hari dan tidak terhindarkan adalah adanya konflik kepentingan dari satu pihak kepada pihak lainnya. Untuk menghindari hal tersebut, KIE menetapkan pedoman penanganan benturan kepentingan yang tertuang pada Surat Keputusan Direksi No. 6/ SKD/DIR/III-2018 tanggal 12 Maret 2018.

PENCEGAHAN TERHADAP BENTURAN KEPENTINGAN

Guna menghindari benturan kepentingan, Pejabat Perusahaan wajib mempergunakan kewenangannya secara baik dan benar dengan mempertimbangkan kepentingan Perusahaan, masyarakat, Insan KIE dan berbagai faktor lainnya. Keterlibatan Insan KIE dalam menyadari dan memahami masalah benturan kepentingan diharapkan dapat mencegah terjadinya hal tersebut. Upaya yang dilakukan KIE antara lain mempublikasikan kebijakan dan pedoman benturan kepentingan, menjamin peraturan dan prosedur mudah diperoleh dan diketahui, serta memberikan pengarahan

CONFLICT OF INTEREST POLICY

A conflict of interest is a situation in which there is a difference between the Company's economic interests and the personal economic interests of members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, or majority or controlling shareholders that may be detrimental to the Company. KIE's business activities generally involve relationships and interactions among internal and external parties. One matter that frequently arises in day-to-day business relations and is often unavoidable is the existence of conflicts of interest between one party and another. To prevent such situations, KIE has established guidelines on the handling of conflicts of interest as stipulated in Board of Directors Decree No. 6/SKD/DIR/III-2018 dated March 12, 2018.

PREVENTION OF CONFLICTS OF INTEREST

To avoid conflicts of interest, Company officials are required to exercise their authority properly and appropriately by taking into account the interests of the Company, the community, KIE personnel, and various other relevant factors. The involvement of KIE personnel in recognizing and understanding conflict of interest issues is expected to help prevent such situations from arising. Measures undertaken by KIE include publishing policies and guidelines on conflicts of interest, ensuring that relevant rules and procedures are readily accessible and known, and providing guidance on the handling of conflicts of

tentang penanganan benturan kepentingan, termasuk juga kepada pihak-pihak luar yang berkaitan atau berhubungan dengan Perusahaan.

Insan KIE yang memiliki potensi benturan kepentingan dalam salah satu kegiatan Perusahaan wajib memberitahukan Perusahaan. Informasi tersebut disampaikan menggunakan formulir yang disediakan Perusahaan.

MEKANISME PELAPORAN TERHADAP BENTURAN KEPENTINGAN

Apabila terjadi situasi benturan kepentingan, maka Insan KIE wajib melaporkan hal tersebut melalui:

1. Atasan Langsung
   Penyampaian surat pernyataan benturan kepentingan kepada atasan langsung dan Atasan mempelajari situasi yang menunjukkan indikasi adanya benturan kepentingan untuk mengambil keputusan situasi tersebut.
2. Sistem Pelaporan Pelanggaran (WBS)
   Pelaporan melalui WBS dilakukan apabila pelapor adalah Insan KIE atau Pemangku Kepentingan lainnya mengetahui potensi terjadinya benturan kepentingan di Perusahaan dengan melampirkan bukti pelaporan. Pelapor dapat memonitor tindak lanjut penanganan yang dilaporkan.

SANKSI TERHADAP BENTURAN KEPENTINGAN

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam pedoman benturan kepentingan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Perusahaan.

IMPLEMENTASI PENGENDALIAN BENTURAN KEPENTINGAN

Pada periode tahun 2025 telah dilakukan pengendalian terhadap benturan kepentingan Insan KIE, sebagai berikut:

1. Sesuai SK Direksi No.6/SKD/DIR/III-2018 tentang Kebijakan Benturan Kepentingan KIE, Bab II A butir 13 dinyatakan bahwa setiap tahunnya Insan Perusahaan wajib membuat pernyataan tidak memiliki benturan kepentingan atas setiap keputusan yang dibuat olehnya dan mematuhi kebijakan Kode Etik Perusahaan. Atas dasar tersebut, pada awal Januari 2025 telah dilakukan penandatangan piagam pakta integritas dan pernyataan tidak ada benturan kepentingan oleh seluruh insan KIE, (dalam hal ini Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan KIE).

2. Selain itu, sesuai SK Direksi No. 6/SKD/ DIR/III-2018 tentang Kebijakan Benturan Kepentingan KIE, Bab II B butir 1.2.2 dinyatakan bahwa Insan Perusahaan yang terlibat langsung dalam proses pengadaan barang dan/atau jasa harus membuat dan menandatangani Pakta Integritas yang menyatakan tidak ada benturan kepentingan dalam proses pengadaan barang dan/atau jasa tersebut. Pakta ini ditandatangani bersama dengan perwakilan pihak vendor/*supplier*. Atas dasar tersebut, telah dilakukan penandatangan Pakta Integritas terkait

interest, including to external parties related to or dealing with the Company.

KIE personnel who have a potential conflict of interest in any Company activity are required to notify the Company. Such information must be submitted using the form provided by the Company.

REPORTING MECHANISM FOR CONFLICTS OF INTEREST

If a conflict of interest situation arises, KIE personnel are required to report it through the following channels:

1. Direct Supervisor
   Submission of a conflict of interest declaration letter to the direct supervisor, who will review the situation indicating the existence of a conflict of interest in order to make a decision regarding the matter.
2. Whistleblowing System (WBS)
   Reporting through the WBS may be made when the reporter, whether KIE personnel or other stakeholders, becomes aware of a potential conflict of interest within the Company, supported by evidence of the report. The reporter may monitor the follow-up handling of the matter reported.

SANCTIONS FOR CONFLICTS OF INTEREST

Violations of the provisions set forth in the conflict of interest guidelines shall be subject to sanctions in accordance with the rules and regulations applicable within the Company.

IMPLEMENTATION OF CONFLICT OF INTEREST CONTROL

In 2025, the Company implemented conflict of interest controls for KIE personnel as follows:

1. Pursuant to Board of Directors Decree No. 6/SKD/DIR/III-2018 concerning KIE's Conflict of Interest Policy, Chapter II A point 13, it is stipulated that every year Company personnel are required to make a declaration stating that they have no conflict of interest in respect of any decisions made by them and that they comply with the Company's Code of Conduct policy. Based on this provision, at the beginning of January 2025, all KIE personnel, (the Board of Commissioners, the Board of Directors, and KIE employees, signed the Integrity Pact Charter and a declaration of no conflict of interest).
2. In addition, pursuant to Board of Directors Decree No. 6/SKD/DIR/III-2018 concerning KIE's Conflict of Interest Policy, Chapter II B point 1.2.2, it is stipulated that Company personnel who are directly involved in the procurement of goods and/or services must prepare and sign an Integrity Pact declaring that there is no conflict of interest in the relevant procurement process. This pact is signed together with representatives of the vendor/supplier. Based on this provision, an Integrity Pact relating to conflicts of interest has been signed each time a procurement cooperation

benturan kepentingan setiap dilakukan kerjasama proses pengadaan pada saat penerbitan PO/SPK dengan pihak vendor/*supplier* dan berjalan secara *continue*.

PENCEGAHAN TERHADAP BENTURAN KEPENTINGAN

Secara berkala, Insan KIE melakukan tanda tangan Pakta Integritas yang dilakukan setiap awal tahun. Dalam mendukung pelaksanaan GCG oleh setiap Insan KIE, dibutuhkan pernyataan komitmen dan integritas kepada Perusahaan guna menghindari tindakan melawan hukum yang akan merugikan kepentingan Perusahaan. Pernyataan komitmen yang ada di Perusahaan antara lain:

1. Daftar Khusus
   Daftar khusus yang di maksud adalah merupakan daftar yang berisi kepemilikan saham Dewan Komisaris dan Direksi beserta keluarganya di perusahaan lainnya. Daftar khusus diperbarui setiap tahun dan disimpan oleh Perusahaan.
2. Pernyataan Tidak Adanya Benturan Kepentingan
   Dalam rangka mendukung praktik GCG, Dewan Komisaris, Direksi, dan pihak-pihak yang terkait dalam aktivitas bisnis dan operasional Perusahaan dilarang melakukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan, baik langsung maupun tidak langsung. Setiap tahun Dewan Komisaris dan Direksi menandatangani surat pernyataan mengenai benturan kepentingan tersebut. Insan KIE yang memiliki potensi benturan kepentingan dalam salah satu kegiatan Perusahaan wajib memberitahukan Perusahaan. Informasi tersebut disampaikan menggunakan formulir yang disediakan Perusahaan.

KEBIJAKAN KOMPENSASI JANGKA PANJANG: PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM OLEH PEGAWAI DAN/ATAU MANAJEMEN PERUSAHAAN (MSOP/ESOP)

Sepanjang tahun 2025, belum terdapat kebijakan terkait kompensasi atau insentif jangka panjang berbasis kinerja kepada manajemen dan/atau karyawan yang dimiliki oleh Perusahaan, antara lain berupa program kepemilikan saham oleh manajemen (*management stock ownership program*/MSOP) dan/atau program kepemilikan saham oleh karyawan (*employee stock ownership program*/ESOP). Sehingga tidak ada informasi terkait jumlah saham ESOP/MSOP dan realisasinya, jangka waktu pelaksanaan, persyaratan manajemen dan/atau karyawan yang berhak serta harga pelaksanaan atau penentuan harga pelaksanaan.

process is carried out upon the issuance of a Purchase Order (PO)/Work Order (SPK) with vendors/suppliers, and this practice has continued on an ongoing basis.

PREVENTION OF CONFLICTS OF INTEREST

On a periodic basis, KIE personnel sign an Integrity Pact at the beginning of each year. In supporting the implementation of Good Corporate Governance by all KIE personnel, a statement of commitment and integrity to the Company is required in order to prevent unlawful acts that may harm the interests of the Company. The statements of commitment implemented within the Company include the following:

1. Special Register
   The special register referred to is a register containing the share ownership of members of the Board of Commissioners and the Board of Directors, as well as their family members, in other companies. The special register is updated annually and maintained by the Company.
2. Statement of No Conflict of Interest
   In order to support the practice of Good Corporate Governance, the Board of Commissioners, the Board of Directors, and parties involved in the Company's business and operational activities are prohibited from conducting transactions involving conflicts of interest, whether directly or indirectly. Each year, the Board of Commissioners and the Board of Directors sign a statement regarding the absence of such conflicts of interest. KIE personnel who have the potential for a conflict of interest in any Company activity are required to notify the Company. Such information is submitted using the form provided by the Company.

LONG-TERM COMPENSATION POLICY: COMPANY MANAGEMENT AND/OR EMPLOYEE STOCK OWNERSHIP PROGRAM (MSOP/ESOP)

Throughout 2025, the Company did not have any policy relating to long-term compensation or performance-based incentives for management and/or employees, including in the form of a management stock ownership program (MSOP) and/or an employee stock ownership program (ESOP). Accordingly, there is no information regarding the number of ESOP/MSOP shares and their realization, implementation period, eligibility requirements for management and/or employees, or the exercise price or the method of determining the exercise price.

06 →

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Social and Environmental Responsibility





Komitmen dan Kebijakan
Commitment and Policy

KIE berkomitmen untuk menjalankan kegiatan usaha secara berkelanjutan dengan mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam setiap proses bisnisnya. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penerapan prinsip Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang menjadi bagian dari strategi Perusahaan.

Perusahaan mengimplementasikan Sistem Manajemen Terintegrasi yang mencakup ISO 9001:2015 (Manajemen Mutu), ISO 14001:2015 (Manajemen Lingkungan), serta Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3). Selain itu, penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) serta manajemen risiko menjadi landasan dalam memastikan praktik bisnis yang bertanggung jawab.

KIE juga berkomitmen untuk menjalankan praktik bisnis yang tidak hanya berorientasi pada profit, namun juga memberikan nilai tambah bagi lingkungan dan masyarakat sekitar melalui program TJSL yang terstruktur.

KIE is committed to conducting its business activities sustainably by integrating economic, social, and environmental aspects into all business processes. This commitment is realized through the implementation of Social and Environmental Responsibility (TJSL) principles as part of the Company's strategy.

The Company implements an Integrated Management System covering ISO 9001:2015 (Quality Management), ISO 14001:2015 (Environmental Management), and the Occupational Health and Safety Management System (OHSMS). In addition, the application of Good Corporate Governance (GCG) principles and risk management serves as the foundation to ensure responsible business practices.

KIE is also committed to conducting business practices that are not solely profit-oriented but also create added value for the environment and surrounding communities through structured TJSL programs.

Strategi TJSL
TJSL Strategy

Strategi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) KIE disusun dengan mengacu pada prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yang mengedepankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan pemberdayaan sosial.
Strategi ini diarahkan untuk:

1. Mengintegrasikan aspek keberlanjutan ke dalam strategi bisnis.
2. Meningkatkan kontribusi nyata terhadap masyarakat.
3. Meminimalkan dampak lingkungan dari aktivitas operasional.

KIE mengadopsi pendekatan *shared value*, di mana program TJSL tidak hanya memberikan manfaat sosial, tetapi juga mendukung keberlanjutan bisnis perusahaan. Hal ini tercermin dalam tema keberlanjutan perusahaan tahun 2025 yaitu "KIEta Memberi Dampak Nyata", yang menegaskan fokus pada penciptaan dampak yang terukur dan berkelanjutan

KIE's Social and Environmental Responsibility (TJSL) strategy is developed based on sustainable development principles emphasizing a balance between economic growth, environmental preservation, and social empowerment.

This strategy is directed to:

1. Integrate sustainability aspects into business strategy.
2. Enhance tangible contributions to the community.
3. Minimize environmental impacts from operational activities.

KIE adopts a shared value approach, where TJSL programs not only provide social benefits but also support the sustainability of the Company's business. This is reflected in the Company's 2025 sustainability theme, "KIEta Creating Tangible Impact", which emphasizes a focus on generating measurable and sustainable impact.

Visi dan Misi TJSL
Vision and Mission of TJSL

Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan mengacu dan selaras dengan visi dan misi Perusahaan dalam menciptakan pertumbuhan usaha yang berkelanjutan serta memberikan nilai tambah bagi pemangku kepentingan.

Perusahaan mengintegrasikan aspek keberlanjutan ke dalam strategi bisnis dengan tujuan menyeimbangkan kepentingan jangka pendek dan jangka panjang serta mendukung pengembangan usaha yang berkelanjutan.

The implementation of Social and Environmental Responsibility (TJSL) refers to and aligns with the Company's vision and mission in creating sustainable business growth and delivering added value to stakeholders.

The Company integrates sustainability aspects into its business strategy with the objective of balancing short-term and long-term interests while supporting sustainable business development.

Program TJSL
TJSL Programs

Program TJSL dilaksanakan secara terstruktur melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat, pengelolaan lingkungan, serta kegiatan sosial di sekitar wilayah operasional Perusahaan.

Pada tahun 2025, Perusahaan merealisasikan anggaran program pemberdayaan masyarakat sebesar Rp1,97 miliar sebagai bagian dari komitmen dalam mendukung kesejahteraan masyarakat.

Pelaksanaan program dilakukan melalui pendekatan KIEta yang menekankan keterlibatan aktif masyarakat dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.

Sepanjang tahun 2025, Perusahaan melaksanakan berbagai program TJSL yang difokuskan pada peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan, serta pemberdayaan masyarakat, antara lain:

1. Edukasi Bahaya Narkoba
   Perusahaan berkolaborasi dengan BNN Kota Bontang dalam penyelenggaraan seminar edukasi bahaya narkoba bagi siswa SMA/SMK di Kota Bontang. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran generasi muda terhadap risiko penyalahgunaan narkoba serta upaya pencegahannya sejak dini.
2. Bimbingan Teknis Keamanan Pangan bagi UMK
   Perusahaan menyelenggarakan bimbingan teknis keamanan pangan bagi pelaku Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang diikuti oleh 30 peserta dari wilayah Loktuan dan Guntung. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pelaku usaha mikro dan kecil dalam menjaga kualitas dan keamanan produk pangan.
3. Santunan Anak Yatim Piatu
   Perusahaan menyalurkan santunan kepada 40 anak yatim piatu dari sejumlah panti asuhan di Kota Bontang dalam momentum Bulan Ramadhan sebagai bentuk kepedulian sosial.

TJSL programs are implemented in a structured manner through community empowerment activities, environmental management, and social initiatives within the Company's operational areas.

In 2025, the Company realized a community empowerment program budget of Rp1.97 billion as part of its commitment to supporting community well-being.

Program implementation is carried out through the KIEta approach, which emphasizes active community engagement and collaboration with numerous stakeholders.

Throughout 2025, the Company implemented numerous TJSL programs focused on improving health, education, and community empowerment, including:

1. Drug Abuse Awareness Education
   The Company collaborated with the Bontang City National Narcotics Agency (BNN) to conduct educational seminars on drug abuse risks for high school and vocational school students in Bontang. This program aims to increase awareness among the younger generation regarding the risks of drug abuse and preventive measures.
2. Food Safety Technical Guidance for MSMEs
   The Company conducted food safety technical training for Home Industry Food (IRTP) business players, attended by 30 participants from Loktuan and Guntung. This program aims to enhance the capacity of micro and small enterprises in maintaining product quality and food safety.
3. Orphan Assistance Program
   The Company provided assistance to 40 orphans from several orphanages in Bontang during the Ramadan period as a form of social care.

4. Pelatihan Penjamah Makanan
   Perusahaan menyelenggarakan pelatihan bagi 36 pengelola kantin sekolah dan guru UKS guna meningkatkan standar keamanan pangan di lingkungan sekolah.
5. Program TRABAS Stunting dan BERSERI
   Perusahaan melaksanakan program pencegahan stunting melalui kegiatan skrining anemia bagi remaja serta edukasi kesehatan kepada pelajar, guru, dan orang tua untuk meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya pola hidup sehat.
6. Workshop Kegawatdaruratan Pelajar
   Perusahaan menyelenggarakan workshop kegawatdaruratan yang diikuti sekitar 150 pelajar sebagai bagian dari upaya peningkatan pengetahuan dasar penanganan kondisi darurat.
7. Program Kampung Iklim (PROKLIM) Perusahaan melaksanakan program pendampingan Kampung Iklim Pesisir BSD sebagai bagian dari upaya mendorong peran aktif masyarakat dalam adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
8. Rumah KIEta Lestari
   Perusahaan melaksanakan pembinaan dan pendampingan kepada kelompok tani melalui pembangunan rumah budidaya *maggot* sebagai salah satu tempat untuk memproduksi pakan ikan alternatif. Dengan program ini diharapkan masyarakat dapat menjadi unit usaha produktif, mengurangi volume sampah organik, dan mendapatkan sumber pakan alternatif bernilai ekonomis.

Melalui berbagai program tersebut, Perusahaan berupaya memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat serta mendukung pembangunan berkelanjutan di wilayah operasional.

4. Food Handler Training
   The Company organized training for 36 school canteen operators and school health unit (UKS) teachers to improve food safety standards in the school environment.
5. TRABAS Stunting and BERSERI Program
   The Company implemented stunting prevention programs through anemia screening for adolescents and health education for students, teachers, and parents to increase awareness of healthy lifestyles.
6. Student Emergency Response Workshop
   The Company conducted an emergency response workshop attended by approximately 150 students to enhance basic knowledge in handling emergency situations.
7. Climate Village Program (PROKLIM)
   The Company implemented mentoring activities for the Coastal BSD Climate Village Program as part of efforts to encourage active community participation in climate change adaptation and mitigation.
8. Rumah KIEta Lestari
   The Company conducted coaching and mentoring for farmer groups through the development of maggot cultivation houses as facilities for producing alternative fish feed. This program aims to support community productivity, reduce organic waste volume, and provide economically valuable alternative feed sources.

Through these programs, the Company strives to provide tangible contributions to improving community quality of life while supporting sustainable development in its operational areas.

TJSL Bidang Hak Asasi Manusia
TJSL in the Human Rights Aspect

KOMITMEN DAN KEBIJAKAN PERUSAHAAN TERKAIT TJSL HAK ASASI MANUSIA

Perusahaan menjalankan kegiatan operasional dengan mengacu pada prinsip tata kelola yang baik, termasuk dalam memastikan hubungan kerja yang profesional, adil, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

RUANG LINGKUP TJSL HAK ASASI MANUSIA

Ruang lingkup tanggung jawab sosial di bidang Hak Asasi Manusia mencakup perlindungan hak tenaga kerja, penerapan prinsip non-diskriminasi, kesetaraan kesempatan kerja, serta penghormatan terhadap hak masyarakat di sekitar wilayah operasional.

COMPANY COMMITMENT AND POLICY RELATED TOTSJL ON HUMAN RIGHTS

The Company conducts its operational activities by adhering to good governance principles, including ensuring professional and fair employment relationships in accordance with prevailing regulations.

SCOPE OF TJSL ON HUMAN RIGHTS

The scope of social responsibility in the area of Human Rights includes the protection of labor rights, implementation of non-discrimination principles, equal employment opportunities, and respect for the rights of communities surrounding the operational areas.

PERENCANAAN TJSL HAK ASASI MANUSIA

Perencanaan dilakukan melalui integrasi kebijakan ketenagakerjaan, kode etik Perusahaan, serta prinsip GCG dalam operasional perusahaan.

PELAKSANAAN INISIATIF TJSL HAK ASASI MANUSIA

Pelaksanaan dilakukan melalui penerapan kebijakan perusahaan dalam pengelolaan tenaga kerja dan hubungan kerja yang profesional.

TJSL PLANNING ON HUMAN RIGHTS

Planning is carried out through the integration of employment policies, the Company's code of conduct, and GCG principles within the Company's operations.

IMPLEMENTATION OF TJSL INITIATIVES ON HUMAN RIGHTS

Implementation is carried out through the application of Company policies in workforce management and professional employment relationships.

TJSL Terkait Operasi yang Adil
TJSL in the Fair Operating Practices Aspect

KOMITMEN DAN KEBIJAKAN PERUSAHAAN TERKAIT TJSL OPERASI YANG ADIL

Perusahaan berkomitmen untuk menjalankan kegiatan usaha secara transparan dan akuntabel melalui penerapan prinsip *Good Corporate Governance* serta Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP).

RUANG LINGKUP TJSL OPERASI YANG ADIL

Ruang lingkup mencakup penerapan tata kelola perusahaan, pengendalian benturan kepentingan, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PERENCANAAN TJSL OPERASI YANG ADIL

Perencanaan dilakukan melalui penyusunan kebijakan dan pedoman perusahaan yang mendukung penerapan prinsip tata kelola yang baik.

PELAKSANAAN INISIATIF TJSL BIDANG OPERASI YANG ADIL

Pelaksanaan dilakukan melalui penerapan sistem pengendalian internal, kebijakan benturan kepentingan, serta mekanisme pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*).

COMPANY COMMITMENT AND POLICY RELATED TO TJSL ON FAIR OPERATING PRACTICES

The Company is committed to conducting business activities transparently and accountably through the implementation of Good Corporate Governance principles and the Anti-Bribery Management System (ABMS).

SCOPE OF TJSL ON FAIR OPERATING PRACTICES

The scope includes the implementation of corporate governance, management of conflicts of interest, and compliance with applicable laws and regulations.

TJSL PLANNING ON FAIR OPERATING PRACTICES

Planning is carried out through the development of Company policies and guidelines that support the implementation of good governance principles.

IMPLEMENTATION OF TJSL INITIATIVES IN FAIR OPERATING PRACTICES

Implementation is carried out through the application of internal control systems, conflict of interest policies, and a whistleblowing system mechanism.

TJSL Bidang Lingkungan Hidup
TJSL in the Environmental Aspect

KOMITMEN DAN SERTIFIKASI BIDANG LINGKUNGAN

Perusahaan memiliki komitmen kuat untuk melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup secara sistematis, terukur, dan berkelanjutan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial serta operasional. Komitmen tersebut diimplementasikan melalui penerapan Sistem Manajemen Lingkungan yang mengacu pada standar ISO 14001:2015, guna memastikan seluruh kegiatan operasional memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Dalam pelaksanaannya, Perusahaan menetapkan kebijakan, prosedur, serta mekanisme pengendalian dampak lingkungan yang mencakup identifikasi aspek dan dampak lingkungan, pengelolaan limbah, efisiensi penggunaan sumber daya, serta pemantauan dan evaluasi kinerja lingkungan secara berkala. Pengelolaan tersebut didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten, termasuk tenaga yang memiliki sertifikasi sebagai Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA), Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL), dan/atau Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Udara (PPPU) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Perusahaan juga melaksanakan upaya pengelolaan lingkungan internal melalui penerapan praktik operasional ramah lingkungan, seperti pengelolaan ruang terbuka hijau, pengendalian emisi dan limbah, serta penerapan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*). Kegiatan ini didukung dengan pemantauan lingkungan secara berkala serta pelaporan sesuai dengan ketentuan regulasi.

Sebagai pengelola kawasan industri, KIE mengembangkan kawasan secara terencana dan terintegrasi melalui pembagian zona kawasan industri besar, menengah, kecil, serta kawasan perkantoran. Pengembangan kawasan ini dilaksanakan dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta dilengkapi dengan infrastruktur pengelolaan lingkungan seperti instalasi pengolahan air limbah terpadu, sistem drainase, dan pengendalian pencemaran, sehingga mendukung terciptanya ekosistem industri yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

COMMITMENT AND ENVIRONMENTAL CERTIFICATION

The Company has a strong commitment to implementing environmental management in a systematic, measurable, and sustainable manner as part of its social and operational responsibilities. This commitment is implemented through the adoption of an Environmental Management System in accordance with the ISO 14001:2015 standard, ensuring that all operational activities comply with applicable laws and regulations as well as the principles of pollution prevention and environmental protection.

In its implementation, the Company establishes policies, procedures, and environmental impact control mechanisms covering the identification of environmental aspects and impacts, waste management, resource efficiency, as well as periodic monitoring and evaluation of environmental performance. These efforts are supported by competent human resources, including personnel certified as Persons in Charge of Water Pollution Control (PPPA), Effluent Treatment Operational Persons in Charge (POPAL), and/or Persons in Charge of Air Pollution Control (PPPU) in accordance with prevailing regulations.

The Company also carries out internal environmental management initiatives through the implementation of environmentally friendly operational practices, such as the management of green open spaces, control of emissions and waste, and the application of the 3R principles (Reduce, Reuse, Recycle). These activities are supported by regular environmental monitoring and reporting in compliance with regulatory requirements.

As an industrial estate mangement, KIE develops its area in a planned and integrated manner through zoning for large, medium, and small-scale industrial areas, as well as office areas. This development considers environmental carrying capacity and capacity limits, and is supported by environmental management infrastructure such as centralized effluent treatment plants, drainage systems, and pollution control systems, thereby fostering a sustainable and environmentally responsible industrial ecosystem.

RKAP DAN RJP PROGRAM TJSL BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Perusahaan secara konsisten mengalokasikan anggaran dalam RKAP untuk mendukung program pengelolaan lingkungan hidup, termasuk pengendalian pencemaran dan pengelolaan limbah.

KEBIJAKAN LINGKUNGAN

Kebijakan lingkungan Perusahaan mencakup pengelolaan dampak operasional terhadap lingkungan melalui pengendalian pencemaran air dan udara, pengelolaan limbah B3, serta pelaksanaan program pelestarian lingkungan di kawasan industri.

PERUMUSAN TJSL BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Perumusan program dilakukan dengan mempertimbangkan dampak kegiatan operasional Perusahaan serta kebutuhan pengelolaan lingkungan di kawasan industri.

KEGIATAN DAN CAPAIAN KEGIATAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Sepanjang tahun pelaporan, Perusahaan melaksanakan berbagai kegiatan pengelolaan lingkungan hidup, antara lain:

1. Pengendalian pencemaran air
   Upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas badan air sekitar agar sesuai dengan baku mutu yang telah ditetapkan. Kegiatan meliputi perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan terhadap upaya pengendalian pencemaran air di KIE.
2. Pengendalian pencemaran udara
   Pengendalian pencemaran udara meliputi pencegahan dan penanggulangan pencemaran, serta pemulihan mutu udara dengan melakukan inventarisasi mutu udara ambien, pencegahan sumber pencemar, baik dari sumber bergerak maupun sumber tidak bergerak termasuk sumber gangguan serta penanggulangan keadaan darurat.
3. Pengelolaan limbah B3
   Berbagai macam aktivitas produksi yang terjadi di lingkungan KIE berpotensi menimbulkan limbah B3. Limbah yang dihasilkan dapat berupa limbah B3 berbentuk cair dan padat. Limbah B3 membutuhkan kontrol ketat dalam proses penanganan, transportasi, pengolahan dan pembuangan. Sistem pengelolaan limbah B3 termasuk pengumpulan limbah B3 hingga pengangkutan hingga tempat pengolahan atau pembuangan akhir.
4. Program penghijauan dan pemeliharaan lingkungan kerja
   Perusahaan secara konsisten melaksanakan program penghijauan dan pemeliharaan lingkungan kerja sebagai bagian dari komitmen terhadap keberlanjutan dan

CORPORATE WORK PLAN & BUDGET (RKAP) AND CORPORATE LONG-TERM PLAN (RJP) FOR ENVIRONMENTAL TJSL PROGRAMS

The Company consistently allocates budget in the RKAP to support environmental management programs, including pollution control and waste management.

ENVIRONMENTAL POLICY

The Company's environmental policy includes the management of operational impacts on the environment through water and air pollution control, hazardous waste (B3) management, and the implementation of environmental conservation programs within the industrial estate.

FORMULATION OF ENVIRONMENTAL CSR RESPONSIBILITY

The formulation of programs is carried out by considering the impacts of the Company's operational activities and the environmental management needs within the industrial estate.

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT ACTIVITIES AND ACHIEVEMENTS

During the reporting year, the Company implemented various environmental management activities, including:

1. Water Pollution Control
   Efforts to prevent and mitigate water pollution as well as restore water quality to ensure that surrounding water bodies meet established quality standards. Activities include planning, managing, and supervising water pollution control efforts within KIE.

2. Air Pollution Control
   Air pollution control includes prevention and mitigation of pollution as well as restoration of air quality through ambient air quality inventory, prevention of pollution sources from mobile and stationary sources, including disturbance sources, and emergency response handling.

3. Hazardous Waste (B3) Management
   Various production activities within KIE have the potential to generate B3 waste, both liquid and solid. B3 waste requires strict control in handling, transportation, processing, and disposal. The B3 waste management system includes waste collection through to transportation to treatment or final disposal facilities.

4. Greening and Workplace Environmental Maintenance Programs
   The Company consistently implements greening and workplace environmental maintenance programs as part

tanggung jawab sosial. Kegiatan ini meliputi penanaman dan perawatan tanaman, pengelolaan ruang terbuka hijau, serta upaya menjaga kebersihan dan kenyamanan area kerja.

of its commitment to sustainability and social responsibility. These activities include planting and maintaining vegetation, managing green open spaces, and maintaining cleanliness and comfort in the work environment.

Penanaman Mangrove di area Telok Bangko Loktuan & Transplantasi Terumbu Karang di area Konservasi Perairan (sekitaran Pulau Pasilan & Karang Segajah) Kota Bontang.

Mangrove Planting in Telong Bangko Loktuan Area & Coral Reefs Transplantations in Marine Conservations area (surrounding Pasilan Island & Karang Segajah (Bontang City)

PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP

Perusahaan memperoleh penghargaan PROPERDA Emas dan PROPERNAS Biru sebagai bentuk pengakuan atas kinerja pengelolaan lingkungan hidup.

ENVIRONMENTAL AWARDS

The Company received the PROPERDA Gold and PROPERNAS Blue award as recognition of its environmental management performance.

TJSL Bidang Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja

TJSL in the Employment, Occupational Health and Safety Aspect

TJSL BIDANG KETENAGAKERJAAN

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup TJSL di bidang ketenagakerjaan mencakup pengelolaan sumber daya manusia secara adil, inklusif, dan berkelanjutan, dengan memperhatikan aspek kesejahteraan, pengembangan kompetensi, serta perlindungan hak-hak karyawan.

KEBIJAKAN DAN KOMITMEN PERUSAHAAN

Perusahaan memandang TJSL di bidang ketenagakerjaan sebagai bagian penting dalam mendukung operasional yang berkelanjutan. Implementasi tanggung jawab tersebut mencakup penerapan praktik terbaik dalam pengelolaan sumber daya manusia, penyediaan jaminan kesehatan bagi karyawan, penerapan prinsip kesetaraan kesempatan kerja, penyediaan sarana serta sosialisasi keselamatan kerja, pengelolaan tingkat kecelakaan kerja, serta penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan bagi karyawan.

KEBEBASAN BERSERIKAT

Perusahaan menghormati hak karyawan untuk berserikat dan berkumpul sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai bagian dari upaya menciptakan hubungan industrial yang harmonis.

Pelaksanaan praktik ketenagakerjaan dilandasi oleh hubungan kerja yang harmonis antara manajemen dan karyawan, dengan memastikan terpenuhinya hak-hak karyawan, baik dalam bentuk kompensasi dan manfaat kerja maupun penghormatan terhadap kebebasan berserikat.

TJSL IN THE AREA OF EMPLOYMENT

SCOPE

The scope of TJSL in employment covers fair, inclusive, and sustainable human resource management, taking into account employee welfare, competency development, and the protection of employee rights.

COMPANY POLICIES AND COMMITMENTS

The Company considers TJSL in employment as an essential component in supporting sustainable operations. Its implementation includes the adoption of best practices in human resource management, provision of employee health benefits, application of equal employment opportunity principles, provision of occupational safety facilities and awareness programs, management of workplace accident rates, as well as the implementation of education and training programs for employees.

FREEDOM OF ASSOCIATION

The Company respects employees' rights to form and join associations in accordance with applicable laws and regulations, as part of fostering harmonious industrial relations.

Employment practices are based on a harmonious relationship between management and employees, ensuring the fulfillment of employee rights, both in terms of compensation and benefits, as well as respect for freedom of association.

KESETARAAN GENDER DAN KESEMPATAN KERJA

Perusahaan memberikan kesempatan kerja yang setara kepada seluruh karyawan tanpa diskriminasi, serta mendorong terciptanya lingkungan kerja yang inklusif dan berkeadilan.

SISTEM MANAJEMEN KARIR

Perusahaan menerapkan pengelolaan sumber daya manusia untuk mendukung pengembangan kompetensi karyawan.

Perusahaan menerapkan sistem pengembangan karir berbasis kompetensi yang dirancang untuk mendukung peningkatan kinerja individu dan organisasi secara berkelanjutan.

PROGRAM KETENAGAKERJAAN YANG DILAKUKAN

Program ketenagakerjaan Perusahaan meliputi pengelolaan kinerja, pengembangan kompetensi, serta peningkatan kesejahteraan karyawan.

PENGEMBANGAN KOMPETENSI DAN SERTIFIKASI

Perusahaan secara berkelanjutan melaksanakan program pendidikan, pelatihan, serta sertifikasi untuk meningkatkan kompetensi karyawan.

Sepanjang tahun 2025, Perusahaan telah melaksanakan 214 (dua ratus empat belas) program pelatihan dan 51 (lima puluh satu) sertifikasi bagi karyawan sebagai bagian dari pengembangan kompetensi.

WAKTU KERJA DAN HAK CUTI KARYAWAN

Perusahaan menetapkan pengaturan waktu kerja sebagai upaya untuk mencegah terjadinya eksploitasi tenaga kerja yang berlebihan. Sistem kerja yang diterapkan terdiri dari dua jenis, yaitu kerja shift dan non-shift. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Perusahaan memberlakukan 5 (lima) hari kerja dalam satu minggu dengan total waktu kerja maksimal 40 (empat puluh) jam atau setara dengan 8 (delapan) jam per hari.

Dalam hal terdapat kebutuhan operasional yang mengharuskan karyawan bekerja di luar jam kerja, Perusahaan memberikan kompensasi berupa upah lembur sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, Perusahaan juga menyediakan berbagai hak cuti bagi karyawan, yang meliputi cuti tahunan, cuti besar, cuti di luar tanggungan Perusahaan, cuti melahirkan, izin menikah, cuti perjalanan spiritual, serta hari libur nasional.

PROGRAM PENGADUAN KARYAWAN

Perusahaan menyediakan mekanisme pengaduan karyawan sebagai sarana komunikasi yang transparan dan akuntabel untuk menyampaikan aspirasi maupun keluhan.

GENDER EQUALITY AND EQUAL EMPLOYMENT OPPORTUNITIES

The Company provides equal employment opportunities to all employees without discrimination and promotes an inclusive and equitable working environment.

CAREER MANAGEMENT SYSTEM

The Company implements human resource management practices that support employee competency development.

A competency-based career development system is applied to support continuous improvement in both individual and organizational performance.

EMPLOYMENT PROGRAMS IMPLEMENTED

The Company's employment programs include performance management, competency development, and employee welfare enhancement.

COMPETENCY DEVELOPMENT AND CERTIFICATION

The Company continuously implements education, training, and certification programs to enhance employee competencies.

Throughout 2025, the Company conducted 214 (two hundred fourteen) training programs and 51 (fifty-one) certifications for employees as part of its competency development initiatives.

WORKING HOURS AND EMPLOYEE LEAVE RIGHTS

The Company regulates working hours to prevent excessive labor exploitation. The working system consists of two types of shift and non-shift work. In accordance with applicable regulations, the Company applies a 5-day (five) workweek with a maximum of 40 (forty) working hours or 8 (eight) hours per day.

In cases where operational needs require employees to work beyond normal working hours, the Company provides overtime compensation in accordance with prevailing regulations. Additionally, the Company provides various types of leave, including annual leave, extended leave, unpaid leave, maternity leave, marriage leave, religious/spiritual leave, and public holidays.

EMPLOYEE GRIEVANCE MECHANISM

The Company provides an employee grievance mechanism as a transparent and accountable communication channel for employees to convey aspirations and complaints.

TJSL BIDANG KESELAMATAN DAN KESEJAHTERAAN KERJA (K3)

KEBIJAKAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Pengelolaan aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) menjadi prioritas utama dalam operasional Perusahaan. Untuk itu, Perusahaan secara konsisten menerapkan sistem manajemen K3 guna meminimalkan potensi kecelakaan kerja serta risiko terhadap kesehatan pekerja.

Perusahaan telah menetapkan kebijakan dan prosedur keselamatan kerja yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan operasional sehari-hari.

Implementasi K3 dilakukan melalui:
1. Pengawasan dan pengendalian terhadap mitra kerja terkait penerapan keselamatan dan kesehatan kerja;
2. Pembentukan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3);
3. Pembentukan Tim Tanggap Darurat untuk untuk menanggulangi pemadaman kebakaran, keamanan dan evakuasi karyawan dengan fungsi dan tugas untuk menanggulangi keadaan darurat kebakaran;
4. Pelaksanaan kegiatan pengujian (*test*) terkait keselamatan dan kesehatan kerja;
5. Sosialisasi dan pelatihan terkait K3 bagi seluruh insan KIE.

Selain itu, sepanjang tahun 2025 Perusahaan mencatat total jam kerja sebesar 3.252.616 jam kerja, sebagai bagian dari pengelolaan operasional yang berorientasi pada keselamatan kerja.

PROGRAM BIDANG K3

1. Pembentukan P2K3
   Untuk memperkuat penerapan budaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan KIE, perusahaan membentuk Unit Kerja K3 yang secara khusus bertanggung jawab dalam mengelola dan mengawasi implementasi aspek keselamatan dan kesehatan kerja. Secara berkala, P2K3 menyelenggarakan rapat bulanan yang dipimpin oleh Direktur Keuangan serta dihadiri oleh seluruh anggota P2K3 KIE, yang terdiri dari para Kepala Divisi dan Kepala Departemen serta Kepala Bagian SBU.

   Melalui forum tersebut, berbagai hal terkait penerapan keselamatan dan kesehatan kerja dibahas serta dievaluasi secara bersama. Sejalan dengan upaya tersebut, KIE juga secara aktif menyelenggarakan berbagai program pelatihan dan kegiatan sosialisasi K3 yang ditujukan kepada seluruh insan KIE guna meningkatkan kesadaran dan pemahaman terhadap pentingnya penerapan keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan perusahaan.

TJSL IN OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY (OHS)

COMMITMENT AND IMPLEMENTATION OF OHS

The Company places Occupational Health and Safety (OHS) as a top priority in its operational activities. Accordingly, the Company consistently implements an OHS management system to minimize potential workplace accidents and health risks.

The Company has established OHS policies and procedures serving as guidelines for daily operational activities.

OHS implementation is carried out through:
1. Supervision and control of contractors and business partners regarding safety practices;
2. The establishment of the Occupational Health and Safety Committee (P2K3);
3. Establishment of an Emergency Response Team to handle fire extinguishing, security and evacuation of employees with functions and duties to handle fire emergencies;
4. Implementation of occupational health and safety testing and inspections;
5. Socialization and training on OHS to all KIE personnel.

Throughout 2025, the Company recorded a total of 3,252,616 safe working hours, reflecting its strong commitment to safety-oriented operations.

OHS PROGRAMS

1. Establishment of P2K3
   To strengthen the implementation of OHS culture within KIE, the Company has established a dedicated OHS Unit responsible for managing and supervising occupational health and safety practices. P2K3 regularly conducts monthly meetings chaired by the Director of Finance, and attended by all P2K3 members of KIE, including Division Heads and Department Heads, and SBU Head Division.

   These meetings serve as a forum to discuss and evaluate OHS implementation. In line with this, KIE actively conducts OHS training programs and awareness campaigns for all KIE personnel to enhance understanding and awareness of occupational health and safety within the Company's perimeter.

2. Pembentukan Tim Tanggap Darurat
   KIE membentuk Tim Tanggap Darurat yang anggotanya berasal dari seluruh unit kerja, diantaranya Tim Gugus Penanggulangan Kebakaran, Tim Pertolongan Pertama pada Kecelakaan, Tim Evakuasi, dan Tim SAR.

   Sebagai bagian dari upaya pengelolaan risiko dan kesiapsiagaan terhadap kondisi darurat, KIE juga telah menetapkan mekanisme serta prosedur penanganan keadaan darurat yang berkaitan dengan keselamatan dan lingkungan hidup. Ketentuan tersebut tertuang dalam dokumen PPUK3L-004 mengenai Kebijakan Kesiagaan dan Tanggap Darurat yang berlaku di lingkungan KIE.

3. Kecelakaan dan Penyakit Akibat Kerja
   KIE menempatkan perlindungan terhadap karyawan sebagai salah satu prioritas dalam lingkungan kerja. Perusahaan memastikan bahwa setiap karyawan memperoleh berbagai bentuk jaminan sosial ketenagakerjaan, yang meliputi jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan kematian, jaminan pensiun, serta jaminan kehilangan pekerjaan.

   KIE memiliki komitmen penuh dalam memastikan penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi seluruh karyawan. Melalui penerapan sistem K3 yang konsisten, perusahaan berupaya meminimalkan bahkan mencegah terjadinya kecelakaan kerja, baik di lingkungan kantor maupun di area proyek. Berkat konsistensi tersebut, sepanjang tahun 2025 tidak tercatat adanya insiden kecelakaan kerja di lingkungan KIE.

2. Establishment of an Emergency Response Team
   KIE formed an Emergency Response Team whose members came from all work units, including the Fire Management Team, First Aid Team for Accidents, Evacuation Team, and SAR Team.

   As part of efforts to manage risks and prepare for emergencies, KIE has also established mechanisms and procedures for handling emergencies related to safety and the environment. These provisions are contained in the PPUK3L-004 document regarding the Emergency Preparedness and Response Policy that applies within the KIE environment.

3. Occupational Accidents and Work-Related Illnesses
   The Company prioritizes employee protection by ensuring that all employees receive comprehensive employment social security benefits, including workplace accident insurance, old-age security, death benefits, pension benefits, and job loss insurance.

   KIE demonstrates a strong commitment to ensuring the implementation of Occupational Health and Safety (OHS) for all employees. Through consistent application of OHS systems, the Company strives to minimize and prevent workplace accidents in both office and project environments. As a result of these efforts, no workplace accidents were recorded throughout 2025.

TJSL Bidang Tanggung Jawab Terhadap Produk dan Pelanggan
TJSL in Product and Customer Responsibility

KOMITMEN DAN KEBIJAKAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL KEPADA KONSUMEN

Pada tahun 2025, tanggung jawab sosial terhadap konsumen tetap menjadi salah satu prioritas utama dalam pelaksanaan kegiatan bisnis Perusahaan. Untuk memastikan tersedianya produk dan layanan yang berkualitas, manajemen KIE terus mengarahkan proses bisnis agar senantiasa berfokus pada kepuasan pelanggan. Perusahaan juga senantiasa melakukan kalibrasi dan tera terhadap alat produksi yang digunakan guna memastikan akurasi pengukuran, menjaga kualitas produk, serta memenuhi standar dan ketentuan yang berlaku. KIE meyakini bahwa terjalinnya hubungan yang baik dengan konsumen merupakan faktor penting dalam mendukung keberhasilan dan keberlanjutan usaha Perusahaan.

COMMITMENT AND POLICY ON CONSUMER RESPONSIBILITY

In 2025, social responsibility towards consumers remained a top priority in the Company's business activities. To ensure the availability of quality products and services, KIE management continues to direct business processes to maintain a focus on customer satisfaction. The Company also continuously calibrates and verifies the production equipment used to ensure measurement accuracy, maintain product quality, and comply with applicable standards and regulations. KIE believes that establishing good relationships with consumers is a crucial factor in supporting the success and sustainability of the Company's business.

KIE menetapkan Standar Pelayanan Minimum bagi konsumen sebagai pedoman bagi setiap unit kerja agar memiliki kesamaan visi dalam menyusun program kerja yang berfokus pada kepuasan pelanggan. Komitmen tanggung jawab perusahaan terhadap konsumen tersebut dituangkan dalam kebijakan Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang telah disahkan oleh seluruh Direksi KIE pada 30 Juli 2021. Kebijakan ini mencakup prinsip pelayanan yang meliputi tepat mutu, tepat waktu, tepat jumlah, tepat harga, tepat jenis, serta tepat tempat.

KIE has established a Minimum Service Standard as a guideline for all business units to align their programs with customer satisfaction objectives. This commitment is formalized through the Minimum Service Standard (SPM) policy, which was approved by the Board of Directors on July 30, 2021. The policy includes service principles covering quality, timeliness, quantity, price, type, and place accuracy.

KEPATUHAN SOSIAL EKONOMI

Perusahaan memastikan bahwa seluruh layanan yang diberikan telah memenuhi standar yang ditetapkan serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

SOCIO-ECONOMIC COMPLIANCE

The Company ensures that all services provided meet established standards and comply with applicable regulations.

SARANA DUKUNGAN PELANGGAN

Perusahaan menyediakan sarana dukungan pelanggan melalui sistem digital SIRKEL (Sistem Lapor Keluh) yang digunakan untuk menampung dan mengelola keluhan pelanggan secara terintegrasi. Melalui implementasi SIRKEL, Perusahaan berhasil meningkatkan efektivitas penanganan keluhan pelanggan.

Selain meningkatkan kecepatan respons, sistem ini juga mendukung dokumentasi dan pemantauan tindak lanjut keluhan secara lebih optimal, serta membantu mengurangi terjadinya keluhan berulang. Tingkat kepuasan pelanggan pada tahun 2025 mencapai 98,74% (kategori sangat baik).

CUSTOMER SUPPORT FACILITIES

The Company provides customer support through a digital platform called SIRKEL (Complaint Reporting System), which is used to manage and handle customer complaints in an integrated manner. Through the implementation of SIRKEL, the Company has improved the effectiveness of complaint handling.

In addition to enhancing response time, the system supports proper documentation and monitoring of complaint resolution, while also reducing recurring complaints. Customer satisfaction in 2025 reached 98.74% (very good category).

TJSL Bidang Pengembangan Sosial Kemasyarakatan
TJSL in Community Social Empowerment

Perusahaan berkomitmen untuk berperan aktif dalam mendukung pengembangan sosial serta perbaikan kualitas hidup masyarakat di sekitar wilayah operasional. Komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai program TJSL yang berfokus pada bidang Pendidikan, Kesehatan, Lingkungan Hidup, Sosial Budaya Ekonomi, serta dukungan terhadap kegiatan sosial kemasyarakatan. Perusahaan juga menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah untuk memastikan bahwa program yang dijalankan dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan. Melalui berbagai inisiatif tersebut, Perusahaan berharap dapat berkontribusi dalam menciptakan hubungan yang harmonis dengan masyarakat sekaligus mendorong terciptanya pembangunan sosial yang lebih baik.

The Company is committed to actively contributing to social development and improving the quality of life of communities surrounding its operational areas. This commitment is realized through various TJSL programs focusing on Education, Health, Environment, Socio-Cultural and Economic Development, as well as support for community social activities. The Company also collaborates with various stakeholders, including local governments, to ensure that the programs implemented provide sustainable benefits. Through these initiatives, the Company aims to foster harmonious relationships with the community while contributing to better social development.

Komitmen tersebut tercermin dari diraihnya Penghargaan TJSLP *Awards* atas kerja sama dan sinergi dalam pelaksanaan pembangunan Kota Bontang yang mencakup sektor kesejahteraan sosial, pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan, seni dan budaya, keagamaan, kewirausahaan, infrastruktur, serta lingkungan.

This commitment is reflected in the achievement of the TJSLP Awards, recognizing collaboration and synergy in supporting the development of Bontang City across sectors such as social welfare, education, employment, health, arts and culture, religion, entrepreneurship, infrastructure, and environment.

KEBIJAKAN TJSL KIE

Pelaksanaan TJSL dilakukan melalui pendekatan KIEta yang menekankan kolaborasi dengan masyarakat.

KIE TJSL POLICY

TJSL implementation is carried out through the KIEta approach, which emphasizes collaboration with the community.

REALISASI PROGRAM TJSL TAHUN 2025

Selama tahun 2025, Perusahaan menjalankan berbagai program TJSL sebagai wujud komitmen dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Program-program tersebut diwujudkan melalui sejumlah kegiatan yang telah dilaksanakan, di antaranya sebagai berikut:

TJSL PROGRAM REALIZATION IN 2025

During 2025, the Company implemented various TJSL programs as part of its commitment to sustainable development.

These programs were carried out through the following initiatives:

BIDANG PENDIDIKAN
1. Edukasi Bahaya Narkoba
2. Sekolah Sehat KIEta
3. School First Aid
4. Donasi Pembangunan
5. Praktek Kerja Lingkungan

EDUCATION SECTOR
1. Drug Abuse Awareness Education
2. Sekolah Sehat KIEta
3. School First Aid
4. Development Donation
5. Environmental Internship Program

BIDANG KESEHATAN
1. Berseri Bersama TJSL KIE
2. TRABAS Stunting

HEALTH SECTOR
1. Berseri Bersama TJSL KIE
2. TRABAS Stunting Program

BIDANG LINGKUNGAN
Perusahaan melaksanakan kegiatan pelestarian lingkungan, melalui berbagai program keanekaragaman hayati, antara lain KIEta Peduli Bumi, Penanaman Mangrove dan Terumbu Karang, dan Program Kampung Iklim.

ENVIRONMENTAL SECTOR
The Company implemented environmental conservation initiatives through biodiversity programs, including: KIEta Peduli Bumi Mangrove and Coral Reef Planting Climate Village Program.

BIDANG SOSIAL, BUDAYA DAN EKONOMI KEAGAMAAN

1. Pendampingan UMKM
2. Rumah KIEta Lestari
3. Pinjam Pakai Lahan

SOCIAL, CULTURAL, AND ECONOMIC (RELIGIOUS) SECTOR
1. MSME Assistance Program
2. Rumah KIEta Lestari
3. Land Lending Program

Judul Title	Kolaborasi dengan BNN Kota Bontang: Seminar Edukasi Bahaya Narkoba Collaboration with BNN Bontang: Drug Abuse Awareness Seminar
Kegiatan Activity	Sebagai bagian dari rangkaian Bulan K3 Nasional (BK3N) 2025, kegiatan ini bertujuan untuk menanamkan pemahaman yang kuat tentang bahaya narkoba bagi generasi muda. Kegiatan ini diselenggarakan di Ruang Pyrus Grand Equator Hotel. As part of the National Occupational Health and Safety Month (BK3N) 2025 series, this activity aimed to instill strong awareness among young generations regarding the dangers of drug abuse. The seminar was held at Pyrus Room, Grand Equator Hotel.
Pencapaian Achievement	Seminar ini diikuti oleh siswa SMA/SMK di Kota Bontang. Kegiatan tersebut memberikan pemaparan mengenai perkembangan tren penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja serta berbagai upaya pencegahan yang dapat diterapkan sejak dini. The seminar was attended by high school and vocational students in Bontang City. It provided insights into current trends in drug abuse among adolescents and preventive measures that can be implemented from an early stage.

Judul Title	Bimtek Keamanan Pangan bagi Pelaku UMK Food Safety Technical Guidance for MSMEs
Kegiatan Activity	KIE menggelar bimbingan teknis (bimtek) penyuluhan keamanan pangan bagi pelaku usaha Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) di Grand Equator Hotel. KIE conducted a food safety technical training (bimtek) for Home Industry Food (IRTP) business players at Grand Equator Hotel.
Pencapaian Achievement	Kegiatan ini diikuti oleh 30 peserta yang berasal dari wilayah Loktuan dan Guntung yang merupakan bagian dari buffer zone KIE, dan dilaksanakan selama dua hari. Melalui kegiatan ini, perusahaan diharapkan dapat terus mendukung penguatan kapasitas Usaha Mikro dan Kecil (UMK) lokal di Kota Bontang. The program was attended by 30 participants from Loktuan and Guntung areas (KIE buffer zones) and was conducted over two days. This initiative supports strengthening the capacity of local MSMEs in Bontang City.

Judul Title	Penyaluran Santunan Bagi Anak Yatim Piatu Pada Momentum Bulan Ramadhan Distribution of Aid for Orphans During Ramadan
Kegiatan Activity	Kegiatan ini dilangsungkan bersamaan dengan acara buka bersama bertema "Harmoni Ramadan: Bersama KIEta Kuat, Berkolaborasi KIEta Hebat". This activity was conducted alongside a communal iftar event themed "Ramadan Harmony: Together KIEta get Stronger, In Collaboration KIEta get Excellent".
Pencapaian Achievement	KIE menyalurkan santunan kepada 40 anak yatim piatu yang berasal dari sejumlah panti asuhan di Kota Bontang. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian sosial serta upaya berbagi kasih kepada sesama. KIE distributed aid to 40 orphans from several orphanages in Bontang City. This activity was carried out as a form of social care and an effort to share love with others.

Judul Title	Pelatihan Penjamah Makanan bagi Pengelola Kantin Sekolah Food Handler Training for School Canteen Operators
Kegiatan Activity	Dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, khususnya di lingkungan sekolah, Perusahaan menggelar Pelatihan Penjamah Makanan yang berlangsung selama 2 hari di Grand Equator Hotel. To improve public health standards, particularly in schools, the Company conducted a two-day Food Handler Training at Grand Equator Hotel.
Pencapaian Achievement	Kegiatan ini dihadiri oleh 36 pengelola kantin sekolah serta guru UKS dari seluruh sekolah di Kecamatan Bontang Utara. Program ini bertujuan untuk memutus rantai permasalahan kesehatan sejak di lingkungan sekolah. Salah satu upaya yang dinilai efektif adalah dengan memastikan bahwa makanan yang dikonsumsi siswa aman dan memenuhi standar kesehatan. This activity was attended by 36 school canteen managers and school health teachers from all schools in North Bontang District. This program aims to break the chain of health problems within the school environment. One effort deemed effective is ensuring that the food consumed by students is safe and meets health standards.

Judul Title	Program TRABAS Stunting TRABAS Stunting Program
Kegiatan Activity	• Sebagai wujud kepedulian terhadap kesehatan generasi muda, Perusahaan resmi memulai rangkaian Program TRABAS STUNTING (Kualitas Juara Bebas Stunting) dengan menggelar kegiatan skrining anemia bagi remaja. • Momentum Hari Anak Nasional 2025 dimanfaatkan Perusahaan dengan meluncurkan Program Bina Remaja Sehat dan Mandiri (BERSERI) dan Kualitas Juara Bebas Stunting (TRABAS Stunting) melalui inisiatif Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) di MTs Al-Amin Loktuan. • The Company initiated the TRABAS Stunting Program (Stunting-Free Champion Quality Program) through anemia screening for adolescents. • The Company utilized the momentum of National Children's Day 2025 by launching the Healthy and Independent Youth Development Program (BERSERI) and the Stunting-Free Champion Quality Program (TRABAS Stunting) through the Social and Environmental Responsibility (TJSL) initiative at MTs Al-Amin Loktuan.

Pencapaian Achievement	• Kegiatan skrining dilakukan oleh tenaga kesehatan bekerja sama dengan Puskesmas setempat. Hal ini dilakukan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi kesehatan remaja putri, sekaligus mendukung deteksi dini terhadap potensi gangguan kesehatan yang bisa berpengaruh pada tumbuh kembang di masa depan. • Melalui Program TRABAS Stunting ini, diharap para pelajar, guru, dan orang tua memahami pentingnya pencegahan stunting serta perawatan kesehatan sejak dini. Program ini juga diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran kolektif untuk menerapkan pola hidup sehat. • Screening activities are carried out by health workers in collaboration with local community health centers (Puskesmas). This is done to provide a comprehensive picture of the health condition of adolescent girls and to support early detection of potential health problems that could impact their future growth and development. • Through the TRABAS Stunting Program, it is hoped that students, teachers, and parents will understand the importance of stunting prevention and early health care. This program is also expected to foster collective awareness of adopting a healthy lifestyle.

Judul Title	*Workshop* Kegawatdaruratan untuk Pelajar SMP dan SMA di Kota Bontang Emergency Response Workshop for Junior High School and Senior High School Students in Bontang City
Kegiatan Activity	Perusahaan menggelar Workshop Kegawatdaruratan sebagai rangkaian awal kegiatan Saka Bakti Husada First Aid Challenge (SFAC) with KIE 2025 pada Minggu (24/8/2025) di Pendopo walikota yang dihadiri oleh sekitar 150 peserta. The company held an Emergency Response Workshop as part of the Saka Bakti Husada First Aid Challenge (SFAC) with IEC 2025 on Sunday (August 24, 2025) at the mayor's office, attended by approximately 150 participants.
Pencapaian Achievement	Workshop kegawatdaruratan ini menjadi bukti nyata komitmen perusahaan dalam mendukung kesehatan pelajar Bontang. This emergency response workshop demonstrated the Company's commitment to supporting the health of Bontang students.

Judul Title	PROKLIM Kampung Iklim Pesisir BSD PROKLIM Coastal BSD Climate Village Program
Kegiatan Activity	Perusahaan melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Program Kampung Iklim (ProKlim) di Kampung Iklim Pesisir BSD. Kegiatan ini dilaksanakan pada Selasa, 23 Desember 2025, bertempat di Gedung Pertemuan Perumahan BSD, Kota Bontang. Through its Social and Environmental Responsibility (TJSL) program, the Company conducted a socialization activity for the Climate Village Program (PROKLIM) at Coastal BSD Climate Village. The activity was held on Tuesday, December 23, 2025, at the BSD Housing Hall, Bontang City.
Pencapaian Achievement	Program Kampung Iklim merupakan langkah strategis untuk mendorong peran aktif masyarakat dalam upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Perusahaan berkomitmen untuk terus mendampingi Kampung Iklim Pesisir BSD agar mampu membangun ketahanan lingkungan yang berkelanjutan. The Climate Village Program represents a strategic initiative to encourage active community participation in climate change adaptation and mitigation efforts. The Company remains committed to continuously supporting and mentoring the Coastal BSD Climate Village in building sustainable environmental resilience.

Laporan Keuangan
Financial Statements

PT KALTIM INDUSTRIAL ESTATE
DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN/ *CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS*

31 DESEMBER 2025/
31 DECEMBER 2025

PT Kaltim Industrial

Kantor Pusat
Wisma KIE
Jl. Amoniak Kav.79 Komplek Kawasan Industri KIE
Bontang
Telp. +62 548 41368 – Fax. +62 548 41370

Kantor Perwakilan Jakarta
Plaza Pupuk Kaltim
Jl. Kebon Sirih No.6A Jakarta Pusat 10110
Telp. +62 21 3451052 – Fax. +62 21 3451053

SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG/ *DIRECTORS' STATEMENT LETTER REGARDING*

TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

THE RESPONSIBILITY ON THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS AS AT AND FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2025

PT KALTIM INDUSTRIAL ESTATE DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Muhammad Erriza
   Alamat Kantor : Wisma KIE, Jl. Ammonia Kav. 79, Komplek Kawasan Industri Bontang, Kalimantan Timur, 75314
   Alamat Domisili : Jl. Bougenvile No. 15 PC 06 PKT, Kota Bontang, Kalimantan Timur
   Telepon : 0548 - 41368
   Jabatan : Direktur Utama

2. Nama : Dianti Citra Agustin
   Alamat Kantor : Wisma KIE, Jl. Ammonia Kav. 79, Komplek Kawasan Industri Bontang, Kalimantan Timur, 75314
   Alamat Domisili : Jl. Anyelir No. 02 PC 04 PKT Kota Bontang, Kalimantan Timur
   Telepon : 0548 - 41368
   Jabatan : Plt Direktur Keuangan

menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian PT Kaltim Industrial Estate dan entitas anak ("Grup");
2. Laporan keuangan konsolidasian Grup telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian Grup telah dimuat secara lengkap dan benar;
   b. Laporan keuangan konsolidasian Grup tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; dan
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam PT Kaltim Industrial Estate.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Atas nama dan mewakili Dewan Direksi.

We, the undersigned:

1. *Name* : *Muhammad Erriza*
   Office Address : *Wisma KIE, Jl. Ammonia Kav. 79, Komplek Kawasan Industri Bontang, Kalimantan Timur, 75314*
   Address of Domicile : *Jl. Bougenvile No.15 PC 06 PKT, Kota Bontang, Kalimantan Timur*
   Telephone : *0548 - 41368*
   Position : *President Director*

2. *Name* : *Dianti Citra Agustin*
   Office Address : *Wisma KIE, Jl. Ammonia Kav. 79, Komplek Kawasan Industri Bontang, Kalimantan Timur, 75314*
   Address of Domicile : *Jl. Anyelir No. 02 PC 04 PKT Kota Bontang, Kalimantan Timur*
   Telephone : *0548 - 41368*
   Position : *Acting Finance Director*

declare that:

1. *We are responsible for the preparation and presentation of consolidated financial statements of PT Kaltim Industrial Estate and subsidiaries (the "Group");*
2. *The Group's consolidated financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;*
3. a. *All information has been fully and correctly disclosed in the Group's consolidated financial statements;*
   b. *The Group's consolidated financial statements do not contain false material information or facts, nor do they omit material information or facts; and*
4. *We are responsible for the internal control system of PT Kaltim Industrial Estate.*

Thus this statement is made truthfully.

For and on behalf of the Board of Directors.

Jakarta, 06 Maret/*March* 2026



Muhammad Erriza
Direktur Utama/
President Director

Dianti Citra Agustin
Plt Direktur Keuangan/
Acting Finance Director

Laporan/*Report* No. 00257/2.1457/AU.1/03/0241-1/1/III/2026

Laporan auditor independen
Kepada para Pemegang Saham

PT Kaltim Industrial Estate

Independent auditors' report
To the Shareholders of

PT Kaltim Industrial Estate

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Kaltim Industrial Estate dan entitas anaknya ("Grup"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2025, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan konsolidasian, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.

Opinion

We have audited the consolidated financial statements of PT Kaltim Industrial Estate and its subsidiaries (the "Group"), which comprise the consolidated statement of financial position as at 31 December 2025, and the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, consolidated statement of changes in equity and consolidated statement of cash flows for the year then ended, and notes to the consolidated financial statements, including material accounting policy information.

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of the Group as at 31 December 2025, and its consolidated financial performance and its consolidated cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan konsolidasian pada laporan kami. Kami independen terhadap Grup berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Basis for opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditors' responsibilities for the audit of the consolidated financial statements paragraph of our report. We are independent of the Group in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the consolidated financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Tanggung jawab manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terhadap laporan keuangan konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Grup dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Grup atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Grup.

Responsibilities of management and those charged with governance for the consolidated financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the consolidated financial statements, management is responsible for assessing the Group's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Group or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Group's financial reporting process.

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan konsolidasian

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan konsolidasian tersebut.

Auditors' responsibilities for the audit of the consolidated financial statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditors' report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, merancang dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian internal Grup.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Grup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan konsolidasian atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Grup tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgement and maintain professional scepticism throughout the audit. We also:

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*
- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Group's internal control.*
- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.*
- *Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Group's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditors' report to the related disclosures in the consolidated financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditors' report. However, future events or conditions may cause the Group to cease to continue as a going concern.*

- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan konsolidasian mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.
- Merencanakan dan melaksanakan audit grup untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat terkait informasi keuangan entitas atau unit bisnis dalam grup sebagai basis untuk merumuskan opini atas laporan keuangan grup. Kami bertanggung jawab atas arahan, supervisi, dan penelaahan atas pelaksanaan pekerjaan audit untuk tujuan audit grup. Kami tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas opini audit kami.

- *Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial statements, including the disclosures, and whether the consolidated financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*
- *Plan and perform the group audit to obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business units within the group as a basis for forming an opinion on the group financial statements. We are responsible for the direction, supervision and review of the audit work performed for purposes of the group audit. We remain solely responsible for our audit opinion.*

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

Jakarta,
6 Maret/*March* 2026

Yanto, S.E., Ak., M.Ak., CPA
Izin Akuntan Publik/*Public Accountant License* No. AP.0241

Kalim Industrial Estate
00257/2.1457/AU.1/03/0241-1/1/III/2026

PT KALTIM INDUSTRIAL ESTATE
DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

Lampiran 1/1 *Schedule*

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
AS AT 31 DECEMBER 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	31 Desember/ *December* 2025	31 Desember/ *December* 2024	
ASET				***ASSETS***
ASET LANCAR				***CURRENT ASSETS***
Kas dan setara kas	4a,24b	257,793	346,766	*Cash and cash equivalents*
Deposito berjangka, lancar	4b,24b	183,800	45,000	*Time deposits, current*
Kas yang dibatasi penggunaannya	4c,24b	21,693	28,982	*Restricted cash*
Piutang usaha				*Trade receivables*
- Pihak berelasi	5,24b	58,878	56,749	*Related parties -*
- Pihak ketiga	5	23,235	8,030	*Third parties -*
Piutang lain-lain				*Other receivables*
- Pihak berelasi		4	-	*Related parties -*
- Pihak ketiga		1,815	382	*Third parties -*
Pekerjaan kontrak konstruksi dalam penyelesaian - tagihan dari pelanggan				*Construction contract work in progress - amount due from customers*
- Pihak berelasi	6,24b	16,911	21,200	*Related parties -*
- Pihak ketiga	6	99	692	*Third parties -*
Persediaan	7	114,403	89,689	*Inventories*
Pajak dibayar di muka	23a			*Prepaid taxes*
- Pajak lain-lain		4,366	5,324	*Other taxes -*
Uang muka dan beban dibayar di muka		4,296	5,663	*Advances and prepayments*
Jumlah aset lancar		**687,293**	**608,477**	***Total current assets***
ASET TIDAK LANCAR				***NON-CURRENT ASSETS***
Investasi pada entitas asosiasi	8	260,700	251,861	*Investment in associates*
Properti investasi	9	209,425	210,614	*Investment properties*
Aset tetap	10	262,955	256,822	*Fixed assets*
Aset pajak tangguhan	23d	5,477	4,191	*Deferred tax assets*
Goodwill		9,244	9,244	*Goodwill*
Aset keuangan tidak lancar lainnya		344	14,915	*Other non-current financial assets*
Jumlah aset tidak lancar		**748,145**	**747,647**	***Total non-current assets***
JUMLAH ASET		**1,435,438**	**1,356,124**	***TOTAL ASSETS***

PT KALTIM INDUSTRIAL ESTATE
DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

Lampiran 1/2 *Schedule*

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
AS AT 31 DECEMBER 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	31 Desember/ *December* 2025	31 Desember/ *December* 2024	
LIABILITAS				***LIABILITIES***
LIABILITAS JANGKA PENDEK				***CURRENT LIABILITIES***
Utang usaha				*Trade payables*
- Pihak berelasi	11,24b	316	268	*Related parties -*
- Pihak ketiga	11	7,393	14,131	*Third parties -*
Utang lain-lain		7,717	2,653	*Other payables*
Beban akrual	12	68,706	49,774	*Accrued expenses*
Pinjaman jangka pendek	15a,24b	2,694	7,292	*Short-term loans*
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	16a	23,569	24,561	*Short-term employee benefits liabilities*
Utang pajak	23b			*Taxes payable*
- Pajak penghasilan badan		1,762	2,605	*Corporate income tax -*
- Pajak lain-lain		2,681	2,448	*Other taxes -*
Pendapatan diterima di muka				*Unearned revenues*
- Pihak berelasi	13,24b	7,331	6,380	*Related parties -*
- Pihak ketiga	13	12,787	10,845	*Third parties -*
Liabilitas pembangunan sarana kawasan	14	679	679	*Development area facilities liabilities*
Liabilitas imbalan pascakerja	16b	685	1,274	*Post-employment benefits liabilities*
Bagian lancar atas:				*Current portion of:*
- Liabilitas sewa		1,883	1,610	*Lease liabilities -*
- Pinjaman jangka panjang	15b,24b	1,954	849	*Long-term loans -*
Jumlah liabilitas jangka pendek		**140,157**	**125,369**	***Total current liabilities***
LIABILITAS JANGKA PANJANG				***NON-CURRENT LIABILITIES***
Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam satu tahun:				*Non-current liabilities, net of current maturities:*
- Liabilitas sewa		42	155	*Lease liabilities -*
- Pinjaman jangka panjang	15b,24b	3,400	-	*Long-term loans -*
Liabilitas pembangunan sarana kawasan	14	1,230	1,230	*Development area facilities liabilities*
Liabilitas imbalan pascakerja	16b	15,905	10,973	*Post-employment benefits liabilities*
Jumlah liabilitas jangka panjang		**20,577**	**12,358**	***Total non-current liabilities***
JUMLAH LIABILITAS		**160,734**	**137,727**	***TOTAL LIABILITIES***
EKUITAS				***EQUITY***
Modal saham - modal dasar 112.614 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham; modal ditempatkan dan disetor penuh 58.307 lembar saham	17	58,307	58,307	*Share capital - authorised 112,614 shares at par value of Rp1,000,000 (full amount) per share; issued and fully paid 58,307 shares*
Penghasilan komprehensif lainnya	18c	170,228	179,744	*Other comprehensive income*
Ekuitas lainnya		(27,063)	(27,063)	*Other equity*
Saldo laba:				*Retained earnings:*
Ditentukan penggunaannya		464,755	374,888	*Appropriated*
Belum ditentukan penggunaannya		569,714	598,238	*Unappropriated*
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk		**1,235,941**	**1,184,114**	***Total equity attributable to the owners of the parent entity***
Kepentingan nonpengendali	19	38,763	34,283	*Non-controlling interest*
JUMLAH EKUITAS		**1,274,704**	**1,218,397**	***TOTAL EQUITY***
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		**1,435,438**	**1,356,124**	***TOTAL LIABILITIES AND EQUITY***

PT KALTIM INDUSTRIAL ESTATE
DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

Lampiran 2 *Schedule*

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	31 Desember/ *December* 2025	31 Desember/ *December* 2024	
Pendapatan	20	520,047	504,283	*Revenues*
Beban pokok pendapatan	21	(387,006)	(385,906)	*Cost of revenues*
Laba kotor		**133,041**	**118,377**	***Gross profit***
Beban umum dan administrasi	22	(62,529)	(60,037)	*General and administrative expenses*
Pendapatan keuangan		19,830	15,824	*Finance income*
Beban keuangan		(3,176)	(2,293)	*Finance costs*
Bagian atas laba bersih entitas asosiasi	8	38,561	42,621	*Share of net profit of associates*
Pendapatan/(beban) lain-lain, bersih		367	(299)	*Other income/(expenses), net*
Laba sebelum pajak penghasilan		**126,094**	**114,193**	***Profit before income tax***
Beban pajak penghasilan	23c	(14,061)	(12,759)	*Income tax expenses*
Laba tahun berjalan		**112,033**	**101,434**	***Profit for the year***
Rugi komprehensif lain				***Other comprehensive loss***
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				*Items that will not be reclassified to profit or loss:*
Cadangan revaluasi aset	10	(2,129)	-	*Asset revaluation reserve*
Bagian rugi komprehensif lain dari entitas asosiasi	8	(531)	(1,555)	*Share of other comprehensive loss from associates*
Pengukuran kembali imbalan pascakerja	16	(12,578)	(821)	*Remeasurement of post-employment benefits*
Pajak penghasilan terkait		2,700	138	*Related income tax*
Rugi komprehensif lain tahun berjalan, setelah pajak		**(12,538)**	**(2,238)**	***Other comprehensive loss for the year, net of tax***
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan		**99,495**	**99,196**	***Total comprehensive income for the year***
Laba tahun berjalan yang diatribusikan pada:				***Profit for the year attributable to:***
Pemilik entitas induk		96,343	89,867	*Owners of the parent entity*
Kepentingan nonpengendali		15,690	11,567	*Non-controlling interest*
		112,033	**101,434**	
Jumlah penghasilan komprehensif yang diatribusikan kepada:				***Total comprehensive income attributable to:***
Pemilik entitas induk		86,827	87,870	*Owners of the parent entity*
Kepentingan nonpengendali	19	12,668	11,326	*Non-controlling interest*
		99,495	**99,196**	

PT KALTIM INDUSTRIAL ESTATE
DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

Lampiran 3 *Schedule*

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	Diatribusikan kepada pemilik entitas induk/*Attributable to the owners of the parent entity*								
				Saldo laba/*Retained earnings*						
		Modal saham/ *Share capital*	Ekuitas lainnya/ *Other equity*	Ditentukan penggunaannya/ *Appropriated*	Belum ditentukan penggunaannya/ *Unappropriated*	Penghasilan komprehensif lain/*Other comprehensive income*	Jumlah/ *Total*	Kepentingan nonpengendali/ *Non-controlling interest*	Jumlah ekuitas/ *Total equity*	
Saldo per 1 Januari 2024		**58,307**	**(27,063)**	**303,552**	**579,707**	**181,741**	**1,096,244**	**25,203**	**1,121,447**	***Balance as at 1 January 2024***
Laba tahun berjalan		-	-	-	89,867	-	89,867	11,567	101,434	*Profit for the year*
Dividen kas	19	-	-	-	-	-	-	(2,246)	(2,246)	*Cash Dividends*
Cadangan umum	18a	-	-	71,336	(71,336)	-	-	-	-	*General reserves*
Rugi komprehensif lain, setelah pajak:	18c									*Other comprehensive loss, net of tax:*
Bagian rugi komprehensif lain dari entitas asosiasi		-	-	-	-	(1,555)	(1,555)	-	(1,555)	*Share of other comprehensive loss from associates*
Pengukuran kembali imbalan pascakerja		-	-	-	-	(442)	(442)	(241)	(683)	*Remeasurement of post-employment benefits*
Saldo per 31 Desember 2024		**58,307**	**(27,063)**	**374,888**	**598,238**	**179,744**	**1,184,114**	**34,283**	**1,218,397**	***Balance as at 31 December 2024***
Laba tahun berjalan		-	-	-	96,343	-	96,343	15,690	112,033	*Profit for the year*
Dividen kas	18b,19	-	-	-	(35,000)	-	(35,000)	(8,188)	(43,188)	*Cash dividends*
Cadangan umum	18a	-	-	89,867	(89,867)	-	-	-	-	*General reserves*
Rugi komprehensif lain, setelah pajak:	18c									*Other comprehensive loss, net of tax:*
Cadangan revaluasi aset		-	-	-	-	(2,129)	(2,129)	-	(2,129)	*Asset revaluation reserve*
Bagian rugi komprehensif lain dari entitas asosiasi		-	-	-	-	(531)	(531)	-	(531)	*Share of other comprehensive loss from associates*
Pengukuran kembali imbalan pascakerja		-	-	-	-	(6,856)	(6,856)	(3,022)	(9,878)	*Remeasurement of post-employment benefits*
Saldo per 31 Desember 2025		**58,307**	**(27,063)**	**464,755**	**569,714**	**170,228**	**1,235,941**	**38,763**	**1,274,704**	***Balance as at 31 December 2025***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements

PT KALTIM INDUSTRIAL ESTATE
DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

Lampiran 4 *Schedule*

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	31 Desember/ *December* 2025	31 Desember/ *December* 2024	
Arus kas dari aktivitas operasi			***Cash flows from operating activities***
Penerimaan dari pelanggan	510,337	489,647	*Receipts from customers*
Pembayaran kepada pemasok	(323,283)	(308,695)	*Payments to suppliers*
Pembayaran biaya karyawan	(95,351)	(96,997)	*Payments of employee costs*
Pembayaran pajak penghasilan badan	(13,490)	(11,010)	*Payments of corporate income tax*
Pembayaran biaya keuangan	(3,176)	(2,293)	*Payments of finance costs*
Penerimaan pendapatan keuangan	19,830	15,824	*Receipts of finance income*
Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi	**94,867**	**86,476**	***Net cash flows provided from operating activities***
Arus kas dari aktivitas investasi			***Cash flows from investing activities***
Pembelian aset tetap dan properti investasi	(36,493)	(21,164)	*Purchases of fixed assets and investment properties*
Penempatan kas yang dibatasi penggunaannya	(10,844)	(6,473)	*Placement of restricted cash*
Penerimaan kas yang dibatasi penggunaannya	18,133	3,256	*Receipts of restricted cash*
Pencairan deposito berjangka	161,000	30,000	*Withdrawal of time deposits*
Penempatan deposito berjangka	(299,800)	-	*Placement of time deposits*
Penerimaan dividen tunai	29,491	18,236	*Receipts of cash dividends*
Arus kas bersih yang (digunakan untuk)/ diperoleh dari aktivitas investasi	**(138,513)**	**23,855**	***Net cash flows (used in)/provided from investing activities***
Arus kas dari aktivitas pendanaan			***Cash flows from financing activities***
Penerimaan pinjaman jangka pendek	16,040	22,974	*Proceeds of short-term loans*
Penerimaan pinjaman jangka panjang	6,156	-	*Proceeds of long-term loans*
Pembayaran pinjaman jangka pendek	(20,638)	(18,203)	*Payments of short-term loans*
Pembayaran pinjaman jangka panjang	(1,651)	(2,176)	*Payments of long-term loans*
Pembayaran liabilitas sewa	(2,003)	(383)	*Payments of lease liabilities*
Pembayaran dividen kas kepada pemilik Perusahaan	(35,000)	-	*Payments of cash dividends to owners of the Company*
Pembayaran dividen kas kepada entitas anak dari kepentingan non-pengendali	(8,188)	(2,246)	*Payments of cash dividends to subsidiary from non-controlling interest*
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan	**(45,284)**	**(34)**	***Net cash flows used in financing activities***
(Penurunan)/kenaikan bersih kas dan setara kas	(88,930)	110,297	***Net (decrease)/increase in cash and cash equivalents***
Kas dan setara kas pada awal tahun	**346,766**	**236,518**	***Cash and cash equivalents at beginning of the year***
Pengaruh perubahan kurs mata uang asing	(43)	(49)	*Effect of foreign exchange rate changes*
Kas dan setara kas pada akhir tahun	**257,793**	**346,766**	***Cash and cash equivalents at end of the year***

Tambahan informasi transaksi nonkas disajikan di Catatan 28

Additional information of non-cash transaction presented in Note 28

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

1. INFORMASI UMUM

a. Pendirian dan informasi umum

PT Kaltim Industrial Estate ("Perusahaan") didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 25, tanggal 29 Agustus 1990 oleh Notaris Hj. Ny. Ayu Woelan Hartono S.H., Notaris di Jakarta yang kemudian diubah dengan Akta No. 4, tanggal 11 Juni 1991 oleh notaris yang sama. Anggaran dasar Perseroan telah mendapat pengesahan dari Kementerian Kehakiman Republik Indonesia No. C2-2800.HT.01.01 TH.91, tanggal 8 Juli 1991 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 20, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 1031, tanggal 10 Maret 1992. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan dengan perubahan terakhir mengenai perubahan anggaran dasar Perusahaan berdasarkan akta notaris Silvia Eni Kristiani, S.H., M.Kn., notaris di Bontang, No. 23 tanggal 24 Oktober 2024 yang telah mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan No. AHU-0068829.AH.01.02.TAHUN 2024 tanggal 28 Oktober 2024.

Perusahaan beroperasi secara komersial sejak tahun 1991 dengan basis pengelolaan kawasan industri berbasis gas dan kondensat di kawasan industri Bontang.

Sesuai dengan pasal 3 anggaran dasar Perusahaan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha adalah sebagai berikut:

a. Real estat;
b. Konstruksi;
c. Pengelolaan air, pengolahan air limbah, pengelolaan dan daur ulang sampah, dan aktivitas remediasi;
d. Perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor;
e. Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan;
f. Pengangkutan dan pergudangan;
g. Industri pengolahan;
h. Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum; dan
i. Pengadaan listrik, gas, uap atau air panas dan udara dingin

Entitas induk langsung Perusahaan adalah PT Pupuk Kalimantan Timur ("PKT"), suatu entitas yang dimiliki oleh PT Pupuk Indonesia (Persero) ("PI") sebagai pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham utama adalah Pemerintah Republik Indonesia.

1. GENERAL INFORMATION

a. Establishment and general information

PT Kaltim Industrial Estate (the "Company") was established based on Notarial Deed No. 25 dated 29 August 1990 by Hj. Ny. Ayu Woelan Hartono, S.H., Notary in Jakarta which was then amended with a Notarial Deed by the same Notary No. 4 on 11 June 1991. The deed was approved by the Ministry of Justice of the Republic of Indonesia No. C2-2800.HT.01.01 TH.91 dated 8 July 1991 and published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 20, and Supplement of State Gazette of the Republic of Indonesia No. 1031 dated 10 March 1992. The Company's Articles of Association have been amended several times with the last amendment made was related to changes in Company's articles of association based on the deed of Silvia Eni Kristiani, S.H., M.Kn., notary in Bontang, No. 23 dated 24 October 2024, which was approved by the Ministry of Law and Human Rights Republic of Indonesia by decree No. AHU-0068829.AH.01.02.TAHUN 2024 dated 28 October 2024.

The Company has commercially operated since 1991 in the gas and condensated industry area processing located in the industry area in Bontang.

In accordance with article 3 of the Company's articles of association, the objective, purpose and business activities are as follows:

a. Real estate;
b. Constructions;
c. Water treatment, waste water treatment, waste treatment and recycling, and remediation activities;
d. Wholesale and retail trade, repair and maintenance of car and motorcycle;
e. Rental activities and lease without option rights, labor, travel agents;
f. Transportation and warehousing;
g. Manufacturing industry;
h. Accommodation, food and drinks provider; and
i. Procurement of electricity, gas, steam or hot water and cold air

The Company's immediate parent entity is PT Pupuk Kalimantan Timur ("PKT"), an entity owned by PT Pupuk Indonesia (Persero) ("PI") as the majority shareholder with the ultimate parent is the Government of Republic of Indonesia.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

1 INFORMASI UMUM (lanjutan)

a. Pendirian dan informasi umum (lanjutan)

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

	2025	2024	
Dewan Komisaris			***Board of Commissioners***
Komisaris Utama	-	Teguh Ismartono*	*President Commissioner*
Komisaris	Turkhamim	Turkhamim	*Commissioner*
Komisaris Independen	-	Ir. Setyorini Tri Hutami**	*Independent Commissioner*
Dewan Direksi			***Board of Directors***
Direktur Utama	Muhammad Erriza	Muhammad Erriza	*President Director*
Direktur Keuangan	-	Dianti Citra Agustin***	*Finance Director*
Pelaksana Tugas Direktur Keuangan	Dianti Citra Agustin***	-	*Acting Finance Director*
Direktur Operasional dan Bisnis	Indra Kusuma Wardana	Indra Kusuma Wardana	*Operational and Business Director*

*Komisaris Utama mengundurkan diri dari jabatannya melalui surat nomor 39023/D/HM/D31400/IT/2025 26 Agustus 2025 yang dikukuhkan pada 28 November 2025 dan hingga 31 Desember 2025 belum terdapat penggantinya.

**Masa jabatan Komisaris Independen telah berakhir pada 30 Juni 2024 dan hingga 31 December 2024 belum terdapat penggantinya.

***Masa jabatan Direktur Keuangan telah berakhir pada 14 Agustus 2025 dan pada tanggal 28 November 2025 diangkat Pelaksana Tugas Direktur Keuangan

Susunan Komite Audit Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

	2025	2024	
Komite Audit			***Audit Committees***
Ketua	Turkhamim	Turkhamim	*Chairman*
Anggota	Fakhrurrazi	Rizky Eka Septianto	*Member*

b. Struktur entitas anak

Pada tanggal 31 Desember 2025, Perusahaan dan entitas anak memiliki 476 orang karyawan tetap (2024: 487 orang karyawan) (tidak diaudit).

Pada laporan keuangan konsolidasian ini, Perusahaan dan entitas anak secara keseluruhan dirujuk sebagai "Grup". Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, struktur Grup adalah sebagai berikut:

1. *GENERAL INFORMATION* *(continued)*

a. Establishment and general information *(continued)*

The members of the Company's Boards of Commissioners and Directors as at 31 December 2025 and 2024 were as follows:

The President Commissioner resigned from his position through letter number 39023/D/HM/D31400/IT/2025 dated 26 August 2025, which was confirmed on 28 November 2025, and as of 31 December 2025, no replacement has been appointed.

The term of the Independent Commissioner ended on 30 June 2024, and as of 31 December 2024, no replacement has been appointed.

The term of the Finance Director ended on 14 August 2025, and on 28 November 2025 an Acting Finance Director was appointed.

The composition of the Company's Audit Committees as at 31 December 2025 and 2024 was as follows:

b. Structure of subsidiaries

As at 31 December 2025, the Company and its subsidiaries had 476 permanent employees (2024: 487 employees) (unaudited).

In these consolidated financial statements, the Company and its subsidiaries are collectively referred to as the "Group". As at 31 December 2025 and 2024, the structure of the Group was as follows:

Entitas anak/ *Subsidiaries*	Domisili/ *Domicile*	Jenis bisnis/ *Nature of business*	Tahun mulai beroperasi/ *Start of operation*	Persentase kepemilikan/ *Percentage of ownership* 2025	2024	Jumlah aset sebelum eliminasi/ *Total assets before elimination* 2025	2024
Penyertaan langsung/*Direct*							
PT Kaltim Jasa Sekuriti ("KJS")	Bontang	Penyediaan jasa pengamanan/ *Security service*	2002	70.00	70.00	59,861	50,157
PT Kaltim Adhiguna Dermaga ("KAD")	Bontang	Jasa bongkar muat/ *Loading unloading service*	1998	50.99	50.99	86,952	77,630
Penyertaan tidak langsung/ *Indirect*							
PT Kaltim Adhiguna Muatan ("KAM")	Bontang	Jasa bongkar muat/ *Loading unloading service*	1990	66.67	66.67	3,206	2,359

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL

Laporan keuangan konsolidasian Grup telah disusun dan diselesaikan oleh Direksi dan diotorisasi untuk diterbitkan pada tanggal 6 Maret 2026.

Berikut ini adalah kebijakan akuntansi material yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian Grup. Kebijakan ini telah diterapkan secara konsisten terhadap semua periode yang disajikan, kecuali dinyatakan lain.

a. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian ini telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK").

Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan konsep harga perolehan, yang dimodifikasi oleh revaluasi tanah (aset tetap), dan aset dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, serta menggunakan dasar akrual kecuali untuk laporan arus kas konsolidasian.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Angka dalam laporan keuangan konsolidasian ini, dibulatkan dan disajikan dalam jutaan Rupiah ("Rp"), kecuali dinyatakan lain.

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan penggunaan estimasi dan asumsi. Hal tersebut juga mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Grup. Area yang kompleks atau memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi atau area dimana asumsi dan estimasi dapat berdampak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian diungkapkan di Catatan 3.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION

The Group's consolidated financial statements were prepared and finalised by the Board of Directors and were authorised for issue on 6 March 2026.

Presented below are the material accounting policies adopted in preparing the consolidated financial statements of the Group. These policies have been consistently applied to all the periods presented, unless otherwise stated.

a. Basis of preparation of consolidated financial statements

The consolidated financial statements have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, including Statements of Financial Accounting Standards ("SFAS") and Interpretations of Financial Accounting Standards ("IFAS").

The consolidated financial statements have been prepared under the historical cost convention, as modified by revaluation of land (fixed assets), and financial assets and liabilities at through profit or loss, and using the accrual basis except for the consolidated statement of cash flows.

The consolidated statement of cash flows were prepared using the direct method by classifying the cash flows on the basis of operating, investing, and financing activities.

Figures in the consolidated financial statements are rounded to and stated in millions of Rupiah ("Rp"), unless otherwise specified.

The preparation of consolidated financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires the use of certain critical accounting estimates and assumptions. It also requires management to exercise its judgment in the process of applying the Group's accounting policies. The areas involving a higher degree of judgment or complexity, or the areas where assumptions and estimates are significant to the consolidated financial statements, are disclosed in Note 3.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

b. Perubahan pada PSAK dan ISAK

Implementasi dari amendemen standar di bawah ini, yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2025, tidak menghasilkan perubahan kebijakan akuntansi Grup dan tidak memiliki dampak material terhadap jumlah yang dilaporkan di periode berjalan atau sebelumnya:

- PSAK 117 "Kontrak Asuransi";
- Amendemen PSAK 117 "Kontrak Asuransi" tentang penerapan awal PSAK 117 dan PSAK 109 – informasi komparatif; dan
- Amendemen PSAK 221 "Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing" tentang kekurangan ketertukaran.

Penyesuaian tahunan dan amendemen yang telah diterbitkan, namun berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2026, tapi penerapan dini diperkenankan, adalah sebagai berikut:

- Penyesuaian Tahunan 2024 Standar Akuntansi Keuangan Indonesia;
- Amendemen terhadap PSAK 107 "Instrumen Keuangan: Pengungkapan" tentang Klasifikasi dan Pengukuran Instrumen Keuangan;
- Amendemen terhadap PSAK 109 "Instrumen Keuangan" tentang Klasifikasi dan Pengukuran Instrumen Keuangan.

Standar baru yang telah diterbitkan, namun baru berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2027, tapi penerapan dini diperkenankan, adalah sebagai berikut:

- PSAK 118 "Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan".

Pada tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian ini, Grup sedang mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru dan amendemen terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup

c. Prinsip-prinsip konsolidasi

(i) Entitas anak

Entitas anak adalah seluruh entitas (termasuk entitas terstruktur) dimana Grup memiliki pengendalian. Grup mengendalikan entitas lain ketika Grup terekspos atas, atau memiliki hak untuk, pengembalian yang bervariasi dari keterlibatannya dengan entitas dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pengembalian tersebut melalui kekuasaannya atas entitas tersebut. Entitas anak dikonsolidasikan secara penuh sejak tanggal dimana pengendalian dialihkan kepada Grup. Entitas anak tidak dikonsolidasikan lagi sejak tanggal dimana Grup kehilangan pengendalian.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION *(continued)*

b. Changes to the SFAS and IFAS

The implementation of the following standard amendments, which are effective from 1 January 2025, did not result in changes to the Group's accounting policies and had no material effect on the amounts reported for current or prior financial periods:

- *SFAS 117 "Insurance Contracts";*
- *Amendment to SFAS 117 "Insurance Contracts" regarding Initial Application of SFAS 117 and SFAS 109 – comparative information; and*
- *Amendment to SFAS 221 "The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates" regarding lack of exchangeability.*

Annual improvement and amendments issued but only effective for financial year beginning on or after 1 January 2026, but early adoption is permitted, are as follows:

- *Annual Improvement 2024 Indonesian Financial Accounting Standards;*
- *Amendment to SFAS 107 "Financial Instruments: Disclosures" related to Classification and Measurement of Financial Instruments;*
- *Amendment to SFAS 109 "Financial Instruments" related to Classification and Measurement of Financial Instruments.*

New standard and amendments issued but only effective for financial years beginning on or after 1 January 2027, but early adoption is permitted, are as follows:

- *SFAS 118 "Presentation and Disclosure in Financial Statements".*

As at the issuance date of these consolidated financial statements, the Group is evaluating the potential impact of these new standards and amendments on the Group's consolidated financial statements.

c. Principles of consolidation

(i) Subsidiaries

Subsidiaries are all entities (including structured entities) over which the Group has control. The Group controls an entity when the Group is exposed to, or has the rights to, variable returns from its involvement with the entity, and when it has the ability to affect those returns through its power over the entity. Subsidiaries are fully consolidated from the date on which control is transferred to the Group. They are deconsolidated from the date on which that control ceases.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

c. Prinsip-prinsip konsolidasi (lanjutan)

(i) Entitas anak (lanjutan)

Kepentingan non-pengendali disajikan di ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari ekuitas pemilik entitas induk.

Transaksi antar perusahaan, saldo dan keuntungan yang belum direalisasi atas transaksi antar Grup perusahaan dieliminasi. Kerugian yang belum direalisasi juga dieliminasi kecuali transaksi tersebut memberikan bukti adanya penurunan nilai aset yang ditransfer. Kebijakan akuntansi anak perusahaan telah diubah dimana diperlukan untuk memastikan konsistensi dengan kebijakan yang diadopsi oleh Grup.

(ii) Entitas asosiasi

Entitas asosiasi adalah seluruh entitas dimana Grup memiliki pengaruh signifikan namun bukan pengendalian, biasanya melalui kepemilikan hak suara antara 20% dan 50%. Investasi pada entitas asosiasi dicatat dengan metode ekuitas. Sesuai metode ekuitas, investasi pada awalnya dicatat pada biaya perolehan dan selanjutnya disesuaikan untuk mengakui bagian investor atas laba rugi pasca akuisisi dari investee atas laba rugi, dan bagiannya dalam pergerakan pendapatan komprehensif lain dari investee atas pendapatan komprehensif lain.

Jika bagian Grup atas kerugian entitas asosiasi sama dengan atau melebihi kepentingannya pada entitas asosiasi, termasuk piutang tanpa agunan, Grup menghentikan pengakuan bagian kerugiannya, kecuali Grup memiliki kewajiban atau melakukan pembayaran atas nama entitas asosiasi.

Keuntungan yang belum terealisasi atas transaksi antara Grup dengan entitas asosiasi dieliminasi sebesar kepentingan Grup dalam entitas asosiasi tersebut. Kerugian yang belum terealisasi juga dieliminasi kecuali transaksi tersebut memberikan bukti adanya penurunan nilai aset yang dialihkan. Kebijakan akuntansi entitas asosiasi telah diubah jika diperlukan untuk memastikan konsistensi dari kebijakan yang diterapkan oleh Grup.

Dividen dari entitas asosiasi diakui sebagai pengurang jumlah tercatat investasi.

Pada setiap tanggal pelaporan, Grup menentukan apakah terdapat bukti objektif bahwa telah terjadi penurunan nilai pada investasi pada entitas asosiasi. Jika demikian, maka nilai tercatat dari investasi yang dicatat dengan akuntansi ekuitas diuji untuk penurunan nilai sesuai dengan kebijakan yang dijelaskan pada Catatan 2m.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION *(continued)*

c. Principles of consolidation *(continued)*

(i) Subsidiaries *(continued)*

Non-controlling interest is reported as equity in the consolidated statement of financial position, separate from the owner of the parent's equity.

Inter-company transactions, balances and unrealised gains on transactions between Group companies are eliminated. Unrealised losses are also eliminated unless the transaction provides evidence of an impairment of the transferred asset. Accounting policies of subsidiaries have been changed where necessary to ensure consistency with the policies adopted by the Group.

(ii) Associates

Associates are all entities over which the Group has significant influence but not control, generally accompanying a shareholding of between 20% and 50% of the voting rights. Investments in associates are accounted for using the equity method. Under the equity method, the investment is initially recognised at cost and adjusted thereafter to recognise the investor's share of the post-acquisition profits or losses of the investee in profit or loss, and its share of movements in other comprehensive income of the investee in other comprehensive income.

When the Group's share of losses in an associate equals or exceeds its interest in the associate, including any other unsecured receivables, the Group does not recognise further losses, unless it has incurred legal or constructive obligations or made payments on behalf of the associate.

Unrealised gains on transactions between the group and its associates are eliminated to the extent of the group's interest in the associates. Unrealised losses are also eliminated unless the transaction provides evidence of an impairment of the asset transferred. Accounting policies of the associates have been changed where necessary to ensure consistency with the policies adopted by the Group.

Dividends from associates are recognised as a reduction in the carrying amount of the investment.

At each reporting date, the Group whether there is any objective evidence that the investment in the associate is impaired. If this is the case, the carrying amount of the equity accounting investments is tested for impairment in accordance with the policy described in Note 2m.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

c. Prinsip-prinsip konsolidasi (lanjutan)

(iii) Perubahan kepemilikan

Grup memperlakukan transaksi dengan kepentingan non-pengendali yang tidak mengakibatkan hilangnya kontrol sebagai transaksi dengan pemilik ekuitas Grup. Perubahan dalam kepemilikan menghasilkan penyesuaian antara nilai tercatat dari kepentingan pengendali dan non-pengendali untuk mencerminkan kepentingan relatifnya di anak perusahaan. Selisih antara jumlah penyesuaian untuk kepentingan non-pengendali dan pertimbangan yang dibayarkan atau diterima diakui dalam cadangan terpisah dalam ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik Grup.

Ketika Grup tidak lagi mengkonsolidasikan atau mencatat menggunakan metode ekuitas untuk investasi karena hilangnya pengendalian atau pengaruh signifikan, maka kepentingan yang masih tersisa atas entitas diukur kembali berdasarkan nilai wajarnya, dan perubahan nilai tercatat diakui dalam laporan laba rugi. Nilai tercatat awal adalah sebesar nilai wajar untuk kepentingan pengukuran kembali kepentingan yang tersisa sebagai entitas asosiasi, ventura bersama atau aset keuangan. Di samping itu, jumlah yang sebelumnya diakui pada pendapatan komprehensif lain sehubungan dengan entitas tersebut dicatat seolah-olah Grup telah melepas aset atau liabilitas terkait. Hal ini dapat berarti bahwa jumlah yang sebelumnya diakui pada pendapatan komprehensif lain direklasifikasi ke laporan laba rugi.

Jika kepemilikan saham entitas asosiasi berkurang namun pengaruh signifikan dipertahankan, hanya sebagian proporsional dari jumlah yang telah diakui sebelumnya dalam pendapatan komprehensif lain yang direklasifikasi ke laba atau rugi jika diperlukan.

d. Aset keuangan

Klasifikasi, pengakuan dan pengukuran

Grup mengklasifikasikan aset keuangannya dalam kategori pengukuran berikut:

(i) Aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi; dan
(ii) Aset keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi atau melalui penghasilan komprehensif lain.

Klasifikasi tersebut tergantung pada model bisnis entitas untuk mengelola aset keuangan dan persyaratan kontraktual arus kas.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION *(continued)*

c. Principles of consolidation *(continued)*

(iii) Changes in ownership interests

The Group treats transactions with non-controlling interests that do not result in a loss of control as transactions with equity owners of the Group. A change in ownership interest results in an adjustment between the carrying amounts of the controlling and non-controlling interests to reflect their relative interests in the subsidiary. Any difference between the amount of the adjustment to non-controlling interests and any consideration paid or received is recognised in a separate reserve within equity attributable to owners of the Group.

When the Group ceases to consolidate or equity account for an investment because of a loss of control or significant influence, any retained interest in the entity is remeasured to its fair value at the date when the control is lost, with the change in carrying amount recognised in profit or loss. The fair value is the initial carrying amount for the purposes of subsequently accounting for the retained interest as an associate, joint venture or financial asset. In addition, any amounts previously recognised in other comprehensive income in respect of that entity are accounted for as if the Group had directly disposed of the related assets or liabilities. This may mean that amounts previously recognised in other comprehensive income are reclassified to profit or loss.

If the ownership interest in an associate is reduced but significant influence is retained, only a proportionate share of the amounts previously recognised in other comprehensive income are reclassified to profit or loss where appropriate.

d. Financial assets

Classification, recognition and measurement

The Group classifies its financial assets in the following measurement categories:

(i) Financial assets measured at amortised cost; and

(ii) Financial assets at fair value through profit or loss ("FVTPL") or other comprehensive income ("FVOCI").

The classification depends on the entity's business model for managing the financial assets and the contractual terms of the cash flows.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

d. Aset keuangan (lanjutan)

Klasifikasi, pengakuan dan pengukuran (lanjutan)

Untuk investasi pada instrumen utang, hal ini akan bergantung pada model bisnis dimana investasi tersebut diadakan. Untuk investasi pada instrumen ekuitas yang tidak dimiliki untuk diperdagangkan, hal ini akan tergantung pada apakah Grup telah melakukan pemilihan tak terbatalkan pada saat pengakuan awal untuk mencatat investasi ekuitas pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Grup memiliki aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dan aset keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Grup mengklasifikasikan aset keuangannya pada biaya perolehan diamortisasi hanya jika aset tersebut dimiliki dalam model bisnis yang bertujuan memperoleh arus kas kontraktual. Aset keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi pada awalnya diukur menggunakan nilai wajar ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur dengan menggunakan metode suku bunga efektif ("EIR"), setelah dikurangi dengan penurunan nilai jika ada. Amortisasi EIR dicatat dalam laporan laba rugi. Kerugian yang timbul dari penurunan nilai juga diakui pada laporan laba rugi.

Aset keuangan Grup yang diukur dengan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain merupakan investasi pada instrumen ekuitas yang pada awalnya diukur pada nilai wajar. Grup selanjutnya mengukur semua investasi ekuitas pada nilai wajar. Dimana Manajemen Grup telah memilih untuk menyajikan keuntungan dan kerugian nilai wajar dari investasi ekuitas pada penghasilan komprehensif lain. Tidak ada reklasifikasi selanjutnya atas keuntungan dan kerugian dari nilai wajar ke laba rugi setelah penghentian pengakuan investasi. Dividen dari investasi tersebut terus diakui dalam laporan laba rugi sebagai penghasilan lainnya ketika hak Grup untuk menerima pembayaran ditetapkan. Kerugian penurunan nilai (dan pembalikan kerugian penurunan nilai) pada investasi ekuitas yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain tidak dilaporkan secara terpisah dari perubahan nilai wajarnya.

Penghentian pengakuan

Aset keuangan dihentikan pengakuannya ketika hak untuk menerima arus kas dari investasi tersebut telah jatuh tempo atau telah ditransfer dan Grup telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION *(continued)*

d. Financial assets *(continued)*

Classification, recognition and measurement *(continued)*

For investments in debt instruments, this will depend on the business model in which the investment is held. For investments in equity instruments that are not held for trading, this will depend on whether the Group has made an irrevocable election at the time of initial recognition to account for the equity investment at fair value through other comprehensive income.

As at 31 December 2025 and 2024, the Group had financial assets measured at amortised cost and financial assets at FVOCI.

The Group classifies its financial assets at amortised cost only if the asset is held within a business model where the objective is to collect the contractual cash flows. Financial assets measured at amortised cost are initially measured at fair value plus transaction cost and subsequently measured using the effective interest rate ("EIR") method, less impairment, if any. EIR amortisation is recorded in profit or loss. The losses arising from impairment are also recognised in profit or loss.

The Group's financial assets at FVOCI represent investments in equity instruments which are initially measured at fair value. The Group subsequently measures all of its equity investments at fair value. Where the Group's management has elected to present fair value gains and losses on equity investments in OCI, there is no subsequent reclassification of the fair value gains and losses to profit or loss following the derecognition of the investment. Dividends from such investments continue to be recognised in profit or loss as other income when the Group's right to receive payments is established. Impairment losses (and reversals of impairment losses) on equity investments that are measured at FVOCI are not reported separately from changes in fair value.

Derecognition

Financial assets are derecognised when the rights to receive the cash flows from the investments have expired or have been transferred and the Group has transferred substantially all of the risks and rewards of ownership.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

d. Aset keuangan (lanjutan)

Instrumen keuangan disalinghapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika terdapat hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan terdapat maksud untuk menyelesaikan secara bersih atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

e. Penurunan nilai aset keuangan

Grup menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Grup menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian ("KKE").

Dalam melakukan penilaian, Grup membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat periode pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi, yang tersedia tanpa biaya atau usaha, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

Grup menerapkan pendekatan yang disederhanakan untuk mengukur KKE yang menggunakan cadangan KKE seumur hidup berdasarkan basis *forward-looking* untuk seluruh saldo piutang usaha. Selain untuk piutang usaha, Grup menerapkan pendekatan umum untuk mengukur KKE.

Grup menilai berdasarkan basis *forward-looking* untuk mengukur KKE terhadap instrumen utang yang diukur dengan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Metode penurunan nilai dilakukan dengan mempertimbangkan apakah risiko kredit telah meningkat secara signifikan.

f. Penjabaran mata uang asing

i. Mata uang fungsional dan penyajian

Pos-pos yang tercakup dalam laporan keuangan setiap entitas di dalam Grup diukur menggunakan mata uang dari lingkungan ekonomi utama dimana entitas tersebut beroperasi ("mata uang fungsional"). Laporan keuangan konsolidasian disajikan dalam Rupiah yang merupakan mata uang fungsional Perusahaan dan penyajian Grup.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION *(continued)*

d. Financial assets *(continued)*

Offsetting financial instruments

Financial assets and liabilities are offset and their net amounts are reported in the consolidated statement of financial position when there is a legally enforceable right to offset the recognised amounts and there is an intention to settle on a net basis, or to realise the asset and settle the liability simultaneously.

e. Impairment of financial assets

The Group assesses whether the credit risk on a financial instrument has increased significantly since initial recognition. When making the assessment, the Group uses the change in the risk of a default occurring over the expected life of the financial instrument instead of the change in the amount of expected credit loss ("ECL").

To make that assessment, the Group compares the risk of a default occurring on the financial instrument as at the reporting date with the risk of a default occurring on the financial instrument as at the date of initial recognition and considers reasonable and supportable information, that is available without undue cost or effort, that is indicative of significant increases in credit risk since initial recognition.

The Group applies the "simplified approach" to measure the ECL, which uses a lifetime expected loss allowance on a forward-looking basis for all trade receivables. Other than the trade receivables, the Group applies a general model to measure ECL.

The Group assesses on a forward-looking basis the ECL associated with its debt instruments that are carried at FVOCI. The impairment methodology that is applied depends upon whether there has been a significant increase in credit risk.

f. Foreign currency translation

i. Functional and presentation currency

Items included in the financial statements of each of the entities within the Group are measured using the currency of the primary economic environment in which the relevant entity operates (the "functional currency"). The consolidated financial statements are presented in Rupiah, which is the functional currency of the Company and presentation currency of the Group.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

f. Penjabaran mata uang asing (lanjutan)

ii. Transaksi dan saldo

Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan menjadi mata uang fungsional menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi.

Pada setiap tanggal pelaporan, setiap aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah disesuaikan untuk mencerminkan kurs penutup. Keuntungan dan kerugian selisih kurs yang timbul dari penyelesaian transaksi dalam mata uang asing dan dari penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing menggunakan kurs yang berlaku pada akhir tahun pelaporan diakui di dalam laba rugi.

Kurs yang digunakan pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian, berdasarkan kurs tengah per 31 Desember 2025 dan 2024 yang diterbitkan Bank Indonesia, adalah sebagai berikut (dalam Rupiah penuh):

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION *(continued)*

f. Foreign currency translation *(continued)*

ii. Transactions and balances

Foreign currency transactions are translated into the functional currency using the exchange rate prevailing at the date of the transactions.

At each reporting date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are adjusted to reflect the prevailing exchange rates at such date. Foreign exchange gains and losses resulting from the settlement of such transactions and from the translation at year-end exchange rates of monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are recognised in profit or loss.

As at the consolidated statement of financial position dates, the exchange rates that were used, based on the middle rates that were published on 31 December 2025 and 2024 by Bank Indonesia, were as follows (full amounts in Rupiah):

	2025	2024	
Dolar Amerika Serikat ("Dolar AS" atau "USD")	16,782	16,162	*United States Dollar ("US Dollars" or "USD")*

g. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi

Grup mempunyai transaksi dengan pihak berelasi sebagaimana didefinisikan pada PSAK 224 "Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi".

Saldo dan transaksi yang material antara Grup dengan pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang relevan.

g. Transactions with related parties

The Group has transactions with related parties as defined in SFAS 224 "Related Parties Disclosures".

The significant transactions and balances of the Group with related parties are disclosed in the relevant notes to the consolidated financial statements.

h. Kas dan setara kas dan kas yang dibatasi penggunaannya

Kas dan setara kas termasuk kas, kas di bank, dan deposito berjangka yang jatuh tempo dalam jangka waktu tiga bulan atau kurang pada saat penempatan, dan yang tidak dibatasi penggunaannya.

Kas di bank dan deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya disajikan pada akun "kas yang dibatasi penggunaannya" dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

h. Cash and cash equivalents and restricted cash

Cash and cash equivalents consist of cash on hand, cash in banks and time deposits with maturity periods of three months or less at the time of placement, and which are not restricted for use.

Cash in banks and time deposits that are restricted are presented as "restricted cash" in the consolidated statement of financial position.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

i. Piutang

(i) Piutang usaha dan piutang lainnya

Piutang usaha merupakan jumlah yang terutang dari pelanggan atas penjualan barang dagangan atau jasa dalam kegiatan usaha. Piutang lain-lain merupakan saldo piutang yang timbul dari transaksi diluar kegiatan usaha biasa. Jika piutang diperkirakan dapat ditagih dalam waktu satu tahun atau kurang, piutang diklasifikasikan sebagai aset lancar. Jika tidak, piutang disajikan sebagai aset tidak lancar.

Piutang usaha dan piutang lain-lain pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode bunga efektif, apabila dampak pendiskontoan signifikan, dikurangi provisi atas penurunan nilai.

Kolektabilitas piutang usaha dan piutang lainnya ditinjau secara berkala. Piutang yang diketahui tidak tertagih, dihapuskan dengan secara langsung mengurangi nilai tercatatnya. Akun penyisihan piutang digunakan untuk mencatat dampak kerugian kredit ekspektasian, menggunakan pertimbangan dalam mendefinisikan hal apa yang dianggap sebagai kenaikan risiko kredit yang signifikan dan dalam pembuatan asumsi dan estimasi, untuk menghubungkan informasi yang relevan tentang kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi. Arus kas terkait dengan piutang jangka pendek tidak didiskontokan apabila efek diskonto tidak material.

Jumlah kerugian penurunan nilai dibebankan pada laba rugi dan disajikan sebagai "Beban umum dan administrasi". Ketika piutang usaha dan piutang lain-lain, yang rugi penurunan nilainya telah diakui, tidak dapat ditagih pada periode selanjutnya, maka piutang tersebut dihapusbukukan dengan mengurangi akun penyisihan. Jumlah yang selanjutnya dapat ditagih kembali atas piutang yang sebelumnya telah dihapusbukukan, diakui pada laba rugi.

(ii) Pekerjaan kontrak konstruksi dalam penyelesaian – tagihan dan utang kepada pelanggan

Tagihan dan utang kepada pelanggan dari pekerjaan kontrak konstruksi yang masih dalam tahap pelaksanaan merupakan selisih antara pendapatan yang diakui berdasarkan metode persentase penyelesaian dan termin yang ditagih.

Tagihan kepada pelanggan dicatat apabila pendapatan yang diakui berdasarkan metode persentase penyelesaian melebihi termin yang ditagih, sedangkan utang kepada pelanggan dicatat apabila termin yang ditagih melebihi pendapatan yang diakui berdasarkan metode persentase penyelesaian.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION *(continued)*

i. Receivables

(i) Trade and other receivables

Trade receivables are amounts that are due from customers for goods that are sold or services that are performed in the ordinary course of business. Other receivables are receivables arising from transactions outside of the ordinary course of business. If collection is expected in one year or less, they are classified as current assets. Otherwise, they are presented as non-current assets.

Trade and other receivables are initially recognised at fair value and subsequently measured at amortised cost using the effective interest method, if the impact of the discounting is significant, less any allowance for impairment.

Collectibility of trade and other receivables is reviewed on an ongoing basis. Receivables which are known to be uncollectible are written-off by reducing the carrying amount directly. An allowance account is used to record impact from expected credit losses, using exercise of judgement in defining what is considered to be a significant increase in credit risk and in making assumptions and estimates to incorporate relevant information about past events, current conditions and forecasts of economic conditions. Cash flow relating to short-term receivables is not discounted if the effect of discounting is immaterial.

The amounts of the impairment losses are charged to profit or loss as "General and administrative expenses". When trade and other receivables for which impairment allowances have been recognised become uncollectible in a subsequent period, they are written-off against the allowance account. Subsequent recoveries of amounts that had previously been written-off are recognised in profit or loss.

(ii) Construction contract work in progress – amount due from and to customers

Amount due from and to customers from construction contract services which are still in progress represents the difference between the revenue recognised based on percentage of completion method and the progress billings.

Amount due from customers are recorded when the revenue recognised based on percentage of completion method exceeds the progress billings, while amount due to customers are recorded when the progress billing exceeds the revenue recognised based on the percentage of completion method.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

j. Persediaan

Persediaan dicatat pada nilai terendah antara harga perolehan atau nilai realisasi bersihnya. Harga perolehan barang jadi terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja serta alokasi biaya overhead langsung maupun tidak langsung baik yang bersifat tetap maupun variabel. Nilai realisasi bersih adalah estimasi harga penjualan dalam kegiatan usaha biasa, dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk melakukan penjualan.

Persediaan real estat terdiri dari lahan yang telah selesai dikembangkan dan bangunan siap dijual. Biaya perolehan lahan yang telah selesai dikembangkan meliputi biaya perolehan tanah dan biaya pengembangan langsung terkait kegiatan pengembangan lahan. Bangunan siap dijual terdiri dari apartemen dan rumah siap dijual. Biaya perolehan apartemen ditentukan dengan metode biaya perolehan. Biaya perolehan rumah siap dijual meliputi biaya perolehan tanah, biaya pengembangan, biaya konstruksi dan biaya lainnya yang dapat diatribusikan pada aktivitas pengembang rumah. Biaya ditentukan menggunakan metode identifikasi khusus.

Persediaan lainnya terdiri dari persediaan bahan jadi material, suku cadang dan persediaan bahan pembantu. Biaya perolehan persediaan lainnya ditentukan dengan metode rata-rata tertimbang.

Penurunan nilai atas persediaan dan suku cadang yang usang dan perputarannya lambat, jika ada, ditentukan berdasarkan hasil penelaahan terhadap kondisi persediaan akhir periode laporan. Setiap pemulihan kembali penurunan nilai persediaan karena peningkatan kembali nilai realisasi neto, diakui sebagai pengurangan terhadap jumlah beban persediaan pada periode terjadinya pemulihan tersebut.

k. Properti investasi

Properti investasi merupakan tanah, bangunan, dan prasarana yang dimiliki untuk disewakan dalam jangka panjang atau untuk kenaikan harga atau keduanya, dan yang tidak ditempati oleh entitas di dalam Grup konsolidasian. Properti investasi juga termasuk properti yang sedang dikonstruksi atau pembangunan untuk penggunaan di masa yang akan datang sebagai properti investasi.

Properti investasi diakui sebesar biaya perolehan dan disusutkan sesuai dengan estimasi umur ekonomisnya. Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat ekonomis properti investasi yaitu 5 sampai dengan 20 tahun.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION *(continued)*

j. Inventories

Inventories are stated at the lower of cost or net realisable value. The cost of finished goods comprises materials, labour and an appropriate proportion of directly attributable fixed and variable overheads. Net realisable value is the estimate of the selling price in the ordinary course of business, less the estimated cost of completion and the estimated costs necessary to make the sales.

Real estate inventories consist of developed land and buildings ready for sale. The cost of developed land consists of cost of land and direct development costs related to real estate development activities. Buildings ready for sale consist of apartment and houses ready for sale. The initial cost of apartment is determined using historical cost. The initial cost of houses ready for sale consists of cost of land, development cost, construction cost and other costs related to the development of the houses. Cost is determined using the specific identification method.

Other inventories consist of finished material inventories, spare parts, and auxiliary materials. The cost of other inventories cost is determined by weighted average method.

The impairment of obsolete and slow-moving inventories and spare-parts, if any, is determined according to a review of the physical condition of the inventories at the end of the reporting period. Any reversal of the decline in the value of inventories due to an increase in net realisable value is recognised as a reduction in the amount of inventory expenses in the period in which the recovery occurs.

k. Properti investasi

Investment properties represent land, buildings and infrastructure that are held for long-term rental yields or for capital appreciation or both and that are not occupied by the companies in the consolidated Group. Investment properties also includes properties that are being constructed or developed for future use as investment properties.

Investment properties are recognised at cost and depreciated over the estimated economic life. Depreciation is computed using the straight-line method based on the estimated useful lives of the investment properties which is 5 to 20 years.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

k. Properti investasi (lanjutan)

Properti investasi dalam bentuk tanah dinyatakan pada biaya perolehan dan tidak disusutkan.

Biaya pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laba rugi pada saat terjadinya. Pengeluaran yang memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan standar kinerja, dikapitalisasi. Properti investasi yang tidak digunakan lagi atau dijual dikeluarkan dari kelompok properti investasi berikut akumulasi penyusutan dan penurunan nilainya, jika ada. Keuntungan atau kerugian dari penjualan properti investasi tersebut dibukukan dalam laba rugi pada tahun penjualan terjadi.

l. Aset tetap

Aset tetap, kecuali tanah, disajikan sebesar harga perolehan dikurangi dengan penyusutan dan kerugian penurunan nilai. Harga perolehan termasuk pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung atas perolehan aset tersebut.

Grup menganalisis fakta dan keadaan untuk masing-masing jenis hak atas tanah dalam menentukan akuntansi untuk hak atas tanah tersebut sehingga dapat merepresentasikan dengan tepat kejadian atau transaksi ekonomi yang mendasarinya. Jika hak atas tanah tersebut tidak mengalihkan pengendalian atas aset pendasar kepada Grup, melainkan mengalihkan hak untuk menggunakan aset pendasar, Grup menerapkan perlakuan akuntansi atas transaksi tersebut sebagai sewa berdasarkan PSAK 116: "Sewa". Jika hak atas tanah secara substansi menyerupai pembelian tanah, maka Grup menerapkan PSAK 216: "Aset tetap".

Tanah disajikan sebesar nilai wajar dan tidak disusutkan. Penilaian terhadap aset-aset tersebut dilakukan oleh penilai independen eksternal yang bersertifikat. Penilaian atas aset tersebut dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa nilai wajar aset yang direvaluasi tidak berbeda secara material dengan nilai tercatatnya. Kenaikan nilai tercatat yang timbul dari revaluasi aset tetap yang menggunakan model revaluasi dikreditkan pada "cadangan revaluasi aset" sebagai bagian dari penghasilan komprehensif lainnya. Penurunan yang menghapus nilai kenaikan sebelumnya atas aset yang sama dibebankan terhadap "cadangan revaluasi aset" sebagai bagian dari penghasilan komprehensif lain. Penurunan lainnya dibebankan pada laba rugi.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION *(continued)*

k. Investment properties *(continued)*

Investment properties in the form of land are presented at acquisition cost and not depreciated.

The cost of repairs and maintenance is charged to profit or loss as incurred. Expenditures which extends the useful lives of the property or results in increasing future economic benefits such as an increase in capacity and improvement in the quality of output or standard of performance, is capitalised. When the property is unused or otherwise disposed of, the carrying value and accumulated impairment losses, if any, are removed from the investment property account. Gains or losses from the sale of investment properties are recorded in profit or loss in the year of sale.

l. Fixed assets

All fixed assets, excluding land, are stated at historical cost less depreciation and impairment losses. Historical cost includes expenditure that is directly attributable to the acquisition of the items.

The Group analyses the facts and circumstances for each type of land rights in determining the accounting for each of these land rights so that it can accurately represent an underlying economic event or transaction. If the land rights do not transfer control of the underlying assets to the Group, but give the rights to use the underlying assets, the Group applies the accounting treatment of these transactions as leases under SFAS 116: "Leases". If land rights are substantially similar with land purchases, the Group applies SFAS 216: "Fixed assets".

Land are shown at fair value and are not depreciated. The valuations of those assets are performed by certified external independent appraiser. The valuations are performed with sufficient regularity to ensure that the fair value of a revalued asset does not differ materially from its carrying amount. Increases in carrying amounts arising from revaluation of fixed assets that use the revaluation model are credited to "asset revaluation reserve" as part of other comprehensive income. Decreases that offset previous increases of the same asset are debited against "asset revaluation reserve" as part of other comprehensive income. All other decreases are charged to profit or loss.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2025
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

I. Aset tetap (lanjutan)

Biaya hukum awal untuk mendapatkan hak legal diakui sebagai bagian biaya akuisisi tanah dan biaya-biaya tersebut tidak disusutkan.

Pada awalnya, semua aset tetap diakui sebesar harga perolehan dan setelahnya dicatat sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai. Aset tetap disusutkan menggunakan metode garis lurus selama estimasi masa manfaatnya sebagai berikut:

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION *(continued)*

I. Fixed assets *(continued)*

The initial legal costs that are incurred in obtaining legal rights are recognised as part of the acquisition costs of the land, and these costs are not depreciated.

Fixed assets are initially recognised at cost and subsequently carried at cost less accumulated depreciation and accumulated impairment losses. Fixed assets are depreciated using the straight-line method over their expected useful lives as follows:

	Tahun/*Years*	
Bangunan dan prasarana	20	*Buildings and infrastructures*
Perlengkapan kantor dan rumah	4 - 8	*Office and household equipment*
Mesin dan peralatan	4 - 20	*Machinery and equipment*
Kendaraan dan alat-alat berat	5 - 20	*Vehicles and heavy equipment*

Biaya-biaya setelah pengakuan awal diakui sebagai bagian nilai tercatat aset atau sebagai aset terpisah, sebagaimana mestinya, hanya jika kemungkinan besar Grup akan mendapatkan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut dan biaya perolehan aset dapat diukur dengan andal. Nilai tercatat komponen yang digantikan dihapuskan. Biaya perbaikan dan pemeliharaan dibebankan dalam laba rugi dalam periode keuangan ketika biaya-biaya tersebut terjadi.

Subsequent costs are included in the asset's carrying amount or recognised as a separate asset, as appropriate, only when it is probable that the future economic benefits that are associated with the item will flow to the Group and the cost of the item can be measured reliably. The carrying amounts of replaced parts are derecognised. All other repairs and maintenance are charged to profit or loss during the financial period in which they are incurred.

Masa manfaat dan metode penyusutan ditelaah dan jika perlu disesuaikan, pada setiap akhir tahun buku. Dampak dari setiap revisi diakui dalam laba rugi, ketika perubahan terjadi.

The asset's useful life and depreciation method are reviewed and adjusted if appropriate, at the end of each financial year. The effects of any revisions are recognised in profit or loss, when the changes arise.

Nilai tercatat aset segera diturunkan sebesar jumlah yang dapat dipulihkan apabila nilai tercatat aset lebih besar daripada estimasi jumlah yang dapat terpulihkan (Catatan 2m).

An asset's carrying amount is written down immediately to its recoverable amount if the asset's carrying amount is greater than its estimated recoverable amount (Note 2m).

Aset tetap yang sudah tidak digunakan lagi atau dijual dikeluarkan dari laporan keuangan konsolidasian. Keuntungan atau kerugian dari pelepasan aset tetap tersebut dibukukan dalam laba rugi.

When assets are retired or otherwise disposed of, their carrying values are removed from the consolidated financial statements. Any resulting gains or losses on disposals of fixed assets are recognised in profit and loss.

Aset dalam penyelesaian dinyatakan sebesar biaya perolehan termasuk biaya pinjaman yang terjadi selama masa pembangunan yang timbul dari utang yang digunakan untuk pembangunan aset tersebut. Akumulasi biaya perolehan akan dipindahkan ke masing-masing aset tetap yang bersangkutan pada saat selesai dan siap digunakan. Penyusutan dimulai pada saat aset tersebut siap untuk digunakan sesuai dengan tujuan yang diinginkan manajemen.

Construction in progress is carried at cost including any borrowing costs that are incurred during construction arising from debts that have been used for funding the construction. The accumulated costs are transferred to the respective fixed assets accounts when the construction is substantially completed and ready for its intended use. Depreciation is charged from the date on which the assets are ready for use in the manner intended by management.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

I. Aset tetap (lanjutan)

Biaya bunga dan biaya pinjaman lainnya, seperti biaya diskonto pinjaman baik yang secara langsung atau tidak langsung digunakan untuk pendanaan konstruksi aset kualifikasian, dikapitalisasi hingga aset tersebut selesai dikonstruksi. Untuk biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung pada aset kualifikasian, jumlah yang dikapitalisasi ditentukan dari biaya pinjaman aktual yang terjadi selama periode berjalan, dikurangi penghasilan yang diperoleh dari investasi sementara atas dana hasil pinjaman tersebut. Untuk pinjaman yang tidak dapat diatribusikan secara langsung pada suatu aset kualifikasian, jumlah yang dikapitalisasi ditentukan dengan mengalikan tingkat kapitalisasi terhadap jumlah yang dikeluarkan untuk memperoleh aset kualifikasian. Tingkat kapitalisasi dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang biaya pinjaman yang dibagi dengan jumlah pinjaman yang tersedia selama periode, selain pinjaman yang secara spesifik diambil untuk tujuan memperoleh suatu aset kualifikasian. Entitas menghentikan kapitalisasi biaya pinjaman ketika secara substansial seluruh aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset kualifikasian telah selesai.

m. Penurunan nilai aset nonkeuangan

Pada tanggal pelaporan, Grup menelaah nilai tercatat aset nonkeuangan untuk menentukan apakah terdapat indikasi bahwa nilai tercatat aset tersebut mungkin tidak terpulihkan. Penurunan nilai diakui jika nilai tercatat aset melebihi jumlah terpulihkannya. Jumlah terpulihkan merupakan jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset dikurangi biaya pelepasan dan nilai pakai aset. Dalam menentukan penurunan nilai, aset dikelompokkan pada tingkat yang paling rendah dimana terdapat arus kas yang dapat diidentifikasi.

Aset nonkeuangan selain *goodwill* yang mengalami penurunan nilai diuji untuk menentukan apakah terdapat kemungkinan pemulihan penurunan nilai, pada setiap tanggal pelaporan. Pemulihan rugi penurunan nilai untuk aset selain *goodwill* diakui jika, dan hanya jika, terdapat perubahan estimasi yang digunakan dalam menentukan jumlah terpulihkan aset sejak pengujian penurunan nilai terakhir kali. Pembalikan rugi penurunan nilai tersebut diakui segera dalam laba rugi. Pembalikan tersebut tidak boleh mengakibatkan nilai tercatat aset melebihi biaya perolehan disusutkan sebelum adanya pengakuan penurunan nilai pada tanggal pembalikan dilakukan. Rugi penurunan nilai yang diakui atas *goodwill* tidak dibalik lagi.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION *(continued)*

I. Fixed assets *(continued)*

Interest and other borrowing costs, such as discount fees on loans that have been either directly or indirectly used to finance the construction of a qualifying asset, are capitalised until the date when the construction is complete. For borrowings that are directly attributable to a qualifying asset, the amount to be capitalised is determined as the actual borrowing cost that has been incurred during the period, less any income that has been earned on the temporary investment of such borrowings. For borrowings that are not directly attributable to a qualifying asset, the amount to be capitalised is determined by applying a capitalisation rate to the amount that has been expended on the qualifying assets. The capitalisation rate is the weighted average of the total borrowing costs that are applicable to the total borrowings outstanding during the period, other than borrowings that have been made specifically for the purpose of obtaining a qualifying asset. An entity shall cease capitalising borrowing costs when substantially all of the activities necessary to prepare the qualifying asset are complete.

m. Impairment of non-financial assets

At the reporting date, the Group reviews the carrying amounts of the non-financial assets to determine whether there is any indication that the carrying amounts of those assets may not be recoverable. An impairment loss is recognised for the amount by which the asset's carrying amount exceeds its recoverable amount. The recoverable amount is the higher of an asset's fair value less costs of disposal and its value-in-use. For the purposes of assessing impairment, assets are grouped at the lowest level for which there are separately identifiable cash flows.

Non-financial assets other than goodwill that suffer impairment are reviewed for the possible reversal of the impairment at each reporting date. Reversals on impairment losses for assets other than goodwill are recognised if, and only if, there has been a change in the estimates that are used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment tests were carried out. Reversals of impairment losses are recognised immediately in profit or loss. A reversal should not result in the carrying amount of an asset exceeding its depreciated cost before the impairment was recognised on the date on which the impairment was reversed. Impairment losses relating to goodwill would not be reversed.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

n. Sewa

Grup sebagai penyewa

Pada tanggal permulaan kontrak, Grup menilai apakah kontrak merupakan, atau mengandung, sewa. Suatu kontrak merupakan atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

Untuk menilai apakah kontrak memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian, Grup mempertimbangkan apakah:

(i) Grup memiliki hak untuk mendapatkan secara substansial seluruh manfaat ekonomi dari penggunaan aset identifikasian; dan
(ii) Grup memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasian. Grup memiliki hak ini ketika Grup memiliki hak untuk pengambilan keputusan yang relevan tentang penentuan bagaimana dan untuk tujuan apa aset digunakan telah ditentukan sebelumnya dan:
- Grup memiliki hak untuk mengoperasikan aset; atau
- Grup telah mendesain aset dengan cara menetapkan sebelumnya bagaimana dan untuk tujuan apa aset akan digunakan selama periode penggunaan.

Pada tanggal insepsi atau pada penilaian kembali atas kontrak yang mengandung sebuah komponen sewa, Grup mengalokasikan imbalan dalam kontrak ke masing-masing komponen sewa berdasarkan harga tersendiri relatif dari komponen sewa dan harga tersendiri agregat dari komponen nonsewa.

Pada tanggal permulaan sewa, Grup mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa. Aset hak-guna diukur pada biaya perolehan, di mana meliputi jumlah pengukuran awal liabilitas sewa yang disesuaikan dengan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan, ditambah dengan biaya langsung awal yang dikeluarkan dan estimasi biaya yang akan dikeluarkan untuk membongkar dan memindahkan aset pendasar atau untuk merestorasi aset pendasar ke kondisi yang disyaratkan dan ketentuan sewa, dikurangi dengan insentif sewa yang diterima.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION *(continued)*

n. Leases

The Group as a lessee

At the inception of a contract, the Group assesses whether the contract is, or contains, a lease. A contract is or contains a lease if the contract conveys the right to control the use of an identified asset for a period of time in exchange for consideration.

To assess whether a contract conveys the right to control the use of an identified asset, the Group considers whether:

(i) The Group has the right to obtain substantially all of the economic benefits from the use of the asset throughout the period of use; and
(ii) The Group has the right to direct the use of the asset. The Group has this right when it has the decision-making rights that are the most relevant to changing the determination of how and for what purpose the asset is used and:

- *The Group has the right to operate the asset; or*
- *The Group has designed the asset in a way that predetermines how and for what purpose it will be used.*

At the inception or on the reassessment of a contract that contains a lease component, the Group allocates the consideration in the contract to each lease component on the basis of the relative stand-alone prices and the aggregate stand-alone price of the non-lease components.

The Group recognises a right-of-use asset and a lease liability on the lease commencement date. The right-of-use asset is initially measured at cost, which comprises the initial amount of the lease liability, adjusted for any lease payments made at or before the commencement date, plus any initial direct costs that have been incurred and an estimate of the costs to dismantle and remove the underlying asset or to restore the underlying asset to the condition required by the terms and conditions of the lease, less any lease incentives that have been received.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

n. Sewa (lanjutan)

Grup sebagai penyewa (lanjutan)

Liabilitas sewa diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal permulaan, didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa atau jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, maka menggunakan suku bunga pinjaman inkremental. Pada umumnya, Grup menggunakan suku bunga pinjaman inkremental sebagai tingkat bunga diskonto.

Pembayaran sewa yang termasuk dalam pengukuran liabilitas sewa meliputi pembayaran berikut ini:

(i) pembayaran tetap, termasuk pembayaran tetap secara substansi dikurangi dengan piutang insentif sewa;
(ii) pembayaran sewa variabel yang bergantung pada indeks atau suku bunga yang pada awalnya diukur dengan menggunakan indeks atau suku bunga pada tanggal permulaan;
(iii) jumlah yang diperkirakan akan dibayarkan oleh penyewa dengan jaminan nilai residual;
(iv) harga eksekusi opsi beli jika Grup cukup pasti untuk mengeksekusi opsi tersebut; dan
(v) penalti karena penghentian awal sewa kecuali jika Grup cukup pasti untuk tidak menghentikan lebih awal.

Setiap pembayaran sewa dialokasikan sebagai beban keuangan dan pengurangan liabilitas sehingga menghasilkan tingkat suku bunga yang konstan atas saldo liabilitas yang tersisa. Utang sewa yang terkait, dikurangi dengan beban keuangan, dimasukkan ke dalam "liabilitas sewa". Elemen bunga dari beban keuangan dibebankan pada laba rugi selama periode sewa sehingga menghasilkan tingkat bunga periodik yang konstan untuk saldo liabilitas yang tersisa pada setiap periode.

Grup menyajikan aset hak-guna sebagai bagian dari "Aset tetap" dan liabilitas sewa di dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

Jika sewa mengalihkan kepemilikan aset pendasar kepada Grup pada akhir masa sewa atau jika biaya perolehan aset hak-guna merefleksikan Grup akan mengeksekusi opsi beli, maka Grup menyusutkan aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga akhir umur manfaat aset pendasar. Jika tidak, maka Grup menyusutkan aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION *(continued)*

n. Leases *(continued)*

Group as a lessee *(continued)*

The lease liability is initially measured at the present value of the lease payments that are not paid at the commencement date, and discounted using the interest rate that is implicit in the lease or, if that rate cannot be readily determined, using the incremental borrowing rate. Generally, the Group uses its incremental borrowing rate as the discount rate.

The lease payments that are included in the measurement of the lease liability comprise the following:

(i) fixed payments, including in-substance fixed payments less any lease incentives that are receivable;
(ii) variable lease payments that depend upon an index or a rate, initially measured using the index or rate as at the commencement date;
(iii) amounts that are expected to be payable under a residual value guarantee;
(iv) the exercise price under a purchase option that the Group is reasonably certain to exercise; and
(v) penalties for the early termination of a lease unless the Group is reasonably certain not to terminate early.

Each lease payment is allocated between the finance charges and the reduction of the lease liability so as to achieve a constant rate on the finance balance outstanding. The corresponding rental obligations, net of finance charges, are included in "lease liabilities". The interest element of the finance cost is charged to profit or loss over the lease period so as to produce a constant periodic rate of interest on the remaining balance of the liability for each period.

The Group presents right-of-use assets as part of "Fixed assets" and lease liabilities in the consolidated statement of financial position.

If the lease transfers ownership of the underlying asset to the Group by the end of the lease term or if the cost of the right-of-use asset reflects that the Group will exercise a purchase option, the Group depreciates the right-of-use asset from the commencement date to the end of the useful life of the underlying asset. Otherwise, the Group depreciates the right-of-use asset from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right-of-use asset or the end of the lease term.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

n. Sewa (lanjutan)

Grup sebagai penyewa (lanjutan)

Sewa jangka pendek

Grup memutuskan untuk tidak mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa untuk sewa jangka pendek yang memiliki masa sewa 12 bulan atau kurang. Grup mengakui pembayaran sewa atas sewa tersebut sebagai beban dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

Sewa aset bernilai rendah

Grup memutuskan untuk tidak mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa untuk sewa aset bernilai rendah. Grup mengakui pembayaran sewa atas sewa tersebut sebagai beban.

o. Utang usaha

Utang usaha adalah kewajiban untuk membayar barang atau jasa yang telah diperoleh dari pemasok dalam kegiatan usaha biasa. Utang usaha diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek jika pembayarannya jatuh tempo dalam waktu satu tahun atau kurang. Jika tidak, utang tersebut disajikan sebagai liabilitas jangka panjang.

Utang usaha pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan kemudian diukur sebesar harga perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

p. Pengakuan pendapatan dan beban

Penjualan barang

Pendapatan dari penjualan diakui jika seluruh kondisi berikut terpenuhi:
- Grup telah memindahkan kontrol kepemilikan barang;
- Grup tidak lagi melanjutkan pengelolaan yang biasanya terkait dengan kepemilikan atas barang ataupun melakukan pengendalian efektif atas barang yang dijual;

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION *(continued)*

n. Leases *(continued)*

Group as a lessee *(continued)*

Short-term leases

The Group has elected not to recognise right-of-use assets and lease liabilities for short-term leases that have a lease term of 12 months or less. The Group recognises the lease payments that are associated with these leases as an expense on a straight-line basis over the lease term.

Low-value assets leases

The Group has elected not to recognise right-of-use assets and lease liabilities for low-value assets. The Group recognises the lease payments associated with these leases as an expense.

o. Trade payables

Trade payables are obligations to pay for goods or services that have been acquired in the ordinary course of business from suppliers. Trade payables are classified as current liabilities if payment is due within one year or less. If not, they are presented as non-current liabilities.

Trade payables are initially recognised at fair value and subsequently measured at amortised cost using the effective interest method.

p. Revenue and expenses recognition

Sales of goods

Revenue from the sale of goods is recognised when all of the following conditions are fulfilled:
- *the Group has transferred control of the goods to the buyer;*
- *the Group retains neither continuing managerial involvement nor effective control over the goods sold;*

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

p. Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan)

Penjualan barang (lanjutan)

Pendapatan dari penjualan diakui jika seluruh kondisi berikut terpenuhi: (lanjutan)

- jumlah pendapatan dapat diukur secara andal;
- kemungkinan besar manfaat ekonomik yang terkait dengan transaksi tersebut akan mengalir ke Grup; dan
- biaya yang terjadi atau akan terjadi sehubungan dengan transaksi penjualan tersebut dapat diukur secara andal.

Terpenuhinya kondisi tersebut tergantung persyaratan penjualan dengan setiap pelanggan. Secara umum risiko dan manfaat dianggap telah berpindah ke pelanggan ketika terjadi transfer kepemilikan dan risiko.

Pendapatan jasa

Bila suatu transaksi pendapatan jasa dapat diestimasi dengan andal, pendapatan sehubungan dengan transaksi tersebut diakui dengan mengacu pada tingkat penyelesaian transaksi tersebut pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian.

Hasil transaksi dapat diestimasi dengan andal pada saat terpenuhinya seluruh kondisi berikut:

- jumlah pendapatan dapat diukur secara andal;
- besar kemungkinan manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut akan mengalir ke Grup;
- tingkat penyelesaian dari suatu transaksi pada akhir periode pelaporan dapat diukur secara andal; dan
- biaya yang terjadi untuk transaksi dan untuk menyelesaikan transaksi tersebut dapat diukur dengan andal.

Beban diakui pada saat terjadinya dengan menggunakan metode akrual.

q. Imbalan kerja

i. Liabilitas imbalan kerja jangka pendek

Imbalan kerja jangka pendek diakui pada saat terutang kepada karyawan.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION *(continued)*

p. Revenue and expenses recognition *(continued)*

Sales of goods (continued)

Revenue from the sale of goods is recognised when all of the following conditions are fulfilled: (continued)

- *the amount of revenue can be measured reliably;*
- *it is probable that the economic benefits associated with the transaction will flow to the Group; and*
- *the cost incurred or to be incurred with respect to the sales transaction can be measured reliably.*

The fulfilment of these conditions depends upon the terms of the sales with individual customers. Generally, the risks and rewards are considered to be transferred to the customer when the title and risk are transferred.

Rendering of services

When the outcome of a transaction involving the rendering of services can be estimated reliably, the revenue that is associated with the transaction is recognised with reference to the stage of completion of the transaction as at the consolidated statement of financial position date.

The outcome of a transaction can be estimated reliably when all of the following conditions are met:

- *the amount of revenue can be measured reliably;*
- *it is probable that the economic benefits that are associated with the transaction will flow to the Group;*
- *the stage of completion of the transaction at the end of the reporting period can be measured reliably; and*
- *the costs incurred for the transaction and the costs to complete the transaction can be measured reliably.*

Expenses are recognised as incurred on an accrual basis.

q. Employee benefits

i. Short-term employee benefits liabilities

Short-term employee benefits are recognised when they accrue to the employees.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

q. Imbalan kerja (lanjutan)

ii. Kewajiban pensiun dan imbalan jangka panjang lainnya

Kewajiban pensiun

Grup diharuskan menyediakan imbalan pensiun dengan jumlah minimal sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 dan Undang-Undang Cipta Kerja No. 11/2020 (bersama-sama "peraturan ketenagakerjaan", atau Perjanjian Kerja Bersama ("PKB"), dimana yang lebih tinggi. Karena peraturan ketenagakerjaan atau PKB menentukan rumus tertentu untuk menghitung jumlah minimal imbalan pensiun, pada dasarnya program pensiun berdasarkan UU Ketenagakerjaan atau PKB adalah program pensiun imbalan pasti.

Program pensiun imbalan pasti ditentukan berdasarkan jumlah imbalan pensiun yang akan diterima seorang pekerja pada saat pensiun, biasanya tergantung beberapa faktor, misalnya usia, masa kerja dan kompensasi.

Liabilitas imbalan pensiun merupakan nilai kini liabilitas imbalan pasti pada akhir periode pelaporan dikurangi dengan nilai wajar aset program. Liabilitas imbalan pasti dihitung sekali setahun oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode *projected unit credit*. Nilai kini liabilitas imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan estimasi arus kas keluar masa depan dengan menggunakan tingkat bunga obligasi pemerintah (dengan pertimbangan saat ini tidak ada pasar aktif untuk obligasi korporat berkualitas tinggi) dalam mata uang Rupiah sesuai dengan mata uang dimana imbalan tersebut akan dibayarkan dan yang memiliki jangka waktu yang kurang lebih sama dengan waktu jatuh tempo liabilitas imbalan pensiun yang bersangkutan.

Biaya bunga bersih dihitung dengan menerapkan tingkat diskonto terhadap saldo bersih kewajiban imbalan pasti dan nilai wajar aset program. Biaya ini termasuk dalam beban imbalan kerja dalam laporan laba rugi.

Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian dan perubahan dalam asumsi-asumsi aktuarial dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas pada pos penghasilan komprehensif lain pada periode terjadinya.

Biaya jasa lalu diakui secara langsung dalam laba rugi. Keuntungan dan kerugian dari kurtailmen atau penyelesaian program manfaat pasti diakui dalam laba rugi ketika kurtailmen atau penyelesaian tersebut terjadi.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION *(continued)*

q. Employee benefits *(continued)*

ii. Pension obligation and other long-term benefits

Pension obligation

The Group is required to provide a minimum amount of pension benefits in accordance with Labour Law No. 13/2003 and Job Creation Law No. 11/2020 (together the "Labour Regulation"), or the Group's Collective Labour Agreement (the "CLA"), whichever is higher. Since the labour regulation and the CLA set the formula for determining the minimum amount of benefits, in substance pension plans under the labour regulation or the CLA represent defined benefit plans.

Defined benefit pension plan program define an amount at pension benefit that an employee will receive on retirement, usually depending on factors such as age, years of service and compensations.

The pension benefit obligation is the present value of the defined benefit obligation at the end of the reporting period less the fair value of plan assets. The defined benefit obligation is calculated annually by independent actuaries using the projected unit credit method. The present value of the defined benefit obligation is determined by discounting the estimated future cash outflows using interest rates of government bonds (considering currently there is no deep market for high quality corporate bonds) that are denominated in Rupiah, the currency in which the benefits will be paid and that have terms to maturity approximating the terms to the related pension obligation.

The net interest cost is calculated by applying the discount rate to the net balance of the defined benefit obligation and the fair value of plan assets. This cost is included in employee benefit expense in the statement of profit or loss.

Actuarial gains and losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions are charged or credited to equity in other comprehensive income in the period in which they arise.

Past service costs are recognised immediately in profit or loss. Gains or losses on the curtailment or settlement of a defined benefit plan are recognised in profit or loss when the curtailment or settlement occurs.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

q. Imbalan kerja (lanjutan)

ii. Kewajiban pensiun dan imbalan jangka panjang lainnya (lanjutan)

Imbalan jangka panjang lainnya

Grup memberikan imbalan jangka panjang lainnya seperti uang penghargaan dan cuti besar. Imbalan jangka panjang lainnya dihitung dengan menggunakan metode *projected unit credit* dan didiskontokan ke nilai kini. Imbalan ini dihitung dengan menggunakan metodologi yang sama dengan metodologi yang digunakan dalam perhitungan program pensiun imbalan pasti, kecuali untuk keuntungan dan kerugian aktuarial yang diakui segera pada laba rugi.

r. Pajak penghasilan kini dan tangguhan

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak diakui dalam laporan laba rugi, kecuali jika pajak tersebut terkait dengan transaksi atau kejadian yang diakui di penghasilan komprehensif lain atau langsung diakui ke ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau ekuitas.

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan peraturan dan tarif pajak yang berlaku pada tanggal pelaporan keuangan. Manajemen secara periodik mengevaluasi posisi yang diambil dalam Surat Pemberitahuan ("SPT") Tahunan sehubungan dengan situasi dimana aturan pajak yang berlaku membutuhkan interpretasi atas peraturan pajak yang berlaku. Jika perlu, manajemen menentukan provisi dibentuk berdasarkan jumlah yang diharapkan akan dibayar pada otoritas pajak.

Penghasilan pajak tangguhan diakui, dengan menggunakan metode *balance sheet liability* untuk semua perbedaan temporer antara dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya pada laporan keuangan konsolidasian. Namun, liabilitas pajak tangguhan tidak diakui jika timbul dari pengakuan awal *goodwill* atau pada saat pengakuan awal suatu aset atau liabilitas yang timbul dari transaksi selain kombinasi bisnis yang pada saat transaksi tersebut tidak mempengaruhi laba rugi akuntansi maupun laba rugi kena pajak. Penghasilan Pajak tangguhan ditentukan menggunakan tarif dan peraturan pajak yang berlaku atau yang secara substansial telah berlaku pada tanggal pelaporan dan diharapkan untuk diterapkan jika aset pajak tangguhan direalisasikan atau liabilitas pajak tangguhan diselesaikan.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION *(continued)*

q. Employee benefits *(continued)*

ii. Pension obligation and other long-term benefits *(continued)*

Other long-term benefits

The Group also provides other long-term benefits such as long service reward and grand leave. Other long-term benefits are calculated using the projected unit credit method and discounted to present value. These benefits are accounted for using the same methodology as that used for the defined benefit pension plan, except for actuarial gains and losses, which are recognised immediately in profit or loss.

r. Current and deferred income tax

The tax expenses comprises current and deferred tax. Tax is recognised in profit or loss, except to the extent that it relates to items recognised in other comprehensive income or directly in equity. In this case, the tax is also recognised in other comprehensive income or equity, respectively.

The current tax expense are determined according to the taxable income from the year, computed using the prevailing tax laws and rates at the reporting date. Management periodically evaluates the positions taken in Annual Tax Returns with respect to situations in which the applicable tax regulations are subject to interpretation with the current tax regulation. If necessary, management establishes a provision, where appropriate on the basis of the amounts that are expected to be paid to the tax authorities.

Deferred income tax is recognised, using the balance sheet liability method, on temporary differences arising between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts in the consolidated financial statements. However, deferred tax liabilities are not recognised if they arise from the initial recognition of goodwill, or not accounted for it they arises from the initial recognition of an asset or liability in a transaction other than a business combination that at the time of the transaction affects neither accounting nor taxable profit or loss. Deferred income tax is determined using the tax rates and tax laws that have been enacted or substantially enacted as at the reporting date and are expected to apply when the related deferred income tax asset is realised or the deferred income tax liability is settled.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

r. Pajak penghasilan kini dan tangguhan (lanjutan)

Aset pajak tangguhan diakui hanya jika besar kemungkinan jumlah penghasilan kena pajak di masa depan akan memadai untuk dikompensasi dengan perbedaan temporer yang masih dapat digunakan.

Atas perbedaan temporer dalam investasi pada entitas anak dan asosiasi, dibentuk pajak penghasilan tangguhan, kecuali untuk liabilitas pajak tangguhan di mana saat pembalikan perbedaan temporer dikendalikan oleh Grup dan sangat mungkin perbedaan temporer tidak akan dibalik di masa mendatang.

Grup dikenakan pajak final atas pendapatan dari real estate dan jasa konstruksi. Pajak final dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku pada tanggal pelaporan keuangan. Pajak penghasilan final disajikan di luar beban pajak penghasilan pada laba rugi. Perbedaan nilai tercatat aset dan liabilitas yang berhubungan dengan pajak penghasilan final dengan dasar pengenaan pajaknya tidak diakui sebagai aset atau liabilitas pajak tangguhan.

s. Modal saham

Saham biasa dikelompokkan sebagai ekuitas.

Biaya langsung yang berkaitan dengan penerbitan saham baru disajikan sebagai pengurang ekuitas, neto setelah pajak, dari jumlah yang diterima.

t. Distribusi dividen

Distribusi dividen kepada pemegang saham diakui sebagai liabilitas dalam laporan keuangan konsolidasian Grup pada periode dimana dividen dideklarasikan dan telah disetujui oleh pemegang saham Perusahaan.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION *(continued)*

r. Current and deferred income tax *(continued)*

Deferred tax assets are recognised only to the extent that it is probable that future taxable profits will be available to be compensated by the temporary differences that can be utilised.

Deferred income tax is provided on temporary differences arising on investments in subsidiaries and associates, except for deferred tax liabilities, where the timing of the reversal of the temporary difference is controlled by the Group, and it is probable that the temporary difference will not be reversed in the foreseeable future.

The Group is subject to final income tax on revenue from real estate and construction services. The final income tax charge is calculated on the basis of the tax laws enacted at the reporting date. Final income tax is presented outside income tax expenses in profit or loss. The difference between the financial statement carrying amounts of existing assets and liabilities related to the final income tax, and their respective final tax bases is not recognised as deferred tax assets or liabilities.

s. Share capital

Ordinary shares are classified as equity.

Incremental costs that are directly attributable to the issuance of new shares are shown as deductions in equity, net of tax, from the proceeds.

t. Dividend distributions

Dividend distribution to the shareholders is recognised as a liability in the Group's consolidated financial statements in the period in which the dividends are declared and approved by the Company's shareholders.

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI SIGNIFIKAN

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia mengharuskan manajemen untuk membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan liabilitas yang dilaporkan dan pengungkapan aset dan liabilitas kontinjensi pada tanggal pelaporan, serta jumlah pendapatan dan beban selama tahun pelaporan. Estimasi, asumsi dan pertimbangan tersebut dievaluasi secara terus menerus dan berdasarkan pengalaman historis dan faktor-faktor lainnya, termasuk harapan peristiwa di masa datang yang diyakini wajar berdasarkan kondisi yang ada.

Grup telah mengidentifikasi hal-hal berikut dimana diperlukan pertimbangan, estimasi dan asumsi signifikan dan dimana hasil aktual dapat berbeda dari estimasi tersebut jika menggunakan asumsi dan kondisi yang berbeda dan dapat mempengaruhi secara material hasil keuangan atau posisi keuangan konsolidasian Grup yang dilaporkan dalam tahun mendatang.

i. Provisi atas KKE untuk piutang usaha

Grup menyesuaikan pengalaman kerugian kredit historis dengan informasi *forward-looking*. Sebagai contoh, jika prakiraan atas kondisi ekonomi diperkirakan memburuk selama periode/tahun depan, yang dapat menyebabkan meningkatnya jumlah gagal bayar, tingkat gagal bayar historis disesuaikan. Pada setiap tanggal pelaporan, tingkat gagal bayar historis diperbaharui dan perubahan estimasi *forward-looking* dianalisis.

Penilaian atas korelasi antara tingkat gagal bayar historis yang diobservasi, prakiraan atas kondisi ekonomi dan KKE merupakan estimasi yang signifikan. Jumlah KKE paling dipengaruhi oleh perubahan keadaan dan prakiraan kondisi ekonomi. Pengalaman kerugian kredit historis Grup dan prakiraan kondisi ekonomi juga mungkin tidak menggambarkan gagal bayar aktual pelanggan di masa yang akan datang.

ii. Pajak penghasilan

Pertimbangan dan asumsi diperlukan dalam menentukan besaran fasilitas pengurang pajak dan investasi (*capital allowance*) dan pengurangan beban tertentu untuk tujuan fiskal selama proses estimasi atas perhitungan beban pajak penghasilan masing-masing perusahaan dalam Grup. Secara khusus, perhitungan beban pajak penghasilan Grup melibatkan penafsiran terhadap peraturan perpajakan dan peraturan lainnya. Banyaknya transaksi dan perhitungan yang dapat menyebabkan ketidakpastian di dalam penentuan kewajiban pajak selama bisnis normal.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS

The preparation of the consolidated financial statements in conformity with the Indonesian Financial Accounting Standards requires management to make estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities and the disclosure of contingent assets and liabilities at the reporting date and the reported amounts of revenue and expenses during the reporting period. Estimates, assumptions and judgements are continually evaluated and are based on historical experience and other factors, including expectations of future events that are believed to be reasonable under the circumstances.

The Group has identified the following matters under which significant judgements, estimates and assumptions are made and where actual results may differ from these estimates under different assumptions and conditions and may materially affect the consolidated financial results or financial position of the Group reported in future years.

i. Provision for ECL for trade receivables

The Group adjusts its historical credit loss experience with forward-looking information. For instance, if the forecast economic conditions are expected to deteriorate over the next period/year, which could lead to an increased number of defaults, the historical default rates are adjusted. At every reporting date, the historically observed default rates are updated, and any changes in the forward-looking estimates are analysed.

The assessment of the correlation between historical observed default rates and forecast economic conditions and ECL is a significant estimate. The amount of ECL is sensitive to changes in circumstances and of forecast economic conditions. The Group's historical credit loss experience and forecast of economic conditions may also not be representative of customer's actual default in the future.

ii. Income taxes

Judgements and assumptions are required to determine the capital allowances and deductibility of certain expenses during the estimation of the provision for income tax expense for each company within the Group. In particular, the calculation of the Group's income tax expenses involves the interpretation of applicable tax laws and regulations. There are many transactions and calculations for which the ultimate tax determination is uncertain during the ordinary course of business.

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

ii. Pajak penghasilan (lanjutan)

Pertimbangan dan estimasi yang dibuat manajemen seperti yang diungkapkan di atas dapat dipertanyakan oleh Direktorat Jenderal Pajak ("DJP"). Sebagai akibatnya, terjadi ketidakpastian dalam penentuan kewajiban pajak. Resolusi posisi pajak yang diambil oleh Grup, dapat berlangsung bertahun-tahun dan sangat sulit untuk memprediksi hasil akhirnya. Apabila terdapat perbedaan perhitungan pajak dengan jumlah yang telah dicatat, perbedaan tersebut akan berdampak pada pajak penghasilan dan pajak tangguhan dalam periode dimana penentuan pajak tersebut dibuat.

Aset pajak tangguhan, termasuk yang timbul dari rugi fiskal, besaran *capital allowance* dan perbedaan temporer lainnya, diakui hanya apabila dianggap lebih mungkin daripada tidak bahwa mereka dapat diterima kembali, dimana hal ini tergantung pada kecukupan pembentukan laba kena pajak di masa depan. Sama seperti "penurunan nilai aset nonkeuangan", asumsi atas laba kena pajak masa depan yang dapat dihasilkan sangat dipengaruhi oleh estimasi dan asumsi manajemen atas tingkat produksi yang diharapkan, volume dan harga penjualan dan lain-lain, yang mana terpapar risiko dan ketidakpastian, sehingga terdapat kemungkinan perubahan keadaan akan mengubah proyeksi laba kena pajak di masa mendatang.

iii. Liabilitas imbalan pascakerja

Nilai kini liabilitas imbalan pascakerja tergantung pada beberapa faktor yang ditentukan dengan dasar aktuarial berdasarkan beberapa asumsi. Asumsi yang digunakan untuk menentukan biaya/(penghasilan) pensiun bersih mencakup tingkat diskonto dan kenaikan gaji di masa datang. Adanya perubahan pada asumsi ini akan mempengaruhi jumlah tercatat liabilitas imbalan pascakerja.

Grup menentukan tingkat diskonto dan kenaikan gaji masa datang yang sesuai pada akhir periode pelaporan. Tingkat diskonto adalah tingkat suku bunga yang harus digunakan untuk menentukan nilai kini atas estimasi arus kas keluar masa depan yang diharapkan untuk menyelesaikan liabilitas imbalan pascakerja. Dalam menentukan tingkat suku bunga yang sesuai, Grup mempertimbangkan tingkat suku bunga obligasi pemerintah yang didenominasikan dalam mata uang imbalan akan dibayar dan memiliki jangka waktu yang serupa dengan jangka waktu liabilitas imbalan pascakerja yang terkait.

Asumsi kunci liabilitas imbalan pascakerja lainnya sebagian ditentukan berdasarkan kondisi pasar saat ini. Informasi tambahan diungkapkan pada Catatan 16b.

***3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS** (continued)*

***ii. Income taxes** (continued)*

The judgements and estimates taken by management as discussed above may be challenged by the Directorate General of Taxes ("DGT"). As a result, the ultimate tax determination becomes uncertain. The resolution of tax positions taken by the Group, can take several years to complete and in some cases, it is difficult to predict the ultimate outcome. Where the final outcome of these matters is different from the amounts initially recorded, such differences will have an impact on the income tax and deferred income tax provision in the period in which this determination is made.

Deferred tax assets, including those arising from tax losses carried forward, capital allowances and other temporary differences, are recognised only where it is considered probable that they will be recovered, which is dependent on the generation of sufficient future taxable profits. Similar to "impairment of non-financial assets", assumptions about the generation of future taxable profits is heavily affected by management's estimates and assumptions regarding expected production levels, sales volumes and prices, etc; which are subject to risk and uncertainty, and hence there is a possibility that changes in circumstances will alter the projected future taxable profits.

iii. Post-employment benefits liabilities

The present value of the post-employment benefits liabilities depends on a number of factors that are determined on an actuarial basis using a number of assumptions. The assumptions used in determining the net cost/(income) for pensions include the discount rate and future salary increase. Any changes in these assumptions will have an impact on the carrying amount of post-employment benefits liabilities.

The Group determines the appropriate discount rate and future salary increase at the end of each reporting period. The discount rate is the interest rate that should be used to determine the present value of estimated future cash outflows expected to be required to settle the post-employment benefits liabilities. In determining the appropriate discount rate, the Group considers the interest rates of government bonds that are denominated in the currency in which the benefits will be paid and that have terms to maturity approximating the terms of the related post-employment benefits liabilities.

Other key assumptions for post-employment benefits liabilities are based on current market conditions. Additional information is disclosed in Note 16b.

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

iv. Penyusutan dan estimasi umur manfaat aset tetap dan properti investasi

Grup mengestimasi masa manfaat aset tetap dan properti investasi berdasarkan ekspektasi utilisasi aset yang sesuai dengan rencana dan strategi usaha setelah mempertimbangkan perkembangan teknologi di masa depan dan perilaku pasar. Di samping itu, estimasi dari masa manfaat aset tetap dan properti investasi juga mempertimbangkan penelaahan Grup secara kolektif terhadap praktek industri, evaluasi teknis internal dan pengalaman untuk aset yang sejenis. Estimasi masa manfaat ditelaah paling sedikit setiap akhir tahun pelaporan dan diperbaharui jika ekspektasi berbeda dari estimasi sebelumnya dikarenakan pemakaian dan kerusakan fisik, keusangan secara teknis atau komersial dan keterbatasan hukum atau pembatasan lainnya atas penggunaan dari aset. Namun, ada kemungkinan, hasil operasi di masa depan dapat dipengaruhi secara material oleh perubahan-perubahan dalam estimasi yang diakibatkan oleh perubahan faktor-faktor yang disebutkan di atas.

Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaatnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis properti investasi dan aset tetap 4 sampai dengan 20 tahun. Perubahan tingkat pemakaian dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis properti investasi dan aset tetap.

Nilai tercatat atas properti investasi dan aset tetap pada tanggal-tanggal pelaporan masing-masing diungkapkan dalam Catatan 9 dan 10.

v. Nilai wajar aset tetap yang menggunakan model revaluasi

Tanah dinyatakan berdasarkan nilai wajar. Penentuan nilai wajar dilakukan oleh penilai publik independen.

Dalam proses penilaian, Manajemen, dengan bantuan penilai publik independen, menentukan data dan asumsi, menelaah metode penilaian serta berdiskusi dengan penilai. Pendekatan dan metode yang digunakan dalam melakukan revaluasi tergantung pada kelas aset. Walaupun data dan asumsi Grup dianggap tepat dan wajar, namun perubahan signifikan pada data input atau asumsi yang digunakan dapat berpengaruh secara signifikan terhadap nilai aset yang menggunakan model revaluasi.

***3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS** (continued)*

iv. Depreciation and estimated useful lives of fixed assets and investment properties

The Group estimates the useful lives of its fixed assets and investment properties in accordance with its expected asset utilisation as anchored in business plans and strategies that also consider expected future technological developments and market behaviours. In addition, the Group's collective assessment of industry practices, internal technical evaluations and experience with similar assets are also considered when estimating the useful lives of fixed assets and investment properties. The estimated useful lives are reviewed at least each financial year end and are updated if expectations differ from previous estimates due to physical wear and tear, technical or commercial obsolescence and legal or other limitations on the use of the assets. It is possible, however, that the future results of operations could be materially affected by any changes in the estimates that have been brought about by changes in the factors mentioned above.

The costs of fixed assets are depreciated on a straight-line basis over their estimated useful lives. Management estimates the useful lives of these investment properties and fixed assets to be between 4 to 20 years. Changes in the expected levels of usage could have an impact on the economic useful lives of these investment properties and fixed assets.

The net carrying amounts of the Group's investment properties and fixed assets at reporting dates are disclosed in Notes 9 and 10.

v. Fair value of fixed assets that use revaluation model

Land is stated at fair value. The determination of the fair value was performed by an independent public appraiser.

Management, with the assistance of an independent public appraiser, determines the data inputs and assumptions, assesses the valuation methods and holds discussions with the appraisers as part of the valuation process. The approaches and methods that are used in the revaluation depend upon the group of assets. While it is believed that the Group's data and assumptions are reasonable and appropriate, significant changes in data inputs, or significant changes in assumptions, may materially affect the value of the assets that use the revaluation model.

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

vi. Penurunan nilai aset nonkeuangan

Grup melakukan tes penurunan nilai setiap tahun untuk *goodwill*. Aset nonkeuangan lainnya ditelaah untuk penurunan nilai apabila terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa jumlah tercatat aset melebihi nilai terpulihkan. Nilai terpulihkan adalah nilai yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakai aset, yang dihitung berdasarkan asumsi dan estimasi manajemen. Perubahan asumsi penting, termasuk ekspektasi produksi dan volume penjualan, biaya operasi, serta belanja modal di masa depan, dapat mempengaruhi perhitungan nilai terpulihkan secara material.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS *(continued)*

vi. Impairment of non-financial assets

The Group tests whether its goodwill has suffered any impairment on an annual basis. Other non-financial assets are reviewed for impairment whenever events or changes in circumstances indicate that the carrying amounts of the assets exceed their recoverable amounts. Recoverable amount is the higher of its fair value less cost to sell and its value-in-use of the assets, calculated on the basis of management's assumptions and estimates. Change in the key assumptions, including the expected production and sales volumes, operating costs and future capital expenditures, could materially affect the calculation of the recoverable amounts.

4. KAS DAN SETARA KAS, DEPOSITO BERJANGKA DAN KAS YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA

a. Kas dan setara kas

4. CASH AND CASH EQUIVALENTS, TIME DEPOSITS AND RESTRICTED CASH

a. Cash and cash equivalents

	2025	2024	
Kas	**427**	**309**	***Cash on hand***
Kas di bank			***Cash in banks***
Entitas berelasi dengan Pemerintah (Catatan 24b)			*Government-related entities (Note 24b)*
Rupiah	64,627	63,310	*Rupiah*
Dolar AS	2,939	2,526	*US Dollars*
Pihak ketiga			*Third parties*
PT BPD Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	2,957	2,392	*PT BPD Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara*
PT Bank Central Asia Tbk	2,182	553	*PT Bank Central Asia Tbk*
PT Bank Muamalat Indonesia	61	76	*PT Bank Muamalat Indonesia*
	72,766	68,857	
Deposito berjangka			***Time deposits***
Entitas berelasi dengan Pemerintah (Catatan 24b)			*Government-related entities (Note 24b)*
Rupiah	182,600	275,600	*Rupiah*
Pihak ketiga			*Third parties*
PT Bank Central Asia Tbk	2,000	2,000	*PT Bank Central Asia Tbk*
	184,600	277,600	
Jumlah	**257,793**	**346,766**	***Total***

4. KAS DAN SETARA KAS, DEPOSITO BERJANGKA DAN KAS YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA (lanjutan)

a. Kas dan setara kas (lanjutan)

Kisaran tingkat suku bunga kontraktual dan jangka waktu deposito berjangka per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

	2025	2024	
Rupiah	2.05% - 5.50%	2.15% - 6.50%	*Rupiah*
Jangka waktu	1 - 3 bulan/*month*	1 - 3 bulan/*month*	*Time period*

b. Deposito berjangka, lancar

	2025	2024	
Entitas berelasi dengan Pemerintah (Catatan 24b)			*Government-related entities (Note 24b)*
Rupiah	183,800	45,000	*Rupiah*
Jumlah	**183,800**	**45,000**	***Total***

Deposito berjangka, lancar merupakan deposito berjangka dengan jatuh tempo satu tahun atau kurang namun lebih dari tiga bulan dari tanggal penempatan. Kisaran tingkat suku bunga kontraktual dan jangka waktu deposito berjangka ini pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

	2025	2024	
Rupiah	5.10%-6.50%	6.25%	*Rupiah*
Jangka waktu	6 bulan/*months*	12 bulan/*months*	*Time period*

c. Kas yang dibatasi penggunaannya

	2025	2024	
Entitas berelasi dengan Pemerintah (Catatan 24b)			*Government-related entities (Note 24b)*
Rupiah	21,693	28,982	*Rupiah*
Jumlah	**21,693**	**28,982**	***Total***

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, saldo kas yang dibatasi penggunaannya sebagian besar merupakan bank garansi kepada kontraktor dan jaminan pinjaman bank ke KAD (Catatan 24b).

***4. CASH AND CASH EQUIVALENTS, TIME DEPOSITS AND RESTRICTED CASH** (continued)*

***a. Cash and cash equivalents** (continued)*

The range of the contractual interest rates and the time periods on time deposits as at 31 December 2025 and 2024 were as follows:

b. Time deposits, current

Short-term time deposits represent time deposits with maturities of one year or less but more than three months from the placement date. The range of the contractual interest rates and periods on these time deposits as at 31 December 2025 and 2024 were as follows:

c. Restricted cash

As at 31 December 2025 and 2024, the restricted cash mostly represented bank guarantees to contractors and guarantees for bank loans to KAD (Note 24b).

5. PIUTANG USAHA / *5. TRADE RECEIVABLES*

	2025	2024	
Pihak berelasi (Catatan 24b)	59,444	57,376	*Related parties (Note 24b)*
Provisi penurunan nilai	(566)	(627)	*Provision for impairment*
	58,878	56,749	
Pihak ketiga	25,303	10,652	*Third parties*
Provisi penurunan nilai	(2,068)	(2,622)	*Provision for impairment*
	23,235	8,030	
Jumlah	**82,113**	**64,779**	***Total***

Rincian umur piutang usaha adalah sebagai berikut: / *The aging of these trade receivables is as follows:*

	2025	2024	
Belum jatuh tempo	59,695	54,697	*Not yet due*
Telah jatuh tempo:			*Past due:*
< 3 Bulan	15,886	9,021	*< 3 Months*
3 - 6 Bulan	2,510	286	*3 - 6 Months*
6 - 12 Bulan	4,041	344	*6 - 12 Months*
> 12 Bulan	2,615	3,680	*> 12 Months*
Jumlah	**84,747**	**68,028**	***Total***

Mutasi provisi atas penurunan nilai adalah sebagai berikut: / *Movements in provision for impairment were as follows:*

	2025	2024	
Saldo awal	3,249	12,857	*Beginning balance*
Penghapusan	(767)	(7,024)	*Reversal*
Pemulihan	(326)	(2,623)	*Recovery*
Penambahan	478	39	*Additions*
Saldo akhir	**2,634**	**3,249**	***Ending balance***

Manajemen berkeyakinan bahwa cadangan atas penurunan nilai atas piutang usaha adalah cukup untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul dari tidak tertagihnya piutang tersebut.

Management believes that the provision for impairment of trade receivables is adequate to cover possible losses on uncollectible accounts.

6. PEKERJAAN KONTRAK KONSTRUKSI DALAM PENYELESAIAN – TAGIHAN DARI PELANGGAN / *CONSTRUCTION CONTRACT WORK IN PROGRESS – AMOUNT DUE FROM CUSTOMERS*

Pekerjaan dalam penyelesaian kontrak konstruksi - dari pelanggan adalah bagian dari kontrak aset yang diakui sehubungan dengan pendapatan dari kontrak dengan pelanggan.

Construction contract work in progress - due from customers is recognised as part of contract assets related to revenue from contracts with customers.

Rincian pekerjaan dalam penyelesaian kontrak konstruksi - dari pelanggan adalah sebagai berikut:

Details of construction contract work in progress - due from customers are as follows:

	2025	2024	
Pihak berelasi (Catatan 24b)	16,911	21,200	*Related parties (Note 24b)*
Pihak ketiga	99	692	*Third parties*
Jumlah	**17,010**	**21,892**	***Total***

Berdasarkan hasil penelaahan atas masing-masing dan kolektif pelanggan pada akhir tahun, manajemen Grup berkeyakinan bahwa potensi kerugian atas jumlah tagihan bruto pelanggan tidak tertagih sangat minimum sehingga tidak terdapat provisi atas penurunan nilai jumlah tagihan bruto pelanggan yang dibukukan untuk saldo per 31 Desember 2025 dan 2024.

Based on the assessment of the individual and collective customers at the end of the year, the Group's management believes that there were minimal potential losses from uncollectible gross amount due from customers, hence there was no provision booked for the impairment of gross amount due from customers as at 31 December 2025 and 2024

7. PERSEDIAAN / *INVENTORIES*

	2025	2024	
Lahan yang sudah dikembangkan	92,162	66,607	*Developed land*
Bangunan siap dijual	13,933	16,638	*Buildings ready for sale*
Persediaan lain-lain	8,308	6,444	*Other inventories*
Jumlah	**114,403**	**89,689**	***Total***

Lahan yang sudah dikembangkan oleh Perusahaan berlokasi di Bontang, Makassar, Purwakarta, dan Samarinda. Luas lahan yang sudah dikembangkan di Bontang, Makassar, Purwakarta dan Samarinda masing-masing seluas 226.442 m^2, 43.260 m^2, 2.052 m^2, dan 5.272 m^2 pada tanggal 31 Desember 2025 (tidak diaudit).

The land developed by the Company is located in Bontang, Makassar, Purwakarta and Samarinda. As at 31 December 2025, the developed land areas in Bontang, Makassar, Purwakarta and Samarinda measure 226,442 m^2, 43,260 m^2, 2,052 m^2, and 5,272 m^2, respectively (unaudited).

Lahan Purwakarta merupakan lahan yang dimiliki oleh Perusahaan di tahun 2025 sehubungan dengan penyelesaian perjanjian kerja sama dengan PT Panenarta Niaga Persada (”PNP”) (Catatan 25).

Land in Purwakarta is land owned by the Company in 2025 as a result of the settlement of agreement with PT Panenarta Niaga Persada (“PNP”) (Note 25).

Lahan Samarinda merupakan lahan yang direklasifikasi dari properti investasi pada tahun 2025 sehubungan dengan perubahan intensi manajemen atas penggunaan lahan tersebut.

Land in Samarinda was reclassified from investment properties in 2025 due to a change in management’s intention regarding the use of the land.

Persediaan lain-lain merupakan persediaan bahan baku pembuatan *ready-mix concrete* dan bahan konstruksi milik Perusahaan.

Other inventories represent the stock of ready-mix concrete’s raw material and construction material owned by the Company.

8. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI / *8. INVESTMENT IN ASSOCIATES*

Nama Perusahaan/ *Name of Company*	%	Nilai tercatat awal tahun/ *Carrying value at the beginning of the year*	Perubahan selama tahun berjalan/ *Changes during the year* – Penambahan/ *Additions*	Bagian laba bersih/ *Share of net income*	Bagian rugi komprehensif lain/ *Share in other comprehensive loss*	Dividen/ *Dividends*	Nilai tercatat akhir tahun/ *Carrying value at the end of the year*
2025							
PT Kaltim Daya Mandiri	44.00	237,827	88,000**	36,306	(403)	(117,191)	244,539
PT Kaltim Medika Utama	26.29	14,034	-	2,255	(128)	-	16,161
PT Bintang Sintuk Hotel*	20.00	-	-	-	-	-	-
Jumlah/*Total*		**251,861**	**88,000**	**38,561**	**(531)**	**(117,191)**	**260,700**
2024							
PT Kaltim Daya Mandiri	44.00	212,728	-	41,702	84	(16,687)	237,827
PT Kaltim Medika Utama	26.29	15,096	-	919	(1,639)	(342)	14,034
PT Bintang Sintuk Hotel*	20.00	-	-	-	-	-	-
Jumlah/*Total*		**227,824**	**-**	**42,621**	**(1,555)**	**(17,029)**	**251,861**

*) Telah mengalami penurunan nilai

*) *Has been impaired*

**) Penambahan tersebut berasal dari pembagian dividen saham dari KDM, yang hanya menambah jumlah saham yang dimiliki dan tidak memengaruhi persentase kepemilikan.

**) *The additions resulted from the stock dividend distribution by KDM, which increased the number of shares owned but did not affect the percentage of ownership.*

Ringkasan informasi keuangan entitas asosiasi Grup, dimana semuanya berdomisili di Indonesia dan tidak diperdagangkan di bursa, adalah sebagai berikut:

The summary of the financial information of the Group's associates, all of which are domiciled in Indonesia and are unlisted, is as follows:

	Aset lancar/ *Current assets*	Aset tidak lancar/ *Non-current assets*	Liabilitas lancar/ *Current liabilities*	Liabilitas tidak lancar/ *Non-current liabilities*	Pendapatan/ *Revenue*	Laba/ *profit*	Penghasilan komprehensif lain/*Other comprehensive income*
2025							
PT Kaltim Daya Mandiri	259,825	403,198	98,142	14,735	651,836	82,515	916
PT Kaltim Medika Utama	122,232	111,197	93,433	31,975	341,251	8,579	488
PT Bintang Sintuk Hotel	6,797	7,648	2,293	2,899	12,759	1,156	-
Jumlah/*Total*	**388,854**	**522,043**	**193,868**	**49,609**	**1,005,846**	**92,250**	**1,404**

8. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI (lanjutan)

Ringkasan informasi keuangan entitas asosiasi Grup, dimana semuanya berdomisili di Indonesia dan tidak diperdagangkan di bursa, adalah sebagai berikut: (lanjutan)

***8. INVESTMENT IN ASSOCIATES** (continued)*

The summary of the financial information of the Group's associates, all of which are domiciled in Indonesia and are unlisted, is as follows: (continued)

	2024						
	Aset lancar/ *Current assets*	**Aset tidak lancar/ *Non-current assets***	**Liabilitas lancar/ *Current liabilities***	**Liabilitas tidak lancar/ *Non-current liabilities***	**Pendapatan/ *Revenue***	**Laba/ *profit***	**Penghasilan komprehensif lain/*Other comprehensive income***
PT Kaltim Daya Mandiri	300,555	369,161	105,031	29,794	655,886	94,777	191
PT Kaltim Medika Utama	118,466	115,266	95,937	37,865	319,701	3,497	-
PT Bintang Sintuk Hotel	9,020	7,838	3,153	2,899	16,610	3,169	-
Jumlah/*Total*	**428,041**	**492,265**	**204,121**	**70,558**	**992,197**	**101,443**	**191**

Rekonsiliasi atas ringkasan informasi keuangan yang disajikan terhadap nilai buku dari kepentingan entitas asosiasi adalah sebagai berikut:

The reconciliation of the summarised financial information presented to the carrying amounts of the interests in associates is as follows:

	2025			
	PT Kaltim Daya Mandiri	**PT Bintang Sintuk Hotel**	**PT Kaltim Medika Utama**	
Ringkasan informasi keuangan				*Summarised financial information*
Pada awal tahun	534,891	10,806	99,930	*At beginning of the year*
Penambahan dari dividen saham	200,000	-	-	*Addition from share dividend*
Laba tahun berjalan	82,515	1,156	8,579	*Profit for the year*
Laba komprehensif lain	(916)	-	(488)	*Other comprehensive loss*
Penyesuaian saldo laba ditahan	-	(1,209)	-	*Retained earnings adjustment*
Penyesuaian rugi komprehensif lain	-	-	-	*Other comprehensive income adjustment*
Dividen saham	(200,000)	-	-	*Share dividend*
Dividen tunai	(66,344)	(1,500)	-	*Cash dividends*
Pada akhir tahun	550,146	9,253	108,021	*At end of the year*
Bagian atas aset bersih entitas asosiasi	242,064	1,851	28,398	*Share of net assets of associates*
Penyesuaian lainnya	2,475	(1,851)	(12,237)	*Other adjustments*
Nilai buku	**244,539**	**-**	**16,161**	***Carrying value***

	2024			
	PT Kaltim Daya Mandiri	**PT Bintang Sintuk Hotel**	**PT Kaltim Medika Utama**	
Ringkasan informasi keuangan				*Summarised financial information*
Pada awal tahun	477,848	9,137	103,967	*At beginning of the year*
Laba tahun berjalan	94,777	3,169	3,497	*Profit for the year*
Laba komprehensif lain	191	-	(6,234)	*Other comprehensive loss*
Dividen tunai	(37,925)	(1,500)	(1,300)	*Cash dividends*
Pada akhir tahun	534,891	10,806	99,930	*At end of the year*
Bagian atas aset bersih entitas asosiasi	235,352	2,161	26,271	*Share of net assets of associates*
Penyesuaian lainnya	2,475	(2,161)	(12,237)	*Other adjustments*
Nilai buku	**237,827**	**-**	**14,034**	***Carrying value***

9. PROPERTI INVESTASI / *9. INVESTMENT PROPERTIES*

	2025					
	Saldo awal/ *Beginning balance*	Penambahan/ *Addition*	Pengurangan/ *Deduction*	Reklasifikasi/ *Reclassification*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Biaya perolehan						***Acquisition costs***
Tanah	133,462	-	-	(13,222)	120,240	*Land*
Bangunan	137,422	3,475	-	4,869	145,766	*Building*
Aset hak-guna						***Right-of-use assets***
Bangunan	1,512	-	(1,512)	-	-	*Building*
Aset dalam penyelesaian						***Construction in progress***
Bangunan	13,278	15,422	-	(4,869)	23,831	*Building*
	285,674	18,897	(1,512)	(13,222)	289,837	
Akumulasi penyusutan						***Accumulated depreciation***
Bangunan	73,617	6,795	-	-	80,412	*Building*
Aset hak-guna						***Right-of-use assets***
Bangunan	1,443	69	(1,512)	-	-	*Building*
	75,060	6,864	(1,512)	-	80,412	
Nilai buku bersih	**210,614**				**209,425**	***Net book value***

	2024					
	Saldo awal/ *Beginning balance*	Penambahan/ *Addition*	Pengurangan/ *Deduction*	Reklasifikasi/ *Reclassification*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Biaya perolehan						***Acquisition costs***
Tanah	133,651	-	(189)	-	133,462	*Land*
Bangunan	136,409	208	(3,064)	3,869	137,422	*Building*
Aset hak-guna						***Right-of-use assets***
Bangunan	3,627	-	(2,115)	-	1,512	*Building*
Aset dalam penyelesaian						***Construction in progress***
Bangunan	12,820	4,327	-	(3,869)	13,278	*Building*
	286,507	4,535	(5,368)	-	285,674	
Akumulasi penyusutan						***Accumulated depreciation***
Bangunan	70,558	6,123	(3,064)	-	73,617	*Building*
Aset hak-guna						***Right-of-use assets***
Bangunan	1,676	1,882	(2,115)	-	1,443	*Building*
	72,234	8,005	(5,179)	-	75,060	
Nilai buku bersih	**214,273**				**210,614**	***Net book value***

Hasil penjualan dari properti investasi dicatat sebagai pendapatan lain - lain pada tahun berjalan. Perhitungan keuntungan pelepasan properti investasi untuk tahun tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Proceeds from sales recorded as other income for the current year. The gain on disposal of investment properties for the years ended 31 December 2025 and 2024 is computed as follows:

	2025	2024	
Hasil penjualan	-	2,252	*Proceeds from sales*
Nilai buku bersih	-	(189)	*Net book value*
Keuntungan pelepasan properti investasi	**-**	**2,063**	***Gain on disposal of investment properties***

Beban penyusutan properti investasi masing-masing sebesar Rp6.864 dan Rp8.005 pada tahun 2025 dan 2024 dicatat sebagai beban pokok pendapatan (Catatan 21).

Depreciation expense of investment properties amounting to Rp6,864 and Rp8,005 in 2025 and 2024, respectively, were recorded as cost of revenues (Note 21).

Berdasarkan evaluasi mengenai nilai properti investasi, manajemen berpendapat tidak terdapat perubahan keadaan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai properti investasi pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

Based on the evaluation of the investment property values, management believes that there are no changes in circumstances that indicate an impairment of investment properties as at 31 December 2025 and 2024.

9. PROPERTI INVESTASI (lanjutan)

Properti investasi Grup telah diasuransikan terhadap risiko kebakaran, kebanjiran, kerusakan, dan risiko lainnya dengan nilai pertanggungan pada tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp127.649. Manajemen meyakini bahwa nilai pertanggungan asuransi atas properti investasi telah mencukupi.

Grup melakukan penilaian properti investasi dengan keteraturan yang cukup untuk memastikan ada atau tidaknya penurunan nilai yang material. Nilai wajar properti investasi pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp590.737. Perhitungan nilai wajar properti investasi didasarkan pada penilaian yang dilakukan oleh KJPP Daz & Rekan, penilai independen, sebagaimana tercantum dalam laporannya tanggal 30 Desember 2025 dan 29 Januari 2026.

***9. INVESTMENT PROPERTIES** (continued)*

The Group's investment properties were covered by insurance against risk of loss, fire and other risks with total coverage of Rp127,649 in 2025 and 2024, respectively. Management considers that the investment properties are adequately insured in order to cover the risk of loss and damage.

The Group conducted appraisal of investment properties with sufficient regularity to ensure whether or not there is a material impairment. Fair value of investment properties as at 31 December 2025 amounts to Rp590,737. The fair value calculation of investment properties was based on appraisal valuation prepared by KJPP Daz & Rekan, an independent appraisal, as stated in its reports dated 30 December 2025 and 29 January 2026.

10. ASET TETAP / ***10. FIXED ASSETS***

	31 Desember/*December* 2025						
	Saldo awal/ *Beginning balance*	**Penambahan/ *Additions***	**Pelepasan/ *Disposals***	**Reklasifikasi/ *Reclassification***	**Revaluasi/ *Revaluation***	**Saldo akhir/ *Ending balance***	
Biaya perolehan							***Acquisition costs***
Kepemilikan langsung							*Direct ownership*
Tanah	197,696		-	-	(2,129)	195,567	*Land*
Bangunan dan prasarana	72,582	3,925	-	2,495	-	79,002	*Buildings and infrastructures*
Mesin dan peralatan	2,212		-	-	-	2,212	*Machinery and equipment*
Kendaraan dan alat-alat berat	134,624	10,252	(17,894)	-	-	126,982	*Vehicles and heavy equipment*
Perlengkapan kantor dan rumah	41,398	5,508	(18,635)	473	-	28,744	*Office and household equipment*
Aset dalam penyelesaian	3,058	2,133	-	(2,968)	-	2,223	*Construction in progress*
	451,570	21,818	(36,529)	-	(2,129)	434,730	
Aset hak guna							*Right-of-use assets*
Tanah	1,103	1,684	(1,357)	-	-	1,430	*Land*
Kendaraan dan alat-alat berat	657	479	(303)	-	-	833	*Vehicles and heavy equipment*
	453,330	23,981	(38,189)	-	(2,129)	436,993	
Akumulasi penyusutan							***Accumulated depreciation***
Kepemilikan langsung							*Direct ownership*
Bangunan dan prasarana	51,386	3,621	-	-	-	55,007	*Buildings and infrastructures*
Mesin dan peralatan	2,177	35	-	-	-	2,212	*Machinery and equipment*
Kendaraan dan alat-alat berat	106,299	8,182	(17,894)	-	-	96,587	*Vehicles and heavy equipment*
Perlengkapan kantor dan rumah	35,423	2,395	(18,635)	-	-	19,183	*Office and household equipment*
	195,285	14,233	(36,529)	-	-	172,989	
Aset hak guna							*Right-of-use assets*
Tanah	696	1,239	(1,357)	-	-	578	*Land*
Kendaraan dan alat-alat berat	527	247	(303)	-	-	471	*Vehicles and heavy equipment*
	196,508	15,719	(38,189)	-	-	174,038	
Nilai tercatat neto	**256,822**					**262,955**	***Net carrying amount***

10. ASET TETAP (lanjutan) / ***10. FIXED ASSETS** (continued)*

	31 Desember/*December* 2024						
	Saldo awal/ *Beginning balance*	**Penambahan/ *Additions***	**Pelepasan/ *Disposals***	**Reklasifikasi/ *Reclassification***	**Revaluasi/ *Revaluation***	**Saldo akhir/ *Ending balance***	
Biaya perolehan							***Acquisition costs***
Kepemilikan langsung							*Direct ownership*
Tanah	197,696	-	-	-	-	197,696	*Land*
Bangunan dan prasarana	71,561	767	-	254	-	72,582	*Buildings and infrastructures*
Mesin dan peralatan	2,212	-	-	-	-	2,212	*Machinery and equipment*
Kendaraan dan alat-alat berat	123,066	11,503	-	55	-	134,624	*Vehicles and heavy equipment*
Perlengkapan kantor dan rumah	38,799	3,771	(1,348)	176	-	41,398	*Office and household equipment*
Aset dalam penyelesaian	614	3,058	(129)	(485)	-	3,058	*Construction in progress*
	433,948	19,099	(1,477)	-	-	451,570	
Aset hak guna							*Right-of-use assets*
Tanah	578	525	-	-	-	1,103	*Land*
Kendaraan dan alat-alat berat	1,532	-	(875)	-	-	657	*Vehicles and heavy equipment*
	2,110	525	(875)	-	-	1,760	
	436,058	19,624	(2,352)	-	-	453,330	
Akumulasi penyusutan							***Accumulated depreciation***
Kepemilikan langsung							*Direct ownership*
Bangunan dan prasarana	48,147	3,239	-	-	-	51,386	*Buildings and infrastructures*
Mesin dan peralatan	2,066	111	-	-	-	2,177	*Machinery and equipment*
Kendaraan dan alat-alat berat	99,283	7,016	-		-	106,299	*Vehicles and heavy equipment*
Perlengkapan kantor dan rumah	35,254	1,517	(1,348)	-	-	35,423	*Office and household equipment*
	184,750	11,883	(1,348)	-	-	195,285	
Aset hak guna							*Right-of-use assets*
Tanah	289	407	-	-	-	696	*Land*
Kendaraan dan alat-alat berat	1,181	221	(875)	-	-	527	*Vehicles and heavy equipment*
	1,470	628	(875)	-	-	1,223	
	186,220	12,511	(2,223)	-	-	196,508	
Nilai tercatat neto	**249,838**					**256,822**	***Net carrying amount***

Pembebanan penyusutan atas aset tetap adalah sebagai berikut:

Depreciation for fixed assets was allocated as follows:

	2025	**2024**	
Beban pokok pendapatan (Catatan 21)	13,145	11,012	*Cost of revenues (Note 21)*
Beban umum dan administrasi (Catatan 22)	2,574	1,499	*General and administrative expenses (Note 22)*
Jumlah	**15,719**	**12,511**	***Total***

Aset tetap tertentu Grup telah diasuransikan terhadap risiko kebakaran, kebanjiran, kerusakan, dan risiko lainnya dengan nilai pertanggungan Rp34.708 pada 31 Desember 2025 (31 Desember 2024: Rp27.194). Manajemen meyakini bahwa nilai pertanggungan asuransi atas aset tetap telah mencukupi.

The Group's certain fixed assets were covered by insurance against risk of loss, fire and other risks with total coverage of Rp34,708 in 31 December 2025 (31 December 2024: Rp27,194). Management considers that the fixed assets are adequately insured in order to cover the risk of loss and damage.

Pinjaman kepada PT Kaltim Adhiguna Dermaga (KAD) dijaminkan dengan tanah senilai Rp4.154 pada 2025 dan 2024 (Catatan 24b).

Borrowings for PT Kaltim Adhiguna Dermaga (KAD) are secured on land for the value of Rp4,154 in 2025 and 2024 (Note 24b).

Grup menggunakan model revaluasi untuk kelas tanah. Pelaksanaan revaluasi aset tersebut dilakukan oleh penilai independen. Revaluasi dilakukan berdasarkan basis penilaian yang dinyatakan di laporan KJPP DAZ No. 00186/2.0128-03/PI/03/0478/1/XII/2025 dan 010/SK-DAZ/PDM-KIE/I/2026.

The Group uses the revaluation model for land. The assets revaluation was performed by an independent public valuer. The revaluation was carried out on the basis stated in KJPP DAZ report No. 00186/2.0128-03/PI/03/0478/1/XII/2025 and 010/SK-DAZ/PDM-KIE/I/2026.

10. ASET TETAP (lanjutan)

Adapun Standar Penilaian yang digunakan Adalah Standar Penilaian Indonesia Edisi VII - 2018, dengan menggunakan pendekatan pasar di tahun 2025. Pendekatan ini mempertimbangkan penjualan dari aset sejenis atau pengganti dan data pasar yang terkait, serta menghasilkan estimasi nilai melalui proses perbandingan. Pada dasarnya, property yang dinilai (obyek penilaian) dibandingkan dengan properti yang sebanding, baik dari transaksi yang telah terjadi maupun property yang masih dalam tahap penawaran penjualan dari suatu proses jual beli, yang disesuaikan untuk perbedaan pada sifat, lokasi dan kondisi dari tanah yang dinilai.

Informasi mengenai penilaian kembali aset tetap pada tanggal 31 Desember 2025 untuk kelompok asset yang direvaluasi Adalah sebagai berikut:

***10. FIXED ASSETS** (continued)*

The Assessment Standards that were used were the Indonesian Appraisal Standards VII Edition - 2018, using the market approach in 2025. This approach considers the sales of similar assets or replacement assets and related market information, which provides value estimation by means of a comparison process. Generally, the properties being valued (the valuation objects) are properties that are compared to other similar properties that have either completed the transaction process or been offered for sale, adjusted for differences in the nature, location or condition of the specific land.

Information on the revaluation of assets as at 31 December 2025 for class of revalued assets are as follows:

	Nilai tercatat/ *Carrying value*	**Defisit revaluasi/ *Revaluation deficit***	**Nilai wajar/ *Fair value***	
Tanah	197,696	(2,129)	195,567	*Land*

11. UTANG USAHA / ***11. TRADE PAYABLES***

	2025	**2024**	
Pihak ketiga	7,393	14,131	*Third parties*
Pihak berelasi (Catatan 24b)	316	268	*Related parties (Note 24b)*
Jumlah	**7,709**	**14,399**	***Total***

12. BEBAN AKRUAL / ***12. ACCRUED EXPENSES***

	2025	**2024**	
Pembelian material dan jasa	51,918	39,167	*Purchase of materials and services*
Beban akrual proyek	16,788	10,607	*Accrued project expenses*
Jumlah	**68,706**	**49,774**	***Total***

13. PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA / ***13. UNEARNED REVENUES***

	2025	**2024**	
Pihak berelasi (Catatan 24b)			*Related parties (Note 24b)*
Uang muka sewa	3,532	4,617	*Rental advances*
Uang muka pelanggan	2,750	1,687	*Customer advances*
Lahan dan proyek	1,049	76	*Land and projects*
	7,331	6,380	
Pihak ketiga			*Third parties*
Uang muka pelanggan	9,003	7,929	*Customer advances*
Uang muka sewa	3,037	2,265	*Rental advances*
Lainnya	747	651	*Others*
	12,787	10,845	
Jumlah	**20,118**	**17,225**	***Total***

14. LIABILITAS PEMBANGUNAN SARANA KAWASAN / *14. DEVELOPMENT AREA FACILITIES LIABILITIES*

Akun ini merupakan provisi atas estimasi biaya yang masih harus dikeluarkan untuk pembangunan jaringan jalan, saluran drainase, dan instalasi penerangan jalan pada Kawasan Industri Bontang masing-masing sebesar Rp1.909 pada 31 Desember 2025 dan 2024.

This account represents provision of estimated cost accrued for development of roads, drainage and installation of road lamp in Bontang Industrial Estate amounting Rp1,909 as at 31 December 2025 and 2024, respectively.

	2025	2024	
Saldo awal	1,909	3,748	*Beginning balance*
Realisasi	-	(1,839)	*Realisation*
	1,909	**1,909**	
Dikurangi:			***Less:***
Bagian jangka pendek	**(679)**	**(679)**	***Current portion***
Bagian jangka panjang	**1,230**	**1,230**	***Non-current portion***

15. PINJAMAN / *15. LOANS*

a. Pinjaman jangka pendek / *a. Short-term loans*

	2025	2024	
Kredit modal kerja			***Working capital loan***
Rupiah			***Rupiah***
Entitas berelasi dengan Pemerintah (Catatan 24b)			*Government-related entities (Note 24b)*
Bank BSI	2,410	2,613	*Bank BSI*
Bank BNI	284	2,179	*Bank BNI*
Bank Mandiri	-	2,500	*Bank Mandiri*
Jumlah	**2,694**	**7,292**	***Total***

Informasi signifikan terkait fasilitas kredit modal kerja adalah sebagai berikut:

Significant information related to working capital loans is as follows:

Kreditur/ *Creditor*	Entitas/ *Entity*	Jenis fasilitas/ *Facility type*	Jumlah fasilitas/ *Facility amount*	Periode jatuh tempo/ *Maturity period*	Suku bunga per tahun/ *Annual interest rate*	Jaminan/ *Collateral*
BSI	KAD	Kredit modal kerja (KMK)/ *Working capital loan*	Rp9,500	25 Maret 2026/ *March 2026**	4.00%	Deposito berjangka/ *Time deposits*
BNI	KAD	Kredit modal kerja (KMK)/ Working capital loan	Rp4,000	25 May 2026/ *May* 2026*	11.50%	Tanah dan deposito berjangka/ *Land and time deposits*

Sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian pinjaman bank, Grup diharuskan untuk menjaga beberapa rasio keuangan tertentu, di mana telah ditaati oleh Grup pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

In accordance with the bank loan agreement, the Group is required to maintain certain financial ratios, with which the Group was in compliance as at 31 December 2025 and 2024.

15. PINJAMAN / *15. LOANS*

b. Pinjaman jangka panjang / *b. Long-term loans*

	2025	2024	
Kredit investasi			***Credit investment loans***
Rupiah			***Rupiah***
Entitas berelasi dengan Pemerintah (Catatan 24b)			*Government-related entities (Note 24b)*
Mandiri Tunas Finance	5,354	-	*Mandiri Tunas Finance*
Bank Mandiri	-	849	*Bank Mandiri*
Jumlah	**5,354**	**849**	***Total***
Dikurangi:			***Less:***
Bagian jangka pendek	**1,954**	**849**	***Current portion***
Bagian jangka panjang	**3,400**	**-**	***Non-current portion***

Informasi signifikan terkait fasilitas kredit modal kerja adalah sebagai berikut:

Significant information related to working capital loans is as follows:

Kreditur/ *Creditor*	Entitas/ *Entity*	Jenis fasilitas/ *Facility type*	Jumlah fasilitas/ *Facility amount*	Periode jatuh tempo/ *Maturity period*	Suku bunga per tahun/ *Annual interest rate*	Jaminan/ *Collateral*
Mandiri Tunas Finance	KAD	Kredit Investasi (KI)/ *Investment credit*	Rp6,156	25 Maret/ *March* 2028	4.40%	Alat berat/*Heavy equipment*

Sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian pinjaman bank, Grup diharuskan untuk menjaga beberapa rasio keuangan tertentu, di mana telah ditaati oleh Grup pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

In accordance with the bank loan agreement, the Group is required to maintain certain financial ratios, with which the Group was in compliance as at 31 December 2025 and 2024.

16. LIABILITAS IMBALAN KERJA DAN PASCA KERJA / *16. EMPLOYMENT AND POST-EMPLOYMENT BENEFITS LIABILITIES*

a. Liabilitas imbalan kerja jangka pendek / *a. Short-term employee benefits liabilities*

	2025	2024	
Jasa operasi	19,540	20,363	*Bonus*
Insentif kinerja	938	2,384	*Performance incentives*
Lain-lain	3,091	1,814	*Others*
Jumlah	**23,569**	**24,561**	***Total***

b. Liabilitas imbalan pasca kerja / *b. Post-employment benefits liabilities*

	2025	2024	
Liabilitas di posisi keuangan untuk:			*Liabilities on financial position for:*
Imbalan pascakerja ("IPK")	11,897	10,521	*Post-employment benefits ("PEB")*
Imbalan jangka panjang lainnya ("IJPL")	4,693	1,726	*Other long-term benefits ("OLTEB")*
	16,590	12,247	
Dikurangi:			***Less:***
Bagian jangka pendek	**685**	**1,274**	***Current portion***
Bagian jangka panjang	**15,905**	**10,973**	***Non-current portion***
Dibebankan pada laba rugi:			*Charged to profit or loss:*
IPK	(4,588)	1,488	*PEB*
IJPL	3,580	880	*OLTEB*
Jumlah	**(1,008)**	**2,368**	***Total***
Dibebankan pada penghasilan komprehensif lain:			*Charged to other comprehensive income:*
IPK	(12,578)	821	*PEB*

Imbalan pascakerja dan imbalan jangka panjang lainnya pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 dihitung oleh aktuaris independen, Kantor Konsultan Aktuaria Steven & Mourits, masing-masing tanggal 26 Februari 2026 dan 14 Januari 2025.

The post-employment benefits and other long-term benefits as at 31 December 2025 and 2024 were calculated by an independent actuary, Kantor Konsultan Aktuaria Steven & Mourits, dated 26 February 2026 and 14 January 2025, respectively.

16. LIABILITAS IMBALAN KERJA DAN PASCA KERJA (lanjutan)

b. Liabilitas imbalan pasca kerja (lanjutan)

Estimasi liabilitas imbalan pascakerja dan imbalan jangka panjang lainnya untuk masing-masing program yang diselenggarakan Grup pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 sebagai berikut:

16. EMPLOYMENT AND POST-EMPLOYMENT BENEFITS LIABILITIES *(continued)*

b. Post-employment benefits liabilities *(continued)*

The estimated post-employment benefits liabilities and other long-term benefits for each of the programs operated by the Group as at 31 December 2025 and 2024 were as follows:

	31 Desember 2025/*December 2025*			
	IPK/*PEB*	**IJPL/*OLTEB***		
	Nilai kini kewajiban/ *Present value of obligations*	**Nilai kini kewajiban/ *Present value of obligations***	**Jumlah/ *Total***	
Nilai kini liabilitas	(38,217)	(4,693)	(42,910)	*Present value of liability*
Nilai wajar aset program	37,813	-	37,813	*Fair value of plan assets*
Aset yang tidak diakui	(11,493)	-	(11,493)	*Unrecognised assets*
Liabilitas imbalan pasca kerja	**(11,897)**	**(4,693)**	**(16,590)**	***Post employment benefit liabilities***

	31 Desember 2024/*December 2024*			
	IPK/*PEB*	**IJPL/*OLTEB***		
	Nilai kini kewajiban/ *Present value of obligations*	**Nilai kini kewajiban/ *Present value of obligations***	**Jumlah/ *Total***	
Nilai kini liabilitas	(15,587)	(1,726)	(17,313)	*Present value of liability*
Nilai wajar aset program	5,066	-	5,066	*Fair value of plan assets*
Liabilitas imbalan pasca kerja	**(10,521)**	**(1,726)**	**(12,247)**	***Post employment benefit liabilities***

Mutasi nilai wajar aset program selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

The movement in the fair value of plan assets of the year is as follows:

	2025	**2024**	
Pada awal tahun	5,066	4,787	*At beginning of the year*
Imbalan yang dibayarkan	(2,409)	(771)	*Benefits payments*
Iuran yang dibayarkan	5,640	964	*Contribution paid*
Pengakuan aset program	26,813	-	*Recognition of plan assets*
Pendapatan bunga	2,284	315	*Interest income*
Imbal hasil	419	(229)	*Return on plan assets*
	37,813	5,066	
Aset yang tidak diakui	(11,493)	-	*Unrecognised assets*
Jumlah	**26,320**	**5,066**	*Total*

16. LIABILITAS IMBALAN KERJA DAN PASCA KERJA (lanjutan)

b. Liabilitas imbalan pasca kerja (lanjutan)

Rincian estimasi liabilitas imbalan pascakerja dan imbalan jangka panjang lainnya untuk masing-masing program yang diselenggarakan Grup pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 sebagai berikut:

16. EMPLOYMENT AND POST-EMPLOYMENT BENEFITS LIABILITIES *(continued)*

b. Post-employment benefits liabilities *(continued)*

The details of estimated post-employment benefits liabilities and other long-term benefits for each of the programs operated by the Group as at 31 December 2025 and 2024 were as follows:

	31 Desember 2025/*December* 2025			
	IPK/*PEB*	**IJPL/*OLTEB***		
	Nilai kini kewajiban/ *Present value of obligations*	**Nilai kini kewajiban/ *Present value of obligations***	**Jumlah/ *Total***	
Pada 1 Januari 2025	**10,521**	**1,726**	**12,247**	***As at 1 January 2025***
Biaya jasa kini	(4,338)	3,298	(1,040)	*Current service cost*
Biaya bunga bersih	(250)	184	(66)	*Net interest cost*
Biaya jasa lalu				*Past services cost*
Keuntungan aktuaria bersih		98	98	*Net actuarial gain*
Jumlah yang diakui dalam laba rugi	(4,588)	3,580	(1,008)	*Total recognised in profit or loss*
Pengukuran kembali:				*Remeasurements:*
Kerugian aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi keuangan	962	-	962	*Actuarial loss from change from in financial assumptions*
Kerugian aktuaria dari penyesuaian pengalaman	543	-	543	*Actuarial loss from experience adjustment*
Hasil pengembalian riil	(420)	-	(420)	*Return on plan assets*
Aset yang tidak diakui	11,493	-	11,493	*Unrecognised asset*
Jumlah yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain	12,578	-	12,578	*Total recognised in other comprehensive income*
Pembayaran dari program:				*Payments from plans:*
Pembayaran iuran	(5,488)	-	(5,488)	*Contribution payments*
Imbalan yang dibayar	(1,126)	(613)	(1,739)	*Benefit payments*
Jumlah pembayaran dari program	(6,614)	(613)	(7,227)	*Total payment from plans*
Liabilitas imbalan pascakerja pada 31 Desember 2025	**11,897**	**4,693**	**16,590**	***Post-employment benefits liabilities as at 31 December 2025***

	31 Desember 2024/*December* 2024			
	IPK/*PEB*	**IJPL/*OLTEB***		
	Nilai kini kewajiban/ *Present value of obligations*	**Nilai kini kewajiban/ *Present value of obligations***	**Jumlah/ *Total***	
Pada 1 Januari 2024	**9,906**	**1,759**	**11,665**	***As at 1 January 2024***
Biaya jasa kini	880	750	1,630	*Current service cost*
Biaya bunga bersih	608	83	691	*Net interest cost*
Biaya jasa lalu	-	77	77	*Past services cost*
Keuntungan aktuaria bersih	-	(30)	(30)	*Net actuarial gain*
Jumlah yang diakui dalam laba rugi	1,488	880	2,368	*Total recognised in profit or loss*
Pengukuran kembali:				*Remeasurements:*
Kerugian aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi keuangan	(257)	-	(257)	*Actuarial loss from change from in financial assumptions*
Kerugian aktuaria dari penyesuaian pengalaman	1,078	-	1,078	*Actuarial loss from experience adjustment*
Jumlah yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain	821	-	821	*Total recognised in other comprehensive income*
Pembayaran dari program:				*Payments from plans:*
Pembayaran iuran	(723)	-	(723)	*Contribution payments*
Imbalan yang dibayar	(971)	(913)	(1,884)	*Benefit payments*
Jumlah pembayaran dari program	(1,694)	(913)	(2,607)	*Total payment from plans*
Liabilitas imbalan pascakerja pada 31 Desember 2024	**10,521**	**1,726**	**12,247**	***Post-employment benefits liabilities as at 31 December 2024***

16. LIABILITAS IMBALAN KERJA DAN PASCA KERJA (lanjutan)

b. Liabilitas imbalan pasca kerja (lanjutan)

Asumsi utama yang digunakan oleh aktuaris untuk menentukan liabilitas imbalan pascakerja dan imbalan jangka panjang lainnya adalah sebagai berikut:

16. EMPLOYMENT AND POST-EMPLOYMENT BENEFITS LIABILITIES *(continued)*

b. Post-employment benefits liabilities *(continued)*

The principal assumptions used by the actuaries in determining post-employment benefits liabilities and other long-term benefits are as follows:

	2025	2024	
Tingkat diskonto per tahun:			*Discount rate per annum:*
- Imbalan pascakerja	4.81% - 7.12%	6.46% - 7.11%	*Post-employment benefits liabilities -*
- Imbalan jangka panjang lainnya	4.81% - 7.12%	6.46% - 7.11%	*Other long-term benefits -*
Tingkat kenaikan gaji	3.00% - 6.00%	3.00% - 7.00%	*Salary growth rate*
Tingkat mortalitas	100% TMI-IV-2019	100% TMI-IV-2019	*Mortality rate*
Usia pensiun normal (dalam tahun)	56	56	*Normal pension age (in years)*

Analisis sensitivitas

Analisis sensitivitas didasarkan pada perubahan atas satu asumsi aktuarial dimana asumsi lainnya dianggap konstan. Dalam prakteknya, hal ini jarang terjadi dan perubahan beberapa asumsi mungkin saling berkorelasi. Dalam perhitungan sensitivitas kewajiban imbalan pasti atas asumsi aktuarial utama, metode yang sama (perhitungan nilai kini kewajiban imbalan pasti dengan menggunakan metode *projected unit credit* di akhir periode pelaporan) telah diterapkan seperti dalam penghitungan kewajiban pensiun yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

Sensitivity analysis

The sensitivity analysis is based on a change in an assumption while holding all other assumptions constant. In practice, this is unlikely to occur, and changes in some of the assumptions may be correlated. When calculating the sensitivity of the defined benefit obligation to significant actuarial assumptions the same method (present value of the defined benefit obligation calculated with the projected unit credit method at the end of the reporting period) has been applied as when calculating the pension liability recognised within the consolidated statement of financial position.

	Dampak atas kewajiban imbalan pasti/ *Impact on defined benefit obligations*			
	Perubahan asumsi/ *Change in assumptions*	**Kenaikan asumsi/ *Increase in assumptions***	**Penurunan asumsi/ *Decrease in assumptions***	
Tingkat diskonto	1%	Penurunan sebesar/ *Decrease by* 6.23%	Kenaikan sebesar/ *Increase by* 7.02%	*Discount rate*
Tingkat kenaikan gaji	1%	Kenaikan sebesar/ *Increase by* 7.43%	Penurunan sebesar/ *Decrease by* 6.64%	*Salary growth rate*

Manajemen berkeyakinan bahwa perkiraan liabilitas dan imbalan kerja karyawan yang diberikan dari keseluruhan program pensiun Grup, yang didasarkan pada estimasi perhitungan aktuaris, telah melebihi kewajiban minimal yang ditentukan oleh UU Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 dan undang-undang yang berlaku.

Management believes that the estimated liabilities of employee benefits from all of the Group's pension programs, based on the estimated calculation provided by the actuaries, exceeds the minimum liability that is stated by the Job Creation Law No. 11 Year 2020 and the prevailing regulations.

Analisis jatuh tempo

Analisis jatuh tempo yang diharapkan dari liabilitas imbalan pascakerja dan imbalan jangka panjang lainnya yang tidak terdiskonto adalah sebagai berikut:

Maturity analysis

The expected maturity analysis of post-employment benefits liabilities and other long-term employment benefits is as follows:

	Kurang dari 1 tahun/ *Less than a year*	**1 sampai 5 tahun/ *Between 1-5 years***	**Lebih dari 5 tahun/ *Over 5 years***	**Jumlah/ *Total***	
IPK	100	19,884	53,963	73,947	*PEB*
IJPL	757	4,241	11,845	16,843	*OLTEB*
Jumlah	**857**	**24,125**	**65,808**	**90,790**	***Total***

17. MODAL SAHAM / *17. SHARE CAPITAL*

Komposisi pemegang saham Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

The composition of the Company's shareholders as at 31 December 2025 and 2024 was as follows:

	2025 dan/*and* 2024			
	Jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh/ *Number of share issued and fully paid*	**Persentase kepemilikan/ *Percentage of ownership %***	**Jumlah/ *Total***	
PT Pupuk Kalimantan Timur	58,306	99.99	58,306	*PT Pupuk Kalimantan Timur*
Yayasan Kesejahteraan Hari Tua Pupuk Kaltim	1	0.01	1	*Yayasan Kesejahteraan Hari Tua Pupuk Kaltim*
Jumlah	**58,307**	**100**	**58,307**	***Total***

18. SALDO LABA DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAINNYA / *18. RETAINED EARNINGS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME*

a. Saldo laba / *a. Retained earnings*

Mengacu kepada Undang-Undang Perseroan Terbatas, Perusahaan diwajibkan untuk menyisihkan cadangan dari keuntungan wajib paling sedikit sebesar 20% dari jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh.

Under Indonesian Limited Company Law, the Company is required to set up a statutory reserve from profits amounting to at least 20% of issued and fully paid share capital.

Sebagaimana telah diputuskan dalam Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham tanggal 30 Juni 2025, mengenai pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 (yang dilakukan di tahun 2025) dan 2023 (yang dilakukan di tahun 2024), laba bersih Perusahaan dialokasikan untuk tujuan sebagai berikut:

As resolved during the respective Shareholders' Annual General Meetings dated 30 June 2025, concerning the legalisation of the Consolidated Financial Statements for the year ended 31 December 2024 (conducted in 2025) and 2023 (conducted in 2024), the Company has allocated its net income for the following purposes:

	2025	**2024**	
Cadangan umum	**89,867**	**71,336**	***General reserves***

Cadangan yang telah ditentukan penggunaannya (*appropriated*) meliputi cadangan terkait pemenuhan kewajiban sesuai Undang-Undang Perseroan Terbatas dan cadangan umum lainnya.

Reserves which purposes have been determined (appropriated) include reserves related to fulfilling obligations in accordance with the Limited Liability Company Law and other general reserves.

b. Dividen kas / *b. Cash dividends*

Berdasarkan Keputusan Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham pada tanggal 30 Juni 2025, Perusahaan membagikan dividen tunai kepada pemegang saham untuk tahun buku 2024 sebesar Rp35.000 dan telah dibayarkan oleh Perusahaan pada tanggal 30 Juli 2025.

Based on the resolution of the Shareholders' Annual General Meetings dated 30 June 2025, the Company distributed cash dividends to the shareholders amounting to Rp35,000 for the financial year 2024, which were fully paid by the Company on 30 July 2025.

18. SALDO LABA DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAINNYA (lanjutan) / *RETAINED EARNINGS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME (continued)*

c. Penghasilan komprehensif lainnya / *Other comprehensive income*

	Imbalan pascakerja, bersih/ *Post-employment benefits, net*	Cadangan revaluasi aset/ *Asset revaluation reserve*	Lainnya/ *Others*	Jumlah/ *Total*	
Saldo pada 1 Januari 2025	(8,673)	189,624	(1,207)	179,744	*Balance as at 1 January 2025*
Mutasi	(6,856)	(2,129)	(531)	(9,516)	*Movement*
Saldo pada 31 Desember 2025	**(15,529)**	**187,495**	**(1,738)**	**170,228**	***Balance as at 31 December 2025***
Saldo pada 1 Januari 2024	(8,231)	189,624	348	181,741	*Balance as at 1 January 2024*
Mutasi	(442)	-	(1,555)	(1,997)	*Movement*
Saldo pada 31 Desember 2024	**(8,673)**	**189,624**	**(1,207)**	**179,744**	***Balance as at 31 December 2024***

19. KEPENTINGAN NONPENGENDALI / *NON-CONTROLLING INTEREST*

	Saldo awal/ *Beginning balance*	Bagian dari penghasilan komprehensif/ *Share of comprehensive income*	Dividen/ *Dividend*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
31 Desember 2025					***31 December 2025***
PT Kaltim Jasa Sekuriti	10,914	3,654	(2,786)	11,782	*PT Kaltim Jasa Sekuriti*
PT Kaltim Adhiguna Dermaga	23,369	9,014	(5,402)	26,981	*PT Kaltim Adhiguna Dermaga*
Jumlah	**34,283**	**12,668**	**(8,188)**	**38,763**	***Total***
31 Desember 2024					***31 December 2024***
PT Kaltim Jasa Sekuriti	8,095	3,608	(789)	10,914	*PT Kaltim Jasa Sekuriti*
PT Kaltim Adhiguna Dermaga	17,108	7,718	(1,457)	23,369	*PT Kaltim Adhiguna Dermaga*
Jumlah	**25,203**	**11,326**	**(2,246)**	**34,283**	***Total***

20. PENDAPATAN / *REVENUES*

	2025	2024	
Pergudangan pelayanan bongkar muat	100,829	83,643	*Loading and unloading service*
Lahan dan proyek	74,547	87,810	*Land and projects*
Tenaga alih daya	79,686	97,305	*Outsourcing*
Pergudangan	82,153	64,076	*Warehousing*
Sewa	65,891	59,574	*Rental*
Ready-mix concrete	63,488	53,771	*Ready-mix concrete*
Jasa perawatan kawasan	14,413	13,979	*Regional service fees*
Perdagangan	10,177	6,936	*Tradings*
Instalasi pengelolaan air (“IPA”)	8,030	9,037	*Water treatment plant ("WTP")*
Instalasi pengelolaan limbah (“IPAL”)	6,265	7,326	*Waste water treatment plant ("IPAL")*
Lain-lain	14,568	20,826	*Others*
Jumlah	**520,047**	**504,283**	***Total***

Lihat Catatan 24b untuk penjelasan transaksi pada pihak berelasi.

Refer to Note 24b for explanation of transactions with related parties.

21. BEBAN POKOK PENDAPATAN / *21. COST OF REVENUES*

	2025	2024	
Jasa	165,843	149,065	*Services*
Gaji dan tunjangan	57,156	72,076	*Salaries and benefits*
Lahan dan proyek	40,738	61,845	*Land and projects*
Bahan baku	60,905	52,860	*Raw material*
Penyusutan (Catatan 9 dan 10)	20,009	19,017	*Depreciation (Notes 9 and 10)*
Perbaikan dan pemeliharaan	19,880	12,839	*Repair and maintenance*
Pajak dan retribusi	15,550	12,348	*Tax and retribution*
Asuransi	893	956	*Insurance*
Lain-lain	6,032	4,900	*Others*
Jumlah	**387,006**	**385,906**	***Total***

22. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI / *22. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES*

	2025	2024	
Gaji dan tunjangan	28,472	31,610	*Salaries and benefits*
Jasa profesional	14,878	13,758	*Professional fees*
Perjalanan dinas	4,618	4,599	*Business trip*
Pajak dan retribusi	3,623	1,534	*Tax and retribution*
Jamuan tamu	2,493	1,495	*Entertainment*
Penyusutan (Catatan 10)	2,574	1,499	*Depreciation (Note 10)*
Peralatan	1,579	294	*Utilities*
Sewa	657	1,291	*Rent*
Perizinan	361	339	*License*
Lain-lain	3,274	3,618	*Others*
Jumlah	**62,529**	**60,037**	***Total***

23. PERPAJAKAN / *23. TAXATION*

a. Pajak dibayar di muka / *a. Prepaid taxes*

	2025	2024	
Pajak lain-lain			***Other taxes***
Perusahaan			*The Company*
Pasal 21	278	-	*Article 21*
Pajak pertambahan nilai ("PPN")	1,770	4,272	*Value added tax ("VAT")*
Entitas anak			*Subsidiaries*
PPN	1,694	636	*VAT*
Pajak dibayar di muka lainnya	624	416	*Other prepaid taxes*
	4,366	5,324	
Jumlah	**4,366**	**5,324**	***Total***
Bagian lancar:			***Current portion:***
- Pajak lain-lain	**4,366**	**5,324**	***Other taxes -***

23. PERPAJAKAN (lanjutan) / ***23. TAXATION*** *(continued)*

b. Utang pajak / ***b. Taxes payable***

	2025	2024	
PPh Badan			***CIT***
Perusahaan			*The Company*
Pasal 25	115	91	*Article 25*
Pasal 29	59	48	*Article 29*
Entitas anak			*Subsidiaries*
Pasal 29	1,078	2,387	*Article 29*
Pasal 25	510	79	*Article 25*
	1,762	2,605	
Pajak lain-lain			***Other taxes***
Perusahaan			*The Company*
Pasal 21	-	157	*Article 21*
Pajak penghasilan final	167	43	*Final income tax*
Pasal 23	148	139	*Article 23*
Entitas anak			*Subsidiaries*
PPN	1,326	1,424	*VAT*
Pasal 21	494	555	*Article 21*
Pajak penghasilan final	289	-	*Final income tax*
Pasal 23	257	130	*Article 23*
	2,681	2,448	
Jumlah	**4,443**	**5,053**	***Total***

c. Beban pajak penghasilan / ***c. Income tax expenses***

	2025	2024	
Perusahaan			*The Company*
Kini	2,703	2,976	*Current*
Penyesuaian tahun lalu	-	1,479	*Prior year adjustment*
Tangguhan	-	-	*Deferred*
Entitas anak			*Subsidiaries*
Kini	9,944	8,722	*Current*
Tangguhan	1,414	(418)	*Deferred*
Jumlah	**14,061**	**12,759**	***Total***

Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan dengan hasil perkalian laba akuntansi sebelum pajak penghasilan Grup dan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

The reconciliation between income tax expense and the theoretical tax amount on the Group's profit before income tax is as follows:

	2025	2024	
Laba konsolidasian sebelum beban pajak penghasilan	126,094	114,193	*Consolidated income before income tax*
Pajak penghasilan dihitung dengan tarif pajak berlaku	27,741	25,123	*Tax calculated at applicable tax rate*
Pendapatan yang dikenakan pajak final	(33,133)	(32,334)	*Income subject to final tax*
Bagian laba bersih entitas asosiasi	(8,484)	(9,377)	*Share in net profit of associate*
Beban yang tidak dapat dikurangkan	27,065	28,465	*Non-deductible expense*
Pajak tangguhan yang tidak diakui	872	(597)	*Unrecognised deferred tax*
Penyesuaian tahun sebelumnya	-	1,479	*Prior year adjustment*
Jumlah	**14,061**	**12,759**	***Total***

Perhitungan pajak penghasilan kini dilakukan berdasarkan estimasi penghasilan kena pajak. Nilai tersebut mungkin disesuaikan ketika Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan disampaikan ke DJP.

Current income tax is calculated based on the estimated taxable income. The amounts may be adjusted when Annual Tax Returns are submitted to the DGT.

23. PERPAJAKAN (lanjutan) / ***23. TAXATION*** *(continued)*

d. Aset pajak tangguhan / ***d. Deferred tax assets***

	31 Desember/*December* 2025				
	1 Januari/ *January* 2025	(Dibebankan)/ dikreditkan ke laba rugi/ *(Charged)/ credited to profit or loss*	Dibebankan ke penghasilan komprehensif lain/ *Charged to other comprehensive income*	31 Desember/ *December* 2025	
Perusahaan					***The Company***
Provisi penurunan nilai piutang	687	(157)	-	530	*Provision for impairment of receivables*
Imbalan pascakerja	1,933	219	67	2,219	*Post-employment benefits*
Jasa operasi	1,562	271	-	1,833	*Bonus*
Aset tetap	(3,153)	370	-	(2,783)	*Fixed assets*
Provisi untuk area pengembangan	420	-	-	420	*Provision for development area facilities*
Aset pajak tangguhan yang tidak diakui	(1,449)	(703)	(67)	(2,219)	*Unrecognised deferred tax assets*
	-	-	-	-	
Entitas anak					***Subsidiaries***
Provisi penurunan nilai piutang	38	18	-	56	*Provision of impairment of receivables*
Goodwill	(1,012)	-	-	(1,012)	*Goodwill*
Imbalan pascakerja	762	(2,030)	2,700	1,432	*Post-employment benefits*
Jasa operasi	3,943	(1,433)	-	2,510	*Bonus*
Aset tetap	309	1,676	-	1,985	*Fixed assets*
Lainnya	179	355	-	534	*Others*
Aset pajak tangguhan yang tidak diakui	(28)	-	-	(28)	*Unrecognised deferred tax assets*
	4,191	(1,414)	2,700	5,477	
Jumlah	**4,191**	**(1,414)**	**2,700**	**5,477**	***Total***

	31 Desember/*December* 2024				
	1 Januari/ *January* 2024	(Dibebankan)/ dikreditkan ke laba rugi/ *(Charged)/ credited to profit or loss*	Dibebankan ke penghasilan komprehensif lain/ *Charged to other comprehensive income*	31 Desember/ *December* 2024	
Perusahaan					***The Company***
Provisi penurunan nilai piutang	2,639	(1,952)	-	687	*Provision for impairment of receivables*
Imbalan pascakerja	1,642	249	42	1,933	*Post-employment benefits*
Jasa operasi	1,115	447	-	1,562	*Bonus*
Aset tetap	(3,160)	7	-	(3,153)	*Fixed assets*
Provisi untuk area pengembangan	825	(405)	-	420	*Provision for development area facilities*
Aset pajak tangguhan yang tidak diakui	(3,061)	1,654	(42)	(1,449)	*Unrecognised deferred tax assets*
	-	-	-	-	
Entitas anak					***Subsidiaries***
Provisi penurunan nilai piutang	209	(171)	-	38	*Provision of impairment of receivables*
Goodwill	(1,012)	-		(1,012)	*Goodwill*
Imbalan pascakerja	924	(300)	138	762	*Post-employment benefits*
Jasa operasi	2,216	1,727	-	3,943	*Bonus*
Aset tetap	1,123	(814)	-	309	*Fixed assets*
Lainnya	203	(24)	-	179	*Others*
Aset pajak tangguhan yang tidak diakui	(28)	-	-	(28)	*Unrecognised deferred tax assets*
	3,635	418	138	4,191	
Jumlah	**3,635**	**418**	**138**	**4,191**	***Total***

e. Administrasi pajak

Berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia, Perusahaan dan entitas anak yang berdomisili di Indonesia menghitung dan membayar sendiri besarnya jumlah pajak yang terutang. Direktorat Jenderal Pajak dapat menetapkan atau mengubah liabilitas pajak dalam batas waktu lima tahun sejak tanggal terutangnya pajak.

e. Tax administration

Under the Indonesian taxation laws, the Company and its subsidiaries, which are domiciled in Indonesia, calculate and pay tax on the basis of self-assessment. The Directorate General of Taxation may assess or amend taxes within five years of the time the tax become due.

23. PERPAJAKAN (lanjutan)

f. Pemeriksaan pajak

Pada tanggal 31 Mei 2023, Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar ("SKPLB") atas PPh badan 2021 sebesar Rp4.087, atas Rp6.054 lebih bayar atas yang diklaim oleh Perusahaan. Atas hasil SKPLB ini, Perusahaan telah menerima sebagian hasil pemeriksaan pajak dan membukukan penyesuaian tahun lalu (beban pajak penghasilan kini) sejumlah Rp475 dan mengajukan keberatan sebesar Rp1.492 kepada DJP pada tanggal 29 Agustus 2023, yang kemudian telah dibebankan pada laba rugi tahun 2024 oleh Perusahaan.

Perusahaan saat ini sedang diaudit oleh kantor pajak atas pajak penghasilan untuk tahun 2022 dan 2023. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan, belum ada hasil atas audit pajak penghasilan untuk tahun 2022 dan 2023.

***23. TAXATION** (continued)*

f. Tax audit

On 31 May 2023, the Company received an Overpayment Tax Assessment Letter ("SKPLB") for CIT 2021 amounting to Rp4,087, for the overpayment of Rp6,054 that is claimed by the Company. In relation to this SKPLB, the Company has accepted a portion of the result of the tax audit and charged fiscal correction for Rp475 as prior year adjustment (current income tax expenses) and submitted an objection letter to DGT on 29 August 2023 for the amount of Rp1,492, which has subsequently been expensed to profit or loss by the Company in 2024.

The Company is being audited by tax office for corporate income tax year 2022 and 2023. Up to finalisation of the financial statements, there is no tax audit result for fiscal year 2022 and 2023, respectively.

24. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK BERELASI

a. Sifat hubungan

Hubungan dan sifat saldo akun dan transaksi dengan pihak yang berelasi adalah sebagai berikut:

24. NATURE OF RELATIONSHIP AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES

a. Nature of relationships

The relationships and natures of the account balances and transactions with related parties are as follows:

Sifat hubungan/ ***Nature of relationships***	**Entitas berelasi/** ***Related parties***	**Jenis transaksi/** ***Nature of transactions***
Entitas berelasi dengan Pemerintah/ *Government related entities*	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Bank Mandiri")	Penempatan giro, penempatan deposito, kredit investasi, kas yang dibatasi penggunaannya dan pendapatan sewa/*Placement of current account, time deposits, investment credit facility, restricted cash and rental revenue*
	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("Bank BRI")	Penempatan giro, penempatan deposito dan pendapatan sewa/*Placement of current account, time deposits and rental revenue*
	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("Bank BNI")	Penempatan giro, penempatan deposito, kas yang dibatasi penggunaannya, kredit modal kerja dan pendapatan sewa/*Placement of current account, time deposits, restricted cash, working capital loan and rental revenue*
	PT Bank Syariah Indonesia Tbk ("Bank BSI")	Penempatan giro dan penempatan deposito, kredit modal kerja/*Placement of current account and time deposits, working capital loan*
	PT Bank Tabungan Negara Tbk ("Bank BTN")	Penempatan deposito/*Placement of time deposits*
	PT Mandiri Tunas Finance	Kredit investasi/*Investment credit facility*
Entitas induk/*Parent entities*	PT Pupuk Kalimantan Timur	Pendapatan sewa, jasa pengelolaan gudang dan pembelian bahan baku serta beban umum dan administrasi/*Rental revenue, warehouse management service income, cost of revenue, general and administrative expense*
Entitas sepengendali/ *Entities under common control*	PT Pupuk Indonesia Logistik	Pendapatan tenaga alih daya dan jasa pengelolaan gudang/ *Revenue from outsourcing and warehouse management service*
	PT Petrokimia Gresik	Pendapatan sewa/*Rental revenue*
	PT Pupuk Sriwidjaja Palembang	Pendapatan jasa pengelola Gudang dan sewa/*Warehouse management service income and rental revenue*
	PT Yasa Industri Nusantara	Pendapatan atas *ready-mix concrete*/*Revenue from ready-mix concrete*
	PT Pupuk Kujang Cikampek	Pendapatan jasa pelayanan bongkar muat/*Revenue from loading and Unloading service*

24. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK BERELASI (lanjutan)

a. Sifat hubungan (lanjutan)

Hubungan dan sifat saldo akun dan transaksi dengan pihak yang berelasi adalah sebagai berikut: (lanjutan)

***24. NATURE OF RELATIONSHIP AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES** (continued)*

***a. Nature of relationships** (continued)*

The relationships and natures of the account balances and transactions with related parties are as follows: (continued)

Sifat hubungan/ ***Nature of relationships***	**Entitas berelasi/** ***Related parties***	**Jenis transaksi/** ***Nature of transactions***
	PT Kaltim Amonium Nitrat	Pendapatan sewa/*Rental revenue*
Entitas asosiasi/*Associates*	PT Bintang Sintuk Hotel	Penyertaan saham/*Investment in shares*
	PT Kaltim Daya Mandiri	Penyertaan saham, pendapatan sewa dan beban pokok pendapatan atas penyaluran listrik/*Investment in shares of stocks, rental revenue and cost of revenue on electricity distribution*
	PT Kaltim Medika Utama	Penyertaan saham dan utang usaha atas jasa medis/ *Investment in shares and medical services*
Personil manajemen kunci/ *Key management personnel*	Dewan Komisaris dan Direksi/ *Boards of Commissioners and Directors*	Gaji dan imbalan kerja/*Salaries and employee benefits*

b. Rincian transaksi

Rincian saldo dan nilai transaksi dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

b. Transaction details

The details of balance and transaction value with related parties are as follows:

	2025	**2024**	
Kas di bank			***Cash in banks***
Rupiah			***Rupiah***
Bank Mandiri	53,539	58,837	*Bank Mandiri*
Bank BNI	4,764	931	*Bank BNI*
Bank BRI	3,262	2,542	*Bank BRI*
Bank BSI	3,062	1,000	*Bank BSI*
	64,627	63,310	
Dolar AS			***US Dollars***
Bank Mandiri	2,939	2,526	*Bank Mandiri*
	2,939	2,526	
Deposito berjangka			***Time deposits***
Rupiah			***Rupiah***
Bank BTN	170,000	70,000	*Bank BTN*
Bank Mandiri	12,300	2,300	*Bank Mandiri*
Bank BSI	-	108,800	*Bank BSI*
Bank BNI	300	13,500	*Bank BNI*
Bank BRI	-	81,000	*Bank BRI*
	182,600	275,600	
Jumlah	**250,166**	**341,436**	***Total***
Persentase terhadap jumlah aset	**17.43%**	**25.18%**	***As a percentage of total assets***
Kas yang dibatasi penggunaannya			***Restricted cash***
Rupiah			***Rupiah***
Bank Mandiri	16,872	27,072	*Bank Mandiri*
Bank BNI	1,910	1,910	*Bank BNI*
Bank BSI	2,911	-	*Bank BSI*
Jumlah	**21,693**	**28,982**	***Total***
Persentase terhadap jumlah aset	**1.51%**	**2.14%**	***As a percentage of total assets***

24. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK BERELASI (lanjutan)

24. NATURE OF RELATIONSHIP AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES *(continued)*

b. Rincian transaksi (lanjutan)

b. Transaction details *(continued)*

Rincian saldo dan nilai transaksi dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut: (lanjutan)

The details of balance and transaction value with related parties are as follows: (continued)

	2025	2024	
Deposito berjangka, lancar			***Time deposits, current***
Rupiah			***Rupiah***
Bank BSI	163,800	45,000	*Bank BSI*
Bank BTN	20,000	-	*Bank BTN*
Jumlah	**183,800**	**45,000**	***Total***
Persentase terhadap jumlah aset	**11.41%**	**3.32%**	***As a percentage of total assets***
Piutang usaha			***Trade receivables***
PT Pupuk Kalimantan Timur	49,777	54,099	*PT Pupuk Kalimantan Timur*
PT Pupuk Kujang Cikampek	1,617	380	*PT Pupuk Kujang Cikampek*
PT Petrokimia Gresik	1,254	85	*PT Petrokimia Gresik*
PT Kaltim Amonium Nitrat	1,714	471	*PT Kaltim Amonium Nitrat*
PT Yasa Industri Nusantara	532	519	*PT Yasa Industri Nusantara*
PT Kaltim Daya Mandiri	301	310	*PT Kaltim Daya Mandiri*
PT Pupuk Indonesia Logistik	279	123	*PT Pupuk Indonesia Logistik*
PT Pupuk Sriwidjaja Palembang	176	821	*PT Pupuk Sriwidjaja Palembang*
Lain-lain	3,794	568	*Others*
	59,444	57,376	
Provisi penurunan nilai	(566)	(627)	*Provision for impairment*
Jumlah	**58,878**	**56,749**	***Total***
Persentase terhadap jumlah aset	**4.14%**	**4.23%**	***As a percentage of total assets***

	2025	2024	
Pekerjaan dalam penyelesaian kontrak konstruksi - dari pelanggan			***Construction contract work in progress - due from customer***
PT Pupuk Kalimantan Timur	16,911	21,200	*PT Pupuk Kalimantan Timur*
Jumlah	**16,911**	**21,200**	***Total***
Persentase terhadap jumlah aset	**1.18%**	**1.56%**	***As a percentage of total assets***

	2025	2024	
Utang usaha			***Trade payables***
PT Pupuk Kalimantan Timur	316	264	*PT Pupuk Kalimantan Timur*
PT Kaltim Medika Utama	-	4	*PT Kaltim Medika Utama*
Jumlah	**316**	**268**	***Total***
Persentase terhadap jumlah liabilitas	**0.20%**	**0.19%**	***As a percentage of total liabilities***

24. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK BERELASI (lanjutan)

***24. NATURE OF RELATIONSHIP AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES** (continued)*

b. Rincian transaksi (lanjutan)

***b. Transaction details** (continued)*

Rincian saldo dan nilai transaksi dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut: (lanjutan)

The details of balance and transaction value with related parties are as follows: (continued)

	2025	2024	
Pendapatan diterima di muka			***Unearned revenue***
PT Pupuk Kalimantan Timur	3,034	2,871	*PT Pupuk Kalimantan Timur*
PT Kaltim Daya Mandiri	909	851	*PT Kaltim Daya Mandiri*
Bank Mandiri	695	1,691	*Bank Mandiri*
Bank BNI	351	291	*Bank BNI*
Bank BRI	118	112	*Bank BRI*
PT Kaltim Amonium Nitrat	117	-	*PT Kaltim Amonium Nitrat*
Lain-lain	2,107	564	*Others*
Jumlah	**7,331**	**6,380**	***Total***
Persentase terhadap jumlah liabilitas	**4.56%**	**4.63%**	***As a percentage of total liabilities***

	2025	2024	
Pinjaman jangka pendek			***Short-term loan***
Rupiah			***Rupiah***
Bank BSI	2,410	2,613	*Bank BSI*
Bank BNI	284	2,179	*Bank BNI*
Bank Mandiri	-	2,500	*Bank Mandiri*
Jumlah	**2,694**	**7,292**	***Total***
Persentase terhadap jumlah liabilitas	**1.68%**	**5.29%**	***As a percentage of total liabilities***

24. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK BERELASI (lanjutan)

***24. NATURE OF RELATIONSHIP AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES** (continued)*

b. Rincian transaksi (lanjutan)

***b. Transaction details** (continued)*

Rincian saldo dan nilai transaksi dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut: (lanjutan)

The details of balance and transaction value with related parties are as follows: (continued)

	2025	2024	
Pinjaman jangka panjang			***Long-term loan***
Rupiah			***Rupiah***
Mandiri Tunas Finance	5,354	-	*Mandiri Tunas Finance*
Bank Mandiri	-	849	*Bank Mandiri*
Jumlah	**5,354**	**849**	***Total***
Dikurangi:			***Less:***
Bagian jangka pendek	**1,954**	**849**	***Current portion***
Bagian jangka panjang	**3,400**	**-**	***Non-current portion***
Persentase terhadap jumlah liabilitas	**3.33%**	**0.62%**	***As a percentage of total liabilities***

	2025	2024	
Pendapatan			***Revenue***
PT Pupuk Kalimantan Timur	325,914	329,626	*PT Pupuk Kalimantan Timur*
PT Kaltim Daya Mandiri	6,120	5,267	*PT Kaltim Daya Mandiri*
PT Petrokimia Gresik	2,992	2,748	*PT Petrokimia Gresik*
PT Pupuk Indonesia Logistik	1,499	1,362	*PT Pupuk Indonesia Logistik*
Bank Mandiri	1,064	1,094	*Bank Mandiri*
PT Pupuk Kujang Cikampek	1,042	991	*PT Pupuk Kujang Cikampek*
PT Pupuk Sriwidjaja Palembang	778	2,485	*PT Pupuk Sriwidjaja Palembang*
Lain-lain	9,102	5,088	*Others*
Jumlah	**348,511**	**348,661**	***Total***
Persentase terhadap jumlah pendapatan	**67.02%**	**69.14%**	***As a percentage of total revenues***

	2025	2024	
Pembelian			***Purchases***
PT Pupuk Kalimantan Timur	8,267	8,557	*PT Pupuk Kalimantan Timur*
PT Kaltim Daya Mandiri	3,459	3,764	*PT Kaltim Daya Mandiri*
Jumlah	**11,726**	**12,321**	***Total***
Persentase terhadap jumlah beban pokok pendapatan	**3.03%**	**3.19%**	***As a percentage of total cost of revenues***

24. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK BERELASI (lanjutan)

c. Kompensasi manajemen kunci

Jumlah kompensasi yang diterima Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan dan entitas anak untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024, sebagai berikut:

	2025	2024	
Imbalan kerja jangka pendek	2,093	3,137	*Short-term employee benefits*

24. NATURE OF RELATIONSHIP AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES *(continued)*

c. Key management compensation

Total compensation received by the Board of Commissioners and Directors of the Company and its subsidiaries for the years ended 31 December 2025 and 2024, are as follows:

25. PERJANJIAN PENTING DAN PERIKATAN

a. Kerjasama pembangunan Perumahan Real Estat Bumi Purwa Raya

Sesuai dengan Perjanjian Kerjasama No. 04 tanggal 22 Oktober 2015, Perusahaan melakukan kerjasama dengan PT Panenarta Niaga Persada (”PNP”) terkait Pembangunan Perumahan Bumi Purwa Raya dengan memberikan pembiayaan sejumlah Rp22.000. Pengembalian dana investasi dihitung berdasarkan jumlah unit lahan yang terjual ditambah dengan keuntungan bagi hasil sebesar 20% yang dihitung secara proporsional. Jangka waktu kontrak yaitu selama 24 bulan.

Perjanjian ini telah mengalami beberapa kali perubahan dan perpanjangan, dimana perubahan dan perpanjangan terakhir terjadi pada tanggal 2 April 2024. Berdasarkan perjanjian tersebut, Perusahaan menyetujui amandemen perjanjian mengenai sisa pembayaran kerjasama sebesar Rp14.356, di mana sisa pembayaran tersebut dijamin dengan:

1. 1 rumah toko tipe 90/54, senilai Rp746 (pembayaran paling lambat dilakukan pada tanggal 1 April 2026)
2. 39 kavling rumah toko tipe 54, dengan nilai Rp13.650 (pembayaran paling lambat dilakukan pada tanggal 1 April 2026)
3. 40 bidang tanah dengan sertifikat Hak Guna Bangunan

Selama tahun 2025, Perusahaan tidak menerima pembayaran dari PNP. Pada tanggal 5 Agustus 2025, PNP membayar sisa dana investasi dengan menyerahkan tanah yang berlokasi di Purwakarta senilai Rp12.031 yang telah diklasifikasikan sebagai persediaan. Adapun sisa dana investasi sebesar Rp1.225 telah dibebankan.

25. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENT

a. Bumi Purwa Raya Real Estate development agreement

In accordance with the Agreement No. 04 dated 22 October 2015, the Company entered an agreement with PT Panenarta Niaga Persada (“PNP”) related to financing agreement for development of Bumi Purwa Raya Real Estate to provide financing amounting to Rp22,000. Returns on investment funds are calculated based on the number of units of land sold plus profit sharing of 20% which is calculated proportionally. The contract period is 24 months.

This agreement was amended and extended several times, where the last amendment and extension was made on 2 April 2024. Based on the agreement, the Company agreed to amend the agreement related to the remaining payment amounted to Rp14,356, which the remaining payment is guaranteed by:

1. *1 shophouse type 90/54, equivalent to Rp746 (payment should be made at the latest on 1 April 2026)*
2. *39 lot shophouses type 54, equivalent to Rp13,650 (payment should be made at the latest on 1 April 2026)*
3. *40 lots of land with HGB certificates*

In 2025, the Company did not receive payment from PNP. On 5 August 2025, PNP settled part of the remaining investment funds by transferring a land plot located in Purwakarta amounting to Rp12,031 which has been classified as inventories. The remaining balance of the investment funds amounting to Rp1,225 has been expensed.

26. ASET KEUANGAN DAN LIABILITAS KEUANGAN

Pada tanggal 31 Desember 2025, Grup mengklasifikasikan kas dan setara kas, deposito berjangka, kas yang dibatasi penggunaannya, piutang usaha, piutang lain-lain, tagihan dari pelanggan dari pekerjaan kontrak konstruksi dalam penyelesaian, aset keuangan lancar dan tidak lancar lainnya sebesar Rp564.572 (2024: Rp522.716) sebagai aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Pada tanggal 31 Desember 2025, Grup mengklasifikasikan utang usaha, utang lain-lain, beban akrual, pinjaman jangka pendek, pinjaman jangka panjang, dan liabilitas sewa sebesar Rp90.705 (2024: Rp76.732) sebagai liabilitas pada biaya perolehan diamortisasi.

26. FINANCIAL ASSETS AND FINANCIAL LIABILITIES

As at 31 December 2025, the Group classified its cash and cash equivalents, time deposits, restricted cash, trade receivables, other receivables, amount due from customers from construction contract work in progress, other current and non-current financial assets amounting to Rp564,572 (2024: Rp522,716) as financial assets measured at amortised cost.

As at 31 December 2025, the Group classified its trade payables, other payables, accrued expenses, short-term loans, long-term loans, and lease liabilities amounting to Rp90,705 (2024: Rp76,732) as liabilities at amortised costs.

27. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Berbagai aktivitas yang dilakukan membuat Perusahaan terekspos terhadap berbagai risiko keuangan: risiko pasar (termasuk risiko nilai tukar mata uang asing dan risiko tingkat suku bunga), risiko kredit dan risiko likuiditas. Tujuan dari manajemen risiko Perusahaan adalah untuk mengidentifikasi, mengukur, mengawasi dan mengelola risiko dasar dalam upaya melindungi kesinambungan bisnis dalam jangka panjang dan meminimalkan dampak yang tidak diharapkan pada kinerja keuangan Perusahaan.

Fungsi manajemen risiko keuangan dijalankan oleh Departemen Manajemen Risiko di bawah kebijakan-kebijakan yang disetujui oleh Direksi. Departemen Manajemen Risiko mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko-risiko keuangan.

a. Risiko pasar

(i) Risiko nilai tukar mata uang asing

Pendapatan, pengeluaran operasional, aset dan liabilitas keuangan Grup secara substansial didenominasi dalam mata uang Rupiah. Oleh karena itu, manajemen berkeyakinan jika Grup tidak memiliki eksposur signifikan terhadap fluktuasi nilai tukar mata uang asing.

(ii) Risiko suku bunga

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Grup tidak memiliki utang yang dikenakan bunga yang signifikan. Risiko suku bunga yang timbul dari kas di bank dan aset keuangan relevan lainnya juga tidak dianggap signifikan. Oleh karena itu, manajemen berkeyakinan bahwa Grup tidak terpengaruh risiko suku bunga secara signifikan.

27. FINANCIAL RISKS MANAGEMENT

The Company's activities are exposed to a variety of financial risks: market risk (including foreign exchange rate risk and interest rate risk), credit risk and liquidity risk. The objectives of the Company's risk management are to identify, measure, monitor and manage basic risks in order to safeguard the Company's long-term business continuity and to minimise potential adverse effects on the financial performance of the Company.

Financial risk management is carried out by a Risk Management Department under policies approved by the Board of Directors. The Risk Management Department identifies and evaluates financial risks.

a. Market risk

(i) Foreign exchange risk

The Group's revenues, operating expenditures, financial assets and liabilities are substantially denominated in Rupiah. Therefore, management believes that the Group does not have a significant exposure to fluctuations in foreign exchange rates.

(ii) Interest rate risk

As at 31 December 2025 and 2024, the Group did not have significant interest bearing debts. The interest rate risk from cash in banks and other relevant financial assets is not considered significant. Therefore, management believes that the Group is not significantly exposed to interest rate risk.

27. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

a. Risiko pasar (lanjutan)

(iii) Risiko harga

Operasi Grup tidak terekspos terhadap risiko pasar terkait dengan fluktuasi harga karena penyelesaian aset dan liabilitas keuangan berdasarkan harga yang tercantum dalam kontrak jual beli yang ditentukan dengan pelanggan.

b. Risiko kredit

Grup yakin akan kemampuannya untuk terus mengendalikan dan mempertahankan eksposur yang minimal terhadap risiko kredit mengingat kas di bank dan deposito berjangka ditempatkan di bank yang memiliki reputasi baik dan Grup memiliki kebijakan yang jelas dalam pemilihan pelanggan dan perjanjian yang mengikat secara hukum untuk transaksi penjualannya.

Eksposur maksimum atas risiko kredit untuk Grup adalah sebesar nilai tercatat dari aset keuangan yang tertera pada laporan posisi keuangan konsolidasian

Semua kas di bank, deposito berjangka, kas yang dibatasi penggunaannya dan deposito berjangka jatuh tempo di atas 3 bulan dan kurang dari 1 tahun ditempatkan di bank yang memiliki kualitas kredit yang baik. Oleh karena itu Grup berkeyakinan bahwa risiko kredit atas aset keuangan ini adalah minimal.

***27. FINANCIAL RISKS MANAGEMENT** (continued)*

***a. Market risk** (continued)*

(iii) Price risk

The Group's operations are not exposed to market risk arising from price fluctuations, as the settlement of its financial assets and liabilities is based on prices stipulated in the sales contracts agreed with customers.

b. Credit risk

The Group is confident in its ability to continue to control and maintain minimal exposure to credit risk since the Group's cash in bank and time deposits are placed in reputable banks and the Group has clear policies on the selection of customers and legally binding agreements in place for their sales transactions.

The maximum exposure to credit risk for the Group is equal to the carrying values of the financial assets as shown in the consolidated statement of financial position.

All the cash in banks, time deposits, restricted cash and time deposits with maturities more than 3 months and less than 1 year are placed in banks with good credit ratings. Consequently, the Group believes the credit risk of such financial assets is minimal.

27. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

b. Risiko kredit (lanjutan)

Kualitas kredit dari piutang usaha, piutang lain-lain dan aset keuangan lainnya yang belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai dapat diperkirakan dengan mengacu pada data historis terkait tingkat gagal bayar penerbit aset keuangan.

Pada tanggal 31 Desember 2025, sekitar 76% (2024: 90%) dari piutang usaha Grup merupakan piutang dari pihak berelasi. Selanjutnya, pada tanggal 31 Desember 2025, sekitar 24% (2024: 10%) dari piutang usaha Perusahaan merupakan piutang dari pelanggan pihak ketiga yang telah bertransaksi dengan Grup selama lebih dari lima tahun. Perusahaan terus memantau kinerja dan umur piutang serta eksposur kredit dari para pelanggannya sebagai bagian dari penilaian kerugian kredit ekspektasian berdasarkan PSAK 109 dan menyimpulkan bahwa risiko kredit tidak signifikan berdasarkan kolektibilitas historis yang disesuaikan dengan faktor-faktor perkiraan masa depan.

Grup menerapkan sebagian kerugian ekspektasian seumur hidup untuk seluruh piutang usaha dan piutang lain-lain. Untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian, piutang usaha dan piutang lain-lain telah dikelompokkan berdasarkan karakteristik risiko kredit dan waktu jatuh tempo yang serupa.

Seluruh saldo terutang dari piutang usaha dan piutang lain-lain di atas yang belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai sebagian besar berasal dari pelanggan pihak ketiga dan pihak berelasi yang sudah ada lebih dari 12 bulan yang tersebar merata atas jumlah pelanggan yang besar. Grup juga melakukan evaluasi kredit berkelanjutan atas kondisi keuangan piutang secara berkala.

***27. FINANCIAL RISKS MANAGEMENT** (continued)*

***b. Credit risk** (continued)*

The credit quality of trade receivables, other receivables and other financial assets that are neither past due nor impaired can be assessed by reference to historical information about counterparty default rates.

As at 31 December 2025, approximately 76% (2024: 90%) of the Group trade receivables represented receivables from related parties. Further, as at 31 December 2025, approximately 24% (2024: 10%) of the Group trade receivables represented receivables from third party customers that have been transacting with the Group for more than five years. The Group continuously monitors the performance and aging of receivables as well as credit exposure of its customers as part of assessing the expected credit losses under SFAS 109 and concluded that the credit risk is not significant based on historical collectability adjusted with forward-looking factors.

The Group applies the lifetime expected loss provision for all trade and other receivables. To measure the expected credit losses, trade and other receivables have been grouped based on similar credit risk characteristics and the days past due.

The entire receivable balance from trade receivables and other receivables is mostly derived from third party and related party customers which have existed for more than 12 months and is spread over a large number of customers. The Group also performs ongoing credit evaluation on the financial condition of its receivables.

27. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

c. Risiko likuiditas

Risiko likuiditas merupakan risiko yang muncul dalam situasi dimana posisi arus kas Grup mengindikasikan bahwa arus kas masuk dari pendapatan jangka pendek tidak cukup untuk memenuhi arus kas keluar untuk pengeluaran jangka pendek. Untuk mengelola risiko likuiditas, Grup memonitor dan menjaga tingkat kas dan setara kas yang diperkirakan cukup untuk mendanai kegiatan operasional Grup dan mengurangi pengaruh fluktuasi arus kas. Manajemen Grup juga secara rutin memonitor perkiraan arus kas dan arus kas aktual, termasuk profil jatuh tempo pinjaman, dan secara terus-menerus menilai kondisi pasar keuangan untuk kesempatan memperoleh dana.

Tabel di bawah ini menganalisis liabilitas keuangan Grup pada tanggal pelaporan berdasarkan kelompok jatuh temponya dari sisa tahun hingga tanggal jatuh tempo kontraktual. Jumlah yang diungkapkan dalam tabel ini adalah nilai arus kas kontraktual yang tidak terdiskonto termasuk estimasi pembayaran bunga.

***27. FINANCIAL RISKS MANAGEMENT** (continued)*

c. Liquidity risk

Liquidity risk is defined as a risk that arises in situations where the cash inflow from short-term revenue is not enough to cover the cash outflow of short-term expenditure. To manage its liquidity risk, the Group monitors its level of cash and cash equivalents, and maintains these at a level deemed adequate to finance the Group's operational activities and to mitigate the effect of fluctuations in cash flow. The Group's management also regularly monitors projected and actual cash flow, including loan maturity profiles and continuously assesses the financial markets for opportunities to raise funds.

The table below analyses the Group's financial liabilities at the reporting date into relevant maturity groupings based on the remaining year to the contractual maturity date. The amounts disclosed in the table are the contractual undiscounted cash flows including estimated interest payments.

	2025			
	< 1 tahun/ *< 1 year*	**1 - 5 tahun/ *1 - 5 years***	**Jumlah/ *Total***	
Utang usaha	7,709	-	7,709	*Trade payables*
Beban akrual	68,706	-	68,706	*Accrued expenses*
Pinjaman jangka pendek	2,823	-	2,823	*Short-term loans*
Pinjaman jangka panjang	2,040	3,550	5,590	*Long-term loans*
Utang lain-lain	7,717	-	7,717	*Other payables*
Liabilitas sewa	1,981	44	2,025	*Lease liabilities*
Jumlah	**90,976**	**3,594**	**94,570**	***Total***

	2024			
	< 1 tahun/ *< 1 year*	**1 - 5 tahun/ *1 - 5 years***	**Jumlah/ *Total***	
Utang usaha	14,399	-	14,399	*Trade payables*
Beban akrual	49,774	-	49,774	*Accrued expenses*
Pinjaman jangka pendek	8,656	-	8,656	*Short-term loans*
Pinjaman jangka panjang	-	-	-	*Long-term loans*
Utang lain-lain	2,653	-	2,653	*Other payables*
Liabilitas sewa	1,721	166	1,887	*Lease liabilities*
Jumlah	**77,203**	**166**	**77,369**	***Total***

d. Estimasi nilai wajar

Nilai tercatat dari aset dan liabilitas keuangan dengan jatuh tempo kurang dari satu tahun, termasuk kas dan setara kas, kas yang dibatasi penggunaannya, piutang usaha, aset keuangan lancar lainnya, piutang lain-lain, aset keuangan tidak lancar lainnya, utang usaha, utang lain-lain, beban akrual, pinjaman jangka pendek, pinjaman jangka panjang, dan liabilitas sewa diperkirakan mendekati nilai wajarnya karena bersifat jangka pendek. Nilai tercatat liabilitas sewa dan pinjaman jangka panjang dengan jatuh tempo lebih dari satu tahun juga mendekati nilai wajarnya karena dampak pendiskontoan tidak signifikan.

d. Fair value estimation

The carrying amount for financial assets and liabilities with maturity of less than one year, including cash and cash equivalents, restricted cash, trade receivables, other current financial assets, other receivables, other financial assets - non current, trade payables, other payables, accrued expenses, short-term loan, long-term loan, and lease liabilities. The carrying amount of lease liabilities and long-term loans with maturity of more than one year are also considered to approximate their fair values as the impact of discounting is not significant.

27. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

e. Manajemen modal

Dalam mengelola permodalannya, Grup senantiasa mempertahankan kelangsungan usaha serta memaksimalkan manfaat bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

Grup secara aktif dan rutin menelaah dan mengelola permodalannya untuk memastikan struktur modal dan pengembalian yang optimal bagi pemegang saham, dengan mempertimbangkan efisiensi penggunaan modal berdasarkan arus kas operasi dan belanja modal, serta mempertimbangkan kebutuhan modal di masa yang akan datang.

Grup juga berusaha mempertahankan keseimbangan antara tingkat pinjaman dan posisi ekuitas untuk memastikan struktur modal dan pengembalian yang optimal. Tidak ada perubahan pada pendekatan Grup dalam mengelola permodalannya selama tahun berjalan.

***27. FINANCIAL RISKS MANAGEMENT** (continued)*

e. Capital management

In managing capital, the Group safeguards its ability to continue as a going concern and to maximise benefits to the shareholders and other stakeholders.

The Group actively and regularly reviews and manages its capital to ensure the optimal capital structure and return to the shareholders, taking into consideration the efficiency of capital use based on operating cash flow and capital expenditure and also consideration of future capital needs.

The Group also seeks to maintain a balance between its level of borrowing and equity position in order to ensure the optimal capital structure and return. There were no changes in the Group's approach to capital management during the year.

28. INFORMASI ARUS KAS

a. Transaksi nonkas

	2025	2024	
Penambahan aset tetap melalui utang usaha	3,353		*Additional fixed assets through trade payables*
Penambahan properti investasi melalui utang usaha	1,443	574	*Additional investment property through trade payables*
Penambahan aset tetap melalui liabilitas sewa	3,413	2,464	*Additional fixed assets through lease liabilities*
Penambahan persediaan melalui properti investasi	10,832	-	*Additional inventories through investment property*

28. CASH FLOWS INFORMATION

a. Non-cash transactions

b. Rekonsiliasi liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan

Tabel di bawah ini menunjukkan rekonsiliasi liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, sebagai berikut:

b. Reconciliation of liabilities arising from financing activities

The table below present a reconciliation of liabilities arising from financing activities for the years ended 31 December 2025 and 2024, as follows:

	Saldo awal/ *Beginning balance*	Arus kas diperoleh dari aktivitas pendanaan/ *Cash flows generated from financing activities*	Arus kas digunakan untuk aktivitas pendanaan/ *Cash flows used in financing activities*	Perubahan nonkas/ *Non-cash changes*: Penyesuaian saldo awal berdasarkan PSAK 116/ *Adjustment beginning balance based on SFAS 116*	Perubahan nonkas/ *Non-cash changes*: Transaksi nonkas dan lainnya/ *Non-cash transactions and others*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
31 Desember 2025							***31 December 2025***
Pinjaman jangka pendek	7,292	16,040	(20,638)	-	-	2,694	*Short-term loans*
Pinjaman jangka panjang	849	6,156	(1,651)	-	-	5,354	*Long-term loans*
Liabilitas sewa	1,765	-	(2,892)	-	3,052	1,925	*Lease liabilities*
31 Desember 2024							***31 December 2024***
Pinjaman jangka pendek	2,521	22,974	(18,203)	-	-	7,292	*Short-term loans*
Pinjaman jangka panjang	3,025	-	(2,176)	-	-	849	*Long-term loans*
Liabilitas sewa	1,623	-	(383)	-	525	1,765	*Lease liabilities*

29. TANGGUNG JAWAB DAN OTORISASI PENERBITAN LAPORAN KEUANGAN

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian yang diotorisasi untuk terbit pada tanggal 6 Maret 2026.

29. RESPONSIBILITY AND AUTHORISATION FOR ISSUANCE OF THE FINANCIAL STATEMENTS

Management of the Company is responsible for the preparation and presentation of the consolidated financial statements that were authorised to be published on 6 March 2026.

30. INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN

Informasi keuangan tambahan pada Lampiran 5/58 sampai dengan Lampiran 5/62 adalah informasi keuangan Perusahaan (entitas induk saja) pada dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 yang menyajikan investasi Perusahaan pada entitas anak berdasarkan metode ekuitas dan bukan dengan metode konsolidasi.

30. SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION

The supplementary financial information on Schedule 5/58 to Schedule 5/62 represents financial information of the Company (parent entity only) for the years ended 31 December 2025 and 2024 which presents the Company's investments in subsidiaries under the equity method, as opposed to the consolidation method.

INFORMASI TAMBAHAN/*SUPPLEMENTARY INFORMATION*
PT KALTIM INDUSTRIAL ESTATE
INDUK PERUSAHAAN SAJA/*PARENT ENTITY ONLY*

Lampiran 5/58 *Schedule*

LAPORAN POSISI KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
AS AT 31 DECEMBER 2025
(Expressed in millions Rupiah, unless otherwise stated)

	31 Desember/ *December* 2025	31 Desember/ *December* 2024	
ASET			***ASSETS***
ASET LANCAR			***CURRENT ASSETS***
Kas dan setara kas	194,500	295,233	*Cash and cash equivalents*
Deposito berjangka jatuh tempo di atas 3 bulan dan kurang dari 1 tahun	183,800	45,000	*Time deposits with maturities more than 3 months and less than 1 year*
Kas yang dibatasi penggunaannya	12,911	20,000	*Restricted cash*
Piutang usaha			*Trade receivables*
- Pihak berelasi	46,027	46,879	*Related parties -*
- Pihak ketiga	13,043	3,978	*Third parties -*
Piutang lain-lain			*Other receivables*
- Pihak berelasi	10,500	-	*Related parties -*
- Pihak ketiga	1,096	23	*Third parties -*
Pekerjaan dalam penyelesaian kontrak konstruksi - dari pelanggan			*Construction contract work in progress - due from customers*
- Pihak berelasi	16,911	21,200	*Related parties -*
- Pihak ketiga	99	692	*Third parties -*
Persediaan	114,403	89,689	*Inventories*
Pajak dibayar di muka			*Prepaid taxes*
- Pajak lain-lain	2,050	4,272	*Other taxes -*
Uang muka dan beban dibayar di muka	2,541	3,042	*Advances and prepayments*
Jumlah aset lancar	**597,881**	**530,008**	***Total current assets***
ASET TIDAK LANCAR			***NON-CURRENT ASSETS***
Investasi pada entitas anak dan asosiasi	319,932	308,726	*Investment in subsidiaries and associates*
Properti investasi	209,425	210,614	*Investment properties*
Aset tetap	228,290	227,243	*Fixed assets*
Aset keuangan tidak lancar lainnya	344	14,915	*Other non-current financial assets*
Jumlah aset tidak lancar	**757,991**	**761,498**	***Total non-current assets***
JUMLAH ASET	**1,355,872**	**1,291,506**	***TOTAL ASSETS***

INFORMASI TAMBAHAN/*SUPPLEMENTARY INFORMATION*
PT KALTIM INDUSTRIAL ESTATE
INDUK PERUSAHAAN SAJA/*PARENT ENTITY ONLY*

Lampiran 5/59 *Schedule*

LAPORAN POSISI KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
AS AT 31 DECEMBER 2025
(Expressed in millions Rupiah, unless otherwise stated)

	31 Desember/ *December* 2025	31 Desember/ *December* 2024	
LIABILITAS			***LIABILITIES***
LIABILITAS JANGKA PENDEK			***CURRENT LIABILITIES***
Utang usaha			*Trade payables*
- Pihak berelasi	6,718	18,331	*Related parties -*
- Pihak ketiga	4,354	7,913	*Third parties -*
Utang lain-lain	2,918	2,374	*Other payables*
Beban akrual	63,880	41,949	*Accrued expenses*
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	8,131	7,201	*Short-term employee benefits liabilities*
Utang pajak			*Taxes payable*
- Pajak penghasilan badan	174	139	*Corporate income tax -*
- Pajak lain-lain	315	339	*Other taxes -*
Pendapatan diterima di muka			*Unearned revenues*
- Pihak berelasi	7,859	6,380	*Related parties -*
- Pihak ketiga	12,310	10,678	*Third parties -*
Liabilitas imbalan pascakerja	685	1,274	*Post-employment benefits liabilities*
Liabilitas pembangunan sarana kawasan	679	679	*Development area facilities liabilities*
Jumlah liabilitas jangka pendek	**108,023**	**97,257**	***Total current liabilities***
LIABILITAS JANGKA PANJANG			***NON-CURRENT LIABILITIES***
Liabilitas pembangunan sarana kawasan	1,230	1,230	*Development area facilities liabilities*
Liabilitas imbalan pascakerja	9,399	7,513	*Post-employment benefits liabilities*
Liabilitas jangka panjang lainnya	42	155	*Other non-current liabilities*
Jumlah liabilitas jangka panjang	**10,671**	**8,898**	***Total non-current liabilities***
JUMLAH LIABILITAS	**118,694**	**106,155**	***TOTAL LIABILITIES***
EKUITAS			***EQUITY***
Modal saham - modal dasar 112.614 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 per saham; modal ditempatkan dan disetor penuh 58.307 lembar saham	58,307	58,307	*Share capital - authorised 112,614 shares at par value of Rp1,000,000 per shares; issued and fully paid 58,307 shares*
Penghasilan komprehensif lainnya	171,431	180,947	*Other comprehensive income*
Ekuitas lainnya	(27,063)	(27,063)	*Other equity*
Saldo laba:			*Retained earnings:*
Ditentukan penggunaannya	464,756	374,888	*Appropriated*
Belum ditentukan penggunaannya	569,747	598,272	*Unappropriated*
JUMLAH EKUITAS	**1,237,178**	**1,185,351**	***TOTAL EQUITY***
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	**1,355,872**	**1,291,506**	***TOTAL LIABILITIES AND EQUITY***

INFORMASI TAMBAHAN/*SUPPLEMENTARY INFORMATION*
PT KALTIM INDUSTRIAL ESTATE
INDUK PERUSAHAAN SAJA/*PARENT ENTITY ONLY*

Lampiran 5/60 *Schedule*

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2025
(Expressed in millions Rupiah, unless otherwise stated)

	31 Desember/ *December* 2025	**31 Desember/ *December* 2024**	
Pendapatan	289,762	292,122	*Revenues*
Beban pokok pendapatan	(220,698)	(225,236)	*Cost of revenues*
Laba kotor	**69,064**	**66,886**	***Gross profit***
Beban umum dan administrasi	(49,748)	(44,643)	*General and administrative expenses*
Pendapatan keuangan	19,085	15,142	*Finance income*
Beban keuangan	(2,298)	(1,716)	*Finance costs*
Bagian atas laba entitas anak dan asosiasi	62,985	59,322	*Share of net profit of subsidiaries and associates*
Beban lain-lain, bersih	(42)	(668)	*Other expenses, net*
Laba sebelum pajak penghasilan	**99,046**	**94,323**	***Profit before income tax***
Beban pajak penghasilan	(2,703)	(4,455)	*Income tax expenses*
Laba tahun berjalan	**96,343**	**89,868**	***Profit for the year***
Rugi komprehensif lain			***Other comprehensive loss***
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:			*Items that will not be reclassified to profit or loss:*
Cadangan revaluasi aset	(2,129)	-	*Asset revaluation reserve*
Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi	(531)	(1,555)	*Share of other comprehensive income from associates*
Pengukuran kembali imbalan pascakerja	(6,856)	(442)	*Remeasurement of post-employment benefits*
Rugi komprehensif lain tahun berjalan, setelah pajak	**(9,516)**	**(1,997)**	***Other comprehensive loss for the year, net of tax***
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan	**86,827**	**87,871**	***Total comprehensive income for the year***

INFORMASI TAMBAHAN/*SUPPLEMENTARY INFORMATION*
PT KALTIM INDUSTRIAL ESTATE
INDUK PERUSAHAAN SAJA/*PARENT COMPANY ONLY*

Lampiran 5/61 *Schedule*

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DECEMBER 2025
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE YEAR ENDED
AS AT 31 DECEMBER 2025
(Expressed in millions Rupiah, unless otherwise stated)

	Modal saham/ *Share capital*	Ekuitas lainnya/ *Other equity*	Saldo laba/*Retained earnings*		Penghasilan komprehensif lain/*Other comprehensive income*	Jumlah ekuitas/ *Total equity*	
			Ditentukan penggunaannya/ *Appropriated*	Belum ditentukan penggunaan/ *Unappropriated*			
Saldo per 1 Januari 2024	**58,307**	**(27,063)**	**303,552**	**579,740**	**182,944**	**1,097,480**	***Balance as at 1 January 2024***
Laba tahun berjalan	-	-	-	89,868	-	89,868	*Profit for the year*
Cadangan umum	-	-	71,336	(71,336)	-	-	*General reserves*
Rugi komprehensif lain, setelah pajak:							*Other comprehensive loss, net of tax:*
Bagian rugi komprehensif lain dari entitas asosiasi	-	-	-	-	(1,555)	(1,555)	*Share of other comprehensive loss from associates*
Pengukuran kembali Imbalan pascakerja	-	-	-	-	(442)	(442)	*Remeasurement of post-employment benefits*
Saldo per 31 Desember 2024	**58,307**	**(27,063)**	**374,888**	**598,272**	**180,947**	**1,185,351**	***Balance as at 31 December 2024***
Laba tahun berjalan	-	-	-	96,343	-	96,343	*Profit for the year*
Dividen kas	-	-	-	(35,000)	-	(35,000)	*Cash dividends*
Cadangan umum	-	-	89,868	(89,868)	-	-	*General reserves*
Rugi komprehensif lain, setelah pajak:							*Other comprehensive loss, net of tax:*
Cadangan revaluasi aset	-	-	-	-	(2,129)	(2,129)	*Asset revaluation reserve*
Bagian rugi komprehensif lain dari entitas asosiasi	-	-	-	-	(531)	(531)	*Share of other comprehensive loss from associates*
Pengukuran kembali Imbalan pascakerja	-	-	-	-	(6,856)	(6,856)	*Remeasurement of post-employment benefits*
Saldo per 31 Desember 2025	**58,307**	**(27,063)**	**464,756**	**569,747**	**171,431**	**1,237,178**	***Balance as at 31 December 2025***

INFORMASI TAMBAHAN/*SUPPLEMENTARY INFORMATION*
PT KALTIM INDUSTRIAL ESTATE
INDUK PERUSAHAAN SAJA/*PARENT ENTITY ONLY*

Lampiran 5/62 *Schedule*

LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DECEMBER 2025
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENT OF CASH FLOWS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2025
(Expressed in millions Rupiah, unless otherwise stated)

	31 Desember/ *December* 2025	31 Desember/ *December* 2024	
Arus kas dari aktivitas operasi			***Cash flows from operating activities***
Penerimaan dari pelanggan	289,487	272,957	*Receipts from customers*
Pembayaran kepada pemasok	(229,200)	(215,543)	*Payments to suppliers*
Pembayaran biaya karyawan	(30,379)	(22,378)	*Payments of employee costs*
Pembayaran pajak penghasilan badan	(2,668)	(2,974)	*Payments of corporate income tax*
Pembayaran beban keuangan	(2,298)	(1,716)	*Payments of finance costs*
Penerimaan pendapatan keuangan	19,085	15,142	*Receipts of finance income*
Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi	**44,027**	**45,488**	***Net cash flows provided from operating activities***
Arus kas dari aktivitas investasi			***Cash flows from investing activities***
Pembelian aset tetap dan properti investasi	(12,430)	(9,678)	*Purchases of fixed assets and investment properties*
Pencairan deposito berjangka	161,000	30,000	*Withdrawal of time deposits*
Penempatan deposito berjangka	(299,800)	-	*Placement of time deposits*
Pencairan kas yang dibatasi penggunaanya	17,089	-	*Receipts of restricted cash*
Penempatan kas yang dibatasi penggunaaanya	(10,000)	-	*Placement of restricted cash*
Penerimaan dividen tunai	34,494	21,592	*Receipts of cash dividends*
Arus kas bersih yang (digunakan untuk)/ diperoleh dari aktivitas investasi	**(109,647)**	**41,914**	***Net cash flows (used in)/provide from investing activities***
Arus kas dari aktivitas pendanaan			***Cash flows from financing activities***
Pembayaran dividen kas kepada pemegang saham Perusahaan	(35,000)	-	*Payments of cash dividends to the Company's shareholders*
Pembayaran liabilitas sewa	(113)	(855)	*Payments of lease liabilities*
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan	**(35,113)**	**(855)**	***Net cash flows used in financing activities***
(Penurunan)/kenaikan bersih kas dan setara kas	**(100,733)**	**86,547**	***Net (decrease)/increase in cash and cash equivalents***
Kas dan setara kas pada awal tahun	**295,233**	**208,686**	***Cash and cash equivalents at beginning of the year***
Kas dan setara kas pada akhir tahun	**194,500**	**295,233**	***Cash and cash equivalents at end of the year***

PT Kaltim Industrial Estate

Kantor Pusat

Wisma KIE Lt. 3
Jl. Ammonia Kav. 79 Komplek Kawasan
Industri Bontang, Kalimantan Timur 75314

+62 548 413 68

Plaza Pupuk Kaltim
Jl. Kebon Sirih 6a Gambir Jakarta Pusat 10110

+62 21 3451 052